



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. program strategis nasional; dan
 - e. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan daerah nasional Tahun 2025.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibuat dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas:

- a. bab I (satu) memuat pendahuluan;
- b. bab II (dua) memuat gambaran umum kondisi Daerah;

- c. bab III (tiga) memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV (empat) memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V (lima) memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI (enam) memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- g. bab VII (tujuh) memuat penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DRAFT



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026

**PEMERINTAH
KOTA DEPOK**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, serta arah kebijakan fiskal daerah. RKPD ini memiliki posisi strategis karena merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025–2029, yang menjadi landasan kebijakan pembangunan lima tahunan kepala daerah terpilih. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Muatan dalam dokumen RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA - APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, selain itu menjadi hak dan kewajiban daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

RKPD merupakan perencanaan tahunan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD,

penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan secara terintegrasi dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), mulai dari proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta penyusunan dan penetapan RKPD.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses yaitu pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah atas (bottom-up), yaitu melalui sinergitas perencanaan partisipatif pembangunan (sapa saba) mulai dari tahapan FGD Isu Strategis, Kolaborasi Bareng Komunitas (Kongko) Pembangunan, Forum Kemitraan dimana hasilnya diselaraskan melalui Rembuk RW, Musrenbang Anak, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan partisipasi 7 aktor pembangunan (heptahelix) dan atas-bawah (top-down) dilakukan untuk memberikan arahan dan panduan, agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan **THIS** yaitu pertama, **pendekatan holistik-tematik** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan

n mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RKPD harus :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan OPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja PD;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara substansi, RKPD 2026 merupakan penjabaran RPJMD pada tahun pertama pemenuhan target RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi akan difokuskan pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat, perbaikan infrastruktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang, Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kota Depok pada tahun 2026, yaitu **“Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan Publik”**
5. Dalam rangka mendukung pembiayaan belanja perangkat daerah di Kota Depok, diperlukan kolaborasi berbagai sumber pendanaan, antara lain melalui APBD Kota Depok, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana masyarakat/umat, serta kontribusi dari dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, pelibatan aktif para pemangku

kepentingan di luar pemerintahan juga menjadi kunci dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang perlu dilakukan dengan mengedepankan pendekatan spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan Kota Depok.

Gambar 1.1 Penerapan Konsep Holistik pada Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2026



Sumber : Bappeda Kota Depok, 2025

RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada Konsultasi Publik dan Musrenbang, kemudian berdasarkan berita acara kesepakatan tersebut Bappeda menyempurnakan dokumen RKPD.

Selanjutnya akan diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, oleh karena itu proses penyusunannya dilakukan secara terpadu antar Perangkat Daerah. Adapun secara garis besar RKPD Tahun 2026, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, kinerja penyelenggaraan daerah serta prakiraan pagu indikatif. Jadwal penyusunan dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2026 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Jadwal Perencanaan Kota Depok Tahun 2026



Sumber : Bappeda Kota Depok, 2025

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan- peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856)
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
22. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
24. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 Tentang Recana Tata Tuang dan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042;
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, keberadaan RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dengan tetap memperhatikan arahan RKP Nasional Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. RKPD Kota Depok 2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

[illegible]

Untuk menjamin konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, maka digunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral, nasional maupun daerah, antara lain:

- Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Depok yang terkait dengan RKPD tahun 2026 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042; Rencana Induk Pengembangan e-Gov; Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Perencanaan Kota Cerdas (Smart City); Perencanaan Kota Hijau (Green City). Dokumen RKPD Tahun 2026 ini memperhatikan juga rancangan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's) yang sedang disusun. Untuk mengintegrasikannya, telah dilakukan penapisan terhadap indikator-indikator TPB dan membandingkannya dengan indikator-indikator yang ada di RPJMD.

I - 10 | Ranhir RKPD Kota Depok 2026

1.3.1. Hubungan RKPD Kota Depok Dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya Prioritas Nasional Tahun 2026, Sasaran Nasional Tahun 2026 dan arah kebijakan RKP Tahun 2026.

1.3.2. Hubungan RKPD Kota Depok Dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026 wajib mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Tahapan penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026 mengikuti tahapan dan jadwal penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.3.3. Hubungan RKPD Kota Depok Tahun 2026 Dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan RKPD Kota Depok Dengan Raperda RTRW KOTA Depok 2022-2042

Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memperhatikan muatan perencanaan spasial pada dokumen rivi RTRW Kota Depok dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2021-2041.

1.3.5. Hubungan RKPD Kota Depok Dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan

dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan RKPD Kota Depok Tahun 2026. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Tahun 2026 ini adalah untuk:

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon
- d. Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026; Menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah;
- e. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- f. Menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah ;
- g. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- h. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah;
- i. Mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program dan pengawasannya serta efisiensi alokasi sumber daya;
- j. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan program, anggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar wilayah, sektor pembangunan dan antar pemerintahan; serta

- k. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.5 Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun yang disusun dengan berdasarkan kepada permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas dan target yang telah ditetapkan.
2. Perubahan terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2026 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 disusun mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD

- 1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Menjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Menjelaskan secara ringkas proses penyusunan RKPD Tahun 2026 dan bagaimana hubungan antar dokumen pembangunan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
- 1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026.
- 1.5. Kaidah Pelaksanaan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2026.

- 1.6. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan sistematika RKPD Tahun 2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahunlalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik, dan aspek daya saing daerah.
- 2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD menjelaskan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah menjelaskan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2.4. Inovasi Daerah
Menjelaskan pelaksanaan dan evaluasi inovasi pembangunan Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, proyeksi, dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2026.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2026 serta pendanaan pembangunan lainnya.
- 3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
Menjelaskan sumber - sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Menjelaskan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, perumusan isu strategis, strategi dan arah kebijakan serta tema pembangunan Tahun 2026.

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Menjelaskan pembangunan kewilayahan sesuai arahan Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW 2022-2042).

4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan implementasi SPM dalam Kota Depok Tahun 2026.

4.5. Kebijakan Inovasi Daerah

Menjelaskan inovasi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan di RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian kinerja Tahun 2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tahun perencanaan berjalan.

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan.

DRAFT



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kota Depok, yang terletak di antara 6°18'30"–6°28'00" LS dan 106°42'30"–106°55'30" BT dengan luas 19.991 hektare dan ketinggian 50–140 meter dpl, merupakan bagian penting dari kawasan metropolitan Jabodetabek dan berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan. Berdasarkan proyeksi BPS 2025, jumlah penduduknya pada 2024 mencapai 2.163.635 jiwa, dengan 71,01% di antaranya berada pada usia produktif. Kota ini memiliki karakter multikultural dengan keberagaman etnis dan agama yang hidup rukun, serta didukung oleh IPM tinggi sebesar 83,05, tertinggi ketiga di Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perdagangan dan jasa, dan pemerintahannya dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung. Depok dilengkapi berbagai ruang publik seperti Alun-Alun Kota, DOS, taman kelurahan, dan Gedung Taman Musik, serta memiliki aksesibilitas yang baik, termasuk jarak 50 km dari Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh dalam waktu 45–60 menit, menjadikannya kota yang maju, nyaman, dan inklusif.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Kota Depok menunjukkan karakter wilayah yang strategis namun penuh tantangan, sebagai kota penyangga Jakarta dalam kawasan Jabodetabek. Urbanisasi pesat mendorong alih fungsi lahan, pertumbuhan permukiman padat, dan ekspansi pusat ekonomi. Depok berkembang menjadi kota hibrid dengan fungsi pendidikan, hunian menengah atas, dan industri kecil, namun masih menghadapi ketimpangan infrastruktur dan keberadaan permukiman informal. Karakter komuter memicu pertumbuhan sektor informal serta tekanan pada transportasi, sementara keberagaman penduduk memunculkan dinamika sosial yang kompleks. Tantangan geografis seperti kemacetan, banjir, dan minimnya ruang hijau menuntut strategi penataan ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6°18'30"-6°28'00" Lintang Selatan dan 106°42'30"-106°55'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane.

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Dengan luas wilayah kurang lebih 19.991 ha, wilayah perencanaan Kota Depok meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1462,88	VII	CINERE	1053,22
1	Beji	193,81	33	Cinere	371,74
2	Beji Timur	71,16	34	Gandul	264,35
3	Kemiri Muka	226,87	35	Pangkalan Jati	263,85
4	Pondok Cina	277,59	36	Pangkalan Jati Baru	153,28
5	Kukusan	346,73	VIII	CIMANGGIS	2177,73
6	Tanah Baru	346,72	37	Cisalak Pasar	180,97
II	PANCORAN MAS	1804,70	38	Mekarsari	389,65
7	Pancoran Mas	348,77	39	Tugu	557,27
8	Depok Jaya	118,51	40	Pasirgunung Selatan	266,85
9	Depok	368,62	41	Harjamukti	597,15
10	Rangkapan Jaya Baru	380,39	42	Curug	185,84
11	Rangkapan Jaya	370,27	IX	TAPOS	3342,99
12	Mampang	218,14	43	Tapos	630,71
III	CIPAYUNG	1137,57	44	Leuwinanggung	430,65
13	Cipayung	214,31	45	Sukatani	481,27

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
14	Cipayung Jaya	222,91	46	Sukamaju Baru	425,88
15	Ratujaya	308,61	47	Jatijajar	265,50
16	Bojong Pondok Terong	219,59	48	Cilangkap	615,55
17	Pondok Jaya	172,16	49	Cimpauen	493,43
			X	SAWANGAN	2607,06
IV	SUKMAJAYA	1736,66	50	Sawangan	328,56
18	Sukmajaya	336,30	51	Kedaung	204,86
19	Mekarjaya	325,98	52	Cinangka	343,82
20	Baktijaya	276,13	53	Sawangan Baru	276,66
21	Abadijaya	250,25	54	Pengasinan	404,67
22	Tirtajaya	287,40	55	Bedahan	585,64
23	Cisalak	260,61	56	Pasir Putih	462,85
V	CILODONG	1537,89	XI	BOJONGSARI	1940,56
24	Sukamaju	435,92	57	Bojongsari	205,65
25	Cilodong	219,00	58	Bojongsari Baru	196,54
26	Kalibaru	324,56	59	Pondok Petir	308,97
27	Kalimulya	306,64	60	Serua	327,89
28	Jatimulya	251,77	61	Curug	422,69
VI	LIMO	1189,37	62	Duren Mekar	191,43
29	Limo	422,83	63	Duren Seribu	287,39
30	Meruyung	276,75	KOTA DEPOK		19.991
31	Grogol	287,75			
32	Krukut	202,04			

Sumber: Perda RTRW Kota Depok 2022-2042, 2022.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok



Sumber: Perda RTRW Kota Depok 2022-2042, 2022.

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Depok memiliki potensi keunggulan komparatif dalam pengembangan perekonomian daerah. Kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional menjadikan Depok sebagai kawasan strategis penyangga ibu kota, yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pendidikan, serta peluang investasi dan lapangan kerja baru. Posisi ini juga memperkuat integrasi infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, secara hidrologis, Kota Depok terletak di antara hulu dan hilir dua sungai besar, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane. Letak ini menjadikan Depok relatif jarang mengalami banjir besar dibandingkan wilayah hilir, karena sebagian besar air limpasan dapat tertampung di situ-situ alami dan jaringan sungai sebelum mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Namun, tantangan tetap ada terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang, sehingga penguatan sistem drainase dan pelestarian situ menjadi penting untuk menjaga ketahanan wilayah terhadap risiko genangan dan banjir lokal.

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 3.342 ha atau 16,72 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Cinere dengan luas 1.053 ha atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

Sementara jumlah Kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos dengan masing-masing berjumlah 7 kelurahan. Untuk jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 134 RW, adapun Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 903 RT.

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	BOJONGSARI	1. Bojongsari	37	14
		2. Serua	70	14
		3. Duren Seribu	37	11
		4. Bojongsari Baru	32	9
		5. Pondok Petir	101	19
		6. Duren Mekar	60	11
		7. Curug	80	16
		JUMLAH	417	94
2	SAWANGAN	1. Pengasinan	87	14
		2. Pasir Putih	78	12
		3. Kedaung	44	11
		4. Sawangan Baru	49	10

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
		5. Sawangan	49	11
		6. Bedahan	81	16
		7. Cinangka	64	12
		JUMLAH	452	86
3	LIMO	1. Meruyung	54	12
		2. Limo	96	16
		3. Krukut	36	8
		4. Grogol	78	13
		JUMLAH	264	49
4	CINERE	1. Cinere	95	19
		2. Gandul	47	10
		3. Pangkalan Jati	42	7
		4. Pangkalan Jati Baru	34	6
		JUMLAH	218	42
5	PANCORAN MAS	1. Rangkapan Jaya Baru	103	15
		2. Depok Jaya	108	14
		3. Mampang	83	16
		4. Depok	117	23
		5. Pancoran Mas	137	21
		6. Rangkapan Jaya	107	19
		JUMLAH	655	108
6	CIPAYUNG	1. Pondok Jaya	57	7
		2. Ratu Jaya	88	12
		3. Cipayung	75	12
		4. Cipayung Jaya	44	10
		5. Bojong Pondok Terong	92	13
		JUMLAH	356	54
7	BEJI	1. Beji	110	17
		2. Tanah Baru	96	14
		3. Beji Timur	33	7
		4. Pondok Cina	35	9
		5. Kukusan	47	8
		6. Kemiri Muka	80	20
		JUMLAH	401	75
8	SUKMAJAYA	1. Sukmajaya	100	13
		2. Bhakti jaya	229	29
		3. Abadi Jaya	193	29
		4. Mekarjaya	251	31
		5. Cisalak	61	13
		6. Tirtajaya	69	10
		JUMLAH	913	142

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
JUMLAH			903	125
9	CILODONG	1. Cilodong	43	8
		2. Kali Baru	69	11
		3. Jatimulya	50	9
		4. Sukamaju	168	30
		5. Kalimulya	63	11
JUMLAH			393	69
10	CIMANGGIS	1. Curug	62	11
		2. Mekarsari	157	22
		3. Tugu	172	19
		4. Cisalak Pasar	55	9
		5. Pasir Gunung Selatan	133	15
		6. Harjamukti	86	16
JUMLAH			665	92
11	TAPOS	1. Sukamaju Baru	86	15
		2. Jatijajar	95	14
		3. Cilangkap	112	22
		4. Tapos	52	18
		5. Cimpaeun	93	25
		6. Sukatani	182	26
		7. Leuwinanggung	44	14
JUMLAH			664	134
JUMLAH TOTAL			5388	928

Sumber: Bappeda Kota Depok Tahun 2024

b. Peran Strategis Daerah

Kota Depok mempunyai peran multidimensional yang krusial dalam struktur spasial dan pembangunan berkelanjutan kawasan Jabodetabekpunjur. Sebagai wilayah yang terintegrasi dengan metropolitan Jakarta, kontribusi Depok bersifat lintas-sektoral, mencakup aspek tata ruang, ekonomi, mobilitas, lingkungan, serta sosial-budaya. Perannya tidak hanya berskala lokal, tetapi juga berdampak signifikan pada pembangunan regional Jawa Barat dan nasional.

Secara geografis, Depok berfungsi sebagai daerah penyangga (buffer zone) dan kawasan urban fringe bagi DKI Jakarta, membantu menyeimbangkan tekanan urbanisasi yang terkonsentrasi di pusat ibu kota. Melalui penataan ruang yang terencana, kota ini berhasil mengembangkan kawasan permukiman terpadu, pusat pertumbuhan ekonomi, serta ruang terbuka hijau yang berkelanjutan.

Keberadaan Depok sebagai bagian dari sistem metropolitan Jabodetabek menjadikannya elemen kunci dalam mendukung ketahanan wilayah, mobilitas penduduk, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan menganalisis berbagai aspek perkotaan secara komprehensif, dapat dilihat bahwa Depok tidak sekadar berperan sebagai kota satelit, melainkan sebagai simpul pertumbuhan (urban node) yang berkontribusi aktif dalam pembangunan wilayah skala luas. Perencanaan tata ruangnya yang progresif, ditopang oleh sektor unggulan seperti pendidikan, logistik, dan industri kreatif, menjadikan Depok contoh menarik dalam pengembangan kawasan metropolitan yang berimbang antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

1) Aspek Tata Ruang dan Fungsi Kawasan

Depok berperan sebagai buffer zone dan urban fringe bagi DKI Jakarta, membantu menyeimbangkan pertumbuhan perkotaan yang kerap terkonsentrasi di pusat ibu kota. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Depok mengalokasikan kawasan permukiman terencana, kawasan hijau (seperti Taman Lembah Gurame dan RTH di sepanjang Sungai Ciliwung), serta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang terdistribusi secara merata. Pengembangan kawasan TOD (Transit-Oriented Development) di sekitar stasiun seperti Depok Baru dan Citayam memperkuat integrasi transportasi-urbanisasi.

2) Kontribusi Ekonomi dan Pusat Pertumbuhan

Depok berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi suburban dengan perkembangan pesat di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, dan teknologi. Kawasan strategis seperti Margonda menjadi pusat komersial dan hiburan yang tidak hanya melayani warga Depok tetapi juga menarik pengunjung dari wilayah Jabotabek.

Sektor UMKM dan startup lokal, termasuk industri keripik belut, sentra batik, serta bisnis digital, semakin memperkuat ketahanan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Depok juga menjadi pusat logistik dan distribusi yang vital, didukung oleh keberadaan gudang penyangga dan kawasan industri modern yang melayani kebutuhan Jakarta dan sekitarnya.

Dengan infrastruktur yang terus berkembang, seperti akses tol dan jaringan transportasi massal (LRT dan KRL), Depok semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan ekonomi strategis di Jabodetabek.

3) Mobilitas dan Konektivitas Regional

Kota Depok memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas regional sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Jabodetabek, khususnya sebagai penghubung utama antara Jakarta dan Bogor. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan perkembangan kawasan permukiman baru, Kota Depok menghadapi tantangan serius terkait kemacetan lalu

lintas yang semakin kompleks. Fenomena urban sprawl tanpa diimbangi oleh sistem integrasi transportasi terpadu telah meningkatkan volume pergerakan komuter harian, baik ke dalam kota maupun ke wilayah sekitar.

Tabel 2.3 Titik Kemacetan di Kota Depok

Titik Kemacetan	Penyebab Utama
Jalan Margonda Raya (Sumber: Laporan Akhir Underpass RS UI)	1. Pusat aktivitas komersial & kampus (UI) 2. Banyak persimpangan & U-turn
Simpang Ramanda (Sumber: (Margonda-Depok Lama)	1. Persimpangan vital 2. Volume kendaraan tinggi dari arah Beji & Pancoran Mas
Stasiun Depok Baru & Lama (Dokumen Kajian Dinas Perhubungan Kota Depok Penanganan Kemacetan Lalu Lintas)	1. Banyak ojek pangkalan/online berhenti dan menunggu penumpang 2. Minim fasilitas park and ride
Jalan Juanda (Depok - Cisalak) (Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari)	1. Akses ke Tol Cijago 2. Perlintasan dengan jalan lokal ramai 3. Titik persimpangan besar (Cisalak, Gas Alam)
Flyover Ui - Kukusan - Kelapa Dua	1. Akses utama ke Tol Depok-Antasari 2. Bottleneck sebelum masuk tol
Jalan Raya Sawangan (Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari)	1. Perlintasan kendaraan besar menuju Sawangan-Parung-Bogor 2. Kemacetan akibat kendaraan berat dan pasar tumpah
Cinere Raya - Gandul - Kukusan (Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari Segmen Brigif - Sawangan)	1. Akses ke Cinere, Tol Cijago 2. Sering terjadi crossing kendaraan arah Gandul-UI
Pasar Kemiri Muka, Pasar Pal	Pedagang kaki lima dan angkot berhenti sembarangan

Sumber: Diadaptasi dari Andalalin Pembangunan Rumah Susun Pondok Cina, 2018; Berita Depok, 2025; Andalalin Shila at Sawangan, 2023; Andalalin Tol Desari, 2020; Laporan Akhir Underpass RS UI

Kemacetan lalu lintas di Kota Depok merupakan cerminan dari pertumbuhan kawasan yang pesat namun tidak diimbangi dengan perencanaan mobilitas yang terintegrasi. Sebagai penghubung penting antara Jakarta dan Bogor dalam kawasan Jabodetabek, Depok menghadapi tekanan mobilitas tinggi, terutama di titik-titik strategis seperti Jalan Margonda Raya yang menjadi pusat aktivitas komersial dan pendidikan, hingga Jalan Juanda dan Jalan Raya Sawangan yang menjadi akses utama ke tol dan jalur kendaraan berat. Persimpangan vital seperti Simpang Ramanda dan

Cisalak kerap mengalami kepadatan akibat volume kendaraan dari berbagai arah, sementara keberadaan pasar tradisional dan ojek yang berhenti sembarangan di sekitar stasiun dan pasar memperparah kondisi lalu lintas. Minimnya fasilitas park and ride, bottleneck di akses tol, dan crossing kendaraan di jalan lokal menunjukkan perlunya optimalisasi pembangunan infrastruktur dan integrasi sistem transportasi yang mendukung pola pergerakan harian masyarakat dan menekan beban lalu lintas di titik-titik krusial tersebut

4) Pendidikan, Inovasi, dan SDM Unggul

Keberadaan Universitas Indonesia (UI) dan perguruan tinggi lainnya menjadikan Depok sebagai knowledge hub yang mendorong inovasi dan riset terapan. Kawasan pendidikan di Depok (seperti Beji dan Cinere) berkontribusi pada penciptaan ekosistem kreatif dan talenta digital, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan startup dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Depok berperan dalam menjaga resapan air dan mengurangi banjir kiriman ke Jakarta melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Program city branding "Depok Bersih dan Nyaman" mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penghijauan. Namun, tekanan urbanisasi perlu diimbangi dengan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mitigasi perubahan iklim.

5) Sosial-Budaya dan Harmoni Urban

Sebagai entitas perkotaan yang tumbuh pesat, Kota Depok menampilkan karakteristik masyarakat urban yang unik dengan komposisi multietnis (Betawi sebagai masyarakat asli, Sunda, Jawa, Minang, Batak, dan berbagai kelompok pendatang) serta multi agama yang mampu memelihara kohesi sosial secara berkelanjutan. Pola permukiman di Depok menunjukkan fenomena menarik dimana berbagai kelompok etnis dapat hidup berdampingan dalam satu kesatuan ruang urban tanpa segregasi yang tajam, menciptakan mozaik kebudayaan yang khas.

Interaksi sosial lintas budaya di Depok terwujud melalui berbagai mekanisme adaptasi, seperti proses akulturasi dalam tradisi kuliner, bahasa sehari-hari yang membaurkan unsur Betawi, Sunda dan Indonesia, serta praktik keagamaan yang saling menghormati. Ruang-ruang publik seperti alun-alun kota pasar tradisional, dan fasilitas pendidikan menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat, memperkuat modal sosial yang menjadi dasar harmoni urban.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Topografi

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 19.991 ha, dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

Keanekaragaman topografi ini memberikan Kota Depok keunggulan komparatif dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian di daerah perbukitan yang subur, serta pemukiman dan perdagangan di dataran rendah yang strategis. Kondisi ini juga memungkinkan pengembangan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan, mendukung pembangunan kota yang ramah lingkungan dan tahan terhadap risiko bencana alam.

Oleh karena itu, variasi topografi ini menuntut pendekatan perencanaan wilayah terpadu yang mempertimbangkan pengelolaan tata ruang, mitigasi bencana, dan pengembangan infrastruktur adaptif. Strategi tersebut penting untuk menyeimbangkan pembangunan kota dengan keberlanjutan lingkungan, terutama dalam mengatasi tantangan hidrologis dan risiko alam.

b. Geologi

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a) Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang–tinggi.
- b) Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c) Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya

dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.

- d) Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.
- e) Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkanik andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- f) Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

Kota Depok memiliki keunggulan komparatif berupa tanah yang subur dan ketersediaan air tanah yang melimpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan lokal serta mendorong pengembangan ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya ini harus dijalankan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup

c. Klimatologi

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celcius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

- a) 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- b) 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- c) 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,

d) 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.

Berdasarkan data klimatologi, Kota Depok menghadapi tantangan signifikan terkait perubahan pola curah hujan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal dan kemiringan lereng yang curam. Ancaman kekeringan relatif rendah, namun banjir dan genangan masih menjadi isu utama yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut penguatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pengelolaan tata ruang yang responsif, perbaikan infrastruktur drainase, serta pelestarian lingkungan.

d. Hidrologi

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 7 (tujuh) sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari WS Ciliwung - Cisadane, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, Sungai Cikeas, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, Kota Depok didominasi oleh kelompok litologi endapan lanau, pasir, kerikil dan kerakal hasil pengendapan kembali endapan vulkanik kwarter (kipas alluvial muda) serta konglomerat dan pasir sungai (endapan alluvial tua), dengan tingkat kelulusan air sedang sampai tinggi termasuk akuifer dengan produktivitas tinggi di bagian utara dan akuifer dengan produktivitas sedang di bagian selatan dengan penyebaran akuifer luas dengan debit antara 1-5 liter/detik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik.

Selain sumber daya air tanah, di Kota Depok juga terdapat sumberdaya air lain yang berasal dari air permukaan yaitu meliputi 30 situ dan 34 sungai/anak sungai yang melintasi Kota Depok. Jumlah Situ dan lokasinya dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data Perda RTRW Tahun 2022-2042 diarahkan seluas 142,03 Ha, meski pada kenyataannya telah banyak situ yang mengalami alih fungsi lahan. Kedalaman situ di Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

Keberadaan sumber daya air permukaan dan air tanah yang cukup melimpah di Kota Depok merupakan potensi strategis yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kebutuhan domestik masyarakat. Pengelolaan sumber daya air yang baik akan memperkuat ketahanan lingkungan dan ekonomi lokal, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Saat ini, situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Penduduk Kota Depok masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar 78,94% penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan 21,70% penduduk Kota Depok memanfaatkan air bersih yang berasal dari PDAM. Eksploitasi air tanah yang kurang dimbangi dengan upaya-upaya konservasi telah menyebabkan terjadinya penurunan air muka tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok dari 15,005 cm di tahun 2016 menjadi 17,88 cm.

Cakupan akses air minum layak di Kota Depok pada tahun 2023 mencapai 85,22%, sedikit di bawah target sebesar 89,31% yang ditetapkan dalam RKPD Kota Depok 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penyediaan layanan air minum, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman dan berkualitas.

Tabel 2.4 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

No	Situ	Lokasi (Kelurahan)	Luas (Ha)
1	Bojongsari	Bojongsari	24,50
2	Rawa Kalong	Curug	8,69
3	Cinere 1	Cinere	0,23
4	Cinere 2	Cinere	0,33
5	Cinere 3	Cinere	0,57
6	Dongkelan	Tugu	5,14
7	Tipar/Cicadas	Mekarsari	7,28
8	Pangarengan/RR1	Cisalak	12,29
9	Gadog	Cisalak Pasar	1,66
10	Jemblung	Harjamukti	8,24
11	Patinggi	Tapos	4,22
12	Pladen	Beji	1,27
13	UI 1	Pondok Cina	1,54
14	Pondok Cina	Pondok Cina	4,57
15	UI 3	Pondok Cina	5,28
16	UI 2	Pondok Cina	2,68
17	Krukut	Krukut	0,70
18	Pancoran Mas	Pancoran Mas	0,46
19	Telaga Subur	Pancoran Mas	1,42
20	Rawa Besar	Depok Jaya	13,21
21	Sidomukti/Baru	Sukmajaya	4,11
22	Pasir Putih	Pasir Putih	2,00
23	Pengasinan	Pengasinan	5,42
24	Asih Pulo	Rangkapan Jaya	2,02
25	Cilangkap	Cilangkap	5,86
26	Jatijajar	Jatijajar	5,03
27	Bahar	Sukamaju	0,65

No	Situ	Lokasi (Kelurahan)	Luas (Ha)
28	Citayam	Bojong Pondok Terong	6,08
29	Cilodong	Kali Baru	6,57
30	Lembah Gurame	Depok Jaya	
LUAS			142,03

Sumber : Perda RTRW Kota Depok 2022-2042, 2022

e. Penggunaan Ruang dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, rencana pola ruang wilayah Kota Depok dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung Kota Depok adalah badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan ruang terbuka hijau. Sementara itu, dalam Pasal 34 yang termasuk ke dalam kawasan budi daya adalah badan jalan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan transportasi.

Secara umum, Kota Depok memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung kegiatan budidaya, termasuk pertanian dan nonpertanian, meskipun terdapat beberapa wilayah yang memiliki daya dukung rendah untuk pengembangan karena memiliki lereng curam, rawan longsor, dan berpotensi erosi seperti kawasan di sekitar Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan, dan Sungai Angke. Wilayah lain yang menghadapi kendala serupa termasuk area sepanjang jalur pipa gas, jalur kereta api, situ, dan jalur distribusi listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi.

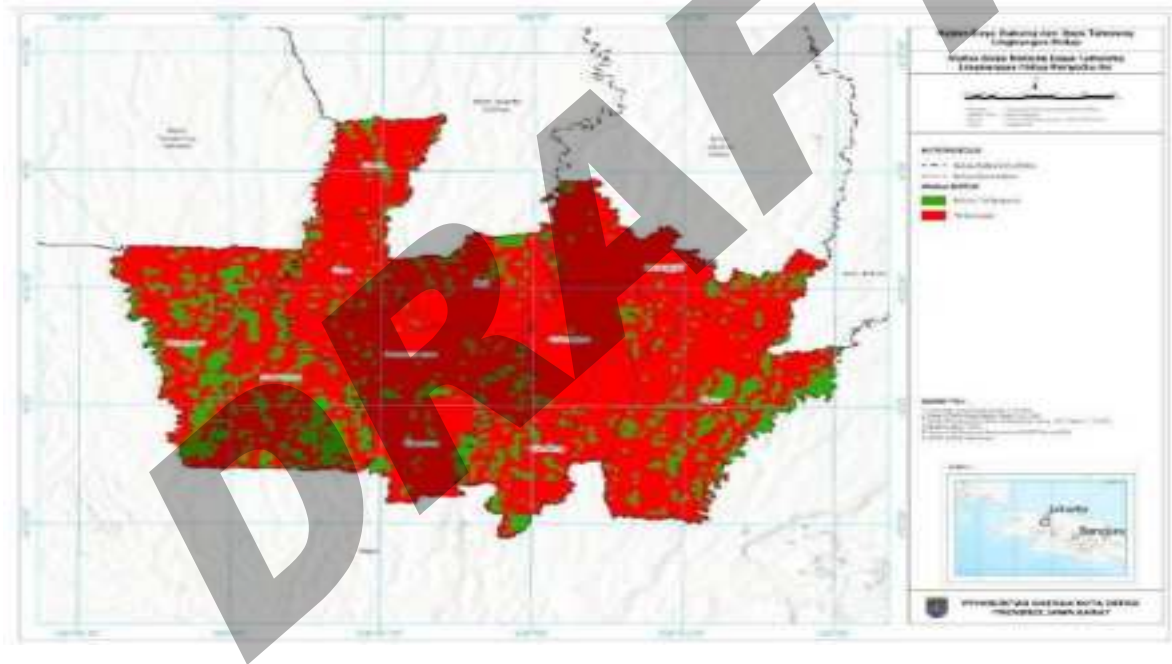
Namun demikian, ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya, terutama untuk pertanian, semakin berkurang seiring dengan tingginya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan sosial. Hal ini ditunjukkan dari pola peningkatan pembangunan perumahan formal dan swadaya di lahan yang seharusnya untuk pertanian atau sebagai kawasan lindung seperti sempadan sungai dan situ. Kepadatan di kawasan perumahan meningkat dari rendah menjadi sedang, bahkan tinggi. Selain itu, lahan di sepanjang jalan utama bertransformasi menjadi kawasan dengan fungsi campuran, mencakup perkantoran dan perdagangan baik retail maupun non-retail.

Tekanan pada tata guna lahan di Kota Depok ini meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika regional. Dominasi penggunaan lahan oleh pembangunan perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis. Tekanan ini berpengaruh pada penurunan tutupan lahan hijau dan mempersulit pemenuhan kewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30% dari luas wilayah. Untuk merespons dinamika pembangunan yang terjadi, saat ini wilayah Depok terbagi menjadi 4 (empat) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), serta 63 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

2.1.1.3. Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Depok, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data KLHS 2025-2029, ketersediaan air di Kota Depok bervariasi antar kecamatan, dengan Kecamatan Tapos dan Sawangan memiliki ketersediaan air tinggi karena luasnya lahan hutan yang berfungsi sebagai kantong air, sementara Kecamatan Cinere, Cipayung, Beji, dan Limo mengalami ketersediaan air rendah. Total ketersediaan air Kota Depok sekitar 94,67 juta m³/tahun, namun kebutuhan air pada 2022 mencapai 197,5 juta m³/tahun, menyebabkan hampir seluruh wilayah mengalami defisit air kecuali sebagian kecil di Tapos dan Beji.

Gambar 2.2 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Depok



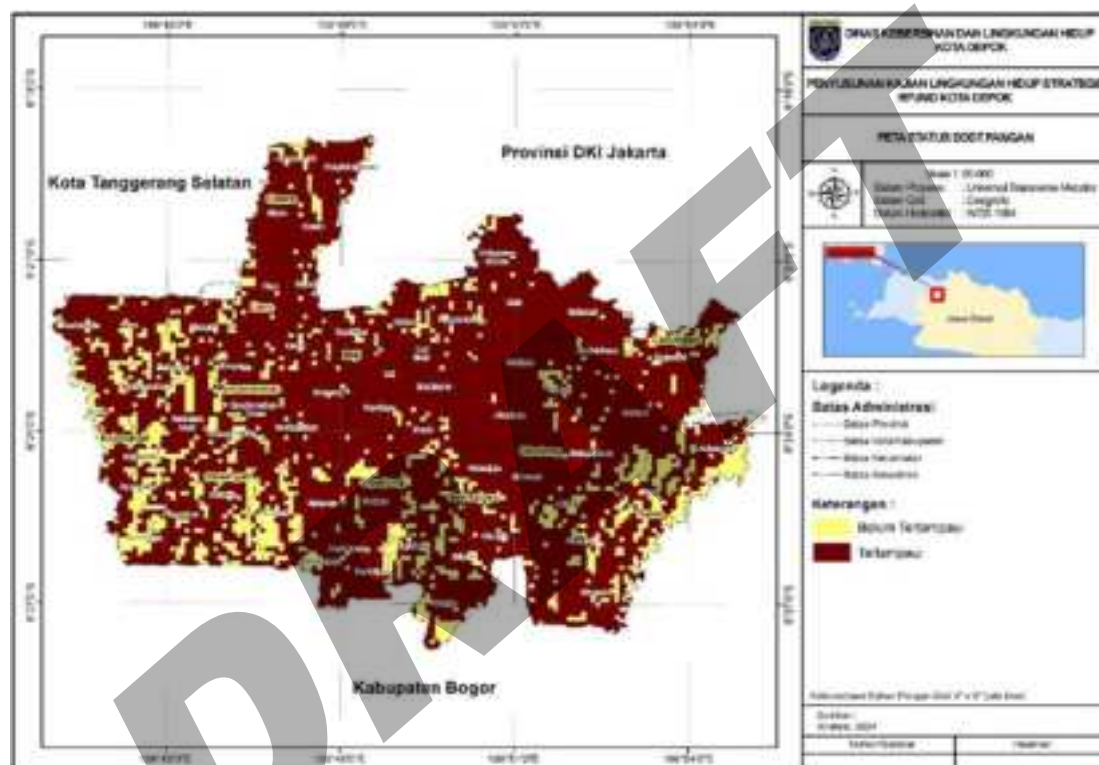
Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2025-2029

Analisis menunjukkan ambang batas penduduk yang dapat terpenuhi kebutuhan airnya telah terlampaui, dengan jumlah penduduk melebihi kapasitas dukung air di hampir semua kecamatan. Luas wilayah dengan status daya dukung air terlampaui mencapai 81%, terutama di Sukmajaya, Cimanggis, dan Cipayung, sehingga secara keseluruhan Kota Depok menghadapi kondisi ketersediaan air yang sudah melebihi kapasitas daya dukungnya.

Hasil pemodelan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH) untuk penyedia pangan di Kota Depok menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah telah melampaui ambang

batas, menandakan tingginya kebutuhan pangan, terutama di kecamatan dengan kepadatan permukiman seperti Cimanggis, Sukmajaya, Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Limo, dan Cinere. Sementara itu, ketersediaan pangan secara alami cenderung rendah akibat dominasi lahan terbangun. Lahan sawah yang terbatas dan terus menyusut akibat konversi menjadi kawasan permukiman menyebabkan defisit produksi beras, sehingga Kota Depok sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain seperti Kabupaten Karawang, Indramayu, dan Subang.

Gambar 2.3 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kota Depok



Sumber: Kajian DDDTLH Kota Depok, 2025-2029

Pemodelan ini menggunakan grid spasial berukuran 150 x 150 meter untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan berdasarkan produksi padi dan distribusi spasialnya. Hasil ini menegaskan perlunya strategi pengelolaan pangan yang terintegrasi guna memenuhi kebutuhan penduduk kota. Strategi penguatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan antara lain berbasis komunitas, seperti pertanian perkotaan (urban farming) dan pemanfaatan pekarangan rumah, serta diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KLHS merekomendasikan langkah-langkah konkret seperti pemanenan air hujan, optimalisasi ruang terbuka hijau, serta penataan ulang tata ruang yang mendukung keberlanjutan ekologis. Di samping itu, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap

kebijakan, rencana, dan program pembangunan menjadi keharusan agar keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat terjaga. Dengan demikian, hasil analisis DDDTLH ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi eksisting lingkungan hidup, tetapi juga menjadi dasar pijakan dalam merancang arah kebijakan pembangunan Kota Depok yang berdaya tahan, berwawasan lingkungan, dan inklusif bagi generasi masa kini maupun mendatang.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

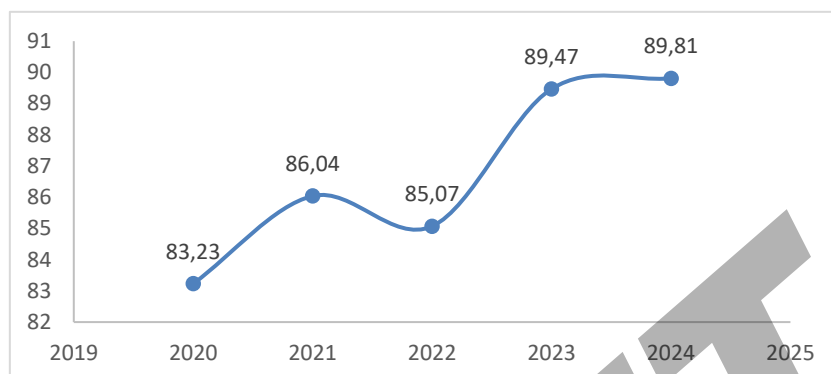
Kota Depok terus berkomitmen menjadi kota yang berkelanjutan dengan mengedepankan ketahanan energi, ketersediaan air bersih, serta kemandirian pangan. Sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota, Depok tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya tahan menghadapi tantangan global.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan komponen integral dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), yang berperan signifikan dalam analisis dan evaluasi ketahanan pangan dan nutrisi di berbagai wilayah. IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta program pangan dan gizi yang dilaksanakan, tetapi juga berkontribusi dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang lebih terarah.

Melalui penerapan IKP, dapat dilakukan evaluasi komprehensif terhadap capaian ketahanan pangan di wilayah tertentu, yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Indeks ini memungkinkan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pangan lokal, serta menetapkan prioritas dalam alokasi sumber daya dan pengembangan strategi. IKP juga memberikan gambaran peringkat atau ranking pencapaian ketahanan pangan di berbagai wilayah, yang berfungsi sebagai indikator penting dalam pengukuran kemajuan dan perbandingan kinerja antar wilayah. Hal ini mendorong penciptaan lingkungan kompetitif yang sehat di antara wilayah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas intervensi ketahanan pangan.

Perubahan iklim menjadi faktor yang semakin penting kaitannya dengan ketahanan pangan. Dampak meningkatnya perubahan iklim seperti peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, gangguan pola tanam, kekeringan, hingga banjir dapat mengancam stabilitas sistem pangan, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kota Depok yang umumnya tergantung pada pasokan pangan dari luar daerah karena kerentanan perubahan iklim mempengaruhi harga, ketersediaan, dan kualitas pangan. Sehingga perlu upaya mitigasi seperti pengembangan urban farming, diversifikasi sumber pangan, dan perlindungan ekosistem sumber daya air.

Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Data Indeks Ketahanan Pangan Kota Depok dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang konsisten, dengan peningkatan dari 83,23 pada 2020 menjadi 89,81 pada 2024, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 (85,07). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program ketahanan pangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Depok, meski masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi ekonomi dan perubahan iklim.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas adalah ekosistem yang lestari dengan udara, air, dan tanah bersih, mendukung kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati, serta dikelola secara berkelanjutan melalui kebijakan dan perilaku ramah lingkungan.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen holistik yang mengevaluasi dan menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi lingkungan hidup dalam ruang lingkup dan periode waktu tertentu. Alat ukur ini secara efektif menyediakan indikasi awal dan kesimpulan yang cepat mengenai status lingkungan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan informasi berbasis data. IKLH merupakan agregasi dari beberapa indeks khusus, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang masing-masing memberikan evaluasi terperinci terhadap aspek tertentu dari lingkungan. Berhubung Kota Depok tidak memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut, sehingga indikator IKAL ini

tidak menjadi komposit perhitungan dalam IKLH. Berikut merupakan hasil pengukuran IKA, IKU, dan IKL Kota Depok.

Tabel 2.5 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Air	51,61	61,03	58,37	52,017	46,22
2.	Indeks Kualitas Udara	65,76	69,63	70,82	74,77	79,06
3.	Indeks Kualitas Lahan	35,873	35,88	35,88	36,51	23,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, (2025)

Data indeks lingkungan di Depok selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang beragam, dengan Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan signifikan (dari 65,76 pada 2020 menjadi 79,5 pada 2024), mencerminkan keberhasilan kebijakan pengendalian polusi kendaraan dan industri. Namun, Indeks Kualitas Air yang sempat membaik pada 2021 (61,03) tetapi terus menurun hingga 2024 (46,22) mengindikasikan perlunya penanganan serius terhadap pencemaran sungai, limbah domestik, dan tata kelola drainase perkotaan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang sebelumnya dikenal sebagai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2020, merupakan hasil pengembangan metode penghitungan IKTL dengan penambahan faktor koreksi berupa dampak kebakaran (DK) dan dampak kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut. Besar IKL pada tahun 2020 hingga 2023 stagnan di kisaran 35,88–36,52 hal ini mencerminkan tantangan khusus di wilayah perkotaan seperti Depok, di mana isu utama bukanlah deforestasi (karena tidak memiliki hutan alam), melainkan alih fungsi lahan terbuka hijau (RTH) menjadi permukiman dan infrastruktur. Minimnya peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian RTH, seperti taman kota, jalur hijau, dan daerah resapan air, belum optimal. Padahal, di kota padat seperti Depok, RTH sangat penting untuk mitigasi banjir, penyerapan polusi, dan kenyamanan hidup warga.

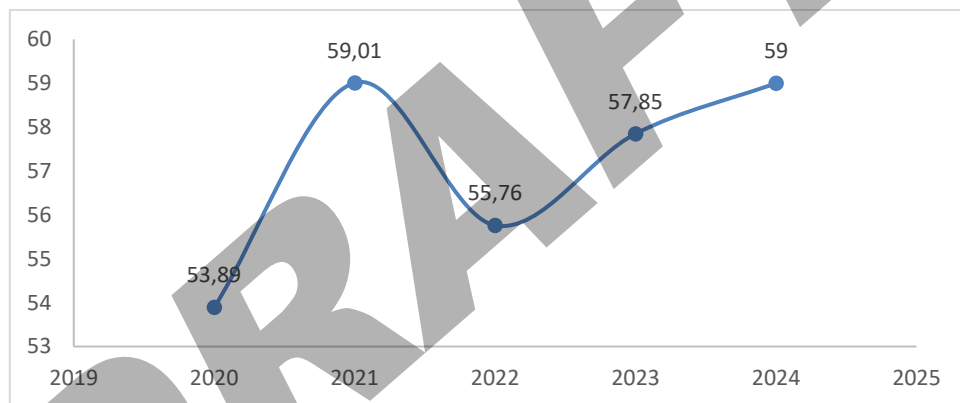
Adapun perubahan drastis nilai IKL, IKU, dan IKA di tahun 2024 dikarenakan perubahan mekanisme perhitungan ke-3 indikator tersebut. Di mana, sebelumnya perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 yang kemudian beralih menjadi RPJMN 2025 - 2029. Adapun, parameter yang paling terdampak akibat perubahan ini adalah IKL yang berubah menjadi 23,53 di tahun 2024 dari 36,51 pada tahun 2023. Untuk meningkatkan indeks ini, Pemerintah Kota Depok perlu:

- i. Memperketat regulasi perlindungan RTH dengan menetapkan target minimal 30% tutupan hijau perkotaan dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

- ii. Mengembangkan ruang terbuka hijau multifungsi, seperti taman kota dengan biopori, rooftop garden di gedung perkantoran, atau vertical planting di kawasan padat penduduk.
- iii. Melibatkan masyarakat dalam program penghijauan, misalnya melalui gerakan penanaman pohon di lingkungan RW atau insentif bagi perumahan yang mempertahankan area hijau.
- iv. Memperbaiki tata kelola drainase dengan mengintegrasikan RTH sebagai bagian dari sistem resapan air untuk mengurangi banjir sekaligus meningkatkan kualitas air.

Dengan pendekatan ini, stagnasi tutupan lahan hijau bisa diatasi tanpa mengorbankan pembangunan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas air dan udara yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan warga menjadi kunci utama dalam menciptakan Depok sebagai kota yang lebih hijau dan layak huni.

Gambar 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok Tahun 2020-2024



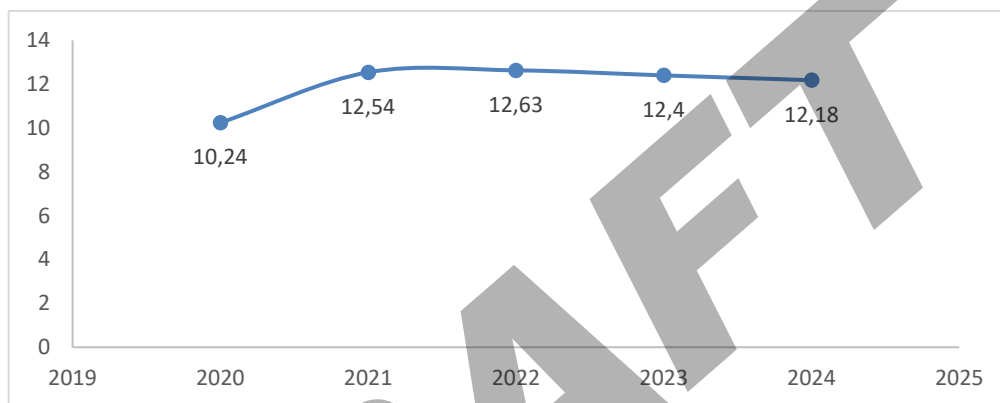
Sumber: DLHK Kota Depok, 2025

Secara deskriptif, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Depok mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 53,89, kemudian meningkat signifikan menjadi 59,01 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 55,76, sebelum kembali meningkat hingga mencapai angka 57,85 pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 54,55 dikarenakan perubahan mekanisme perhitungan IKLH. Perkembangan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Depok. Hal ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Depok untuk terus memperkuat integrasi program-program lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pelestarian ruang terbuka hijau, agar kualitas lingkungan dapat terus meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.

- b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator yang mengukur proporsi rumah tangga yang telah menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, higienis, dan dikelola secara aman. Akses sanitasi aman mencakup ketersediaan toilet yang tidak terbuka, tidak digunakan bersama, serta memiliki sistem pengelolaan limbah yang mampu mencegah pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan, seperti septic tank yang disedot dan lumpurnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau terhubung ke sistem pengelolaan air limbah terpusat.

Gambar 2.6 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kota Depok menunjukkan tren yang cenderung stagnan dan relatif rendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 hanya 10,24% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Angka ini meningkat menjadi 12,54% pada 2021 dan mencapai puncaknya sebesar 12,63% pada tahun 2022. Namun demikian, capaian tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi 12,40% pada 2023 dan 12,18% pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan sanitasi, pertumbuhannya masih sangat lambat dan belum menjangkau mayoritas penduduk. Beberapa faktor yang memengaruhi lambatnya peningkatan ini antara lain terbatasnya cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik, keterbatasan infrastruktur IPAL komunal, rendahnya kesadaran masyarakat akan sanitasi aman, serta masih dominannya penggunaan tangki septik individu yang belum memenuhi standar.

Untuk meningkatkan capaian ke depan, dibutuhkan intervensi strategis melalui perluasan pembangunan IPAL skala permukiman, peningkatan program edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta insentif bagi rumah tangga untuk meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi, juga kolaborasi lintas sektor untuk

mempercepat perluasan akses sanitasi aman sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan di Kota Depok.

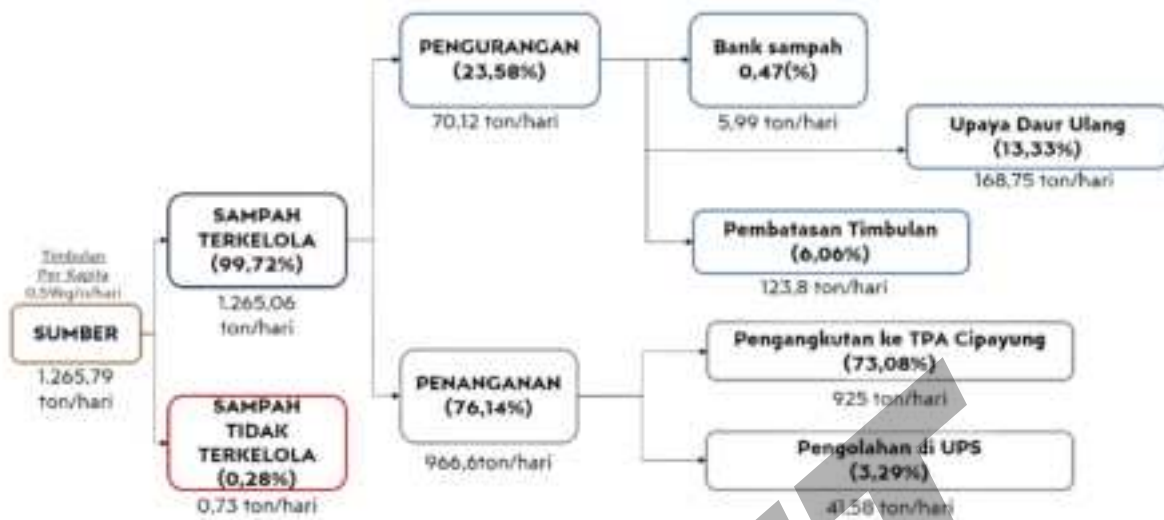
C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Depok menghasilkan timbulan sampah harian sebesar 1.265,79 ton, dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola mencapai 1.265,06 ton per hari atau sekitar 99,72%. Meski persentase pengelolaan tampak tinggi, namun sebagian besar pengelolaan tersebut masih berupa pengangkutan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung, bukan pengolahan melalui fasilitas daur ulang atau pengomposan. Hanya sebagian kecil dari sampah yang benar-benar terolah melalui fasilitas pengolahan, seperti bank sampah dan unit pengolahan sampah (UPS).

Pada tahun 2023, terdapat 423 unit bank sampah aktif, naik dari 315 unit pada tahun 2020, serta dua bank sampah induk yang berlokasi di Kecamatan Cilodong dan Beji. Selain itu, terdapat 28 unit UPS organik yang tersebar di beberapa kecamatan. Melalui fasilitas-fasilitas ini, pengurangan sampah tercatat sebesar 5,99 ton per hari melalui bank sampah, dan 41,58 ton per hari melalui UPS. Namun demikian, sebagian besar sampah kota, yakni sekitar 925 ton per hari atau 73,08%, masih dibuang langsung ke TPA Cipayung yang saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas (overload).

Sumber utama sampah berasal dari fasilitas publik sebesar 51%, disusul oleh rumah tangga sebesar 21%. Tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kota Depok terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan masih adanya praktik pembakaran sampah secara terbuka. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan peran fasilitas pengolahan sampah, edukasi perilaku warga, serta inovasi teknologi pengelolaan yang berkelanjutan seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) atau sistem desentralisasi berbasis komunitas untuk mengurangi beban ke TPA dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah kota secara keseluruhan.

Gambar 2.7 Neraca Massa Persampahan Eksisting Kota Depok Tahun 2023



Sumber: RIPS, 2024

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah menggambarkan sejauh mana sistem pengelolaan persampahan mampu menjangkau seluruh rumah tangga secara rutin dan menyeluruh, mulai dari pengumpulan di sumber hingga pengangkutan ke tempat pemrosesan atau pembuangan akhir. Di Kota Depok, pola pengumpulan sampah umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu pola individual tidak langsung dan pola komunal langsung. Salah satu inovasi dalam sistem ini adalah program “Partai Ember”, di mana warga diminta memilah sampah organik di rumah tangga ke dalam ember-ember kecil. Ember-ember tersebut kemudian dikumpulkan oleh petugas pengelola sampah tingkat RT/RW menggunakan motor sampah setiap dua hari sekali, lalu diserahkan ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Terpilah atau Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Sampah dari titik kumpul diangkut lebih lanjut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menggunakan gerobak motor untuk lokasi yang dekat atau kendaraan roda empat untuk lokasi yang lebih jauh dari UPS. Untuk sampah anorganik, warga didorong untuk menyerahkannya ke TPS Terpilah atau Bank Sampah tingkat RT/RW, atau langsung ke Bank Sampah Induk. Sampah residu juga dipisahkan dan ditangani secara terpisah. Saat ini, Kota Depok memiliki 62 TPS komersial dan 15 TPS DLHK sebagai titik layanan, dengan dukungan armada berupa 47 gerobak motor dan 29 unit kendaraan bak terbuka (pick up).

Namun demikian, kondisi sarana pengumpulan sampah saat ini masih kurang optimal. Beberapa armada pengangkut mengalami kerusakan atau telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga menurunkan efisiensi dan jangkauan pelayanan. Selain itu, keterbatasan jumlah armada dan belum meratanya

distribusi TPS menyebabkan belum semua rumah tangga dapat terlayani secara penuh dan rutin. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sarana dan prasarana pengumpulan, terutama melalui penggantian unit armada lama dan pembelian armada baru secara bertahap, disertai dengan peningkatan kapasitas operasional petugas di lapangan.

Ke depan, Pemerintah Kota Depok perlu memperkuat integrasi sistem layanan pengumpulan, memperluas cakupan UPS dan bank sampah, serta meningkatkan partisipasi warga dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah yang lebih tanggap, efisien, dan berbasis komunitas akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem persampahan kota yang berkelanjutan dan inklusif

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Depok menghadapi risiko tinggi terhadap bencana dan perubahan iklim seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Kerentanan ini diperparah oleh alih fungsi lahan dan rendahnya kapasitas adaptasi. Diperlukan upaya penguatan infrastruktur hijau, tata kelola lingkungan, dan integrasi adaptasi iklim dalam kebijakan pembangunan agar kota lebih tangguh dan berketahanan.

a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

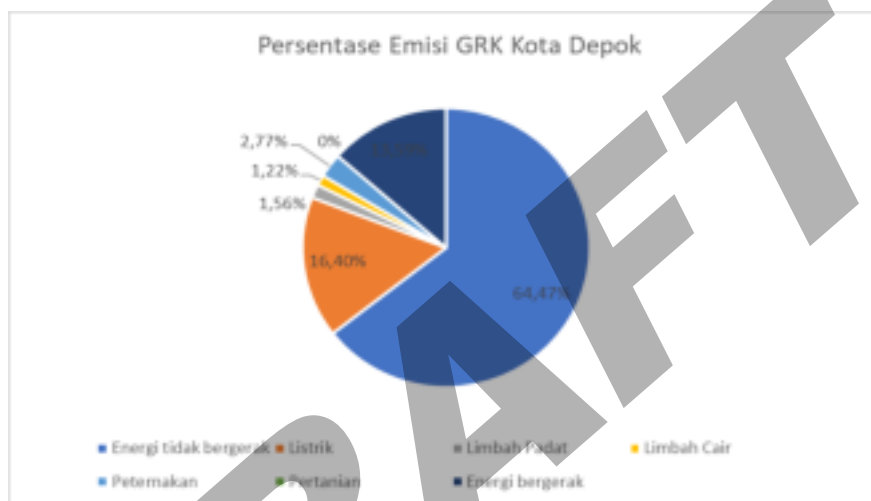
Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, yang mengakibatkan efek pemanasan pada atmosfer bumi. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca karena mereka berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat, mirip dengan cara kerja rumah kaca yang mempertahankan panas di dalamnya. Gas rumah kaca utama termasuk: Karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrogen oksida (N₂O), Gas rumah kaca lainnya: (hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), sulfur heksafluorida (SF₆), dan nitrogen trifluorida (NF₃).

Gas-gas ini berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat, namun dalam konsentrasi berlebih berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tren peningkatan suhu udara rata-rata di Indonesia sebesar 1,02°C selama 44 tahun terakhir, dengan suhu rata-rata nasional tahun 2024 mencapai 27,52°C—anomali positif 0,81°C dibanding periode klimatologis 1991–2020, menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pengamatan.

Upaya global sedang dilakukan untuk mengurangi emisi ini melalui berbagai kebijakan dan teknologi ramah lingkungan. Perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari Kota Depok meliputi beberapa sumber yaitu, sektor limbah, sektor energi, sektor AFOLU, dan sektor penggunaan Listrik,

didapatkan nilai emisi CO₂, emisi CH₄, dan emisi N₂O. Emisi GRK yang dihasilkan terbesar yaitu emisi CO₂ sedangkan emisi CH₄ dan N₂O menghasilkan emisi yang sedikit dibandingkan CO₂. Total emisi GRK Kota Depok tahun 2024 yaitu sebesar 6.689,9508 gg CO₂eq/tahun. Sektor penghasil emisi GRK terbesar dalam satuan emisi CO₂eq/tahun yaitu sektor energi tidak bergerak sebesar 4.312,7645 gg CO₂eq/tahun, sedangkan penghasil emisi terkecil dihasilkan dari sektor Pertanian sebesar 0,0013 gg CO₂eq/tahun. Adapun persentase emisi GRK dari setiap sektor dapat dilihat pada gambar berikut.

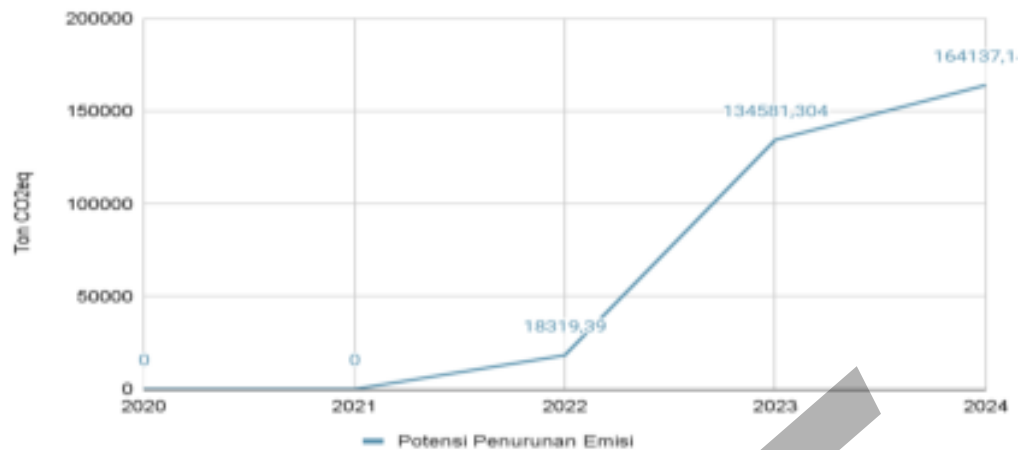
Gambar 2.8 Persentase Emisi GRK Kota Depok



Sumber: Berdasarkan Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kota Depok 2024

Total emisi gas rumah kaca (GRK) Kota Depok meningkat 2,6% dari 6.520,75 gg CO₂eq pada 2023 menjadi 6.689,95 gg CO₂eq pada 2024, dengan kenaikan terutama berasal dari sektor energi dan listrik, sementara sektor limbah dan AFOLU mengalami penurunan emisi. Untuk menurunkan emisi ini, Pemerintah Kota Depok telah melakukan sosialisasi pengurangan emisi di sektor energi, khususnya pada bangunan komersial melalui penerapan bangunan hijau yang hemat energi dan air. Selain itu, strategi pengurangan emisi juga meliputi pengembangan transportasi publik ramah lingkungan dan pengelolaan limbah secara terintegrasi dengan teknologi penangkap gas metana di TPA. Upaya ini sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan transformasi sistem transportasi sebagai langkah efektif mengurangi emisi GRK di perkotaan. Dengan implementasi strategi tersebut, Kota Depok dapat mengendalikan dan menurunkan emisi GRK demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.

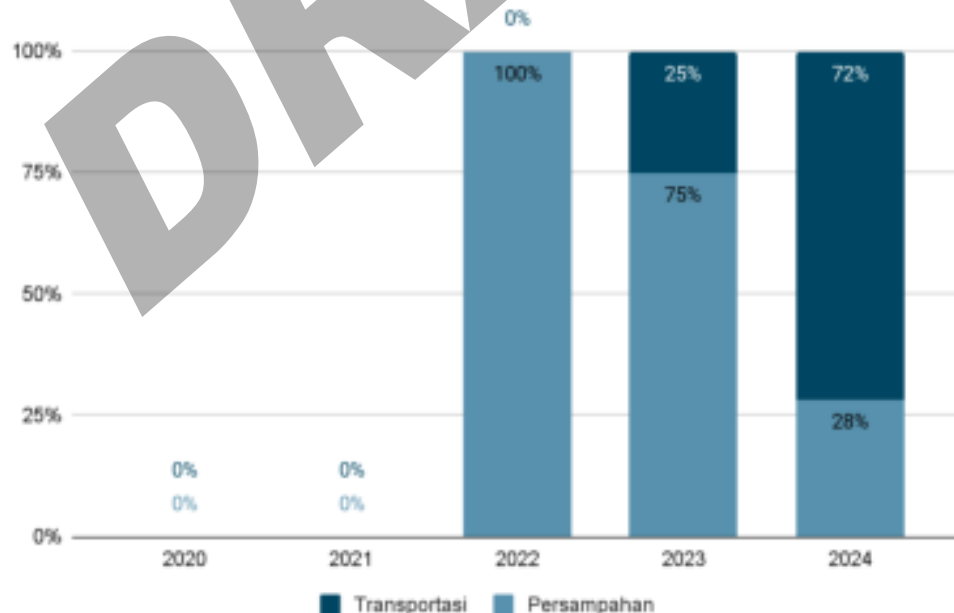
Gambar 2.9 Potensi Penurunan Emisi GRK Kota Depok Tahun 2020 – 2024



Sumber: Aksara Bappenas, 2025

Potensi penurunan emisi GRK dari 2020 dan 2021 belum terdapat kontribusi yang tercatat, namun mulai tahun 2022 terdapat peningkatan potensi penurunan hingga melonjak drastis di tahun 2023 dan melanjutkan tren positifnya di tahun 2024. Hal ini menunjukkan hasil intervensi dari 48 kegiatan pembangunan rendah karbon perubahan iklim yang telah dilakukan di Kota Depok.

Gambar 2.10 Sektor Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kota Depok Tahun 2020 – 2024



Sumber: Aksara Bappenas, 2025

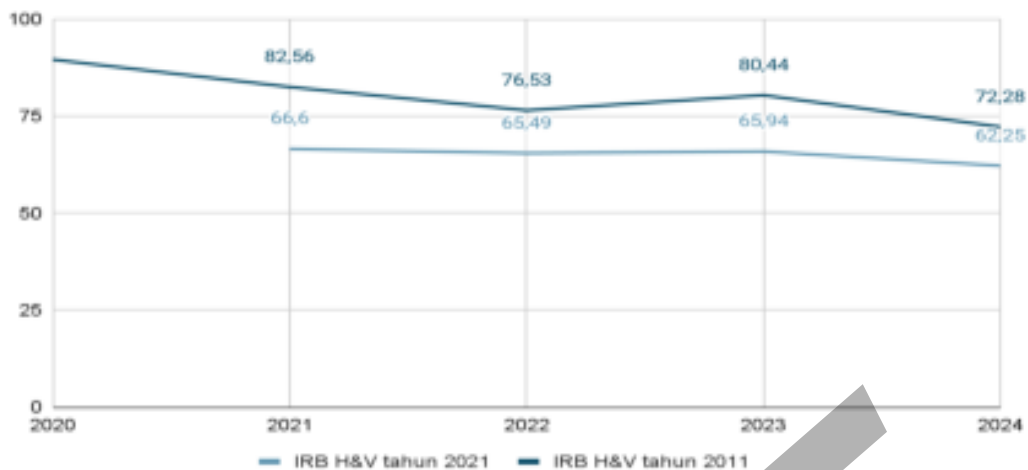
Dari grafik di atas, menunjukkan kontribusi sektor-sektor terhadap penurunan emisi GRK di Kota Depok periode 2020-2024. Pada tahun 2022, sektor persampahan memberikan kontribusi tunggal terhadap penurunan emisi sebesar 100% (17.000,07 ton CO₂eq). Pergeseran komposisi terjadi pada tahun 2023 dengan sektor transportasi mulai berkontribusi dengan proporsi sebesar 24,98% (28.595,68 ton CO₂eq), sementara sektor persampahan masih mendominasi dengan 75,02% (85.858,40 ton CO₂eq). Ini menunjukkan adanya implementasi program pembangunan rendah karbon ke sektor transportasi seperti manajemen lalu lintas dan peningkatan infrastruktur transportasi berkelanjutan.

Tren ini berlanjut di tahun 2024, dimana kontribusi sektor transportasi meningkat tajam menjadi 71,73% (18.948,36 ton CO₂eq) yang mengungguli sektor persampahan yang menyumbang sebesar 28,26% (7.465,64 ton CO₂eq), tercatat pula kontribusi kecil dari sektor pertanian sebesar 0,01% (2,01 ton CO₂eq). Perubahan komposisi kontribusi ini mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan rendah karbon yang lebih luas tidak hanya pada pengelolaan sampah tetapi juga sektor transportasi dan pertanian. Hal ini memperkuat peran lintas sektor dalam mendukung agenda penurunan emisi GRK di Kota Depok.

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana, dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Nilai IRB dihitung berdasarkan analisis berbagai faktor, seperti frekuensi dan intensitas bencana alam, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Skala indeks umumnya berkisar antara 0–100, di mana semakin tinggi nilainya, semakin besar risiko bencana di wilayah tersebut. IRB digunakan sebagai alat evaluasi untuk merumuskan kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, atau kekeringan. Indeks Risiko Bencana Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada gambar berikut.

Gambar 2.11 Indeks Risiko Bencana Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: BNPB, 2025 (diolah)

Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) terdiri dari beberapa komponen, yaitu indeks bahaya, jumlah penduduk terpapar, potensi kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kapasitas daerah. Sejak IRBI 2012 hingga 2024, data bahaya dan kerentanan menggunakan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2011. Namun, mulai 2021, BNPB memperkenalkan KRB 2021 yang digunakan sebagai transisi menuju IRBI 2025.

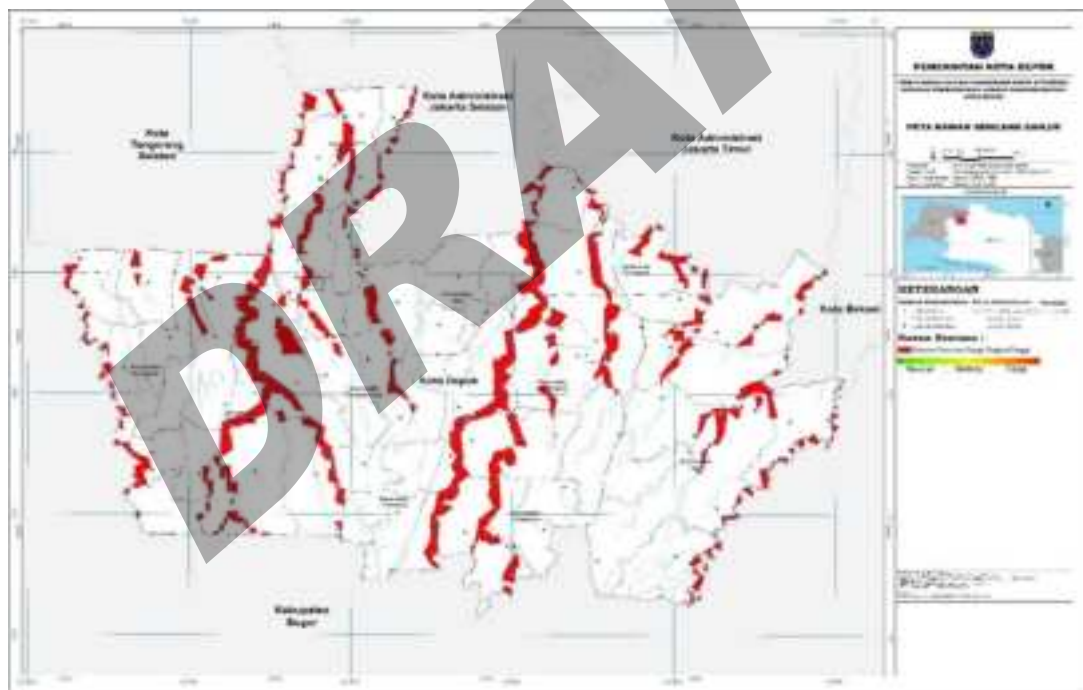
Perubahan ini berdampak pada nilai IRBI. Di Kota Depok, nilai IRBI tahun 2024 dengan basis KRB 2021 tercatat 62,25, lebih rendah dibandingkan nilai IRBI dengan KRB 2011 sebesar 72,28. Penurunan ini bukan hanya karena metodologi, tetapi juga perubahan nyata dalam dinamika risiko dan kerentanan akibat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan tata guna lahan. Meski demikian, nilai dari dua baseline ini tidak dapat dibandingkan langsung karena adanya perbedaan metodologi dan jenis bencana yang dihitung. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menggambarkan perbedaan pendekatan dalam pengukuran risiko bencana.

Tren Indeks Risiko Bencana Kota Depok dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan indeks dari 66,6 pada tahun 2021 menjadi 65,49 pada tahun 2022, lalu naik menjadi 65,94 di tahun 2023, dan menurun lagi hingga 62,25 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Depok memiliki tingkat risiko kerentanan yang sedang terhadap bencana, baik dari sisi bahaya, paparan, maupun kapasitas respons dan adaptasi yang masih perlu diperkuat. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya upaya sistematis dan berkelanjutan dalam peningkatan mitigasi risiko bencana serta

penguatan kapasitas adaptasi, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan perkembangan wilayah yang pesat.

Kota Depok memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap sejumlah bencana, terutama banjir, longsor, dan kebakaran. Di antara ketiganya, banjir merupakan ancaman utama yang dipengaruhi oleh faktor topografi, alih fungsi ruang terbuka hijau, serta curah hujan yang tinggi. Analisis BMKG menunjukkan tren peningkatan intensitas hujan (wetspell), sementara sistem drainase yang belum terintegrasi dan kapasitasnya terbatas menyebabkan limpasan air yang tidak tertampung dengan baik.

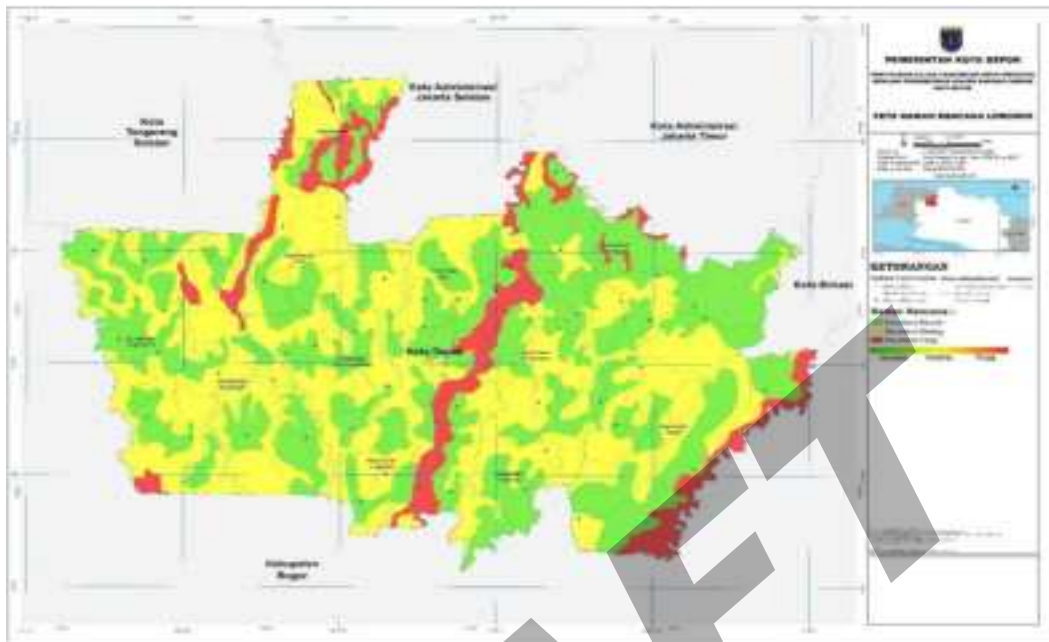
Keberadaan sungai besar seperti Ciliwung, Angke, dan Pesanggrahan yang mengalami fluktuasi debit ekstrem turut memperparah potensi banjir, terutama di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan risiko tertinggi antara lain Beji, Cipayung, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis, Limo, Cinere, dan Tapos. Secara keseluruhan, Kota Depok dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, dengan luas area rawan mencapai 2.161,73 hektare. Berikut merupakan peta Distribusi spasial daerah rawan bencana banjir Kota Depok.



Gambar 2.12 Distribusi Spasial Potensi Bencana Banjir di Kota Depok
Sumber: Dokumen KLHS Kota Depok 2025-2029

Di sisi lain, tanah longsor berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah, terutama di sekitar sempadan sungai seperti Ciliwung, Krukut, dan Cikeas. Sekitar 9,3% wilayah Depok dengan luas 1.859,35 Ha dikategorikan memiliki potensi longsor tinggi, yang disebabkan oleh erosi tebing sungai

karena volume air sungai serta eksploitasi air tanah berlebihan yang memicu pergerakan tanah. Peta Distribusi Spasial Potensi Bencana Longsor di Kota Depok dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.13 Distribusi Spasial Potensi Bencana Longsor di Kota Depok
Sumber: Dokumen KLHS Kota Depok 2025-2029

Sementara itu, potensi kebakaran juga cukup tinggi, terutama di kawasan padat permukiman, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Keragaman jenis bangunan dan kepadatan permukiman menyulitkan proses pemadaman saat terjadi insiden. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun 2024, jumlah kejadian kebakaran di Kota Depok mengalami peningkatan dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, tercatat 123 kejadian tetapi pada tahun berikutnya, jumlah kebakaran sedikit menurun, dengan 121 kejadian di tahun 2021. Tren peningkatan kembali terjadi pada 2022 dengan 141 kejadian, lalu pada 2023 dengan 160 kejadian dan terus bertambah menjadi 203 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut serta upaya pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi risiko kebakaran di Kota Depok. Untuk mengurangi risiko bencana, diperlukan strategi mitigasi terpadu melalui peningkatan kapasitas dan integrasi sistem drainase, perlindungan daerah resapan air, pengembangan infrastruktur hijau, serta pengawasan ketat terhadap tata ruang dan pembangunan di wilayah rawan bencana

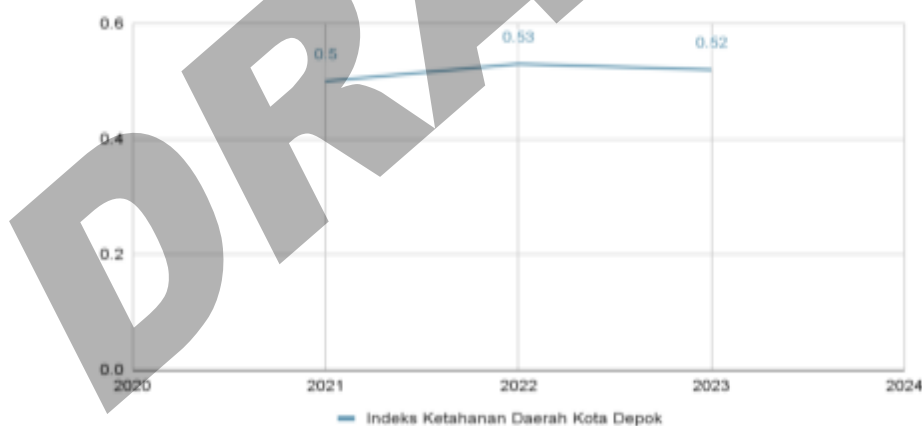


Gambar 2.14 Kejadian Bencana Kebakaran Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok (2025)

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengatasi bencana, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Untuk Kota Depok, IKD pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan stabilitas dan sedikit peningkatan, dari 0,5 menjadi 0,52. Dengan nilai ini, Kota Depok dikelompokkan sebagai daerah dengan ketahanan sedang.



Gambar 2.15 Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok

Sumber: Portal Satu data Indonesia, 2025

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Daerah Kota Depok tahun 2021-2023, terlihat bahwa ketahanan wilayah mengalami fluktuasi dengan tren yang relatif stabil. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 0,50, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,53 di tahun 2022, sebelum sedikit menurun ke 0,52 di tahun 2023. Kenaikan pada 2022 mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek-aspek ketahanan seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, atau lingkungan, yang mungkin didorong oleh pemulihan pasca-pandemi atau intervensi kebijakan.

Meski mengalami penurunan kecil di 2023, nilai indeks tetap lebih tinggi dibanding baseline tahun 2021, menunjukkan bahwa ketahanan Kota Depok secara umum telah mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun, fluktuasi ini juga menyiratkan perlunya penguatan kebijakan yang lebih konsisten, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti pertumbuhan penduduk, tekanan lingkungan, atau dinamika ekonomi, agar ketahanan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2.1.1.7. Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Populasi penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2024 sebanyak 2.163.635 jiwa yang terdiri atas 1.088.759 jiwa penduduk laki-laki dan 1.074.876 jiwa penduduk perempuan (BPS Kota Depok, 2025). Pada Gambar dibawah ini diperlihatkan perkembangan Penduduk Kota Depok 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) yang tumbuh rata-rata sekitar 1,87% per tahun. Dari gambar tersebut terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk Kota Depok menunjukkan tren menurun. Hal ini bisa dilihat dari LPP Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 3,21% menjadi 1,37% pada Tahun 2024. Kondisi ini dapat terjadi karena kombinasi situasi mulai dari pandemi Covid-19, kematian akibat penyakit, dan penundaan hingga pembatasan kelahiran. Semua kondisi tersebut memerlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kota Depok.

Sebagai respon terhadap dinamika tersebut, Pemerintah Kota Depok turut mendorong implementasi kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kelahiran, kematian, dan migrasi. PTS ini memiliki lima pilar utama, yaitu:

- 1) Pengendalian kelahiran – melalui program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh fasilitas layanan kesehatan primer, penyuluh KB, serta penyediaan alat kontrasepsi secara merata dan mudah diakses.
- 2) Penurunan kematian – melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta penguatan sistem surveilans penyakit.
- 3) Pengelolaan mobilitas penduduk – dengan kebijakan penataan urbanisasi, pengembangan kawasan pinggiran, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
- 4) Peningkatan kualitas penduduk – mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja yang didukung oleh sarana pendidikan, pelatihan vokasi, dan fasilitas layanan dasar yang merata.
- 5) Pembangunan keluarga berkualitas – melalui edukasi ketahanan keluarga, pembinaan karakter anak dan remaja, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan.

Dukungan terhadap implementasi kelima pilar PTS ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, sekolah, tempat pelatihan kerja, sistem informasi kependudukan yang terintegrasi, serta sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Kota Depok diharapkan mampu mengelola dinamika pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup warganya, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan.



Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Depok. 2025 (diolah)

b. Komposisi Penduduk

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin (2020-2024), total jumlah penduduk laki-laki di Kota Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok Tahun 2024 sebesar 101,29. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Rasio ini termasuk wajar bagi kota Depok yang merupakan wilayah urban penyanggah kota Jakarta dan sejalan dengan tren nasional.



Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2020- 2024

Sumber: Kota Depok dalam Angka 2025 (diolah)

Berdasarkan data BPS Tahun 2025, proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebanyak 499.408 orang (23,08%), usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.536.372 (71,01%) dan usia lanjut atau 65 tahun ke atas sebanyak 127.855 orang (5,91%). Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2024 menjadi 40,83. Angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 41 orang kelompok non produktif.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2024 (Ribu Jiwa)

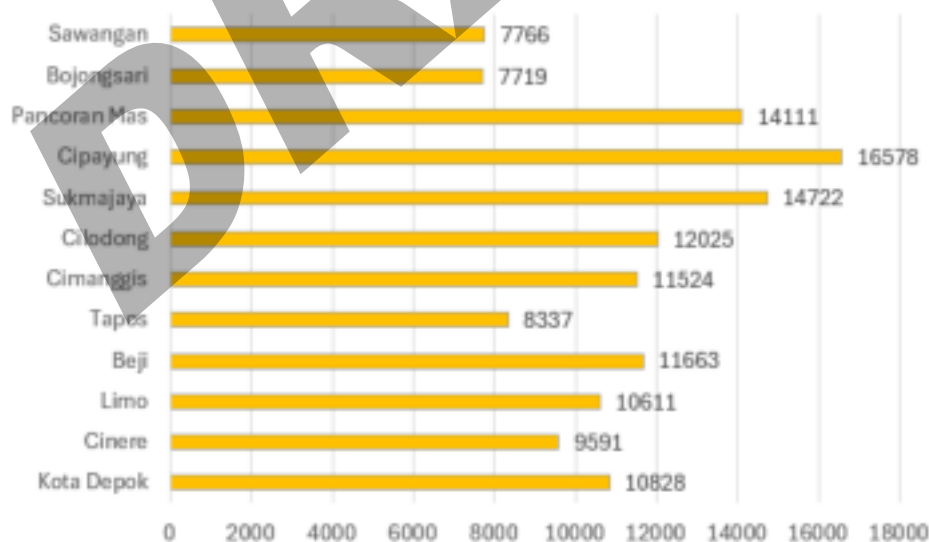
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0-4	85,575	81,966	167,541	104.40
5-9	84,943	80,925	165,868	104.96
10-14	84,709	81,290	165,999	104.20
15-19	90,105	84,130	174,235	107.10
20-24	82,955	79,390	162,345	104.49
25-29	81,380	79,780	161,160	102.01
30-34	85,002	86,772	171,774	97.96
35-39	87,868	89,734	177,602	97.92
40-44	86,989	86,206	173,195	100.91
45-49	84,646	81,953	166,599	103.29
50-54	72,575	70,743	143,318	102.59
55-59	59,060	58,731	117,791	100.56
60-64	43,343	45,010	88,353	96.30
65-69	29,027	31,536	60,563	92.05

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
70–74	18,085	20,473	38,558	88.33
75+	12,497	16,237	28,734	76.97
Kota Depok	1,088,759	1,074,876	2,163,635	101.29

Sumber: BPS Kota Depok. 2025

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi faktor demografis yaitu tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok. Kota Depok merupakan wilayah penyangga aktivitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan. Selain faktor demografis, pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran) maupun mortalitas (kematian) penduduk Kota Depok.

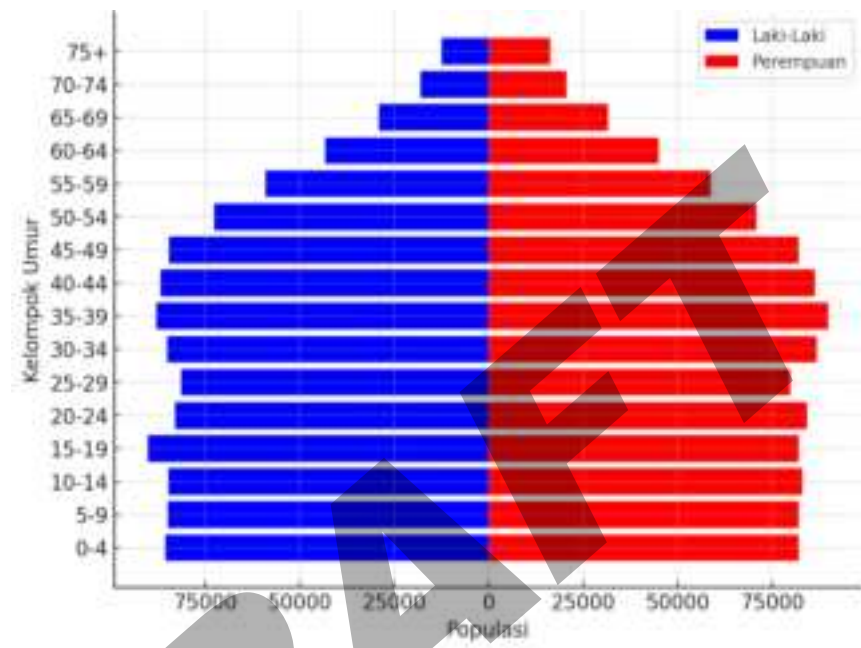
Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap kepadatan jumlah penduduk di wilayah Kota Depok. Pada gambar dibawah ditunjukkan bahwa Kecamatan Cipayung merupakan wilayah terpadat dengan jumlah 16.578 jiwa per Km², diikuti dengan Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 14.722 jiwa per km². Sementara Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Kota Depok, dengan jumlah masing-masing 7.766 jiwa per km² dan 7.719 jiwa per km².



Gambar 2.18 Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Depok. 2025 (diolah)

Piramida penduduk Kota Depok tahun 2024 menunjukkan bentuk stasioner (konstruktif) yang mencerminkan struktur penduduk dengan angka kelahiran dan kematian yang relatif seimbang serta dominasi penduduk usia produktif. Hal ini tampak dari lebar yang hampir merata pada kelompok

usia 15–59 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Depok berada pada usia produktif. Kelompok usia 0–14 tahun mulai mengalami penyempitan, yang mengindikasikan adanya tren penurunan angka kelahiran. Di sisi lain, kelompok usia 60 tahun ke atas masih menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan akses layanan kesehatan yang mendukung peningkatan harapan hidup.

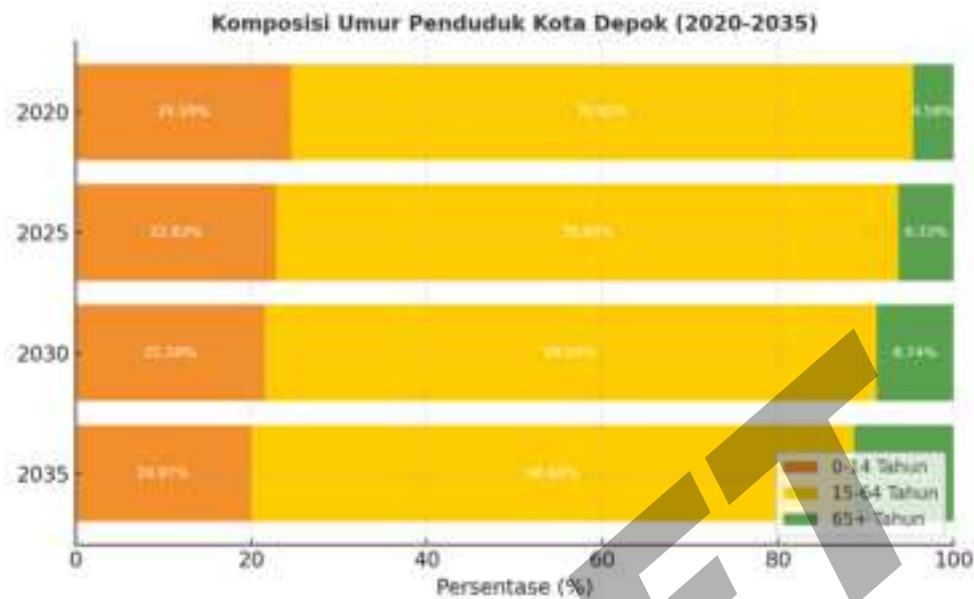


Gambar 2.19 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2024
Sumber: BPS Kota Depok. 2025 (diolah)

Struktur kependudukan seperti ini menunjukkan bahwa Kota Depok sedang berada pada fase bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama jika pemerintah mampu mengoptimalkan potensi usia produktif melalui penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta kebijakan yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Namun, kondisi ini juga menuntut kesiapan dalam menghadapi tantangan jangka panjang, khususnya terkait meningkatnya jumlah penduduk lansia di masa depan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok perlu mulai merancang kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti penguatan sistem jaminan sosial, layanan kesehatan lansia, serta pengembangan ekonomi yang inklusif. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek pembangunan kependudukan berbasis wilayah, agar pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan dapat merata dan sesuai dengan karakteristik demografis tiap kecamatan. Dengan perencanaan yang

tepat dan berkelanjutan, struktur penduduk Kota Depok tahun 2024 dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pencapaian visi kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.



Gambar 2.20 Komposisi Umur Penduduk Kota Depok (2020-2035)
Sumber: Hasil Analisis . 2025

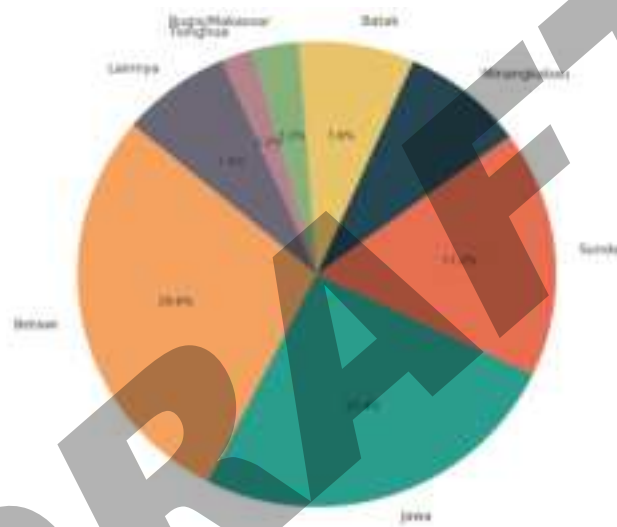
Dilihat secara menyeluruh, struktur demografis Kota Depok pada tahun 2024 mencerminkan kondisi bonus demografi yang ideal, ditandai dengan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari dua pertiga populasi. Pada proyeksi pertumbuhan wilayah Kota Depok tahun 2020 hingga 2035 menunjukkan piramida penduduk berbentuk stasioner. Bentuk ini ditandai oleh distribusi yang relatif merata pada kelompok usia produktif, mencerminkan kondisi demografis yang stabil dengan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang serta pertumbuhan penduduk yang terkendali.. Generasi Z dan Milenial merupakan kelompok dominan, meskipun proporsinya menunjukkan tren penurunan dari 70,82% pada tahun 2020 menjadi 68,68% pada tahun 2035. Di sisi lain, Generasi Alpha (0–14 tahun) juga mengalami penurunan dari 24,59% menjadi 19,97%, yang dapat mengindikasikan penurunan angka kelahiran dan potensi penyusutan tenaga kerja di masa depan.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan signifikan dari 4,58% menjadi 11,35%, yang menunjukkan awal dari transisi menuju masyarakat menua. Hal ini menandakan bahwa Kota Depok tidak hanya harus memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap kewirausahaan, tetapi juga mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan peningkatan angka ketergantungan. Sistem kesehatan, jaminan sosial, dan infrastruktur ramah lansia

perlu diperkuat sejak dini agar pergeseran demografis ini tidak menjadi beban di masa depan, melainkan dapat dikelola menjadi peluang melalui kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Kota Depok merupakan salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta yang memiliki karakter urban dan multikultural. Sebagai kota tujuan urbanisasi, Depok menjadi rumah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Keberagaman ini menjadikan Kota Depok sebagai cerminan Indonesia mini, dengan dinamika sosial yang terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok (2024), komposisi suku penduduk di Kota Depok dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.21 Komposisi Suku di Kota Depok

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok (2024)

Berdasarkan diagram di atas mengenai komposisi suku di Kota Depok tahun 2024 di atas, terlihat bahwa suku Betawi merupakan kelompok etnis terbesar dengan proporsi 28,6% dari total populasi yang mencerminkan status Betawi sebagai penduduk asli kawasan Jabodetabek. Komunitas Betawi masih memiliki konsentrasi cukup besar terutama di wilayah seperti Pancoran Mas, Beji, dan Sawangan. Budaya Betawi masih dilestarikan melalui kesenian seperti lenong, ondel-ondel, dan makanan khas seperti kerak telur.

Menyusul di posisi kedua adalah suku Jawa dengan persentase 25,4%, menunjukkan dominasi migrasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Depok. Umumnya, masyarakat suku Jawa berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang bermigrasi untuk bekerja atau menetap, bekerja, belajar, maupun bertempat tinggal. Kemudian, wilayah Cimanggis dan Tapos banyak dihuni oleh masyarakat

suku Sunda yang mencakup 17,2% penduduk. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, suku Sunda memiliki peran penting dalam tatanan budaya lokal. Masyarakat suku Sunda secara geografis berdekatan dengan Kota Depok sebagai bagian dari Jawa Barat, dan tetap mempertahankan pengaruh budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Suku Minangkabau dan suku Batak masing-masing menyumbang 8,3% dan 7,8%, mencerminkan kehadiran komunitas Sumatera yang cukup signifikan, terutama dalam sektor perdagangan, jasa, dan profesional. Masyarakat suku Minangkabau banyak bermukim di area Margonda, sedangkan masyarakat suku Batak —terutama sub-etnis Toba dan Karo—menempati bagian penting dalam sektor ekonomi dan profesional di Depok, termasuk dalam bidang hukum, teknik, dan jasa.

Sementara itu, suku Bugis dan Makassar berkontribusi sekitar 3,2%, yang umumnya tersebar di sektor logistik, transportasi dan perdagangan. Komunitas Tionghoa membentuk 2,1% dari populasi dan banyak bergerak di bidang ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan. Sisanya, sebanyak 7,4%, terdiri dari kelompok suku lainnya seperti Dayak, Nias, Papua, Ambon, dan etnis nusantara lainnya yang turut memperkaya mozaik keberagaman Kota Depok. Kelompok ini mencerminkan keberagaman nusantara yang semakin inklusif, terutama di kalangan mahasiswa, pekerja profesional, dan ASN.

Keberagaman suku di Kota Depok menjadi kekayaan sosial budaya yang perlu dijaga melalui penguatan integrasi sosial, pendidikan multikultural, serta pelibatan semua kelompok etnis dalam pembangunan kota. Pemerintah Kota Depok juga telah menginisiasi berbagai program pelestarian budaya lokal dan penguatan kohesi sosial lintas suku untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Pencapaiannya dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Depok. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan (2) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial. Kinerja masing-masing aspek tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok berfluktuasi selama lima tahun terakhir (2020–2024). Hal tersebut bisa dilihat melalui perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan target daerah pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi dengan Target LPE Kota Depok Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Target LPE	7,67	7,31	5,50	5,96	5,28
Realisasi LPE	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

LPE Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,92%, jauh di bawah target sebesar 7,67%. Kegagalan ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara nasional dan global. Tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan dengan realisasi LPE sebesar 3,76%, namun tetap belum mencapai target 7,31%, menandakan bahwa pemulihan berjalan namun belum cukup kuat untuk mengejar proyeksi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, meskipun target diturunkan signifikan menjadi 5,50%, realisasi hanya menyentuh 5,24%, menunjukkan adanya kehati-hatian dalam penetapan target, namun pemulihan belum optimal.

Tahun 2023 mencatat realisasi sebesar 5,05% dari target 5,96%, yang masih berada di bawah ekspektasi, menandakan tantangan struktural dan kemungkinan penyesuaian kebijakan yang belum sepenuhnya efektif dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Baru pada tahun 2024, target sebesar 5,28% berhasil dilampaui dengan capaian 5,47%, mengindikasikan mulai tercapainya stabilitas dan efektivitas strategi pembangunan ekonomi lokal.

Adapun tingkat perubahan LPE Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Tingkat Perubahan LPE Kota Depok Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
LPE	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47
Perubahan	-8,66	5,72	1,48	-0,19	0,42
Tingkat Perubahan (%)	-128,5	-295,83	39,36	-0,04	8,32

Sumber : BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa data tingkat perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan respons ekonomi terhadap

krisis global dan proses pemulihan pasca-pandemi. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekstrem sebesar -1,92%, yang merupakan penurunan tajam sebesar 8,66 poin dari LPE tahun 2019 (yang diasumsikan sebesar 6,74%). Tingkat perubahan negatif sebesar -128,5% menandakan keterpurukan ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang menghantam hampir seluruh sektor perekonomian.

Tahun 2021 menunjukkan rebound kuat dengan lonjakan LPE sebesar 5,72 poin ke angka 3,76%, yang berarti terjadi pertumbuhan sebesar 295,83% dibanding tahun sebelumnya. Ini menggambarkan adanya upaya pemulihan yang mulai efektif, baik dari sisi kebijakan fiskal, peningkatan aktivitas ekonomi, maupun adaptasi masyarakat terhadap kenormalan baru. Namun, tahun 2022 mencatat peningkatan LPE yang lebih moderat, yaitu 1,48 poin (naik menjadi 5,24%), dengan tingkat perubahan sebesar 39,36%. Ini menandakan bahwa meskipun pemulihan masih berlangsung, laju percepatannya mulai melambat seiring berkurangnya efek “bounce-back”.

Pada 2023, justru terjadi sedikit penurunan sebesar -0,19 poin (turun ke 5,05%) dengan tingkat perubahan -0,04%, menunjukkan adanya stagnasi atau potensi hambatan struktural dalam mempertahankan momentum pertumbuhan. Baru pada 2024, terjadi kenaikan kembali sebesar 0,42 poin (menjadi 5,47%) dengan tingkat perubahan 8,32%, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang mulai stabil namun dengan laju pertumbuhan yang lebih hati-hati.

Secara keseluruhan, analisis tingkat perubahan ini menunjukkan bahwa Kota Depok mengalami guncangan hebat di awal pandemi, diikuti oleh fase pemulihan yang cepat namun tidak konsisten. Fluktuasi ini memperlihatkan pentingnya perencanaan ekonomi yang fleksibel dan antisipatif terhadap berbagai dinamika eksternal, serta perlunya penguatan struktur ekonomi lokal agar lebih resilien terhadap krisis di masa depan.

Sementara untuk perbandingan LPE Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Perbandingan LPE Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	(2,39)	3,56	5,25	4,96	4,90
Jawa Barat	(2,44)	3,74	5,45	5	4,95
Kota Depok	(1,92)	3,76	5,24	5,05	5,47
Kabupaten Bogor	(1,76)	3,55	5,25	5,19	5,21
Kabupaten Karawang	(3,80)	5,85	6,31	5,4	4,20
Kabupaten Bekasi	(3,40)	3,65	5,30	6,08	5,17
Kota Bogor	(0,41)	3,76	5,65	5,1	5,15
Kota Bekasi	(2,58)	3,22	4,96	5,43	5,19

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dengan wilayah-wilayah setara selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun Depok mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi, performanya tergolong relatif moderat dibanding beberapa daerah lain. Pada tahun tersebut, Depok mencatat kontraksi -1,92%, lebih baik dibanding Karawang (-3,80%), Bekasi (-3,40%), dan DKI Jakarta (-2,39%), namun masih di bawah performa Kota Bogor yang hanya terkontraksi -0,41%. Ini menunjukkan bahwa Depok memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di masa krisis, walaupun bukan yang terbaik di kawasan Jabodetabekpunjur.

Tahun 2021 menjadi titik balik pemulihan, dan Depok menunjukkan kinerja yang baik dengan LPE 3,76%, yang berada di atas rata-rata Jawa Barat (3,74%) dan DKI Jakarta (3,56%), serta sejajar dengan Kota Bogor. Namun Karawang mengalami lonjakan signifikan (5,85%), menandakan penguatan sektor industri manufakturnya sebagai pendorong utama pertumbuhan. Tahun 2022, meski Depok tumbuh cukup baik (5,24%), masih tertinggal dari Karawang (6,31%), Kota Bogor (5,65%), dan Kabupaten Bekasi (5,30%), mengindikasikan bahwa sektor-sektor unggulan Depok belum sepenuhnya mengimbangi daya dorong industri di wilayah tetangga.

Pada 2023, Depok mencatat pertumbuhan 5,05%, yang sedikit lebih tinggi dari DKI Jakarta (4,96%) dan Jawa Barat (5,00%), namun tertinggal dari Kabupaten Bekasi (6,08%) dan Kota Bekasi (5,43%). Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Depok mulai menunjukkan stabilitas, namun laju akselerasinya masih belum cukup kompetitif dibanding daerah industri dan kota satelit yang memiliki struktur ekonomi lebih dinamis.

Tahun 2024 menjadi titik positif bagi Kota Depok, dengan LPE sebesar 5,47% — tertinggi di antara seluruh wilayah yang dibandingkan. Ini menandakan keberhasilan Depok dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan perbaikan struktur ekonomi lokal yang lebih stabil dan adaptif. Namun demikian, capaian ini perlu dilihat secara hati-hati; keunggulan Depok bisa jadi bersifat temporer jika tidak disertai dengan penguatan daya saing sektor unggulan secara berkelanjutan.

Secara umum, Kota Depok berada di jalur pemulihan yang cukup solid dan mampu bersaing dengan kota/kabupaten setara, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mengimbangi dinamika pertumbuhan wilayah dengan basis industri kuat seperti Karawang dan Bekasi. Untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi, Pemkot Depok perlu terus mendorong transformasi ekonomi digital, penguatan UMKM, dan pengembangan SDM, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dalam kerangka integrasi kawasan metropolitan Jabodetabek.

Adapun perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata Capaian wilayah sekitar tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Perbandingan Perubahan LPE Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	Perubahan	2021	Perubahan	2022	Perubahan	2023	Perubahan	2024
DKI Jakarta	(2,39)	5,95	3,56	1,69	5,25	(0,29)	4,96	(0,06)	4,90
Jawa Barat	(2,44)	6,18	3,74	1,71	5,45	(0,45)	5	(0,05)	4,95
Kota Depok	(1,92)	5,68	3,76	1,48	5,24	(0,19)	5,05	0,42	5,47
Kabupaten Bogor	(1,76)	5,31	3,55	1,7	5,25	(0,06)	5,19	0,02	5,21
Kabupaten Karawang	(3,80)	9,65	5,85	0,46	6,31	(0,91)	5,4	(1,2)	4,20
Kabupaten Bekasi	(3,40)	7,05	3,65	1,65	5,30	0,78	6,08	(0,91)	5,17
Kota Bogor	(0,41)	4,17	3,76	1,89	5,65	(0,55)	5,1	0,05	5,15
Kota Bekasi	(2,58)	5,8	3,22	1,74	4,96	0,47	5,43	(0,24)	5,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Analisis perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2020–2024, jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah setara, menunjukkan dinamika yang mencerminkan resiliensi moderat dan pemulihan bertahap pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi yang dalam akibat pandemi. Namun, kontraksi Depok sebesar -1,92% termasuk yang paling kecil kedua setelah Kota Bogor (-0,41%), dan lebih baik dibanding Karawang (-3,80%), Bekasi (-3,40%), maupun DKI Jakarta -2,39%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdampak, perekonomian Depok cenderung lebih tahan terhadap guncangan awal pandemi dibanding beberapa wilayah industri lainnya, kemungkinan karena struktur ekonomi Depok yang lebih tersentral pada sektor jasa, pendidikan, dan perdagangan.

Tahun 2021 menunjukkan fase rebound, di mana Depok mencatat kenaikan LPE sebesar 5,68 poin menjadi 3,76%, sedikit lebih rendah dari Karawang (9,65 poin) dan Bekasi (7,05 poin), tetapi masih mencerminkan pemulihan yang cukup baik. Perubahan LPE Depok dari 2020 ke 2021 (5,68) berada di atas rerata perubahan wilayah seperti Bogor (5,31) dan Kota Bekasi (5,80), menandakan respons kebijakan dan adaptasi lokal yang cukup efektif.

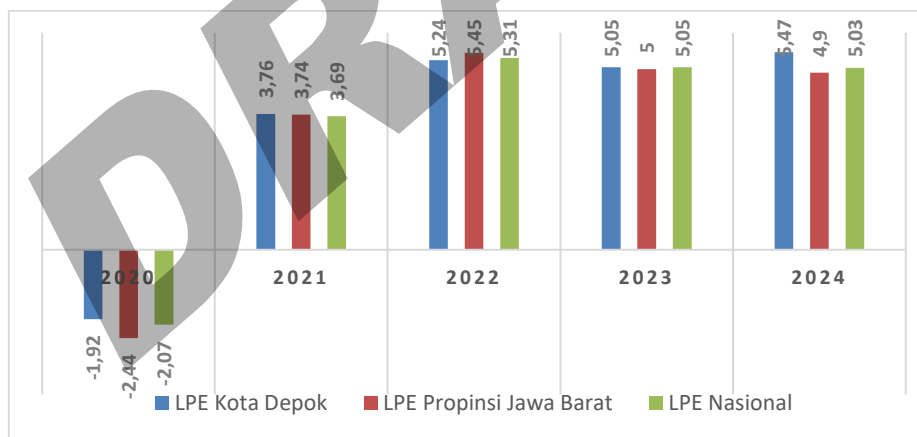
Pada 2022, Depok mencatat kenaikan sebesar 1,48 poin menjadi 5,24%, di bawah beberapa wilayah seperti Kota Bogor (1,89) dan Jawa Barat (1,71), namun tetap menunjukkan pemulihan yang stabil. Namun demikian, mulai tahun 2023, laju pertumbuhan mulai melambat. Depok mengalami sedikit penurunan sebesar -0,19 poin menjadi 5,05%, namun ini lebih kecil dibanding penurunan yang dialami Karawang (-0,91) dan Kota Bogor (-0,55), menandakan stabilitas ekonomi yang mulai terbentuk. Sementara itu, wilayah seperti Kabupaten Bekasi justru tumbuh lebih tinggi, naik 0,78 poin, menandakan pergeseran dinamika pemulihan yang lebih berpihak pada daerah berbasis industri berat.

Tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi Kota Depok, dengan peningkatan LPE sebesar 0,42 poin menjadi 5,47%. Ini adalah salah satu peningkatan tertinggi di antara seluruh wilayah yang dianalisis, di saat sebagian besar wilayah lain justru mencatatkan perlambatan atau pertumbuhan yang stagnan. Performa ini menandakan bahwa Depok mulai menemukan momentum baru dalam pertumbuhan ekonominya, berpotensi sebagai hasil dari kebijakan daerah yang lebih adaptif, penguatan sektor perdagangan dan jasa, serta daya tahan ekonomi masyarakat yang semakin solid.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Kota Depok berada dalam posisi menengah dalam hal ketahanan ekonomi saat krisis, namun memiliki kecenderungan pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan. Meskipun tidak selalu menjadi yang tercepat dalam rebound, Depok cenderung menunjukkan kestabilan dan arah pertumbuhan yang menjanjikan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan mempercepat momentum pertumbuhan ini melalui strategi diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi lokal, serta pemberdayaan sektor informal dan UMKM agar lebih produktif dan berdaya saing di tengah perubahan lanskap ekonomi regional.

Perkembangan perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Depok dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.22 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Depok, 2025

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika pemulihan ekonomi yang menarik pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi, dengan Kota Depok mencatatkan LPE -1,92%. Ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat (-2,44%) dan Nasional (-2,07%), yang menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap perekonomian Depok relatif lebih ringan.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh struktur ekonomi Depok yang didominasi sektor jasa dan perdagangan, yang mampu lebih cepat beradaptasi dibandingkan wilayah dengan dominasi industri manufaktur.

Tahun 2021 menjadi fase awal pemulihan, dan Depok kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan LPE 3,76%, sedikit di atas Jawa Barat (3,74%) dan nasional (3,69%). Capaian ini menandakan respons cepat dari sisi adaptasi kebijakan daerah dan daya dukung sektor informal yang cukup kuat. Pada tahun 2022, Depok tumbuh sebesar 5,24%, meskipun masih sedikit di bawah Jawa Barat (5,45%) dan nasional (5,31%), namun selisihnya relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Depok mulai menyatu dengan tren pemulihan regional dan nasional secara umum.

Tahun 2023 menjadi titik keseimbangan, di mana LPE Depok dan Nasional berada di angka yang sama yaitu 5,05%, sedangkan Jawa Barat sedikit lebih rendah di angka 5,00%. Ini mencerminkan bahwa kinerja ekonomi Depok berhasil menjaga momentum di tengah tantangan global seperti inflasi dan ketidakpastian rantai pasok. Lalu pada 2024, Depok mencatatkan LPE tertinggi dibanding dua entitas lainnya, yakni sebesar 5,47%. Jawa Barat dan nasional masing-masing mencatatkan pertumbuhan 4,9% dan 5,03%, yang memperlihatkan bahwa Depok berhasil keluar dari tren pelambatan dan justru mencatat akselerasi pertumbuhan yang positif.

Secara keseluruhan, tren grafik ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik saat krisis dan kemampuan pemulihan yang progresif serta konsisten. Pencapaian puncaknya pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa strategi pembangunan ekonomi lokal yang ditempuh telah mulai menunjukkan hasil nyata. Namun demikian, untuk mempertahankan keunggulan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang ekonomi, serta mendorong diversifikasi sektor unggulan agar tidak hanya bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Depok kini berada pada posisi strategis untuk mengonsolidasikan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan.

Tabel 2.11 Perbandingan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dengan Capaian Nasional Tahun 2020-2024

LPE	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kota Depok	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47
LPE Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03
Perubahan LPE Kota Depok	-8,66	5,68	1,48	-0,04	0,42
Perubahan LPE Nasional	-7,09	5,76	1,62	-0,05	-0,02

Sumber : BPS Kota Depok, 2023 (diolah)

Analisis data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dan LPE Nasional tahun 2020–2024 beserta tingkat perubahannya menunjukkan pola pemulihan ekonomi yang sejalan, namun dengan dinamika yang sedikit berbeda.

Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 menghantam seluruh sendi perekonomian, Kota Depok mencatat kontraksi sebesar -1,92%, sedikit lebih ringan dibanding nasional yang mencapai -2,07%. Tingkat penurunan LPE Kota Depok dari tahun sebelumnya mencapai -8,66 poin, lebih dalam dibandingkan penurunan nasional sebesar -7,09 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara angka akhir Depok terlihat lebih baik, pukulan terhadap laju pertumbuhan tahunannya justru lebih besar—kemungkinan disebabkan oleh basis pertumbuhan sebelumnya yang lebih tinggi atau ketergantungan pada sektor tertentu yang sangat terdampak.

Tahun 2021 menjadi momen awal pemulihan, dengan Depok tumbuh 5,68 poin menjadi 3,76%, sementara nasional tumbuh 5,76 poin menjadi 3,69%. Artinya, meskipun laju pemulihannya sedikit lebih rendah secara nominal dibanding nasional, LPE akhir Kota Depok berhasil melampaui nasional. Ini dapat mengindikasikan bahwa strategi pemulihan ekonomi di tingkat lokal berhasil menggerakkan sektor-sektor pendorong dengan cukup efektif.

Pada 2022, kedua wilayah kembali menunjukkan pertumbuhan positif dengan laju yang relatif tinggi: Depok tumbuh menjadi 5,24% (naik 1,48 poin), sementara nasional mencatat LPE 5,31% (naik 1,62 poin). Selisih kecil ini menunjukkan konvergensi performa antara ekonomi lokal dan nasional. Namun demikian, mulai tahun 2023, tren perlambatan mulai tampak. LPE Kota Depok stagnan di angka 5,05% (turun -0,04 poin), sama persis dengan nasional. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, baik Depok maupun ekonomi nasional sama-sama menghadapi tekanan yang membuat laju pertumbuhan tidak mengalami peningkatan berarti—kemungkinan akibat faktor global seperti inflasi, suku bunga tinggi, atau ketegangan geopolitik.

Pada tahun 2024, Kota Depok mencatat kenaikan LPE sebesar 0,42 poin menjadi 5,47%, sementara LPE nasional justru mengalami penurunan tipis -0,02 poin menjadi 5,03%. Ini menjadikan Depok sebagai wilayah dengan performa yang lebih progresif dibanding tren nasional. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam menjaga momentum pemulihan melalui kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan mungkin lebih efektif dalam mendorong sektor domestik, seperti perdagangan, jasa, UMKM, dan digitalisasi.

Kesimpulannya, meskipun Kota Depok sempat terdampak cukup dalam pada awal pandemi, arah pemulihannya menunjukkan ketangguhan yang konsisten dan bahkan mengungguli tren nasional dalam dua tahun terakhir (2023–2024). Untuk memperkuat tren positif ini, perlu terus dilakukan penguatan basis ekonomi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan fiskal dan non-fiskal yang ramah investasi dan inklusif terhadap pelaku ekonomi kecil-menengah.

.Struktur perekonomian

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas:

- 1) Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan.
- 2) Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik & Gas; Pengadaan Air; Konstruksi.
- 3) Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Distribusi PDRB ADHB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2020–2024 tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 2.23 Distribusi PDRB ADHB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Struktur PDRB Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan dominasi sektor sekunder dan tersier, masing-masing menyumbang sekitar 50% dan 48% dari total PDRB. Sektor sekunder cenderung menguat, terutama pasca pandemi, didorong oleh aktivitas industri dan konstruksi. Sementara itu, sektor tersier sedikit menurun namun tetap berperan besar dalam ekonomi kota. Sektor primer sangat kecil dan stagnan di kisaran 1,3%, mencerminkan minimnya kontribusi pertanian dan perikanan. Kondisi ini

mencerminkan ekonomi Depok yang urban dan berbasis jasa serta industri. Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, perlu penguatan sektor unggulan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Tabel 2.12 Distribusi PDRB ADHB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
A	Sektor Primer	1,35	1,31	1,31	1,31	1,35
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	1,31	1,31	1,31	1,35
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
B	Sektor Sekunder	49,91	50,41	50,19	50,16	50,24
3	Industri Pengolahan	28,89	29,18	28,90	28,86	29,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	20,64	20,84	20,92	20,93	20,72
C	Sektor Tersier	48,72	48,26	48,50	48,50	48,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,21	21,18	21,11	21,11	20,96
8	Transportasi dan Pergudangan	4,36	4,21	4,44	4,45	4,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	4,13	3,93	4,01	4,02	3,81
10	Informasi dan Komunikasi	2,35	2,37	2,32	2,32	2,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,25	4,31	4,31	4,23
12	Real Estat	1,69	1,76	1,82	1,82	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,2	0,20	0,21	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	2,55	2,38	2,20	2,19	2,20
15	Jasa Pendidikan	3,41	3,33	3,29	3,28	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,16	1,13	1,13	1,14
17	Jasa lainnya	3,69	3,54	3,67	3,67	3,56
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Depok Dalam Angka 2024

Distribusi PDRB ADHB Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan struktur ekonomi yang konsisten dan didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder, khususnya industri pengolahan dan konstruksi, berkontribusi terbesar dengan porsi stabil sekitar 50%, mencerminkan basis ekonomi yang kuat di industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur. Industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama, diikuti oleh konstruksi yang terus meningkat hingga 20,93% pada 2023 sebelum sedikit menurun di 2024.

Sektor tersier juga memiliki peran penting, menyumbang hampir separuh dari PDRB, didorong oleh perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Meskipun

kontribusi sektor jasa perdagangan sedikit menurun dari 21,21% (2020) menjadi 20,96% (2024), transportasi dan komunikasi justru mengalami peningkatan, yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan logistik dan digitalisasi ekonomi pasca pandemi. Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan jasa sosial relatif stabil, mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan yang terus berlangsung.

Sektor primer, yang hanya terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, stagnan di kisaran 1,31–1,35%, memperlihatkan ketergantungan ekonomi Depok yang sangat rendah pada sektor berbasis sumber daya alam. Tidak adanya kontribusi dari sektor pertambangan juga menguatkan bahwa Depok merupakan kota dengan struktur ekonomi urban dan minim eksplorasi SDA.

Secara keseluruhan, komposisi ini menandakan arah pembangunan ekonomi Depok yang cenderung padat karya dan padat modal di sektor industri serta jasa. Pemerintah Kota Depok perlu terus mendorong inovasi, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberlanjutan lingkungan, terutama mengingat rendahnya kontribusi sektor primer yang menyangkut ketahanan pangan lokal.

Tabel 2.13 Sektor Basis di Tiap Kecamatan Kota Depok s.d. Tahun 2022

Kecamatan	Sektor Unggulan Secara Kompetitif dan Komparatif
Beji	Pengadaan listrik dan gas; real estate
Bojongsari	Industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar & eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa pendidikan
Cilodong	-
Cimanggis	-
Cinere	Pengadaan air dan pengelolaan limbah; konstruksi, perdagangan besar & eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; dan jasa kesehatan
Cipayung	Industri pengolahan; pengolahan air; sektor pengadaan listrik; konstruksi; perdagangan; transportasi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; pendidikan dan jasa kesehatan
Limo	Pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan; transportasi; akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; perusahaan; pendidikan
Pancoran Mas	Pertanian kehutanan dan perikanan; perdagangan besar & eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan; jasa pendidikan
Sawangan	Pertanian kehutanan dan perikanan; pengelolaan air; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar & eceran; dan penyediaan akomodasi makan minum
Sukmajaya	Industri pengolahan; pengelolaan air; perdagangan besar & eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan; jasa perusahaan; dan jasa kesehatan
Tapos	-

Sumber : BPS Kota Depok, 2023 (diolah).

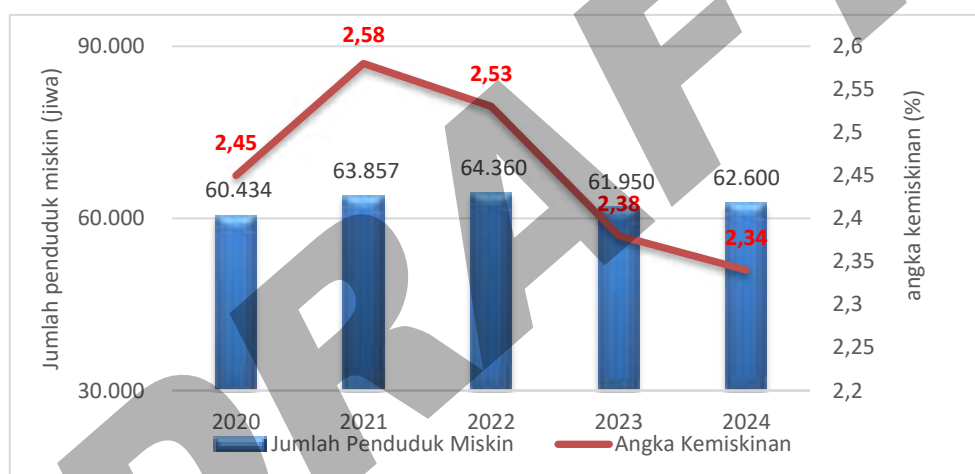
b. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin berarti penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan angka kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah.

Angka Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kota Depok tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.24 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di Kota Depok selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, tren angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,45% pada tahun 2020 menjadi 2,34% pada tahun 2024. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 2,58%, yang bertepatan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 63.857 jiwa.

Setelah itu, baik jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun. Pada tahun 2023, angka kemiskinan turun cukup signifikan menjadi 2,38% seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 61.950 jiwa. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 62.600 jiwa, angka kemiskinan tetap menurun menjadi 2,34%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Depok berjalan cukup efektif, terutama dalam menjaga proporsi penduduk miskin terhadap total populasi.

Adapun perbandingan persentase penduduk miskin dengan target daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024

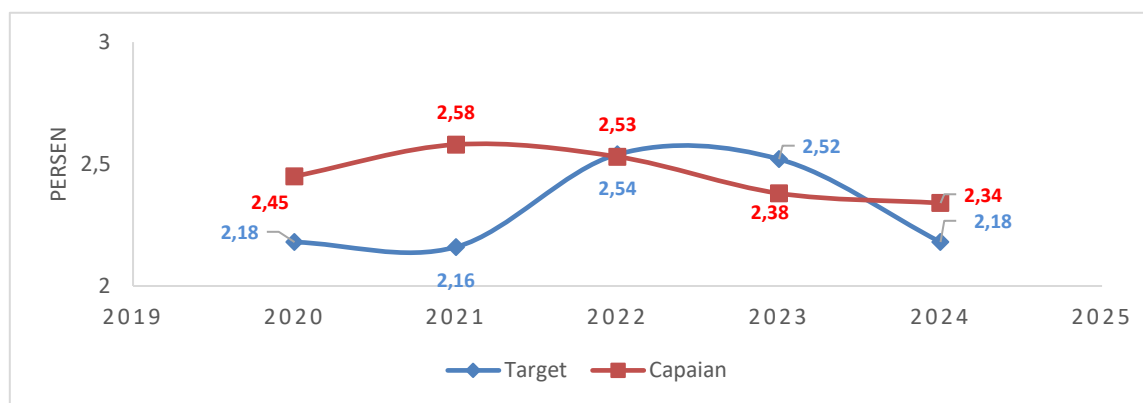
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2,18	2,16	2,54	2,52	2,18
Realisasi	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2022 (diolah)

Kota Depok menunjukkan perkembangan yang menarik dalam pencapaian target penurunan kemiskinan selama lima tahun terakhir. Periode 2020-2021 mencatat ketidakberhasilan mencapai target, dimana realisasi kemiskinan justru lebih tinggi dari yang ditetapkan (2020: target 2,18% vs realisasi 2,45%; 2021: target 2,16% vs 2,58%). Namun, tren positif mulai terlihat sejak 2022 dimana Depok berhasil memenuhi target (2,53% vs target 2,54%) dan konsisten hingga 2024 (2,34% vs target 2,18%). Capaian ini mengindikasikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang semakin tepat sasaran pasca pandemi.

Beberapa faktor kunci yang mendorong keberhasilan ini antara lain: (1) penyempurnaan sistem targeting bantuan sosial berbasis data terpadu, (2) peningkatan cakupan program padat karya tunai, dan (3) pemulihan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Depok. Namun, kesenjangan antara target dan realisasi di tahun 2024 (0,16%) menunjukkan perlunya intensifikasi program, terutama dalam mengantisipasi dampak inflasi dan penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pencapaian ini.

Gambar 2.25 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Target Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Adapun tingkat perubahan persentase penduduk miskin Kota Depok dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Tingkat Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2020-2024

Persentase Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	2,45%	2,58%	2,53%	2,38%	2,34%
Tingkat perubahan	18,36%	5,31%	-1,94%	-5,93%	-1,68%

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Tingkat perubahan persentase penduduk miskin di Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, tingkat perubahan sebesar 18,36% mengindikasikan lonjakan angka kemiskinan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan kehilangan mata pencaharian. Pada tahun 2021, meskipun angka kemiskinan meningkat menjadi 2,58%, tingkat perubahan turun menjadi 5,31%, menandakan perlambatan kenaikan akibat berbagai upaya pemulihan ekonomi, seperti bantuan sosial dan program stimulus.

Tahun 2022 menjadi titik awal perbaikan, dengan tingkat perubahan -1,94%, mencerminkan penurunan angka kemiskinan dari 2,58% menjadi 2,53%. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan awal dari intervensi kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan UMKM dan program pemberdayaan masyarakat. Tren ini berlanjut dengan penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2023, di mana tingkat perubahan mencapai -5,93%, menunjukkan dampak positif dari percepatan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2024, tingkat perubahan kembali mengalami perlambatan menjadi -1,68%, yang mengindikasikan bahwa penurunan kemiskinan semakin sulit dicapai seiring mendekati angka yang lebih rendah. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan struktural, seperti ketimpangan distribusi sumber daya dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif dan inklusif. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan keberhasilan bertahap, meskipun diperlukan upaya yang lebih besar untuk mempertahankan momentum pengurangan kemiskinan.

Sementara perbandingan perubahan persentase penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2023 Kota Depok menempati urutan 1 (pertama) dengan angka kemiskinan terendah dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Tabel 2.16 Perbandingan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah Setara Kota Depok Tahun 2020-2024

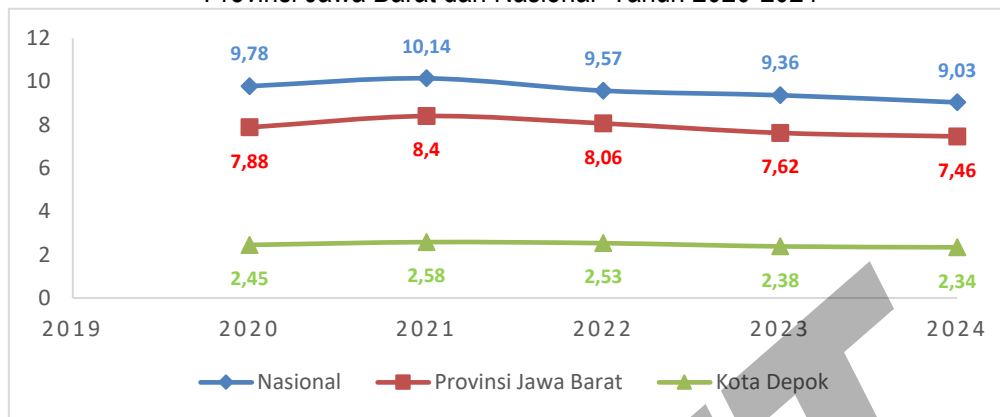
Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	7,88	8,40	8,06	7,62	7,46
Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14
Kabupaten Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	7,23
Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11
Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,1
Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,47
Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,8
Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,2
Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,1
Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85

Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat, 2025

Data kemiskinan Jawa Barat periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten di hampir seluruh wilayah, termasuk Kota Depok. Secara keseluruhan, persentase kemiskinan Jawa Barat turun dari 7,88% (2020) menjadi 7,46% (2024), mencerminkan dampak positif dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan intervensi kebijakan sosial. Namun, disparitas antardaerah masih signifikan, dengan Kota Depok mencatat persentase kemiskinan terendah (2,34% pada 2024), jauh di bawah rata-rata provinsi. Sebaliknya, wilayah seperti Kabupaten Indramayu (11,93%) dan Kota Tasikmalaya (11,10%) masih menghadapi beban kemiskinan yang tinggi, menunjukkan ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural.

Perbandingan capaian persentase penduduk miskin Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.26 Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

Tren kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pola yang menarik ketika membandingkan tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Depok. Data mengungkapkan bahwa ketiga entitas ini mengalami penurunan persentase kemiskinan yang konsisten, meskipun dengan kecepatan dan pola yang berbeda-beda. Kota Depok unggul sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah sekaligus penurunan paling stabil, dari 2,45% pada 2020 menjadi 2,34% di 2024. Pencapaian ini tidak lepas dari posisi strategis Depok sebagai kota penyangga Jakarta yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan logistik, serta implementasi program sosial yang tepat sasaran.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding rata-rata nasional, dengan penurunan dari 9,78% (2019) menjadi 7,46% (2024). Namun, pencapaian ini masih menyisakan tantangan besar mengingat disparitas yang tajam antara wilayah urban seperti Depok dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada grafik dimana tingkat kemiskinan nasional dan Jawa Barat mengalami lonjakan pada 2020-2021, sementara Depok mampu mempertahankan stabilitasnya. Hal ini mengindikasikan ketahanan ekonomi kota yang lebih baik terhadap guncangan eksternal.

Pasca pandemi, ketiga level pemerintahan menunjukkan kemampuan pemulihan yang baik, meskipun dengan dinamika berbeda. Depok terus mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan kemiskinan terendah, sementara Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Namun, kesenjangan yang masih lebar antara Depok (2,34%) dengan rata-rata Jawa Barat (7,46%) maupun nasional (9,03%) pada 2024 menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih terpadu dan inklusif. Ke depan, pembelajaran dari kesuksesan Depok dalam pengelolaan perkotaan dan program sosial dapat menjadi acuan bagi wilayah lain, sementara Depok

sendiri perlu waspada terhadap tantangan pertumbuhan seperti pencegahan urban sprawl dan penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk generasi muda.

Tingkat kemiskinan Kota Depok konsisten berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sampai dengan tahun 2023, Kota Depok merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah peringkat ke-1 di Jawa Barat dan peringkat ke-3 di tingkat Nasional, setelah Balikpapan-Kalimantan Timur (2,23%), dan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (2,33%).

Tabel 2.17 Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2024

	Perubahan Persentase Penduduk Miskin	Perubahan LPE	Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan LPE
Nasional	(0,33)	(0,02)	16,5
Depok	(0,04)	0,42	(0,095)

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Data rasio perubahan persentase penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2024 menunjukkan pola yang kontras antara pencapaian nasional dan Kota Depok. Pada tingkat nasional, penurunan kemiskinan sebesar 0,33% yang disertai penurunan LPE sebesar 0,02% menghasilkan rasio positif 16,5, mengindikasikan bahwa setiap penurunan kemiskinan nasional masih belum sepenuhnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini mencerminkan tantangan struktural dalam menciptakan pertumbuhan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaliknya, Kota Depok mencatat penurunan kemiskinan lebih kecil (0,04%) namun diiringi kenaikan LPE sebesar 0,42%, menghasilkan rasio negatif (-0,095). Rasio ini menunjukkan dua kemungkinan:

- Efisiensi Pembangunan: Penurunan kemiskinan yang stabil di Depok tidak membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkat program sosial yang tepat sasaran (seperti bansos berbasis data) dan struktur ekonomi yang sudah terdiversifikasi (dominan sektor jasa/logistik).
- Ketimpangan Tersembunyi: Pertumbuhan ekonomi Depok mungkin kurang dirasakan kelompok rentan, atau sudah mendekati batas minimal kemiskinan sehingga penurunannya melambat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tingkat perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Depok selama periode 2020–2024 mencerminkan fluktuasi yang signifikan, menunjukkan variasi dalam intensitas kemiskinan, yaitu seberapa jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020–2022, indeks mengalami kenaikan konsisten dengan tingkat perubahan sebesar 0,05 di tahun 2021 dan 0,08 di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin secara relatif stabil, mereka yang tergolong miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan daya beli akibat dampak pandemi COVID-19 serta ketidakstabilan ekonomi.

Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan pada indeks kedalaman kemiskinan dengan perubahan sebesar -0,18, mencerminkan perbaikan yang substansial. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat, peningkatan lapangan kerja, serta distribusi bantuan sosial yang lebih efektif, yang membantu masyarakat miskin mendekati garis kemiskinan. Meskipun demikian, pada tahun 2024, indeks kembali meningkat dengan perubahan -0,10, menunjukkan adanya tantangan baru, seperti tekanan inflasi atau ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi yang membuat beberapa kelompok rentan kembali ke situasi lebih sulit.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa selain upaya menurunkan angka kemiskinan, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada pengurangan kesenjangan ekonomi. Pendekatan seperti peningkatan keterampilan kerja, program pemberdayaan masyarakat yang inklusif, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik.

Tabel 2.18 Tingkat Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok Tahun 2020-2024

Indeks Kedalaman	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
Perubahan	0,05	0,05	0,08	(0,18)	(0,10)

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Pada skala provinsi Jawa Barat, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Depok Tahun 2019-2023 konsisten lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Depok relatif jauh lebih mampu mengendalikan peningkatan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Tabel 2.19 Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	1,13	1,47	1,32	1,17	1,21
Kota Depok	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
Kabupaten Bogor	0,83	1,36	1,49	0,97	1,08
Kabupaten Karawang	1,28	1,27	1,58	1,06	1,18
Kabupaten Bekasi	0,72	0,91	0,74	0,82	0,70
Kota Bogor	1,08	1,1	1,27	0,99	0,95
Kota Bekasi	0,6	0,66	0,96	0,63	0,80

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat selama kurun waktu 2020-2024 memperlihatkan pola perkembangan yang beragam antara Kota Depok dan wilayah sekitarnya. Kota Depok secara konsisten mencatatkan nilai indeks terendah dengan rentang 0,24-0,42, jauh di bawah rata-rata Jawa Barat yang berkisar antara 1,13-1,47. Pencapaian ini tidak terlepas dari efektivitas program penanganan kemiskinan berbasis data dan struktur ekonomi kota yang didominasi sektor jasa dan perdagangan yang relatif tahan terhadap guncangan ekonomi. Meski sempat mengalami peningkatan menjadi 0,42 pada 2022 akibat dampak pandemi, Depok berhasil menekan kembali indeksnya menjadi 0,34 pada 2024, menunjukkan kemampuan adaptasi dan pemulihan yang lebih baik dibanding wilayah lain seperti Kabupaten Bogor yang masih bertahan di angka 1,08 atau Kabupaten Karawang di 1,18 pada tahun yang sama.

Perbandingan dengan wilayah penyangga lain mengungkapkan beberapa temuan penting. Kabupaten/Kota dengan basis industri seperti Bekasi menunjukkan penurunan signifikan pasca 2022, didorong oleh revitalisasi sektor manufaktur, meski nilainya masih tetap lebih tinggi daripada Depok. Sementara itu, wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian seperti Bogor dan Karawang cenderung mengalami fluktuasi yang lebih besar, mencerminkan kerentanan terhadap faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas dan dampak iklim.

Keberhasilan Depok dalam mempertahankan indeks kedalaman kemiskinan yang rendah dapat diatribusikan kepada tiga faktor utama: pertama, implementasi program bantuan sosial yang terarah dan berbasis data; kedua, diversifikasi ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu; dan ketiga, kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat pihak terkait berpuas diri, karena tantangan ke depan tetap mengemuka. Kenaikan indeks di tingkat provinsi dari 1,17 (2023) ke 1,21 (2024) mengisyaratkan potensi tekanan kemiskinan yang bersifat sistemik, sementara pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dapat menciptakan kelompok rentan baru di pinggiran kota.

Untuk memastikan keberlanjutan pencapaian ini, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Model intervensi Depok yang terbukti efektif dapat diadaptasi untuk wilayah-wilayah dengan indeks tinggi, dengan penyesuaian sesuai karakteristik lokal. Di sisi lain, Depok sendiri perlu memperkuat program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan akses layanan dasar, sekaligus mewaspadai efek spillover dari ketimpangan di wilayah sekitarnya. Pada akhirnya, pengalaman Depok menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana tata kelola perkotaan yang inklusif dapat menciptakan ketahanan ekonomi, namun upaya terkoordinasi di tingkat regional tetap dibutuhkan untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan.

Secara umum, hal ini menunjukkan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20 Perbandingan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Perbandingan Perubahan Pencapaian		Indeks Kedalaman Kemiskinan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	Nasional	1,75	1,23	1,56	1,53	1,46
	Provinsi Jawa Barat	1,13	1,47	1,32	1,17	1,21
	Kota Depok	0,29	0,34	0,42	0,24	0,34
Perubahan	Nasional	0,15	(0,52)	0,33	(0,03)	(0,07)
	Provinsi Jawa Barat	0,04	0,34	(0,15)	(0,15)	0,04
	Kota Depok	0,05	0,05	0,08	(0,18)	(0,10)

Sumber: BPS, 2024

Data indeks kedalaman kemiskinan (P1) selama periode 2020-2024 mengungkapkan tiga pola perkembangan yang berbeda antara tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Depok. Pada tingkat nasional, terlihat penurunan yang cukup signifikan dari 1,75 (2020) menjadi 1,46 (2024), meskipun sempat mengalami fluktuasi di tahun 2022 dengan kenaikan 0,33 poin. Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa yang lebih baik dengan penurunan dari 1,13 (2020) ke 1,21 (2024), walaupun sempat melonjak di 2021 sebesar 0,34 poin. Yang paling mencolok adalah kinerja Kota Depok yang secara konsisten mempertahankan indeks terendah dengan rentang 0,24-0,42, jauh di bawah rata-rata nasional maupun provinsi.

Beberapa temuan krusial dapat diidentifikasi dari data ini. Pertama, dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada lonjakan indeks di tahun 2021-2022 di semua level, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Kedua, kemampuan pemulihan pasca pandemi juga bervariasi - Depok menunjukkan resilience terbaik dengan penurunan 0,18 poin di 2023, sementara pemulihan di tingkat nasional berjalan lebih lambat. Ketiga, disparitas yang signifikan antara Depok dengan wilayah lain mengindikasikan bahwa

model penanganan kemiskinan perkotaan yang diterapkan Depok mungkin lebih efektif dibanding pendekatan umum di tingkat nasional maupun provinsi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Depok antara lain: (1) sistem bantuan sosial yang terdigitalisasi dan tepat sasaran, (2) struktur ekonomi yang terdiversifikasi dengan dominasi sektor jasa dan perdagangan, serta (3) tata kelola pemerintahan yang efektif dalam merespons guncangan ekonomi. Sementara itu, tantangan yang masih dihadapi mencakup: (1) potensi peningkatan angka kemiskinan baru akibat urbanisasi, (2) tekanan inflasi pada kebutuhan pokok, dan (3) kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kota Depok terus meningkat pada tahun 2022 yaitu menjadi 64,36 ribu orang. Namun pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kota Depok menurun menjadi 61,95 ribu orang. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21 Perbandingan Realisasi dengan Target Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2020-2024

Jumlah Penduduk Miskin	2020	2021	2022	2023	2024
Target	54.158	55.350	65.993	63.180	47.167
Realisasi	60.434	63.857	64.360	61.950	62.602
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tidak tercapai
Tingkat Pertumbuhan	22,46%	5,66%	0,79%	-1,99%	1,05%

Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Data jumlah penduduk miskin Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan tantangan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan, target pengurangan jumlah penduduk miskin belum konsisten tercapai. Dari lima tahun yang dianalisis, hanya pada tahun 2022 dan 2023 realisasi jumlah penduduk miskin berhasil di bawah target. Pada tahun-tahun lainnya—terutama tahun 2020, 2021, dan 2024—target tidak tercapai, dengan selisih yang cukup besar, misalnya pada 2024 terdapat selisih sekitar 15.435 orang di atas target.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin memperlihatkan pola fluktuatif. Tahun 2020 mencatat lonjakan signifikan sebesar 22,46%, yang kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat, terutama sektor informal. Kenaikan berlanjut pada 2021 dan 2022 meskipun dengan laju yang lebih moderat. Penurunan baru mulai terlihat pada 2023 (-1,99%) seiring dengan pemulihan ekonomi, namun kembali meningkat pada 2024 (1,05%), menandakan bahwa kemiskinan di Depok masih cukup rentan terhadap dinamika ekonomi dan sosial.

Kinerja ini mengindikasikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya dalam memastikan bahwa intervensi sosial tepat sasaran, adaptif terhadap kondisi ekonomi makro, dan inklusif terhadap kelompok rentan. Ke depan, pengendalian inflasi, peningkatan akses pekerjaan layak, serta perlindungan sosial berbasis data yang akurat akan menjadi kunci dalam menurunkan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan dan mencapai target-target pembangunan sosial yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kota Depok dengan rata-rata wilayah setara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok dengan Rata-rata Wilayah Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	0,15	0,07	(4,04)	(4,48)	(2,10)
Kota Depok	0,22	0,06	(1,93)	(3,74)	(1,68)
Kabupaten Bogor	0,18	0,05	(4,92)	(4,42)	(3,03)
Kabupaten Bekasi	0,25	0,09	(3,84)	1,47	(2,64)
Kota Bogor	0,17	0,07	(1,93)	(5,31)	(2,10)
Kota Bekasi	0,18	0,08	(6,54)	(5,82)	(2,20)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (Diolah)

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Depok dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang menarik ketika dibandingkan dengan wilayah setara di Jawa Barat. Pada fase awal pandemi (2020-2021), Depok mengalami pertumbuhan penduduk miskin yang lebih tinggi (0,22% dan 0,06%) dibanding rata-rata Jawa Barat (0,15% dan 0,07%), mengindikasikan kerentanan khusus sebagai kawasan urban terhadap guncangan ekonomi. Namun, pada periode pemulihan (2022-2024), Depok menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dengan penurunan bertahap (-1,93% pada 2022 hingga -1,68% di 2024), meskipun masih lebih lambat dibanding pencapaian spektakuler Kota Bogor (-5,31% di 2023) dan Kota Bekasi (-5,82% di 2023).

Beberapa faktor kunci menjelaskan dinamika ini. Pertama, struktur ekonomi Depok yang berbasis jasa dan perdagangan memang lebih tahan banting, tetapi kurang responsif terhadap program penanggulangan kemiskinan skala besar dibanding wilayah dengan basis industri seperti Bekasi. Kedua, sebagai kota penyangga Jakarta, Depok menghadapi tekanan urbanisasi yang terus menerus, di mana arus migrasi pekerja berpenghasilan rendah cenderung mempertahankan angka kemiskinan tetap stabil. Ketiga, program bantuan sosial yang sudah relatif maju di Depok menghadapi tantangan efektivitas di tengah kompleksitas masalah perkotaan.

Tahun 2024 menjadi titik perhatian khusus, di mana semua wilayah termasuk Depok mengalami perlambatan penurunan kemiskinan. Fenomena ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal

seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak sistemik. Untuk Depok secara khusus, perlambatan ini mengisyaratkan bahwa pendekatan konvensional mungkin sudah mencapai titik jenuh, dan diperlukan terobosan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.

Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2019-2023 ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23 Perbandingan Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Perbandingan Perubahan		Jumlah Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
Capaian (ribu)	Nasional	26.424,02	26.500,00	26.161,16	25.898,55	25.219,20
	Provinsi Jawa Barat	3.920,23	4.195,66	4.070,98	3.888,60	3.848,67
	Kota Depok	60,43	63,86	64,36	61,95	62,60
Perubahan (%)	Nasional	0,051	0,003	(0,013)	(1,00)	(2,62)
	Provinsi Jawa Barat	0,153	0,070	(0,030)	(4,48)	(1,03)
	Kota Depok	0,225	0,057	0,008	(3,74)	1,05

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Data jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Depok. Pada tingkat nasional, terlihat tren penurunan yang konsisten dari 26.424 ribu (2020) menjadi 25.219 ribu (2024), meskipun sempat mengalami kenaikan kecil di tahun 2021 sebesar 0,003%. Provinsi Jawa Barat mengikuti pola serupa dengan penurunan dari 3.920 ribu (2020) ke 3.849 ribu (2024), namun dengan fluktuasi yang lebih tajam, termasuk penurunan signifikan sebesar 4,48% di tahun 2023. Kota Depok menunjukkan pola yang unik dengan jumlah penduduk miskin yang relatif stabil di kisaran 60-64 ribu orang, namun mencatat kenaikan 1,05% di tahun 2024 setelah sebelumnya turun 3,74% di tahun 2023.

Beberapa temuan penting dapat diidentifikasi dari analisis data ini. Pertama, dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2021 di semua level pemerintahan. Kedua, kemampuan pemulihan pasca pandemi bervariasi - tingkat nasional dan Jawa Barat menunjukkan penurunan yang stabil, sementara Depok justru mengalami kenaikan di tahun 2024. Ketiga, meskipun jumlah absolut penduduk miskin Depok kecil dibandingkan skala nasional atau provinsi, fluktuasi terakhir mengindikasikan kerentanan tersendiri di tingkat lokal.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik.

Secara umum, nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Namun untuk kasus beberapa kabupaten/kota yang banyak kaum komuternya, PDRB per kapita tidak dapat menjelaskan ukuran kemakmuran di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar warganya membangkitkan ekonomi bukan di wilayah dimana mereka tinggal. Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) dengan target daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24 Perbandingan Realisasi dan Target PDRB per kapita (ADHK) Kota Depok Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	21.269	22.128	24.098	24.788,74	
Realisasi	20.390	24.000	24.870	25.740	26.919
Capaian	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, realisasi PDRB per kapita ADHK tercapai sesuai target pada tahun 2021-2023, sedangkan yang tidak tercapai yaitu tahun 2020. Peningkatan PDRB perkapita tahun 2021-2023 seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya nilai tambah output lapangan usaha utama, yakni lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar & eceran; reparasi mobil & sepeda motor, dan konstruksi.

Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	170.089	175.004	183.598	192.133	201.315
Jawa Barat	30.181	30.908	32.182	33.482	34.801
Kota Depok	23.496	23.945	24.759	25.740	26.919
Kabupaten Bogor	28.476	29.070	30.230	31.399	32.713
Kabupaten Bekasi	78.341	79.744	83.010	86.249	89.700
Kota Bogor	30.893	31.712	33.234	34.608	36.134
Kota Bekasi	26.629	27.212	28.198	29.401	30.730

Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Kota Depok dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp 23,496 juta pada 2020 menjadi Rp26.919 ribu pada 2024. Meskipun pertumbuhannya konsisten, angka ini masih berada di bawah rata-rata capaian wilayah yang setara. Dibandingkan dengan Kota Bekasi (Rp 30,730 juta) dan Kota Bogor (Rp 36,134 juta), serta Kabupaten Bogor (Rp32,713 juta), posisi Kota Depok relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi secara umum terjadi, produktivitas ekonomi per kapita di Depok belum sekompetitif kota-kota lain di sekitar Jabodetabek.

Lebih lanjut, perbandingan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp 34,801 juta) dan terlebih lagi DKI Jakarta (Rp 201,315 juta) memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar, yang dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, dominasi sektor jasa yang bernilai tambah rendah di Depok, serta kapasitas SDM dan investasi yang masih terbatas. Namun demikian, konsistensi kenaikan tiap tahun menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki fondasi pertumbuhan yang cukup kuat, meskipun perlu akselerasi melalui penguatan sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan bernilai tinggi, dan digitalisasi UMKM.

Tabel 2.26 Perbandingan Realisasi dan Target PDRB Per Kapita (ADHB) Kota Depok Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	33.463,33	35.768,80	24.098.61	24.788,74	41.170
Realisasi	34.356,00	35.655,00	38.225.81	40.816,92	43.514,52
Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27 Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	262.615	274 .659	299.674	322.615	344.350
Jawa Barat	43.237	45.194	49.038	52.651	56.080
Kota Depok	23.496	23.945	24.759	40.817	43.515
Kabupaten Bogor	28.476	29.070	30.17	51.378	54.857
Kabupaten Bekasi	78.341	79.744	82.47	121.647	128.693
Kota Bogor	30.893	31.712	31.65	53.239	56.616
Kota Bekasi	26.629	27.212	28.28	45.281	48.922

Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan PDRB per kapita ADHB Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang signifikan, terutama antara tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2020 hingga 2022, pertumbuhan PDRB per kapita Kota Depok tergolong lambat dan stagnan, hanya meningkat dari Rp 23,496 juta menjadi Rp 24,759 juta. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan drastis mencapai Rp 40,817 juta (naik lebih dari 60%), dan kembali naik menjadi Rp 43,515 juta pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan adanya pemulihan dan percepatan ekonomi yang sangat kuat, kemungkinan besar akibat normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi serta pertumbuhan signifikan di sektor-sektor industri dan jasa.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara seperti Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, Depok sempat tertinggal pada periode 2020–2022, namun mulai mengejar ketertinggalan pada tahun 2023. Kota Depok hampir menyamai capaian Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor dalam hal PDRB per kapita, meskipun masih berada di bawah Kota Bogor (Rp 56,616 juta) dan Kabupaten Bekasi (Rp128,693 juta) yang merupakan pusat industri besar di kawasan Jabodetabek.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp 56, 080 juta di 2024) dan DKI Jakarta (Rp344,350 juta), posisi Depok masih cukup jauh tertinggal, menandakan adanya kesenjangan produktivitas dan kontribusi ekonomi per individu yang perlu terus dikejar. Namun demikian, lonjakan pertumbuhan yang tajam di tahun 2023 menjadi sinyal positif bahwa struktur ekonomi Kota Depok mulai bertransformasi ke arah yang lebih produktif dan inklusif.

Ke depan, tantangannya adalah menjaga momentum pertumbuhan ini secara berkelanjutan dengan memperkuat investasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi per kapita secara konsisten.

Tabel 2.28 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kota Depok Tahun 2020–2024

U R A I A N	2020	2021	2022*	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	70.386,33	74.382.336	81.166.747	87.568.624	94.149.544
PDRB Atas dasar harga Konstan Tahun 2010 (Rp)	48.135,93	49.947.235	52.564.976	55.221.821	58.241.856
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
PDRB per Kapita ADHB	34.35	35.74	38.40	40.82	43.51
PDRB per Kapita ADHK	23.49	24.00	24.87	25.74	26.92
Jumlah Penduduk (orang)	2.048.632	2.081.129	2.113.618	2.145.400	2.163.635

Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita Kota Depok tahun 2020–2024, terlihat tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif. Nilai PDRB atas dasar harga

berlaku (ADHB) meningkat dari Rp70,39 triliun pada 2020 menjadi Rp94,15 triliun pada 2024. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yang mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi, juga menunjukkan peningkatan dari Rp48,13 triliun pada 2020 menjadi Rp58,24 triliun pada 2024. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang cukup konsisten di Kota Depok.

Dari sisi kesejahteraan ekonomi individu, PDRB per kapita ADHB meningkat dari Rp28,34 juta pada 2020 menjadi Rp43,51 juta pada 2024. Kenaikan yang signifikan terutama terjadi pada tahun 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan perhitungan jumlah penduduk atau pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk PDRB per kapita ADHK, nilainya tumbuh dari Rp19,38 juta pada 2020 menjadi Rp26,92 juta pada 2024, mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi penduduk dalam ukuran riil.

Menariknya, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk antara 2020 dan 2021, yakni dari sekitar 2,4 juta menjadi 2,08 juta jiwa, hal ini berdampak pada meningkatnya nilai PDRB per kapita secara cukup tajam. Namun dalam tahun-tahun selanjutnya, jumlah penduduk kembali meningkat secara bertahap, sejalan dengan pertumbuhan PDRB, menjaga tren kenaikan pendapatan per kapita tetap stabil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Depok terus tumbuh baik secara agregat maupun per individu. Tantangan ke depan adalah menjaga pertumbuhan ini tetap inklusif, berkualitas, dan didorong oleh sektor-sektor produktif agar peningkatan PDRB benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pertumbuhan dan distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kota Depok pada tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB ADHB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi Tahun 2024 (%)	Pertumbuhan Tahun 2024(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,05
2	Industri Pengolahan	29,16	1,04
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	-3,57
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,00
5	Konstruksi	20,72	-1,00
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,96	-0,71
7	Transportasi dan Pergudangan	4,8	7,87
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,81	-5,22
9	Informasi dan Komunikasi	2,41	3,88
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,23	-1,86
11	Real Estat	1,81	-0,55
12	Jasa Perusahaan	0,21	0,00

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi Tahun 2024 (%)	Pertumbuhan Tahun 2024(%)
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,2	0,46
14	Jasa Pendidikan	3,28	0,00
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	0,88
16	Jasa lainnya	3,56	-3,00
Kota Depok		100	

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Kota Depok menunjukkan struktur ekonomi yang didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan (29,16%), perdagangan besar dan eceran (20,96%), serta konstruksi (20,72%). Namun, ironisnya, ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB ini justru menunjukkan kinerja yang kurang menggemblirakan dengan pertumbuhan yang stagnan bahkan negatif di tahun 2024. Sektor industri pengolahan hanya tumbuh 1,04%, sementara perdagangan dan konstruksi masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,71% dan 1,00%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sektor-sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Di sisi lain, beberapa sektor dengan kontribusi lebih kecil justru menunjukkan performa yang lebih baik, terutama transportasi dan pergudangan yang tumbuh pesat sebesar 7,87%, serta informasi dan komunikasi yang tumbuh 3,88%. Pertumbuhan kedua sektor ini mencerminkan potensi ekonomi digital dan logistik modern yang mulai berkembang di Depok.

Pola pertumbuhan ekonomi Depok tahun 2024 ini mengungkapkan beberapa tantangan penting. Pertama, ketergantungan yang tinggi pada sektor industri dan perdagangan tradisional yang pertumbuhannya mulai melambat. Kedua, adanya peluang pengembangan sektor-sektor baru berbasis teknologi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, beberapa sektor jasa seperti penyediaan akomodasi dan makan minum masih mengalami dampak pandemi dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,22%. Kondisi ini memerlukan penyesuaian strategi pembangunan ekonomi kota, terutama dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi pasca pandemi dan era digitalisasi. Kota Depok perlu melakukan transformasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor potensial yang berbasis teknologi, sekaligus melakukan revitalisasi terhadap sektor-sektor tradisional yang selama ini menjadi andalan.

Tabel 2.30 Dinamika Distribusi PDRB ADHB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.35	1,31	1.31	1,31	1,35

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Industri Pengolahan	28.89	29.18	28.90	28,86	29,16
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0.28	0,29	0.28	0,28	0,27
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0,09	0,09
5	Konstruksi	20.64	20.84	20.92	20,93	20,72
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.21	21.18	21.11	21,11	20,96
7	Transportasi dan Pergudangan	4.36	4.21	4.44	4,45	4,8
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.13	3.93	4.01	4,02	3,81
9	Informasi dan Komunikasi	2.35	2.37	2.32	2,32	2,41
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.08	4.25	4.31	4,31	4,23
11	Real Estat	1.69	1.76	1.82	1,82	1,81
12	Jasa Perusahaan	0.19	0.2	0.20	0,21	0,21
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.55	2.38	2.20	2,19	2,2
14	Jasa Pendidikan	3.41	3.33	3.29	3,28	3,28
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.11	1.16	1.13	1,13	1,14
16	Jasa lainnya	3.69	3.54	3.67	3,67	3,56

Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Distribusi PDRB ADHB Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan struktur ekonomi yang relatif stabil dengan dominasi pada sektor sekunder dan tersier. Industri Pengolahan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, meningkat dari 28,89% pada 2020 menjadi 29,16% pada 2024. Hal ini menunjukkan peran strategis sektor industri dalam mendukung perekonomian kota, meskipun peningkatannya cenderung stagnan. Sektor konstruksi juga menempati porsi besar (sekitar 20,7%–20,9%), mencerminkan pesatnya pembangunan infrastruktur dan properti di wilayah ini. Namun, kecenderungan menurun di 2024 dapat menjadi sinyal perlambatan atau selesainya beberapa proyek besar.

Di sektor tersier, perdagangan besar dan eceran tetap menjadi kontributor signifikan dengan kisaran 20,96% pada 2024, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa mencerminkan pergeseran pola konsumsi atau kompetisi dari sektor digital dan e-commerce. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat tren positif, naik dari 4,36% (2020) ke 4,80% (2024), yang mungkin berkaitan dengan meningkatnya mobilitas barang dan jasa pascapandemi serta pertumbuhan logistik. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum justru menurun

pada 2024 menjadi 3,81%, mengindikasikan belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi atau pergeseran preferensi konsumsi masyarakat.

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh secara perlahan ke 2,41% pada 2024, mencerminkan peran penting teknologi dan digitalisasi yang terus meningkat. Sebaliknya, kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi relatif stagnan, menandakan perlunya dorongan inovasi dalam sektor ini. Sektor pertanian tetap marginal, meski sedikit naik ke 1,35% pada 2024, sesuai dengan karakteristik Kota Depok sebagai kota urban. Sektor jasa lainnya dan jasa pendidikan memiliki kontribusi stabil, mengindikasikan peran penting layanan sosial dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kota Depok menunjukkan ketergantungan pada industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Ke depan, perlu ada strategi diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor jasa modern dan berbasis pengetahuan, serta meningkatkan kontribusi sektor-sektor yang masih kecil namun potensial seperti jasa perusahaan, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan PDRB Kota Depok dapat dilihat berdasarkan sisi pengeluaran seperti yang terdapat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.31 Pertumbuhan PDRB Kota Depok Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2023-2024

Komponen Pengeluaran	Kontribusi terhadap PDRB Tahun 2022 (%)	Kontribusi terhadap PDRB Tahun 2023 (%)	Tingkat Pertumbuhan Tahun 2023 (%)	Kontribusi terhadap PDRB Tahun 2024 (%)	Tingkat Pertumbuhan Tahun 2024 (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	125,36	126,85	1,19	126,87	0,02
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,09	1,13	3,67	1,15	1,77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,55	3,95	11,27	3,31	-16,20
Pembentukan Modal Tetap Domentik Bruto	53,67	53,61	-0,11	53,11	-0,93
Perubahan Inventori	0,08	0,04	-50,00	0,04	0,00
Net Ekspor	-83,27	-85,22	2,34	-84,47	-0,88

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Struktur pengeluaran PDRB Kota Depok selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan dominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang mencapai kontribusi sangat tinggi yaitu di atas 125% terhadap PDRB. Meskipun tingkat pertumbuhannya relatif kecil (1,19% pada 2023 dan hanya 0,02% pada 2024), hal ini menandakan tingginya ketergantungan perekonomian kota terhadap konsumsi masyarakat, serta terbatasnya diversifikasi sumber pertumbuhan. Pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit Rumah Tangga) tumbuh cukup baik, yakni 3,67%

pada 2023 dan 1,77% pada 2024, walaupun kontribusinya masih di bawah 2%, menunjukkan bahwa peran sektor sosial dan keagamaan sedikit meningkat namun belum signifikan secara makro.

Sebaliknya, pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tinggi pada 2023 sebesar 11,27%, namun mengalami kontraksi tajam pada 2024 sebesar -16,20%. Hal ini mengindikasikan adanya penyesuaian anggaran atau efisiensi belanja pemerintah daerah yang dapat berdampak pada stabilitas permintaan agregat. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), sebagai indikator investasi, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi kontribusi maupun pertumbuhan, yakni masing-masing -0,11% pada 2023 dan -0,93% pada 2024, yang mencerminkan penurunan kegiatan investasi sektor swasta maupun pemerintah — suatu sinyal yang perlu diwaspadai terhadap prospek pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, perubahan inventori tetap tidak signifikan, bahkan mengalami kontraksi 50% pada 2023 dan stagnan di 2024. Terakhir, net ekspor barang dan jasa terus memberikan kontribusi negatif terhadap PDRB, meskipun sempat mengalami sedikit kontraksi lebih dalam pada 2023 (-85,22) dan membaik sedikit di 2024 (-84,47). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih tinggi, atau daya saing produk/jasa lokal belum cukup kuat untuk menekan impor dan mendorong ekspor antardaerah. Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kota Depok masih sangat konsumtif dan belum ditopang secara seimbang oleh investasi dan sektor perdagangan luar, yang menjadi tantangan strategis untuk transformasi ekonomi ke depan.

Tabel 2.32 Dinamika Kontribusi Komponen Pengeluaran PDRB Kota Depok Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran	Kontribusi Komponen Pengeluaran Berdasarkan Harga Berlaku (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	126,39	125,39	125,36	126,85	126,87
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,11	1,09	1,13	1,15
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,87	3,81	3,55	3,95	3,31
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	52,04	54,4	53,67	53,61	53,11
Perubahan Inventori	1,63	-0,38	0,08	0,04	0,04
Net Ekspor	-85,05	-84,33	-83,27	-85,22	-84,47
Produk Domestik Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan data kontribusi komponen pengeluaran terhadap PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku tahun 2020–2024, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga secara konsisten menjadi kontributor utama, bahkan melebihi 100% setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 125%–127%. Hal ini menandakan bahwa kekuatan ekonomi Depok sangat bergantung pada aktivitas konsumsi masyarakat, yang memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pola ini juga menunjukkan ketergantungan tinggi yang bisa menjadi kerentanan jika daya beli masyarakat menurun.

Pengeluaran konsumsi LNPRT tetap relatif stabil dengan kontribusi yang kecil (sekitar 1,1%), menunjukkan bahwa sektor sosial seperti yayasan atau lembaga non-profit belum berperan besar dalam struktur ekonomi, meskipun menunjukkan tren sedikit meningkat pada 2024. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan kontribusi dari 3,87% di 2020 menjadi 3,31% di 2024. Meskipun sempat naik pada 2023, tren keseluruhan menunjukkan berkurangnya peran belanja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) cukup stabil dan tinggi di atas 50%, menandakan bahwa investasi tetap masih menjadi pilar penting dalam pembentukan PDRB. Namun, trennya cenderung stagnan bahkan sedikit menurun pada 2024, yang bisa mencerminkan penurunan aktivitas investasi baru atau ekspansi usaha. Perubahan inventori sangat fluktuatif, sempat negatif di 2021 (-0,38%) dan hanya menyumbang 0,04% pada 2023 dan 2024, yang menunjukkan minimnya akumulasi stok barang, bisa jadi karena ketidakpastian pasar atau efisiensi distribusi.

Yang paling mencolok adalah kontribusi negatif dari net ekspor barang dan jasa, yang secara konsisten mengurangi nilai PDRB dengan kisaran -83% hingga -85%. Ini mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap produk dan jasa dari luar wilayah, dan menunjukkan bahwa aktivitas ekspor antardaerah atau antarkota belum mampu mengimbangi volume impor. Oleh karena itu, struktur pengeluaran PDRB Kota Depok menggambarkan ekonomi yang sangat konsumtif, dengan kontribusi investasi tetap yang cukup, namun masih lemah dalam perdagangan luar daerah — kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing produk lokal

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kota Depok sangat fluktuatif, artinya jumlah pengangguran berada dalam posisi jumlah yang pada tahun-tahun tertentu mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan di tahun berikutnya.

Gambar 2.27 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok Tahun 2020-2024



Grafik menunjukkan tren penurunan signifikan baik dalam jumlah pengangguran maupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, saat dampak pandemi COVID-19 masih sangat terasa, jumlah pengangguran mencapai 118 ribu jiwa dengan TPT sebesar 9,87%. Meski sempat sedikit menurun di 2021 (117,8 ribu jiwa dan TPT 9,76%), penurunan yang lebih tajam mulai terjadi sejak 2022 seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada 2022, jumlah pengangguran turun menjadi 98,43 ribu jiwa dengan TPT sebesar 7,82%, dan terus membaik hingga 2023 dengan angka pengangguran 72,04 ribu jiwa dan TPT 6,97%. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, di mana jumlah pengangguran turun lagi ke 65,74 ribu jiwa, dan TPT mencapai 6,27%, level terendah dalam lima tahun terakhir.

Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja mulai menunjukkan hasil yang nyata. Namun, meskipun tren menurun, TPT 6,27% masih terbilang moderat dan menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan masih perlu diatasi. Pemerintah Kota Depok dapat memperkuat upaya dengan mendorong sektor padat karya, memperluas program wirausaha, serta meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan dan industri agar keterampilan pencari kerja lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perbedaan tren antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, TPT laki-laki mencapai 10,28%, lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada di angka 9,17%. Perbedaan ini masih terlihat pada tahun 2021, di mana TPT laki-laki sedikit menurun menjadi 10,22%, sementara perempuan juga turun tipis menjadi 9,01%.

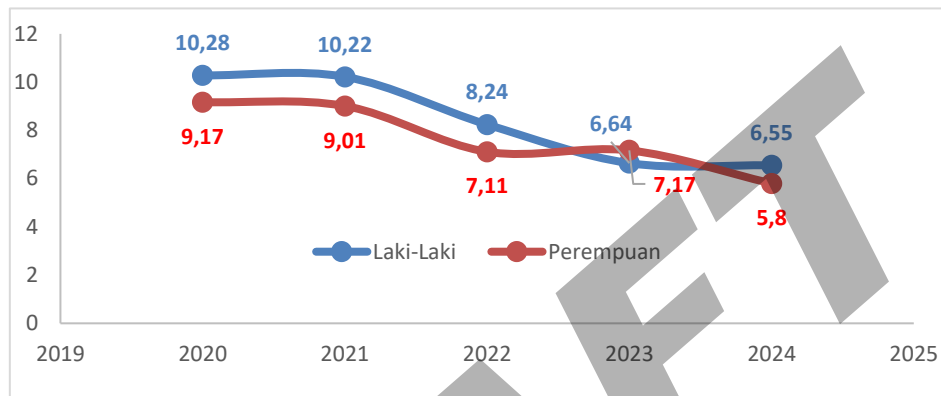
Penurunan yang lebih signifikan mulai terjadi pada tahun 2022, dengan TPT laki-laki berkurang menjadi 8,24% (penurunan sekitar 19,4% dibandingkan 2020) dan perempuan turun menjadi 7,11% (penurunan sekitar 22,5% dibandingkan 2020). Pada tahun 2023, terjadi perubahan pola, di mana TPT perempuan sedikit meningkat menjadi 7,17%, sementara laki-laki terus menurun ke 6,64%. Pada 2024, perbedaan semakin mencolok, dengan TPT laki-laki turun lagi ke 6,55%, sedangkan TPT perempuan menunjukkan penurunan signifikan menjadi 5,8%, menjadikannya angka terendah selama lima tahun terakhir.

Tren ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kerja untuk kedua kelompok, tetapi perempuan tampaknya berhasil mengakses pekerjaan dengan lebih baik dalam jangka waktu ini, terutama pada tahun-tahun terakhir. Hal ini mungkin didorong oleh peningkatan kesetaraan gender dalam akses kerja, keberhasilan program pemberdayaan perempuan, atau perubahan struktur pekerjaan yang mendukung

sektor yang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja perempuan. Namun, peningkatan TPT perempuan pada 2023 dapat menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan yang lebih spesifik untuk menjaga stabilitas tersebut. Secara keseluruhan, penurunan TPT untuk kedua jenis kelamin mencerminkan upaya efektif pemerintah Kota Depok dalam mengurangi pengangguran.

Lebih jelasnya mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin di Kota Depok tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.28 TPT Kota Depok Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024



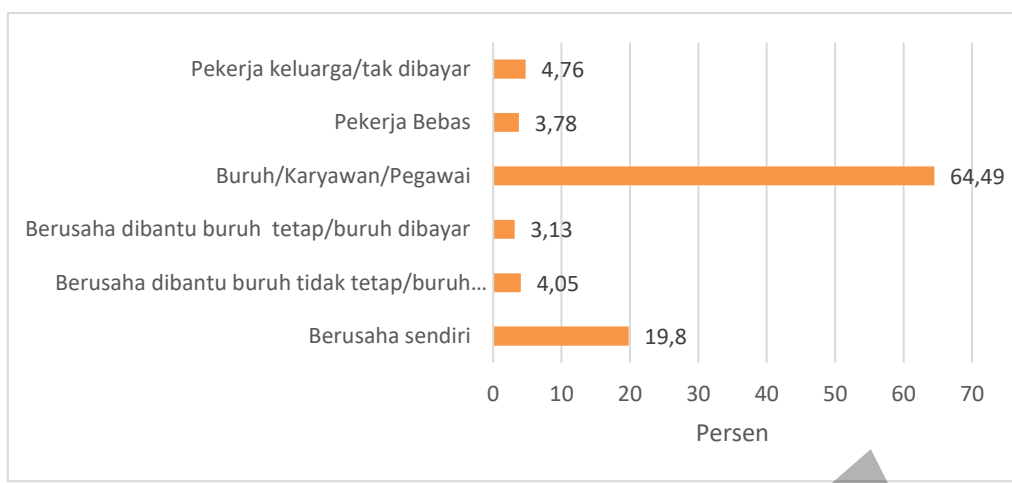
Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Grafik dibawah ini menunjukkan distribusi status pekerjaan penduduk Kota Depok dengan dominasi yang sangat tinggi pada kategori Buruh/Karyawan/Pegawai, yang mencapai 64,49%. Hal ini mencerminkan struktur ekonomi Depok yang didominasi oleh sektor formal, terutama jasa dan perdagangan, yang menyerap sebagian besar tenaga kerja dalam bentuk hubungan kerja formal.

Kategori Bekerja sendiri menempati urutan kedua sebesar 19,8%, menunjukkan keberadaan sektor informal dan semangat kewirausahaan masyarakat yang cukup kuat, meski belum mendominasi. Sementara itu, proporsi pekerja keluarga/tak dibayar (4,76%), pekerja bebas (3,78%), serta mereka yang berusaha dibantu buruh baik tetap maupun tidak tetap (3,13% dan 4,05%) masih tergolong kecil. Hal ini menandakan bahwa meskipun sektor informal dan usaha kecil tetap ada, namun belum menjadi tumpuan utama mata pencaharian.

Struktur ini memberikan peluang dan tantangan. Di satu sisi, dominasi pekerjaan formal menunjukkan kestabilan dan perlindungan kerja yang lebih baik. Namun di sisi lain, rendahnya proporsi wirausaha dan usaha produktif non-formal bisa menjadi sinyal perlunya dorongan kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM, inovasi usaha, serta perluasan kesempatan kerja mandiri agar ekonomi menjadi lebih inklusif dan tangguh terhadap guncangan. Pemerintah dapat mempertimbangkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta inkubasi bisnis bagi pelaku usaha kecil dan pekerja informal.

Gambar 2.29 Status Pekerjaan Utama



Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Adapun perbandingan realisasi dan target TPT Kota Depok tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Perbandingan Realisasi dan Target TPT Kota Depok Tahun 2020-2024

TPT (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Target	9.34	6,2 - 6,8	9,47	7,66	6,47
Realisasi	9.87	9.76	7,82	6,97	6,27
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian realisasi TPT tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tahun 2020 misalnya, realisasi TPT sebesar 9,87% jauh di atas target 9,34%, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar kerja. Tahun 2021 pun mengalami hal serupa, di mana target TPT sebesar 6,2–6,8% tidak tercapai karena realisasi justru naik menjadi 9,76%, kemungkinan masih merupakan efek lanjutan pandemi dan pemulihan ekonomi yang belum stabil.

Namun mulai tahun 2022, terdapat perbaikan signifikan. Realisasi TPT sebesar 7,82% berhasil lebih baik dibandingkan target 9,47%, sehingga tahun ini dinyatakan tercapai. Perbaikan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, realisasi 6,97% sedikit lebih rendah dari target 7,66%, dan pada 2024, TPT berhasil ditekan hingga 6,27%, lebih baik dari target 6,47%.

Kecenderungan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam mengelola pemulihan ekonomi pasca pandemi, termasuk perluasan lapangan kerja serta peningkatan kualitas angkatan kerja. Ke depan, tantangan akan lebih difokuskan pada menjaga tren penurunan ini tetap

berlanjut, termasuk mengurangi pengangguran terselubung dan meningkatkan produktivitas pekerja, terutama di sektor informal dan UMKM.

Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Tingkat Perubahan TPT Kota Depok Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
Tingkat Perubahan	61,54%	-1,11%	-19,88%	-10,87%	-10,04%

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Data Tingkat Perubahan TPT Kota Depok tahun 2020–2024 mencerminkan dinamika pasar kerja yang signifikan, terutama akibat dampak dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan tajam sebesar 61,54% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), menunjukkan dampak langsung pandemi terhadap kehilangan pekerjaan dan pembatasan aktivitas ekonomi.

Namun, mulai 2021, terlihat adanya perbaikan meskipun belum signifikan, dengan penurunan TPT sebesar -1,11%, yang menunjukkan bahwa upaya pemulihan mulai berjalan namun masih terbatas. Perubahan besar terjadi pada 2022, di mana TPT menurun drastis sebesar -19,88%, menandai momentum pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, seiring membaiknya kondisi aktivitas ekonomi.

Tren positif ini terus berlanjut pada 2023 dan 2024, masing-masing mencatat penurunan sebesar -10,87% dan -10,04%. Penurunan yang konsisten ini menjadi bukti bahwa program pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM di Kota Depok mulai menunjukkan hasil nyata. Meski demikian, tantangan ke depan mencakup bagaimana mempertahankan tren ini secara berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, khususnya di sektor informal dan generasi muda yang baru masuk pasar kerja.

Pada skala wilayah setara di Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok pada tahun 2024 merupakan yang terendah dibanding lima kabupaten/kota setara lainnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pelatihan tenaga kerja, program Wira Usaha Baru (WUB) dan lain-lain. Perbandingan TPT Kota Depok dengan wilayah yang setara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35 Perbandingan TPT Kota Depok dan Wilayah Setara Tahun 2019-2023 (persen)

Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18	6,53	6,21
Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
Kabupaten Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34

Wilayah Jawa Barat	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18	6,53	6,21
Kabupaten Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
Kabupaten Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82

Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Data perbandingan TPT Kota Depok dengan wilayah setara di Jawa Barat dan DKI Jakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan posisi Kota Depok yang relatif kompetitif dan progresif dalam mengatasi pengangguran. Pada tahun 2020, TPT Kota Depok berada di angka 9,87%, lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (10,95%) dan rata-rata wilayah Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor (14,29%) dan Kota Bogor (12,68%), menunjukkan resiliensi awal Kota Depok saat pandemi melanda.

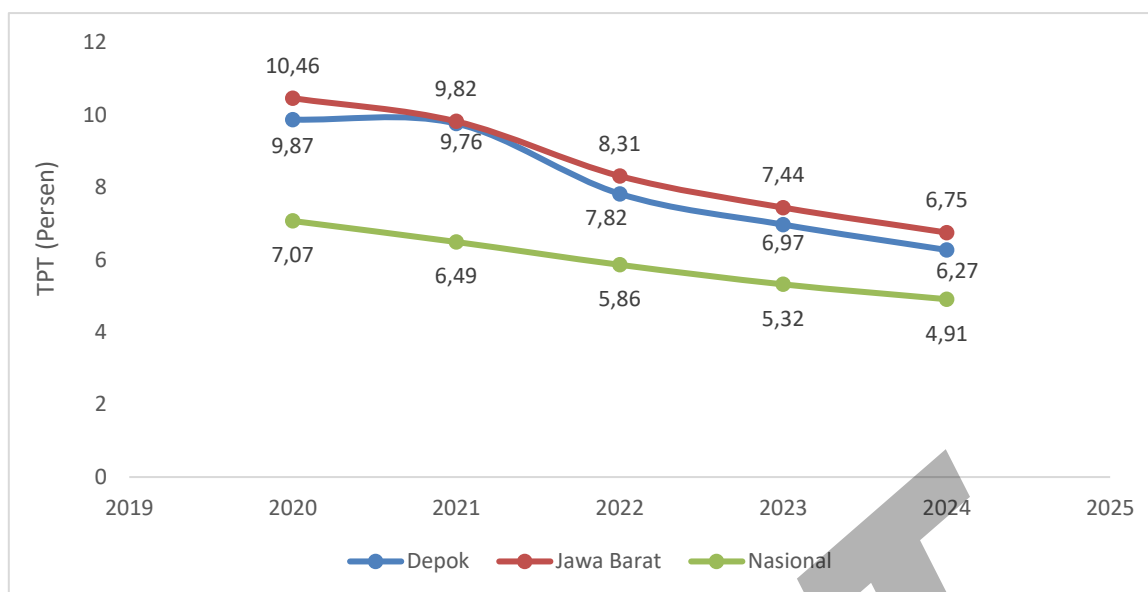
Meski tahun 2021 menunjukkan penurunan kecil di sebagian besar wilayah, sebagian besar daerah masih berada pada angka TPT di atas 10%, sementara Depok mampu menjaga di level 9,76%, hanya terpaut tipis dari rata-rata Jawa Barat (9,82%) dan DKI Jakarta (8,50%). Mulai tahun 2022, penurunan TPT semakin signifikan. Kota Depok berhasil menurunkan angka TPT ke 7,82%, dan pada 2023 turun menjadi 6,97%, melampaui capaian Kota Bekasi (7,90%) dan bahkan Provinsi Jawa Barat (7,44%).

Pada tahun 2024, Kota Depok berhasil mencapai TPT 6,27%, lebih rendah dibandingkan seluruh wilayah pembanding. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi penurunan pengangguran di Kota Depok yang lebih konsisten dibandingkan dengan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, Kota Depok menunjukkan tren penurunan TPT yang lebih cepat dan stabil, mencerminkan keberhasilan dalam penciptaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta sinergi kebijakan ketenagakerjaan yang mulai membuahkan hasil nyata. Kota ini patut dijadikan contoh dalam pengelolaan pasar kerja daerah secara adaptif dan berorientasi pada hasil.

Perbandingan TPT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.30 Perbandingan TPT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat, 2025

Grafik perbandingan TPT Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten di semua wilayah, namun Kota Depok menunjukkan performa penurunan yang sangat signifikan dan lebih baik dibandingkan Jawa Barat.

Pada tahun 2020, TPT Kota Depok (9,87%) berada di bawah rata-rata Jawa Barat (10,46%), meski masih di atas angka nasional (7,07%). Pada tahun-tahun berikutnya, Depok berhasil menurunkan TPT lebih tajam, mencapai 6,27% di tahun 2024, mendekati angka nasional (4,91%) dan lebih baik daripada rata-rata Jawa Barat (6,75%).

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penurunan pengangguran di Depok lebih efektif, dengan laju perbaikan yang lebih cepat dari Jawa Barat maupun tren nasional. Peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif kemungkinan besar menjadi faktor pendukung pencapaian ini.

Dengan demikian, Kota Depok dapat dipandang sebagai daerah yang sukses mengelola pasar tenaga kerja pasca-pandemi dan menjadi model percontohan dalam penanggulangan pengangguran di wilayah urban.

Tabel 2.36 Perbandingan Perubahan TPT Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,84	(0,58)	(0,63)	(0,54)	(0,41)
Provinsi Jawa Barat	2,42	(0,64)	(1,51)	(0,87)	(0,70)
Kota Depok	3,76	(0,11)	(1,94)	(0,85)	(0,76)

Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Tabel diatas menunjukkan Data perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok,

Provinsi Jawa Barat, dan Nasional pada periode 2020–2024 menunjukkan pola perbaikan yang relatif stabil, dengan Kota Depok mencatat penurunan TPT yang paling tajam secara kumulatif, khususnya pasca-pandemi.

Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami lonjakan TPT akibat dampak pandemi COVID-19, dengan peningkatan tertinggi terjadi di Kota Depok sebesar +3,76%, disusul Jawa Barat (+2,42%) dan Nasional (+1,84%). Namun, yang menarik adalah kemampuan Kota Depok untuk melakukan pemulihan yang jauh lebih cepat dan konsisten dibandingkan wilayah lainnya.

Mulai tahun 2021 hingga 2024, Kota Depok mencatat tren penurunan yang signifikan:

- 2021: meskipun hanya turun sedikit (–0,11%),
- 2022: penurunan drastis sebesar –1,94%,
- 2023: turun lagi sebesar –0,85%,
- 2024: melanjutkan tren dengan –0,76%.

Secara kumulatif 2021–2024, TPT Kota Depok turun sebanyak –3,66%, lebih besar dari Provinsi Jawa Barat (–3,72%) dan Nasional (–2,16%). Namun, bila memperhitungkan basis lonjakan pada 2020, Depok melakukan pemulihan tercepat terhadap dampak pandemi. Hal ini menandakan bahwa kebijakan dan program ketenagakerjaan di Kota Depok telah berjalan cukup efektif, seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Depok berhasil mengubah tantangan pandemi menjadi peluang pemulihan ekonomi yang progresif.

Tabel 2.37 Tingkat Perubahan TPT Kota Depok Tahun 2020-2024

TPT	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
Perubahan	3,76	(0,11)	(1,94)	(0,85)	(0,70)
Laju Perubahan	61,5%	-1,1%	-19,88	-10,87	-10,04

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Data Tingkat Perubahan dan Laju Perubahan TPT Kota Depok Tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika pemulihan pasar kerja yang menarik dan progresif pasca-pandemi. Pada tahun 2020, TPT melonjak tajam ke 9,87%, mencerminkan dampak berat pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama sektor informal dan UMKM. Dibandingkan tahun sebelumnya (2019), terjadi kenaikan TPT sebesar 3,76 poin persentase, atau laju kenaikan sebesar 61,5% — tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Namun, sejak 2021, tren TPT mulai menunjukkan perbaikan bertahap. Meski penurunan pada 2021 sangat kecil (–0,11 poin atau –1,1%), pemulihan mulai terasa signifikan pada 2022, dengan penurunan TPT sebesar 1,94 poin (–19,88%). Tren positif ini berlanjut pada 2023 dan 2024, masing-

masing dengan laju penurunan -10,87% dan -10,04%, mengindikasikan adanya peningkatan daya serap tenaga kerja dan membaiknya kondisi ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, Kota Depok telah berhasil menurunkan TPT sebesar 3,6 poin persentase selama 2020–2024, dari 9,87% menjadi 6,27%. Ini menandakan bahwa berbagai program pemerintah daerah dalam menumbuhkan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta mendorong wirausaha dan investasi lokal mulai membuahkan hasil. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum penurunan ini agar menuju TPT ideal di bawah 5%, sembari memastikan kualitas pekerjaan yang tersedia juga meningkat.

Adapun perbandingan perubahan TPT Kota Depok dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Perbandingan Perubahan TPT Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)										
	Realisasi						Perubahan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75	2,42	(0,64)	(1,51)	(0,87)	(0,69)
Kota Depok	6,11	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27	3,76	(0,11)	(1,94)	(0,85)	(0,70)
Kabupaten Bogor	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34	5,18	(2,07)	(1,58)	(2,17)	(1,13)
Kabupaten Karawang	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04	1,84	0,31	(1,96)	(0,92)	(0,91)
Kabupaten Bekasi	9,00	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82	2,54	(1,45)	0,22	(1,44)	(0,05)
Kota Bogor	9,16	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13	3,52	(0,89)	(1,01)	(1,39)	(1,26)
Kota Bekasi	8,30	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82	2,38	0,20	(2,07)	(0,91)	(0,08)

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok menunjukkan dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, Depok mengalami lonjakan pengangguran tertinggi dibandingkan wilayah setara di Jawa Barat, dengan kenaikan sebesar 3,76% (dari 6,11% menjadi 9,87%), melebihi rata-rata provinsi yang hanya naik 2,42%. Hal ini mengindikasikan kerentanan pasar kerja Depok terhadap guncangan ekonomi, kemungkinan akibat ketergantungan pada sektor informal atau UMKM yang paling terdampak pandemi. Namun, pemulihan yang terjadi pada 2021–2024 terlihat cukup signifikan, di mana TPT Depok turun secara konsisten hingga mencapai 6,27% pada 2024—lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat (6,75%) dan beberapa wilayah tetangga seperti Kabupaten Bogor (7,34%) dan Kota Bekasi (7,82%). Penurunan terbesar terjadi pada 2022 (-1,94%), lebih cepat dibandingkan tren provinsi (-1,51%), yang menunjukkan efektivitas program penyerapan tenaga kerja atau pemulihan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pendidikan.

Meski begitu, tantangan ke depan masih ada. Meski TPT Depok sudah lebih rendah dibanding wilayah sekitarnya, angka 6,27% masih termasuk kategori menengah, sehingga perlu upaya lebih agresif

untuk menekannya di bawah 6%. Pemerintah kota perlu memperkuat program pelatihan vokasi, mendorong investasi padat karya, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Selain itu, disparitas dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Bogor (7,34%) juga perlu diwaspadai, karena dapat mencerminkan ketimpangan akses lapangan kerja di kawasan metropolitan. Dengan kebijakan yang tepat, Depok berpotensi mempertahankan tren positif ini sekaligus mengurangi kesenjangan dengan daerah sekitarnya.

Tabel 2.39 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Jumlah Penganggur	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Pertumbuhan	Capaian	Pertumbuhan	Capaian	Pertumbuhan	Capaian	Pertumbuhan	Capaian	Pertumbuhan
Nasional	9.767.754	37,49%	9.102.052	-6,82%	8.420.000	-7,49%	7.380.000	-12,35%	7.465.599	1,16
Prov. Jawa Barat	2.530.000	31,09%	2.430.000	-3,95%	2.130.000	-12,35%	1.888.287	-11,35%	1.768.226	-6,36
Kota Depok	118.032	63,20%	117.816	-0,18%	98.430	-16,45%	72.043	-26,81%	65.742	-8,75

Sumber: BPS Kota Depok, 2024

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan jumlah penganggur di Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang signifikan pascapandemi. Tahun 2020 mencatat lonjakan jumlah penganggur sebesar 63,20% menjadi 118.032 orang, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (37,49%) maupun Provinsi Jawa Barat (31,09%). Namun, mulai 2021, tren penurunan konsisten terjadi, dengan penurunan tajam pada 2023 sebesar -26,81%, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi yang cukup berhasil. Tahun 2024, jumlah penganggur terus menurun menjadi 65.742 orang, meskipun laju penurunannya mulai melambat (-8,75%). Dibandingkan nasional dan provinsi, Depok menunjukkan proses pemulihan yang lebih cepat dan agresif, mencerminkan perbaikan sektor tenaga kerja dan peningkatan akses kesempatan kerja. Keberlanjutan tren ini perlu dijaga melalui kebijakan proaktif di bidang investasi lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif.

Tabel 2.40 Perubahan Jumlah Penganggur Kota Depok Tahun 2020-2024

Jumlah Penganggur	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	118.032	117.816	98.430	72.043	65.742
Perubahan	45.707	(216)	(19,386)	(26.387)	(6.301)

Sumber: BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, Data jumlah penganggur di Kota Depok tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan pola fluktuatif namun menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2021. Pada tahun 2020, jumlah penganggur melonjak drastis menjadi 118.032 orang—terjadi peningkatan sebesar

45.707 orang dibandingkan tahun sebelumnya akibat dampak pandemi. Namun, pada tahun 2021, angka ini sedikit turun tipis sebesar 216 orang menjadi 117.816, menandakan awal pemulihan. Penurunan signifikan mulai terjadi pada 2022 dengan pengurangan 19.386 orang, dilanjutkan oleh penurunan tajam sebesar 26.387 orang di tahun 2023. Pada tahun 2024, tren penurunan masih berlanjut dengan selisih 6.301 orang, menurunkan jumlah penganggur menjadi 65.742. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Depok berhasil menurunkan angka pengangguran secara bertahap dan konsisten setelah puncak krisis tahun 2020, menandakan pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas pasar kerja yang positif.

Tabel 2.41 Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2024

	Perubahan TPT	Perubahan LPE	Rasio Perubahan TPT dan LPE
Nasional	(0,41)	(0,02)	20,5
Kota Depok	(0,76)	0,42	(1,81)

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Data tahun 2024 menunjukkan perbedaan mencolok dalam hubungan antara penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi antara tingkat nasional dan Kota Depok. Secara nasional, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,41% terjadi bersamaan dengan kontraksi ekonomi sebesar 0,02%, menghasilkan rasio positif yang tinggi sebesar 20,5. Pola ini mengindikasikan bahwa penurunan pengangguran nasional lebih banyak didorong oleh faktor non-pertumbuhan, seperti program padat karya pemerintah atau peningkatan sektor informal, ketimbang oleh ekspansi ekonomi riil. Di sisi lain, Kota Depok mencatat kinerja yang lebih impresif dengan penurunan TPT lebih tajam (0,76%) yang disertai pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,42%, menciptakan rasio negatif sebesar -1,81.

Pola unik yang ditunjukkan Depok mengungkap beberapa hal penting. Pertama, Kota Depok berhasil menciptakan model pertumbuhan ekonomi yang secara efektif mentransformasikan ekspansi ekonomi menjadi penyerapan tenaga kerja. Kedua, struktur ekonomi Depok yang didominasi sektor jasa modern dan industri kreatif tampaknya lebih responsif dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan ekonomi nasional yang lebih heterogen. Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan Depok yang berfokus pada pelatihan vokasi dan linkage dengan industri terbukti efektif meningkatkan employability penduduknya. Namun, pencapaian ini tidak lepas dari tantangan. Depok perlu mewaspadaai risiko overheating di pasar tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di level nasional, temuan ini menyoroti perlunya reorientasi kebijakan ketenagakerjaan yang

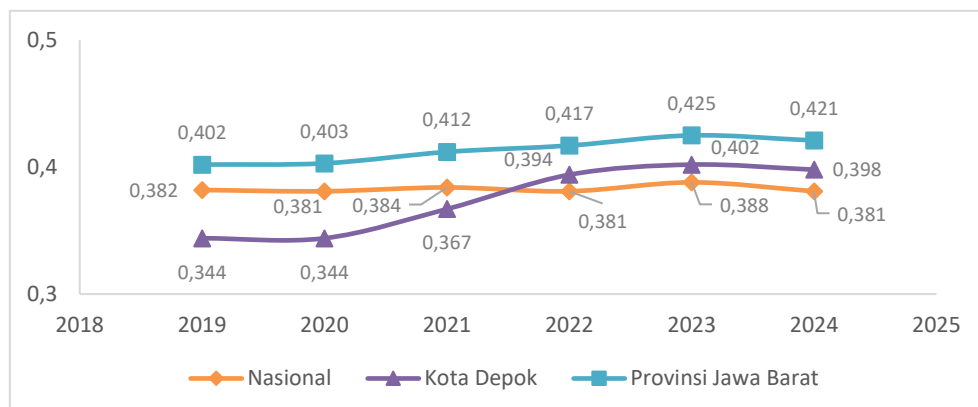
lebih terintegrasi dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran dari keberhasilan Depok dalam menciptakan pertumbuhan yang padat karya (labor-intensive growth) patut menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat hubungan antara sektor pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan industri. Ke depan, baik Depok maupun tingkat nasional perlu fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk memastikan bahwa penciptaan lapangan kerja diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

e. Indeks Gini

Indeks Gini adalah angka yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Koefisien Gini bernilai “nol” (0) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi di wilayah tersebut. Jika dilihat dari sisi indeks rasio gini di Kota Depok, pada umumnya tingkat ketimpangan di Kota Depok dari tahun 2010-2022 berada pada tingkat ketimpangan rendah-sedang. Hal ini dapat dilihat dari Sebagian besar nilai Rasio gini yang kurang dari 0.4. Kondisi ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kota Depok semakin merata karena nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu.

Data rasio Gini Kota Depok selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020, Depok mencatat rasio Gini sebesar 0,344, lebih rendah dibandingkan angka nasional (0,381) dan Jawa Barat (0,403). Namun, dalam kurun waktu empat tahun berikutnya, ketimpangan di Depok meningkat secara konsisten, mencapai puncaknya di tahun 2023 sebesar 0,402, sebelum sedikit menurun menjadi 0,398 di tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Depok tergolong stabil, manfaatnya belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.31 Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan ini antara lain: pertumbuhan sektor properti dan jasa yang cenderung menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi, arus urbanisasi yang meningkatkan populasi pekerja berupah rendah, serta kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meskipun terjadi penurunan kecil di tahun 2024, rasio Gini Depok masih lebih tinggi dibandingkan level tahun 2020, menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan belum sepenuhnya efektif.

Secara komparatif, ketimpangan di Depok tetap lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, yang rasio Gininya terus meningkat dari 0,403 (2020) menjadi 0,421 (2024). Namun, jarak antara Depok dan rata-rata nasional semakin mengecil, terutama setelah tahun 2022. Hal ini mengisyaratkan bahwa Depok mulai menghadapi tantangan serupa dengan wilayah lain, seperti inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah.

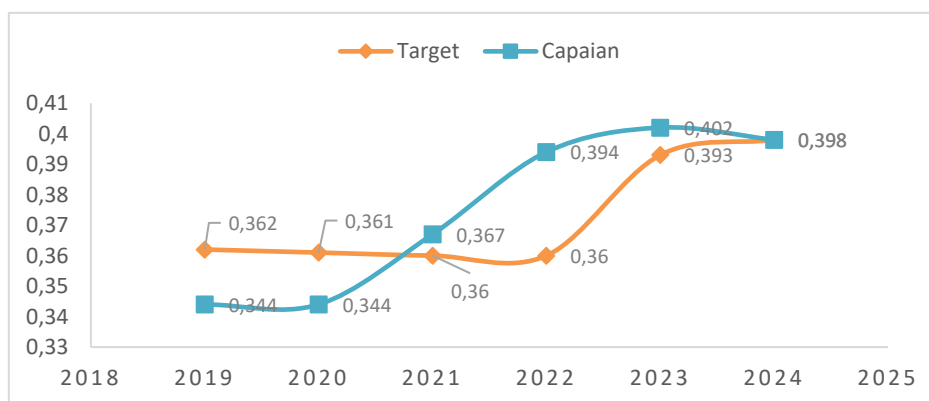
Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini meliputi:

- Memperkuat program bantuan sosial berbasis data untuk menjangkau kelompok paling rentan.
- Mendorong investasi di sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dengan upah kompetitif.
- Meningkatkan akses pendidikan vokasi dan pelatihan digital untuk memperluas kesempatan kerja berkualitas.

Proyeksi ke depan, jika tren ini tidak diintervensi, ketimpangan di Depok berpotensi menyamai level nasional dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu mengintegrasikan kebijakan pengurangan ketimpangan ke dalam strategi pembangunan jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan inklusif dan pemerataan akses ekonomi.

Adapun perbandingan rasio gini dengan target daerah Kota Depok dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.32 Perbandingan Rasio Gini dengan Target Daerah



Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, Kota Depok berhasil mencapai keselarasan antara target dan realisasi rasio

Gini, dengan kedua indikator menunjukkan angka 0,398. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan ketimpangan pendapatan, sekaligus menandai titik penting dalam upaya penurunan ketimpangan yang konsisten sejak 2020. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dari rasio Gini 2020 sebesar 0,344, meskipun sedikit lebih tinggi dari target awal tahun tersebut (0,361). Tren kenaikan rasio Gini dari 2020 hingga 2023 (dari 0,344 menjadi 0,402) menunjukkan adanya tekanan ketimpangan yang mungkin dipicu oleh faktor makro seperti pandemi atau pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Namun, kemampuan Depok menstabilkan angka pada 2024 dan menurunkannya dari puncak 2023 (0,402) mengindikasikan efektivitas intervensi kebijakan, seperti program bantuan sosial, peningkatan lapangan kerja, atau pemerataan akses pendidikan.

Pencapaian target 2024 juga perlu dilihat dalam konteks target yang lebih realistis dibandingkan tahun 2023 (target 0,393 vs realisasi 0,402), yang menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program. Namun, angka 0,398 tetap berada pada kategori ketimpangan "sedang" (menurut BPS), sehingga diperlukan upaya lebih agresif untuk mendorongnya ke bawah 0,4 ke depan. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan spesifik seperti pajak progresif, program UMKM, atau penyerapan tenaga kerja, agar keberlanjutan penurunan ketimpangan dapat dipertahankan.

Perbandingan Perubahan Rasio Gini Kota Depok dengan Wilayah yang Setara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.42 Perbandingan Pertumbuhan Rasio Gini Kota Depok dengan Wilayah yang Setara Tahun 2020– 2024

Wilayah	Capaian						Pertumbuhan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Depok	0,344	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398	0,00	6,69	7,36	2,03	-1,00
Kabupaten Bogor	0,404	0,381	0,396	0,4	0,369	0,398	-5,69	3,94	1,01	-7,75	7,86
Kabupaten Sukabumi	0,347	0,334	0,343	0,309	0,355	0,342	-3,75	2,69	-9,91	14,89	-3,66
Kabupaten Cianjur	0,363	0,350	0,372	0,313	0,319	0,338	-3,58	6,29	-15,86	1,92	5,96
Kabupaten Bandung	0,355	0,414	0,386	0,37	0,348	0,364	16,62	-6,76	-4,15	-5,95	4,60
Kabupaten Garut	0,352	0,352	0,322	0,302	0,361	0,324	0,00	-8,52	-6,21	19,54	-10,25
Kabupaten Tasikmalaya	0,322	0,343	0,378	0,378	0,404	0,363	6,52	10,20	0,00	6,88	-10,15
Kabupaten	0,354	0,336	0,342	0,337	0,341	0,326	-5,08	1,79	-1,46	1,19	-4,40

Wilayah Jawa Barat	Capaian						Pertumbuhan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Ciamis											
Kabupaten Kuningan	0,435	0,361	0,349	0,345	0,351	0,369	-17,01	-3,32	-1,15	1,74	5,13
Kabupaten Cirebon	0,344	0,338	0,339	0,355	0,361	0,374	-1,74	0,30	4,72	1,69	3,60
Kabupaten Majalengka	0,347	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354	-3,17	5,36	3,67	-6,81	3,51
Kabupaten Sumedang	0,344	0,384	0,359	0,394	0,366	0,337	11,63	-6,51	9,75	-7,11	-7,92
Kabupaten Indramayu	0,284	0,319	0,321	0,3	0,344	0,306	12,32	0,63	-6,54	14,67	-11,05
Kabupaten Subang	0,333	0,350	0,329	0,36	0,331	0,32	5,11	-6,00	9,42	-8,06	-3,32
Kabupaten Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372	0,398	3,76	-6,28	-5,41	1,36	6,99
Kabupaten Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353	0,389	0,376	-8,40	14,37	-5,61	10,20	-3,34
Kabupaten Bekasi	0,354	0,372	0,340	0,373	0,397	0,367	5,08	-8,60	9,71	6,43	-7,56
Kabupaten Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368	0,374	0,4	3,87	-5,32	3,37	1,63	6,95
Kabupaten Pangandaran	0,310	0,335	0,320	0,294	0,323	0,286	8,06	-4,48	-8,13	9,86	-11,46
Kota Bogor	0,386	0,412	0,441	0,43	0,464	0,477	6,74	7,04	-2,49	7,91	2,80
Kota Sukabumi	0,419	0,397	0,436	0,482	0,458	0,436	-5,25	9,82	10,55	-4,98	-4,80
Kota Bandung	0,442	0,402	0,427	0,459	0,459	0,44	-9,05	6,22	7,49	0,00	-4,14
Kota Cirebon	0,408	0,421	0,489	0,468	0,468	0,424	3,19	16,15	-4,29	0,00	-9,40
Kota Bekasi	0,352	0,352	0,401	0,441	0,414	0,435	0,00	13,92	9,98	-6,12	5,07
Kota Cimahi	0,437	0,380	0,415	0,408	0,394	0,402	-13,04	9,21	-1,69	-3,43	2,03
Kota Tasikmalaya	0,360	0,366	0,414	0,405	0,428	0,359	1,67	13,11	-2,17	5,68	-16,12
Kota Banjar	0,302	0,312	0,341	0,362	0,337	0,318	3,31	9,29	6,16	-6,91	-5,64

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan wilayah setara di Jawa Barat, Depok menempati posisi menengah-atas dalam hal ketimpangan. Beberapa kota seperti Kota Sukabumi (0,436), Kota Bogor (0,477), dan Kota Cirebon (0,424) menunjukkan Rasio Gini yang lebih tinggi pada 2024, menandakan ketimpangan yang lebih besar. Namun, banyak wilayah kabupaten seperti Kabupaten Cianjur (0,338) atau Kabupaten Ciamis (0,326) memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibanding Depok.

Meskipun pertumbuhan Rasio Gini Depok tergolong tinggi pada 2021–2022, beberapa daerah mencatat lonjakan yang lebih tajam, seperti Kota Cirebon (16,15% pada 2021) dan Kabupaten Karawang (14,37% pada 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketimpangan di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan, akibat kesenjangan ekonomi yang mencolok antara kelas menengah atas dan bawah.

Secara umum, Kota Depok menghadapi tantangan serius dalam menekan ketimpangan pendapatan, terutama dalam dua tahun pascapandemi. Upaya pengurangan ketimpangan perlu diarahkan pada peningkatan pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, agar pertumbuhan ekonomi yang ada dapat dinikmati lebih inklusif.

Adapun Perbandingan Tingkat Perubahan Rasio Gini Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 bisa dilihat pada table berikut.

Tabel 2.43 Perbandingan Tingkat Perubahan Rasio Gini Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

	Rasio gini	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	Nasional	0,381	0,384	0,381	0,388	0,381
	Provinsi Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
	Kota Depok	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398
Tingkat Perubahan	Nasional	(0,001)	0,003	(0,003)	1,84	(1,80)
	Provinsi Jawa Barat	0,001	0,009	0,005	1,92	(0,94)
	Kota Depok	0,000	0,023	0,027	2,03	(1,00)

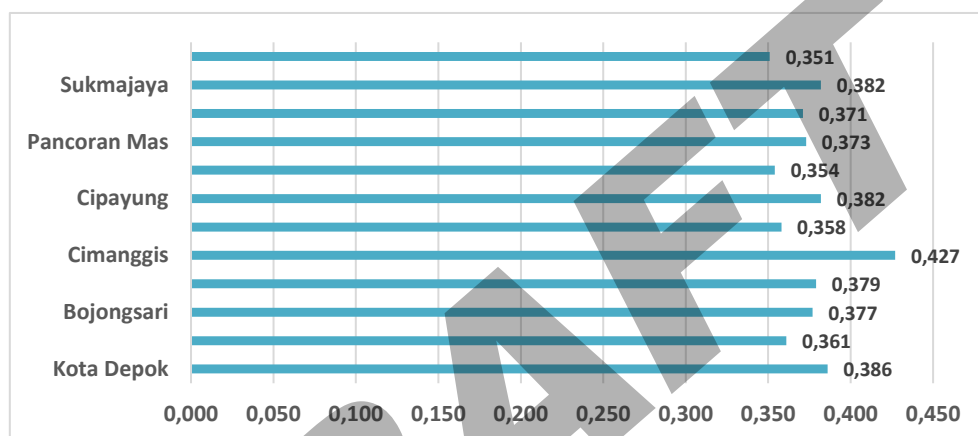
Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Tren ketimpangan pendapatan di Kota Depok selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan namun dengan tanda-tanda perbaikan terkini. Awal periode 2020, Depok mencatat rasio Gini sebesar 0,344 - lebih baik dibanding rata-rata nasional (0,381) maupun Jawa Barat (0,403). Namun situasi berubah drastis dalam tiga tahun berikutnya, dimana ketimpangan di Depok melonjak tajam hingga mencapai 0,402 pada 2023, dengan tingkat perubahan tahunan yang secara konsisten lebih tinggi dibanding wilayah lain. Lonjakan ini terutama terjadi pada 2021-2022 dengan kenaikan masing-masing 0,023 dan 0,027 poin, jauh di atas kenaikan di tingkat provinsi dan nasional. Faktor pendorongnya mungkin meliputi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tekanan urbanisasi, serta dampak pandemi yang berkelanjutan terhadap sektor-sektor padat karya di Depok.

Tahun 2024 membawa angin segar dengan penurunan pertama rasio Gini menjadi 0,398 (turun 1,00%), lebih baik dibanding penurunan di Jawa Barat (-0,94%) meski masih kalah dengan pencapaian nasional (-1,80%). Perbaikan ini mungkin mencerminkan efektivitas berbagai program penanggulangan ketimpangan yang diimplementasikan pemerintah daerah. Namun demikian, tingkat ketimpangan saat

ini masih lebih buruk 15,7% dibanding kondisi 2020, mengisyaratkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya terjadi. Dibandingkan dengan Jawa Barat yang rasio Gininya tetap tertinggi (0,421) dan cenderung stagnan, serta pencapaian nasional yang lebih stabil, Depok menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih terarah pada penguatan sektor informal, perluasan akses pelatihan vokasi, serta optimalisasi sistem perpajakan progresif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 33 Gini Rasio Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2024



Sumber : Satu Data Kota Depok, 2024

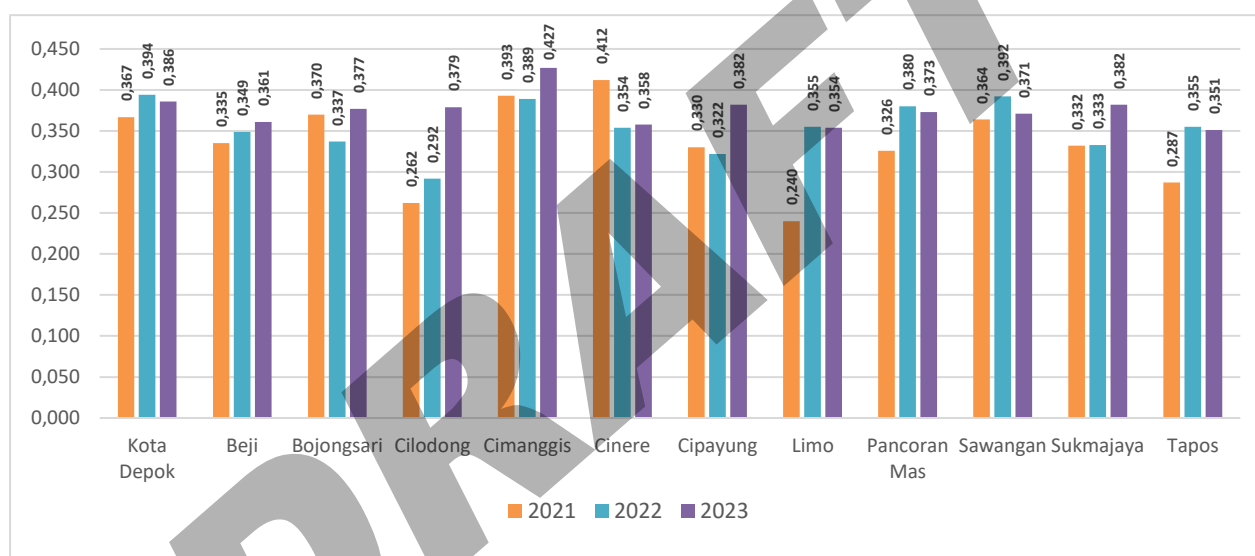
Selanjutnya pada Gambar dibawah ini menunjukkan ketimpangan antar kecamatan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir (2021-2023), umumnya berada dalam kriteria ketimpangan sedang, dengan nilai Gini Ratio berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Beberapa kecamatan pada tahun tertentu masuk dalam kriteria ketimpangan rendah (nilai Gini Ratio kurang dari 0,3), seperti Cilodong, Tapos, dan Limo pada tahun 2021. Tidak ada kecamatan yang masuk dalam kriteria ketimpangan tinggi (nilai Gini Ratio lebih dari 0,5) selama tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam tingkat ketimpangan antar kecamatan, dengan beberapa kecamatan memiliki nilai Gini Ratio yang relatif tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, pada tahun 2023, kecamatan Cimanggis memiliki nilai Gini Ratio tertinggi (0,427), sementara pada tahun 2021, Cinere memiliki nilai Gini Ratio tertinggi (0,412).

Kecamatan Limo memiliki nilai Gini Ratio terendah pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum ketimpangan di Kota Depok terkategori sedang, terdapat variasi dalam tingkat ketimpangan antar kecamatan serta fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan analisis yang terus-menerus untuk memahami dinamika ketimpangan di setiap wilayah.

Pola pergerakan nilai gini ratio dari tahun 2021-2023 di kecamatan-kecamatan Kota Depok berbeda-beda. Kecamatan Sukmajaya, Cilodong, dan Beji memiliki nilai Gini Ratio cenderung naik dari

tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di kecamatan-kecamatan ini cenderung memburuk dari waktu ke waktu selama periode tersebut. Kemungkinan faktor-faktor tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan distribusi pendapatan, dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan di kecamatan-kecamatan ini. Kecamatan lainnya memiliki pola pergerakan nilai Gini Ratio dari tahun 2021 hingga 2023 cenderung naik turun. Hal ini menunjukkan fluktuasi dalam tingkat ketimpangan ekonomi di kecamatan-kecamatan lainnya selama periode tersebut. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan dalam struktur ekonomi lokal, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi distribusi pendapatan, atau peristiwa-peristiwa ekonomi tertentu yang memengaruhi pendapatan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Gambar 2.34 Nilai Gini Rasio Kecamatan Kota Depok Tahun 2021-2023



Sumber : Satu Data Kota Depok, 2024

Kecamatan-kecamatan yang memiliki kontribusi utama sebagai sumber ketimpangan didalam kluster terutama yaitu Kecamatan Cilodong dan Cimanggis, hal ini konsisten sejak tahun 2018-2021, dan ada sedikit perubahan di tahun 2022 dimana Kecamatan Cinere juga masuk kategori penyumbang ketimpangan yang signifikan.

Adapun perbandingan rasio gini dan pertumbuhan ekonomi, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.44 Rasio Perubahan Indeks Rasio Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Tahun 2024

	Perubahan Rasio Gini	Perubahan LPE	Rasio Perubahan Rasio Gini dan LPE
Nasional	1,84	(0,02)	(0,50)
Depok	2,03	0,42	(0,41)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rasio perubahan Rasio Gini dan LPE Kota Depok tahun 2023 lebih besar dari rata-rata capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok berpengaruh terhadap bertambahnya indeks rasio gini.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya diimbangi dengan penurunan ketimpangan wilayah. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan ketimpangan wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok justru diiringi oleh peningkatan ketimpangan wilayah, bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa ketimpangan wilayah seharusnya menurun seiring pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan-kecamatan seperti Cinere, Pancoran Mas, Bojongsari, Sukmajaya, dan Sawangan menunjukkan LPE tinggi serta ketimpangan wilayah yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan ini telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif merata, di mana manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan lebih seimbang di antara wilayah-wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan ini termasuk kebijakan lokal yang efektif dalam distribusi sumber daya, investasi dalam infrastruktur, serta program-program pembangunan yang mendorong pemerataan ekonomi.

Sebaliknya, kecamatan seperti Beji, Cimanggis, dan Tapos menunjukkan LPE rendah dengan ketimpangan wilayah yang tinggi. Kecamatan-kecamatan ini menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada kondisi ini meliputi kurangnya investasi, akses terbatas terhadap layanan dasar, serta kebijakan ekonomi yang kurang efektif dalam mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan tersebut.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Program-program seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, investasi dalam infrastruktur publik, serta kebijakan redistributif dapat membantu mengurangi ketimpangan wilayah sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang efektif harus kontekstual dan berbasis wilayah, mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing kecamatan. Untuk kecamatan dengan LPE rendah dan ketimpangan wilayah tinggi, kebijakan harus fokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan mendorong investasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Kecamatan dengan LPE tinggi dan ketimpangan wilayah rendah dapat

dijadikan model bagi kebijakan yang berhasil, yang bisa diterapkan di daerah lain dengan penyesuaian sesuai konteks lokal.

Berdasarkan model GWR yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat 10 variabel yang berbanding lurus dengan ketimpangan pendapatan. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah sebagai berikut: [A] Jumlah penginapan; [B] Jumlah kedai; [C] Jumlah toko; [D] Jumlah PT (perguruan tinggi); [E] Jumlah praktek dokter; [F] Jumlah RS (Rumah Sakit); [G] Jumlah minimarket; [H] share PDRB sektor jasa perusahaan; [I] share PDRB sektor industri; dan [J] share PDRB sektor perdagangan. Ketika terjadi peningkatan satu satuan pada variabel2 tersebut diatas, maka akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Depok. Besarnya dampak terhadap ketimpangan pendapatan adalah sebesar nilai parameter estimate untuk masing-masing variable.

Sementara itu, variable-variabel yang berbanding terbalik dengan ketimpangan pendapatan antara lain adalah: [A] : Jumlah hotel; [B] : Jumlah warung; [C] : Jumlah restoran; [D] : Share PDRB sektor jasa keuangan; [E] : Share PDRB sektor pertanian; [F] : Share PDRB sektor real estate; dan [G] : Share PDRB sektor akomodasi. Jika terjadi peningkatan pada variable-variabel tersebut maka akan terjadi penurunan pada ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pada variable-variable tersebut, maka nilai ketimpangan pendapatan justru akan meningkat.

f. Pengeluaran per Kapita

Data pengeluaran per kapita Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif. Sepanjang lima tahun tersebut, realisasi pengeluaran per kapita selalu melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara umum. Pada tahun 2020, target sebesar Rp14.980,00 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp15.281,00. Tren ini terus berlanjut hingga 2024, dengan realisasi tertinggi mencapai Rp16.640,00, mengungguli target sebesar Rp16.543,00.

Pertumbuhan realisasi pengeluaran per kapita secara tahunan menunjukkan peningkatan yang stabil, dengan selisih yang cukup positif dibandingkan target, walaupun selisihnya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dan intervensi kebijakan sosial ekonomi cukup efektif dalam mendorong konsumsi masyarakat, serta adanya perbaikan pendapatan dan aktivitas ekonomi lokal pasca-pandemi.

Dengan capaian target yang konsisten selama lima tahun berturut-turut, Kota Depok menunjukkan kapasitas fiskal dan sosial ekonomi yang baik dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakatnya. Namun demikian, peningkatan pengeluaran per kapita ini perlu tetap dibarengi dengan strategi pengendalian ketimpangan (Rasio Gini), agar pertumbuhan kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Perbandingan Realisasi dengan Target Pengeluaran Per Kapita Kota Depok Tahun 2020-2024

Pengeluaran Per Kapita	2020	2021	2022	2023	2024
Target	14.980,00	15.120,00	15.777	15.956	16.543
Realisasi	15.281,00	15.420,00	15.926	16.279	16.640
Capaian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Adapun Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Laju (%)	Capaian	Laju (%)	Capaian	Laju (%)	Capaian	Laju (%)	Capaian	Laju (%)
Jawa Barat	10.845	-2,8	10.934	0,82	11.277	3,14	11.695	3,71	12.157	3,95
Kota Depok	15.281	-2,6	15.420	0,91	15.926	3,28	16.279	2,22	16.640	2,22
Kota Bogor	11.564	-2,2	11.716	1,31	12.058	2,92	12.656	4,96	13.154	3,93
Kota Sukabumi	10.999	-1,8	10.942	-0,52	11.229	2,62	11.799	5,08	12.252	3,84
Kota Bandung	16.887	-2,1	16.996	0,65	17.639	3,78	18.236	3,38	18.795	3,07
Kota Cirebon	11.800	-1,1	11.810	0,08	12.087	2,35	12.506	3,47	12.869	2,90
Kota Bekasi	15.776	-2,4	15.903	0,81	16.239	2,11	16.479	1,48	16.775	1,80
Kota Cimahi	12.025	-3,4	12.019	-0,05	12.500	4,00	12.883	3,06	13.278	3,07
Kota Tasikmalaya	10.263	-1,4	10.213	-0,49	10.578	3,57	11.063	4,58	11.431	3,33
Kota Banjar	10.535	-1,6	10.476	-0,56	10.967	4,69	11.356	3,55	11.811	4,01

Sumber : BPS, 2024 (diolah)

Tabel perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita di Kota Depok dengan wilayah kota setara di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam tren daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal. Secara umum, hampir seluruh wilayah mengalami kontraksi pengeluaran per kapita pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dengan laju pertumbuhan negatif berkisar antara -1,1% hingga -3,4%. Kota Depok mencatat penurunan sebesar -2,6%, relatif sejalan dengan Kota Bekasi (-2,4%) dan Kota Bandung (-2,1%), namun lebih baik dibandingkan Kota Cimahi yang mengalami kontraksi terdalam (-3,4%).

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, seluruh wilayah mulai menunjukkan pemulihan, meskipun dengan laju yang bervariasi. Kota Depok mencatat pertumbuhan pengeluaran per kapita yang cukup stabil namun tidak terlalu tinggi, dengan laju tahunan sekitar 0,91% (2021), 3,28% (2022), 2,22% (2023),

dan tetap 2,22% pada 2024. Jika dibandingkan dengan kota lain, laju pertumbuhan Kota Depok tergolong moderat. Kota-kota seperti Sukabumi dan Banjar bahkan mencatat laju yang lebih tinggi di beberapa tahun, seperti Kota Sukabumi yang tumbuh 5,08% pada 2023 dan Kota Banjar yang tumbuh 4,69% pada 2022. Sementara Kota Bandung, meskipun memiliki nominal pengeluaran per kapita tertinggi (Rp18.795 pada 2024), juga menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif konsisten, berkisar 3–4% selama periode pemulihan.

Kota Depok menempati posisi kedua tertinggi dalam hal nominal pengeluaran per kapita (Rp16.640 pada 2024), hanya sedikit di bawah Kota Bandung, dan unggul jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp12.157) maupun dari kota-kota lain seperti Bogor, Cirebon, dan Bekasi. Namun, capaian nominal tinggi ini tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika pertumbuhan yang agresif, melainkan lebih kepada posisi dasar yang sudah tinggi sejak awal periode. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daya beli masyarakat Depok relatif tinggi, kecepatan pertumbuhannya cenderung melambat atau stabil dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan potensi kejenuhan pasar atau perlambatan ekonomi lokal.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, kondisi ini memberikan dua catatan penting bagi Kota Depok. Pertama, tingginya nominal pengeluaran per kapita perlu dijaga melalui kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penghambat akselerasi pertumbuhan, seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan ekonomi, atau perubahan perilaku konsumsi pasca-pandemi. Dalam konteks regional, Depok tetap menjadi salah satu kota dengan daya saing ekonomi yang kuat, namun untuk menjaga momentum tersebut dibutuhkan strategi pertumbuhan ekonomi baru yang adaptif terhadap tantangan sosial-ekonomi dan lingkungan di masa depan.

Tabel 2.47 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Depok Tahun 2020-2024

Pengeluaran Per Kapita	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian (ribu rupiah)	15.281	15.420	15.926	16.279	16.640
Perubahan	-415	139	506	353	361
Pertumbuhan	-2,64%	0,91%	3,28%	2,11%	2,22%

Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Berdasarkan data pengeluaran per kapita Kota Depok tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pola fluktuasi yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam merespons berbagai dinamika, terutama akibat pandemi dan fase pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita mengalami penurunan cukup tajam sebesar Rp415 ribu atau menyusut -2,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang

menurunkan pendapatan rumah tangga, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menekan daya beli masyarakat.

Tahun 2021 menandai awal pemulihan dengan peningkatan pengeluaran per kapita sebesar Rp139 ribu atau tumbuh sebesar 0,91%. Meski masih rendah, angka ini menunjukkan mulai pulihnya konsumsi masyarakat dan pelanggaran pembatasan aktivitas. Namun demikian, pemulihan tersebut masih dalam tahap awal dan belum cukup kuat untuk memulihkan kondisi ekonomi secara penuh.

Momentum pemulihan yang lebih kuat terjadi pada tahun 2022, saat pengeluaran per kapita meningkat signifikan sebesar Rp506 ribu atau tumbuh 3,28%. Ini menjadi titik tertinggi laju pertumbuhan selama periode lima tahun terakhir. Lonjakan ini menandakan adanya kepercayaan masyarakat dalam berbelanja dan peningkatan pendapatan, yang bisa jadi dipengaruhi oleh mulai pulihnya sektor informal, UMKM, serta aktivitas ekonomi lainnya yang sebelumnya terpukul pandemi.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan kembali melambat masing-masing menjadi 2,11% dan 2,22%, meskipun nilai pengeluaran tetap mengalami peningkatan (masing-masing sebesar Rp353 ribu dan Rp361 ribu). Pelambatan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang mulai stabil, namun belum cukup kuat untuk mengalami percepatan pertumbuhan. Bisa jadi ini disebabkan oleh tekanan inflasi, stagnasi pendapatan riil, atau terbatasnya investasi dalam sektor produktif yang berpengaruh langsung terhadap konsumsi rumah tangga.

Secara umum, Kota Depok tetap menunjukkan daya beli masyarakat yang tinggi dibandingkan rata-rata kota di Jawa Barat. Namun tren pertumbuhan yang melambat pada dua tahun terakhir menunjukkan pentingnya strategi penguatan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mendorong stimulus ekonomi, memperluas lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat sektor-sektor produktif lokal agar pertumbuhan pengeluaran per kapita tidak hanya stabil, tetapi juga inklusif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia, yang mewakili kondisi akumulasi modal manusia, dapat mencerminkan kondisi kualitas dari penduduk di suatu daerah. IPM dianggap dapat mewakili bentuk kualitas dari penduduk sebagai objek pembangunan karena dalam indikator IPM sudah merangkum tiga dimensi penting dalam modal penduduk untuk melakukan pembangunan dan mencapai kesejahteraan. Tiga dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Jadi apabila pencapaian angka IPM suatu daerah tinggi maka semakin tinggi kualitas penduduk daerah tersebut yang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

IPM Kota Depok Tahun 2024 sebesar 83,05 poin. Adapun IPM Jawa Barat dan Nasional pada Tahun 2024 masing-masing sebesar 74,92 poin dan 75,02 poin. Perbandingan IPM Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.35 Perbandingan IPM Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPM Kota Depok berada di angka 80,97 poin, jauh melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,09 poin dan Nasional sebesar 71,94 poin. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana IPM Kota Depok mencapai 83,05 poin, sementara Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing berada di 74,92 poin dan 75,02 poin. Peningkatan signifikan terlihat pada periode 2023-2024, dengan kenaikan 0,52 poin untuk Kota Depok dibandingkan kenaikan yang lebih kecil pada tingkat provinsi dan nasional.

Perbedaan yang cukup signifikan antara IPM Kota Depok dan rata-rata provinsi maupun nasional menunjukkan bahwa program pembangunan manusia di Depok lebih progresif, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Kinerja ini mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam mengelola layanan publik dan pembangunan. Dominasi IPM Kota Depok atas provinsi dan nasional juga memperlihatkan potensinya sebagai model pembangunan manusia yang patut dicontoh.

Perbandingan pertumbuhan IPM daerah Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara Kota Depok tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48 Perbandingan Pertumbuhan IPM Daerah Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Setara	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	0,01%	0,42%	0,67%	0,94%	0,72%
Jawa Barat	0,08%	0,50%	0,92%	0,83%	0,92%
Kota Depok	0,19%	0,49%	0,60%	0,62%	0,63%
Kabupaten Bogor	-0,35%	0,28%	0,85%	0,79%	
Kabupaten Bekasi	0,11%	0,51%	1,03%	0,70%	
Kota Bogor	-0,16%	0,63%	0,76%	0,88%	
Kota Bekasi	-0,11%	0,55%	0,62%	0,65%	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Berdasarkan tren capaian IPM dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kota Depok menempati peringkat ke-3 di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tingkat pertumbuhan yang hampir sama dengan wilayah setara maupun DKI Jakarta pada saat sebelum pandemi, kecuali jika dibandingkan dengan Kota Bogor. Namun dengan adanya tekanan pandemi, tingkat pertumbuhan IPM Kota Depok dibanding wilayah setara dan juga Provinsi DKI Jakarta relatif sama. Walaupun nilai IPM Kota Depok setiap tahun naik, namun terjadi penurunan tingkat IPM pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 meningkat kembali.

Berdasarkan Tabel 2.50, Kota Depok memiliki kualitas penduduk yang tinggi dan dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. IPM tertinggi Kota Depok terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 82,53, begitupun IPM tertinggi Provinsi Jawa Barat yang sebesar 74,24.

Tabel. 2.49 Perbandingan Perubahan IPM Kota Depok dengan Rata- rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Setara	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ
DKI Jakarta	80,77	0,01	81,11	0,34	82,77	0,54	83,55	0,58	84,15	0,8
Jawa Barat	72,09	0,06	72,45	0,36	73,63	0,67	74,24	0,61	74,92	0,68
Kota Depok	80,97	0,15	81,37	0,4	82,02	0,49	82,53	0,51	83,05	0,52
Kabupaten Bogor	70,4	-0,25	70,6	0,2	72,45	0,6	73,02	0,57	73,63	0,61
Kabupaten Sukabumi	66,88	0,01	67,07	0,19	68,87	0,57	69,71	0,84	70,18	0,47
Kabupaten Cianjur	65,36	-0,02	65,56	0,2	67,55	0,38	68,18	0,63	68,89	0,71
Kabupaten Bandung	72,39	-0,02	72,73	0,34	73,46	0,43	74,03	0,57	74,59	0,56
Kabupaten Garut	66,12	-0,1	66,45	0,33	68,51	0,96	69,22	0,71	69,91	0,69
Kabupaten Tasikmalaya	65,67	0,03	65,9	0,23	68,45	0,94	69,38	0,93	69,98	0,6
Kabupaten Ciamis	70,49	0,1	70,93	0,44	72,52	0,52	73,12	0,6	73,64	0,52
Kabupaten Kuningan	69,38	0,26	69,71	0,33	70,44	0,45	70,99	0,55	71,56	0,57
Kabupaten Cirebon	68,75	0,06	69,12	0,37	70,92	0,94	71,81	0,89	72,30	0,49
Kabupaten Majalengka	67,59	0,07	67,81	0,22	70,18	0,75	70,76	0,58	71,37	0,61

Wilayah Setara	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ	Capaian	Δ
Kabupaten Sumedang	71,64	0,18	71,8	0,16	73,53	0,89	74,02	0,49	74,57	0,55
Kabupaten Indramayu	67,29	0,32	67,64	0,35	69,52	0,91	70,19	0,67	70,72	0,53
Kabupaten Subang	68,95	0,26	69,13	0,18	70,54	0,74	71,42	0,88	72,05	0,63
Kabupaten Purwakarta	70,82	0,15	70,98	0,16	72,89	0,58	73,43	0,54	73,99	0,56
Kabupaten Karawang	70,66	-0,2	70,94	0,28	72,64	0,8	73,25	0,61	73,82	0,57
Kabupaten Bekasi	74,07	0,08	74,45	0,38	75,60	0,77	76,13	0,53	76,80	0,67
Kabupaten Bandung Barat	68,08	-0,19	68,29	0,21	69,82	0,75	70,33	0,51	70,77	0,44
Kabupaten Pangandaran	68,06	-0,15	68,28	0,22	70,21	0,75	70,57	0,36	71,03	0,46
Kota Bogor	76,11	-0,12	76,59	0,48	77,68	0,58	78,36	0,68	79,03	0,67
Kota Sukabumi	74,21	-0,1	74,6	0,39	76,24	0,8	77,16	0,92	77,69	0,53
Kota Bandung	81,51	-0,11	81,96	0,45	82,75	0,54	83,29	0,54	83,75	0,46
Kota Cirebon	74,89	-0,03	75,25	0,36	76,89	0,64	77,45	0,56	78,09	0,64
Kota Bekasi	81,5	-0,09	81,95	0,45	82,52	0,51	83,06	0,54	83,55	0,49
Kota Cimahi	77,83	-0,28	78,06	0,23	79,01	0,71	79,69	0,68	80,30	0,61
Kota Tasikmalaya	73,04	0,2	73,31	0,27	74,84	0,52	75,47	0,63	76,03	0,56
Kota Banjar	71,7	-0,05	71,92	0,22	73,93	0,63	74,45	0,52	75,01	0,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Berdasarkan data perbandingan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara pada tahun 2020–2024, terlihat bahwa Kota Depok secara konsisten menempati posisi unggul dalam capaian IPM dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, IPM Kota Depok tercatat sebesar 80,97 dan meningkat secara bertahap setiap tahun hingga mencapai 83,05 pada 2024, dengan rata-rata kenaikan tahunan sebesar 0,51 poin. Kinerja ini menempatkan Kota Depok di antara kota-kota dengan IPM tertinggi di Jawa Barat, bersanding dengan Kota Bekasi (83,55), Kota Bandung (83,75), dan DKI Jakarta (84,15), serta menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang sudah sangat tinggi dalam konteks regional.

Dari sisi pertumbuhan tahunan, meskipun capaian Kota Depok tergolong tinggi, laju pertumbuhannya cenderung moderat jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain yang masih berada dalam kategori IPM menengah. Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan sejumlah kabupaten seperti Garut, Indramayu, dan Subang mencatatkan laju pertumbuhan IPM yang lebih tinggi, dengan rata-rata kenaikan di atas 0,6 poin per tahun. Misalnya, Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan IPM sebesar 3,79 poin dalam lima tahun, dari 66,12 pada 2020 menjadi 69,91 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan IPM lebih rendah umumnya mengalami pertumbuhan lebih cepat, sebagai bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan.

Sementara itu, wilayah seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi mencatat pertumbuhan yang sebanding dengan Kota Depok, tetapi sedikit lebih rendah pada beberapa tahun terakhir. Kota Bandung misalnya, hanya tumbuh 0,46 poin pada 2024, dan Kota Bekasi sebesar 0,49 poin. Di sisi lain, DKI Jakarta mencatat lonjakan pertumbuhan tertinggi pada 2024 sebesar 0,8 poin, yang kemungkinan dipicu oleh akselerasi pascapandemi dan intervensi kebijakan yang masif terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

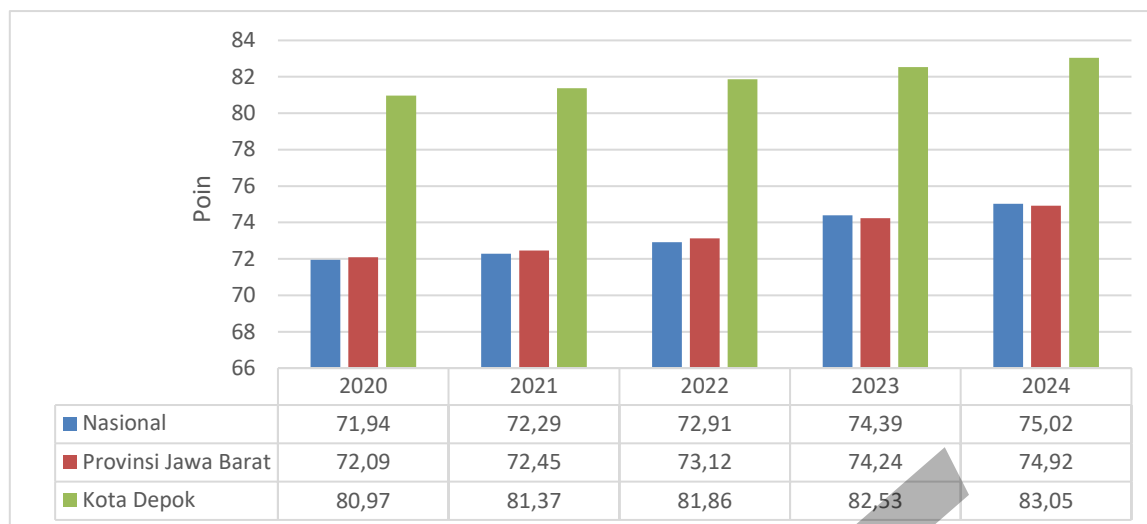
Jika dibandingkan dengan rerata Provinsi Jawa Barat, capaian IPM Kota Depok jauh di atas rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 baru mencapai 74,92. Artinya, terdapat kesenjangan IPM yang cukup lebar antara Kota Depok dan sebagian besar wilayah lainnya, terutama kabupaten-kabupaten dengan karakteristik rural seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Depok memiliki keunggulan struktural dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak, yang menjadi dimensi utama pengukuran IPM.

Namun demikian, pertumbuhan IPM Kota Depok yang cenderung moderat juga mengindikasikan bahwa wilayah ini sedang berada dalam fase konsolidasi pembangunan, di mana tantangannya bukan lagi memperbesar angka secara signifikan, melainkan meningkatkan kualitas dan inklusivitas pembangunan manusia. Untuk mempertahankan daya saing dan menghindari stagnasi, Kota Depok perlu memperkuat strategi pembangunan sumber daya manusia, seperti penguatan pendidikan vokasi, peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas, dan perluasan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Peningkatan IPM ke depan tidak hanya diukur dari nilai nominal, tetapi juga dari seberapa merata manfaat pembangunan itu dirasakan oleh seluruh warga kota.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kota dengan capaian pembangunan manusia tertinggi di Jawa Barat. Namun, untuk mencapai lompatan kualitas pembangunan berikutnya, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada inovasi sosial serta keberlanjutan jangka panjang.

Perbandingan IPM Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.36 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik dan tabel yang menyajikan perbandingan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional pada tahun 2020–2024, terlihat bahwa Kota Depok secara konsisten mencatatkan capaian IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2020, IPM Kota Depok tercatat sebesar 80,97, sementara IPM Provinsi Jawa Barat berada pada angka 72,09, dan nasional 71,94. Selama lima tahun berikutnya, IPM Kota Depok terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 83,05 pada tahun 2024, mengungguli capaian nasional (75,02) dan Jawa Barat (74,92) secara signifikan.

Kenaikan IPM Kota Depok setiap tahun juga menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan kenaikan tahunan rata-rata sekitar 0,5 poin. Hal ini menandakan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak. Sebaliknya, meskipun IPM nasional dan provinsi juga mengalami pertumbuhan, laju kenaikannya cenderung lebih fluktuatif, terutama pada tahun 2023, yang menunjukkan lonjakan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya—kemungkinan sebagai dampak dari pemulihan pascapandemi yang mulai signifikan.

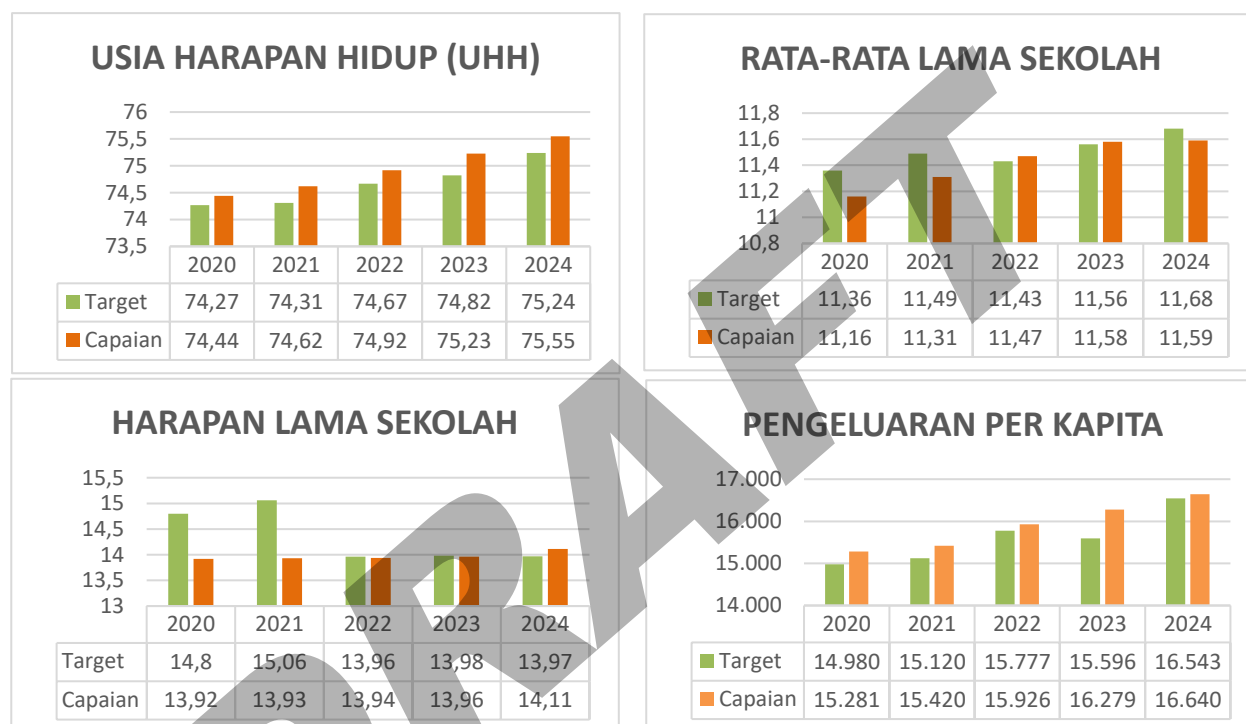
Selisih antara IPM Kota Depok dan Jawa Barat mencapai lebih dari 8 poin sepanjang periode ini, sementara selisih dengan capaian nasional bahkan hampir 10 poin. Hal ini mencerminkan bahwa Kota Depok memiliki struktur sosial-ekonomi yang lebih maju, didukung oleh akses layanan publik yang lebih baik, tingkat pendidikan yang tinggi, dan pendapatan per kapita yang memadai. Gap tersebut juga menjadi indikator ketimpangan antardaerah, yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat dan provinsi dengan kebijakan afirmatif bagi wilayah-wilayah dengan IPM rendah.

Namun demikian, meskipun capaian IPM Kota Depok tergolong tinggi, tren pertumbuhan yang mulai melandai menunjukkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya sekadar meningkatkan angka,

tetapi juga menjamin inklusivitas dan pemerataan hasil pembangunan. Artinya, pemerintah Kota Depok perlu mulai fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata hingga ke wilayah pinggiran, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang masih tertinggal secara sosial maupun ekonomi.

Adapun Perbandingan Komponen IPM dengan Target Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.37 Perbandingan Komponen IPM dengan Target Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik empat indikator pembangunan manusia Kota Depok tahun 2020–2024, terlihat bahwa capaian Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran per Kapita secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kemajuan di bidang kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UHH meningkat dari 74,44 menjadi 75,55 tahun, sementara pengeluaran per kapita naik dari Rp15,28 juta menjadi Rp16,64 juta. Di sisi lain, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami capaian yang fluktuatif dan cenderung belum sepenuhnya memenuhi target, meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas hidup dan daya beli masyarakat membaik, tantangan masih ada dalam peningkatan kualitas dan kesinambungan pendidikan. Untuk itu, ke depan, Kota Depok perlu memperkuat intervensi di sektor pendidikan agar pertumbuhan IPM tetap berkelanjutan dan merata di semua dimensi.

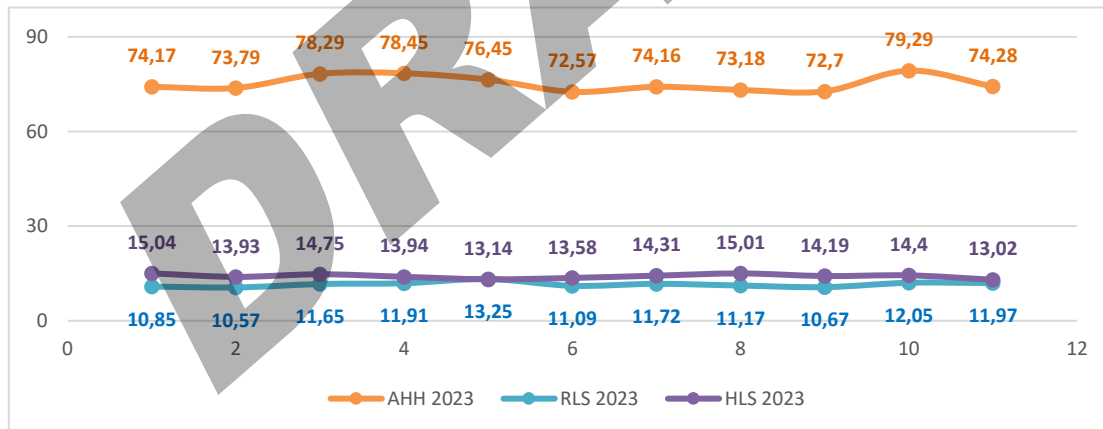
Tabel 2.50 Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM
2020	74,44	13,92	11,28	15.281	80,97
2021	74,62	13,93	11,46	15.420	81,37
2022	74,92	13,94	11,47	15.926	81,86
2023	75,23	13,96	11,58	16.279	82,53
2024	75,55	14,11	11,59	16.640	83,05

Sumber : BPS Jawa Barat : 2024

Pada Tingkat kecamatan, IPM di Kota Depok dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung mempunyai pertumbuhan yang positif. IPM tertinggi selama kurun waktu tersebut berada di Kecamatan Sukmajaya dan terendah pada Kecamatan Cipayung. Kemudian berdasarkan komponen penyusun IPM pada tahun 2023, kecamatan Sukmajaya juga mempunyai angka harapan hidup (AHH) tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Sedangkan pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi pada Kecamatan Beji (15.01) dan terendah pada Kecamatan Tapos (13.02) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi ditemukan di Kecamatan Cinere (13.25) dan terendah pada Kecamatan Beji (11.04). Hal tersebut dilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.38 Komponen Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Depok, 2024 (diolah)

Analisis terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi. Korelasi yang kuat antara LPE dan IPM sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya berkontribusi pada peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, dan Kesehatan. Studi-studi sebelumnya mengindikasikan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung mengalami peningkatan yang signifikan

dalam indikator-indikator pembangunan manusia. Namun, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Temuan ini menekankan pentingnya strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan pembangunan manusia. Di kecamatan seperti Cinere, Sukmajaya, dan Pancoran Mas, di mana baik LPE maupun IPM tinggi, kebijakan perlu difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Sebaliknya, di kecamatan seperti Tapos yang memiliki LPE dan IPM rendah, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

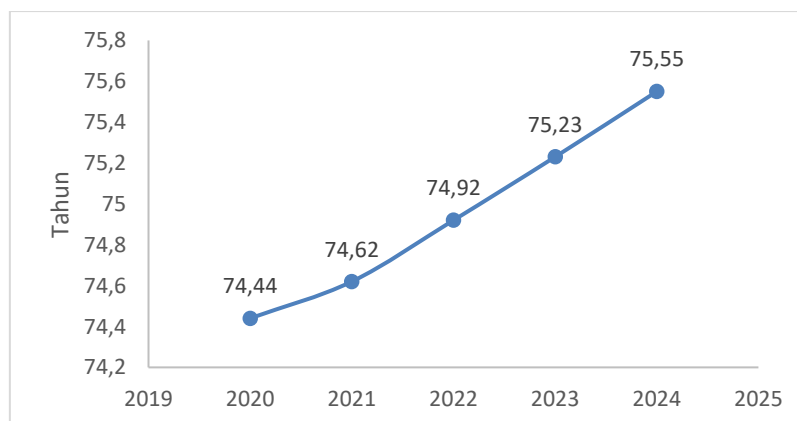
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

"Kesehatan untuk Semua" adalah upaya menjamin akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menekankan pencegahan, pengobatan, dan penanganan faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuannya menciptakan masyarakat sehat, produktif, dan berkeadilan di mana setiap orang bisa hidup dengan kualitas hidup yang optimal.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok.

Gambar 2.39 Usia Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2020–2024



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat - Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan Angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Depok dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH berada di angka 74,44 tahun, kemudian terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 75,55 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat.

Kenaikan UHH yang relatif stabil dan konsisten juga mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan sosial dan kesehatan di Kota Depok berjalan cukup efektif. Terutama peningkatan signifikan terjadi antara tahun 2021 ke 2022 dan seterusnya, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,3 tahun per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa Depok telah berada pada jalur yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya, namun tetap perlu memperhatikan kelompok rentan, seperti lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar pertumbuhan ini dapat dirasakan secara merata. Perbandingan UHH dengan target UHH Kota Depok Tahun 2020-2024, tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51 Perbandingan Realisasi dengan Target UHH Kota Depok Tahun 2020-2024

Angka Harapan Hidup	2020	2021	2022	2023	2024
Target	74,27	74,31	74,67	74,82	75,24
Realisasi	74,44	74,62	74,92	75,53	75,55
Capaian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan data perbandingan realisasi dengan target Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Depok tahun 2020–2024, terlihat bahwa seluruh target tahunan berhasil tercapai dan bahkan dilampaui. Pada tahun 2020, target UHH sebesar 74,27 tahun, sementara realisasinya mencapai 74,44 tahun. Tren ini terus berlanjut setiap tahun, menunjukkan kinerja positif dalam pencapaian indikator kesehatan penduduk.

Kesenjangan antara realisasi dan target juga semakin melebar dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2023, target UHH sebesar 74,82 tahun, namun realisasi mencapai 75,53 tahun, yang berarti kelebihan sebesar 0,71 tahun. Demikian pula pada tahun 2024, realisasi mencapai 75,82 tahun, melampaui target sebesar 0,31 tahun.

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Kota Depok dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran hidup sehat, dan akses terhadap sarana kesehatan yang memadai. Konsistensi capaian yang melampaui target juga menandakan bahwa program-program pembangunan di bidang kesehatan dan lingkungan hidup telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke

depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan pencapaian ini sekaligus memastikan peningkatan kualitas hidup menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

. Perbandingan pertumbuhan UHH Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara Tahun 2020-2024, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.52 Perbandingan Pertumbuhan UHH Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju
Provinsi DKI Jakarta	72,91	0,16%	73,01	0,14%	73,32	0,42%	75,81	3,40%	75,99	0,24%
Provinsi Jawa Barat	73,04	0,26%	73,23	0,26%	74,65	0,40%	74,91	0,35%	75,16	0,33%
Kota Depok	74,44	0,17%	74,62	0,24%	74,92	0,40%	75,23	0,41%	75,55	0,43%
Kabupaten Bogor	71,17	0,23%	71,36	0,27%	74,42	0,41%	74,67	0,34%	74,90	0,31%
Kabupaten Ciamis	71,83	0,36%	72,02	0,26%	74,69	0,39%	74,69	0,00%	75,26	0,76%
Kabupaten Bekasi	73,68	0,16%	73,81	0,18%	74,86	0,31%	75,09	0,31%	75,33	0,32%
Kota Bogor	73,61	0,27%	73,82	0,29%	75,21	0,42%	75,52	0,41%	75,80	0,37%
Kota Sukabumi	72,42	0,22%	72,58	0,22%	74,64	0,37%	74,89	0,33%	75,11	0,29%
Kota Bandung	74,28	0,19%	74,46	0,24%	75,26	0,39%	75,53	0,36%	75,83	0,40%
Kota Cirebon	72,26	0,18%	72,44	0,25%	74,87	0,41%	75,17	0,40%	75,48	0,41%
Kota Bekasi	75,01	0,16%	75,19	0,24%	75,60	0,39%	75,86	0,34%	76,14	0,37%
Kota Cimahi	74,03	0,19%	74,21	0,24%	74,99	0,39%	75,27	0,37%	75,55	0,37%
Kota Tasikmalaya	72,15	0,31%	72,34	0,26%	74,80	0,40%	75,08	0,37%	75,31	0,31%
Kota Banjar	70,99	0,28%	71,19	0,28%	74,48	0,42%	74,77	0,39%	74,99	0,29%

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Data perbandingan pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Depok dengan wilayah setara selama tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa Kota Depok secara konsisten mencatat capaian UHH yang relatif tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah di sekitarnya. UHH Depok meningkat dari 74,44 pada tahun 2020 menjadi 75,82 pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan yang cukup stabil berkisar antara 0,17% hingga 0,40%. Capaian akhir tahun 2024 (75,55) menjadikan Depok salah satu kota dengan UHH tertinggi di Jawa Barat, hanya sedikit di bawah Kota Bekasi (76,14) dan Kota Bandung (75,83). Dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Depok memiliki laju pertumbuhan yang sebanding atau sedikit lebih tinggi, mencerminkan upaya pembangunan kesehatan dan kualitas hidup yang cukup berhasil.

Secara umum, laju pertumbuhan UHH Depok tetap kompetitif jika dibandingkan kota-kota lain seperti Cimahi, Bogor, dan Sukabumi, yang mencatat pertumbuhan tahunan serupa di kisaran 0,30–0,40%. Dengan demikian, posisi Kota Depok dalam peta pembangunan kesehatan regional cukup menonjol, menunjukkan arah positif dalam pencapaian tujuan pembangunan manusia.

Perbandingan pertumbuhan UHH daerah dengan rata-rata capaian nasional, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan UHH Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Usia Harapan Hidup		2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	Nasional	71,94	72,29	73,70	73,93	75,02
	Provinsi Jawa Barat	73,04	73,23	74,65	74,91	75,16
	Kota Depok	74,44	74,62	74,92	75,23	75,55
Tingkat Pertumbuhan (%)	Nasional	0,03	0,49	-0,61	0,31	1,47
	Provinsi Jawa Barat	0,26	0,26	0,40	0,35	0,33
	Kota Depok	0,17	0,24	0,40	0,41	0,43

Sumber : BPS, 2024 (diolah)

Data perbandingan tingkat pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Depok secara konsisten mencatatkan angka UHH yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Pada 2020, UHH Kota Depok berada di angka 74,44 tahun, lebih tinggi dari Jawa Barat (73,04) dan nasional (71,94). Tren ini terus berlanjut hingga 2024, di mana Depok mencatat 75,55 tahun, sementara Jawa Barat di angka 75,16 tahun dan nasional 75,02 tahun.

Namun, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan tahunannya, Kota Depok mencatat kenaikan yang relatif stabil namun moderat. Tingkat pertumbuhan UHH di Depok berkisar antara 0,17% hingga 0,43%, menunjukkan perbaikan yang konsisten tetapi tidak secepat pertumbuhan UHH secara nasional yang sempat melonjak hingga 1,47% pada 2024. Lonjakan nasional pada 2024 tampaknya menjadi outlier, kemungkinan dipengaruhi oleh pemutakhiran data atau intervensi besar dalam kebijakan kesehatan secara nasional.

Kinerja UHH Kota Depok yang relatif stabil dan tinggi menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan, lingkungan, serta kesejahteraan sosial masyarakat berada dalam kondisi baik. Namun, tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan nasional mengindikasikan bahwa potensi peningkatan kualitas hidup di Depok masih bisa dioptimalkan, terutama melalui pendekatan preventif seperti edukasi kesehatan, peningkatan kualitas layanan primer, dan intervensi sosial-ekonomi yang menjangkau kelompok rentan. Depok tidak hanya perlu mempertahankan capaian tinggi ini, tetapi juga terus mendorong percepatan peningkatan UHH agar tetap kompetitif dan berdaya saing secara regional maupun nasional.

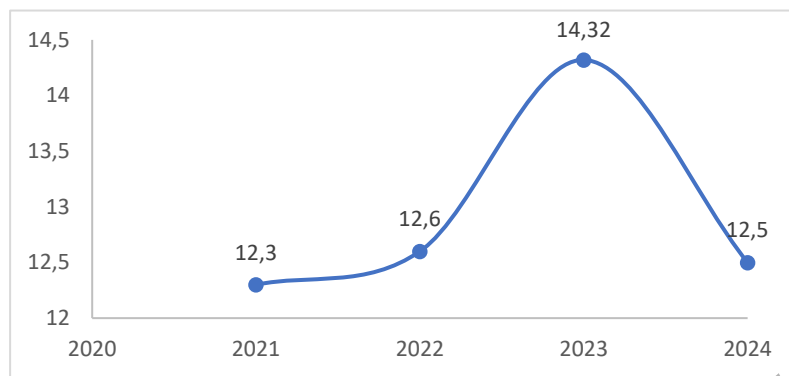
Variabel Indeks kesehatan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat cukup banyak, antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan status gizi balita. Indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan dan gizi bayi itu sendiri sebagai faktor tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh sebab itu, perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita merupakan awal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kekurangan gizi pada bayi akan berakibat terhadap munculnya masalah kesehatan yang lain, dan akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2000).

Apabila terdapat Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, program peningkatan kecukupan gizi dan kalori dan program penanggulangan kemiskinan.

b. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting adalah persentase balita (usia 0-59 bulan) dengan tinggi badan di bawah standar usia menurut WHO, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Indikator ini mengukur masalah gizi jangka panjang dan menjadi tolok ukur kualitas kesehatan anak serta ketahanan pangan rumah tangga. Stunting berdampak serius pada perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi di masa depan, dan siklus kemiskinan antargenerasi.

Berdasarkan data Prevalensi Stunting di Kota Depok dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat tren yang menunjukkan naik dan turun. Pada tahun 2022, angka stunting mencapai 12,6%, namun mengalami peningkatan menjadi 14,3% pada 2023. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 (12,5%), menunjukkan keberhasilan upaya intervensi kesehatan dan gizi Masyarakat.



Gambar 2.40 Prevalensi Stunting Kota Depok Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2025 (diolah)



Gambar 2.41 Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kemajuan positif dalam penanganan stunting di Kota Depok. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah potensi kenaikan kembali. Penanganan gizi buruk harus menjadi prioritas, melalui intervensi terpadu seperti edukasi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta bantuan sosial yang tepat sasaran. Program bantuan sosial, khususnya bagi keluarga rentan, berperan penting dalam memastikan akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar. Upaya ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar prevalensi stunting dapat terus ditekan hingga di bawah 3% pada tahun-tahun mendatang.

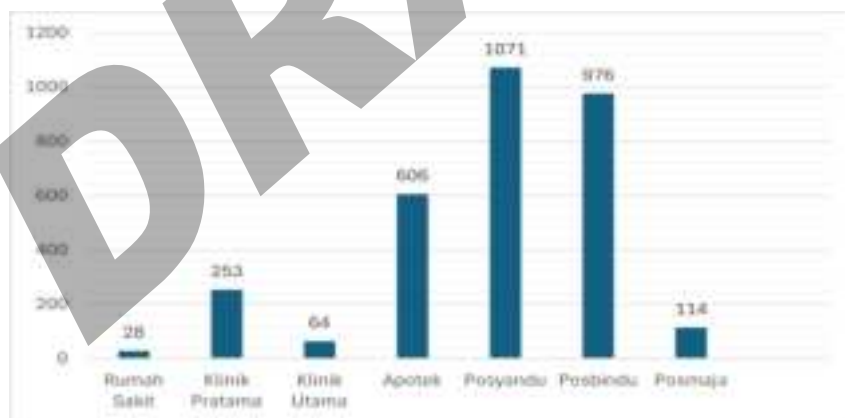
Indeks Pembangunan Kependudukan dan Keluarga (IPKK) Kota Depok tahun 2024 yang mencapai angka 65,3 mencerminkan capaian positif dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk, khususnya di bidang kesehatan dan tata kelola kependudukan. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen

Pemerintah Kota Depok dalam mengimplementasikan kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), yang secara langsung mendukung perbaikan indikator kesehatan melalui penguatan layanan Keluarga Berencana (KB). Dengan pendekatan lintas sektor dan fokus pada lima pilar PTS, termasuk pembangunan keluarga berkualitas dan peningkatan kualitas penduduk, kebijakan ini tidak hanya menstabilkan dinamika pertumbuhan penduduk, tetapi juga mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Posyandu dan Posbindu merupakan pilar utama dalam upaya pencegahan stunting di Kota Depok. Melalui peran kader dan kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, Posyandu berkontribusi signifikan dalam deteksi dini masalah gizi dan kesehatan pada balita. Kota Depok berhasil mencapai angka 100% Posyandu yang aktif pada tahun 2023, dengan jumlah Posyandu yang meningkat dari 1.051 pada tahun 2022 menjadi 1.162 pada tahun 2023. Dengan peran aktif kader Posyandu dan Posbindu yang didorong oleh Tim Penggerak PKK, upaya edukasi mengenai pola makan sehat dan pentingnya pemeriksaan rutin dapat dijalankan secara efektif, mencegah anak-anak dari risiko stunting.

c. Pelayanan Kesehatan

Kota Depok menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketersediaan fasilitas kesehatan. Tercatat 38 Puskesmas, 253 klinik pratama, 64 klinik utama, dan 28 rumah sakit (4 milik pemerintah dan 24 swasta) tersebar di seluruh kecamatan. Tak hanya layanan kuratif, Depok juga memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui 1.071 Posyandu, 976 Posbindu, dan 114 Posyandu Remaja.



Gambar 2.42 Fasilitas Kesehatan dan UKBM

Sumber: Forum Rencana Kerja Dinas Kesehatan Depok Tahun Anggaran 2026

Selain itu, tersedia 606 apotek sebagai penunjang distribusi obat dan pelayanan farmasi. Pemerintah juga menyiagakan PSC 119 dan satu Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai bagian dari sistem tanggap darurat dan pemeriksaan laboratorium.

Tabel 2.54 Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk di Kota Depok Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Rasio/100 ribu penduduk (2019)	Rasio/100 ribu penduduk (2019)	Target Rasio/100 ribu penduduk (2025)	Capaian
1	Dokter Spesialis	11	60,53	12	504,42%
2	Dokter Umum	45	70,52	50	141,04%
3	Dokter Gigi	13	26,6	14	190,00%
4	Perawat	180	150,37	200	75,19%
5	Bidan	120	63,85	130	49,12%
6	Gizi	14	7,21	18	40,06%
7	Apoteker	12	28,32	15	188,80%
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	24	26,02	30	89,73%
9	Kesehatan	15	9,03	18	50,17%

Sumber: Seksi SDMK, SISDMK, Januari 2024

Tenaga kesehatan di Kota Depok menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2019, mencerminkan perbaikan distribusi dan ketersediaan tenaga medis. Rasio dokter spesialis meningkat drastis dari 11 menjadi 60,53 per 100 ribu penduduk, disusul oleh dokter umum dari 45 menjadi 70,52, serta dokter gigi dari 13 menjadi 26,6. Peningkatan juga terjadi pada tenaga apoteker yang naik dari 12 menjadi 28,32 dan tenaga teknis kefarmasian dari 24 menjadi 26,92. Meskipun demikian, beberapa profesi justru mengalami penurunan rasio, seperti perawat dari 180 menjadi 150,37, serta tenaga gizi dan kesehatan masyarakat yang turun dari masing-masing 14 dan 15 menjadi 7,21 dan 9,03 per 100 ribu penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat peningkatan jumlah tenaga medis, tantangan dalam pemerataan dan pemenuhan tenaga di sektor-sektor tertentu masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator kesehatan, peningkatan jumlah fasilitas, serta pertumbuhan rasio tenaga medis di Kota Depok menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga. Dengan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, tenaga medis, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Depok berada pada jalur yang tepat menuju layanan kesehatan yang lebih merata, preventif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

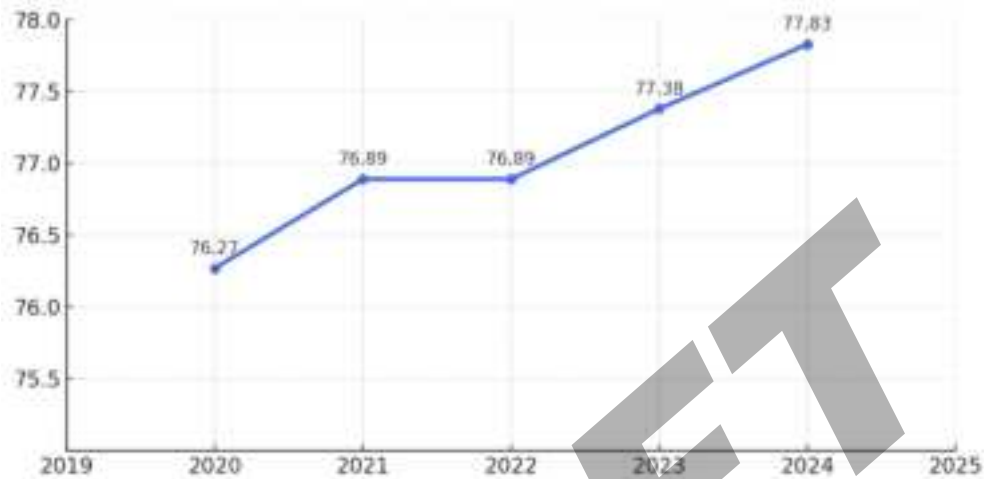
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata adalah sistem yang menjamin akses dan kualitas pembelajaran inklusif bagi semua, melalui pemerataan infrastruktur, guru berkualitas, dan kurikulum relevan untuk menciptakan kesetaraan peluang dan mengurangi kesenjangan sosial.

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pendidikan suatu wilayah berbasis rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (skala 0-1), digunakan untuk menilai kemajuan dan pemerataan kualitas pendidikan. Indeks Pendidikan Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.43 Indeks Pendidikan Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok telah menunjukkan kemajuan yang stabil dalam peningkatan kualitas pendidikan selama periode 2020 hingga 2024, tercermin dari pertumbuhan Indeks Pendidikan yang konsisten. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 76,27, kemudian mengalami peningkatan bertahap menjadi 76,89 (2021), bertahan di level yang sama di tahun 2022, sebelum kembali naik menjadi 77,38 (2023) dan mencapai 77,83 di tahun 2024. Peningkatan total sebesar 1,56 poin dalam lima tahun ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pendidikan di Depok telah memberikan dampak positif, meskipun dengan laju pertumbuhan yang cenderung moderat. Stagnasi di tahun 2022 mungkin mencerminkan adanya tantangan tertentu, seperti dampak pandemi atau perlunya penyesuaian kebijakan. Namun, pemulihan dan pertumbuhan yang kembali terjadi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kemampuan adaptasi dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mempercepat pencapaian,

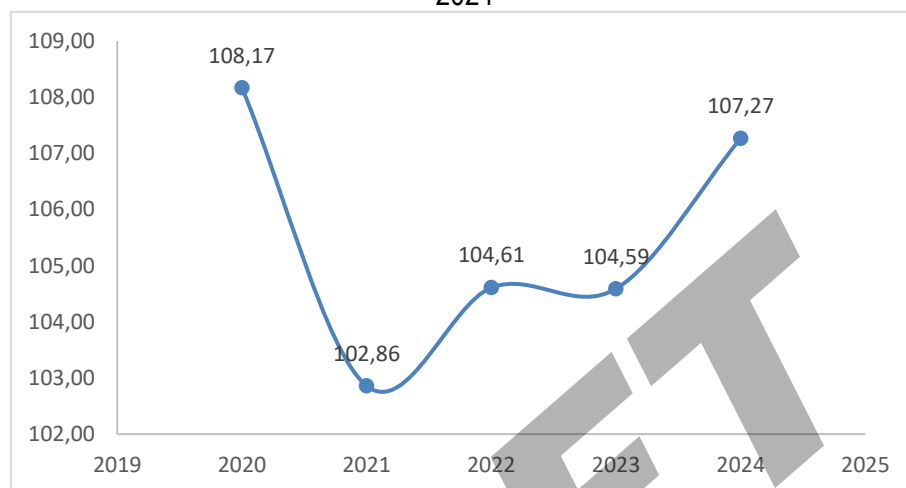
Depok perlu fokus pada inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah. Dengan demikian, target Indeks yang dicapai sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator pendidikan yang mengukur persentase jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan (baik yang sesuai maupun tidak tersebut. APK digunakan

untuk menilai tingkat aksesibilitas dan partisipasi pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.44 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok mencatat dinamika yang menarik dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, APK mencapai 108,17%, menunjukkan tingginya partisipasi pendidikan dasar yang bahkan melampaui 100% karena mencakup peserta didik di luar kelompok usia sekolah normal. Namun, di tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 102,86%, diduga kuat akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sistem pendidikan. Setelahnya, APK mulai pulih secara bertahap, mencapai 104,61% (2022), stabil di 104,59% (2023), dan kembali meningkat signifikan menjadi 107,27% di tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan ketahanan sistem pendidikan Depok dalam menghadapi tantangan, sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pemulihan pasca pandemi seperti program inklusi pendidikan, perbaikan akses sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan nonformal.

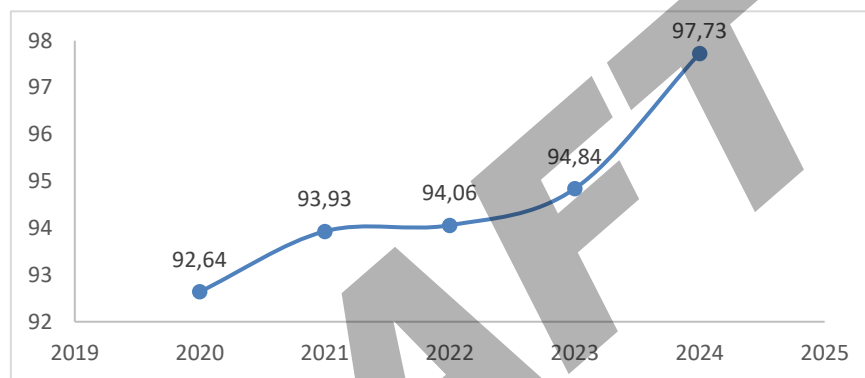
Stabilnya APK di kisaran 104-107% dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa Kota Depok telah berhasil mempertahankan cakupan pendidikan dasar yang luas, dengan partisipasi yang melampaui kelompok usia sekolah formal. Hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan bahwa tingginya angka partisipasi ini diiringi dengan pemerataan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terfokus untuk meningkatkan mutu pembelajaran sambil mempertahankan cakupan pendidikan yang luas, serta kajian mendalam tentang komposisi peserta didik untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi hak pendidikan dasar bagi seluruh warganya

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kota Depok tahun 2020-2024 tertera pada gambar berikut:

Gambar 2.45 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B Kota Depok tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam perluasan akses pendidikan menengah pertama selama lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari peningkatan berkelanjutan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari 92,64% pada tahun 2020 menjadi 97,73% di tahun 2024. Peningkatan bertahap sebesar 5,09 poin persentase ini mengindikasikan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan pendidikan, termasuk program wajib belajar 12 tahun, perluasan akses sekolah, dan peningkatan daya tarik pendidikan kesetaraan Paket B. Terdapat akselerasi pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024 dengan kenaikan 2,89 poin persentase, menunjukkan efektivitas intervensi khusus seperti program afirmasi bagi kelompok rentan, pembangunan unit sekolah baru, atau inovasi layanan pendidikan inklusif.

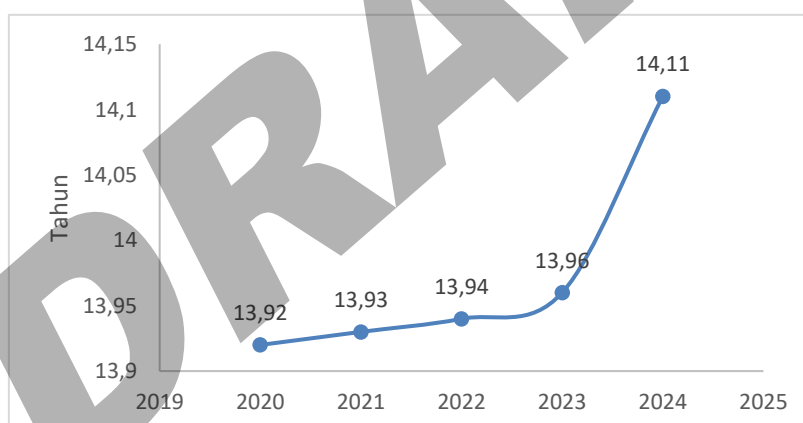
Capaian APK yang mendekati 100% ini merefleksikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengurangi angka putus sekolah di jenjang transisi antara pendidikan dasar dan menengah, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan bagi lulusan SD/MI. Tantangan ke depan adalah mempertahankan momentum ini sambil memastikan bahwa peningkatan kuantitas partisipasi diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang merata di semua satuan pendidikan, termasuk sekolah regular, madrasah, dan pendidikan kesetaraan.

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

Harapan Lama Sekolah di Kota Depok menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023, mengindikasikan komitmen yang kuat terhadap pendidikan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Depok semakin mendapatkan akses pendidikan yang lebih lama, yang mencerminkan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang baik. Kebijakan pemerintah lokal, program pendidikan, dan investasi dalam infrastruktur pendidikan mungkin berkontribusi besar terhadap pencapaian ini. Pada tahun 2023, HLS Kota Depok mencapai 13,96 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma II. Hal tersebut diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.46 Harapan Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Adapun perbandingan capaian HLS dengan target daerah Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55 Perbandingan HLS dengan target daerah Kota Depok Tahun 2019-2024

Harapan Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
Target	14,8	15,06	13,96	13,98	
Realisasi	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	TidakTercapai	

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Capaian nilai Harapan Lama Sekolah Kota Depok berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir tidak tercapai sesuai nilai yang ditargetkan, namun nilai capaian ini tergolong cukup baik dan angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2020. Perbandingan pertumbuhan HLS Kota Depok dengan rata-rata capaian wilayah yang setara tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56 Perbandingan Pertumbuhan HLS Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara Tahun 2020-2024

Wilayah Setara	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju	Capaian	Laju
Provinsi DKI Jakarta	11,13	0,63%	11,17	0,36%	13,08	17,10%	13,33	1,91%	13,51	1,35
Provinsi Jawa Barat	12,5	0,16%	12,61	0,88%	12,62	0,08%	12,68	0,48%	12,80	0,95
Kota Depok	13,92	0,07%	13,93	0,07%	13,94	0,07%	13,96	0,14%	14,11	1,07
Kabupaten Bogor	12,48	0,08%	12,49	0,08%	12,50	0,08%	12,64	1,12%	12,75	0,87
Kabupaten Ciamis	14,06	1,96%	14,2	1,00%	14,28	0,56%	14,29	0,07%	14,30	0,07
Kabupaten Bekasi	13,09	0,08%	13,1	0,08%	13,11	0,08%	13,17	0,46%	13,18	0,08
Kota Bogor	13,41	0,07%	13,42	0,07%	13,43	0,07%	13,45	0,15%	13,51	0,45
Kota Sukabumi	13,47	0,07%	13,58	0,82%	13,59	0,07%	13,60	0,07%	13,62	0,15
Kota Bandung	14,2	0,07%	14,21	0,07%	14,23	0,14%	14,24	0,07%	14,25	0,07
Kota Cirebon	13,12	0,08%	13,13	0,08%	13,14	0,08%	13,16	0,15%	13,17	0,08
Kota Bekasi	14	0,07%	14,1	0,71%	14,11	0,07%	14,12	0,07%	14,14	0,14
Kota Cimahi	13,8	0,07%	13,81	0,07%	13,82	0,07%	13,84	0,14%	13,85	0,07
Kota Tasikmalaya	13,45	0,07%	13,46	0,07%	13,47	0,07%	13,49	0,15%	13,50	0,07
Kota Banjar	13,23	0,08%	13,24	0,08%	13,25	0,08%	13,27	0,15%	13,28	0,08

Sumber : BPS, 2025 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Depok dengan wilayah setara di Jawa Barat dan DKI Jakarta pada periode 2020–2024. Kota Depok konsisten mencatatkan capaian HLS yang relatif tinggi, meningkat dari 13,92 tahun (2020) menjadi 14,11 tahun (2024), dengan laju pertumbuhan tahunan yang stabil namun lambat (berkisar 0,07%–1,07%). Kenaikan signifikan terjadi pada 2024, menandakan adanya intervensi pendidikan yang mulai berdampak, seperti peningkatan akses PAUD atau penguatan transisi pendidikan dasar-menengah.

Jika dibandingkan, capaian HLS Depok lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat (12,80 tahun) dan mendekati Kota Bandung (14,25 tahun), namun masih di bawah Kabupaten Ciamis yang mencapai 14,30 tahun. Meskipun Kota Depok tertinggal dari Ciamis dalam angka absolut, laju pertumbuhan Depok pada 2024 (1,07%) lebih tinggi, mengindikasikan tren perbaikan yang menjanjikan. Sementara itu, DKI Jakarta mengalami lonjakan ekstrem pada 2022 (17,1%), yang kemungkinan besar merupakan efek pembaruan metodologi atau rekalisasi data pascapandemi.

Perbandingan Tingkat Pertumbuhan HLS Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan HLS Kota Depok dengan Rata-rata Capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Harapan Lama Sekolah		2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
	Provinsi Jawa Barat	12,50	12,61	12,62	12,62	12,80
	Kota Depok	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
Tingkat Pertumbuhan	Nasional	0,23%	0,77%	0,15%	0,38%	0,46%
	Provinsi Jawa Barat	0,16%	0,88%	0,08%	0%	1,43%
	Kota Depok	0,07%	0,07%	0,07%	0,14%	1,07%

Sumber : BPS, 2024 (diolah)

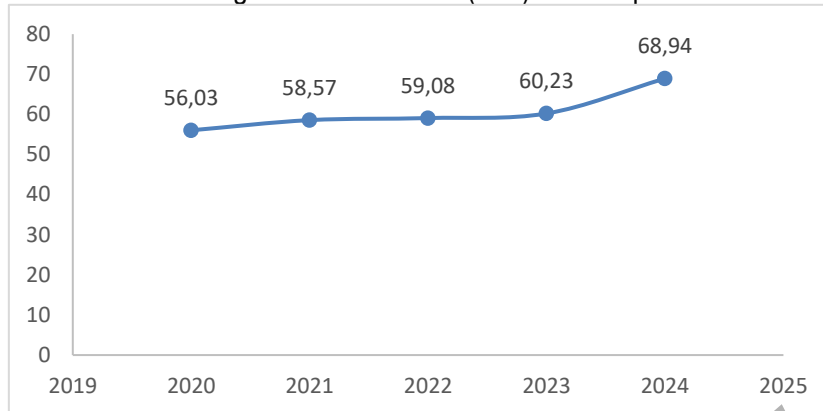
Data perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional selama tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa Kota Depok secara konsisten mencatat capaian HLS tertinggi, yakni naik dari 13,92 tahun (2020) menjadi 14,11 tahun (2024). Meski pertumbuhan tahunannya cenderung rendah pada 2020–2023 (rata-rata hanya 0,07–0,14%), pada 2024 terjadi peningkatan signifikan sebesar 1,07%, mengindikasikan adanya dorongan positif dalam upaya memperpanjang partisipasi pendidikan.

Jika dibandingkan, capaian HLS Provinsi Jawa Barat masih tertinggal, dengan angka 12,80 tahun (2024), namun menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada 2024 (1,43%). Sementara itu, rata-rata nasional berada di tengah, dengan capaian 13,21 tahun pada 2024 dan pertumbuhan yang lebih stabil namun moderat. Artinya, Kota Depok telah melampaui rata-rata capaian nasional dan provinsi secara konsisten, namun dalam aspek laju pertumbuhan, perlu menjaga konsistensi dan mencegah stagnasi seperti yang terjadi pada 2020–2022.

e. Indeks Kegemaran Membaca

Indeks Kegemaran Membaca (IKM) adalah indikator yang mengukur tingkat minat dan kebiasaan membaca suatu populasi dalam suatu wilayah, dengan mempertimbangkan frekuensi membaca, durasi membaca, dan jenis bahan bacaan yang dikonsumsi (buku, media digital, koran, dll.). Indikator ini biasanya menggunakan skala 0-100, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan minat baca yang lebih kuat. Indeks Kegemaran Membaca (IKM) Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.47 Indeks Kegemaran Membaca (IKM) Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok menunjukkan kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan minat baca masyarakat selama lima tahun terakhir. Indeks kegemaran membaca mengalami peningkatan konsisten dari 56,03 pada tahun 2020 menjadi 68,94 di tahun 2024, dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun terakhir (meningkat 8,71 poin). Tren positif ini mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif pembudayaan literasi, seperti penguatan program membaca di sekolah, pengembangan perpustakaan umum dan digital, serta kampanye gemar membaca yang masif. Lonjakan besar pada 2024 menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil nyata.

Namun, untuk mempertahankan momentum ini, perlu dilakukan perluasan akses ke daerah yang masih tertinggal, peningkatan kualitas bahan bacaan, serta evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang telah berjalan agar dapat direplikasi dan ditingkatkan. Pencapaian ini menempatkan Depok pada posisi yang baik untuk menjadi model pengembangan minat baca di tingkat nasional, asalkan komitmen dan inovasi dalam bidang literasi terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

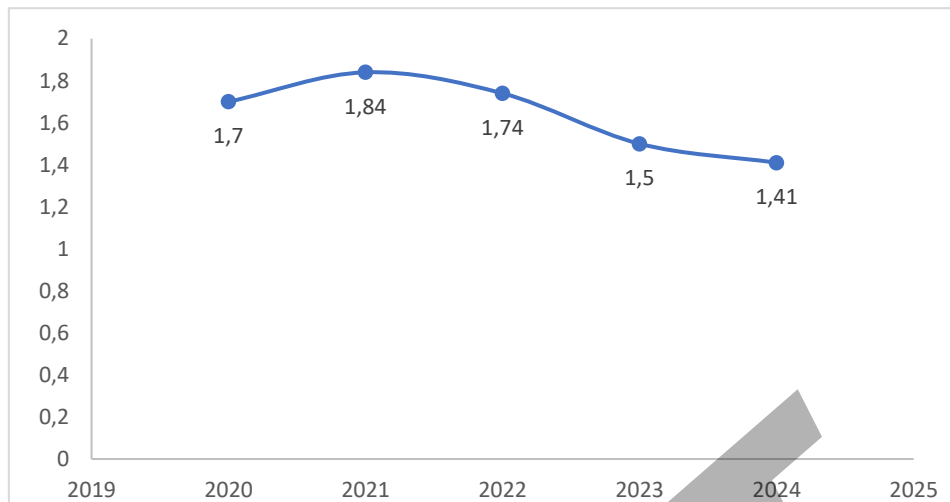
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah sistem jaminan sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika risiko dan guncangan (bencana, pandemi, krisis ekonomi) melalui respons cepat, fleksibel, dan inklusif untuk melindungi kelompok rentan. Konsep ini menggabungkan skema perlindungan tetap (seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan) dengan mekanisme responsif yang dapat diperluas saat terjadi krisis.

a. Indeks Konflik Sosial

Indeks Konflik Sosial adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan tingkat intensitas dan frekuensi konflik dalam suatu wilayah selama periode tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial, agama, dan etnis. Indeks ini digunakan untuk memetakan potensi konflik, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan kebijakan pencegahan serta resolusi konflik

yang efektif. Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2020-2024, tertera pada gambar berikut.



Gambar 2.48 Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2020-2024

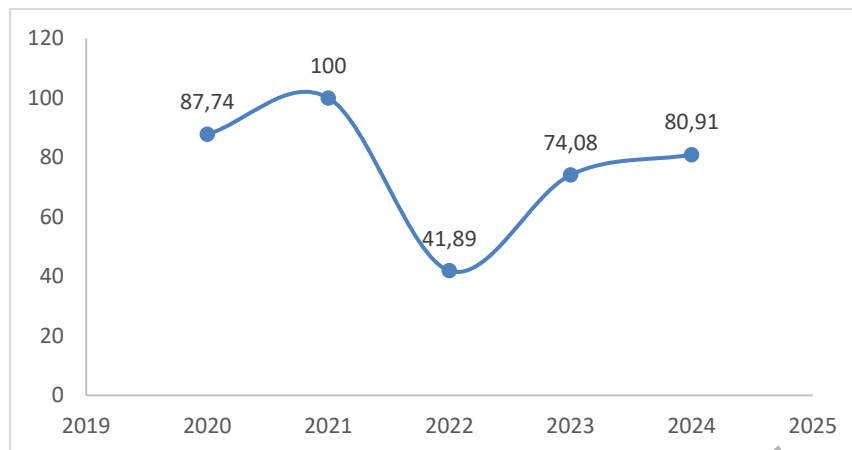
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Konflik Sosial Kota Depok dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika fluktuasi dengan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks konflik berada di angka 1,7, kemudian meningkat menjadi 1,84 di tahun 2021, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak sosial-ekonomi pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, indeks sedikit turun menjadi 1,74, sebelum mengalami penurunan signifikan di tahun 2023 (1,5) dan 2024 (1,41).

Tren penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan resolusi konflik sosial di Kota Depok semakin efektif, baik melalui kebijakan pemerintah, peran masyarakat, atau program perdamaian. Meskipun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap faktor-faktor pemicu konflik, seperti kesenjangan sosial atau isu politik, agar stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat dapat terus terjaga.

b. Persentase PPKS yang Tertangani

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani adalah indikator yang mengukur proporsi penerima manfaat program perlindungan sosial (seperti bantuan tunai, rehabilitasi, atau pendampingan) dari total PPKS yang teridentifikasi dalam suatu wilayah. PPKS mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak jalanan, korban kekerasan, dan masyarakat miskin ekstrem. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.49 Persentase PPKS yang Tertangani Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan data presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Depok dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dalam capaian program tersebut. Pada tahun 2020, persentase penanganan mencapai 87,74%, kemudian meningkat secara maksimal menjadi 100% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis hingga 41,89%, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi atau perubahan kebijakan. Pada tahun 2023, persentase kembali membaik menjadi 74,08%, dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 80,91%. Meskipun belum kembali ke level tertinggi seperti tahun 2021, tren positif dalam dua tahun terakhir menunjukkan upaya perbaikan dan pemulihan dalam penanganan PPKS. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penurunan di tahun 2022 serta penguatan strategi untuk mempertahankan konsistensi dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

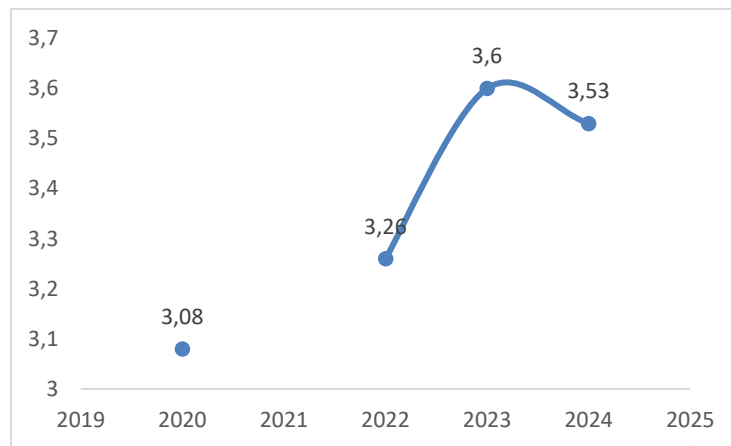
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kemajuan kebudayaan sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang mengukur tingkat harmoni sosial antarumat beragama dalam suatu wilayah, berdasarkan tiga dimensi utama:

- 1) Toleransi: Kesiediaan menerima perbedaan keyakinan dan praktik ibadah.
- 2) Kesetaraan: Tidak adanya diskriminasi dalam akses hak sipil/politik berdasarkan agama.
- 3) Kerja Sama: Kolaborasi lintas agama dalam pembangunan sosial-ekonomi

IKUB Kota Depok tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.50 IKUB Kota Depok tahun 2020-2024

Sumber: Bakesbangpol Kota Depok, 2025 (diolah)

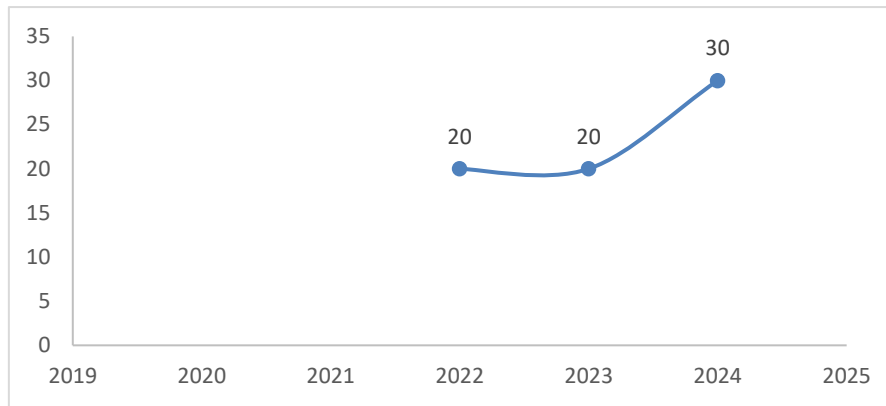
Perkembangan indeks kerukunan umat beragama di Kota Depok dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi. Dari angka dasar 3,08 pada tahun 2020, terjadi peningkatan bertahap menjadi 3,26 di tahun 2022, kemudian mengalami lonjakan signifikan ke 3,60 di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,53, secara keseluruhan Kota Depok berhasil meningkatkan indeks kerukunan sebesar 0,45 poin dalam periode ini.

Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan semakin kuatnya toleransi dan hubungan harmonis antarumat beragama di Depok. Lonjakan di tahun 2023 menjadi indikator kuat bahwa nilai-nilai kerukunan telah semakin mengakar dalam masyarakat. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2024, angka yang tetap berada di atas 3,5 menunjukkan bahwa kerukunan beragama di Depok telah mencapai tingkat yang stabil dan matang.

Perjalanan ini menggambarkan bahwa masyarakat Depok terus berproses menuju kehidupan beragama yang semakin harmonis, dengan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah keberagaman. Tantangan kecil yang muncul di tahun terakhir justru menjadi bahan refleksi bersama untuk terus memperkuat ikatan sosial tanpa mengurangi semangat untuk mencapai kerukunan yang lebih baik di masa depan.

b) Indeks Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah ditengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Indeks Pemajuan Kebudayaan Kota Depok Tahun 2020-2024, diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.51 Indeks Pemajuan Kebudayaan Kota Depok Tahun 2022-2024

Sumber: Disporyata Kota Depok, 2025 (diolah)

Data pemajuan kebudayaan Kota Depok menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir setelah sebelumnya tidak tercatat pada 2020-2021. Pada tahun 2022, persentase pemajuan kebudayaan mencapai 20% dan bertahan di level yang sama di tahun 2023, kemudian mengalami lonjakan sebesar 10 poin menjadi 30% di tahun 2024.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya percepatan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, mungkin didorong oleh implementasi program-program kebudayaan yang lebih intensif atau kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Capaian di tahun 2024 yang mencapai 30% menunjukkan bahwa upaya pemajuan kebudayaan mulai menunjukkan hasil yang nyata, meskipun masih terdapat ruang besar untuk terus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan momentum positif ini sekaligus memperluas cakupan program kebudayaan agar dapat menjangkau seluruh aspek warisan budaya dan seni di Depok.

Obyek pemajuan kebudayaan di Kota Depok adalah seni (seni tari dan seni musik), tradisi lisan dan permainan tradisional dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan. Upaya pelestarian di Kota Depok ini bertujuan untuk menjaga warisan sejarah dan identitas kultural masyarakat setempat, sekaligus memberikan nilai edukatif dan potensi pengembangan pariwisata berbasis budaya. Beberapa wilayah yang menjadi fokus pelestarian cagar budaya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Cagar Budaya yang Sudah Ditetapkan

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
1	Rumah Cimanggis	2018	593/289/Kpts/Disporya ta/Huk/2018	Sukmajaya, Cisalak	106°51'34.3"BT, 6°23'36.4"LS	
2	Sekolah Negri Pancoran Mas 2	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'17.81"BT, 6°24'07.97"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
3	Gereja GPIB Immanuel	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'29.34"BT, 6°24'11.30"LS	
4	Kantor Yayasan Lembaga Coernelis Chastelein (YLCC)	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'31.26"BT, 6°24'10.74"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
5	Rumah Sakit Harapan	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'12.10"BT, 6°24'09.83"LS	
6	Pemakaman Kamboja (Kerkhof)	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'31.83"BT, 6°23'51.48"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
7	Jembatas Panus	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'12.1"BT, 6°24'09.83"LS	
8	Rumah Tinggal Keluarga Eduard Soedira	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'27.95"BT, 6°23'55.67"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
9	Rumah Tinggal Pendeta GPIB Immanuel	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'27.68"BT, 6°24'09.07"LS	
10	SMU KASIH	2019	643/417/Kpts/Disporya ta/Huk/2019	Pancoran Mas, Depok	106°49'30.21"BT, 6°24'09.32"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
11	Makam Syekh Muhammad Yusuf	2021	430/604/Kpts/Disporya ta/Huk/2021	Sukmajaya, Mekarjaya	106°50'29.57"BT, 6°22'50.21"LS	
12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Depok	2021	430/604/Kpts/Disporya ta/Huk/2021	Pancoran Mas, Jl. Pemuda No 53	109°49'32.49"BT, 6°24'07.35"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
13	Kompleks Bangunan Eks Seminari Depok	2021	430/604/Kpts/Disporya ta/Huk/2021	Pancoran Mas, Jl. Stasiun No 7	106°49'04.84"BT, 6°24'19.99"LS	
14	Masjid Jami Al-Ittihad	2021	430/604/Kpts/Disporya ta/Huk/2021	Cipayung, Bojong Pondok Terong	106°48'50.30"BT, 6°24'23.30"LS	

No.	Nama Cagar Budaya	Tahun Penetapan	SK Penetapan	Lokasi Administratif	Koordinat	Foto
15	Rumah Tua Pondok Cina	2021	430/604/Kpts/Disporyata/Huk/2021	Beji, Kemiri Muka	106°48'50.30"BT, 6°24'23.30"LS	

Sumber : Disporyata, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kawasan Depok Lama merupakan salah satu pusat sejarah penting di Kota Depok. Kawasan ini menyimpan sejumlah bangunan peninggalan era kolonial Belanda, seperti rumah ibadah, sekolah, dan hunian khas masyarakat Betawi Depok. Upaya pelestarian yang dilakukan mencakup kegiatan pendokumentasian aset budaya, rehabilitasi bangunan yang memiliki nilai sejarah, serta penataan ulang kawasan berdasarkan pendekatan berbasis nilai-nilai historis. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali karakter asli kawasan sebagai pusat budaya dan sejarah kota.

Rumah Cimanggis menjadi salah satu contoh konkret dari pelestarian bangunan cagar budaya yang telah diakui secara resmi. Bangunan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektural yang tinggi, tetapi juga menjadi simbol keberadaan dan kontribusi komunitas Kristen dalam sejarah Depok. Pelestarian terhadap Rumah Cimanggis dilakukan melalui pendekatan restorasi arsitektural, serta didukung kolaborasi antara pemerintah kota, komunitas lokal, dan kalangan akademisi guna menjamin keberlanjutan nilai-nilai yang dikandungnya.

Kompleks Makam Keramat Beji beserta beberapa situs kuno lainnya turut menjadi objek pelestarian karena nilai historis dan spiritualnya bagi masyarakat lokal. Pelestarian terhadap situs-situs ini melibatkan pengelolaan terpadu yang mencakup pemeliharaan berkala, pengamanan aset, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian untuk menjaga kesinambungan makna kultural yang diwariskan.

Secara keseluruhan, strategi pelestarian cagar budaya di Kota Depok menunjukkan pergeseran dari pendekatan konservasi semata menuju model pelestarian yang lebih partisipatif dan berbasis tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini memungkinkan pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai praktik kolektif yang mengakar dalam kehidupan sosial dan identitas warga kota.

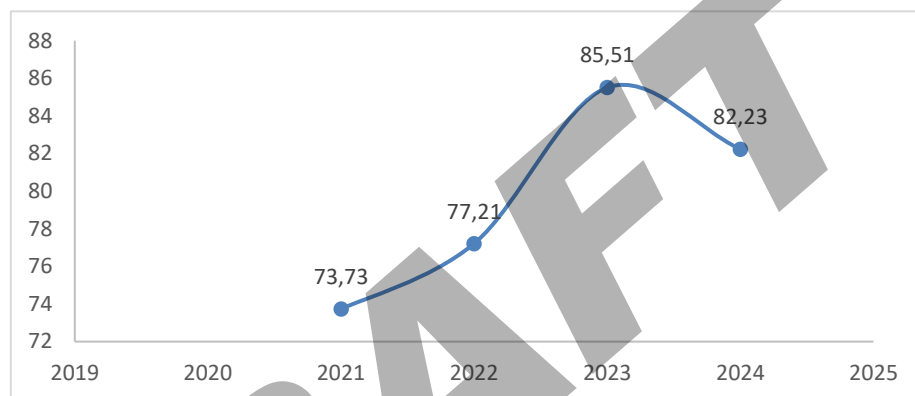
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan masyarakat Inklusif

"Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif" merupakan pendekatan holistik untuk membangun masyarakat yang berketahanan melalui penguatan keluarga (kesehatan, pendidikan, ekonomi), penghapusan diskriminasi gender, dan pemenuhan hak kelompok rentan. Indikatornya meliputi penurunan stunting, peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik, serta ketersediaan fasilitas inklusif, yang selaras dengan SDGs 5 dan 10. Tantangan utamanya adalah mengubah pola pikir patriarkis dan memastikan kebijakan berbasis data inklusif.

a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPK) adalah ukuran kesejahteraan keluarga yang mencakup lima aspek utama: kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial, dengan skala 0-100. Indeks ini membantu pemerintah mengidentifikasi keluarga rentan, mengevaluasi program bantuan, dan merencanakan kebijakan yang tepat sasaran. Data IPK menjadi dasar penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung pencapaian SDGs. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Depok Tahun 2020-2024, diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan keluarga selama empat tahun terakhir, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Dimulai dari data yang belum tersedia pada 2020, indeks melesat dari 73,73 (2021) menjadi 77,21 (2022), kemudian mengalami lonjakan dramatis ke 85,51 di tahun 2023. Namun, di tahun 2024 tercatat sedikit penurunan menjadi 82,23. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 8,5 poin dalam tiga tahun (2021-2024), dengan pertumbuhan tercepat terjadi antara 2022-2023 (8,3 poin).

Pencapaian puncak di tahun 2023 dan kemampuan mempertahankan indeks di atas 82 pada 2024 menunjukkan efektivitas program-program keluarga yang diimplementasikan, meski perlu diwaspadai adanya penurunan terakhir. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan dinamika sosial-ekonomi atau perubahan efektivitas program. Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam membangun ketahanan keluarga, sekaligus menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan terakhir untuk memastikan tren positif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

b. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

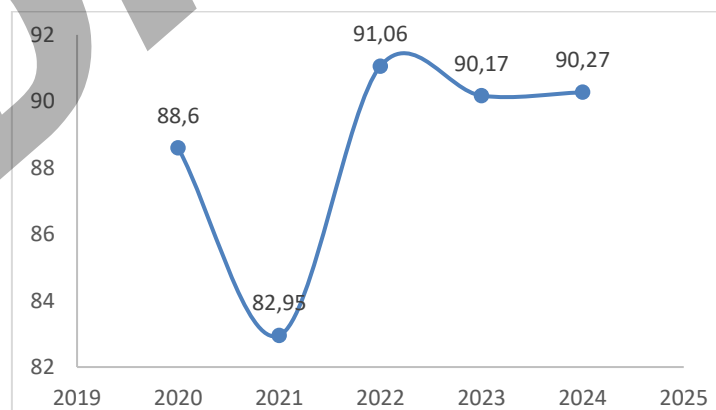
Pembangunan yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan di Kota Depok mencerminkan komitmen untuk menjangkau seluruh kelompok usia, termasuk generasi muda. Salah satu dimensi penting untuk mengukur pembangunan tersebut tercermin dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kondisi fisik remaja, kondisi mental, gaya hidup, serta akses terhadap layanan kesehatan yang layak menjadi alat ukur penting indikator kesehatan dalam IPP.

Provinsi Jawa Barat berhasil memperbaiki indikator angka kesakitan pemuda pada tahun 2022 (dari 11,71 menjadi 10,64). Perbaikan juga terjadi pada persentase pemuda korban kejahatan (dari 1,02 menjadi 0,47); persentase pemuda yang merokok (dari 28,61 menjadi 27,63) dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (dari 16,71 menjadi 6,37). Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan perbaikan IPP di Kota Depok khususnya indikator bidang kesehatan.

c. Indeks Ketahanan Keluarga

Menurut UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Indeks Ketahanan Kota Depok tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.53 Indeks Ketahanan Kota Depok tahun 2020-2024



Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2025 (diolah)

Kota Depok mencatat dinamika yang menarik dalam Indeks Ketahanan Keluarga selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada level yang cukup tinggi (88,60), namun mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 menjadi 82,95, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak

pandemi COVID-19 terhadap stabilitas keluarga. Namun, pemulihan yang luar biasa terjadi di tahun 2022 dengan lonjakan ke 91,06, menunjukkan ketahanan yang kuat dari keluarga-keluarga di Depok.

Meskipun sedikit menurun di tahun 2023 (90,17), indeks berhasil stabil di level yang relatif tinggi pada tahun 2024 (90,27). Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa:

1. Resiliensi keluarga Depok cukup kuat untuk bangkit dari tekanan eksternal;
2. Program pembangunan keluarga pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata;
3. Level ketahanan di atas 90 sejak 2022 menunjukkan kualitas kehidupan keluarga yang baik.

Secara keseluruhan, Kota Depok berhasil mempertahankan ketahanan keluarga di level yang tinggi pasca-pemulihan dari dampak pandemi, dengan rata-rata indeks 5 tahun sebesar 88,61. Capaian ini merefleksikan keberhasilan integrasi antara kebijakan sosial, program keluarga, dan ketahanan masyarakat di Depok. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas ini sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga rentan untuk mencapai target yang lebih tinggi.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui optimalisasi sumber daya lokal, inovasi, dan tata kelola pembangunan yang efektif

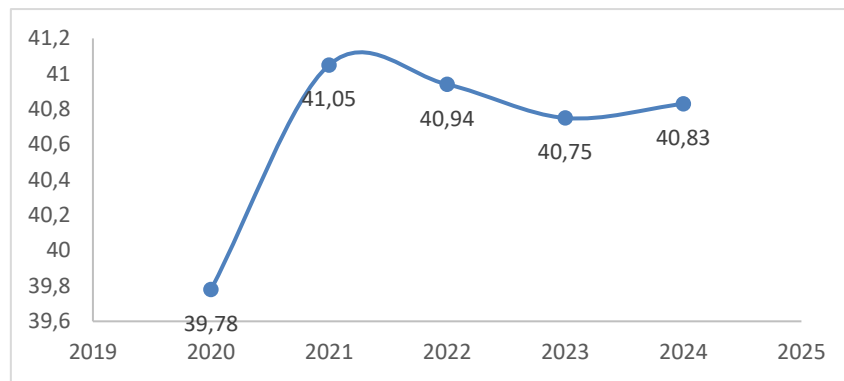
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya Saing Sumber Daya Manusia mencerminkan kemampuan tenaga kerja suatu wilayah dalam bersaing di pasar global, yang ditentukan oleh kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan industri, kesehatan produktif, penguasaan teknologi digital, dan budaya inovasi. Indikator kuncinya meliputi IPM (>75 ideal), tingkat pengangguran terdidik (<5%), dan upah kompetitif, dengan tantangan utama berupa kesenjangan kompetensi di era otomatisasi dan persaingan talenta global.

a) Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah indikator demografis yang mengukur rasio penduduk non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65+ tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka Ketergantungan Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.54 Angka Ketergantungan Kota Depok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Berdasarkan data Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Depok periode 2020–2024, terlihat fluktuasi yang relatif stabil dengan kecenderungan naik moderat. Pada tahun 2020, angka ketergantungan sebesar 39,78, lalu meningkat menjadi 41,05 di 2021—kenaikan yang mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi terhadap lapangan kerja atau perubahan demografi. Namun, angka ini kemudian sedikit turun dan stabil di kisaran 40,7–40,9 pada 2022–2024 (40,94 di 2022; 40,75 di 2023; 40,83 di 2024).

Stabilitas angka ketergantungan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa beban demografis Kota Depok (perbandingan penduduk non-produktif terhadap produktif) tidak mengalami perubahan drastis. Namun, angka di atas 40 mengindikasikan bahwa sekitar 40–41 penduduk usia tidak bekerja (anak dan lansia) bergantung pada setiap 100 penduduk usia produktif. Untuk menekan angka ini, diperlukan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran, terutama mengingat potensi bonus demografi di masa depan.

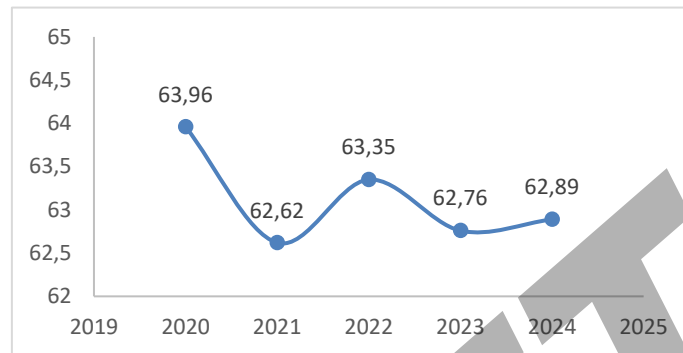
Catatan: Angka ketergantungan yang stabil dapat menjadi sinyal untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan guna memastikan penduduk usia produktif benar-benar berkontribusi optimal bagi pembangunan.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi merupakan tiga pilar kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas untuk mendorong efisiensi dan nilai tambah ekonomi. IPTEK menjadi fondasi melalui penelitian dan pengembangan (litbang) yang menghasilkan temuan baru, sementara inovasi menerapkan temuan tersebut dalam produk/layanan yang bernilai pasar. Produktivitas ekonomi tercermin dari peningkatan output per tenaga kerja atau unit modal, yang didorong oleh adopsi teknologi dan sistem manajemen modern.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) adalah indikator yang mengukur persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, terhadap total populasi usia kerja. TPAK Kota Depok 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.55 TPAK Kota Depok 2020-2024

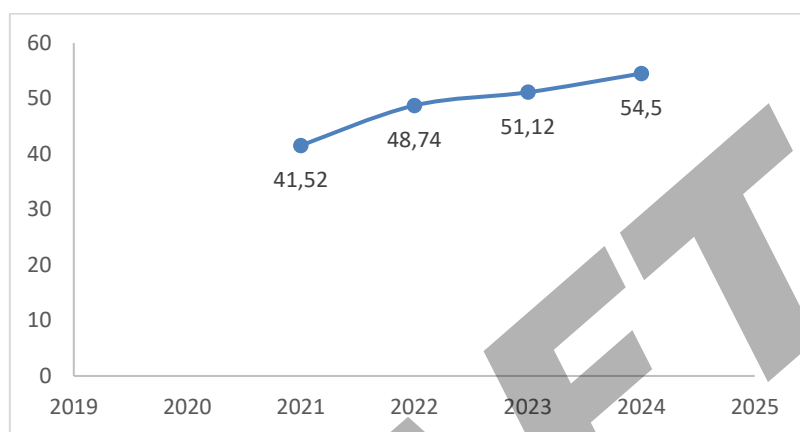
Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari posisi tertinggi 63,96% pada tahun 2020 menjadi 62,89% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan struktural dalam menyerap penduduk usia kerja ke dalam pasar tenaga kerja, terutama pada segmen informal dan sektor non-pertanian. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang belum sepenuhnya terserap, terutama di sektor informal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari separuh penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Depok bekerja di sektor non-pertanian, yang sebagian besar merupakan sektor informal. Ketergantungan pada sektor informal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pekerjaan dan pendapatan, sehingga mempengaruhi keputusan individu untuk aktif dalam angkatan kerja.

Pola ini mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja cenderung stagnan, yang dapat mencerminkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja baru maupun peningkatan daya tarik sektor ketenagakerjaan. Perlu upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap kesempatan kerja agar TPAK dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain memperkuat kapasitas angkatan kerja, kebijakan juga perlu difokuskan pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja di sektor formal yang layak yakni pekerjaan yang menjamin perlindungan tenaga kerja, upah yang adil, dan peluang pengembangan keterampilan sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekaligus kualitas ketenagakerjaan secara menyeluruh.

b) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator komposit yang mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan, mengadopsi, dan mengimplementasikan inovasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



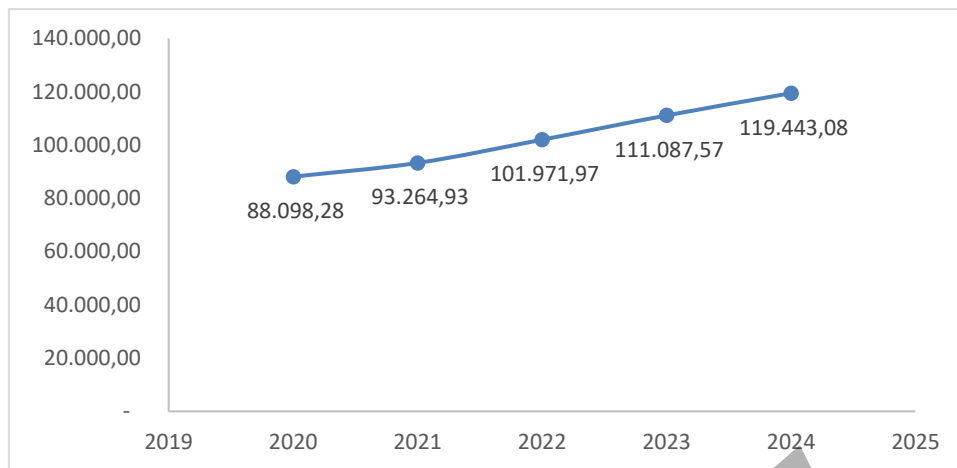
Gambar 2.56 Indeks Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Kota Depok, 2025 (diolah)

Data Indeks Inovasi Daerah Kota Depok tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 41,52 dan mengalami kenaikan menjadi 48,74 pada tahun 2022. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 51,12 dan mencapai 54,5 pada tahun 2024. Meskipun data tahun 2020 tidak tersedia, tren dari tahun-tahun berikutnya menggambarkan adanya komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja inovasi di berbagai bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kapasitas kelembagaan, kreativitas kebijakan, serta dorongan terhadap budaya inovatif di lingkungan pemerintahan Kota Depok. Namun demikian, perlu terus didorong kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kualitas inovasi agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

c) Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)

Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) merujuk pada total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu, yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) tanpa penyesuaian tingkat inflasi. Indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.57 Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) Kota Depok Tahun 2020-2024

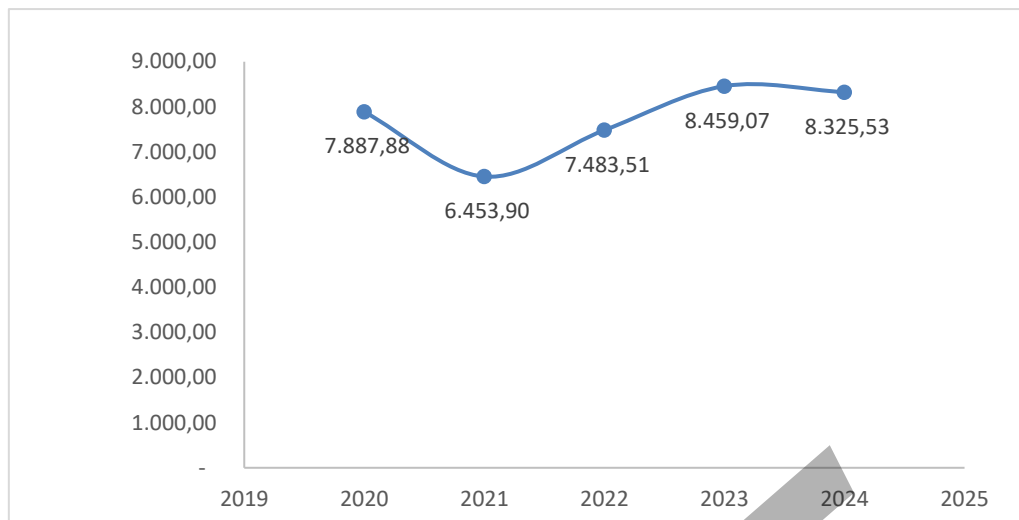
Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Data konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Konsumsi tercatat sebesar Rp88.098,28 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp119.443,08 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 7,9%. Peningkatan ini mencerminkan peran penting rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum, kenaikan ini dapat diartikan sebagai sinyal pemulihan ekonomi pasca pandemi, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok dari sisi pengeluaran.

Namun demikian, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga perlu dilihat secara hati-hati dalam konteks laju inflasi dan biaya hidup. Meskipun tingkat inflasi Kota Depok pada tahun 2024 relatif terkendali, yakni sebesar 1,95%, tingginya rata-rata pengeluaran rumah tangga tetap menjadi perhatian. Hal ini menandakan bahwa sebagian dari kenaikan konsumsi juga mungkin terdorong oleh naiknya harga barang dan jasa pokok, bukan sepenuhnya karena peningkatan daya beli. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Depok perlu memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara merata, serta pengendalian tingkat inflasi yang berkelanjutan.

d) Nilai Investasi

Nilai Investasi mencerminkan total penanaman modal (domestik dan asing) dalam suatu wilayah selama periode tertentu, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transformasi industri. Nilai Investasi Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 2.58 Nilai Investasi Kota Depok Tahun 2020-2024

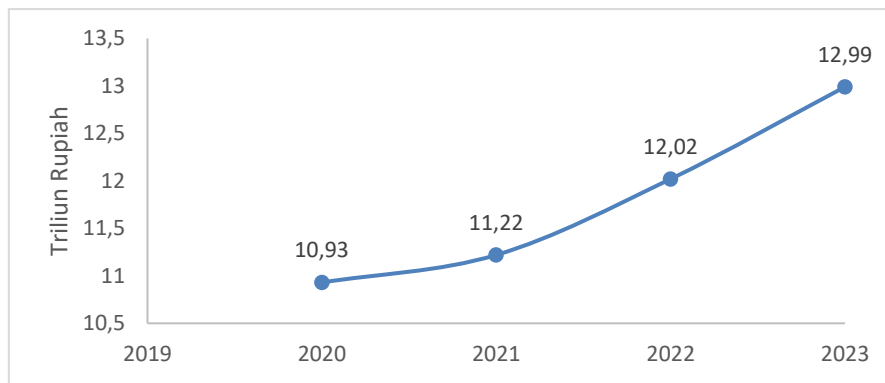
Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Tren investasi di Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara keseluruhan, dengan nilai investasi mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp 8.459,07 miliar dan sedikit menurun menjadi Rp 8.325,53 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan kepercayaan investor pasca pandemi serta meningkatnya daya tarik Kota Depok sebagai lokasi investasi strategis. Berdasarkan data realisasi, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar, didorong oleh tingginya permintaan terhadap perumahan, bangunan komersial, dan infrastruktur logistik. Selain itu, sektor perdagangan, jasa, dan teknologi informasi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan investasi daerah.

Kecenderungan peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Kota Depok serta potensi pertumbuhan sektor-sektor unggulan. Untuk menjaga momentum ini, Pemerintah Kota perlu terus memastikan stabilitas iklim investasi melalui perbaikan regulasi, penyediaan infrastruktur pendukung, serta integrasi kebijakan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

e) PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB Ekonomi Kreatif mengukur kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan dari 17 subsektor kreatif berbasis ide dan kekayaan intelektual. PDRB Ekonomi Kreatif (ADHB) Kota Depok Tahun 2020-2023 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.59 PDRB Ekonomi Kreatif (ADHB) Kota Depok Tahun 2020-2023
Sumber: Diskominfo Kota Depok, 2024 (diolah)

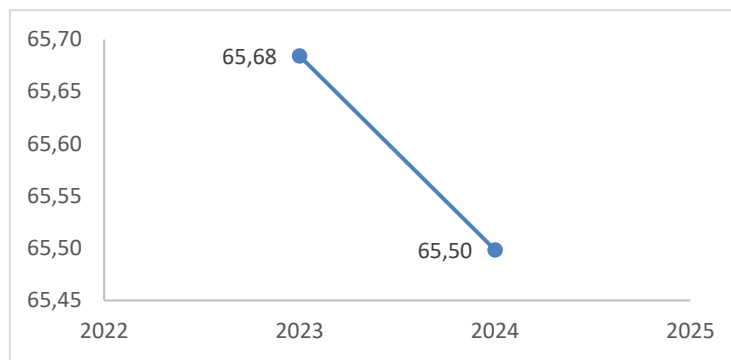
Tren pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif Kota Depok selama periode 2020–2023 menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten. Nilai PDRB ekonomi kreatif meningkat dari Rp10,93 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp12,99 triliun pada tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar 18,85% dalam tiga tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan kontribusi signifikan sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah serta potensi pengembangan lebih lanjut sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Peningkatan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota dalam menciptakan ekosistem kreatif yang mendukung produktivitas pelaku usaha, inovasi, dan digitalisasi.

Tiga subsektor utama yang menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB ekonomi kreatif Kota Depok adalah kuliner, fesyen, dan kriya. Pada tahun 2023, subsektor kuliner memberikan kontribusi terbesar, yaitu 61,62%, diikuti oleh fesyen sebesar 17,16% dan kriya 14,71%. Selain itu, subsektor aplikasi dan pengembangan permainan (game) juga telah ditetapkan sebagai subsektor unggulan daerah dan menjadi identitas kreatif Kota Depok dalam nominasi Jaringan Kota Kreatif UNESCO. Tren ini mencerminkan semakin kuatnya peran ekonomi kreatif dalam struktur perekonomian daerah, didukung oleh potensi SDM yang inovatif dan berkembangnya digitalisasi. Pertumbuhan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor ini memiliki daya saing dan prospek cerah dalam mendorong ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi suatu wilayah dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, serta inklusif terhadap aspek sosial. Dalam konteks Kota Depok, penerapan prinsip ekonomi hijau menjadi sangat relevan mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Data Indeks Ekonomi Hijau Kota Depok tahun 2023-2024 bisa dilihat pada grafik berikut



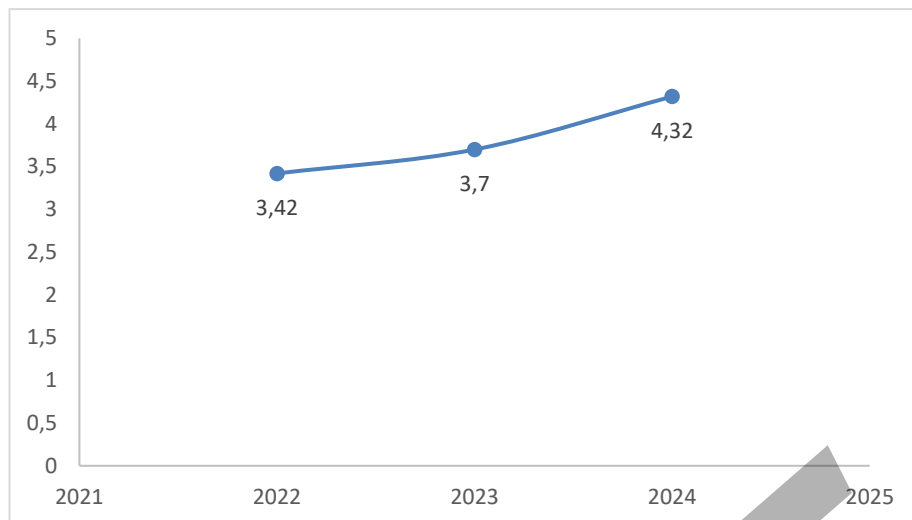
Gambar 2.60 Grafik Indeks Ekonomi Hijau Kota Depok Tahun 2022-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Depok, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Ekonomi Hijau Kota Depok mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu dari 65,68 menjadi 65,50. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya. Meskipun selisihnya relatif kecil, tren penurunan ini perlu dicermati sebagai sinyal bahwa upaya transisi menuju ekonomi hijau mungkin menghadapi hambatan, baik dalam bentuk keterbatasan implementasi kebijakan, belum optimalnya program pengelolaan lingkungan, atau kurangnya partisipasi lintas sektor. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan berkelanjutan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta meningkatkan investasi pada program hijau agar capaian indeks ini dapat kembali meningkat dan mencerminkan komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Indeks SPBE menjadi indikator kunci untuk mengukur sejauh mana transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah diterapkan secara sistematis dan efektif. Pada tahun 2022, nilai indeks SPBE Kota Depok tercatat sebesar 3,42, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 3,70 pada tahun 2023. Lonjakan terbesar terjadi di tahun 2024, ketika indeks SPBE meningkat tajam menjadi 4,32. Kenaikan tajam ini menunjukkan akselerasi nyata dalam digitalisasi birokrasi, baik dari sisi infrastruktur, layanan digital, interoperabilitas data, maupun tata kelola sistem elektronik pemerintahan.



Gambar 2.61 Grafik Indeks SPBE Kota Depok Tahun 2022-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Depok, 2025

Target RPJMD Kota Depok tahun 2026 untuk indikator ini adalah 3,50, yang artinya pada tahun 2024 capaian indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 123,43%. Secara kuantitatif dan kualitatif, ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang mencerminkan keseriusan Pemkot Depok dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Status capaian indikator ini secara resmi adalah “Tercapai”, dan menjadi satu-satunya indikator pada Sasaran 2, sehingga tingkat keberhasilan sasaran ini adalah 100% tercapai.

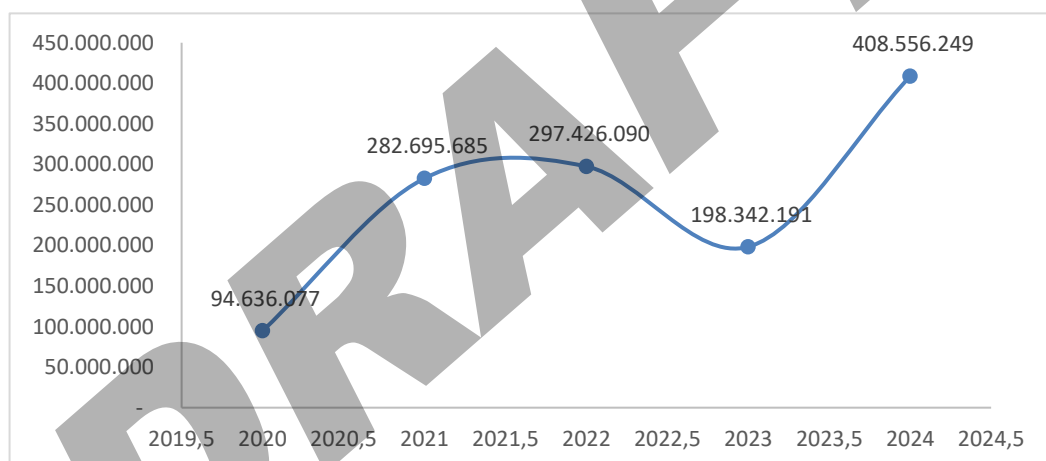
Kenaikan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari sejumlah inovasi digital yang terintegrasi, seperti penerapan layanan publik berbasis daring, penggunaan satu data daerah, integrasi aplikasi layanan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN dalam bidang teknologi informasi. Transformasi ini memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, yang juga berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Namun demikian, meskipun target numerik telah melampaui ekspektasi, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan kualitas implementasi SPBE, terutama dalam aspek interoperabilitas antar sistem, keamanan data, dan perluasan akses teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus tahun 2025–2026 sebaiknya diarahkan pada penguatan ekosistem digital daerah secara menyeluruh, termasuk membangun kolaborasi dengan sektor swasta, memastikan inklusivitas digital untuk kelompok rentan, serta memanfaatkan data besar (big data) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global mencerminkan keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dalam negeri dengan pasar internasional, yang mendorong perluasan pasar, efisiensi produksi, dan alih teknologi. Dalam konteks ini, indikator ekspor bersih perdagangan—selisih antara nilai ekspor dan impor—berfungsi sebagai cerminan kemampuan suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan keterbukaan ekonomi global.

Ekspor bersih yang positif menunjukkan daya saing produk domestik yang tinggi serta sinergi antara produksi lokal dan permintaan global, sementara nilai negatif dapat menandakan ketergantungan pada impor dan lemahnya struktur industri dalam negeri. Oleh karena itu, integrasi ekonomi yang efektif perlu didukung oleh penguatan sektor produksi, peningkatan kapasitas SDM, dan kebijakan perdagangan yang adaptif agar ekspor bersih dapat terus tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekspor Bersih Perdagangan Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.62 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: Disdagin Kota Depok, 2025 (diolah)

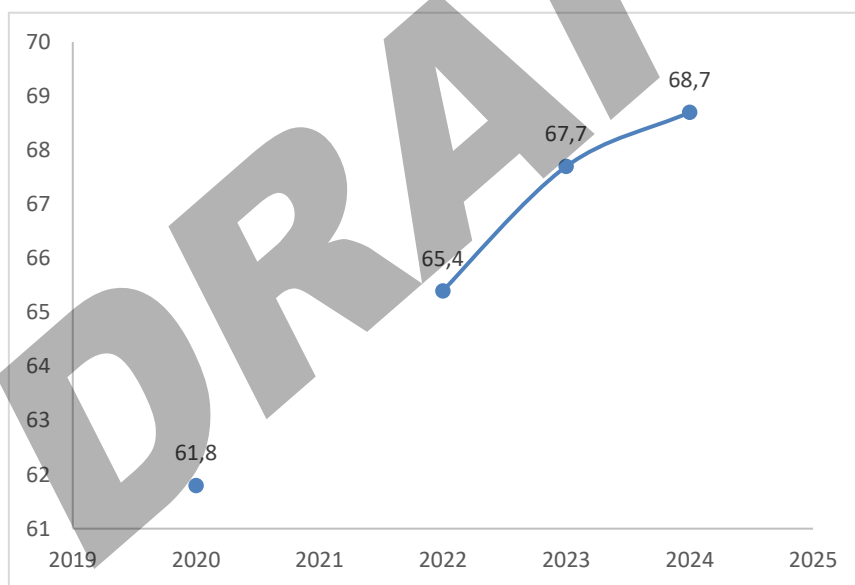
Data ekspor bersih perdagangan Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, ekspor bersih tercatat sebesar US\$94,6 juta dan melonjak hampir tiga kali lipat menjadi US\$282,7 juta pada 2021. Kenaikan ini berlanjut pada 2022 dengan nilai sebesar US\$297,4 juta, sebelum mengalami penurunan pada 2023 menjadi US\$198,3 juta. Namun, pada tahun 2024, ekspor bersih kembali menunjukkan lonjakan tajam hingga mencapai US\$408,6 juta, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika perdagangan luar negeri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, daya saing produk lokal, dan kebijakan perdagangan, namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki potensi ekspor yang terus

berkembang dan semakin kuat berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan berperan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan inovasi yang mendorong pembangunan wilayah secara menyeluruh. Namun, agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan inklusif, kota tidak hanya perlu berkembang secara fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menjadi tempat yang nyaman dan layak huni bagi seluruh penduduknya. Dalam hal ini, indeks kota layak huni menjadi indikator penting untuk menilai kualitas hidup di perkotaan, mencakup aspek lingkungan, infrastruktur, layanan publik, keamanan, serta keterjangkauan hunian.

Indeks ini mencerminkan sejauh mana kota mampu menyediakan ruang hidup yang sehat, produktif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi daya tarik bagi investasi dan mobilitas penduduk. Dengan meningkatkan nilai indeks kota layak huni, maka peran kota sebagai pusat pertumbuhan akan semakin optimal, mendorong pembangunan yang merata dan memperkuat daya saing wilayah secara keseluruhan. Indeks Kota Layak Huni Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.63 Indeks Kota Layak Huni Tahun 2020-2024

Sumber: Disdagin Kota Depok, 2025 (diolah)

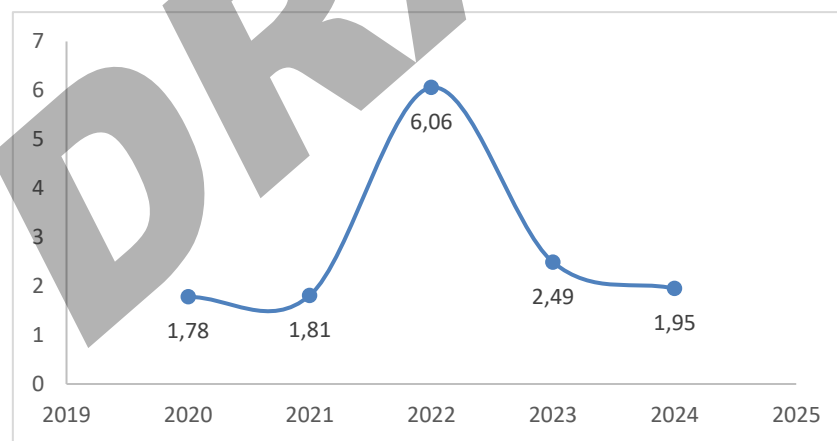
Indeks Kota Layak Huni (IKLH) Kota Depok menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan pembangunan perkotaan. Pada tahun 2020, IKLH Depok berada di angka 61,8, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada 2022 menjadi 65,4, didorong oleh perbaikan infrastruktur, tata kelola lingkungan, dan pelayanan publik. Tren positif terus berlanjut dengan pencapaian 67,7 di tahun 2023 dan 68,7 di tahun 2024, yang menandakan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan

berkelanjutan bagi warganya.

Peningkatan ini juga sejalan dengan pengembangan kawasan permukiman, transportasi umum (seperti integrasi LRT dan KRL), serta penataan ruang terbuka hijau. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai standar kota layak huni yang lebih tinggi, terutama dalam hal pengendalian kepadatan penduduk, pengelolaan sampah, dan mitigasi banjir. Secara keseluruhan, tren naik IKLH Depok menunjukkan kemajuan positif dalam pembangunan perkotaan, meski tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk tetap perlu menjadi perhatian utama ke depan.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan karena menciptakan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung investasi serta konsumsi. Tingkat inflasi menjadi indikator utama stabilitas ini, karena mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. Tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat, sedangkan tingkat inflasi yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu stabilitas, menurunkan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan. Oleh karena itu, menjaga tingkat inflasi dalam batas wajar menjadi prioritas untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2.64 Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Depok, 2025 (diolah)

Selama periode 2020 hingga 2024, laju inflasi Kota Depok menunjukkan tren fluktuatif dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,06% akibat dampak kenaikan harga global dan gangguan rantai pasokan pasca pandemi. Melalui kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi pasokan yang efektif, tingkat inflasi berhasil ditekan menjadi 2,49% pada 2023 dan kembali turun ke 1,95% pada tahun

2024. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tahun 2024 terutama disumbang oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (10,14%), Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (3,73%), serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya (3,19%). Dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat, tingkat inflasi Kota Depok tergolong moderat. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengendalian tingkat inflasi di Kota Depok relatif efektif dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, tekanan harga pada kelompok jasa dan kebutuhan konsumsi harian tetap menjadi perhatian utama. Untuk itu, penguatan koordinasi dalam pengelolaan distribusi, pasokan, serta intervensi pasar tetap diperlukan guna menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang sehat serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.8. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu aspek dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Kinerja pelayanan umum menjadi indikator kemajuan tata kelola dan administrasi pemerintahan serta sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok, sebagai berikut.

2.1.3.9. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Pelayanan umum merupakan salah satu aspek dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, menentukan kualitas interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Kinerja pelayanan umum menjadi indikator kemajuan tata kelola dan administrasi pemerintahan serta sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat ke bawah. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat menjadi kewenangan Provinsi.

Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan di Kota Depok. Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa Pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan Kota Depok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,34	54,54	42,34	65,09	70,92
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	%	108,71	102,86	104,6	104,59	107,27
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	92,64	93,93	94,06	94,84	97,73
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100,95	97,37	97,87	94,20	100,57
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	75,03	77,94	74,80	80,02	87,46
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0,001	0,001	0,002	0,016
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0,001	0,001	0,002	0,008
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
10	Angka Melanjutkan SD/MI	%	112,13	111	111,55	100	109,60
11	Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	123,76	97,62	102,44	113	108,09
12	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	30	337	30	27,91	30
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	409	9	0,005	815	12
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	41	1,19	1,25	39	16
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Rasio	108	100	75,41	89,91	100
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99,88	100	86,27	99,83	100
17	Penduduk yang berusia »15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,87	98,96	70,24	96,53	99,48
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV	%	85,62	91,31	91,34	86,06	90,59

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Depok, 2025

Data indikator kinerja urusan pendidikan Kota Depok tahun 2020–2024 menunjukkan sejumlah capaian positif, namun juga mencerminkan beberapa fluktuasi dan tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami penurunan tajam pada 2022 (42,34%) namun berhasil meningkat signifikan menjadi 70,92% di 2024, mencerminkan pemulihan partisipasi dini pasca pandemi. APK dan APM jenjang SD dan SMP secara umum menunjukkan tren positif, dengan APK SD mencapai 107,27% dan APM SD mencapai 100,57% di 2024, menandakan inklusivitas tinggi. APM SMP juga meningkat dari 75,03% (2020) menjadi 87,46% (2024), mencerminkan perbaikan akses dan keterlibatan di jenjang menengah.

Sementara itu, angka putus sekolah di jenjang SD dan SMP tetap sangat rendah (di bawah 0,02%), dan angka kelulusan kedua jenjang konsisten di angka 100%, menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan siswa hingga lulus. Namun, angka melanjutkan sekolah cenderung fluktuatif, terutama untuk jenjang SMP yang sempat turun pada 2021 (97,62%) namun kembali meningkat hingga 113% pada 2023 sebelum menurun lagi di 2024.

Di sisi lain, data rasio guru-murid dan ketersediaan sekolah terlihat tidak konsisten, bahkan menunjukkan angka yang kemungkinan besar merupakan kesalahan entri (misalnya rasio guru/murid 409 di 2020 dan 0,005 di 2022), yang perlu divalidasi ulang karena dapat memengaruhi keakuratan pengambilan kebijakan. Angka melek huruf usia 15–24 tahun dan penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan pemulihan signifikan pada 2024 setelah penurunan tajam pada 2022, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kendala data atau gangguan layanan pendidikan selama masa pandemi.

Secara umum, kinerja pendidikan Kota Depok menunjukkan tren membaik pada tahun 2024 dengan beberapa indikator kunci telah melampaui capaian awal sebelum pandemi. Namun, perlu penguatan tata kelola data, pemerataan akses PAUD dan SMP, serta perhatian terhadap kesinambungan partisipasi pendidikan lanjutan agar pembangunan sektor pendidikan dapat lebih merata dan inklusif.

b. Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Depok terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui strategi pelayanan yang berkualitas menuju Smart Healthy City dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan. Adapun capaian indikator kinerja kesehatan lainnya pada kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin	1,30	1,39	2,69	3,62	7,15
2	Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup	Poin	998,81	998,61	997,31	996,38	992,85
3	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Poin	1,35	0,38	0,12	3,98	0,60
4	Angka Kematian Neonatal 1000 kelahiran hidup	Poin	1,01	1,05	2,39	1,92	4,60
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Poin	58,45	155,58	56,14	66,40	88,21
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 Balita)	Poin	8,43	6,82	8,7	6,38	6,39
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, per satuan penduduk (Per 1000 penduduk)	Poin	0,090	0,10	0,15	0,19	0,17
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1000 penduduk)	Poin	0,01	0,01	0,01	0,01	0,014
9	Rasio dokter per satuan penduduk (Per 1000 penduduk)	Poin	0,65	1,04	0,58	0,65	0,86
10	Rasio tenaga medis (bidan dan perawat) per satuan penduduk (Per 1000 penduduk)	Poin	0,76		1,34	1,55	1,91
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	72,37	81,18	100	85,55	14,29
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	98,29	100,13	100,01	91,10
13	Cakupan Imunisasi lengkap Universal Child Immunization	%	79,36	84,13	95,24	93,70	61,90
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	73,7	94,56	91,61	96,30	113,27%
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	2	2	1,71	4,76	4,51
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	7,35	8,83	61,73	20,76	49,00
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	47,40	65,65	90,84	97,35	99,94
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	133	158	225,25	344	428,25
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	3,54	1,76	5,70	6,46	16,29
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	NA	66	85,16	97,35	99,94
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	NA	86	59,77	80,36	67,89
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100,00
24	Penderita diare yang ditangani	%	20,79	15,13	35,31	41,18	134,06
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,05	0,01	0,11	0,13	0,10
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,06	20,80	10,93	0,15	17,46
27	Cakupan kunjungan bayi	%	80,03	95,38	100,24	90,29	93,60
28	Cakupan puskesmas	%	345,45	345,5	345,45	345,45	345,45
29	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94,91	96,31	98,96	99,52	91,90
30	Cakupan pelayanan nifas	%	97,38	96,46	100	99,86	90,92
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	62,59	55,48	100	65,89	7,25
32	Cakupan pelayanan anak balita	%	50,75	96,73	100	96,27	90,95

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	105,13	100	96,46	82,65	93,49
34	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	99,30	53,09	89,03	97,40	98,29
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan Persen (RS)	%	100	100	100	100	100
37	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2025

Secara keseluruhan, kinerja urusan kesehatan di Kota Depok menunjukkan berbagai pencapaian yang signifikan dalam periode 2020–2024, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Berbagai indikator kesehatan yang dipantau, seperti angka kematian bayi, angka kelangsungan hidup bayi, dan rasio fasilitas kesehatan per 1000 penduduk, mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang tidak sesuai harapan atau mengalami penurunan. Salah satunya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang pada 2024 mengalami lonjakan signifikan hingga lebih dari 376% dari capaian target. Meskipun demikian, Angka Kelangsungan Hidup Bayi tetap tinggi, menunjukkan bahwa perawatan medis untuk bayi secara umum telah terjaga dengan baik. Hal ini menjadi indikasi penting bahwa meskipun ada masalah pada angka kematian bayi, faktor lain seperti akses ke perawatan neonatal dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayi dapat membantu menurunkan angka kematian yang lebih serius.

Indikator lainnya yang menunjukkan capaian positif adalah Angka Kematian Balita, yang mengalami penurunan signifikan pada 2024, mencapai 151,61% dari target. Pencapaian ini menandakan keberhasilan dalam upaya menurunkan angka kematian balita melalui program-program kesehatan

preventif dan pengobatan dini yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Di sisi lain, Angka Kematian Ibu masih menunjukkan angka yang perlu perhatian lebih, meskipun mencapai 48,57% dari target yang ditetapkan. Peningkatan layanan kebidanan, pengawasan kehamilan, dan fasilitas persalinan dengan tenaga medis yang kompeten tetap menjadi faktor kunci untuk menurunkan angka ini.

Kinerja dalam penyediaan fasilitas kesehatan juga menunjukkan tren positif. Misalnya, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu yang berada di angka 188,89% di 2024 menggambarkan peningkatan signifikan dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan primer, meskipun tantangan distribusi di wilayah tertentu masih perlu mendapat perhatian. Rasio Rumah Sakit dan Dokter per Satuan Penduduk juga mengalami peningkatan yang signifikan, yang memperlihatkan adanya upaya untuk memperbaiki akses ke layanan kesehatan tingkat lanjutan dan tenaga medis di Kota Depok.

Capaian positif lainnya tercatat pada indikator terkait dengan imunisasi, seperti Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan Cakupan Imunisasi Campak pada Anak Usia 1 Tahun, yang masing-masing mencapai 98,41% dan 115,28% pada 2024. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam program imunisasi yang telah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti campak, dan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak-anak Kota Depok.

Selain itu, beberapa indikator yang berhubungan dengan penanganan penyakit infeksi, seperti penanganan gizi buruk pada balita, penemuan penderita penyakit TBC, dan penanganan penyakit diare, menunjukkan capaian yang baik dengan angka 100% di beberapa kategori, menandakan bahwa Kota Depok telah berhasil memberikan perhatian yang serius terhadap kesehatan anak-anak dan pengendalian penyakit menular. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan pada penanganan komplikasi kebidanan dan penanganan komplikasi neonatal, di mana angka penanganan belum mencapai 100%, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem rujukan dan pelayanan di fasilitas kesehatan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, meskipun banyak indikator kesehatan yang menunjukkan capaian yang sangat baik, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian khusus, seperti peningkatan penanganan ibu hamil berisiko tinggi, perbaikan kualitas layanan di fasilitas kesehatan primer, dan penguatan sistem kesehatan untuk mencegah dan menangani penyakit menular. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa akses ke layanan kesehatan berkualitas dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kota Depok, terutama di daerah yang lebih terpencil.

Kinerja kesehatan di Kota Depok telah menunjukkan arah yang positif dengan berbagai upaya yang berhasil dilakukan. Namun, untuk mencapai target kesehatan yang lebih optimal di masa depan, terutama dalam hal menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menangani komplikasi kebidanan

dan neonatal dengan lebih baik, perlu adanya penguatan sistem kesehatan yang lebih komprehensif dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Depok memiliki misi untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan guna mendukung tercapainya visi Bersama Depok Maju. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu prioritas pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membangun infrastruktur yang dapat menunjang sekaligus mempercepat pertumbuhan Kota Depok, mengingat letaknya yang langsung berbatasan dengan Ibu Kota Jakarta, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerataan pembangunan di Kota Depok juga menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kota Depok, sehingga tidak ada lagi persepsi yang menyatakan pembangunan Kota Depok hanya difokuskan di daerah Margonda dan sekitarnya. Capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0.6611	0.6920	0.6920	0.6791	0,72
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /Jam)	%	67.63	67.96	67.00	70.80	78,82
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	%	1.69	2.52	1.65	n/a	1,65
4	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	98.46	98.73	99.13	98.93	99,43
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	3.76	18.28	4.14	n/a	n/a
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	85.97	24.20	91.50	81.88	94,59

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	47.25	35.91	12.10	93.19	93,22
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	42.34	42.34	42.34	42.34	42,34
10	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0.2109	0.2109	0.2109	0.2109	0,21
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	94.31	95.51	97.47	85.99	95,80
12	Persentase areal kawasan kumuh	%	0.14	0.14	0.09	0.09	0,06%
13	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	17.63	20.10	20.90	22.75	
14	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	168.18	203.36	203.09	203.093	201.01
15	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	0.87	0.88	1.1	1.09	1,07

Sumber: Dinas PUPR, DLHK, Setda, Rumkim Kota Depok, 2025

Secara keseluruhan, kinerja urusan infrastruktur di Kota Depok antara tahun 2020 dan 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, meskipun masih terdapat area yang perlu perhatian lebih untuk memastikan kualitas dan pemerataan yang lebih baik. Dalam sektor transportasi, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan bertahap, dari 0,6611 pada 2020 menjadi 0,72 pada 2024. Ini mencerminkan upaya konsisten dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan di kota tersebut. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan, dengan capaian 78,82% pada 2024, meningkat dari 67,63% pada 2020. Peningkatan ini mencerminkan usaha yang berhasil dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas penduduk.

Namun, persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase masih tergolong rendah, meskipun ada sedikit peningkatan dari 1,69% pada 2020 menjadi 1,65% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pembangunan trotoar dan drainase yang memadai, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki, serta mencegah masalah genangan dan banjir. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar tidak tercatat dalam data, yang menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik dan pemanfaatan lahan sempadan jalan dan sungai masih menjadi tantangan bagi pemerintah kota.

Dalam hal pengelolaan lingkungan, Persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan angka yang sangat positif, dengan capaian 99,43% pada 2024, meningkat dari 98,46% pada 2020. Ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan fasilitas sanitasi di tingkat rumah tangga. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar mengalami fluktuasi, dengan pencapaian 18,28% pada 2021 yang menurun menjadi 4,14% pada 2022, namun tidak ada data yang tersedia untuk 2023 dan 2024, menunjukkan perlunya upaya untuk menanggulangi pemanfaatan ruang sempadan sungai yang tidak sesuai aturan.

Persentase drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan signifikan dari 85,97% pada 2020 menjadi 94,59% pada 2024, menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir. Tidak terjadinya genangan lebih dari 2 kali setahun juga menunjukkan pencapaian yang menggembirakan, dengan angka 93,22% pada 2024, meningkat drastis dari hanya 12,10% pada 2022. Hal ini mengindikasikan efektivitas upaya pemerintah dalam mengatasi masalah genangan dan banjir.

Di sektor air bersih, Persentase penduduk yang berakses air minum terus menunjukkan peningkatan, meskipun terjadi penurunan signifikan pada 2023 (85,99%), yang kemudian kembali meningkat ke 95,80% pada 2024. Secara keseluruhan, angkanya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan 94,31% pada 2020, mencerminkan kesuksesan dalam penyediaan akses air bersih meskipun ada tantangan di tahun 2023.

Persentase areal kawasan kumuh menurun dengan signifikan dari 0,14% pada 2020 menjadi 0,06% pada 2024, menunjukkan pengurangan kawasan kumuh yang efektif dalam proses urbanisasi dan pemukiman. Di sisi lain, Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan terus meningkat, mencapai 22,75% pada 2024, meskipun masih perlu peningkatan lebih lanjut untuk mengelola sampah secara berkelanjutan di perkotaan.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tahun 2024 sebesar 201.01 yang menurun dari tahun 2023 sebesar 203.093. Meskipun rasio menurun tipis, angka 201,01 masih lebih tinggi dibanding periode 2019–2020, mencerminkan penambahan lahan TPU dan optimalisasi tata letak pemakaman. Penurunan kecil ini memerlukan pemantauan proyeksi penduduk lansia agar lahan tetap mencukupi. Begitu juga dengan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, yang menunjukkan sedikit fluktuasi dengan 1,07 pada 2024, dibandingkan dengan 0,87 pada 2020, yang mencerminkan peningkatan jumlah fasilitas ibadah sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Secara keseluruhan, meskipun banyak indikator yang menunjukkan pencapaian positif, beberapa sektor infrastruktur seperti pengelolaan trotoar, drainase, dan kawasan yang tertib masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai kualitas dan pemerataan yang lebih baik di seluruh

wilayah Kota Depok. Pencapaian yang signifikan pada pengelolaan sanitasi, air bersih, dan pengurangan kawasan kumuh menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depannya, diperlukan fokus lebih lanjut pada pengelolaan infrastruktur jalan, ruang publik, serta pengelolaan sampah yang lebih efektif untuk mendukung kehidupan perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	36.16	36.16	36.16	36.16	34.16
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	76.49	75.24	77.50	99.24	99.24

Sumber: Dinas PUPR Kota Depok, 2025

Pada urusan penataan ruang Kota Depok, dua indikator yang diukur adalah rasio luas kawasan tertutup pepohonan dan ketaatan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Rasio luas kawasan tertutup pepohonan, yang mengukur persentase luas daratan yang tertutup oleh pepohonan berdasarkan citra satelit dan survei foto udara, menunjukkan angka yang tetap di 36,16% pada periode 2020 hingga 2022, dengan sedikit penurunan pada 2024 menjadi 34,16%. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, mengindikasikan adanya pengurangan kawasan hijau di Kota Depok, yang bisa disebabkan oleh konversi lahan untuk pembangunan. Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan ruang terbuka hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, ketaatan terhadap RTRW menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada 2020, ketaatan terhadap RTRW tercatat hanya 76,49%, namun angka ini meningkat pesat menjadi 99,24% pada 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam penerapan dan pengawasan terhadap peraturan tata ruang di Kota Depok. Kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan ruang telah menghasilkan perencanaan yang lebih teratur dan sesuai dengan rencana, sehingga pengelolaan tata ruang menjadi lebih efisien dan terarah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan kecil pada rasio kawasan tertutup pepohonan, pencapaian yang sangat baik pada indikator ketaatan terhadap RTRW menunjukkan bahwa Kota Depok telah berhasil dalam menata ruangnya dengan lebih baik. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau dan melakukan pemantauan serta evaluasi yang

lebih lanjut untuk mengurangi konversi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan keberlanjutan kota.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman tak luput dari fokus pembangunan Kota Depok yang notabene berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta. Seperti diketahui bahwa kota Depok banyak dijadikan sebagai daerah tempat bermukimnya para pekerja yang bekerja di Wilayah DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap perumahan semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga berupaya menjamin masyarakat Kota Depok mendapatkan rumah yang layak huni beserta fasilitas-fasilitas yang mendukungnya. Oleh karena itu, kebijakan dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perumahan dan kawasan permukiman tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok, sehingga dapat membantu terwujudnya misi Kota Depok yaitu mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman. Tabel dibawah ini menyajikan capaian indikator kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman Kota Depok Tahun 2020-2024.

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,2084	0,209	0,209	0,220	0,2215
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,9984	0,9984	0,9703	0,9992	0,9995
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95,50	96,10	96,27	96,85	97,18
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	9,96	3,27	3,51	4,35	4,82
5	Persentase permukiman yang tertata	%	99,84	99,84	99,89	99,93	99,95
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,14	0,14	0,09	0,06	0,041
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	78,83	78,83	86,60	90,57	91,56
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	4,50	3,90	3,90	3,91	3,93
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	71,62	71,31	73,57	76,59	77,05

Sumber: Disrumkim Kota Depok, 2025

Urusan permukiman dan perumahan di Kota Depok menunjukkan beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan dalam kualitas perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup di

daerah tersebut. Rasio rumah layak huni menunjukkan angka yang konsisten pada 0,2084 hingga 0,2215 pada 2024, yang mengindikasikan peningkatan kualitas rumah layak huni. Namun, peningkatan ini tergolong lambat dibandingkan dengan kebutuhan perumahan yang terus berkembang. Sementara itu, rasio permukiman layak huni hampir selalu mendekati 1 (0,9995 pada 2024), menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman di Kota Depok sudah memenuhi standar kelayakan. Hal ini mencerminkan upaya yang baik dalam memperbaiki kualitas permukiman, meskipun masih ada beberapa kawasan yang memerlukan perhatian lebih.

Terkait dengan cakupan ketersediaan rumah layak huni, angka ini meningkat secara stabil dari 95,50% pada 2020 menjadi 97,18% pada 2024, menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan rumah yang layak bagi warganya. Namun, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau tetap rendah, hanya mencapai 4,82% pada 2024, yang mengindikasikan keterbatasan dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Persentase pemukiman yang tertata tetap tinggi, hampir mencapai 100% sepanjang periode, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemukiman di Kota Depok telah teratur dan terorganisir dengan baik. Selain itu, persentase lingkungan pemukiman kumuh menurun tajam dari 0,14% pada 2020 menjadi 0,041% pada 2024, yang menandakan adanya upaya yang sukses dalam mengurangi pemukiman kumuh.

Namun, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan meningkat dari 78,83% pada 2020 menjadi 91,56% pada 2024, yang menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan pemukiman di area perkotaan, terutama terkait dengan konversi lahan dan urbanisasi yang cepat. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sedikit meningkat dari 3,90% pada 2020 menjadi 3,93% pada 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan pemukiman kumuh, rumah tangga di daerah kumuh tetap stabil.

Akhirnya, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana Sarana Umum) menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 71,62% pada 2020 menjadi 77,05% pada 2024, yang menandakan bahwa kualitas hidup masyarakat di lingkungan perumahan semakin membaik seiring dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung.

Secara keseluruhan, Kota Depok telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan perumahan dan pemukiman, dengan beberapa indikator menunjukkan perbaikan kualitas yang baik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyediakan perumahan terjangkau dan mengatasi masalah pemukiman kumuh di kawasan perkotaan yang terus berkembang.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu layanan urusan wajib terpenting pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Salah satu misi Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera adalah mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman. Dengan Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Kota Depok Menyusun program-program yang berdasarkan indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	22	27	27	22,78	24,39
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	73,02	100	100	74,88	52,09
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	n/a	87,75	100	100	90,81
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	84	100	77	83,19	86,52
5	Persentase Penegakan PERDA	%	87,32	88	88	90,14	47,89

Sumber: Satpol PP, Damkar Kota Depok, 2025

Indikator kinerja dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Depok menunjukkan perkembangan yang variatif antara tahun 2020 hingga 2024. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami sedikit peningkatan dari 22% pada 2020 menjadi 24,39% pada 2024. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan peran Linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Namun, angka ini masih tergolong rendah dan menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan jumlah personel Linmas agar dapat lebih efektif menjalankan tugasnya.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Setelah mencapai 100% pada 2021 dan 2022, angka ini menurun tajam pada 2023 menjadi 74,88% dan lebih rendah lagi pada 2024 dengan 52,09%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelesaikan pelanggaran terkait ketertiban, yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih tegas dan efektif.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tetap sangat baik, dengan angka 100% pada 2022 dan 2023, meskipun sedikit turun menjadi 90,81% pada 2024. Capaian ini menunjukkan kesiapsiagaan yang sangat baik dalam menghadapi bencana kebakaran, tetapi penurunan pada 2024 perlu dievaluasi untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas dalam pelayanan.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) dalam daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menunjukkan angka yang cukup stabil. Meskipun ada sedikit penurunan dari 100% pada 2021 menjadi 86,52% pada 2024, angka ini masih menunjukkan waktu tanggap yang baik dalam menghadapi kejadian kebakaran. Pengelolaan waktu tanggap ini masih berada dalam batas yang dapat diterima, namun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Persentase Penegakan PERDA menunjukkan angka yang cukup tinggi pada 2020 (87,32%) dan meningkat pada 2021-2022 (88%). Namun, pada 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 90,14%, sebelum mengalami penurunan drastis pada 2024 ke angka 47,89%. Penurunan ini sangat signifikan dan menunjukkan adanya kendala besar dalam penegakan peraturan daerah (PERDA) yang perlu segera diperbaiki. Hal ini menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa ketertiban umum tetap terjaga di Kota Depok.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan yang dicapai dalam sektor perlindungan masyarakat dan ketertiban umum, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan penegakan PERDA, penyelesaian pelanggaran ketertiban, dan pemeliharaan cakupan pelayanan bencana. Evaluasi lebih lanjut dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta petugas Linmas akan menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa depan.

f. Sosial

Pesatnya pembangunan di kawasan kota juga menyimpan potensi bagi munculnya masalah sosial, tak terkecuali di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok mengusung misi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing untuk menangani permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Misi tersebut dijawabntahkan kedalam berbagai program penanganan masalah sosial yang efektif dan efisien. Capaian indikator kinerja urusan sosial Kota Depok tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	72,25	60,78	38	66,71	87,42

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase PPKS yang tertangani	%	87,74	70,92	41,89	74,08	80,91
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	68,68	59,58	25,51	51,58	72,14
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, (persen)	%	n/a	n/a	17,65	25,00	25,00
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	1,71	1,71	6	7,50	7,50
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	40	58,23	100	100	na
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	27,64	58,85	22	30,28	na

Sumber: Dinas Sosial Kota Depok, 2025

Indikator kinerja dalam urusan sosial di Kota Depok menunjukkan perkembangan yang bervariasi, mencerminkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS). Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Dari 72,25% pada 2020, angka ini turun pada 2021 ke 60,78% dan bahkan mencapai 38% pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, capaian ini meningkat drastis ke 66,71% dan 87,42% masing-masing. Peningkatan yang signifikan pada 2024 menunjukkan upaya yang lebih efektif dalam distribusi bantuan sosial kepada PPKS.

Persentase PPKS yang tertangani juga mengalami fluktuasi yang cukup besar, dimulai dari 87,74% pada 2020, menurun tajam menjadi 41,89% pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 74,08% pada 2023 dan 80,91% pada 2024. Penurunan yang tajam pada 2022 dapat menunjukkan tantangan dalam penanganan kasus PPKS, namun upaya perbaikan pada 2023 dan 2024 mencerminkan peningkatan dalam respons terhadap kebutuhan masyarakat rentan ini.

Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 68,68% pada 2020 menjadi 25,51% pada 2022. Angka ini kembali meningkat pada 2023 dan 2024, mencapai 51,58% dan 72,14% berturut-turut. Penurunan pada 2022 dapat menandakan adanya kendala dalam distribusi bantuan yang tepat sasaran, namun capaian 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS.

Indikator terkait dengan panti sosial juga mengalami perkembangan. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya menunjukkan peningkatan yang positif, dari tidak ada data pada 2020 dan 2021, menjadi 17,65% pada 2022 dan tetap pada angka 25% pada 2023 dan 2024. Ini menunjukkan adanya usaha untuk memberdayakan panti sosial dalam pengelolaan ekonomi sosial, meskipun angka ini masih relatif rendah.

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial mengalami sedikit peningkatan dari 1,71% pada 2020 menjadi 7,50% pada 2024. Meskipun ada peningkatan, angkanya masih jauh dari harapan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal di panti sosial.

Capaian untuk korban bencana sangat positif, dengan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tetap mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan yang sangat baik dalam memberikan bantuan sosial selama masa tanggap darurat bencana.

Namun, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 40% pada 2020 menjadi 100% pada 2022 dan 2023. Capaian 2024 tidak tersedia, namun angka 100% pada 2022 dan 2023 mencerminkan peningkatan kemampuan dalam penanganan evakuasi korban bencana.

Indikator terakhir, yaitu persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, mengalami peningkatan signifikan dari 27,64% pada 2020 menjadi 58,85% pada 2021. Namun, penurunan kembali terlihat pada 2022 (22%) dan 2023 (30,28%), dengan data 2024 tidak tersedia. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam memperluas akses jaminan sosial kepada penyandang cacat dan lanjut usia yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada pencapaian yang signifikan dalam perlindungan sosial di Kota Depok, tantangan tetap ada, terutama dalam distribusi bantuan sosial dan penanganan jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Evaluasi lebih lanjut dan peningkatan kebijakan sosial dapat meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di masa depan.

2.1.3.10. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap daerah, di samping faktor alam dan faktor modal. Walaupun suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan modal yang besar, tenaga kerja tetap dibutuhkan sebagai salah satu faktor produksinya. Tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang merupakan faktor produksi tidak hanya berperan penting dalam peningkatan jumlah produksi, tetapi juga dapat mendorong naiknya pendapatan daerah. Tingginya pendapatan daerah memungkinkan terbentuknya tabungan, baik tabungan masyarakat, tabungan perusahaan, atau tabungan pemerintah. Tabungan adalah sumber investasi untuk perluasan usaha, sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Depok juga menganggap penting urusan tenaga kerja dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	15,56	7,01	5,04	1,90	1,82
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	45,95	40	64,52	40	45
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	56,96	43,42	44,37	42,39	42,85
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	74,32	66,14	5,44	52	4,62
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	58,82	73	35	62	66,26
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	pelatihan berbasis masyarakat						

Sumber: Disnaker dan BPS Kota Depok, 2025

Indikator kinerja dalam urusan tenaga kerja di Kota Depok menunjukkan berbagai tantangan dan perkembangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, dari 15,56% pada 2020 menjadi hanya 1,82% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam hubungan industrial dan pengelolaan sengketa antara pengusaha dan pekerja, yang dapat menjadi indikasi keberhasilan dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Dari 45,95% pada 2020, angka ini turun menjadi 40% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 64,52% pada 2022, dan kembali turun menjadi 40% pada 2023 dan 45% pada 2024. Meskipun ada penurunan pada 2023, data ini menunjukkan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menyelesaikan kasus ketenagakerjaan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dari 56,96% pada 2020, angka ini turun ke 42,39% pada 2023 dan sedikit meningkat menjadi 42,85% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam menempatkan pencari kerja di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Upaya yang lebih intensif dalam memfasilitasi pencari kerja agar dapat terserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja perlu ditingkatkan.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan penurunan yang drastis dari 74,32% pada 2020 menjadi hanya 4,62% pada 2024. Penurunan ini sangat signifikan dan menandakan adanya penurunan partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini mungkin berkaitan dengan permasalahan akses dan kesadaran yang masih rendah di kalangan pekerja, yang perlu menjadi fokus perbaikan dalam kebijakan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan peningkatan yang positif dari 58,82% pada 2020 menjadi 66,26% pada 2024. Angka ini mencerminkan adanya upaya yang lebih baik dalam memberikan pelatihan berbasis kompetensi

untuk tenaga kerja agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di tingkat lokal maupun nasional.

Sementara itu, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tetap konsisten di angka 100% setiap tahunnya sejak 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memberikan akses pelatihan kepada seluruh tenaga kerja di masyarakat, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan berbagai sektor pekerjaan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan dalam beberapa indikator, seperti partisipasi dalam program Jamsostek dan penempatan pencari kerja, ada sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan, terutama dalam mengurangi sengketa pengusaha-pekerja dan peningkatan pelatihan berbasis kompetensi. Namun, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan peningkatan partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial dan strategi yang lebih efektif untuk menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1,05	1,17	1,42	0,19	0,70
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	26	26	26	26	28,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	3,12	9,63	48,53	48,53	48,93
4	Rasio KDRT	%	0,021	0,00011	0,00025	0,00021	0,004800
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	47,57	47,92	47,36	46,99	46,8
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	90	111,11	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	61,54	68,75	75	75
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	1,83	0	0	0	0
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2025

Indikator kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Depok menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan yang tajam, dari 1,05% pada 2020 menjadi hanya 0,70% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor pemerintahan dan kebijakan yang mendukung representasi mereka.

Di sisi lain, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR tetap stabil di angka 26% pada 2020 hingga 2023, dan sedikit meningkat menjadi 28% pada 2024. Meskipun ada kenaikan, angka ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di lembaga legislatif masih perlu didorong lebih lanjut agar lebih mencerminkan proporsi populasi perempuan.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,12% pada 2020 menjadi 48,93% pada 2024, mencerminkan adanya kesadaran dan kebijakan yang lebih terbuka terhadap pemberdayaan perempuan di sektor swasta, yang sangat positif untuk kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Tingkat rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengalami fluktuasi dari 0,021% pada 2020 menjadi 0,0048% pada 2024, meskipun terjadi penurunan, angka ini masih menunjukkan adanya masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam pencegahan KDRT sangat diperlukan untuk menurunkan angka tersebut lebih jauh.

Partisipasi angkatan kerja perempuan sedikit mengalami penurunan, dari 47,57% pada 2020 menjadi 46,8% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, yang mungkin terkait dengan faktor sosial-ekonomi dan kebijakan terkait keluarga dan pekerjaan.

Dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kota Depok berhasil menjaga kualitas layanan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial dengan angka 100% pada 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa sistem perlindungan korban kekerasan yang ada di Kota Depok berjalan dengan baik dan memberikan dukungan yang efektif kepada korban kekerasan.

Namun, cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan mengalami penurunan signifikan, dengan angka 0% pada 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pemulihan masih perlu perbaikan dalam hal pemenuhan kebutuhan korban untuk kembali ke masyarakat secara aman dan terdukung.

Cakupan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengalami penurunan dari 100% pada 2020 menjadi 75% pada 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penanganan kasus hukum, tantangan dalam mempercepat proses penyidikan dan pengadilan kasus kekerasan masih perlu diatasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan, seperti peningkatan partisipasi perempuan di sektor swasta dan peningkatan cakupan layanan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum, ada beberapa area yang perlu perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan

partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan penegakan hukum dan layanan pemulangan korban kekerasan.

c. Pangan

Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Depok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama (beras)	Ton	241.794	246.877	197.409	204.215	925.259,60
2	Ketersediaan energi perkapita perkapita	Kalori/ Kapita/ Hari	2.734,97	2.779,04	2.574,82	n/a	n/a
3	Ketersediaan protein perkapita	Gram/ Kapita/ Hari	88,59	89,96	82,42	n/a	n/a
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	85,05	95,00	n/a

Sumber: DKP3 Kota Depok, 2025

Kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada indikator utama seperti ketersediaan pangan, energi, dan protein. Ketersediaan pangan utama (beras) mengalami lonjakan yang sangat besar pada tahun 2024, dari 204.215ton pada 2023 menjadi 925.259,60 ton. Peningkatan lebih dari 4 kali lipat ini menandakan adanya peningkatan pasokan yang luar biasa, yang bisa disebabkan oleh optimalisasi rantai pasok, impor, distribusi regional, atau intervensi program pangan dari pemerintah pusat/daerah. Namun, angka ini perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi akurasi dan keberlanjutan, karena lonjakan sebesar itu cenderung tidak biasa dalam konteks pertumbuhan tahunan normal.

Sementara itu, ketersediaan energi per kapita menunjukkan tren penurunan dari 2.779,04 kalori/kapita/hari pada 2021 menjadi 2.574,82 kalori/kapita/hari di tahun 2022, dengan data 2023–2024 yang tidak tersedia. Penurunan ini perlu dicermati karena dapat berimplikasi pada asupan gizi masyarakat. Jika tidak dikompensasi dengan peningkatan kualitas pangan lain, penurunan ini bisa berdampak pada status kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Hal serupa juga terjadi pada indikator ketersediaan protein per kapita, yang menurun dari 89,96 gram/kapita/hari pada 2021 menjadi 82,42gram pada 2022. Sekalipun angka tersebut masih berada di atas standar minimum kebutuhan protein harian (sekitar 57 gram), tren penurunan ini

perlu diwaspadai karena protein adalah makronutrien penting bagi pertumbuhan dan kekebalan tubuh. Tidak tersedia data tahun 2023 dan 2024 juga menyulitkan untuk memastikan apakah tren ini berlanjut atau membaik.

Dari sisi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, capaian pada 2020 dan 2021 sempurna di angka 100%, namun menurun menjadi 85,05% pada 2022 sebelum kembali naik ke 95% pada 2023. Data tahun 2024 tidak tersedia. Fluktuasi ini mencerminkan adanya variasi dalam intensitas atau cakupan pengawasan dan pembinaan. Ketika pengawasan menurun, risiko terhadap keamanan pangan seperti cemaran bahan berbahaya, produk kadaluarsa, atau ketidaksesuaian label bisa meningkat, sehingga perlu dipastikan agar program pembinaan ini dilakukan secara konsisten.

Secara keseluruhan, urusan ketahanan pangan Kota Depok menunjukkan potensi yang baik, khususnya dalam ketersediaan beras di tahun 2024. Namun, tren penurunan dalam asupan energi dan protein, serta fluktuasi pengawasan keamanan pangan, menjadi perhatian utama. Konsistensi data dan keberlanjutan intervensi menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang di kota ini.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2019-2021, indikator kinerja masih berdasarkan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021, yaitu luas pengadaan lahan pemerintah.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Penyelesaian izin lokasi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Luas pengadaan lahan pemerintah	area	67	75	55	122	76

Sumber: Disrumkim Kota Depok, 2025

Urusan pertanahan di Kota Depok selama periode 2020–2024 hanya menyajikan data terukur pada satu indikator, yaitu luas pengadaan lahan pemerintah, sementara tiga indikator lainnya—yakni persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi—tidak memiliki data (n.a.) pada seluruh tahun yang dianalisis. Ketiadaan data ini merupakan tantangan besar dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan pertanahan secara menyeluruh, padahal indikator tersebut sangat krusial dalam konteks kepastian hukum dan perencanaan ruang.

Indikator luas pengadaan lahan pemerintah memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2020, pengadaan mencapai 67 satuan luas (kemungkinan hektare atau meter persegi, tergantung standar pengukuran yang digunakan). Nilai ini meningkat menjadi 75 pada 2021, lalu menurun menjadi 55 pada 2022. Peningkatan tajam terjadi pada 2023 hingga mencapai 122, namun kembali turun menjadi 76 pada 2024. Pergerakan ini bisa mencerminkan perubahan kebutuhan pengadaan lahan, baik untuk pembangunan fasilitas umum, pelayanan publik, maupun proyek strategis pemerintah daerah.

Puncak pengadaan di tahun 2023 dapat diasumsikan berkaitan dengan proyek prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur dasar, sekolah, fasilitas kesehatan, atau pemukiman, yang biasanya memang membutuhkan lahan dalam skala besar. Penurunan pada 2024 bisa menandakan selesainya sebagian besar akuisisi lahan utama tersebut atau bergesernya prioritas anggaran.

Namun demikian, tanpa kejelasan pada tiga indikator lainnya, sulit untuk menilai efektivitas tata kelola pertanahan di Depok secara utuh. Misalnya, indikator persentase luas lahan bersertifikat sangat penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya—sebuah elemen penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengendalian konflik agraria. Demikian pula, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi merupakan indikator penting bagi stabilitas pertanahan dan kelancaran investasi.

Oleh karena itu, untuk memperkuat perencanaan dan pengambilan kebijakan di sektor pertanahan, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan ketersediaan, pencatatan, dan pelaporan data, khususnya pada indikator yang belum terukur. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu diperkuat agar permasalahan legalitas tanah dan perizinan dapat ditangani secara komprehensif.

e. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Depok dalam membangun kota. Pembangunan yang berwawasan lingkungan diupayakan untuk menjamin daya dukung kota tidak berkurang dengan meminimalkan pengaruh negatif pembangunan terhadap fungsi lingkungan. Beberapa indikator kinerja urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	51,61	61,03	58,37	52,02	50
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	65,76	69,63	70,82	74,77	79,5
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Poin	35,84	35,88	36,44	36,51	36,519
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	48	55,1	51,2	55	90
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota	Jumlah	60	62	100	64	85
8	Timbulan sampah yang ditangani	%	76,6	76,6	76,1	71,31	83,50
9	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	17,63	20,10	20,06	22,75	26,49
10	Persentase cakupan area pelayanan	%	76,60	76,73	76,50	71,31	83,50
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	76,60	76,63	76,10	71,31	83,50
12	Operasionalisasi PA/TPST/SPA di kabupaten/kota, (poin)	Poin	70	60	60	n/a	n/a

Sumber: DLHK Kota Depok, 2025

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan arah kebijakan yang relatif konsisten dalam aspek perencanaan, namun dengan dinamika signifikan pada indikator kualitas dan pengelolaan lingkungan. Dari sisi perencanaan lingkungan, dua indikator utama, yaitu tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan terintegrasinya RPPLH ke dalam rencana pembangunan daerah, menunjukkan capaian yang stabil selama lima tahun berturut-turut, dokumen tersebut telah tersedia dan diintegrasikan. Hal ini mengindikasikan komitmen administratif pemerintah daerah dalam menjadikan aspek lingkungan sebagai landasan dalam pembangunan jangka panjang.

Namun, kondisi kualitas lingkungan memperlihatkan tantangan yang cukup serius, khususnya pada Indeks Kualitas Air yang mengalami penurunan dari 61,03 poin pada tahun 2021 menjadi hanya 50 poin di tahun 2024. Penurunan ini menandakan terjadinya degradasi kualitas air permukaan, yang berpotensi disebabkan oleh buruknya pengelolaan air limbah domestik maupun meningkatnya beban pencemaran akibat urbanisasi. Berbeda halnya dengan Indeks Kualitas Udara, yang justru menunjukkan tren peningkatan cukup signifikan, dari 65,76 poin pada tahun 2020 menjadi 79,5 poin pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengendalian emisi, baik dari kendaraan bermotor maupun kegiatan industri, serta dapat menjadi bukti efektivitas kebijakan sektor transportasi ramah lingkungan atau penghijauan kota. Indeks Kualitas Lahan juga mengalami peningkatan walaupun sangat lambat, dari 35,84 pada 2020 menjadi 36,519 pada 2024, yang mencerminkan masih terbatasnya perluasan ruang terbuka hijau dan perlindungan kawasan lindung di wilayah perkotaan.

Dari sisi penegakan dan pengawasan, indikator Pembinaan dan Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan menunjukkan kemajuan pesat. Capaian indikator ini meningkat dari 48% pada 2020 menjadi 90% pada tahun 2024, yang menandakan bahwa Pemkot Depok semakin aktif dalam mengawasi ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Namun, secara paralel, jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan mengalami peningkatan dari 60 kasus pada 2020 menjadi 85 kasus pada 2024, dengan puncaknya mencapai 100 kasus pada 2022. Hal ini bisa dibaca dari dua sisi: meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan, atau memburuknya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di lapangan. Oleh karena itu, kualitas penyelesaian aduan harus menjadi perhatian utama ke depan.

Dalam hal pengelolaan sampah, tren kinerja mengalami fluktuasi namun berakhir dengan capaian positif di tahun terakhir. Timbulan sampah yang ditangani sempat menurun dari 76,6% (2020) menjadi 71,31% (2023), namun kembali meningkat signifikan menjadi 83,5% pada 2024. Kondisi ini juga tercermin dalam indikator cakupan area pelayanan dan jumlah sampah yang tertangani yang memiliki nilai identik. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh penguatan armada pengangkutan,

penambahan TPS/TPST, atau efisiensi sistem manajemen persampahan. Di sisi lain, indikator pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menunjukkan tren kenaikan positif dari 17,63% (2020) menjadi 26,49% (2024), yang menunjukkan keberhasilan program edukasi dan pelibatan masyarakat serta inovasi pengelolaan sampah skala rumah tangga dan komunitas. Namun demikian, data terkait operasionalisasi fasilitas TPST atau SPA hanya tersedia hingga tahun 2022 dan stagnan di kisaran 60–70 poin, sehingga sulit menilai secara pasti keberlanjutan dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan hidup Kota Depok pada periode 2020–2024 menunjukkan arah yang menggembirakan dalam aspek pengawasan, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas udara. Namun, terdapat tantangan besar yang perlu segera ditindaklanjuti, yaitu penurunan kualitas air yang cukup drastis dan perlunya dorongan lebih kuat dalam memperluas tutupan lahan hijau. Selain itu, tren meningkatnya pengaduan masyarakat perlu ditanggapi bukan hanya dengan penyelesaian kasus semata, tetapi juga perbaikan sistematis terhadap perizinan, transparansi, dan mitigasi risiko lingkungan sejak dini. Strategi ke depan perlu mengutamakan sinergi antara perencanaan yang komprehensif, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,9988	0,9999	0,9972	0,9975	0,9999
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,9603	0,9775	0,9825	0,9800	0,992
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,4453	0,5381	0,5843	0,6912	0,7367
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,88	99,99	99,72	99,75	99,99
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	96,03	97,75	98,25	98,00	99,20

Sumber: Disdukcapil Kota Depok, 2025

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) Kota Depok selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat positif, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitas layanan. Indikator pertama, yaitu Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, konsisten berada sangat tinggi mendekati nilai sempurna selama lima tahun terakhir. Dimulai dari angka 0,9988 pada tahun 2020, indikator ini tetap stabil di atas 0,997 hingga mencapai kembali 0,9999 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP di Kota Depok telah terdokumentasi secara administratif, menunjukkan efektivitas layanan penerbitan KTP dan sistem pemutakhiran data kependudukan.

Demikian pula, rasio bayi yang memiliki akta kelahiran mengalami tren peningkatan signifikan dari 0,9603 di tahun 2020 menjadi 0,992 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan pencatatan kelahiran, termasuk melalui program digitalisasi layanan dan integrasi rumah sakit dengan Dinas Dukcapil. Keberhasilan ini penting tidak hanya dari sisi legalitas administrasi, tetapi juga sebagai dasar akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak.

Sementara itu, rasio pasangan berakta nikah juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun, dari 0,4453 pada 2020 menjadi 0,7367 pada 2024. Meskipun angkanya belum mencapai 1, tren ini menunjukkan kemajuan dalam hal legalisasi pernikahan dan pencatatan sipil pasangan menikah. Peningkatan ini mungkin juga mencerminkan hasil dari kolaborasi antara instansi keagamaan, KUA, dan Dinas Dukcapil dalam mendorong pencatatan pernikahan resmi serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen akta nikah.

Adapun indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah menunjukkan konsistensi dengan keterangan “sudah” dari 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa Kota Depok telah sepenuhnya mengadopsi kebijakan nasional terkait sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menjadi pondasi bagi integrasi layanan publik lintas sektor, mulai dari perbankan, pendidikan, hingga kesehatan dan bantuan sosial.

Dua indikator terakhir, yakni cakupan penerbitan KTP dan cakupan penerbitan akta kelahiran, memperkuat gambaran umum tentang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan. Penerbitan KTP tercatat stabil pada kisaran 99,72% hingga 99,99%, sedangkan penerbitan akta kelahiran meningkat dari 96,03% pada 2020 menjadi 99,20% pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah hampir mencapai layanan universal dalam dua layanan dasar Adminduk tersebut. Ini merupakan capaian penting karena keberhasilan penerbitan dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga berperan besar dalam perlindungan hak sipil warga negara dan integrasi sosial-ekonomi mereka ke dalam sistem pemerintahan.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Adminduk di Kota Depok sepanjang 2020–2024 dapat dinilai sangat baik dengan progres yang merata di seluruh indikator. Perbaikan yang terus-menerus dari sisi cakupan layanan, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga adopsi teknologi menjadi pilar utama dari capaian ini. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan antara lain adalah memastikan keakuratan dan pemutakhiran data, serta memperluas akses layanan di wilayah padat dan kelompok rentan, agar tidak hanya cakupan tercapai, tetapi juga kualitas dan keadilan dalam pelayanan publik bisa terus ditingkatkan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat dan kelurahan adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	6	6	13	15	15
2	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
4	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	98,82	94,01	100
5	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	67,24	80,45	80

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2025

Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan Kota Depok selama periode 2020 hingga 2024 secara umum menunjukkan tren yang baik dan stabil, dengan capaian indikator yang tinggi dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Indikator pertama, yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, mengalami peningkatan signifikan dari angka 6 kelompok pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 13 kelompok pada 2022 dan meningkat lagi menjadi 15 kelompok pada tahun 2023 dan 2024. Lonjakan ini mencerminkan semakin berkembangnya partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas, serta adanya pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah.

Sementara itu, persentase PKK aktif dan persentase Posyandu aktif menunjukkan hasil yang sangat positif, yaitu 100% selama lima tahun berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa seluruh unit PKK dan Posyandu di Kota Depok beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Keaktifan PKK menjadi cerminan dari tingginya partisipasi perempuan dalam pembangunan di tingkat keluarga dan komunitas, sementara keberlanjutan Posyandu menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu dan anak. Capaian ini juga dapat diasosiasikan dengan keberhasilan program pelatihan kader, dukungan logistik, dan pembinaan rutin dari pemerintah daerah.

Indikator selanjutnya, yaitu swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, juga menunjukkan angka yang impresif. Selama tahun 2020 dan 2021, partisipasi swadaya mencapai 100%, menurun sedikit menjadi 98,82% pada 2022 dan 94,01% pada 2023, namun berhasil kembali mencapai 100% pada tahun 2024. Walaupun sempat terjadi fluktuasi, tingkat partisipasi yang tetap tinggi menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan inisiatif lokal dalam mendukung pembangunan tetap terjaga. Penurunan sementara kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi atau transisi sistem pelaksanaan program, namun keberhasilan mengembalikan angka ini menjadi sempurna pada tahun terakhir menunjukkan efektivitas strategi pemulihan partisipasi masyarakat.

Terakhir, indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan performa yang stabil, dengan capaian 80% pada 2020, 2021, dan 2024. Namun, sempat menurun menjadi 67,24% pada 2022 sebelum kembali naik menjadi 80,45% pada 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil dari program pemberdayaan masyarakat tetap terpelihara dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan di beberapa titik waktu. Penurunan pada 2022 dapat menjadi sinyal bahwa keberlanjutan program pasca pelaksanaan memerlukan perhatian lebih, baik dalam bentuk pendampingan lanjutan, penguatan kelembagaan lokal, maupun peningkatan kapasitas teknis masyarakat penerima manfaat.

Secara keseluruhan, kinerja pemberdayaan masyarakat dan kelurahan Kota Depok menunjukkan kesinambungan dan efektivitas program yang tinggi. Konsistensi capaian 100% pada indikator partisipasi dan keaktifan kelembagaan menunjukkan bahwa sistem kelembagaan di tingkat masyarakat telah matang dan berjalan baik. Namun demikian, indikator pemeliharaan hasil program serta dinamika swadaya masyarakat tetap perlu menjadi perhatian agar hasil pemberdayaan tidak hanya bersifat sementara, melainkan benar-benar berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga nonformal lokal menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini ke depannya.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu permasalahan yang perlu dikendalikan adalah peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran yang meningkat, hingga meningkatnya kriminalitas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah mensukseskan program KB. Indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan KB bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,21	1,92	1,79	1,55	1,64
2	Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2,069	2,04	1,99	1,99	1,95
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	%	17,60	50	58	59	86,49
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	0	13	13	78,38
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	2	1	1	3	3
6	Rasio Akseptor KB	%	74,30	74,98	51,41	58,05	69,07
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	74,30	74,98	52,40	58,05	69,07
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15 19 tahun (ASFR 15–19)		10,7	10,01		9,2	7
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	84,49	9,26	31,91	20,32	7,39
10	Persentase Penggunaan	%	25,82	26		27,50	25,29

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	25,70	33,38	51,15	27,50	25,29
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	73,63	72,79		11,11	12,01
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	%	63,11	62,92		8,20	9,70
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	44,36	31,66		10,86	11,20
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	NA	9,09		9	9,09
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	0		69,90	62,50	65,50
17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	43,60	86,12	32	44	44
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	20,73	21,82	100	50	54
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	NA	75	100	79,36	100
20	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	NA	NA	na
21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	99,20	99,70	95	82,85	99,82
22	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	76,35	78,80	6,89	18,35	36
23	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	23	23,32	23,53

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
24	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	2	0,19	0,25	0,13	0,12

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok, 2025

Selama periode 2020–2024, Kota Depok menunjukkan dinamika yang signifikan dalam upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Bangga Kencana. Laju pertumbuhan penduduk berhasil ditekan dari 3,21% pada 2020 menjadi 1,64% pada 2024. Penurunan yang konsisten ini merupakan sinyal positif dari efektivitas strategi pengendalian populasi. Hal ini juga tercermin dalam angka Total Fertility Rate (TFR) yang menurun dari 2,069 pada 2020 menjadi 1,95 pada 2024, mendekati angka ideal pengganti generasi (replacement level fertility) yaitu 2,1.

Keterlibatan lintas sektor juga meningkat signifikan, ditunjukkan oleh persentase perangkat daerah yang aktif dalam pembangunan Kampung KB yang melonjak dari 17,6% pada 2020 menjadi 86,49% pada 2024. Demikian pula dengan persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk yang awalnya nihil pada 2021, naik drastis menjadi 78,38% di 2024. Kedua indikator ini menunjukkan adanya komitmen lintas OPD dalam mendukung pendekatan integratif dan berbasis wilayah untuk pembangunan kependudukan.

Dari sisi kebijakan, jumlah Perda atau Perwal tentang pengendalian penduduk relatif kecil namun stabil, yaitu 2–3 dokumen selama lima tahun. Ini mengindikasikan bahwa meskipun belum masif, pengaturan formal sudah ada sebagai fondasi regulasi. Namun demikian, rasio akseptor KB dan angka pemakaian kontrasepsi mengalami penurunan pada 2022 (sekitar 51%) dan 2023 (58,05%) sebelum kembali meningkat ke 69,07% pada 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika pelaksanaan program di lapangan, termasuk tantangan selama masa pandemi dan pasca pemulihan.

Peningkatan juga tercermin pada angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun (ASFR) yang menurun dari 10,7 pada 2020 menjadi 7 pada 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Di sisi lain, unmet need KB yang sangat tinggi pada 2020 (84,49%) berhasil ditekan drastis menjadi hanya 7,39% pada 2024, menunjukkan peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan KB bagi pasangan usia subur.

Namun demikian, cakupan penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi cenderung stagnan di kisaran 25–27%. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun akses telah meningkat, preferensi terhadap kontrasepsi jangka pendek masih mendominasi, yang mungkin disebabkan faktor edukasi, kepercayaan, atau logistik.

Indikator bina keluarga menunjukkan capaian yang cukup rendah, khususnya pada Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), dan Lansia (BKL), dengan capaian di bawah 15% pada 2022–2024. Ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjangkau kelompok ini, yang bisa berasal dari rendahnya kesadaran, kurangnya kegiatan pembinaan, atau keterbatasan kader. Di sisi lain, keberadaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di tingkat kecamatan telah stabil pada angka 9,09%, mencerminkan pemerataan minimal layanan keluarga di seluruh wilayah.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa telah mencakup lebih dari 60% remaja sejak 2022, yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat remaja adalah kelompok kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, cakupan PUS KB mandiri anggota UPPKS fluktuatif, menurun dari 86,12% di 2021 menjadi 44% pada 2024. Ini menunjukkan adanya penurunan kemandirian dan mungkin juga keterbatasan akses ekonomi terhadap layanan KB.

Capaian positif juga terlihat dalam cakupan penyediaan data mikro keluarga yang meningkat ke 100% pada 2024, menandai kesiapan sistem informasi sebagai dasar intervensi berbasis data. Namun demikian, persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan layanan KB sesuai standar justru menurun dari 100% di 2022 menjadi 54% di 2024, menandakan adanya tantangan kesinambungan layanan standar di fasilitas kesehatan.

Sementara itu, indikator yang menyangkut fungsi keluarga, seperti pembinaan 8 fungsi keluarga dan pengasuhan balita, menunjukkan dinamika yang cukup besar. Cakupan pembinaan 8 fungsi keluarga tetap tinggi, yaitu 99,82% pada 2024, namun pemahaman dan pelaksanaan pengasuhan anak hanya 36%, meski naik dari 6,89% pada 2022. Artinya, penyuluhan masih perlu diperluas agar nilai-nilai pengasuhan berkualitas meresap dalam keluarga.

Terakhir, rata-rata usia kawin pertama wanita menunjukkan tren peningkatan dari 22 tahun (2020) menjadi 23,53 tahun (2024), yang secara positif berkorelasi dengan penurunan angka kelahiran remaja dan peningkatan kualitas keluarga. Namun, pembiayaan program Bangga Kencana melalui APBD dan APBDes menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari 2% pada 2020 menjadi hanya 0,12% pada 2024, mengindikasikan rendahnya alokasi anggaran daerah untuk sektor ini, padahal perannya sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja pengendalian penduduk dan KB Kota Depok mengalami banyak kemajuan, terutama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, akses informasi, dan penurunan fertilitas. Namun, tantangan masih cukup besar dalam hal kontinuitas penggunaan kontrasepsi jangka panjang, partisipasi keluarga binaan, dan keterlibatan fasilitas kesehatan. Intervensi yang lebih kuat, kolaboratif, dan berbasis data diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat program Bangga Kencana di masa depan.

i. Perhubungan

Indikator kinerja urusan Perhubungan Kota Depok tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	21,6	18,5	29,6	36,9	46.32
2	Rasio ijin trayek	Poin	0.0021	0.00205	0.0023	0.0015	0,0015
3	Jumlah uji kir angkutan umum	KIR	10,421	10,949	10,949	10,025	9.444
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Terminal	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	%	0.03	0.07	0.01	0.08	na
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0.71	0.52	0.54	0.43	na
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	60.96	8.35	9.08	7.66	7,23%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Poin	0,0014	0,0013	0,0017	0,0016	0,0016
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Juta Orang	21,6	18,5	29,6	36,9	46.32
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Juta Orang	4,4	3,8	3,8	4,1	3.25

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Depok, 2025

Kinerja urusan perhubungan Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan sejumlah indikator mencerminkan tren pertumbuhan, sementara indikator lainnya menunjukkan stagnasi atau bahkan penurunan. Salah satu indikator paling mencolok adalah jumlah arus penumpang angkutan umum, yang mengalami peningkatan signifikan dari 21,6 juta orang pada 2020 menjadi 46,32 juta orang pada 2024. Kenaikan ini sangat signifikan, terutama setelah penurunan drastis pada 2021 akibat pandemi COVID-19. Lonjakan jumlah penumpang setelah 2021 mengindikasikan pulihnya mobilitas masyarakat dan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan angkutan umum, serta kemungkinan adanya peningkatan integrasi moda transportasi di wilayah Jabodetabek.

Indikator rasio izin trayek, meskipun angkanya terlihat kecil, cenderung menurun dari 0,0023 pada 2022 menjadi 0,0015 pada 2023 dan stagnan di 2024. Ini bisa mengindikasikan adanya efisiensi

atau pembatasan dalam penerbitan izin baru, yang mungkin dimaksudkan untuk menjaga kualitas layanan atau merespons kebutuhan aktual lapangan. Sementara itu, jumlah uji KIR angkutan umum mengalami tren menurun, dari 10.949 pada 2021 dan 2022 menjadi hanya 9.444 pada 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya jumlah kendaraan umum aktif, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau keterbatasan kapasitas pelayanan uji KIR.

Ketersediaan terminal sebagai simpul perhubungan tetap stagnan selama lima tahun terakhir, hanya berjumlah dua unit, tanpa ada ekspansi atau pembangunan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dalam konteks simpul terminal belum menjadi prioritas utama atau terkendala oleh keterbatasan lahan dan anggaran. Hal ini juga terlihat dari jumlah orang/barang yang dilayani melalui dermaga, bandara, atau terminal yang tetap fluktuatif, bahkan menurun dari 4,4 juta pada 2020 menjadi 3,25 juta pada 2024, menunjukkan potensi underutilization dari simpul perhubungan tersebut.

Dalam hal cakupan layanan, persentase layanan angkutan darat menunjukkan ketidakstabilan. Setelah naik ke 0,07% pada 2021, turun drastis ke 0,01% pada 2022, dan kembali naik menjadi 0,08% di 2023, sementara data 2024 tidak tersedia. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya kendala perencanaan atau pelaksanaan program layanan, yang perlu diatasi untuk memperluas jangkauan pelayanan transportasi publik secara merata. Begitu pula dengan persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang menurun dari 0,71% pada 2020 menjadi 0,43% pada 2023. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi teknis dan keselamatan.

Kondisi infrastruktur lalu lintas juga kurang menggembirakan. Pemasangan rambu-rambu jalan justru mengalami tren penurunan tajam, dari 60,96% pada 2020 menjadi hanya 7,23% pada 2024. Ini merupakan penurunan drastis yang berdampak langsung pada keselamatan, keteraturan lalu lintas, dan kenyamanan pengguna jalan. Ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program keselamatan lalu lintas, terutama dalam kota yang padat kendaraan seperti Depok. Adapun rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tetap sangat kecil dan stagnan di angka 0,0016 sejak 2023. Rasio ini menunjukkan tekanan luar biasa pada kapasitas jalan kota, memperkuat kebutuhan akan pengembangan infrastruktur jalan atau diversifikasi moda transportasi.

Menariknya, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan peningkatan paralel dengan arus penumpang angkutan umum, dari 21,6 juta orang pada 2020 menjadi 46,32 juta pada 2024. Hal ini memperkuat dugaan adanya peningkatan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem angkutan umum. Namun demikian, peningkatan ini tidak didukung oleh pertumbuhan fasilitas fisik seperti terminal atau sarana uji KIR yang memadai, sehingga dikhawatirkan menimbulkan beban berlebih pada fasilitas yang ada.

Secara keseluruhan, kinerja urusan perhubungan Kota Depok menunjukkan arah positif dalam hal peningkatan mobilitas masyarakat melalui angkutan umum. Namun, capaian ini tidak diiringi dengan perbaikan dan ekspansi infrastruktur serta manajemen transportasi yang memadai, sebagaimana tercermin dari indikator pemasangan rambu, rasio jalan, layanan KIR, dan stagnasi fasilitas terminal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk investasi infrastruktur, manajemen keselamatan lalu lintas, dan penguatan regulasi, untuk mewujudkan sistem transportasi kota yang berkelanjutan, aman, dan inklusif.

j. Komunikasi dan Informatika

Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media pelayanan informasi. Berdasarkan UU KIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, melakukan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai Lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai kebutuhannya.

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	0	0	0	0	0

Sumber: Diskominfo dan BPS Kota Depok, 2025

Penguatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) menjadi bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam kerangka tersebut, KIM berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mendiseminasikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah menempatkan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagai salah satu agenda strategis. Namun demikian, berdasarkan data indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020–2024, belum tercatat adanya realisasi pengembangan KIM di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian formal terhadap indikator tersebut masih nol dalam lima tahun terakhir.

Meski belum tercatat secara kuantitatif, inisiatif penguatan kelembagaan KIM mulai menunjukkan perkembangan pada tahun 2024. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan tahapan awal

berupa sosialisasi di seluruh 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Tahapan ini merupakan bagian dari proses yang diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kelompok Informasi Masyarakat, yang mencakup sosialisasi, pembentukan, penetapan, dan penyusunan program kerja. Artinya, proses pengembangan KIM memang sedang berlangsung dan berada pada tahap persiapan kelembagaan.

Di sisi lain, perubahan regulasi di tingkat nasional melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 membawa dampak signifikan terhadap peran Diskominfo. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembentukan dan penetapan KIM kini menjadi tanggung jawab kelurahan atau desa, bukan lagi Diskominfo sebagai pelaksana teknis. Dengan demikian, peran Diskominfo bergeser menjadi fasilitator, khususnya dalam pemetaan dan pengembangan kemitraan strategis dengan KIM. Pemetaan ini meliputi identifikasi KIM yang aktif, karakteristik khalayak sarannya, media dan konten yang digunakan, hingga kekuatan jejaring yang dimiliki. Kegiatan tersebut wajib dilaksanakan menggunakan Aplikasi Umum, dan menjadi dasar dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Dengan latar belakang tersebut, ketiadaan data realisasi pengembangan KIM pada indikator kinerja tahun 2020–2024 tidak serta-merta mencerminkan ketiadaan aktivitas. Sebaliknya, proses kelembagaan dan transisi peran akibat perubahan kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut. Ke depan, tantangan utama terletak pada bagaimana pemerintah daerah, melalui Diskominfo, mampu mengoordinasikan lintas pemangku kepentingan di tingkat kelurahan/desa untuk mempercepat pembentukan KIM, sekaligus memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya sebagai mitra dalam diseminasi informasi publik.

k. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM merupakan lokomotif bagi bergeraknya ekonomi kerakyatan setelah pandemi Covid-19. Koperasi sebagai wadah dan sumber permodalan bagi para pelaku usaha. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM akan berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok menganggap penting peran Koperasi dan UKM dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.

Tabel 2.76 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	%	34,70	87,79	88,20	50,30	83,73

Sumber: DKUM Kota Depok, 2025

Kinerja indikator persentase koperasi aktif di Kota Depok selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika fluktuatif yang cukup signifikan, mencerminkan tantangan sekaligus potensi dalam pengembangan sektor koperasi di tengah berbagai tekanan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2020, koperasi aktif tercatat hanya sebesar 34,70%, angka yang cukup rendah dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas. Ketika banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi mengalami penurunan aktivitas atau bahkan berhenti beroperasi, angka ini menjadi cerminan langsung dari kerentanan kelembagaan koperasi pada masa krisis.

Namun demikian, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan persentase koperasi aktif meningkat drastis ke angka 87,79% dan 88,20%. Kenaikan ini sangat mencolok dan dapat diartikan sebagai hasil dari intervensi kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi, yang mungkin mencakup fasilitasi perizinan ulang, digitalisasi koperasi, pelatihan kelembagaan, atau pemberian bantuan modal bergulir. Kemungkinan lainnya adalah adanya penertiban dan pendataan ulang koperasi yang lebih selektif dan terarah, sehingga koperasi yang tidak aktif secara administratif dibersihkan dari daftar, dan yang tersisa adalah entitas yang benar-benar menjalankan aktivitas ekonominya.

Akan tetapi, tren positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis menjadi 50,30%. Penurunan ini patut menjadi perhatian karena menandakan adanya kemunduran dari sisi keberlanjutan operasional koperasi, atau kendala teknis dan administratif dalam proses pelaporan dan verifikasi koperasi aktif. Penurunan ini juga bisa dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pendampingan atau pengawasan koperasi, serta belum pulih sepenuhnya daya beli dan kegiatan usaha di sektor riil pasca pandemi, khususnya koperasi konsumen atau simpan pinjam.

Pada tahun 2024, terjadi pemulihan kembali ke angka 83,73%, yang hampir mendekati capaian terbaik di tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa program pemulihan dan revitalisasi koperasi kembali menunjukkan hasil yang positif. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi koperasi, serta meningkatkan dukungan terhadap kapasitas kelembagaan koperasi baik melalui pelatihan, digitalisasi layanan, maupun sinergi dengan UMKM.

Keseluruhan fluktuasi ini mencerminkan bahwa koperasi di Kota Depok sangat sensitif terhadap kondisi eksternal dan internal, baik dari sisi perekonomian, regulasi, hingga kualitas manajemen. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan koperasi aktif tidak hanya bergantung pada penertiban administratif semata, melainkan juga memerlukan strategi jangka panjang berupa pembinaan terpadu, fasilitasi teknologi, penguatan SDM koperasi, serta integrasi dengan ekosistem UMKM dan digital

economy. Selain itu, penting untuk menyusun sistem klasifikasi koperasi berdasarkan skala, sektor, dan kontribusi ekonomi untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran ke depan.

I. Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan Penanaman Modal Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	138	1.337	427	425	6248
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	7.887,88	6.453,90	7.483.51	8.459.07	7.825,53
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Poin	2,14	1,3	2.17	1.18	0,96
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-6,58	-18	15.95	13.03	-34,00

Sumber: DPMPPTSP Kota Depok, 2025

Urusan Penanaman Modal di Kota Depok menunjukkan sebuah pola yang dinamis, meskipun terkadang terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan domestik. Indikator pertama, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), menggambarkan lonjakan luar biasa yang terjadi pada tahun 2021, yang mungkin berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru atau insentif yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, yang berhasil menarik minat investor. Lonjakan ini begitu signifikan, mencapai angka 1.337 perusahaan dari hanya 138 perusahaan di tahun 2020, namun setelahnya jumlah investor menurun kembali pada 2022 dan 2023, dengan sedikit pemulihan di 2024. Tren ini dapat menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap perubahan eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat atau kondisi perekonomian global, yang mempengaruhi keputusan investor untuk tetap berinvestasi atau menunda komitmen mereka.

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) mencatatkan fluktuasi yang serupa dengan jumlah investor. Di tahun 2020, investasi tercatat cukup tinggi, namun menurun pada 2021 dan 2022, meskipun ada pemulihan di 2023. Fluktuasi ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun jumlah investor besar, nilai investasi yang dibawa belum selalu stabil, yang mungkin disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. Di 2024, meskipun ada sedikit penurunan, angka ini masih mencerminkan pentingnya sektor investasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Rasio daya serap tenaga kerja yang tercatat menurun tajam dari 2,14 pada 2020 menjadi 0,96 pada 2024. Penurunan ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada investasi yang masuk, tidak semua sektor investasi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Hal ini bisa jadi karena kecenderungan beralihnya investasi pada sektor-sektor yang lebih padat modal dan teknologi tinggi, yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus atau bahkan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia.

Sedangkan, perubahan dalam kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN menunjukkan adanya variabilitas yang cukup besar dalam pencapaian target investasi. Meskipun ada pemulihan pada 2022 dan 2023, dengan nilai realisasi yang positif, tahun 2024 justru menunjukkan penurunan tajam hingga -34%. Penurunan ini bisa mencerminkan ketidakstabilan dalam arus investasi, yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang dapat memitigasi dampak negatif dan memperkuat daya tarik Kota Depok sebagai destinasi investasi.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menggambarkan gambaran yang beragam tentang keberhasilan dan tantangan dalam penanaman modal di Kota Depok. Sementara ada lonjakan yang menggembirakan di beberapa tahun, fluktuasi dan penurunan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa Kota Depok perlu lebih fokus dalam menjaga kestabilan iklim investasi dan meningkatkan sektor-sektor yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, serta memperkuat kebijakan yang mendukung investasi yang berkelanjutan.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Indikator kinerja urusan Kepemudaan dan olahraga Kota Depok tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93	84	84	91,14	91,14
2	Persentase wirausaha muda	%	0,10	2,94	0,05	1,50	n/a
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	90,69	86	91	31	20
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	50	85,68	71	68	67,90
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	8	11,95	15,69	7	15,57
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	2	166	10	28	27
7	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	7	16	12	15	13

Sumber: Disporyata Kota Depok, 2025

Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Depok menunjukkan perkembangan yang beragam, dengan beberapa indikator menunjukkan hasil yang menggembirakan, sementara lainnya mencatat penurunan yang cukup signifikan. Salah satu indikator yang menunjukkan konsistensi adalah persentase organisasi pemuda yang aktif. Meskipun sempat mengalami penurunan pada 2021 dan 2022 (dari 93% menjadi 84%), pada 2023 dan 2024 indikator ini kembali meningkat hingga 91,14%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan pandemi dan keterbatasan aktivitas sosial, organisasi pemuda di Depok tetap mampu bertahan dan aktif, yang menjadi modal penting dalam membina generasi muda untuk berpartisipasi dalam berbagai program sosial dan kepemudaan.

Di sisi lain, indikator wirausaha muda menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dengan penurunan yang drastis dari 2,94% pada 2021 menjadi hanya 0,05% pada 2022, dan sedikit pemulihan pada 2023 dengan angka 1,50%. Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi oleh para wirausaha muda di Depok, kemungkinan disebabkan oleh dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi serta terbatasnya akses dan dukungan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Angka ini juga menandakan bahwa upaya pembinaan kewirausahaan di kalangan pemuda belum sepenuhnya berhasil menciptakan sektor wirausaha yang stabil dan berkembang.

Indikator cakupan pembinaan olahraga menunjukkan penurunan yang cukup drastis pada 2023 dan 2024, dari 91% pada 2022 menjadi hanya 31% pada 2023 dan 20% pada 2024. Penurunan ini bisa mencerminkan adanya perubahan prioritas atau kesulitan dalam mengelola dan melaksanakan program-program pembinaan olahraga, yang mungkin dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran, infrastruktur, atau fokus kebijakan pada sektor lain. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pembinaan yang dapat dilakukan, yang pada akhirnya berdampak pada potensi atlet muda di Kota Depok.

Sementara itu, cakupan pelatih yang bersertifikasi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pada 2020, angka ini dimulai dari 50%, dan pada 2021-2022 meningkat tajam hingga lebih dari 70%, meskipun sedikit menurun pada 2023 dan 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas pelatih olahraga yang dapat membimbing para atlet muda secara profesional dan terstandarisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembinaan atlet dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Cakupan pembinaan atlet muda, meskipun mengalami fluktuasi, tetap menunjukkan progres, meskipun tidak selalu konsisten. Pada 2020, hanya 8% atlet muda yang mendapatkan pembinaan, namun angka ini meningkat hingga 15,69% pada 2022. Pada 2023, terdapat penurunan signifikan, tetapi kembali pulih pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pembinaan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam hal distribusi dan akses pembinaan olahraga untuk atlet muda di seluruh wilayah Kota Depok.

Indikator jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga mencatatkan fluktuasi yang cukup besar, dengan pencapaian yang mengesankan pada 2021, yang mencatatkan 166 atlet berprestasi, namun turun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, terdapat 27 atlet berprestasi dan 13 cabang olahraga yang berhasil mencatatkan prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang cukup besar dalam pembinaan atlet, belum semua cabang olahraga dapat mempertahankan prestasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, indikator-indikator di urusan Kepemudaan dan Olahraga ini mencerminkan dinamika yang cukup menantang. Meskipun ada beberapa sektor yang mengalami perkembangan positif, seperti organisasi pemuda yang aktif dan pelatih bersertifikasi, ada juga beberapa sektor yang menunjukkan penurunan, terutama dalam hal pembinaan olahraga dan wirausaha muda. Ke depan, pemerintah Kota Depok perlu lebih fokus pada penyelarasan kebijakan dan program-program yang mendukung pembinaan olahraga yang lebih merata serta memperkuat sektor kewirausahaan di kalangan pemuda untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas generasi muda Kota Depok.

n. Statistik

Indikator kinerja urusan Statistik Kota Depok tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79 Indikator Kinerja Urusan Statistik Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Tidak	Belum	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kota Depok dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Diskominfo Kota Depok, 2025

Indikator kinerja Urusan Statistik di Kota Depok menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sistem statistik yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Salah satu indikator utama adalah ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2020 dan 2021, Kota Depok belum memiliki sistem yang terintegrasi, yang mungkin mencerminkan adanya keterbatasan dalam infrastruktur dan koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan data. Namun, pada 2022 hingga 2024, sistem data yang terintegrasi sudah mulai tersedia, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan data dan statistik. Keberadaan sistem yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Selain itu, buku "Kota Depok dalam Angka" dan buku "PDRB" (Produk Domestik Regional Bruto) yang diterbitkan secara konsisten setiap tahun, menunjukkan adanya komitmen untuk menyediakan data

statistik yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Buku-buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografis Kota Depok, yang sangat berguna dalam merencanakan kebijakan dan program-program pembangunan daerah. Ketersediaan kedua buku ini menunjukkan transparansi dan upaya pemerintah Kota Depok untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi publik.

Secara keseluruhan, meskipun sistem data dan statistik terintegrasi baru tersedia pada 2022, keberlanjutan penerbitan buku statistik seperti “Kota Depok dalam Angka” dan “PDRB” memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas statistik dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Ke depan, penting bagi Kota Depok untuk terus mengembangkan sistem data yang lebih canggih dan terintegrasi agar dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data.

o. Persandian

Capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2024, realisasi penggunaan sandi telah mencapai target sebesar 42,11%, dengan predikat kinerja “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah yang menjadi sasaran target telah berhasil mengimplementasikan sistem komunikasi yang aman dan tersandikan, sesuai dengan ketentuan dan arahan dalam penguatan keamanan informasi pemerintahan.

Tabel 2.80 Indikator Kinerja Urusan Persandian Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Tidak	Belum	Ada	Ada	Ada

Sumber: Diskominfo Kota Depok, 2025

Indikator kinerja Urusan Persandian di Kota Depok menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam penerapan sistem sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah. Pada tahun 2020 hingga 2022, persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi sangat rendah, hanya sekitar 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan penerapan sistem keamanan data melalui sandi mungkin masih terbatas atau belum menjadi prioritas utama dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang sangat signifikan, dengan 100% perangkat daerah mulai mengimplementasikan penggunaan sandi dalam komunikasi mereka. Hal ini berarti seluruh Perangkat Daerah di Pemkot Depok (37 PD) telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Pencapaian ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam kebijakan atau peningkatan kesadaran mengenai pentingnya keamanan data dan komunikasi antar instansi pemerintah di Kota

Depok. Penggunaan sandi dalam komunikasi sangat krusial untuk menjaga kerahasiaan informasi, melindungi data sensitif, dan mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan awal dalam penerapan sistem persandian, pencapaian 100% pada tahun 2023 menggambarkan kemajuan yang luar biasa dan komitmen Kota Depok terhadap penguatan sistem keamanan informasi di pemerintahan. Ke depan, keberlanjutan dan pemeliharaan kebijakan ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terus menjaga kerahasiaan dan integritas komunikasi mereka.

p. Kebudayaan

Realisasi indikator kinerja urusan kebudayaan Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	20	17	33	44	19
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	37,90	75	50	37,50	37,50
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	2	3	3	4	-
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	3	3	3	-

Sumber: Disporyata Kota Depok 2025

Indikator kinerja Urusan Kebudayaan Kota Depok memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan serta seni di kota ini. Dalam hal penyelenggaraan festival seni dan budaya, Kota Depok menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kegiatan budaya. Pada tahun 2020, jumlah festival yang dilaksanakan tercatat sebanyak 20 kali, namun angkanya menurun pada 2021 menjadi 17 kali, yang bisa jadi disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atau faktor lainnya. Meskipun demikian, jumlah festival meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 33 kali dan terus naik pada 2023 menjadi 44 kali, yang menunjukkan pemulihan dan peningkatan kegiatan seni dan budaya. Namun, pada tahun 2024, jumlah festival mengalami penurunan lagi menjadi 19 kali. Penurunan ini bisa jadi terkait dengan berbagai faktor eksternal, seperti kendala anggaran atau perubahan prioritas kegiatan.

Di sisi lain, indikator mengenai pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya menunjukkan angka yang bervariasi. Pada tahun 2020, hanya sekitar 37,90% dari benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Namun, angka ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 75%, menunjukkan upaya yang lebih serius dalam pelestarian budaya. Pada 2022, terjadi penurunan

menjadi 50%, dan pada 2023 serta 2024, persentasenya kembali stabil pada 37,50%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan bahwa komitmen terhadap pelestarian budaya tidak menurun, meskipun sudah ada langkah-langkah positif di tahun-tahun sebelumnya.

Indikator lainnya, yaitu jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, menunjukkan progres yang baik meskipun tidak tercatat untuk tahun 2024. Pada 2020, hanya ada 2 karya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, namun jumlah ini meningkat menjadi 4 karya pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pengelolaan dan pelestarian karya budaya Kota Depok.

Selain itu, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tetap stabil sebanyak 3 unit selama 4 tahun berturut-turut (2020–2023), yang menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam pengelolaan cagar budaya meskipun belum ada perkembangan signifikan dalam pengelolaannya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator, upaya Kota Depok untuk memajukan kebudayaan dan seni tetap berjalan, dengan pencapaian yang cukup signifikan di beberapa area, terutama dalam revitalisasi karya budaya dan peningkatan jumlah festival seni dan budaya. Ke depan, perlu ada evaluasi dan perhatian lebih pada pelestarian cagar budaya serta pengelolaan kegiatan budaya agar dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan lembaga penting dalam upaya meningkatkan Sumberdaya Manusia yang handal dan berdaya saing. Secara khusus, perpustakaan sangat vital keberadaannya dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Saat ini budaya literasi masyarakat Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain.

Pemerintah Kota Depok, dengan misi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing, juga sangat memperhatikan perpustakaan sebagai institusi penting bagi pembangunan Kota Depok. Capaian indikator kinerja urusan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio	0,53	0,26	0,94	1,29	1,11
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	47.714	51.808	0.49	0.46	0,42
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Poin	0,34	0,40	0,26	0,39	0,38
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (anggota perpustakaan orang)	Orang	27.345	13.167	48.280	62.385	32.834

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	22.863	25.376	27.594	33.118	33.418
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	50	70	76.92	76.92	77

Sumber: Diskarpus Kota Depok, 2025

Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Depok menunjukkan perkembangan yang signifikan di beberapa aspek, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu indikator utama, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, rasio pengunjung perpustakaan adalah 0,53, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,26. Angka ini meningkat tajam pada 2022 menjadi 0,94 dan terus meningkat pada 2023 menjadi 1,29. Meski begitu, pada 2024, rasio ini sedikit turun menjadi 1,11. Peningkatan yang signifikan pada 2022 dan 2023 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam menarik minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan, meskipun tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut, seperti ketersediaan layanan atau aksesibilitas.

Indikator berikutnya, yaitu koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, menunjukkan angka yang kurang stabil. Pada 2020, terdapat 47.714 koleksi buku, yang meningkat menjadi 51.808 pada 2021. Namun, data untuk 2022 hingga 2024 menunjukkan penurunan yang tajam, dengan koleksi buku yang tersedia hanya mencapai 0,49 pada 2022, 0,46 pada 2023, dan 0,42 pada 2024. Penurunan ini sangat signifikan dan dapat mencerminkan masalah dalam pengelolaan koleksi buku atau kurangnya pembaruan koleksi untuk menarik minat pengunjung.

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menunjukkan angka yang relatif stabil meskipun sedikit berfluktuasi. Pada 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,34, meningkat menjadi 0,40 pada 2021, namun turun menjadi 0,26 pada 2022, dan kembali meningkat pada 2023 (0,39) dan 2024 (0,38). Meskipun ada fluktuasi, secara keseluruhan rasio ini menunjukkan adanya upaya yang relatif konsisten dalam menyediakan layanan perpustakaan di seluruh wilayah kota.

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun terdapat penurunan pada 2024. Pada 2020, jumlah rata-rata pengunjung adalah 27.345 orang, yang turun menjadi 13.167 pada 2021. Namun, pada 2022 jumlah ini melonjak menjadi 48.280, dan pada 2023 mencapai 62.385 orang. Penurunan pada 2024 menjadi 32.834 orang mungkin perlu dianalisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh faktor internal seperti pengelolaan layanan atau faktor eksternal lainnya, seperti kompetisi dari platform digital atau masalah akses.

Indikator koleksi judul buku perpustakaan menunjukkan angka yang konsisten, dengan sedikit peningkatan dari 22.863 judul pada 2020 menjadi 33.418 judul pada 2024. Peningkatan ini

mencerminkan usaha yang berkelanjutan dalam memperkaya koleksi buku yang ada, meskipun ada penurunan pada jumlah koleksi buku secara keseluruhan yang perlu dipertimbangkan.

Indikator terakhir, jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat menunjukkan tren positif. Pada 2020, hanya 50% pustakawan yang memiliki sertifikat, tetapi angka ini meningkat menjadi 70% pada 2021 dan terus meningkat hingga 76,92% pada 2022 dan tetap stabil hingga 2024 (77%). Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas tenaga perpustakaan yang berkompeten dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator, seperti jumlah pengunjung dan koleksi judul buku, penurunan dalam koleksi buku secara keseluruhan dan fluktuasi dalam pengunjung perpustakaan perlu menjadi perhatian untuk mempertahankan kualitas layanan perpustakaan yang semakin relevan dengan perkembangan zaman. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan koleksi dan peningkatan layanan untuk memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi pusat informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

r. Kearsipan

Realisasi indikator kinerja urusan Kearsipan Kota Depok Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	48,42	139,63	100	100	80
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	n/a	100	46	50	40

Sumber: Diskarpus Kota Depok, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja Urusan Kearsipan Kota Depok menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun juga menghadapi beberapa tantangan terkait konsistensi dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Indikator pertama, yang mengukur persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, mencatatkan angka yang cukup fluktuatif. Pada 2020, angka ini tercatat sebesar 48,42%, menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di sebagian besar perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, pada 2021, ada lonjakan yang luar biasa, dengan angka mencapai 139,63%, yang kemungkinan besar mencerminkan pencapaian yang melebihi target atau kebijakan baru yang diimplementasikan dalam waktu tersebut. Pada 2022 dan 2023, angka ini stabil di 100%, menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah berhasil mengelola arsip sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Akan tetapi, pada 2024, terjadi penurunan menjadi 80%,

yang menandakan adanya penurunan atau tantangan dalam mempertahankan standar pengelolaan arsip yang konsisten di seluruh perangkat daerah.

Indikator kedua, yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan, menunjukkan angka yang lebih bervariasi. Pada 2021, persentase SDM pengelola kearsipan yang telah mengalami peningkatan mencapai 100%, menandakan adanya upaya yang maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan pada tahun tersebut. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan, dengan angka mencapai 46% pada 2022, 50% pada 2023, dan 40% pada 2024. Penurunan ini mungkin menunjukkan tantangan dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas pengelola arsip yang kompeten, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan program pelatihan dan pembinaan untuk staf kearsipan di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat pencapaian yang signifikan di tahun 2021, terutama dalam hal pengelolaan arsip yang baku dan peningkatan SDM, penurunan pada tahun-tahun berikutnya perlu menjadi perhatian serius. Pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pengelolaan arsip dan kompetensi SDM pengelola kearsipan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip tetap efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku, terutama dengan pentingnya kearsipan dalam mendukung administrasi publik yang transparan dan akuntabel.

2.1.3.11. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Disamping urusan wajib, pemerintah Kota Depok juga memiliki fokus urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kondisi obyek Kota Depok.

a. Pariwisata

Salah satu faktor penting dari tumbuhnya suatu daerah adalah meningkatnya kinerja pada urusan pariwisata. Pariwisata yang berkembang akan mampu mendorong tingkat perekonomian suatu daerah. Kota Depok mempunyai potensi pengembangan pariwisata yang cukup besar. Potensi tersebut berupa wisata alam (setu dan sungai), wisata seni/budaya, wisata religi dan wisata kuliner. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius, konsisten dan simultan, sehingga potensi kepariwisataan di Kota Depok dapat dikembangkan secara optimal.

Tabel 2.84 Indikator kinerja Urusan Pariwisata Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	55,55	73,65	206,17	184,03	177,87
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	PAD sektor pariwisata	Milyar Rupiah	162,612	182,071	258,925	291,50	172,28

Sumber: Disporyata Kota Depok, 2025

Urusan pariwisata di Kota Depok selama periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang menarik dengan capaian yang melonjak drastis pada sisi kunjungan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar dalam hal lama tinggal wisatawan dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor ini. Pada indikator pertama, yaitu kunjungan wisata, terlihat adanya lompatan pertumbuhan yang sangat signifikan pasca pandemi COVID-19. Dari angka 55,55% pada 2020, kunjungan meningkat menjadi 73,65% pada 2021, dan melonjak lebih dari dua kali lipat pada 2022 menjadi 206,17%. Meskipun mengalami sedikit penurunan di 2023 (184,03%) dan 2024 (177,87%), jumlah ini tetap menunjukkan daya tarik pariwisata lokal yang semakin berkembang—kemungkinan didorong oleh peningkatan event lokal, kampanye promosi wisata, atau adaptasi pelaku wisata terhadap norma baru pariwisata pasca-pandemi.

Namun demikian, indikator lama kunjungan wisata menunjukkan stagnasi selama lima tahun terakhir, bertahan di angka 0,5 hari. Ini menandakan bahwa meskipun wisatawan datang dalam jumlah besar, mereka cenderung melakukan kunjungan singkat (day-trip) tanpa menginap. Fenomena ini mencerminkan kurangnya daya tarik destinasi wisata yang dapat mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, atau belum optimalnya fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, atau paket wisata terpadu. Dalam konteks ini, pendekatan pengembangan wisata berbasis experience atau integrasi wisata budaya, kuliner, dan alam bisa menjadi strategi untuk meningkatkan length of stay dan secara otomatis berdampak pada belanja wisatawan di wilayah ini.

Berpindah ke indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, angkanya naik stabil dari Rp162,6 miliar pada 2020 menjadi Rp291,5 miliar di 2023, sebelum turun ke Rp172,28 miliar di tahun 2024. Penurunan PAD di tahun terakhir menjadi sorotan penting karena terjadi saat angka kunjungan masih tinggi, yang bisa mengindikasikan adanya kebocoran potensi penerimaan, kurang maksimalnya retribusi, atau kurangnya inovasi dalam diversifikasi sumber PAD dari kegiatan wisata. Penurunan ini perlu diantisipasi melalui kebijakan yang menguatkan regulasi, digitalisasi pencatatan transaksi wisata, serta kemitraan yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata lokal.

Secara keseluruhan, kinerja sektor pariwisata Kota Depok menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Kunjungan wisatawan meningkat tajam, tetapi masih bersifat kunjungan singkat dengan kontribusi PAD yang fluktuatif. Untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, diperlukan strategi lintas sektor yang menyentuh penguatan destinasi, pelibatan masyarakat, serta pengembangan ekosistem wisata yang mampu memperpanjang masa tinggal dan meningkatkan pengeluaran wisatawan di Kota Depok.

b. Pertanian

Indikator kinerja urusan pertanian Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	1.40	1.37	1.31	1.31	1.35
2	Cakupan bina kelompok petani	%	111.76	100	104.92	102.13	105.32

Sumber: DKPPP Kota Depok dan BPS Kota Depok, 2025

Meskipun bukan merupakan sektor unggulan dalam struktur ekonomi perkotaan seperti Depok, pertanian tetap memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ketahanan pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat pinggiran kota. Hal ini tercermin dari dua indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian Kota Depok, yaitu kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan cakupan bina kelompok petani.

Pertama, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir cenderung stagnan, berada di kisaran 1,31%–1,40%. Tren ini mencerminkan bahwa peran sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi kota relatif kecil dan cenderung mengalami penurunan secara perlahan dari tahun ke tahun, meskipun ada sedikit perbaikan pada tahun 2024. Fakta ini wajar mengingat Depok adalah kota dengan karakter urban yang kuat, di mana sektor jasa dan perdagangan mendominasi struktur ekonomi. Namun demikian, angka yang konsisten ini juga mencerminkan adanya keberlangsungan aktivitas pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan dan urbanisasi yang masif. Hal ini menjadi sinyal bahwa meski sektor pertanian tidak dominan, tetap ada potensi yang bisa dioptimalkan, terutama dalam konteks pertanian perkotaan (urban farming) dan pertanian terpadu.

Indikator kedua yaitu cakupan bina kelompok petani justru menunjukkan kinerja yang impresif. Capaian yang selalu melebihi angka 100% dalam lima tahun terakhir—termasuk puncaknya di tahun 2020 sebesar 111,76%—menandakan bahwa Pemerintah Kota Depok berhasil menjangkau lebih banyak kelompok tani dari target yang ditetapkan. Konsistensi ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan kelompok tani, baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, bantuan sarana produksi, maupun akses permodalan. Ini juga memberi gambaran bahwa pemerintah tetap memperhatikan pembangunan sektor ini meskipun kontribusinya terhadap PDRB kecil. Pembinaan ini sangat penting untuk menjaga eksistensi kelompok tani sebagai aktor utama dalam ketahanan pangan lokal dan pelestarian ruang terbuka hijau produktif.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pertanian Kota Depok dalam lima tahun terakhir menunjukkan keseimbangan antara tantangan struktural dan upaya pemberdayaan. Meski kontribusi terhadap PDRB kecil dan cenderung menurun, cakupan bina petani yang luas memberi peluang untuk

mengembangkan sektor ini melalui pendekatan inovatif, seperti pertanian ramah lingkungan, digital farming, dan integrasi pertanian dengan ekowisata. Pertanian di Depok, jika dikelola adaptif, dapat menjadi pilar ketahanan kota yang menyatu dengan visi pembangunan berkelanjutan.

c. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dengan berbagai kebijakan yang mampu mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif. Salah satu indikator penting dari sektor perdagangan adalah Nilai Ekspor Bersih (NEB). NEB mengacu pada nilai ekonomi netto dari ekspor suatu daerah setelah dikurangi dengan nilai impor.

Nilai ekspor bersih mencerminkan saldo perdagangan suatu daerah dalam perdagangan. Jika nilai ekspor bersih positif (nilai ekspor lebih besar dari nilai impor), ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki surplus perdagangan. Sebaliknya, jika nilai ekspor bersih negatif (nilai impor lebih besar dari nilai ekspor), itu menunjukkan defisit perdagangan. Nilai ekspor bersih yang positif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan sumber daya tambahan untuk investasi dalam infrastruktur dan pengembangan ekonomi lainnya.

Tabel 2.86 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	94.636.077	282.695.69	297.426.09	198.342.19	408.556.25

Sumber: Disdagin Kota Depok, 2025

Kinerja urusan perdagangan Kota Depok dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup mencolok melalui indikator nilai ekspor bersih perdagangan, satu-satunya indikator utama yang digunakan untuk menilai performa sektor ini. Tren nilai ekspor yang mengalami fluktuasi tajam dari tahun ke tahun menandakan adanya kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi aktivitas perdagangan luar negeri Kota Depok.

Tahun 2020 dimulai dengan angka yang relatif rendah, yakni sebesar USD 94,6 juta, kemungkinan besar terdampak oleh disrupsi global akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun berikutnya (2021), terjadi lonjakan signifikan hingga hampir tiga kali lipat menjadi USD 282,7 juta, dan tren positif ini berlanjut pada 2022 yang mencatat angka tertinggi saat itu sebesar USD 297,4 juta. Peningkatan drastis tersebut bisa jadi mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan

produksi sektor industri dan UMKM, serta adanya permintaan ekspor yang meningkat dari negara mitra dagang.

Namun pada 2023, nilai ekspor menurun cukup drastis ke angka USD 198,3 juta. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan faktor global seperti perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, atau bahkan penyesuaian kebijakan ekspor nasional yang berdampak ke daerah. Meskipun demikian, tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang sangat kuat, dengan capaian ekspor menembus angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, yakni USD 408,6 juta. Ini menunjukkan bahwa struktur perdagangan Kota Depok mulai menunjukkan ketangguhan dan adaptabilitas yang tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Pergerakan indikator ini juga menandakan adanya potensi besar di sektor perdagangan Depok yang bisa terus dikembangkan. Besarnya nilai ekspor bersih menunjukkan bahwa Depok bukan hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga memiliki kemampuan produksi yang kompetitif, baik melalui produk industri kreatif, manufaktur ringan, maupun komoditas jasa bernilai tinggi. Keberhasilan 2024 patut diapresiasi dan menjadi pijakan untuk memperkuat sistem dukungan bagi pelaku usaha ekspor—mulai dari penyederhanaan regulasi, fasilitasi promosi luar negeri, digitalisasi pemasaran, hingga kemitraan dengan investor.

Singkatnya, indikator tunggal ini menggambarkan geliat perdagangan luar negeri Kota Depok yang sangat dinamis, menunjukkan kapasitas pertumbuhan yang tinggi di tengah berbagai tantangan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaboratif, sektor perdagangan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing global.

d. Perindustrian

Urusan perindustrian di Kota Depok dalam lima tahun terakhir tampak difokuskan pada dua indikator utama: jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan, serta kontribusi sektor tersier terhadap PDRB. Meski sederhana, kedua indikator ini mencerminkan peran strategis sektor industri dalam menjamin stabilitas pasokan, sekaligus menyumbang pada struktur ekonomi kota.

Indikator pertama, yaitu jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan, menunjukkan konsistensi aktivitas pengawasan selama tahun 2021, 2023, dan 2024, yang masing-masing tercatat sebanyak 48 kali. Pada tahun 2020, jumlahnya hanya setengah dari itu, yaitu 24 kali—kemungkinan akibat terbatasnya mobilitas dan pengawasan akibat pandemi. Sementara pada tahun 2022, tidak terdapat data yang tersedia (N/A), sehingga tidak dapat dikaji secara lengkap kontinuitasnya. Namun secara umum, tren ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki perhatian terhadap pengendalian distribusi komoditas penting—langkah vital untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan

harga barang, terutama bahan pangan strategis yang sangat berpengaruh pada tingkat inflasi daerah dan daya beli masyarakat.

Indikator kedua, yaitu kontribusi sektor tersier terhadap PDRB, mencerminkan porsi sektor jasa (termasuk perdagangan, transportasi, komunikasi, dan jasa lainnya) dalam struktur ekonomi daerah. Kontribusi sektor tersier pada tahun 2020 sebesar 48,18%, dan meningkat menjadi 48,5% pada tahun-tahun berikutnya (2022–2024). Meski peningkatannya tampak kecil secara angka, namun kestabilan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor jasa masih menjadi tulang punggung ekonomi Depok, termasuk aktivitas industri kecil yang berbasis jasa seperti kuliner, logistik, dan manufaktur ringan. Ketiadaan data tahun 2021 menyulitkan penggambaran tren penuh, tetapi keberlanjutan angka setelahnya menyiratkan pemulihan dan stabilisasi pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, meskipun indikator yang digunakan dalam urusan perindustrian ini belum banyak menggambarkan dinamika sektor manufaktur atau industri pengolahan secara spesifik, tetap tampak bahwa Kota Depok lebih bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan dibanding industri berat. Oleh karena itu, pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penguatan industri kreatif, peningkatan kualitas SDM industri, dan pemanfaatan teknologi digital, termasuk mendukung industrialisasi skala mikro dan kecil yang berbasis inovasi lokal. Selain itu, perlu adanya indikator tambahan di masa mendatang untuk merekam keberadaan IKM (Industri Kecil Menengah), kontribusi lapangan kerja sektor industri, serta daya saing produk industri unggulan Depok.

Tabel 2.87 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	Kali	24	48	N/A	48	48
2	Kontribusi PDRB Tersier	%	48,18	N/A	48,5	48,5	48,5

Sumber: Disdagin Kota Depok dan BPS Kota Depok, 2025

e. Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88 Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan (Jumlah ekor benih ikan produksi)	Ekor	46.750.356	49.102.535	50.406.960	50.303.778	53.920.830
2	Konsumsi ikan	kg/kapita/th	17	20,6	24,78	28,05	27,9

Sumber: DKPPP Kota Depok, 2025

Meskipun Depok bukan wilayah pesisir, peran urusan kelautan dan perikanan tetap cukup penting, khususnya dalam konteks perikanan budidaya air tawar dan peningkatan konsumsi protein hewani. Dua indikator utama yang diamati dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 adalah produksi benih ikan serta konsumsi ikan per kapita per tahun.

Produksi benih ikan menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Dimulai dari 46,75 juta ekor benih pada tahun 2020, angka ini terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 53,92 juta ekor pada tahun 2024. Lonjakan tertinggi terjadi pada rentang 2023 ke 2024, yang naik lebih dari 3 juta ekor, mencerminkan dorongan besar terhadap penguatan sektor budidaya perikanan di wilayah ini. Konsistensi ini menandakan bahwa Depok telah berhasil mengembangkan kapasitas hatchery atau pembenihan yang efisien, serta adanya permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk budidaya lanjutan di dalam kota maupun pasokan ke daerah sekitarnya.

Sementara itu, indikator konsumsi ikan menunjukkan peningkatan yang lebih tajam dan signifikan. Dari angka awal sebesar 17 kg/kapita/tahun pada 2020, konsumsi meningkat menjadi 28,05 kg di tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 27,9 kg pada 2024. Tren naik ini mencerminkan keberhasilan dalam kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein dari ikan untuk gizi keluarga. Penurunan tipis di tahun terakhir tidak signifikan, namun perlu diwaspadai dalam konteks pengendalian harga, distribusi, dan pasokan ikan yang merata.

Korelasi antara meningkatnya produksi benih dan konsumsi ikan menunjukkan ekosistem budidaya yang berkembang secara sehat. Namun, ke depan, perlu ada indikator tambahan untuk memperkaya gambaran urusan ini, seperti volume panen ikan konsumsi, nilai ekonomi hasil budidaya, dan jumlah pelaku usaha perikanan aktif. Penguatan daya saing sektor ini melalui teknologi bioflok, urban aquaculture, dan pemberdayaan UMKM pengolahan hasil perikanan akan menjadi langkah strategis berikutnya, mengingat peran perikanan sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penjaga ketahanan pangan berbasis sumber daya air kota.

2.1.3.12. Fokus Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Dalam UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia di daerah tersebut. Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100	n/a	99,47	98,96	100
4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd	%	100	98,02	100	100	100
5	Penjabaran konsistensi program RKPd ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Depok, 2025

Urusan perencanaan merupakan fondasi dalam siklus pembangunan daerah. Data indikator kinerja dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Depok telah mempertahankan stabilitas dan kualitas yang baik dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan daerah. Ketiga dokumen perencanaan utama—RPJPD, RPJMD, dan RKPd—secara konsisten telah tersedia dan ditetapkan melalui regulasi resmi (PERDA dan PERKADA), menandakan adanya kepatuhan normatif terhadap ketentuan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

Dokumen jangka panjang RPJPD dan menengah RPJMD telah tersedia sejak awal periode evaluasi, yaitu tahun 2020, hingga tahun 2024, dengan status “Ada” setiap tahunnya. Ini menjadi indikasi bahwa perencanaan strategis jangka panjang dan menengah Kota Depok telah disiapkan secara sistematis dan telah memiliki arah kebijakan yang jelas, termasuk dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah. Keberadaan dokumen ini juga menjadi syarat mutlak bagi tersusunnya RKPd dan APBD setiap tahun.

Indikator ketiga, yaitu tersedianya dokumen RKPd (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), juga menunjukkan tren yang hampir sempurna. Dengan capaian 100% di 2020 dan 2024, serta sedikit fluktuasi di tahun 2022 (99,47%) dan 2023 (98,96%), hal ini menandakan bahwa proses perencanaan tahunan berjalan cukup optimal. Fluktuasi tersebut kemungkinan terkait dengan keterlambatan dalam penetapan atau harmonisasi dengan tahapan Musrenbang dan proses penginputan SIPD, namun secara umum tidak mengganggu keberlangsungan proses perencanaan.

Lebih lanjut, indikator konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran juga menunjukkan kinerja luar biasa. Konsistensi program RPJMD ke RKPd dan konsistensi program RKPd ke APBD sama-sama berada di angka 100% selama sebagian besar periode, kecuali tahun 2021 yang sempat sedikit menurun ke 98,02%—kemungkinan karena penyesuaian terhadap perubahan arah

kebijakan akibat pandemi COVID-19 atau revisi RPJMD. Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemkot Depok berhasil menjaga benang merah antara perencanaan strategis dan operasional hingga ke level penganggaran.

Secara keseluruhan, kinerja urusan perencanaan Kota Depok selama lima tahun terakhir tergolong sangat baik dan konsisten. Hal ini menjadi landasan kuat untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan dokumen perencanaan, serta mampu menjawab kebutuhan dan prioritas masyarakat secara berkelanjutan. Ke depan, kualitas perencanaan ini dapat lebih ditingkatkan melalui penguatan sistem informasi perencanaan berbasis digital, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, serta evaluasi periodik terhadap keselarasan antara hasil dan perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Keuangan

Setiap pembangunan tentunya perlu dibiayai dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan anggaran yang akuntabel dan memihak rakyat merupakan salah satu fokus Pemerintah Kota Depok dalam membangun Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera.

Tabel dibawah ini menunjukkan capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Depok Pada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.90 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan,	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	Persen	9,26	15,93	13,27	6,58	5,08
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9,26	15,93	12,97	6,42	4,95
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	29,61	24,84	23,12	20,63	27,55
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	15,56	21,79	20,65	19,38	19,21
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BKD Kota Depok, 2025

Dalam lima tahun terakhir, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Depok menunjukkan performa yang kuat dan stabil, mencerminkan tata kelola fiskal yang akuntabel, efisien, dan selaras dengan prinsip transparansi. Hal ini terlihat dari capaian Opini BPK atas laporan keuangan yang secara konsisten memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi opini WTP dari BPK merupakan indikator utama bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah disusun secara akurat, berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum, dan mencerminkan keandalan sistem pengendalian internal.

Lebih lanjut, indikator Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Penurunan SILPA dari 15,93% pada 2021 menjadi hanya 5,08% pada 2024 mencerminkan peningkatan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. SILPA yang menurun secara progresif ini bisa menjadi cerminan bahwa Pemkot Depok telah melakukan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, mengurangi potensi idle budget, dan meningkatkan realisasi program pembangunan. Selain itu, rasio SILPA terhadap total APBD juga menunjukkan pola serupa turun dari 15,93% menjadi 4,95%, memperkuat sinyal bahwa kapasitas serapan belanja daerah mengalami peningkatan.

Pada aspek belanja wajib, proporsi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai amanat konstitusi juga menunjukkan perhatian serius. Belanja pendidikan yang selalu berada di atas 20% bahkan mencapai 29,61% di tahun 2020 dan 27,55% di 2024 membuktikan komitmen kuat Pemkot terhadap pengembangan SDM jangka panjang. Sementara itu, belanja kesehatan juga selalu memenuhi syarat minimal 10%, bahkan lebih dari itu setiap tahun, dengan capaian tertinggi 21,79% di tahun 2021. Tren ini penting, terlebih mengingat adanya kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat selama masa pandemi, dan masih menjadi prioritas pada fase pemulihan pasca pandemi.

Terakhir, indikator ketepatan waktu penetapan APBD menunjukkan capaian yang sempurna: 100% tepat waktu selama lima tahun berturut-turut. Ini menandakan koordinasi lintas sektor di tingkat legislatif dan eksekutif berjalan efektif, serta menunjukkan kedewasaan sistem perencanaan fiskal Kota Depok. Ketepatan ini krusial dalam menjamin pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

Secara keseluruhan, urusan keuangan Kota Depok dapat dikatakan telah dikelola secara sangat baik. Konsistensi opini WTP, tren SILPA yang menurun, pemenuhan belanja wajib, serta ketepatan penetapan APBD menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berjalan normatif, tetapi juga semakin berkualitas dari sisi implementasi. Ke depan, tantangan yang mungkin dihadapi adalah mempertahankan efisiensi ini di tengah dinamika fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Tantangan dalam pembangunan Kota Depok semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permasalahan yang dihadapi Kota Depok sebagai kota metropolitan dan daerah penyangga Ibukota Jakarta. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, tentunya Pemerintah Kota Depok

membutuhkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang responsif dalam melayani masyarakat. Realisasi indikator kinerja urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	n/a	0	18,08	25,56	87,16
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	8,91	6,46	6,75	12,21	31,19
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	4,51	1,75	10,59	13,46	14,15
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	28	30	32	31	30
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2,887	2,756	2,579	2,172	2111
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	Pemangku Jabatan	3,739	3,658	3,882	5,014	4849

Sumber: BKPSDM Kota Depok, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja Pemerintah Kota Depok dalam urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada aspek pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terlihat dari indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, yang melonjak tajam dari nihil di tahun 2021 menjadi 87,16 jam di tahun 2024. Peningkatan drastis ini mengindikasikan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi pegawai, yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara paralel, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga menunjukkan tren peningkatan progresif dari 8,91% pada tahun 2020 menjadi 31,19% di tahun 2024. Meskipun sempat menurun di tahun 2021 dan 2022, capaian ini berhasil dipacu kembali pada dua tahun terakhir, yang bisa jadi merupakan hasil dari strategi kebijakan pelatihan berbasis kebutuhan organisasi dan pemanfaatan platform pelatihan daring pascapandemi. Peningkatan signifikan ini merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak ASN yang memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas secara formal, sebagai bagian dari penguatan SDM birokrasi yang adaptif dan profesional.

Namun demikian, indikator persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural memperlihatkan peningkatan yang lebih lambat. Meskipun ada perbaikan dari 1,75% di tahun 2021 menjadi 14,15% pada tahun 2024, capaian ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk membentuk pemimpin birokrasi yang visioner dan kompeten secara manajerial. Hal ini bisa menjadi catatan penting ke depan bahwa pengembangan leadership ASN, terutama dalam kerangka manajemen talenta, memerlukan akselerasi yang lebih terstruktur.

Di sisi komposisi jabatan, jumlah jabatan pimpinan tinggi cenderung stabil, berada pada kisaran 28–32 jabatan selama periode lima tahun, menunjukkan bahwa struktur organisasi tingkat strategis tidak mengalami banyak perubahan. Sementara itu, jumlah jabatan administrasi mengalami penurunan yang konsisten dari 2.887 pada 2020 menjadi 2.111 pada 2024, yang dapat ditafsirkan sebagai bagian dari transformasi birokrasi, terutama terkait penyederhanaan birokrasi dan peralihan ke jabatan fungsional. Sebaliknya, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu meningkat dari 3.739 menjadi 4.849, memperkuat hipotesis bahwa Pemerintah Kota Depok tengah mengarah pada sistem birokrasi berbasis keahlian, sebagaimana amanat reformasi birokrasi nasional.

Secara umum, capaian urusan ini mengindikasikan bahwa Kota Depok semakin menempatkan pengelolaan SDM ASN sebagai prioritas strategis pembangunan institusi pemerintahan. Meski beberapa indikator masih membutuhkan akselerasi, terutama terkait pelatihan struktural pejabat ASN, tren penguatan kapasitas, transformasi jabatan, dan peningkatan waktu pelatihan menunjukkan bahwa pondasi reformasi birokrasi telah mulai terbentuk dengan cukup kokoh. Ke depan, penguatan kebijakan manajemen talenta berbasis kinerja serta pengembangan kompetensi berkelanjutan akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan birokrasi yang lincah dan berdampak.

d. Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	16	100	93	35	50
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	92	95	70	70
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa	%	n/a	100	100	65	70
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	%	70	78	87	70	70

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	di daerah Penerapan SiDa						

Sumber: Bappeda Kota Depok, 2025

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan (litbang) Kota Depok selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik, menggambarkan perjalanan transformasi daerah dalam mengarusutamakan pendekatan berbasis pengetahuan (knowledge-based policy) dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Indikator persentase implementasi rencana kelitbangan mencerminkan tingkat eksekusi dari rencana kegiatan penelitian yang telah disusun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini masih rendah, yakni hanya 16%, namun melonjak drastis menjadi 100% di tahun 2021. Meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya turun ke 93% pada 2022, kemudian cukup drastis menurun ke 35% di 2023, dan naik kembali ke 50% di 2024 hal ini mencerminkan adanya tantangan konsistensi dalam pelaksanaan rencana litbang, baik dari sisi pembiayaan, koordinasi antar perangkat daerah, maupun kualitas perencanaan awalnya.

Indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan secara umum menunjukkan capaian yang baik dan relatif stabil di atas 70% sepanjang periode evaluasi. Dengan angka tertinggi 100% di tahun 2020 dan angka terendah 70% pada dua tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok secara nyata telah dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi program. Meski demikian, stagnasi pada angka 70% di 2023 dan 2024 juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa hasil kelitbangan mulai menghadapi tantangan dalam relevansi, daya guna, atau keberterimaan pada tataran implementatif.

Salah satu kekuatan yang ditunjukkan urusan ini terletak pada aspek fasilitasi penerapan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) kepada perangkat daerah. Setelah tidak tersedia datanya di tahun 2020, capaian indikator ini langsung melonjak ke 100% di tahun 2021 dan 2022, mencerminkan komitmen tinggi dalam membangun ekosistem inovasi daerah. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023 (65%) dan stagnan di angka 70% pada 2024, hal ini tetap mencerminkan bahwa lebih dari separuh perangkat daerah telah mulai terfasilitasi dalam penerapan sistem inovasi — capaian yang masih tergolong baik, meskipun perlu penguatan lebih lanjut, khususnya dari aspek pembinaan dan asistensi keberlanjutan.

Selaras dengan indikator sebelumnya, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah melalui penerapan SiDa juga memperlihatkan tren peningkatan dari 70% di tahun 2020 hingga puncaknya 87% pada 2022, meskipun kemudian kembali stagnan di angka 70% pada 2023 dan 2024. Konsistensi dalam mempertahankan angka ini menunjukkan adanya kesinambungan pemanfaatan instrumen inovatif dalam kebijakan daerah, namun juga mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi yang benar-benar terimplementasi di lapangan, terutama dengan memperkuat sinergi antara hasil litbang dan kebutuhan real-time dari tiap-tiap perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian urusan penelitian dan pengembangan Kota Depok menegaskan bahwa pendekatan evidence-based policy sudah mulai dijalankan dengan cukup baik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya, dibutuhkan sistem pelacakan hasil litbang yang lebih ketat, penguatan kolaborasi dengan lembaga riset dan universitas, serta penguatan kapasitas SDM litbang di perangkat daerah. Pendekatan litbang tak hanya menjadi instrumen pelengkap, tetapi harus terus ditumbuhkan sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang cerdas, adaptif, dan inovatif.

2.1.3.13. Fokus Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Pengawasan

Fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan di Kota Depok dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data indikator kinerja urusan pengawasan Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.93 Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	90,64	90,49	93,59	88,63	94,92
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	2,03	0,23	0,34	0,11	0,14
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	20	11	22	7	20

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Depok, 2024

Kinerja urusan pengawasan di Kota Depok selama tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang cukup signifikan dalam konteks efektivitas tindak lanjut hasil audit serta disiplin aparatur pemerintah. Dari indikator persentase tindak lanjut temuan, terlihat bahwa Pemerintah Kota Depok secara konsisten menjaga tingkat penyelesaian atas temuan audit di atas 88%, dengan capaian tertinggi sebesar 94,92% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya komitmen dan respons cepat dalam menyikapi temuan pemeriksaan, yang merupakan salah satu indikator penting dari akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun sempat menurun pada tahun 2023 (88,63%) dari capaian sebelumnya (93,59% di 2022), perbaikan kembali pada 2024 menjadi sinyal positif bahwa mekanisme perbaikan dan kontrol internal masih berjalan efektif.

Selanjutnya, indikator persentase pelanggaran pegawai menggambarkan tren yang sangat menggembirakan dalam aspek kedisiplinan dan kepatuhan ASN terhadap norma dan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2020, tingkat pelanggaran pegawai berada pada angka 2,03%, namun berhasil ditekan secara drastis menjadi hanya 0,23% di 2021, dan terus bertahan rendah di kisaran 0,11% hingga 0,14% pada periode 2022–2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan strategi pembinaan, pengawasan melekat, dan penegakan disiplin yang dijalankan oleh manajemen kepegawaian serta fungsi pengawasan internal.

Namun demikian, indikator jumlah temuan BPK memperlihatkan fluktuasi yang patut dicermati. Setelah mengalami penurunan signifikan dari 20 temuan di 2020 menjadi hanya 11 di 2021, angka ini kembali naik menjadi 22 pada tahun 2022. Penurunan drastis terjadi di 2023 dengan hanya 7 temuan, tetapi pada 2024 kembali melonjak ke 20 temuan. Ketidakstabilan ini bisa diinterpretasikan sebagai cerminan bahwa meskipun proses tindak lanjut berjalan baik, akar permasalahan atau kelemahan dalam proses pengelolaan keuangan dan program di beberapa perangkat daerah masih muncul secara berulang atau berganti bentuk. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya sistem kontrol internal di beberapa unit kerja atau karena belum optimalnya penerapan prinsip manajemen risiko dan monitoring berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja pengawasan di Kota Depok tergolong baik dalam hal kecepatan menindaklanjuti temuan dan menjaga kedisiplinan pegawai. Namun, untuk meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh, perlu diperkuat sistem deteksi dini (*early warning system*), serta peningkatan kualitas audit internal dan pengawasan fungsional. Dengan demikian, tidak hanya jumlah temuan yang bisa ditekan, tetapi juga potensi kesalahan berulang dapat dicegah sejak dini melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih preventif dan strategis.

2.1.3.14. Fokus Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Dewan

Indikator kinerja urusan Sekretariat Dewan Kota Depok Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kota Depok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Dewan, 2025

Kinerja urusan Sekretariat Dewan Kota Depok antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja DPRD. Semua indikator yang terukur, seperti tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, terstruktur dan terintegrasinya program-program kerja DPRD, serta terintegrasi program-program DPRD dalam dokumen perencanaan dan anggaran, semuanya tercatat dengan angka pencapaian 100% dari tahun ke tahun.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Kota Depok telah berhasil mengelola perencanaan dan penganggaran dengan sangat baik. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik dalam fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah (Perda), maupun dalam fungsi anggaran, telah dimasukkan dengan tepat ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RPJM) dan tahunan (RKPD), serta dokumen anggaran yang dikelola oleh Setwan DPRD. Dengan demikian, ada transparansi yang jelas mengenai setiap langkah dan alokasi anggaran untuk mendukung tugas-tugas DPRD yang sangat penting dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan daerah.

Selain itu, integrasi yang solid antara program-program DPRD dan dokumen perencanaan serta anggaran ini mencerminkan keberhasilan dalam sistem tata kelola yang memadai, yang juga menunjukkan profesionalisme Sekretariat Dewan dalam menjalankan tugas administratifnya. Dengan segala pencapaian ini, Sekretariat Dewan Kota Depok sudah berada pada jalur yang benar dalam mendukung kelancaran fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif.

Namun, meskipun pencapaian ini sangat baik dalam aspek administrasi dan perencanaan, perlu ada perhatian lebih terhadap pemantauan implementasi dari setiap program yang sudah terencana. Melihat bahwa indikator yang digunakan lebih bersifat administratif, ke depan mungkin dapat dipertimbangkan untuk menambah indikator yang lebih menggambarkan dampak dan efektivitas dari implementasi program kerja DPRD, terutama dalam hal pengawasan dan perencanaan anggaran yang berkelanjutan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai tahun 2025

2.2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Depok sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi capaian indikator makro sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum bisa dilakukan karena data belum tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menghitung capaian indikator makro. Untuk itu dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 masih menggunakan data Tahun 2024. Perkembangan indikator makro pembangunan Kota Depok sampai dengan tahun 2024 secara umum masih di atas rata-rata nasional dan Propinsi Jawa Barat, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.95 Realisasi Indikator Makro Kota Depok 2020-2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	80,97	81,37	82,02	82,53	83,05	Belum Rilis
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47	Belum Rilis
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27	Belum Rilis
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34	Belum Rilis
5	Indeks Gini (poin)	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398	Belum Rilis
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,64	1,92	1,79	1,55	1,37	Belum Rilis

NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	80,97	81,37	82,02	82,53	83,05	Belum Rilis
7	Pendapatan Per Kapita (ribu rupiah)	34.356,00	35.655,00	38.225,81	40.816,92	43,51	Belum Rilis
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ /tahun)	9,03	8,40	3,10	-32,37	-28,36	Belum Rilis

Sumber : Bappeda, BPS Kota Depok, 2025

Berdasarkan data indikator makro Kota Depok periode 2020–2025, terlihat beberapa tren penting yang mencerminkan dinamika pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan konsisten dari 80,97 poin (2020) menjadi 83,05 poin (2024), mengindikasikan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Namun, data 2025 belum dirilis, sehingga perlu pemantauan lebih lanjut untuk melihat apakah tren positif ini berlanjut.

Di bidang ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi sempat berkontraksi (-1,92%) pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, tetapi pulih signifikan pada 2021–2024 dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5%. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Kota Depok, didorong oleh pemulihan sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Namun, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi (meski turun dari 9,87% di 2020 menjadi 6,27% di 2024), mengisyaratkan perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif, terutama bagi tenaga kerja muda dan terampil.

Kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan hasil beragam. Persentase penduduk miskin cenderung menurun (2,45% di 2020 menjadi 2,34% di 2024), tetapi Indeks Gini justru naik dari 0,344 (2020) ke 0,402 (2023) sebelum sedikit membaik menjadi 0,398 (2024). Ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan berkurang, kesenjangan pendapatan masih melebar, memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti program bantuan sosial yang progresif dan penguatan UMKM.

Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,64% (2020) ke 1,37% (2024), mencerminkan tren urbanisasi yang melambat atau efektivitas program keluarga berencana. Sementara itu, pendapatan per kapita meningkat signifikan dari Rp34,356 ribu (2020) ke Rp43,51 ribu (2024), meskipun perlu verifikasi apakah kenaikan ini telah diikuti oleh pemerataan akses ekonomi.

Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menunjukkan perkembangan menarik. Dari penurunan 9,03 ton CO₂ pada 2020 menjadi -32,37 ton CO₂ pada 2023 dan -28,36 ton CO₂ pada 2024, menandakan keberhasilan upaya dekarbonisasi. Konsistensi penurunan emisi ini perlu dijaga untuk mendukung komitmen nasional terhadap penanggulangan perubahan iklim.

Secara keseluruhan, Kota Depok menunjukkan kemajuan di banyak sektor, tetapi tantangan seperti ketimpangan, pengangguran, dan keberlanjutan lingkungan masih perlu menjadi fokus pemerintah daerah. Pembangunan ke depan harus lebih inklusif, berbasis data, dan memprioritaskan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja tujuan pembangunan jangka menengah Kota Depok Tahun 2021-2026 terdiri dari 6 (enam) tujuan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tujuan. Data capaian kinerja tujuan sampai pada triwulan I tahun 2025 belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025. Adapun capaian kinerja tujuan pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Indikator Kinerja Tujuan Kota Depok Tahun 2020-2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Infrastruktur Fisik dan Digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Indeks kota layak huni	poin	61,8	n.a	63	64	67,7	Data belum tersedia
2	Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	62,9	63,13	63,9	64,4	82,15	Data belum tersedia
3	Membangun masyarakat Kota Depok yang	Persentase pemajuan kebudayaan	persen	NA	NA	0,18	0,19	0,2	Data belum tersedia

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
	berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga	Indeks pendidikan	poin	76,27	76,89	76,89	77,35	77,82	Data belum tersedia
		Indeks konflik sosial	poin	1,7	1,84	1,66	1,62	1,5	Data belum tersedia
		Indeks Pembangunan Keluarga	poin	NA	73,73	60,32	62,44	64,2	Data belum tersedia
4	Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	persen	-1,92	3,76%	5,30-5,78	5,96	5,28	Data belum tersedia
		Gini Rasio	poin	0,342	0,367	0,348	0,393	0,398	Data belum tersedia
5	Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing	Persentase pembangunan pemuda Kota Depok	persen	NA	NA	0,32	0,34	0,36	Data belum tersedia
6	Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib	Indeks kesehatan	poin	83,75	84,03	84,11	84,34	84,58	Data belum tersedia
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	poin	NA	74,19	74,67	75,33	76	Data belum tersedia

Sumber : RPJMD Kota Depok 2021-2026

Berdasarkan data indikator kinerja tujuan Kota Depok tahun 2020–2025, terlihat adanya tren positif pada sebagian besar indikator meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pencapaiannya. Pada tujuan pertama, yaitu terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, Indeks Kota Layak Huni mengalami peningkatan dari 61,8 poin pada tahun 2020 menjadi 67,7 poin pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung kenyamanan hidup warga serta penguatan infrastruktur digital. Namun, belum tersedianya

data tahun 2025 menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akhir capaian pembangunan tujuan ini.

Untuk tujuan kedua, yaitu terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan progres yang signifikan dari 62,9 pada tahun 2020 menjadi 82,15 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya pembenahan sistem kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi administrasi pemerintahan.

Pada tujuan ketiga, yaitu membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan, dan ketahanan keluarga, terdapat beberapa indikator kinerja. Persentase pemajuan kebudayaan menunjukkan peningkatan bertahap dari 0,18% pada 2022 menjadi 0,2% pada 2024, yang menandakan adanya komitmen dalam penguatan identitas budaya lokal, meskipun masih dalam tahap awal dan perlu akselerasi. Indeks Pendidikan yang naik dari 76,27 ke 77,82 poin mencerminkan peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang mendukung pembentukan masyarakat berpengetahuan. Indeks Konflik Sosial yang menurun dari 1,84 (2021) menjadi 1,5 (2024) mengindikasikan keberhasilan pembangunan sosial dalam memperkuat kohesi dan harmoni antarkelompok masyarakat. Sementara itu, Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan penurunan dari 73,73 (2021) menjadi 64,2 (2024), yang menjadi perhatian serius karena berpotensi melemahkan fondasi ketahanan keluarga yang menjadi basis utama masyarakat berbudaya dan toleran.

Tujuan keempat, yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri, menunjukkan dinamika yang menarik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) meningkat drastis dari -1,92% (2020) akibat dampak pandemi, menjadi 5,28% pada 2024, yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang cukup cepat dan kuat. Namun, kenaikan Gini Rasio dari 0,342 menjadi 0,398 pada periode yang sama menandakan adanya peningkatan kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat, sehingga perlu strategi pertumbuhan yang lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata.

Pada tujuan kelima, yakni terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, Persentase pembangunan pemuda Kota Depok meningkat perlahan dari 0,32% pada 2022 menjadi 0,36% pada 2024. Meskipun peningkatan ini menunjukkan adanya intervensi terhadap pemberdayaan pemuda, nilainya masih relatif rendah dan memerlukan terobosan lebih signifikan agar generasi muda memiliki daya saing dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, tujuan keenam, yaitu membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib, tercermin dari peningkatan Indeks Kesehatan dari 83,75 menjadi

84,58 poin, yang mengindikasikan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum naik dari 74,19 (2021) menjadi 76 (2024), menunjukkan adanya penguatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan tujuan ini tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas hidup secara holistik, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan perumahan.

Secara keseluruhan, Kota Depok menunjukkan progres positif dalam pencapaian berbagai tujuan strategis pembangunan daerah 2020–2024. data capaian tahun 2025 belum tersedia, karena belum dilakukan pengukuran. Evaluasi menyeluruh dan pembenahan pada indikator yang stagnan atau menurun sangat penting agar sasaran pembangunan jangka menengah Kota Depok 2025–2029 dapat dicapai secara berkelanjutan dan inklusif.

2.2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dapat diwujudkan. Tingkat capaian Kinerja Daerah berdasarkan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.97 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kota Depok 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian				
			(Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	poin	D (0,79)	D (0,79)	0,77	C (0.74)	C (0.72)	n/a
2	Moda Share Transportasi Umum	persen	17,10%	18,32%	14,46%	15,91%	18,62%	n/a
3	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	persen	47,25%	35,91%	12,10%	6,83%	6,77%	n/a
4	Ketaatan terhadap RTRW	persen	76,49%	75,24%	99,24%	99,24%	99,24%	n/a
5	Indeks SPBE	poin	3,39	2,99	3,42	3,70	4,32	n/a
6	Rasio Permukiman Layak	poin	0,9984	0,9984	0,9703	0,9992	0,9995	n/a

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Capaian				
			Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Cakupan Akses Sanitasi Layak	persen	98,81%	99,12%	99,13%	99,37%	99,42%	n/a
8	Cakupan Akses Air Minum Layak	persen	88,78%	89,01%	85,99%	85,22%	96,80%	n/a
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	53,89	58,97	58,61	57,85	59,00	n/a
10	Cakupan Layanan Persampahan	persen	94,23%	96,83%	94,82%	94,06%	95,23%	n/a
11	Nilai SAKIP Kota	poin	67,78	67,78	67,10	67,32	68,80	68,85
12	Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	77,00	77,00	83,25	84,25	84,75	85,75
14	Indeks Inovasi Daerah	poin	N.A	41,52	48,74 (inovatif)	51,12 (inovatif)	54,50 (inovatif)	n/a
15	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	persen	37,50%	50,00%	37,50%	37,50%	42,50%	42,50%
16	Persentase Ekspresi Budaya	jumlah/ persen	20 kegiatan	26,80%	34,02%	29,90%	30,93%	n/a
17	Indeks Kegemaran Membaca	poin	56,03	58,57	59,08	60,23	68,94	n/a
18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	persen	108,17%	102,86%	104,61%	104,59%	107,27%	n/a
19	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	persen	92,64%	93,93%	94,06%	94,84%	97,73%	n/a
20	Persentase PPKS yang tertangani	persen	87,74%	100,00%	41,89%	74,08%	80,91%	36,55%
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	3,08	n/a	3,26	3,6	3,53	n/a

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Capaian				
			Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Indeks Ketahanan Keluarga	poin	88,6	82,95	91,06	90,17	90,27	n/a
23	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)	Milyar Rp	88.098,28	93.264,93	101.971,97	111.087,57	119.443,08	n/a
24	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Milyar Rp	7.887,88	6.453,90	7.483,51	8.459,07	8.325,53	n/a
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	9,87%	9,76%	7,82%	6,97%	6,27%	n/a
26	Angka Kemiskinan	persen	2,45%	2,58%	2,53%	2,38%	2,34%	n/a
27	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	persen	N.A	48,10%	42,70%	42,80%	66,30%	n/a
28	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	persen	N.A	51,94%	53,00%	53,91%	50,00%	n/a
29	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jumlah	58,45	155,58	56,14	66,40	88,21	22,73
30	Persentase balita stunting	persen	5,31%	3,50%	3,48%	3,24%	3,58%	3,79%
31	Persentase Capaian SPM Trantibum	persen	N.A	65,50%	86,47%	89,38%	98,32%	89,02%

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2025

Data capaian kinerja sasaran RPJMD Kota Depok tahun 2021–2026 menunjukkan sejumlah pencapaian yang positif, meskipun masih terdapat fluktuasi dan tantangan di berbagai sektor. Pada sektor infrastruktur dan tata ruang, Tingkat Pelayanan Jalan menunjukkan peningkatan kualitas dari kategori D (0,79) menuju C (0,72) pada 2024, mencerminkan upaya peningkatan konektivitas jalan. Persentase genangan >2 kali setahun turun drastis dari 47,25% (2020) menjadi 6,77% (2024), menunjukkan keberhasilan pengelolaan drainase.

Moda share transportasi umum masih fluktuatif, mencerminkan tantangan dalam mendorong peralihan dari kendaraan pribadi. Sementara itu, kepatuhan terhadap RTRW meningkat tajam dari 76,49% menjadi 99,24%, menandakan penguatan dalam penegakan tata ruang. Indeks SPBE juga naik signifikan hingga mencapai 4,32 pada 2024, mencerminkan kemajuan digitalisasi layanan publik. Akses

sanitasi dan air minum layak tetap tinggi, namun cakupan air minum sempat menurun sebelum melonjak ke 96,80% pada 2024.

Dari sisi lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat meskipun fluktuatif, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan lingkungan. Cakupan layanan persampahan tetap tinggi di atas 94%, mencerminkan keberlanjutan dalam pelayanan dasar. Di bidang pemerintahan, nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 67,78 menjadi 68,85, dan opini BPK tetap WTP selama lima tahun berturut-turut, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat konsisten dari 77 menjadi 85,75, menunjukkan bahwa kualitas layanan publik semakin diapresiasi. Indeks Inovasi Daerah juga meningkat dan tetap pada kategori "inovatif", mengindikasikan kemampuan adaptif daerah terhadap perubahan. Di bidang budaya, meskipun jumlah warisan budaya yang ditetapkan stagnan, persentase ekspresi budaya dan indeks kegemaran membaca meningkat, menandakan penguatan budaya dan literasi masyarakat.

Di sektor pendidikan, APK SD dan SMP meningkat dan berada di atas 100% dan 97% secara berurutan pada 2024, menunjukkan keterjangkauan dan partisipasi pendidikan yang tinggi. Namun, penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) mengalami penurunan drastis pada 2022 (41,89%) dan kembali menurun di triwulan I 2025, mengindikasikan perlunya penajaman strategi intervensi sosial.

Indeks Kerukunan Umat Beragama stabil dan cukup tinggi, sementara Indeks Ketahanan Keluarga cenderung stabil di atas 90, mencerminkan ketahanan sosial masyarakat yang cukup baik. Secara ekonomi, konsumsi rumah tangga dan nilai investasi mengalami peningkatan, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dari 9,87% menjadi 6,27%, dan angka kemiskinan juga turun menjadi 2,34%, menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi.

Pada aspek kesehatan, angka kematian ibu sempat melonjak di 2021 namun berhasil ditekan menjadi 22,73 per 100.000 kelahiran hidup pada awal 2025, sementara angka stunting balita berhasil ditekan ke level di bawah 4% sejak 2022, mencerminkan efektivitas program intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak. Persentase capaian SPM Trantibum meningkat signifikan menjadi 98,32% pada 2024, meskipun sedikit menurun pada triwulan I 2025, menandakan penguatan pelayanan dasar di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum, capaian kinerja sasaran RPJMD Kota Depok menunjukkan arah yang konstruktif menuju target pembangunan, meskipun data 2025 belum lengkap karena sebagian besar indikator belum dilakukan pengukuran menyeluruh hingga triwulan pertama.

2.2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Kota Depok 2025 sampai dengan Triwulan I 2025

Berdasarkan tabel evaluasi Hasil RKPD Kota Depok sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana terlampir pada dokumen laporan ini, rata-rata capaian kinerja program per urusan adalah 27,00% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sangat tinggi : 24 program (12,57%) dari jumlah total 191 program;
2. Tinggi : 8 program (4,19%) dari jumlah total 191 program;
3. Sedang : 3 program (1,57%) dari jumlah total 191 program;
4. Rendah : 4 program (2,09%) dari jumlah total 191 program;
5. Sangat Rendah : 152 program (79,58%) dari jumlah total 191 program.

Kemudian untuk pencapaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025, rata-rata capaian kinerja kegiatan per urusan adalah 27,97% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sangat tinggi : 45 kegiatan (8,96%) dari jumlah total 502 kegiatan;
2. Tinggi : 6 kegiatan (1,20%) dari jumlah total 502 kegiatan;
3. Sedang : 8 kegiatan (1,59%) dari jumlah total 502 kegiatan;
4. Rendah : 13 kegiatan (2,59%) dari jumlah total 502 kegiatan;
5. Sangat Rendah : 430 kegiatan (85,66%) dari jumlah total 502 kegiatan.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sub kegiatan per urusan adalah 19,55% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sangat tinggi : 141 sub kegiatan (10,52%) dari jumlah total 1.340 sub kegiatan;
2. Tinggi : 9 sub kegiatan (0,67%) dari jumlah total 1.340 sub kegiatan;
3. Sedang : 20 sub kegiatan (1,49%) dari jumlah total 1.340 sub kegiatan;
4. Rendah : 15 sub kegiatan (1,12%) dari jumlah total 1.340 sub kegiatan;
5. Sangat Rendah : 1.155 sub kegiatan (86,19%) dari jumlah total 1.340 sub kegiatan.

Ringkasan capaian indikator kinerja program disandingkan dengan realisasi keuangan per urusan tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Program dibandingkan Realisasi Keuangan per Urusan s.d.
Triwulan I Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB	2.892.160.400.717,00	461.129.539.076	39,46	Sangat Rendah	15,94	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	2.251.028.665.519,00	283.028.510.492	39,61	Sangat Rendah	12,57	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	715.066.758.840,00	128.396.996.944	5,66	Sangat Rendah	17,96	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	732.021.360.427,00	114.390.442.792	44,31	Sangat Rendah	15,63	Sangat Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	386.913.197.477,00	13.912.592.363	3,65	Sangat Rendah	3,60	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	299.577.374.554,00	6.505.456.999	71,45	Sedang	2,17	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	81.533.832.231,00	15.018.101.943	31,10	Sangat Rendah	18,42	Sangat Rendah
1.06	Sosial	35.916.141.990,00	4.804.919.451	81,50	Tinggi	13,38	Sangat Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	641.131.735.198,00	178.101.028.584	39,30	Sangat Rendah	27,78	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	17.098.057.207,00	2.434.224.071	27,83	Sangat Rendah	14,24	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.309.343.647,00	3.363.102.227	33,30	Sangat Rendah	20,62	Sangat Rendah
2.09	Pangan	17.806.816.318,00	4.705.410.470	26,60	Sangat Rendah	26,42	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan	130.503.687.000,00	72.104.820.015	52,27	Rendah	55,25	Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	217.865.418.733,00	33.034.117.906	77,64	Tinggi	15,16	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	24.054.204.847,00	6.688.795.529	23,94	Sangat Rendah	27,81	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.482.905.150,00	132.746.746	117,81	Sangat Tinggi	2,96	Sangat Rendah
2.15	Perhubungan	83.449.293.701,00	29.206.923.155	51,04	Rendah	35,00	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	36.021.538.386,00	5.305.494.511	25,00	Sangat Rendah	14,73	Sangat Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.292.583.074,00	3.002.700.394	3,75	Sangat Rendah	11,87	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18	Penanaman Modal	19.217.604.200,00	4.113.081.808	15,17	Sangat Rendah	21,40	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	29.673.672.070,00	10.394.593.945	20,43	Sangat Rendah	35,03	Sangat Rendah
2.20	Statistik	1.050.079.000,00	71.122.800	80,00	Tinggi	6,77	Sangat Rendah
2.21	Persandian	502.993.150,00	0	88,89	Tinggi	0,00	Sangat Rendah
2.22	Kebudayaan	1.381.452.500,00	66.319.800	3,38	Sangat Rendah	4,80	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	2.302.408.900,00	322.650.884	11,36	Sangat Rendah	14,01	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	14.119.677.315,00	3.154.924.323	9,76	Sangat Rendah	22,34	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	38.372.069.752,00	8.917.233.885	16,62	Sangat Rendah	23,24	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	697.219.350,00	147.090.725	17,00	Sangat Rendah	21,10	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	971.157.050,00	47.745.450	0,00	Sangat Rendah	4,92	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	2.741.056.050,00	689.308.240	54,92	Rendah	25,15	Sangat Rendah
3.30	Perdagangan	32.555.151.902,00	8.031.069.470	27,77	Sangat Rendah	24,67	Sangat Rendah
3.31	Perindustrian	1.296.741.400,00	2.020.000	0,00	Sangat Rendah	0,16	Sangat Rendah
3.32	Transmigrasi	110.744.000,00	0	0	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	284.380.251.857,00	68.262.276.394	41,93	Sangat Rendah	24,00	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	164.191.325.753,00	33.559.822.281	43,86	Sangat Rendah	20,44	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	120.188.926.104,00	34.702.454.113	40,00	Sangat Rendah	28,87	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	252.722.643.715,00	20.842.572.957	34,62	Sangat Rendah	8,25	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	22.441.011.204,00	4.708.704.515	47,89	Sangat Rendah	20,98	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	178.421.265.212,00	12.689.779.125	64,80	Rendah	7,11	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	41.494.540.799,00	3.375.804.361	60,27	Rendah	8,14	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	9.062.876.800,00	18.113.500	0,17	Sangat Rendah	0,20	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.302.949.700,00	50.171.456	0,00	Sangat Rendah	3,85	Sangat Rendah
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	23.428.950.559,00	5.925.905.675	17,05	Sangat Rendah	25,29	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01	Inspektorat	23.428.950.559	5.925.905.675	17,05	Sangat Rendah	25,29	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	404.964.654.141,00	46.011.914.621	16,11	Sangat Rendah	11,36	Sangat Rendah
7.01	Kecamatan	404.964.654.141,00	46.011.914.621	16,11	Sangat Rendah	11,36	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.090.420.760,00	2.675.143.129	10,77	Sangat Rendah	8,89	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	30.090.420.760,00	2.675.143.129	10,77	Sangat Rendah	8,89	Sangat Rendah
TOTAL		3.926.119.391.501,00	613.764.585.737,00	27,00	Sangat Rendah	15,63	Sangat Rendah

Keterangan : % Fisik adalah rata-rata capaian kinerja program per urusan

Sumber : Evaluasi Hasil Renja PD Tw. I 2025, diolah

Dari tabel diatas, rata-rata capaian kinerja program per urusan adalah 27,00% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sangat tinggi : 1 Urusan (3,45%) dari jumlah total 29 Urusan dan 0 Unsur (0%) dari jumlah total 10 unsur;
- b. Tinggi : 4 Urusan (13,79%) dari jumlah total 29 Urusan dan 0 Unsur (0%) dari jumlah total 10 unsur;
- c. Sedang : 1 Urusan (3,45%) dari jumlah total 29 Urusan dan 0 Unsur (0%) dari jumlah total 10 unsur;
- d. Rendah : 3 Urusan (10,34%) dari jumlah total 29 Urusan dan 2 Unsur 2(0%) dari jumlah total 10 unsur;
- e. Sangat Rendah : 20 Urusan (68,97%) dari jumlah total 29 Ur/usan dan 8 Unsur (80%) dari jumlah total 10 unsur.

Realisasi Belanja Daerah (terhadap APBD 2025)

Realisasi belanja daerah Kota Depok Tahun 2025 hingga Triwulan I mencapai Rp613.764.585.737,- dari pagu APBD sebesar Rp4.602.017.263.509,- atau 13,34% (klasifikasi sangat rendah). Secara rinci, realisasi terdiri atas belanja operasi (14,95%), belanja modal (7,78%), dan belanja tidak terduga (4,27%). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.99 Realisasi Belanja s.d. Triwulan I Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/CAPAIAN	%
		Rp.	Rp.	Rp.	
2.1	BELANJA OPERASI	3.574.107.316.287	534.462.510.408	(3.039.644.805.879)	14,95
2.2	BELANJA MODAL	1.010.130.402.016	78.542.075.329	(931.588.326.687)	7,78
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.779.545.206	760.000.000	(17.019.545.206)	4,27
Jumlah Belanja		4.602.017.263.509	613.764.585.737	(3.988.252.677.772)	13,34

Sumber : LRA Triwulan I 2025. BKD

Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan per Perangkat Daerah

Serapan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun anggaran 2025

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.829.777.054.314	283.028.510.492	2.546.748.543.822	10,00
1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.221.641.591.340	128.396.996.944	1.093.244.594.396	10,51
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan	1.221.641.591.340	128.396.996.944	1.093.244.594.396	10,51
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	796.844.679.129	114.390.442.792	682.454.236.337	14,36
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	796.844.679.129	114.390.442.792	682.454.236.337	14,36
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	392.377.668.640	13.912.592.363	378.465.076.277	3,55
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	392.377.668.640	13.912.592.363	378.465.076.277	3,55
1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	299.124.827.534	6.505.456.999	292.619.370.535	2,17
1.04.2.10.1.03.3.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	299.124.827.534	6.505.456.999	292.619.370.535	2,17
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	83.729.717.181	15.018.101.943	68.711.615.238	17,94
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.334.305.193	6.762.797.318	28.571.507.875	19,14

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.05.0.00. 0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	48.395.411.988	8.255.304.625	40.140.107.363	17,06
1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	36.058.570.490	4.804.919.451	31.253.651.039	13,33
1.06.0.00. 0.00.01.	Dinas Sosial	36.058.570.490	4.804.919.451	31.253.651.039	13,33
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan	769.783.423.198	178.101.028.584	591.682.394.614	23,14 %
2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	19.854.530.757	2.434.224.071	17.420.306.686	12,26
2.07.3.32. 0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	19.854.530.757	2.434.224.071	17.420.306.686	12,26
2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.920.253.647	3.363.102.227	13.557.151.420	19,88
2.08.2.13. 2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.920.253.647	3.363.102.227	13.557.151.420	19,88
2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	17.721.784.318	4.705.410.470	13.016.373.848	26,55
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	17.721.784.318	4.705.410.470	13.016.373.848	26,55
2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	217.442.487.000	72.104.820.015	145.337.666.985	33,16
1.04.2.10. 1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	217.442.487.000	72.104.820.015	145.337.666.985	33,16
2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	218.477.393.333	33.034.117.906	185.443.275.427	15,12
2.11.1.03. 0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	218.477.393.333	33.034.117.906	185.443.275.427	15,12
2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.919.974.647	6.688.795.529	18.231.179.118	26,84
2.12.0.00. 0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24.919.974.647	6.688.795.529	18.231.179.118	26,84
2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.142.422.150	132.746.746	16.009.675.404	0,82

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.08.2.13. 2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.142.422.150	132.746.746	16.009.675.404	0,82
2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	108.454.107.176	29.206.923.155	79.247.184.021	26,93
2.15.0.00. 0.00.01.	Dinas Perhubungan	108.454.107.176	29.206.923.155	79.247.184.021	26,93
2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	36.418.840.786	5.305.494.511	31.113.346.275	14,57
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	36.418.840.786	5.305.494.511	31.113.346.275	14,57
2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	24.543.904.699	3.002.700.394	21.541.204.305	12,23
2.17.0.00. 0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	24.543.904.699	3.002.700.394	21.541.204.305	12,23
2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	19.824.309.700	4.113.081.808	15.711.227.892	20,75
2.18.0.00. 0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.824.309.700	4.113.081.808	15.711.227.892	20,75
2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	29.674.120.570	10.394.593.945	19.279.526.625	35,03
2.19.2.22. 3.26.0 3.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	29.674.120.570	10.394.593.945	19.279.526.625	35,03
2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1.050.079.000	71.122.800	978.956.200	6,77
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.050.079.000	71.122.800	978.956.200	6,77
2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	602.993.150	-	602.993.150	0,00
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	602.993.150	-	602.993.150	0,00
2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.305.965.500	66.319.800	1.239.645.700	5,08
2.19.2.22. 3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	1.305.965.500	66.319.800	1.239.645.700	5,08
2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.297.681.650	322.650.884	1.975.030.766	14,04
2.24.2.23. 0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.297.681.650	322.650.884	1.975.030.766	14,04

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	14.132.575.115	3.154.924.323	10.977.650.792	22,32
2.24.2.23. 0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	14.132.575.115	3.154.924.323	10.977.650.792	22,32
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	39.156.665.202	8.917.233.885	30.239.431.317	22,77
3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	697.219.350	147.090.725	550.128.625	21,10
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	697.219.350	147.090.725	550.128.625	21,10
3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	883.157.050	47.745.450	835.411.600	5,41
2.19.2.22. 3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	883.157.050	47.745.450	835.411.600	5,41
3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	2.804.896.050	689.308.240	2.115.587.810	24,58
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2.804.896.050	689.308.240	2.115.587.810	24,58
3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	33.268.736.902	8.031.069.470	25.237.667.432	24,14
3.30.3.31. 0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	33.268.736.902	8.031.069.470	25.237.667.432	24,14
3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.391.911.850	2.020.000	1.389.891.850	0,15
3.30.3.31. 0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.391.911.850	2.020.000	1.389.891.850	0,15
3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	110.744.000	-	110.744.000	0,00
2.07.3.32. 0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	110.744.000	-	110.744.000	0,00
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	292.464.342.402	68.262.276.394	224.202.066.008	23,34
4.01.	Sekretariat Daerah	163.811.945.223	33.559.822.281	130.252.122.942	20,49
4.01.0.00. 0.00.01.	Sekretariat Daerah	163.811.945.223	33.559.822.281	130.252.122.942	20,49
4.02.	Sekretariat DPRD	128.652.397.179	34.702.454.113	93.949.943.066	26,97
4.02.0.00. 0.00.01.	Sekretariat DPRD	128.652.397.179	34.702.454.113	93.949.943.066	26,97
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	202.029.398.262	20.842.572.957	181.186.825.305	10,32
5.01.	Perencanaan	21.062.892.466	4.708.704.515	16.354.187.951	22,36
5.01.5.05. 0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	21.062.892.466	4.708.704.515	16.354.187.951	22,36

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.02.	Keuangan	137.213.604.347	12.689.779.125	124.523.825.222	9,25
5.02.2.16. 0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	137.213.604.347	12.689.779.125	124.523.825.222	9,25
5.03.	Kepegawaian	33.339.037.949	3.375.804.361	29.963.233.588	10,13
5.03.5.04. 0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.339.037.949	3.375.804.361	29.963.233.588	10,13
5.04.	Pendidikan Dan Pelatihan	9.110.913.800	18.113.500	9.092.800.300	0,20
5.03.5.04. 0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.110.913.800	18.113.500	9.092.800.300	0,20
5.05.	Penelitian Dan Pengembangan	1.302.949.700	50.171.456	1.252.778.244	3,85
5.01.5.05. 0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	1.302.949.700	50.171.456	1.252.778.244	3,85
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	31.194.418.042	5.925.905.675	25.268.512.367	19,00
6.01.	Inspektorat	31.194.418.042	5.925.905.675	25.268.512.367	19,00
6.01.0.00. 0.00.01.	Inspektorat Daerah	31.194.418.042	5.925.905.675	25.268.512.367	19,00
7.	Unsur Kewilayahan	408.191.451.585	46.011.914.621	362.179.536.964	11,27
7.01.	Kecamatan				
7.01.0.00. 0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	40.550.932.982	3.926.108.246	36.624.824.736	9,68
7.01.0.00. 0.00.02.	Kecamatan Cilodong	31.948.597.282	3.923.081.839	28.025.515.443	12,28
7.01.0.00. 0.00.03.	Kecamatan Sawangan	42.797.605.205	4.802.052.756	37.995.552.449	11,22
7.01.0.00. 0.00.04.	Kecamatan Cinere	25.456.365.816	3.180.103.795	22.276.262.021	12,49
7.01.0.00. 0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	43.807.717.422	4.210.444.280	39.597.273.142	9,61
7.01.0.00. 0.00.06.	Kecamatan Limo	25.937.523.122	3.148.478.072	22.789.045.050	12,14
7.01.0.00. 0.00.07.	Kecamatan Beji	38.414.746.884	5.057.244.692	33.357.502.192	13,16
7.01.0.00. 0.00.08.	Kecamatan Tapos	43.902.615.309	4.667.454.598	39.235.160.711	10,63
7.01.0.00. 0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	41.471.544.590	3.862.081.833	37.609.462.757	9,31%
7.01.0.00. 0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	41.849.111.751	5.875.843.906	35.973.267.845	14,04
7.01.0.00. 0.00.11.	Kecamatan Cipayung	32.054.691.222	3.359.020.604	28.695.670.618	10,48
8.	Unsur Pemerintahan Umum	29.420.510.504	2.675.143.129	26.745.367.375	9,09
8.01.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.420.510.504	2.675.143.129	26.745.367.375	9,09

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
8.01.0.00. 0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.420.510.504	2.675.143.129	26.745.367.375	9,09
Jumlah		4.602.017.263.509	613.764.585.737	3.988.252.677.772	13,34

Sumber : LRA Triwulan I 2025. BKD

Realisasi anggaran tertinggi pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 35,03% dan yg terendah pada Urusan Transmigrasi dan Urusan Persandian yaitu 0%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I antara lain:

- a. Permasalahan dalam serapan dan pengelolaan belanja daerah antara lain:
 - Tidak terserapnya gaji, tunjangan kinerja, dan THR disebabkan oleh pengurangan pegawai akibat mutasi, meninggal dunia, pensiun, dan sebagainya.
 - Perangkat daerah tidak disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaannya.
 - Efisiensi anggaran.
 - Keterlambatan sebagian belanja barang dan jasa disebabkan oleh proses perubahan penjabaran APBD yang masih berlangsung.
- b. Kelemahan perencanaan kegiatan/sub kegiatan : penyusunan target anggaran kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat penyimpangan (deviasi) penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran kas;
- c. Keterlambatan Pembuatan/penerbitan dokumen penatausahaan keuangan :
 - Pada belanja pengadaan barang dan jasa, diperlukan verifikasi berulang terhadap dokumen penatausahaan keuangan untuk proses pencairan;
 - Terdapat keterlambatan dari perangkat daerah dalam mengajukan ganti uang.
- d. Kurang/tidak efektifnya pemantauan atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan : Perangkat Daerah belum melaksanakan kegiatan secara efektif sesuai dengan anggaran kas.

Solusi yang telah diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan pendampingan penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Kelurahan oleh Tim Kota untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan rencana;
- b. Melakukan desk evaluasi penyerapan APBD Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara berkala untuk memantau progres dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi;

- c. Meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dan pembinaan agar lebih kompeten dalam melaksanakan tugas;

Melakukan identifikasi kegiatan untuk meminimalisir penyimpangan realisasi keuangan terhadap anggaran kas (deviasi) serta meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan anggaran agar lebih akurat dan efektif

2.2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

2.2.5.1 Faktor Pendorong

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penunjang pencapaian kinerja sasaran adalah:

- a. Kerja sama antarlembaga dan sektor swasta
Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPTJ, PT CAB, filantropi, CSR perusahaan, akademisi, serta komunitas mendorong percepatan program dan peningkatan pelayanan publik.
- b. Dukungan regulasi dan kebijakan daerah
Tersedianya Perda, Perwali, serta keputusan wali kota menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan kegiatan strategis seperti SPBE, pengelolaan cagar budaya, dan RTRW.
- c. Inovasi teknologi dan digitalisasi system
Pemanfaatan aplikasi digital seperti SIMPATIK, OSS, elitbang, e-signature, dan platform SPBE meningkatkan efisiensi layanan, akuntabilitas, dan integrasi data.
- d. Partisipasi dan kesadaran Masyarakat
Peran aktif warga melalui gotong royong, bank sampah, kampung iklim, pelaporan mandiri, dan penggunaan transportasi umum menjadi kekuatan sosial yang mendukung pencapaian indikator.
- e. Penguatan kapasitas SDM dan pelatihan rutin
Bimtek, ToT, workshop, serta program peningkatan kompetensi secara rutin mendukung implementasi program di berbagai OPD dan meningkatkan profesionalisme layanan publik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman dari para pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan evaluasi secara periodik.

Adapun faktor pendorong untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1). Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pendidikan:

- a. Pemanfaatan LKIP Secara Optimal: Informasi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Evaluasi Rutin oleh Disdik: Dinas Pendidikan secara berkala melakukan evaluasi capaian kinerja untuk memastikan program berjalan sesuai target;
- c. Reviu Renstra Melalui Desk Tiap Bidang: Pendekatan desk digunakan untuk memperoleh data akurat terkait ketercapaian target dalam Rencana Strategis (Renstra);
- d. Tindak Lanjut yang Jelas: Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program ke depan;
- e. Evaluasi Program yang Komprehensif: Penilaian keberhasilan atau kegagalan program dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan langkah perbaikan;
- f. Pendekatan Result-Oriented dalam Perencanaan: Penyusunan Renstra 2021–2026 dilakukan dengan fokus pada hasil dan dampak nyata;
- g. Penyempurnaan Indikator Kinerja: Indikator kinerja terus disempurnakan agar lebih akurat dalam mengukur pencapaian;
- h. Keterpaduan Perencanaan: Perencanaan dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme kinerja yang jelas dan berjenjang;
- i. Komitmen terhadap Tindakan Nyata: Evaluasi Rencana Aksi tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

2) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kesehatan:

- a. Ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan;
- b. Adanya target perjanjian kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah. Serta Perjanjian Kinerja Seluruh pejabat struktural dan koordinator;
- c. Adanya Kebijakan–kebijakan dilevel Pusat dan Propinsi yang mendukung capaian kinerja;
- d. Adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan program di berbagai level dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan;
- e. Dukungan Penta Helix dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja;
- f. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber daya manusia kesehatan melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang baik dalam rangka mewujudkan capaian Indikator Dinas Kesehatan.
- g. Penanganan Stunting:

- a) Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) mulai tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan yang melibatkan kolaborasi lintas program dan sektor dipimpin oleh Kepala Daerah;
 - b) Peningkatan kapasitas kader tentang pelatihan konseling pemberian makanan bayi dan anak untuk intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pelatihan kader terampil cegah stunting, pelatihan kesehatan keluarga, pelatihan duta stunting, pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pelatihan manajemen stunting;
 - c) Pemberdayaan kelompok remaja melalui inovasi Stunting Warrior yang melibatkan Forum Genre sebagai konselor sebaya dalam pendampingan minum Tablet Tambah Darah Remaja Putri (TTD Rematri);
 - d) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat (Gernas) untuk hidup sehat melaksanakan pola hidup sehat dan pola gizi seimbang.
- h. Gizi dan KIA :
- a) Tersedianya USG di 38 Puskesmas;
 - b) Tersedianya anggaran pengadaan media pencatatan dan media KIE (Buku KIA);
 - c) Dokter puskesmas sudah terlatih dalam penggunaan USG;
 - d) Sudah tersedia sarana prasarana laboratorium yang lengkap di semua Puskesmas;
 - e) Terdapat kader aktif yang bisa diberdayakan;
 - f) Semua puskesmas sudah BLUD.

3) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang:

- a. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program pembangunan sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
- b. Keterlibatan dan kerjasama pihak akademisi (perguruan tinggi maupun Lembaga penelitian lainnya) dan pemerintah lainnya (kementerian dan pemda lainnya);
- c. Adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan;
- d. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
- e. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
- f. Penanganan Genangan:
 - a) Terdapatnya Satuan Petugas (Satgas) Sumber Daya Air (SDA) yang menangani banjir dan longsor untuk penanganan sementara kerusakan infrastruktur;

- b) Cepatnya penyampaian informasi laporan kejadian banjir dan longsor ke Dinas PUPR Kota Depok melalui call center atau via komunikasi aktif;
 - c) Peran Masyarakat dan Legislatif dalam pengusulan kegiatan penanganan banjir dan longsor yang membantu pengurangan titik banjir;
 - d) Pembiayaan penanganan banjir didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- g. Ketaatan terhadap RTRW :
- a) Telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042;
 - b) Meningkatnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi ketentuan dari Perda RTRW.
- h. Cakupan akses sanitasi layak :
- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap sanitasi dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b) Diperlukan dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua;
 - c) Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, Kementerian PUPR memberikan perhatian dan fokus pada pendekatan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), serta memfasilitasi bantuan Hibah Air Limbah setempat.
- 4) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perumahan dan permukiman:
- a. Tersedianya kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. Adanya monitoring dan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja dan anggaran Dinas secara berkala;
 - c. Lelang Dini untuk beberapa pekerjaan konsultasi perencanaan.
- 5) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja :

- a) Peraturan Perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
 - b) Meningkatnya kebutuhan pelayananan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c) Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Kota Depok;
 - d) Tersusunnya SOP dibidang Trantibum yang meliputi SOP Bidang Gakda dan SOP Bidang Trantibum Pamwal.
 - e) Keterlibatan Satlinmas dalam pencegahan gangguan Trantibum, dilakukan tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, sehingga membantu tugas-tugas penertiban yang dilaksanakan Satpol PP.
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:
- a) Disusunnya Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan Walikota Depok, yang diturunkan dalam perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV sebagai target dan tolak ukur dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
 - b) Disusunnya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang memuat target kinerja setiap triwulan sehingga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
 - c) Memasuki Triwulan IV, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menghimbau kepada KPA serta PPTK untuk melaksanakan kegiatan dengan mempedomani anggaran kas yang telah disusun, serta segera melakukan percepatan penyerapan maupun pelaksanaan fisik anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pada triwulan sebelumnya.
 - d) Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja baik Fisik dan Keuangan secara berkala dalam bentuk rapat koordinasi.
 - e) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu berupaya mengkomunikasikan kendala-kendala yang dalam pelaksanaan pekerjaan baik secara formal maupun komunikasi informal.
 - f) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menindaklanjuti hasil rekomendasi atas reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Depok
- 6) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan sosial :

- a. Adanya komitmen pimpinan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana kerja Dinas Sosial Kota Depok;
 - b. Adanya dukungan dari stakeholder yang masih terus terjaga hingga triwulan IV yang diantaranya adalah bantuan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - c. Adanya perbaikan dalam system pelaksanaan program. Seperti menambah aturan/kebijakan dalam penyelenggaraan layanan seperti memberikan standar kinerja kepada PSKS, sehingga PSKS lebih termotivasi dalam melaksanakan layanan sosial.
 - d. Menambah intensitas pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS – menambah sub kegiatan terkait dengan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota, melalui kegiatan ini dapat menambah kerja sama dan semakin memperjelas tugas dan fungsi masing-masing OPD dalam pelaksanaan layanan sosial.
- 7) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan tenaga kerja:
- a. Komitmen Pimpinan
 - a) Adanya komitmen dari pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk memperbaiki tata kelola internal.
 - b) Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di semua level (Eselon II, III, IV) yang meningkatkan akuntabilitas.
 - b. Evaluasi Kinerja Berkala
 - a) Evaluasi capaian kinerja dilakukan setiap triwulan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.
 - b) Evaluasi melibatkan semua bidang, termasuk PPTK dan Bendahara, sehingga identifikasi masalah lebih efektif.
 - c. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - a) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan yang ditandatangani oleh pejabat terkait, meningkatkan akuntabilitas.
 - b) Memberikan gambaran yang jelas tentang kendala dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pelaksanaan Desk Anggaran Kas dan Rencana Umum Pengadaan
 - a) Desk anggaran dipimpin oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja untuk meminimalkan deviasi serapan anggaran.

- b) Membantu perencanaan anggaran lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan setiap triwulan.
 - e. Simple Lintas Sektor: LPK dan LSP;
 - f. Peminat pendaftar peserta pelatihan cukup tinggi;
 - g. Tersedianya peralatan kerja yang memadai;
 - h. Adanya P3MI di Kota Depok yang berkualitas untuk menempatkan pencari kerja ke ke Luar Negeri;
 - i. Sosialisasi untuk bekerja ke luar negeri;
 - j. Adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara penempatan;
 - k. Membuka jejaring kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
 - l. Laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat dikarenakan kondisi pandemi covid 19 sudah berangsur membaik;
 - m. Adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan Tenaga Kerja;
 - n. Koordinasi antar bidang terkait intergrasi;
 - o. Sosialisasi penggunaan BKOL melalui media sosial dan brosur;
 - p. Komitmen pimpinan dan seluruh SDM internal Disnaker yang besar terhadap terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan;
 - q. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait (Apindo, SP/SB, Dunia Usaha dan Dunia Industrial serta OPD terkait lainnya;
 - r. Tersedianya SOP sebagai panduan dalam syarat kerja;
 - s. Adanya pembinaan bagi Perusahaan secara berkesinambungan;
- 8) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
- a. Adanya regulasi pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga serta Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Perwal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Perwal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak, Perwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok;

- b. Komitmen Pimpinan dan seluruh SDM internal DP3AP2KB yang besar terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan;
- c. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait;
- d. Tersedianya anggaran untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung terselenggaranya kegiatan.

9) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pangan :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal;
- b. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan dan pemutakhiran data (NBM/Neraca Bahan Makanan, PPH/Pola Pangan Harapan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) telah dilaksanakan secara optimal;
- c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan secara optimal;
- d. Adanya dukungan Pimpinan untuk semua kegiatan sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

10) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup :

- a. Perencanaan kegiatan yang matang: adanya perencanaan yang baik dalam berbagai program dan kegiatan.
- b. Kerjasama tim dan pembagian tugas yang jelas : sinergi antar tim dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan efektivitas pencapaian target.
- c. Efisiensi anggaran: penggunaan anggaran yang lebih hemat, seperti rapat daring (online) yang mengurangi belanja konsumsi dan honorarium.
- d. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi: rapat dan koordinasi dilakukan secara online, mengurangi kebutuhan anggaran.
- e. Adanya target kinerja yang jelas: penetapan target yang realistis mendukung pencapaian hasil yang lebih baik.
- f. Akreditasi dan registrasi Laboratorium Lingkungan: Status akreditasi meningkatkan kredibilitas dan capaian retribusi laboratorium lingkungan.
- g. Inovasi dalam pengelolaan sampah: pemanfaatan incinerator dan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) mengurangi volume sampah yang perlu diangkut.
- h. Koordinasi dengan pihak terkait: kerjasama dengan pemerintah provinsi, kementerian, dan instansi lain membantu kelancaran pelaksanaan program.

11) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil :

- a. Realisasi anggaran yang baik: belanja kegiatan terlaksana tanpa kendala berarti dan nilai realisasi anggaran tinggi.

- b. Pelaksanaan sesuai rencana: kegiatan berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- c. Komitmen pegawai dan pimpinan: pegawai dan pimpinan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan tugas, termasuk menghadiri rapat koordinasi dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- d. Kolaborasi dengan pihak terkait
 - a) Adanya dukungan dari berbagai stakeholder, seperti kepala sekolah, komunitas, BAZNAS, dan sponsor dalam kegiatan tertentu.
 - b) Kerja sama antar bidang dalam mendukung kegiatan layanan jemput bola.
- e. Dukungan dan Ketersediaan Data:
 - a) Data By Name By Address (BNBA) tersedia untuk menentukan target layanan kependudukan.
 - b) Penggunaan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan, termasuk WhatsApp, website, dan aplikasi Depok Single Window.
- f. Dukungan SDM dan Kebijakan Internal:
 - a) Adanya penugasan khusus SDM dalam pengadaan barang/jasa.
 - b) Dukungan kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

12) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perhubungan :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok;
- b. Usulan anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan);
- c. Perhatian dari Bappeda Kota Depok untuk mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai upaya mengurangi kemacetan.
- d. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dalam upaya pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM);
- e. Adanya Kerjasama dengan JRC dan JAC.
- f. Terbentuknya Dewan Transportasi Kota Depok sebagai pendorong terlaksananya kebijakan urusan Perhubungan;
- g. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar perencanaan pengembangan transportasi kedepan;
- h. Telah beroperasinya LRT Harjamukti untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh Masyarakat;

- i. Adanya mekanisme pendanaan pengembangan angkutan umum yaitu subsidi buy the service oleh Kementerian Perhubungan dan Kota Depok telah mengajukan usulan subsidi tersebut;
 - j. Adanya RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) dari BPTJ yang dapat mendukung dan membantu pengembangan transportasi khususnya di Kota Depok;
 - k. Adanya pembangunan jalan tol baru yang melewati Kota Depok;
 - l. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg oleh Kementerian Perhubungan sehingga meningkatkan penggunaan Transportasi masal;
 - m. Adanya manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan untuk meningkatkan kinerja ruas jalan.
 - n. Memiliki alat pemantau arus lalu lintas yang canggih yang dapat mengatur antrian dan tundaan di simpang simpang secara adaptif;
 - o. Adanya kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan BPTJ dengan Peluncuran Trans Depok “ Biskita “
 - p. Respon baik dari masyarakat Kota Depok dengan adanya BISKITA dan Mikro Trans Depok (Angkot AC) dengan meningkatnya jumlah penumpang setiap hari.
- 13) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian:
- Komunikasi dan Informatika :
- a. Adanya peraturan yang mengatur standar pengelolaan nama domain pemerintahan;
 - b. Nama domain dan subdomain yang terkelola dengan baik membantu melindungi data pemerintah dari ancaman siber;
 - c. Terdapat beberapa regulasi yang mendukung pengembangan TIK di Kota Depok seperti Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas dan Peraturan Wali Kota Depok No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d. Telah terintegrasinya seluruh perangkat daerah, kelurahan dan puskesmas dalam jaringan intranet Pemkot Depok menggunakan fiber optic;
 - e. Terdapat ruang server yang dapat melayani seluruh aplikasi Perangkat Daerah;
 - f. Telah terintegrasinya seluruh perangkat daerah, kelurahan dan puskesmas dalam jaringan intranet Pemkot Depok menggunakan fiber optic;
 - g. Koordinasi yang cukup baik dengan stakeholder baik dari unsur akademisi, praktisi dan komunitas yang dapat mengawal implementasi TIK di Kota Depok;
 - h. Telah terpasangnya titik wifi di hampir semua RW yang ada di Kota Depok;
 - i. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan berbagai media yang ada baik nasional maupun local;

- j. Perkembangan transformasi digital yang pesat menjadikan perubahan pasar dari media konvensional menjadi media elektronik dan media online sebagai platform yang sangat membuka akses serta kecepatan diterimanya informasi dan reaksi langsung sebagai umpan balik dari pengguna media sosial yang dapat dijadikan sebagai strategi komunikasi;
- k. Dukungan anggaran, regulasi dan sumber daya yang tidak terlepas dari capaian prestasi sumber daya komunikasi yang dikelola dengan baik.

Satistik :

- a. Telah tersusunnya Peraturan Wali Kota Depok No. 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Kota Depok;
- b. Telah tersusunnya SK Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok;
- c. Telah Tersusunnya SOP Pengumpulan, Pengolahan dan Pengendalian Akses Data;
- d. Tersedianya Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) untuk berbagi pakai data;
- e. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pembina dan produsen data dalam setiap proses penyelenggaraan satu data kota depok;
- f. Telah ditunjuknya Petugas Pengelola Data pada tiap Perangkat Daerah;

Persandian :

- a. Kerjasama dengan BSSN dan Perangkat Daerah di Kota Depok terjalin dengan baik;
- b. Telah tersusunnya beberapa regulasi yang mendukung keamanan informasi yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- c. Telah diimplementasikannya Jaring Komunikasi Sandi Internal di Pemerintah Kota Depok;
- d. Telah diimplementasikannya Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu bentuk pengamanan informasi;
- e. Telah terintegrasinya beberapa aplikasi di OPD dengan tanda tangan elektronik.

14) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro:

- a. Penunjang urusan pemerintahan daerah: Pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, mendukung kinerja ASN dan fungsi organisasi;
- b. Pelayanan izin usaha simpan pinjam: tersedianya fasilitasi (anggaran, sarana, kerjasama stakeholder, narasumber, dan peserta);

- c. Pendidikan dan latihan perkoperasian: dukungan anggaran, sarana, serta kolaborasi stakeholder dan peserta;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi: Ketersediaan anggaran, sarana, serta dukungan dari stakeholder dan peserta;
- e. Pemberdayaan UMKM:
 - a) Fasilitasi anggaran dan sarana.
 - b) Kolaborasi baik antara stakeholder, narasumber, dan peserta.
 - c) Kemudahan dengan aplikasi Dkerens dan WA Blast.
 - d) Koordinasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.
- f. Pengembangan UMKM:
 - a) Regulasi bantuan subsidi bunga.
 - b) Kurasi produk unggulan Kota Depok.
 - c) Pendaftaran online dan komunikasi intensif melalui WA Grup.

15) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan penanaman modal :

- a. Adanya penambahan dan perbaikan aplikasi perizinan online dan penambahan perizinan yang diselenggarakan secara online;
- b. Peningkatan fasilitas pada loket dan ruang tunggu;
- c. Berbagai kanal pengaduan (baik secara elektronik maupun secara tatap muka melalui loket) yang ditindaklanjuti petugas;
- d. Adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan digunakan oleh Masyarakat;
- e. Proses penanganan pengaduan yang cepat dan efisien untuk mencegah penumpukan kasus;
- f. Komunikasi yang jelas dan terbuka kepada pelapor mengenai status dan tindak lanjut pengaduan;
- g. Kolaborasi dengan dinas terkait untuk mendukung upaya penanganan pengaduan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses penanganan pengaduan;
- i. Implementasi cetak mandiri perizinan, pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok mengimplementasikan cetak mandiri surat izin melalui perizinanonline.depok.go.id dimana cetak mandiri memberikan kemudahan dalam proses perizinan;
- j. Penguatan kanal informasi dan pengaduan untuk dapat menjangkau masyarakat lebih optimal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Depok megoptimalkn sarana informasi baik melalui loket dan media elektronik, akses informasi dan pengaduan dapat pula dilakukan mellaui whatsapp, instgram maupun email, selain hal tersebut pengaduan melalui aplikasi SIGAP SP4N Lapor dan SIGAP Depok juga akan ditindaklanjuit oleh dinas terkait;

- k. Pengaduan koordinasi antar perangkat daerah, untuk menjamin pelaksanaan perizinan efektif dan efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang membidangi sektor sektor perizinan dalam menyelesaikan proses perizinan maupun permasalahan yang timbul.

16) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin sudah berjalan optimal;
- b. Adanya pemantauan dan review kegiatan secara rutin oleh pimpinan;
- c. Adanya dorongan dan keterlibatan dari pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal;
- d. Terdapat tim monitoring anggaran hibah;
- e. Tersedianya ruang ekspresi (Alun-alun, Taman Musik Depok, Mall) dan Komunitas Seni dan Budaya;
- f. Meningkatnya partisipasi Kota Depok dalam event tingkat Provinsi dan Nasional;
- g. Makin meningkatnya minat seni budaya (sanggar, komunitas) di masyarakat;
- h. Tingginya tingkat partisipasi pemuda terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Kepemudaan;
- i. Tingginya kesadaran pemuda terhadap pentingnya berorganisasi dalam upaya peningkatan aktualisasi diri;
- j. Adanya potensi jumlah pemuda yang cukup besar;
- k. Adanya IT yang memudahkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi;
- l. Terbukanya kesempatan berusaha / berbisnis bagi para pemuda karena kemudahan transportasi dan mendapatkan pangsa pasar / konsumen;
- m. Sarana prasarana olahraga, ruang terbuka publik, ketersediaan anggaran, peran serta stakeholder diantaranya KONI, KORMI dan NPCI, danberbagai komunitas olahraga lainnya serta bantuan tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang saat ini ditempatkan di 2 (dua) kecamatan di Kota Depok yaitu Kec. Cipayung dan Kec. Tapos. Keberadaaan SP3OR ini dinilai cukup efektif mampu menaikkan angka partisipasi olahraga masyarakat. Salah satu tugas SP3OR adalah menyosialisasikan pentingnya olahraga di tingkat

kewilayahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga.

17) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan :

- a. Regulasi, Pedoman, Kebijakan dan Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sudah diatur secara jelas sehingga pelaksanaan atas kegiatan perencanaan dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ada;
- b. Komitmen pimpinan dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja Perangkat Daerah. Target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas dan Wali Kota menjadi acuan kinerja seluruh pejabat eselon III, eselon IV dan seluruh pegawai di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;
- c. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menghimbau kepada KPA serta PPTK untuk melaksanakan kegiatan dengan mempedomani anggaran kas yang telah disusun, serta segera melakukan percepatan penyerapan maupun pelaksanaan fisik anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pada triwulan sebelumnya;
- d. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja baik Fisik dan Keuangan secara berkala dalam bentuk rapat koordinasi..
- e. Peningkatan koleksi buku-buku Perpustakaan;
- f. Penyediaan buku elektronik yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat minat baca masyarakat.

18) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan Perikanan :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal.
- b. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelayanan rutin sudah dilakukan secara optimal;
- c. Pembinaan, penyuluhan terkait penguatan dan pembentukan kelembagaan kelompok sudah dilakukan para Penyuluh Perikanan sesuai wilayah binaan masing-masing;
- d. Pemenuhan kebutuhan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan menyediakan dan atau menyalurkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang direncanakan;
- e. Tingginya dukungan Pimpinan untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan

dengan baik.

- f. Kualitas air di Kota Depok masih cocok untuk budidaya perikanan terutama untuk ikan hias.
- g. Ikan hias di Kota Depok memiliki keunggulan komparatif dari segi kualitas;
- h. Terdapat Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok untuk pengembangan teknologi dan inovasi di bidang perikanan di Kota Depok;
- i. Tingginya minat masyarakat Kota Depok terhadap produk pengolahan hasil perikanan.

19) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan Pertanian :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelayanan rutin sudah dilakukan secara optimal;
- c. Pembinaan, penyuluhan penguatan dan pembentukan kelembagaan kelompok sudah dilakukan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai wilayah binaan masing-masing;
- d. Pemenuhan kebutuhan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan menyediakan dan atau menyalurkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang direncanakan;
- e. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG bersumber dari APBD Kota Depok sebagian besar sudah sesuai jadwal pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG dengan Pelatihan Satwa Harapan dan pelayanan IB/PKB untuk meningkatkan produksi peternakan sudah dilaksanakan secara optimal;
- g. Pemenuhan kebutuhan kelompok tani di lokasi P2WKSS yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan menyalurkan sarana dan prasarana budidaya satwa harapan sesuai dengan yang direncanakan;
- h. Tingginya dukungan Pimpinan untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik.

20) Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perdagangan dan perindustrian:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja RPJMD, Renstra, Renja, RKT dan RAK yang menjadi pedoman tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas;
- b. Adanya perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas dengan Wali Kota; perjanjian kinerja Pejabat Eselon 3 dan JFT ahli muda selaku koordinator serta perjanjian kinerja staf

pelaksana;

- c. Mengevaluasi dan menyusun beberapa SOP sebagai pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara rutin;
- e. Monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara rutin pada pelaku usaha, agen dan pasar rakyat;
- f. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi pada sistem Sifordagin, website dinas dan DSW;
- g. Sertifikasi dan Surveillance SNI untuk pasar rakyat;
- h. Pelaksanaan Terling (Tera Keliling);
- i. Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 s.d Triwulan IV
- j. Adanya kerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan RI dalam rangka pendampingan ekspor kepada para IKM;
- k. Kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang sangat membantu dalam mendorong pemasaran produk IKM
- l. Tersedianya Rumah Kemasan sebagai sarana konsultasi bagi para IKM dalam rangka meningkatkan daya saing produk melalui kemasan, sebagai sarana pengembangan usaha melalui desain kemasan dan peningkatan kualitas kemasan produk dengan mendatangkan tenaga ahli di bidang desain kemasan dan kemasan serta bekerjasama dengan Politeknik APP Jakarta yang berada dalam pengelolaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dalam lingkungan Kementerian Perindustrian RI;

21) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah):

- a. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Unit Kerja: adanya komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja.
- b. Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Manajemen:
 - a) Tersedianya dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT, PK, IKU, MR, dan Renaksi.
 - b) Adanya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada level eselon tiga.
 - c) Tersedianya dokumen Manajemen Risiko (MR) sampai level subkegiatan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Berkala: dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target.

- d. Harmonisasi Produk Hukum dan Kualitas Legal Drafter:
 - a) Adanya harmonisasi produk hukum oleh Kemenkumham, khususnya Perda dan Perwal.
 - b) Adanya legal drafter yang berkualitas dalam penyusunan peraturan daerah.
- e. Pengelolaan JDIH Terintegrasi: pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai standar.
- f. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengadaan: telah dilakukannya e-Purchasing melalui Toko Daring dan e-Tendering dalam proses pengadaan barang/jasa.
- g. Refocusing Anggaran: adanya refocusing anggaran untuk menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan.

22) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat DPRD):

- a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya;
- b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
- c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- d. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

23) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (perencanaan, penelitian dan pengembangan):

- a. Adanya regulasi dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Keterlibatan dan kerjasama pihak akademisi (perguruan tinggi maupun Lembaga penelitian lainnya) dan pemerintah lainnya (kementerian dan pemda lainnya);
- c. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;

- d. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan pernyataan kinerja dalam SKP untuk seluruh pegawai Bappeda Kota Depok.
- e. Adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana;

24) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (keuangan) :

- a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan BKD;
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Walikota Depok, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
- c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

25) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (kepegawaian, pendidikan dan pelatihan):

- a. Penyusunan dokumen perencanaan didasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- b. Penyusunan dokumen penganggaran dengan memperhatikan ketercapaian output, real kebutuhan belanja serta mengacu pada sesuai standar belanja yang berlaku.
- c. Penyusunan laporan akhir kegiatan dan updating data sebagai upaya penyampaian dokumen pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
- d. Penyusunan RKBMD dan kebutuhan pemeliharaan didasarkan atas inventarisasi kebutuhan dan kondisi BMD.
- e. Penyusunan belanja administrasi perkantoran didasarkan atas evaluasi belanja tahun sebelumnya dan prediksi real kebutuhan PD;
- f. Telah terbangunnya sistem informasi manajemen pegawai Kota Depok yang memudahkan updating data pegawai.
- g. Telah terbangunnya aplikasi kinerja mobile sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kehadiran dan kinerja pegawai.
- h. Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun Satu Atap yang memudahkan verifikasi dan validasi serta koordinasi dengan BKN.
- i. Tersedianya fasilitasi anggaran untuk penunjang pendidikan lanjutan pegawai.
- j. Anggaran pengembangan kompetensi manjerial, teknis dan sosiokultural cukup besar.
- k. Kesempatan mengikuti diklat/bimtek dan sejenisnya terbuka cukup lebar.

26) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan (inspektorat daerah):

- a. Regulasi dan Pedoman yang Jelas : Adanya regulasi, pedoman, kebijakan, dan jadwal penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.
- b. Komitmen Pimpinan : Pimpinan Inspektorat Daerah berkomitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Renja Perangkat Daerah.
- c. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) : PKPT sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko.
- d. Penguatan Inspektorat Daerah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ yang mengamanahkan pembinaan dan pengawasan sejak tahap perencanaan dengan orientasi pencegahan.
- e. Surat Edaran Bersama tentang Penguatan APIP Daerah : Penguatan dalam aspek anggaran pengawasan, SDM, independensi dan objektivitas, serta peran dan layanan.
- f. Sinergitas dengan Lembaga Pengawasan : Kerja sama dengan BPKP, BPK RI, KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan lainnya.
- g. Perjanjian Kerjasama dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat : Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Kepolisian.
- h. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder : Pendampingan dan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pengawasan lainnya.
- i. Perubahan Paradigma Inspektorat Daerah : Dari "watch dog" menjadi mitra strategis bagi Perangkat Daerah.
- j. Tuntutan Masyarakat terhadap Governance : Masyarakat mengharapkan peningkatan peran pengawas internal dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
- k. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM : Diklat substantif, sertifikasi, dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.
- l. Konsistensi dalam Pengukuran Kinerja : Pengumpulan data kinerja yang disertai eviden dan dokumen yang memadai.
- m. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan : Sesuai dengan target kinerja dokumen perencanaan yang telah disusun pada awal tahun atau periode.
- n. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang : Pemenuhan peralatan kantor, perlengkapan pengawasan, serta pemeliharaan kendaraan dan mesin lainnya.

27) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur kewilayahan (Kecamatan):

- a. Tuntutan Masyarakat
 - a) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
 - b) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - c) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.
- b. Komitmen dan Kerjasama Internal
 - a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
 - b) Terbentuknya kerjasama tim dari level tertinggi hingga level terendah.
 - c) Adanya komitmen semua unsur di lingkungan kecamatan untuk melaksanakan perjanjian kinerja.
- c. Regulasi dan Kebijakan
 - a) Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.
 - b) Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
 - c) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.
- d. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Peningkatan kemampuan dan keahlian pegawai melalui Bimbingan Teknik dan pelatihan.
 - b) Terbukanya peluang untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan pelatihan.
- e. Inovasi dan Teknologi
 - a) Adanya perkembangan teknologi informatika yang mendukung pelaksanaan tugas.
 - b) Dibentuknya tim Transformasi Digital untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.
 - c) Inovasi layanan seperti Happy Call untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
- f. Monitoring dan Evaluasi: Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. Dukungan Stakeholder
 - a) Tingginya dukungan stakeholder terkait perencanaan daerah, terlihat dari partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan.
 - b) Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- h. Target Kinerja

- a) Adanya target Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Walikota serta seluruh pejabat Eselon III dan IV.
- b) Adanya perjanjian kinerja yang disepakati untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

28) Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pemerintahan umum (urusan Bangsa dan Politik) :

- a. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program pembangunan sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
- c. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
- d. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
- e. Keterlibatan dan kerjasama dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- f. Kerukunan umat beragama : Kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu agama.

2.2.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, secara umum terkendala oleh :

- 1) Keterbatasan infrastruktur dan SDM teknis
Kurangnya alat berat, jaringan distribusi air dan sanitasi, petugas lapangan, serta tenaga ahli TIK menghambat realisasi program terutama yang bersifat teknis dan operasional.
- 2) Lemahnya koordinasi antar-OPD dan lintas sektor
Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan dan perencanaan, serta minimnya sinergi dalam pengawasan menyebabkan rendahnya efisiensi program.
- 3) Belum optimalnya regulasi dan pedoman teknis
Tidak tersedianya insentif/disinsentif di bidang tata ruang, belum adanya peta rencana SPBE, serta lemahnya pedoman pelestarian budaya menjadi penghambat kepatuhan dan implementasi.
- 4) Keterbatasan anggaran dan alokasinya tidak merata

Distribusi anggaran yang tidak proporsional antar wilayah atau OPD, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi dana menjadi hambatan utama dalam realisasi program.

5) Tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks

Masalah seperti alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, ketidaktaatan warga terhadap PHBS, serta dampak perubahan iklim mengganggu ketahanan infrastruktur dan layanan dasar.

Kendala pencapaian kinerja pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1) Kendala pencapaian kinerja pada urusan pendidikan :

- a. Keterbatasan infrastruktur sekolah: daya tampung sekolah masih belum mencukupi kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat.
- b. Kondisi bangunan sekolah: masih terdapat sekolah yang tidak layak digunakan, sehingga memerlukan rehabilitasi.
- c. Sebaran sekolah yang tidak merata: lokasi sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan kepadatan penduduk, mengakibatkan akses pendidikan tidak merata.
- d. Keterbatasan anggaran: pemerintah kota depok harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta bantuan pendidikan.
- e. Kesulitan siswa miskin dalam pembiayaan: masih ada siswa yang mengalami kendala dalam membayar biaya sekolah, meskipun sudah ada program bantuan.
- f. Efektivitas program hibah dan bantuan sosial: proses penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi siswa miskin perlu lebih tepat sasaran dan transparan.
- g. Peningkatan jumlah penduduk yang cepat: pertumbuhan urbanisasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan pendidikan lebih cepat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas.
- h. Koordinasi dan regulasi: diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga terkait untuk memastikan program pendidikan berjalan optimal.

2) Kendala pencapaian kinerja pada urusan kesehatan:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Program dalam melaksanakan kegiatan– kegiatan yang saling berkaitan;
2. Adanya proses rotasi, mutasi serta belum semua SDM mendapatkan pelatihan sesuai dengan program yang dibutuhkan;

3. Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang bisa mengampu semua kebutuhan program dari berbagai level Fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
4. Gizi dan KIA :
 - a) Laporan dari Jejaring puskesmas belum berjalan dengan baik , data laporan tidak dalam bentuk By Name By Address (BNBA);
 - b) Pencatatan secara digital (e kohort) belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c) Kompetensi Bidan Praktek Mandiri dalam melakukan ANC Masih kurang;
 - d) USG puskesmas belum dimanfaatkan secara optimal;
 - e) Belum ada anggaran pembinaan jejaring Puskesmas di tingkat Puskesmas;
 - f) Tingginya biaya pelayanan ANC di Puskesmas;
 - g) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ANC masih rendah;
 - h) Ketersediaan Sarana pencatatan dan media edukasi (Buku KIA) kurang;
 - i) Ketersediaan prasarana pencatatan (laptop, PC) terbatas.
- 3) Kendala pencapaian kinerja pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :
 - a. Pada awal tahun masih dilakukan survey oleh tim teknis dan persiapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - b. Adanya pergeseran anggaran/nomenklatur di beberapa sub kegiatan;
 - c. Pemeriksaan DED yang masih dilakukan di awal tahun;
 - d. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dari bidang dalam penyelesaian proses perencanaan, seperti pengumpulan data dan laporan secara tepat waktu.
- 4) Kendala pencapaian kinerja pada urusan perumahan dan permukiman:
 - a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Tata Bangunan tidak bisa dilakukan diawal tahun, dikarenakan perlu ditetapkannya terlebih dahulu Proyek Strategis Daerah melalui SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota dan dilakukan reuiu oleh Inspektorat. Hal ini, menyebabkan terlambatnya proses pengadaan Barang dan Jasa yang awalnya diperkirakan selesai pada Bulan April 2024 baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2024;
 - b. Jumlah SDM yang masih kurang;
 - c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
 - d. Pelaksana pekerjaan (kontraktor) yang tidak memenuhi time schedule yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan keterlambatan capaian progress pekerjaan;
 - e. Permukiman Layak:

- a) Adanya Perubahan luas kawasan permukiman di Kota Depok berdasarkan Perda RTRW terbaru;
- b) Bertambahnya jumlah penduduk Kota Depok yang menempati kawasan permukiman kumuh/mendekati kumuh sehingga memperluas kawasan kumuh dan memunculkan wilayah permukiman kumuh baru;
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana lingkungan.

5) Kendala pencapaian kinerja pada urusan ketentraman dan ketertiban umum :

Satpol PP :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana minimal yang dimiliki Satpol PP Kota Depok;
- b. Perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mengindahkan himbauan/peringatan hingga penertiban Satpol PP;
- c. Jumlah personil Satpol PP Kota Depok yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Depok;
- d. Lemahnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

- a. Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA maupun Anggaran Kas pada awal penyusunan Renja dan RKA sehingga pada saat pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian atau perubahan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dan berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.
- b. Meskipun beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan, karena pergeseran pada akhirnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan baik pada akhir Triwulan IV dengan tercapainya target realisasi fisik.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar bagian lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga berpengaruh pada kecepatan penghimpunan data baik data perencanaan maupun data pelaporan serta dalam hal pengambilan keputusan.

6) Kendala pencapaian kinerja pada urusan sosial :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas seperti mobil pelayanan, Rumah Perlindungan Sosial dan Mako TAGANA;

- b. Masih belum optimalnya data penerima bantuan dan petugas lapangan dalam melakukan verifikasi data;
- c. Kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat dan beragam – di sisi lain adanya keterbatasan jenis layanan yang menjadi tugas pokok atau kewenangan Dinas Sosial Kota Depok;

7) Kendala pencapaian kinerja pada urusan tenaga kerja :

- 1. Peningkatan Kinerja yang Masih Kecil : Walaupun ada peningkatan, capaian kinerja masih tergolong kecil dibanding target yang diharapkan.
- 2. Masalah dalam Penyerapan Anggaran : Masih terdapat kendala dalam serapan anggaran yang perlu diperbaiki untuk tahun berikutnya.
- 3. Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : Ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang mempengaruhi pencapaian target.
- 4. Kemungkinan Kurangnya Sumber Daya atau Koordinasi: Potensi keterbatasan SDM atau koordinasi antar bidang yang menghambat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

8) Kendala pencapaian kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

- a. Penyaluran anggaran bersumber dana DAK disalurkan oleh pemerintah pusat sekitar bulan April sehingga kegiatan bersumber dana DAK pelaksanaannya mundur (tidak sesuai ankas);
- b. Pencairan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal ankas;
- c. Belum terbitnya juknis pelayanan KB pasca persalinan sehingga tertundanya kegiatan;
- d. Kegiatan menyesuaikan jadwal propinsi (pada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh propinsi maupun pusat);
- e. Terdapat pergeseran anggaran yang disebabkan oleh :
 - a) Surat edaran Kemendagri terkait nomenklatur sub kegiatan bersumberdana DAK sehingga terdapat 1 sub kegiatan yang alokasi anggarannya di pindahkan ke sub kegiatan yang lain sesuai Surat Edaran Kemendagri tersebut;
 - b) Terdapat surat edaran dari BKKBN terkait perubahan satuan standar.

9) Kendala pencapaian kinerja pada urusan pangan:

Faktor penghambat internal meliputi:

- a. Kurang optimalnya perencanaan;
- b. Keberadaan aset tersebar baik di Dinas maupun di UPT serta Bangunan di luar Balaikota.

Faktor penghambat eksternal meliputi:

- a. Tidak tersedianya data yang diperlukan untuk kegiatan;
- b. Data yang ada belum mewakili, misal data penyedia pangan belum semua sumber terdata
- c. Pengadaan langsung melalui Mbizmarket memerlukan ketekunan dan kesabaran dikarenakan sistem yang masih kurang stabil;
- d. Belum semua penanggungjawab kendaraan dinas mengetahui bahwa pada Triwulan IV sudah ada pelaksanaan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- e. Kurangnya informasi data pemeliharaan yang tersedia;
- f. Kurangnya tenaga yang dapat membantu proses pengadaan menyebabkan adanya paket pengadaan yang terlewat belum dilakukan pembelanjaan melalui Mbizmarket;
- g. Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kolaborasi dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat (Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga) belum ditetapkan jadwal pelaksanaannya sehingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

10) Kendala pencapaian kinerja pada urusan lingkungan hidup :

- a. Keterbatasan waktu pelaksanaan: beberapa kegiatan tidak sesuai perencanaan karena keterbatasan waktu atau dilakukan saat ABT (Anggaran Belanja Tambahan);
- b. Proses pengadaan yang melibatkan pihak luar: kegiatan yang memerlukan proses pengadaan sering mengalami keterlambatan;
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): jumlah SDM yang terbatas dalam verifikasi, validasi, dan pengujian laboratorium menghambat operasional;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana: masih ada kekurangan dalam fasilitas dan alat pendukung, terutama di laboratorium lingkungan;
- e. Belum optimalnya dukungan pimpinan: minimnya dukungan dari pimpinan terhadap pengembangan laboratorium lingkungan;
- f. Regulasi yang membatasi: larangan dari pengawas kepada pelaku usaha untuk tidak menggunakan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan;
- g. Target yang terlalu rendah atau tidak realistis: beberapa program, seperti pengelolaan sampah, memiliki target yang tidak sesuai dengan jumlah komunitas atau bank sampah yang ada;
- h. Koordinasi antar instansi yang belum optimal: misalnya, proses KLHS RDTR tertunda karena Raperwal RDTR masih dalam tahap penyusunan di Dinas PUPR;
- i. Anggaran tidak terserap optimal: efisiensi dan perubahan metode kerja (rapat online)

menyebabkan beberapa anggaran tidak terserap;

- j. Pembagian waktu kegiatan yang belum optimal: beberapa program lingkungan tertunda karena kurangnya pembagian waktu yang efektif.

11) Kendala pencapaian kinerja pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil :

1. Keterbatasan Anggaran
 - a) Kekurangan anggaran perjalanan dinas dalam daerah, terutama di triwulan II dan III.
 - b) Anggaran perjalanan dinas habis lebih cepat akibat kegiatan jemput bola dan rapat koordinasi yang mendesak.
 - c) SILPA yang besar akibat anggaran pulsa layanan yang terlalu tinggi.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Banyak kegiatan jemput bola yang harus dilaksanakan dengan jumlah SDM terbatas.
 - b) Kurangnya antusiasme OPD lain dalam pemanfaatan data kependudukan.
3. Keterbatasan Sarana dan Blangko Dokumen Kependudukan
 - a) Terbatasnya blangko KTP dari Kemendagri.
 - b) Sulitnya mendapatkan penyedia untuk pengadaan motor layanan keliling dengan spesifikasi khusus.
4. Prosedur Administratif yang Memakan Waktu
 - a) Proses persetujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data di Kemendagri lebih lama karena adanya prosedur baru.
 - b) Syarat ISO untuk OPD dalam pengajuan PKS membutuhkan biaya tambahan yang besar.
 - c) SK Tim Pendampingan Kejaksaan belum terbit, sehingga honor tim belum bisa diberikan.
5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - a) Kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 - b) Masyarakat masih ragu menerima layanan jemput bola karena khawatir akan penipuan.
 - c) Kurangnya minat masyarakat dalam program Itsbat Nikah.
6. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana kantor baru dilakukan di triwulan III, sehingga pemeliharaan terlambat.
 - b) Laporan hasil pemeliharaan peralatan dan mesin dari penyedia terlambat, menyebabkan pencairan anggaran tertunda.
 - c) Pembuatan buku Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 tertunda karena

proses pengolahan data belum selesai.t.

12) Kendala pencapaian kinerja pada urusan perhubungan:

- a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
- b. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
- c. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan.
- d. Belum optimalnya Integrasi antar moda (kurangnya konektivitas) sehingga dapat mengefisiensikan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
- e. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
 - a) Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Tingginya volume lalu lintas tidak sejalan dengan kapasitas jalan yang ada. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Tidak bertambahnya kapasitas jalan kemudian bertambahnya hambatan samping seperti parkir di badan jalan, kendaraan yang berhenti di badan jalan dan kendaraan lambat menyebabkan semakin turunnya kinerja suatu jalan;
 - b) Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup Masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi;
 - c) Masalah kemacetan bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan karena harus ada keterlibatan PUPR terkait ruas dan lebar jalan.
 - d) Transportasi publik hampir 50% sudah tidak layak, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat;
 - e) Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
 - f) DED Pembangunan terminal Sawangan perlu dikaji Kembali agar segera terbangun untuk meningkatkan konektivitas transportasi.

13) Kendala pencapaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika, statistika dan persandian :

Komunikasi dan informatika :

- a. SDM TIK belum tersebar merata di semua perangkat daerah;
- b. Keterbatasan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan layanan TIK.;

- c. Kurangnya jumlah SDM pengelola aplikasi yang menyebabkan tidak terpeliharanya aplikasi;
- d. Kekurangan perangkat keras dan lunak yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE;
- e. Tidak adanya kebijakan yang konsisten dan terarah dalam mendukung implementasi SPBE.

Statistik :

- a. Belum semua perangkat daerah mempunyai pemahaman yang sama terkait Satu Data Kota Depok;
- b. Belum dipenuhinya komitmen penyelenggaraan satu data oleh semua perangkat daerah;
- c. Kurangnya SDM statistik;
- d. Kurangnya pemahaman OPD terkait keterbukaan informasi public;
- e. Kurangnya pemahaman tentang tata kelola data geospasial.

Persandian :

- a. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk penerapan keamanan komunikasi dan informatika;
- b. SDM di bidang Keamanan Informasi yang belum memadai
- c. Belum optimalnya pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk sistem elektronik di Pemerintah Kota Depok
- d. Kesadaran akan keamanan informasi yang masih rendah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

14) Kendala pencapaian kinerja pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah :

- a. Penunjang urusan pemerintahan daerah:
 - a) Perubahan kebijakan terkait barang milik daerah (aset).
 - b) Berkurangnya jumlah pegawai DKUM, mempengaruhi penyerapan anggaran.
- b. Pelayanan izin usaha simpan pinjam: sistem jaringan/server OSS yang lambat, menghambat perizinan koperasi.
- c. Pendidikan dan latihan perkoperasian: ketidakhadiran peserta tanpa pemberitahuan, sulit mencari pengganti.
- d. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi:
 - a) Terbatasnya SDM pengawas koperasi.
 - b) Tidak adanya ASN dengan jabatan fungsional pengawas koperasi.
 - c) Data yang disampaikan koperasi belum lengkap.

- e. Pemberdayaan koperasi:
 - a) Kurangnya pemahaman koperasi terhadap digitalisasi.
 - b) Beragamnya permasalahan koperasi (keuangan, RAT, pengelolaan).
 - f. Pemberdayaan UMKM:
 - a) Perubahan regulasi terkait persyaratan peserta dan pendamping.
 - b) Kurangnya tenaga pengolah data.
 - c) Produk mikro belum memenuhi standar mitra/ritel modern.
 - d) Keterbatasan kuota fasilitas perizinan.
 - e) Pendamping usaha mikro belum memenuhi standar BNSP.
 - f) Kurangnya penyebaran informasi dari stakeholder kepada masyarakat.
 - g. Pengembangan UMKM:
 - a) Produk peserta kurasi kurang variatif.
 - b) Masa usaha di bawah 3 bulan, menyebabkan ketidakstabilan usaha mikro.
- 15) Kendala pencapaian kinerja pada urusan penanaman modal yaitu belum optimalnya implemementasi penarapan SOP layanan perizinan dan non perizinan untuk beberapa jenis layanana perizinan dan non perizinan yang memerlukan pengecekan lapangan oleh tim teknis terhadap objek/lokasi yang dimohon.
- 16) Kendala pencapaian kinerja pada urusan kepemudaan olahraga, pariwisata dan kebudayaan :
- a. Proses perencanaan kurang cermat dan optimal;
 - b. Jumlah SDM kurang jika dibandingkan dengan banyaknya urusan yang diampu;
 - c. Tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan cagar budaya;
 - d. Kelengkapan administrasi pencairan anggaran hibah tidak lengkap sehingga tidak terserap;
- 17) Kendala pencapaian kinerja pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan :
- a. Belum optimalnya penyusun perencanaan pengadaan, sehingga ada beberapa pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dapat dilaksanakan.
 - b. Kurang cermatnya dalam penyusunan RKA maupun anggaran kas sehingga pada saat pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian atau perubahan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dan berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.

- c. Masih belum terlaksananya proses pemindahan sisa arsip dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.
- d. Belum adanya armada mobil kearsipan dalam rangka pelayanan kearsipan dimasyarakat..

18) Kendala pencapaian kinerja pada urusan perikanan:

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Pusat dan Provinsi terkait kolaborasi yang akan dilakukan;
- b. Permasalahan dan kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap maupun kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah keterbatasan jumlah enumerator yang ditetapkan yang berimplikasi dengan keterbatasannya Data Sampling yang dihimpun;
- c. Alih fungsi lahan;
- d. Rendahnya minat generasi milenial untuk mengembangkan budidaya ikan, sehingga dikhawatirkan rendahnya terhambatnya proses regenerasi pelaku usaha perikanan;
- e. Masih Kurangnya informasi tentang permintaan ikan dari luar negeri dan mekanisme ekspor ikan hias;
- f. Kurangnya indukan ikan hias dan ikan konsumsi yang berkualitas di Kota Depok;
- g. Kurangnya lengkapnya data pendukung peserta kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan yang meliputi Profil Usaha, Nomor Induk Berusaha dan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA);
- h. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Bazar Produk Hasil Perikanan adalah Pembinaan terhadap pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan terkait penerapan GMP dan SSOP belum terjadwal;
- i. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Gemarikan adalah tidak sinkronnya data penerima manfaat Gemarikan dan Kurangnya Koordinasi dengan stakeholder (kader) terkait identifikasi peserta dalam pelaksanaan kegiatan.

19) Kendala pencapaian kinerja pada urusan pertanian:

- a. Budidaya Satwa Harapan belum menarik perhatian petani sebagai sumber penghasilan tambahan keluarga;

- b. Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) terkendala petugas inseminator yang terbatas waktunya karena memiliki tugas ganda sebagai medis/paramedis di Puskesmas;
- c. Pelayanan IB PKB dibatasi harus yang bereartag nasional agar tercatat secara nasional;
- d. Berkurangnya populasi sapi yang ada di Kota Depok;
- e. Perlunya sosialisasi satwa harapan yang bernilai ekonomis kepada petani/masyarakat yang bisa dilakukan di lahan yang terbatas;
- f. Keterbatasan tenaga inseminator yang bisa siap 24 jam karena jauhnya tempat tinggal peternak dengan rumah inseminatornya, akibatnya masa birahi sapi tertunda.

20) Kendala pencapaian kinerja pada urusan perdagangan dan perindustrian:

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap layanan Dinas, baik dalam hal pembinaan/pemberdayaan pelaku usaha perdagangan dan IKM; pengelolaan pasar rakyat disisi lain adanya keterbatasan anggaran yang tersedia;
- b. Beberapa pasar rakyat milik Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya dikuasai sehingga belum dapat ditata secara penuh (kendala asset) dan dapat diintervensi dengan anggaran;
- c. Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kota Depok;
- d. Terbatasnya kapasitas SDM Dinas Perdagangan dan Perindustrian baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas, UPTD Pasar dan UPTD Metrologi Legal;
- f. Beberapa kegiatan Dinas melibatkan pihak ketiga/instansi lain sehingga dapat berpengaruh dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan;
- g. Kurang cermat/kurang konsisten dalam penempatan anggaran kas kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

21) Kendala pencapaian kinerja pada Urusan Transmigrasi :

Kota Depok tidak mendapatkan kuota pemberangkatan calon transmigran pada tahun 2023 disebabkan ketidaksesuaian tujuan transmigrasi yaitu sektor kelautan.

- 22) Kendala pencapaian kinerja pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah):
- Implementasi dan pengembangan aplikasi E-SAKIP: Terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Setda yang belum dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait implementasi dan pengembangan Aplikasi E-SAKIP.
 - Pergeseran anggaran: sering terjadi pergeseran anggaran kegiatan yang dapat mengganggu konsistensi pelaksanaan program.
 - Perubahan Kebijakan/Regulasi: adanya perubahan kebijakan atau regulasi pada tahun berjalan yang memengaruhi pelaksanaan program.
 - Kualitas Rancangan Perundang-undangan: masih terdapat rancangan perundang-undangan yang belum memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
 - Keterlambatan Penyampaian Dokumen: sering terjadi keterlambatan penyampaian dokumen pendukung penilaian LPPD oleh Perangkat Daerah.
 - Ketidakpatuhan dalam Proses Pengadaan:
 - Masih terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan yang tidak mematuhi prosedur PBJ, seperti tidak menyelesaikan proses pemilihan pada eKatalog.
 - Realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang lebih kecil dari nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - Perubahan indikator penilaian: adanya perubahan kebijakan terkait indikator penilaian LPPD oleh Kemendagri yang memengaruhi proses evaluasi.
- 23) Kendala pencapaian kinerja pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Dewan):
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan sehingga target program dan kegiatan tidak tercapai;
 - Kurangnya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari perencanaan;
 - Hubungan struktural Sekretariat DPRD dengan pelaksana yang kurang harmonis dalam melaksanakan kegiatan;
 - Kurang optimalnya proses koordinasi dengan pihak penyedia, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
 - Kurangnya kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
 - Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang;

- g. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD.

24) Kendala pencapaian kinerja pada unsur perencanaan dan penelitian pengembangan:

- a. Adanya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa karena perubahan metode pengadaan;
- b. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan;
- c. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian proses perencanaan, seperti pengumpulan data dan laporan secara tepat waktu.

25) Kendala pencapaian kinerja pada unsur keuangan :

- a. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan memperhitungkan SDM yang tersedia dan padatnya jadwal kegiatan di waktu yang sama.
- b. Adanya jadwal pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan belanja dan pendapatan tahun anggaran 2023 pada bulan Januari s/d Maret 2024 menyebabkan Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Perbendaharaan tidak bisa menjalankan kegiatannya, karena sebagai narahubung BPK dan pemangku tupoksi tingkat kota.
- c. Adanya pergeseran anggaran sehingga beberapa sub kegiatan di Bidang Pengelolaan Aset mengalami penjadwalan ulang.
- d. Adanya rencana perubahan anggaran sehingga kegiatan di Bidang Perbendaharaan ditunda pelaksanaannya.

26) Kendala pencapaian kinerja pada unsur kepegawaian :

- a. Belum diimplementasikannya secara menyeluruh manajemen talenta dalam promosi dan mutasi ASN.
- b. Belum adanya asessment center dan asessor di Pemkot Depok sehingga masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk uji kompetensi.
- c. Belum adanya mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai yang akuntabel dan implementatif diterapkan di Kota Depok.
- d. Beberapa sub kegiatan jadwal pelaksanaannya bergantung kepada Kementerian/Instansi lain sebagai penyelenggara kegiatan dan pembuat kebijakan.
- e. Belum tersedianya road map atau pemetaan kebutuhan diklat baik teknis, fungsional, manajerial maupun sosiokultural.

- f. Masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan minimal pengembangan kompetensi (terdapat pegawai yang tidak memenuhi target minimal 20 JP, namun terdapat pegawai yang jauh melebihi target JP dalam setahun).
- g. Belum tersedianya dokumen Human Development Capital Planning (HDCP).

27) Kendala pencapaian kinerja pada unsur pengawasan :

- a. Perumusan Kinerja Pegawai dan Manajemen Risiko Belum Terintegrasi : Masih dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah tanpa koordinasi dengan Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat.
- b. Kurangnya Pedoman Pelaksanaan Pengawasan : Mandat pengawasan dari Pemerintah Pusat sering tidak disertai pedoman yang jelas, menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal dan waktu penyelesaian pengawasan yang lama.
- c. Beban Kerja Inspektorat yang Terlalu Tinggi : Banyaknya pengawasan mandatory dari berbagai lembaga (Kemendagri, KPK, BPKP, BPK, Aparat Penegak Hukum) menyebabkan 1 APIP menangani 3-4 penugasan sekaligus.
- d. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam Memenuhi Dokumen : Dokumen yang dibutuhkan untuk pengawasan sering terlambat diserahkan, menghambat optimalisasi hasil pengawasan.
- e. Kurangnya Adaptasi Teknologi dalam Pengawasan : Perkembangan teknologi belum diimbangi dengan efektivitas waktu penugasan, sehingga hasil pengawasan kurang optimal.
- f. Kurangnya Kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Tertentu : Beberapa pengawasan hanya membutuhkan validasi dari Inspektorat, sehingga pengaruh terhadap objektivitas dan hasil pengawasan menjadi terbatas.
- g. Terbatasnya Jumlah SDM Auditor dan PPUPD : Jumlah auditor dan PPUPD masih jauh dari kebutuhan ideal, menghambat efektivitas pengawasan.
- h. Keterbatasan Sarana dan Prasarana : Kapasitas gedung kantor tidak mencukupi untuk menampung pegawai dan ruang arsip dokumen rahasia.
- i. Kurangnya Anggaran Pengawasan : Anggaran pengawasan hanya 0,1% dari total belanja daerah, masih jauh dari ketentuan minimal 0,5%.
- j. Kinerja Perangkat Daerah yang Tumpang Tindih : Rumusan kinerja belum terstruktur secara SMART, menyebabkan kelebihan beban kerja di beberapa Perangkat Daerah.
- k. Belum Optimalnya Integrasi SIPD : Implementasi SIPD masih tergantung pada masing-masing Pemerintah Daerah, menyebabkan perbedaan jumlah dan interpretasi kegiatan/subkegiatan pengawasan.

- l. Aplikasi E-SAKIP yang Masih Terbatas : Baru sebatas pencatatan kinerja tanpa kemampuan menilai dan mengukur efektivitas kinerja Perangkat Daerah.
- m. Dampak Kebijakan Penjadwalan Ulang dan Pengurangan Anggaran : Mengakibatkan penyesuaian target kinerja Inspektorat yang tidak optimal.
- n. Keterbatasan SDM di Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) : Beban kerja tinggi tanpa pemenuhan jumlah pegawai yang memadai.
- o. Waktu Perencanaan yang Terbatas : Kurangnya waktu untuk menyusun perencanaan secara optimal, berdampak pada kualitas hasil yang diharapkan.

28) Kendala pencapaian kinerja pada unsur kewilayahan:

- a. Kurang optimalnya penyerapan anggaran
 - a) Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - b) Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - c) Adanya penjadwalan ulang kegiatan yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Masalah dalam verifikasi hibah
 - a) Kurang cermat dalam melakukan verifikasi hibah, menyebabkan duplikasi dengan perangkat daerah lain atau penerima hibah yang sudah menerima hibah di tahun sebelumnya.
 - b) Data ganda dalam sistem e-berbagi atau ketidaktersediaan data penerima hibah.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Jumlah SDM yang terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
 - b) Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi.
 - c) Adanya pegawai yang memasuki masa purna bhakti (pensiun) setiap tahun.
- d. Kinerja aparatur yang belum optimal
 - a) Kinerja aparatur yang kurang inovatif dan kreatif.
 - b) Kurangnya komitmen dari pelaksana kegiatan dalam hal waktu pelaksanaan, seringkali tidak sesuai dengan rencana.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kurang matang
 - a) Kurang cermat dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas.

- b) Perencanaan jadwal kegiatan yang kurang matang, menyebabkan perubahan atau pergeseran jadwal.
 - c) Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja, RKA, dan DPA) dalam hal judul kegiatan dan indikator kinerja.
 - f. Keterbatasan sarana dan prasarana:
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, baik di kantor maupun di lapangan.
 - b) Terbatasnya jumlah Pokmas (Kelompok Masyarakat) sebagai pelaksana kegiatan swakelola di Kelurahan.
 - g. Koordinasi dan prosedur yang rumit : sebagian kegiatan harus menunggu arahan atau persetujuan dari tingkat kota, membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah yang memakan waktu dan biaya.
 - h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital : belum optimalnya pemanfaatan layanan digital (elektronik/online) dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
 - a. Kurangnya konsistensi dalam perencanaan : kurang konsisten dalam menyusun perencanaan, menyebabkan kesulitan dalam evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 29) Kendala pencapaian kinerja pada unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik):
- a. Adanya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa karena perubahan metode pengadaan;
 - b. Kurang cermat dalam menempatkan anggaran kas;
 - c. Kurangnya SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

2.2.5.3 Tindakanjutan Bagi Pelaksanaan Triwulan/ RKPD Berikutnya

Upaya percepatan pencapaian kinerja baik pada tingkat sasaran, program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD
Melalui forum koordinasi, integrasi perencanaan, serta pembentukan unit pengendali teknis untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan program.
- 2) Optimalisasi pembiayaan dan SDM
Pemanfaatan dana pusat, provinsi, CSR, serta peningkatan kapasitas SDM melalui rekrutmen dan pelatihan untuk memperkuat implementasi program.
- 3) Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur prioritas

Normalisasi sungai, pembangunan embung, BLK daerah, jaringan air minum, dan perluasan jalur transportasi publik menjadi fokus tindak lanjut infrastruktur.

4) Peningkatan literasi dan partisipasi publik

Sosialisasi intensif, edukasi masyarakat, pelibatan komunitas budaya, dan forum konsultasi publik menjadi strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

5) Digitalisasi layanan dan sistem pengawasan berbasis data

Pengembangan aplikasi digital, pemanfaatan big data dan audit sistem, serta integrasi dokumen perencanaan berbasis SPBE mendorong tata kelola yang transparan dan responsif..

Tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan tahun berikutnya per Urusan sebagai berikut :

1) Urusan pendidikan:

- a. Program sekolah penggerak dan guru penggerak dapat diimplementasikan disatuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) dan masyarakat (sekolah swasta).
- b. Dilakukannya rehabilitasi atau perbaikan sekolah-sekolah yang rusak;
- c. Ditingkatkannya kualitas mengajar para pendidik;
- d. Peningkatan capaian dari target RPJMD Kota Depok tahun 2021–2026 dibidang pendidikan, yakni meningkatnya akses layanan Pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas SDM, relevansi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang makin efisien dan efektif;
- f. Melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

2) Urusan kesehatan:

- a. Perlu adanya perbaikan dan penguatan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, baik secara internal maupun eksternal organisasi;
- b. Optimalisasi pencapaian indikator kinerja program urusan kesehatan yang belum mencapai target dilakukan dengan :
 - a) Identifikasi hal yang menjadi penghambat dan pendorong dalam mencapai target;
 - b) Sosialisasi indikator kinerja dinas kesehatan Lintas program lebih intensif;
 - c) Indikator pelayanan kesehatan ibu hamil ibu bersalin dan balita sesuai standar yang belum tercapai dilakukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait (BPJS, PMI, fasilitas Kesehatan lain, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat);
- Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi maternal dan neonatal yang belum mencapai target melalui penelusuran (validasi) kejadian di fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
- Pelatihan kompetensi kebidanan;
- Meningkatkan jumlah SDM Kesehatan yang mengelola Program KIA baik ditingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;
- Mengoptimalkan pelaporan dari semua fasilitas kesehatan yang ada;
- Meningkatkan sarana penunjang pelayanan KIA;
- Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di RS se-Kota Depok;
- Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi Puskesmas PONED;
- Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui skema Bansos, PBI dan non kuota PBI;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119.

d) Indikator pelayanan kefarmasian sesuai standar yang belum mencapai target dilakukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian melalui pelatihan dan workshop;
- Meningkatkan mutu layanan kefarmasian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

3) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :

- Melakukan koordinasi melalui rapat rutin antar bidang dalam upaya perbaikan capaian kinerja dan anggaran;
- Melakukan pergeseran anggaran dan penyesuaian target kinerja untuk memperbaiki capaian kinerja;
- Melakukan evaluasi setiap bulan terhadap pencapaian target dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan;
- Menetapkan jadwal kegiatan dengan mempedomani hasil evaluasi tahun sebelumnya.

4) Urusan perumahan dan permukiman :

- Menetapkan jadwal kegiatan dan anggaran kas dengan mempedomani hasil evaluasi tahun sebelumnya;

- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana prioritas kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan;
- d. Melakukan antisipasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan;
- e. Permukiman Layak :
 - a) Mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh prioritas yang harus segera ditangani;
 - b) Memaksimalkan peluang pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah yang bisa diakses untuk penanganan wilayah kumuh;
 - c) Menggali potensi swadaya masyarakat dan kolaborasi dengan stakeholder serta kelompok peduli dalam penanganan kumuh seperti CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dan lembaga non pemerintah lainnya;
 - d) Melakukan kajian dan menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan DED Penataan Kawasan Kumuh.

5) Urusan ketentraman dan ketertiban umum :

Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Dilakukan koordinasi internal Satpol PP dan eksternal yakni dengan Bappeda Kota Depok terkait dengan Indikator Kinerja Satpol PP yang terkait langsung dengan RPJMD;
- b. Dilakukan pemetaan kinerja berdasarkan Sasaran yang ditetapkan sesuai SOTK;
- c. Dilakukan evaluasi kinerja pada setiap Triwulan melalui TIPEKIN;
- d. Penyusunan konsep kebijakan pemberian “reward and punishment”;
- e. Dilakukan proses pengukuran Capaian IKU Triwulan IV Tahun 2024.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

- a. Segera melaksanakan penjadwalan ulang atas kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya;
- b. Melakukan penyesuaian indikator dan target pada kegiatan yang mengalami pergeseran dan diinput pada RKPD Perubahan;
- c. Mengutamakan pelaksanaan program/ kegiatan Prioritas yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bahan evaluasi pada penyusunan Renja selanjutnya;
- e. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan pada triwulan selanjutnya;
- f. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

6) Urusan sosial :

- a. Meningkatkan penggunaan aplikasi pendataan seperti pendataan PPKS dan SITPAS/Belimbing Manis dalam upaya untuk optimalisasi pendataan;
- b. Menaikan honor petugas lapangan dalam melakukan verifikasi data sehingga dapat memotivasi petugas untuk melakukan updating data;
- c. Menaikan tali asih PSKS sehingga dapat memberikan motivasi kepada PSKS dalam memberikan layanan sosial;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dari pihak pemerintah yang dapat mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial, khususnya untuk layanan kesejahteraan sosial yang ada di lingkup Provinsi dan Nasional;
- e. Membuka kerja sama dengan stakeholder dari pihak non-pemerintah melalui MoU seperti dengan BAZNAZ, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan akademisi;
- f. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin di lingkup Dinas Sosial Kota Depok.

7) Urusan tenaga kerja :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja minimal setiap 3 bulan, dalam waktu yang berbeda. Pelaksanaan monev dilakukan sebelum berakhirnya triwulan, sehingga masih dapat dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan tersebut;
- b. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Lebih cepat dalam menyusun anggaran;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Tenaga Kerja.

8) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

- a. Melakukan penyesuaian rencana kinerja DP3AP2KB (DP3AP2KB) dengan jawal propinsi setahun sebelumnya;
- b. Melakukan perencanaan kinerja perubahan yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas;

- c. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja;
- d. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan pejabat DP3AP2KB Kota Depok;
- e. Penyelenggaraan Sekolah Pra Nikah;
- f. Penyelenggaraan Sekolah Ayah Bunda;
- g. Penyelenggaraan RW Ramah Anak;
- h. Melaksanakan sosialisasi penguatan ketahanan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) meliputi kegiatan bincang keluarga, roadshow puspaga, dan ceria bersama puspaga;
- i. Gerakan perlindungan anak dan parenting melalui kegiatan Sekolah Ayah Bunda, kampanye Gerakan Sayang Keluarga, talkshow sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (SKPA) serta Sekolah Pranikah;
- j. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender yang berketahanan keluarga menekankan pada isu-isu gender dan pemahaman serta persepsi gender yang benar;
- k. Pembinaan ekonomi produktif bagi keluarga rentan anggota kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga);
- l. Kegiatan pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa serta forum anak;
- m. Melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta perlindungan anak dengan membangun komitmen bersama melalui Rukun Warga (RW) Ramah Anak dan Kampung KB serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertujuan menghidupkan 8 fungsi keluarga serta pemenuhan hak anak;
- n. Memberikan perlindungan dan pelayanan terpadu melalui kegiatan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berupa pelayanan tim respon cepat di nomor hotline 112 atau nomor HP. 08111186598, pelayanan bantuan pendampingan hukum, mediasi terhadap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendampingan oleh psikolog;
- o. Memberikan edukasi kepada keluarga dengan tujuan penguatan ketahanan keluarga berupa tindakan preventif dan kuratif terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dan dampaknya melalui:
 - a) Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Rukun Warga (RW) yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan;
 - b) Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis

layanan yang dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/ Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor.

c) Konseling kepada pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

9) Urusan pangan:

- a. Melaksanakan evaluasi setiap bulan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan dalam upaya mencari solusi atau pemecahan masalah;
- b. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik;
- c. Melakukan koordinasi komprehensif di internal dan terhadap pihak eksternal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Dilakukan monitoring ke lokasi dimana aset berada secara berkala agar pengamanan terhadap aset;
- e. Penyusunan SOP Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagai bentuk pengendalian internal;
- f. Informasi kepada semua penanggungjawab kendaraan dinas agar kendaraannya dapat dilakukan pemeliharaan;
- g. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik;
- h. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan senantiasa berkoordinasi dengan TP PKK Kota Depok maupun Direktorat Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kolaborasi dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat (Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga).

10) Urusan lingkungan hidup :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi kinerja tahun 2024 dengan para pejabat struktural dan fungsional selaku PPTK;
- b. Memperkuat koordinasi antar bagian/bidang dalam upaya perbaikan capaian kinerja dan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya;
- c. Menentukan kegiatan dengan skala prioritas dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah guna penyempurnaan capaian anggaran dan kinerja di tahun anggaran selanjutnya;
- d. Melakukan penjadwalan kegiatan sesuai target yang direncanakan serta pencairan keuangan sesuai rencana kas pada awal tahun anggaran 2025.

11) Urusan kependudukan dan catatan sipil :

- a. Keterbatasan Anggaran
 - a) Mengajukan revisi anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional.
 - b) Melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan perencanaan yang lebih matang.
 - c) Menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan realisasi kebutuhan, seperti mengurangi anggaran yang tidak terpakai untuk dialihkan ke pos yang lebih prioritas.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Mengoptimalkan peran SDM yang ada dengan pembagian tugas yang lebih efektif.
 - b) Mengusulkan penambahan SDM melalui tenaga kontrak atau kerja sama dengan pihak lain.
 - c) Meningkatkan sosialisasi kepada OPD terkait manfaat pemanfaatan data kependudukan agar partisipasi meningkat.
- c. Keterbatasan Sarana dan Blangko Dokumen Kependudukan
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Kemendagri untuk memastikan ketersediaan blangko KTP lebih lancar.
 - b) Menggunakan solusi alternatif seperti e-KTP digital bagi masyarakat yang belum mendapatkan blangko fisik.
 - c) Melakukan evaluasi ulang terhadap spesifikasi kendaraan layanan agar lebih fleksibel dalam pengadaan.
- d. Prosedur Administratif yang Memakan Waktu
 - a) Berkoordinasi lebih awal dengan Kemendagri untuk memahami perubahan prosedur dan mempercepat proses pengajuan PKS.
 - b) Mengusulkan subsidi atau anggaran tambahan untuk memenuhi syarat ISO yang dibutuhkan OPD.
 - c) Mengakselerasi penerbitan SK Tim Pendampingan Kejaksaan dengan koordinasi langsung ke pihak terkait.
- e. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - a) Mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya IKD dan layanan jemput bola.
 - b) Bekerja sama dengan komunitas dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap layanan jemput bola.

- c) Mengadakan program edukasi khusus terkait manfaat dan prosedur Itsbat Nikah agar lebih banyak masyarakat yang tertarik mengikuti.
- f. Keterlambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan
 - a) Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana sejak awal tahun untuk menghindari keterlambatan pemeliharaan.
 - b) Menjalin komunikasi lebih intensif dengan penyedia jasa pemeliharaan agar laporan dapat diterima tepat waktu.
 - c) Mengoptimalkan sumber daya dan sistem yang ada agar pengolahan data untuk buku DKB dapat selesai sesuai jadwal.

12) Urusan perhubungan :

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Transportasi
 - a) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM transportasi secara berkala.
 - b) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terkait transportasi.
 - c) Menyusun standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan transportasi modern.
- b. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi
 - a) Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan peremajaan sarana prasarana seperti crane, kendaraan operasional, dan kendaraan derek.
 - b) Meningkatkan kapasitas dan kualitas ruang pelayanan UPT PKB serta lahan parkir PKB.
 - c) Menerapkan sistem pemeliharaan berkala untuk memastikan sarana tetap dalam kondisi optimal.
- c. Peningkatan Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Perhubungan
 - a) Mengembangkan sistem layanan berbasis digital untuk mempermudah administrasi dan pemantauan transportasi.
 - b) Mengintegrasikan teknologi GPS dan monitoring real-time dalam manajemen lalu lintas.
 - c) Mengembangkan aplikasi layanan transportasi yang terhubung dengan berbagai moda transportasi.
- d. Optimalisasi Integrasi Antar Moda Transportasi
 - a) Menyusun kebijakan integrasi antar moda, khususnya antara wilayah selatan dan barat.
 - b) Mengembangkan sistem transportasi yang saling terhubung untuk mengurangi biaya dan waktu perjalanan.
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung.

e. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

a) Peningkatan kapasitas jaringan jalan:

- Berkoordinasi dengan PUPR untuk pelebaran ruas jalan dan pembangunan jalan baru.
- Mengoptimalkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi titik kemacetan.

b) Pengaturan transportasi daring:

- Menyusun regulasi yang lebih ketat terkait operasional transportasi daring.
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap transportasi daring agar tidak berdampak negatif pada angkutan umum.

c) Revitalisasi transportasi publik:

- Mengadakan program peremajaan armada angkutan umum.
- Menyediakan insentif bagi operator angkutan umum untuk meningkatkan pelayanan.

d) Penertiban lalu lintas dan parkir liar:

- Meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar melalui patroli rutin.
- Menyediakan fasilitas parkir resmi di lokasi strategis untuk mengurangi parkir sembarangan.

e) Penyelesaian pembangunan Terminal Sawangan:

- Mengkaji ulang DED pembangunan terminal agar segera direalisasikan.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan pembangunan terminal.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses perizinan dan konstruksi.

13) Urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian:

- a. Meningkatkan layanan keamanan informasi dan komunikasi publik;
- b. Sosialisasi dan pendampingan kepada semua perangkat daerah terkait SPBE dan Satu Data Kota Depok;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus kepada pejabat PPID pada semua perangkat daerah agar perannya dapat lebih optimal.

14) Urusan koperasi dan usaha mikro :

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan;
- b. Merinci perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prediksi masa depan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait sistem OSS;

- d. Berkoordinasi lebih sering dengan stakeholder serta menyiapkan peserta cadangan untuk pelatihan;
- e. Berkoordinasi dengan BKPSDM terkait jabatan fungsional pengawas koperasi;
- f. Meningkatkan kualitas program bagi UMKM dalam hal produk dan manajemen keuangan;
- g. Mempercepat monitoring dan evaluasi UMKM binaan untuk melihat dampak pelatihan terhadap omzet usaha.

15) Urusan penanaman modal :

- a. Penyusunan SOP yang Lebih Detail:
 - a) Menyusun SOP yang mencakup tahapan pengecekan lapangan secara spesifik.
 - b) Menentukan batas waktu optimal untuk setiap tahap verifikasi lapangan.
- b. Peningkatan Koordinasi Antar Tim:
 - a) Membentuk mekanisme komunikasi yang efektif antara pemohon, tim teknis, dan pihak terkait.
 - b) Menyediakan sistem pelaporan dan monitoring progres pengecekan lapangan.
- c. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi:
 - a) Mengembangkan sistem digital untuk pemantauan dan pelacakan pengecekan lapangan.
 - b) Memanfaatkan aplikasi mobile atau GIS untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengecekan.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM:
 - a) Melakukan pelatihan berkala bagi tim teknis agar lebih efektif dalam melakukan pengecekan.
 - b) Meningkatkan jumlah petugas jika ditemukan hambatan dari keterbatasan SDM.
- e. Evaluasi dan Perbaikan Berkala:
 - a) Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SOP dan melakukan revisi jika diperlukan.
 - b) Menyediakan mekanisme umpan balik dari pemohon untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan.
- f. Penerapan Mekanisme Prioritas:
 - a) Menentukan kriteria urgensi dalam pengecekan lapangan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya.
 - b) Mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk mempercepat layanan bagi pemohon yang memenuhi syarat tertentu.

- g. Penyederhanaan Proses Administrasi:
 - a) Mengurangi proses birokrasi yang tidak perlu agar pengecekan lapangan lebih cepat dan efisien.
 - b) Mengintegrasikan data perizinan dengan instansi lain guna mempercepat proses validasi.
- 16) Urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata :
 - a. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang lebih matang;
 - b. Pembenahan tata kelola SDM untuk mengatasi ketersediaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Koordinasi Bersama TACB dan Wali Kota terkait penetapan Cagar Budaya;
 - d. Membuat juknis hibah agar proses pencairan hibah dapat dilaksanakan dengan baik.
- 17) Urusan perpustakaan dan kearsipan :
 - a. Rapat evaluasi pelaksanaan anggaran, untuk mengidentifikasi serapan anggaran yang masih rendah;
 - b. Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Peningkatan kompetensi SDM terkait perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa.
- 18) Urusan Perikanan :
 - a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi;
 - b. Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah dan akademisi untuk mengembangkan alternatif cara budidaya ikan di lahan terbatas;
 - c. Koordinasi dengan instansi pemerintahan dan profesional terkait ekspor ikan hias;
 - d. Kerjasama secara intensif dengan kabupaten/kota lain yang merupakan sentra indukan ikan hias dan konsumsi;
 - e. Masih diperlukannya pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap maupun Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota kedepannya menyesuaikan dengan Nomenklatur Program pada Renstra DKP3 Kota Depok yang telah ditetapkan;
 - f. Perlu dilakukannya penambahan Enumerator maupun Penyuluh Perikanan dalam rangka optimalnya pelaksanaan Program/Kegiatan.

- g. Untuk menindaklanjuti permasalahan dan kendala pada kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2024 maka akan tetap melaksanakan koordinasi yang intensif terkait updating data peserta;
- h. Untuk menindaklanjuti permasalahan dan kendala pada kegiatan Bazar Produk Hasil Perikanan melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan terkait penerapan GMP dan SSOP secara terjadwal dan tetap melaksanakan koordinasi yang intensif terkait updating data penerima manfaat Gemarikan.

19) Urusan pertanian :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada petani mengenai Satwa Harapan yang bisa dibudidayakan di lahan terbatas tetapi bisa menguntungkan;
- b. Perlu penambahan petugas inseminator yang tidak merangkap tugas di Puskeswan;
- c. Meningkatkan pemasangan eartag nasional pada semua sapi betina yang ada di Kota Depok;
- d. Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai Satwa Harapan yang bernilai ekonomis dan bisa dibudidayakan di lahan sempit;
- f. Perlu diadakan atau mengikuti diklat IB terampil bagi peternak agar masalah pelaksanaan Inseminasi pada ternak tidak tertunda dan efektif.

20) Urusan perdagangan dan perindustrian :

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait program nasional revitalisasi pasar;
- b. Melaksanakan kajian dan surveillance bagi pasar rakyat yang belum memenuhi sertifikasi SNI dan pasar rakyat yang sudah ber-SNI;
- c. Melaksanakan koordinasi terkait status Bangun Guna Serah (BGS) pasar rakyat dengan instansi terkait;
- d. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dan regulasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian;
- e. Terus berupaya mengoptimalkan jalinan kemitraan yang sudah terbentuk dengan para stakeholder Dinas;
- f. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Depok yang disesuaikan dengan RTRW Kota Depok sebagai pedoman pembangunan industri kota;

- g. Mengusulkan penambahan SDM dan peningkatan kompetensi SDM kepada BKPSDM dan Kementerian;
- h. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Mengusulkan pengurangan anggaran terhadap program/kegiatan yang berpotensi tidak diserap hingga akhir tahun dan/atau pergeseran anggaran terhadap program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Dinas;
- j. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi IKM.

21) Urusan Transmigrasi :

Koordinasi lebih lanjut dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tentang kuota transmigran tahun 2024 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan kuota tahun 2025 untuk penyusunan bahan Renja tahun 2025.

22) Unsur Sekretariat Daerah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan kinerja Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan mengadopsi aplikasi JAPATI Provinsi Jawa Barat;
- b. Melakukan penyesuaian indikator dan target pada kegiatan yang mengalami pergeseran dan refocusing dan diinput pada RKPD Perubahan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kepala Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan kualitas rancangan produk hukum daerah;
- d. Melakukan penyesuaian bukti dukung terhadap perubahan indikator penilaian pada LPPD Kota Depok;
- e. Melaksanakan Desk kepada Perangkat Daerah dalam upaya percepatan penyampaian bukti dukung LPPD;
- f. Melakukan Sosialisasi dan pendampingan tentang prosedur PBJ melalui e katalog kepada PPK seluruh perangkat Daerah Kota Depok.

23) Unsur Sekretariat Dewan:

- a. Penguatan tugas dan fungsi masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang detail bagi kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD;

- c. Pemanfaatan Bimbingan Teknis dan Coaching Klinik bagi Bagian-Bagian yang memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis;
- d. Percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bagian Umum yang masih kurang pada Triwulan IVI Tahun Anggaran 2024;
- e. Peningkatan pemahaman tentang target-target yang akan dicapai oleh masing-masing Sub Bagian;
- f. Peningkatan pemahaman tentang proses perencanaan dan pertanggung jawaban yang akan dicapai oleh masing-masing Sub Bagian.

24)Unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan:

- a. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara rutin tiap bulannya.

25)Unsur keuangan:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja minimal setiap 3 bulan, dalam waktu yang berbeda. Pelaksanaan monev dilakukan sebelum berakhirnya triwulan, sehingga masih dapat dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan tersebut;
- b. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Lebih cermat dalam menyusun anggaran (anggaran kas);
- d. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Keuangan Daerah terutama pengelola keuangan.
- e. Mengimplementasikan rencana sesuai dokumen yang dibuat.

26)Unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan:

- a. Mencermati dan melaksanakan hasil rekomendasi dari Bappeda terhadap evaluasi pelaksanaan renja triwulanan.
- b. Dibutuhkan komitmen dan dukungan pimpinan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan jadwal kegiatan dengan mempedomani anggaran kas.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana prioritas kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan.
- e. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan renja 2024 menjadi acuan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya.
- f. Melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan.

- g. Menerapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan pencapaian target output dan anggaran.

27)Unsur pengawasan :

- a. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi internal secara rutin di lingkup Inspektorat Daerah Kota Depok;
- b. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Pengawas lainnya dalam rangka sinergitas pengawasan;
- c. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat preventif;
- d. Meningkatkan koordinasi baik kepada pimpinan maupun Perangkat Daerah mengenai peran dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Depok.

28)Unsur kewilayahan :

- a. Verifikasi Hibah: Membandingkan data penerima hibah tahun sebelumnya dengan usulan masyarakat untuk memastikan anggaran terserap optimal;
- b. Perencanaan Kinerja: Menyusun RKA dan anggaran kas dengan lebih baik guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. Kaderisasi Pejabat Pengadaan: Meningkatkan kapasitas pejabat pengadaan barang dan jasa agar proses lebih cepat dan efisien;
- d. Pembenahan Tata Kelola SDM: Mengatasi keterbatasan SDM dengan optimalisasi dan bimbingan kepada pegawai;
- e. Prioritas Penganggaran: Mengutamakan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja;
- f. Monitoring dan Evaluasi: Mengadakan evaluasi internal secara rutin untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
- g. Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Menggunakan hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan pelayanan;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengintensifkan sosialisasi program dan membentuk lebih banyak kelompok masyarakat untuk pembangunan swakelola;
- i. Detail Rencana Kerja: Menyusun RKPD dengan timeline yang jelas dan mitigasi risiko keterlambatan;
- j. Penambahan ASN: Mengusulkan kebutuhan ASN ke tingkat kota untuk pengadaan pegawai yang lebih optimal;

- k. Optimalisasi Forum Koordinasi: Memanfaatkan forum lintas perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan;
- l. Digitalisasi Administrasi: Menginput dan menyelesaikan SPJ segera setelah pelaksanaan kegiatan.
- m. Peningkatan Infrastruktur: Memfasilitasi internet kantor agar lebih cepat untuk mendukung efisiensi kerja;
- n. Penyesuaian Dokumen Perencanaan: Menyesuaikan dokumen Renstra dengan RKPD/Renja Kecamatan Bojongsari..

29)Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara rutin tiap bulannya;
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur Bakesbangpol;
- Menyusun perencanaan dan penganggaran lebih cermat.

2.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pemerintah Kota Depok berupaya mencapai seluruh tujuan TPB tersebut. Dari ke-17 TPB, hanya 2 (dua) tujuan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Tujuan ke-7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; dan Tujuan ke -14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Hasil monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran TPB/SDG's tahun 2023 secara lengkap diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101 Hasil Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran TPB/SDG's Kota Depok Tahun 2023

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.			01.01.01	Tingkat kemiskinan ekstrim.							
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0%. Tahun dasar September 2020: 10,19% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,69	Persentase Penduduk Miskin	2,52	2,53	2,38	Dinsos	
			1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		2.1 Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial menjadi 98%. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional).	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja,		Penerima Bantuan luran (PBI)					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kelompok miskin dan rentan.							
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	2.2 Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98% (2024. Tahun dasar 2020: 82,07% (Sumber data: Dewan Jaminan Sosial Nasional))	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	97,00%	Total 1.767.018 jiwa (92,90%) Dengan rincian: PBI= 507.831 jiwa (26,82%) Non PBI= 1.259.187 jiwa (66,51%)	Total 1.882.916 jiwa (97,67%) Dengan rincian: PBI= 572.899 jiwa (29,72%) Non PBI= 1.310.017 jiwa (67,95%)	Dinkes	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun	2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal	2.3 Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	27,87	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	NA	NA	NA	Disnaker	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: 63,82% (formal) dan 3,21% (informal) (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).									
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	2.2 Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			381 orang	336 orang	75 orang	Dinsos	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk	2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Progra	7.201.200		23.175 orang	30.693 Orang	28.386 Orang	Dinsos	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	tahun 2019 (2015: 3 juta).			m Keluarga Harapan.							
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.		1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.		Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	100	95,03	100	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)					
	3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.		1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	88,45	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	93,00	100	100	Dinkes	
	3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	96,3	Idl 0-11 68,1 Baduta lanjutan 18-24 bl 18,6	100,00	97,43% (42.087 orang)	95,52	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.3 Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	84,3		75,30%	50,45%	58,05	Dp3ap2kb	
	3.4 Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	3.1 Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 79,53% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	87,78	Cakupan Pelayanan Air Minum	89,31%	85,99%	85,22%	DPUPR	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	3.1 Meningkatnya akses air minum layak menjadi 100%. Tahun dasar 2020: 90,21% akses layak; Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Tahun dasar 2020: 79,53% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	68,06	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	99,17%	99,13%	99,37%	DPUPR	
	3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	7,14%	3,64%	3,91%	Disrumkim	
	3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	101,55		100%	97,87%	94,20%	Disdik	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).										
	3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederaj at.	105,29		76,50%	74,80%	80,02%	Disdik	
	3.9 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).		1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederaj at.	90,05					Disdik	
						Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C				Disdik	
	3.10 Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	96,80%	96,46%	NA	Disdukcapil	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.11 Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	99,95						
			1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.							
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada		4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak			50	43,37	54	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana		per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).		bencana per 100.000 orang.							
	4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.			NA	NA	NA	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
	4.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.			NA	NA	NA	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	
	4.3 Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.						Dinsos	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).										
	4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.						Dinsos	
	4.5 Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	4.3 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen. Tahun dasar 2019: 183 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)		76,53	80,44	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10%o (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.							
			1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.							
		4.4 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana danpasca bencana sebanyak 55dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen (Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana).	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	7		1	NA	1	Disdamkar	
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari		5.1 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial dan ekonomi produktif. Tahun dasar 2019: 15,54 (Sumber data: Kementerian Keuangan).		pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.							
			1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				total belanja pemerintah.							
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.		5.2 Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan terkait dengan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola perlindungan sosial serta peningkatan pemanfaatan anggaran kesehatan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor- sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.							
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan											
II.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang,	1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun	1.1 Menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	7.3	Prevalensi Gizi Buruk	13% (Tidak ada di RPJMD, target	5,46% (5.731 balita)	5,4% (5.494 balita)	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
terutama orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Undernourishment-PoU) menjadi 5%. Tahun dasar 2020: 8,34% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)					berdasarkan Indikator Kinerja Program Gizi Kemenkes)				
	1.2 Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	1.2 Menurunnya prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES) menjadi 4%. Tahun dasar 2020: 5,12% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	12.44	SPPH dengan asupan kalori minimum dibawah 2100 kkal/kapita/hari	NA	NA	NA	DKP3	
II.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada	2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita menjadi 14%. Tahun dasar 2019:	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	34.43		4,77%	3,48% (3.637 Balita)	3,24% (3.283 orang)	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	27,7% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).									
			2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	13.08		13,08% (Tidak ada di RPJMD, target mengikuti target RAD SDGs 2023)	2,97% (952 orang)	2,69% (843 Balita)	Dinkes	
	2.2 Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%).	2.2 Menurunnya prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita menjadi 7%. Tahun dasar 2019: 7,4% (Sumber data: Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019).	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	17.5		7,3% (Tidak ada di RPJMD, target berdasarkan Indikator Kinerja	1,96% (2.048 orang) balita terkena obesitas; 3,06% (3.203 orang)	2,55% (2.588 balita Wasting)	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Gizi Kemenkes)	balita terkena wasting			
	2.3 Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).										
	2.4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).										
	2.5 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun	2.3 Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 95,2. Tahun dasar 2020: 86,3 (Angka Kecukupan Energi: 2. IOO kkal/kapita/ hari) (Sumber data: Direktori Konsumsi Pangan 2020, Kementerian Pertanian).	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	89		NA	89	NA		

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).										
II.3 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	3.1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	4.1 Terlindunginya lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 100%. Tahun dasar 2019: 50% (Sumber data: Kementerian Pertanian).	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	38%		NA	NA	NA	DKP3	
Tujuan 3 Kehidupan Sehat Dan Kesejahteraan											
III.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	1.1 Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	82	Jumlah Kasus Kematian Ibu	58,3	56,14 / 100.000 KH (24	66,40	Dinkes	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	hidup menjadi 183. Tahun dasar 2015: 305 (Sumber data: Survei Penduduk Antar Sensus 2015)						kematian/4 2.747 kelahiran hidup)			
	1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	1.2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 95%. Tahun dasar 2020: 87,91% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	93	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100,00%	100% (44.884/44. 884 x 100%)	100,00%	Dinkes	
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	88.45	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100,00%	100% (44.884/44. 884 x 100%)	100,00%	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) menjadi 16. Tahun dasar 2017;24 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	29	Rasio Kematian Bayi	1,27	0,12	3,98	Dinkes	
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	11	Rasio Kematian Bayi	1	2,39 per 1000 kelahiran hidup (102 kematian/4 2.747 kelahiran hidup)	1,92	Dinkes	
	2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai	2.2 Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai	92		100,00%	100% (IDL Kota	100% (IDL Kota	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Hidup) menjadi 10. Tahun dasar 2017: 15 (Sumber data: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017).		80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.				Depok = 97,43%)	Depok = 95,52%)		
III.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	3.1 Menurunnya insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) menjadi 0,18. Tahun dasar 2020: 0,18 (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.		Persentase Pasien Hiv Yg Di Obati	0,18(Tidak ada di RPJMD, target mengikuti target Rencana Aksi Nasional Penegndalian HIV dan AIDS)	327 orang	0,20 (435/2.145 .400x1000)Kasus HIV tahun 2023 = 435 kasus	Dinkes	▼
	3.2 Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	3.2 Menurunnya insidensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk menjadi 190. Tahun dasar 2019: 312 (Sumber data: Global	3.3.2	Kejadian TB per 1.000 orang.		Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Success Rate)	1,17 (Tidak ada di RPJMD, target mengikuti target IKD th 2023 dengan	3,13/1000 orang		Dinkes	▼

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tuberculosis Report 2020)					indikator prevalensi kasus tb) per 1000 penduduk				
			3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)	117 (Tidak ada di RPJMD, target mengikuti target IKD th 2023 dengan indikator prevalensi kasus tb) per 100.000 penduduk	313,96 orang/100. 000 penduduk		Dinkes	▼
	3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	3.3 Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria menjadi 405. Tahun dasar 2020: 312 (Sumber data:	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	0.1		0,1 (Tidak ada di RPJMD, target mengikuti target RAD SDGs 2023)	0,11/1000 orang (209 kasus)	0,16/1000 orang (350 kasus)	Dinkes	▶

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kementerian Kesehatan).									
	4.4 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).		3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan n upaya kesehatan jiwa.		Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	1 Kota	1 Kota	1 Kota	Dinkes	
III.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	5. 1 Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis menjadi 11.500. Tahun dasar 2020: 9.583 orang (Sumber data: Kementerian Kesehatan).	3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.			NA	NA	NA	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.			NA	NA	NA	Dinkes	
			3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.			NA	NA	NA	Dinkes	
	5.2 Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75).		3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.			NA	NA	NA	Dinkes	
	5.3 Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.			NA	NA	NA	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).										
			3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir.			NA	NA	NA	Dinkes	
III.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.	-	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.			NA	0,19903	0,199963	Dinkes	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan	8.1 Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	-	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang		Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	100,00%		100,00%	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).							
			3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	8,76%	31,91%	20,32%	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	7.1 Meningkatnya cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 Persen penduduk berpendapatan terbawah menjadi 112,9 juta penduduk. Tahun dasar 2020: 96,6 Juta penduduk (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	95	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	97,00%	92,90% (1.767.018 jiwa)	97,67%	Dinkes	
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	97,00%	Total 1.767.018 jiwa (92,90%) Dengan rincian: PBI= 507.831 jiwa	97,67%	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(26,82%) Non PBI= 1.259.187 jiwa (66,51%)			
3.C Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.		-	3.C.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			Tidak ada di RPJMD	4,77	4,59	Dinkes	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa			4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.							
	1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	95		95	98,31	92,18	Disdik	
	1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	95		95	98,7	94,23	Disdik	
	1.3 Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019		4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	95	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	menjadi 84,6% (2015:73,5%).										
	1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	2.1 Meningkatnya persentase anak kelas I SD/MI/SDLB yang pemerintah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%. Tahun dasar 2020: 62,48%(Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	106.23		100%	104,61%	104,59%	Disdik	
	1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	105.78		93,14%	94,06%	94,84%	Disdik	
	1.6 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).		4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	104.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9.38		11.31	11,47	11.58	Disdik	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.							
			4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.							
	2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	86.43		100%	62,11%	65.09%	Disdik	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki- laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.			4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.							
	3.1 Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun		4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).			SMA/SMK/MA/ sederajat.							
	3.2 Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).		4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	31.11						
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.			4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).							
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang	4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-	98.8		100%	98,20%	94,20%	Disdik	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	setara gender pada tahun 2019.			laki di (1) SD/MI/ sederajat;							
	4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.		4.5.2*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (2) SMP/MTs/sederaj at;	81.23		76,50%	77,08%	80,02%	Disdik	
	4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019.			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di (3) SMA/SMK/MA/se derajat;	58.25	APM SMA/SMK/SLB					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	31.23						
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.			4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.							
	5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun.	100		98,90%	99,42	96,53%	Diskarpus	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).										
	5.2 Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15- 59 tahun pada tahun 2019.		4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.			99.9	99.42	99.19	Disdik	
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi			4.7.1	Pengarusutamaa n pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.				pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.							
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.			4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).							
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan			4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.											
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		9.1 Meingkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.					30,13	Disdik	●
Tujuan 5 Kesetaraan Gender											
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender	1.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender	1		NA	8	11	DP3AP2KB	●

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
terhadap kaum perempuan dimanapun.	mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	gender dan pemberdayaan perempuan		mendukung pemberdayaan perempuan.							
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			0,018	0,0002504 38	0,0002157 03	DP3AP2KB	
	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Tahun dasar 2016: 9,4%	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0.01	Indeks Perlindungan Anak*	100%	86 anak	100%	DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Sumberdata: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016).									
	2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	DP3AP2KB	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan		3.1 Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74o/o. Tahun dasar 2020: 10,35% (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	109.03	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	NA	NA	NA	DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.			23	23.1	23,32	DP3AP2KB	
	3.2 Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).			9,98%	9%	9%	DP3AP2KB	
	3.3 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).		5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat.							
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,52%, DPRD Provinsi menjadi 20%, dan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen	19.32	Persentase perempuan di legislatif	26%	26%	28%	DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17%. Tahun dasar Hasil Pemilu 2019 untuk DPR RI: 20,52%, DPRD Provinsi: 17,53%, dan DPRD Kabupaten / Kota: 15,72% (Sumber data: Komisi Pemilihan Umum)		daerah dan pemerintah daerah.							
	4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	45.75		3,15%	47%	NA	DP3AP2KB	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of			5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,		Cakupan Peserta KB Aktif	75,60%	51,41%	58,05%	DP3AP2KB	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.				penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.							
	5.1 Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	5.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Cakupan Peserta KB Aktif	8,76%	26%	20,32(%)	DP3AP2KB	
	5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	NA	Penyuluhan PLKB/PKB =5380 kali	NA	DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).										
	5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	6.1 Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.							
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol			5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.			lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.								
			5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/ atau hak kontrol.							
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan		7.1 Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020: 57,48% (Sumber data: Survei	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.			0,3	75,66	77,26	Diskominfo	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pemberdayaan perempuan.		Sosial Ekonomi) Nasional)									
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.		8.1 Meningkatnya kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan erencanaan dan Penganggaran esponsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa.	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.							
	5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.							
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.			5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.							
			5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/ atau hak kontrol.							
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.			5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memil iki telepon genggam.							
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum			5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
perempuan di semua tingkatan.											
Tujuan 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak											
VI.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	1.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45% dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%. Tahun dasar 2020: 90,21% untuk akses air minum layak, 20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,97% untuk akses air minum aman	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.		Akses Air Minum Layak dan Aman	89,31%	85,99%	85,22%	DPUPR	
			6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	86	Akses Air Minum Layak	89,31%	85,99%	85,22%	DPUPR	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				layanan sumber air minum layak.							
	1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau. Persentase kapasitas tampung SDA/volume eksisting	41.56		350 SR	679 SR	179 SR	DPUPR	
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum			96,34%	15,43% (Data Akses Aman Air	17,62%	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				aman dan berkelanjutan.				Minum 2022)			
VI.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	2.1 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman sebesar 90% untuk layak, termasuk 15% untuk aman. Tahun dasar 2020: 79,53% untuk layak termasuk 7,64% untuk aman (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.		Akses Sanitasi Layak	89,31%	85,99%	85,22%	DPUPR	
			6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	-	0,50%	0,51%	DPUPR	
			6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki	78.87		99,17%	99,13%	99,37%	DPUPR	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				akses terhadap layanan sanitasi layak.							
	2.2 Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	2.2 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 0%. Tahun dasar 2020: 6,19% . (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	5962		63	63 Kelurahan	63	DPUPR	
			6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	2408	Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	NA	63 Kelurahan	63 Kelurahan	Dinkes	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	27	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja	-	0,50%	0,51%	DPUPR	
			6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	240.80		-	0,38% (Data Perhitungan IKK LPPD 2022)	0,31% (Data Perhitungan IKK LPPD 2023)	DPUPR	
VI.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah	3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.			Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	27		NA	1	NA	DPUPR	
	3.2 Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas		6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem	19.84		NA	4493	NA	DPUPR	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.			pengelolaan lumpur tinja.							
	3.3 Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	3.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 59,65	6.3.2.(a)	Kualitas air danau. IKA		Indeks Kualitas Air	51,70	58,37	52,02	DLHK	
	3.4 Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	3.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 59,65	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Indeks Kualitas Air	51,70	58,37	52,02	DLHK	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	4.1 Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.	4.1 Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m3/detik) sebesar 131,36 m3/detik. Tahun dasar 2019: 81,36 m3/detik (Sumber data: RPJMN 2020-2024.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.							
			6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	2343						
	4.2 Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser- ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).										
			6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.		Indeks Penggunaan Air (IPA)					
VI.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	5.1 Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	5.1 Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada seluruh wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbarui sebanyak 64 dokumen (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2022)	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100). Dokumen Pola		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0- 100)*					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Rencana Pengelolaan SDA							
			6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).							
	5.2 Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.		6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.							
	5.5 Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa		6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.			pemulihan kawasan DAS.							
	5.6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai.		6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.							
	5.7 Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang- ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke- mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar- wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.										
			6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.							
			6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.							
			6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.1 Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019.	6.1 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5. Tahun dasar 2019: 52,65 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan					
			6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.							
	6.2 Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019.		6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.							
	6.3 Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019.		6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.							
	6.4 Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam		6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019.										
	6.5 Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai di 5 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas) dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019.		6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.							
Tujuan 8. Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1.1. Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	8.1 Meningkatnya Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan menjadi USD5.810-6.000 per kapita. Tahun dasar, 2020; USD3.870 (Sumber data:World Banks.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	50.98	Pendapatan Per Kapita	24,79	38.23	40.80	Diskominfo	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	2.1. Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	2.1 Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat menjadi 3,7-4,5%. Tahun dasar 2020: - 1,84 (Sumber data: BadanPusat Statistik).	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.							
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk	3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	57.06		NA	NA	NA	Disnaker	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
melalui akses terhadap jasa keuangan.	3.2 Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	3.1 Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,8%. Tahun dasar 2020: 24,39% (Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Otoritas Jasa Keuangan).	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	6.55		NA	NA	NA	Disnaker	
	3.2 Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	30.712	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	NA	20%	NA	DKUM	
	8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi,	4.1 Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan	8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.		produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen. Tahun dasar 2020: 2 dokumen (Sumber data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)									
			8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).							
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas,			8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	25.280	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	NA	NA	NA	Disnaker	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.			8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	8.04	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66	7,82	6,97%	Disnaker	
			8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	6.30						
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	5.1. Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	6.1 Meningkatnya Kualitas pemuda.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2.39	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	63%	NA	61%	Disnaker	
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan		7.1 Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keagamaan dan karakteristik wilayah	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan		Rasio penduduk yang bekerja				DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.		anak untuk memastikan anak menikmati haknya.		berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).							
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja			8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non- fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dalam pekerjaan berbahaya.											
	7.1. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.	8.1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.		Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	NA	NA	NA	Disnaker	
			8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.		Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan					
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk	8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap	9.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 4,5% terhadap PDB. Tahun dasar 2020:	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	1,50%	4,01%	4,02%	Disporyata	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	4,0% (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).									
	8.2. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	9.2 Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 16-17 juta. Tahun dasar 2020: 4,05juta (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	8,829,522	Jumlah Wisatawan Mancanegara	NA	520	1786	Disporyata	
		9.3 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 320-335 juta perjalanan. Tahun dasar 2020: 198,24 juta (Sumber data: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	105,663,108	Jumlah Wisatawan Domestik	NA	2,473,480	2.298.606	Disporyata	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)									
		9.4 Meningkatnya devisa pariwisata menjadi USD 21,5-22,9 Miliar. Tahun dasar 2020: USD3,46 Miliar (Sumber data: Neraca Pembayaran Indonesia, Bank Indonesia)	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.			NA	NA	NA	Disporiyata	
			8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.			NA	NA	NA	Disporiyata	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.			8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	5237						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.1. Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	10.1 Meningkatkan pendalaman sektor keuangan.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).							
			8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.			2100,00		0	DKUM	
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.			8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.			NA	NA	NA	DKUM	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.			8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.							
Tujuan 9. Industri, Inovasi Dan Infrastruktur											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus	1.1. Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1.1 Meningkatnya kemantapan jalan nasional rner:jadi 97%. Tahun dasar 2020: 92% (Sumber data: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.			9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi							
			9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan provinsi							
	1.2. Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).		9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan. Rehab, belum ada pembangunan							
	1.3. Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	1.3 Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 7.451 km. Tahun dasar 2020: 6.221 km (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.							
			9.1.2	Jumlah penumpang dan volume							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pengangkutan, menurut jenis transportasi.							
	1.4. Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).	1.4 Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit. Tahun dasar 2019: 15 (Sumber data: Kementerian Perhubungan).	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.							
	1.5. Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	1.5 Meningkatnya jumlah lokasi pelabuhan penyeberangan sebanyak 36 unit. Tahun dasar 2019: 24 (Sumber data: Kementerian Perhubungan)	9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan strategis. Prasarana sudah dibangun, belum operasional, Bojongsalawe, Pelabuhan Ratu (Review DED), Patimban (PT PII) untuk ekspor impor mobil							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	2.1. Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	2.2 Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur menjadi 8, 1%. Tahun dasar 2020: -2,93% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	9.2.1*	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	10,85		2,70%	4,19%	7,21%	Disdagin	
	2.2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	2.3 Meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja menjadi 75,7%. Tahun dasar 2020: 13,61% (Sumber data: Badan Pusat Statistik).	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3,72						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.3 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	3.1. Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.	4.1 Meningkatnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri sebanyak 2,9%. Tahun dasar 2019: 0,6% (Sumber data: Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan/AKSARA).	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industry manufaktur.			NA	NA	NA	DLHK	
			9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	19.22		NA	NA	NA	DLHK	
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan	1.1. Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurunnya koefisien gini menjadi 0,376-0,378. Tahun dasar	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,355	Indeks Gini	0,393	0,394	0,402	Diskominfo	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		September 2020: 0,385 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).									
	1.2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurunnya koefisien gini menjadi 0,376-0,378. Tahun dasar September 2020: 0,385 (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional).	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4.69	Persentase Penduduk Miskin	2,52%	2,53%	2,38%	Dinsos	
	1.3. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.		10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.		Indeks Desa Membangun					
	1.4. Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Menurunnya Desa Tertinggal menjadi 9.152 desa. Tahun dasar 2019: 19.152 (Sumber data: Indeks Desa).	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	275	Indeks Desa Membangun	0,00				

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.5. Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa. Tahun dasar 2019: 1.444 (Sumber data: Indeks Desa).	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	34,36	Persentase Desa Mandiri					
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.							
	1.6. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 23,5 -24%. Tahun dasar 2020: 25,32% (Sumber data: Badan Pusat Statistik, diolah).	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Persentase Penduduk Miskin					
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras,			10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.				kelamin dan penyandang disabilitas.							
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		Meningkatnya skor indeks demokrasi Indonesia variabel kebebasan menjadi 84,0. Tahun dasar 2020:79,40 (Sumber data: Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik).	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.							
	2.1. Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).		10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	100	Indeks Demokrasi	NA	NA	NA	Bakesbangpol	
		Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan	40						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	INDIKATOR PROXY	TARGET RAD-SDGs 2023	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban penangarn pelanggaran HAM berat. Tahun dasar 2019: 401 surat keterangan (Sumber data: RPJMN 2020-2024)		pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
			10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
		Terbitnya rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban sebanyak 40 rekomendasi pada tahun 2024. Tahun dasar 2020:20 rekomendasi. (Sumber data: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)		lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.			10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.							
			10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sosial pemerintah pusat.							
	3.1. Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal. Tahun dasar 2020: formal 63,82%; informal 3,21% (Sumber data: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	43.24			NA	178.625	Disnaker	
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.			10.5.1	Financial Soundness Indicator.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.			10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.							
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.			10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.							
	4.1. Meningkatnya kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran.		10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.							
	4.2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan tenaga migran.		10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.							
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara			10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization				dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen							
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara- negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara- negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.			10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja			10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.							
Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan											
XI.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 707o. Tahun dasar 2019: 56,510/o (Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional)	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.							
			11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	98.24 – 99.05		51,38	47,34	50,79	Disrumkim	
	1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni		11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.			pelayanan perkotaan (SPP).							
	1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.		11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.							
XI.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan	2.1. Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	2.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)sebanyak 6 kota. Tahun dasar 2019: I	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilih menurut jenis							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.		kota (Sumber data: RPJMN 2020-20241.		kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas.							
			11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.			18	14,46	15,91	Dishub	
	2.2. Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.		11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.							
XI.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan	3.1. Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa		11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah							



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.			dengan laju pertumbuhan penduduk.							
			11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.							
	3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan		11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).			Kegiatan Nasional (PKN).							
			11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.							
	3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.		11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.		11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.							
XI.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan mer:capai 62,7 . Tahun dasar 2019: 55,23 (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).							
			11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1		NA	NA	NA	Disporyata	
XI.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh	5.1. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	4.1 Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	20.000 (39,1)		43,37	50	54	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
		4.2 Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10% (Sumber data: RPJMN 2020-2024	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).				76,53	80,44	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	▼
		6.1 Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan									
		6.2 Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) sebanyak 50 dokumen.								Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahun dasar 2019: 183 dokumen									
		6.3 Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana sebanyak 55 dokumen. Tahun dasar 2020: 246 dokumen									
	5.2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).		11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.							
	5.3. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.							
			11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.							
XI.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk	6.1. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	5.1 Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan			76,40%	76,10%	71,31%	DLHK	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		dengan baik sebesar 80%o penanganan dan 20o/o pengurangan. Tahun dasar 20 19 : 54,8o/o penanganan dan 0,88% pengurangan		pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.							
		5.2 Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80		76,40%	76,10%	71,31%	DLHK	
		5.3 Rata-rata tahunan materi patrikulat halus PM 10 kurang dari 40									
		5.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50. Tahun dasar 2019: 86,57									
	6.2. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan		11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce- reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.			dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.							
			11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)							
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan	7.1. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau,		11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia,							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.	paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.			jenis kelamin dan penyandang disabilitas.							
			11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.							
			11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.							
Tujuan 12. Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab											
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mem-pertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	1.1 Tersusunnya konsep kebijakan rencana operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya berupa kolaborasi tematik quick wins program hingga tahun 2019.	Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen (kumulatif).	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.							
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber			12.2.1	Jejak material (material footprint).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
daya alam secara efisien.											
			12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).							
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.			12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.							
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di			12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.							
	2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Tersusunnya rancangan standar penanganan masalah limbah 83 industri dan penerapan sirkular ekonomi dalam pembangunan industri sebanyak 20 rancangan (Sumber data: RPJMN 2020- 2024).	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	440	-	NA	NA	NA	DLHK	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.							
			12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya.							
			12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA		75%	55%	51%	DLHK	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 539,8 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2018: 367,3 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	10						
							423	423	391 Bank sampah unit, 2 Bank sampah induk	DLHK	
	3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2019: 67,45 juta ton (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	114.3		NA	67.092 ton/tahun	Bank sampah = 5,51 ton UPS organik = 64,19 ton	DLHK	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.		Meningkatnya perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH menjadi 10%. (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.							
	4.1 Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkatnya jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi 25 dokumen (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.							
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.			12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				yang berkelanjutan.							
	5.1 Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.							
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim											
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Rata-rata korban akibat bencana hidrometeorologi di daerah rawan bencana maksimal sebesar 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	7			NA			
			13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	20.000 (39,1)						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				per 100.000 orang.							
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	2.1 Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	Persentase penurunan emisi GRK sebesar 26,35%. Tahun dasar 2019: 22,60% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	15	Jumlah Korban Bencana Hidrometeorologi					
		Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 29,91%. Tahun dasar 2019: 22,80% (Sumber data: Rencana Kerja Pemerintah 2021).	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	15		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DLHK	
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations			13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan dan mengoperasi- onalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.				mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.							
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas			13.b.1	Jumlah negara- negara kurang berkembang dan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.			negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat								

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				lokal dan marjinal.							
Tujuan 15. Ekosistem Daratan											
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.			15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.		Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan*					
	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.	Meningkatnya luas tutupan hutan secara nasional mencapai 420.000 ha per tahun. Tahun dasar 2020: 366.000 ha (Sumber	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	22.02		NA	NA	NA	DLHK	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		data: RPJMN 2020- 2024).									
			15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	157		NA	NA	NA	DLHK	
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.			15.2.1	Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).		15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.							
	2.2 Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015: 100.000 ha).		15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.							
			15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.							
			15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.			15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	1.46	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	35,876	36,44	36,512	DLHK	
	3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5.9					DLHK	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.			15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	34.31						
			15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.							
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun	4.1 Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).		15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.											
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.			15.6.1*			Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.					
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk			15.7.1			Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.					

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
hidupan liar secara ilegal.											
	5.1 Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/tahun).		15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.							
			15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.							
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan			15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.				pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).							
	6.1 Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati melalui pelaksanaan tiga kebijakan terkait pada tahun 2019 (2015: 3).		15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.							
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran			15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pengurangan kemiskinan.				Keanekaragaman Hayati 2011-2020.							
	7.1 Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	1						
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.			15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Rp.15,000,000,000						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.			15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.							
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang			15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mata pencaharian yang berkelanjutan.											
			15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.							
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh											
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.			16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.							
			16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.							
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.							
			16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.					
			16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1	TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.							
			16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.							
			16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir							
			16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.							
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.							
			16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.							
			16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.							
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	29.15	Kasus kekerasan seksual pada anak usia kurang dari 18 tahun	NA	85	71	DP3AP2KB	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.			16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.							
			16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.							
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi	3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.		16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	100						

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.											
	3.2 Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500 perkara.		16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.							
			16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.							
			16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).							
			16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.							
			16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.							
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,26 (?)	73,53	73,21	Inspektorat Daerah	
			16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.							
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).		16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	WTP	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	Bkd	
	5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas	91.7(A)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal A	69,28	B (67,10)	67,32	Setda	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).			Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
	5.3 Meningkatnya penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.			45%	44,25%	45,86%	Setda	
	5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lem	95.7	Persentase perangkat daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal kategori 'B'	64,4	B (64,78)	82,14	Setda	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).			baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
			16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.							
			16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lem baga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif,			16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur,							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.			jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.								
	6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).		16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	30		30%	26%	28%	Sekretariat Dprd	
	6.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan	35	Persentase keterwakilan perempuan sebagai	30%	38,71%	38,71%	Bkpsdm	



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).			sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
			16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, disabilitas dan kelompok masyarakat.							
	6.3 Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019 (2015: 66,87).		16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	60,19	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,93%		74,08%	Kesbangpol	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4 Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,30).		16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	73,7	Nilai Aspek Kebebasan	NA	NA	NA	Kesbangpol	
	6.5 Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019 (2015: 70,63).		16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	97,95	Nilai Aspek Kesetaraan	75,18%		78,16%	Kesbangpol	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.			16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Jumlah pemilik akta lahir 0-5 thn	NA	97,56%	97,00%	Disdukcapil	
	7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98		96,80%	98,25%	98,00%	Disudkcapil	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.			16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.							
	8.1 Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan		16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.			Asasi Manusia (HAM).							
	8.2 Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat- nya indikator kewajiban mengumum- kan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.		16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.							
			16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.							
	8.3 Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.		16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.							
			16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ajudikasi non litigasi.							
	8.4 Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.		16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.			100,00%	2,5	2,4	Diskominfo	
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional,			16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen							



SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.				yang sejalan dengan Paris Principles.							
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.			16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							
			16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							
Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		Meningkatnya rasio pendapatan negara menjadi 11,4 -12,0 persen PDB (Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal/KEM-PPKF 2023). Tahun dasar 2020: 10,68% PDB (Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Audited).	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0.85	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1,41%	46,11%	2,02%	Bkd	
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.78	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1,18%	1,66%	1,69%	Bkd	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.78						
		Mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah dengan perkiraan rasio utang sebesar 42,80-43,59% PDB (Sumber data: Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal/ KEM-PPKF 2022).	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.							
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan			17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pembangunan (Official Development Assistance -ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/ GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.			kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.								

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.		Mendorong inovasi pendanaan pembangunan dengan mengembangkan berbagai pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.							
			17.3.2	Volume pengiriman uang/ remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.							
			17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.			17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.							
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.			17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				kurang berkembang.							
17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular.		17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular							
			17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.							
	2.2 Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota yang menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2019 (2015: 82% kabupaten/kota).		17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di:- Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%).- Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).		17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan.						Diskominfo	
	2.4 Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi.		17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband						Diskominfo	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Perdesaan menjangkau 52% populasi.										
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.			17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara- negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasika n dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.							
17.8 Mengoperasionalisasika n secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan			17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.			NA	NA	NA	Diskominfo	

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
	3.1 Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.		17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.			30,00%	92,09	92,09	Diskominfo	
	17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan		17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.				Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.							
			17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.							
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade	4.1 Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).		17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.											
	5.1 Menurunnya rata-rata tarif terbobot di negara Free Trade Agreement (FTA) mitra (6 negara) menjadi 6,78 pada tahun 2019 (2015: 9,05).		17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).							
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.			17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1 Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%).		17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas							
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta			17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
berkontribusi pada kemudahan akses pasar.											
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	7.1 Tersedianya dashboard makroekonomi.		17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.							
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.			17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.							
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan			17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				penyedia kerjasama pembangunan.							
dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.											
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan	8.1 Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah- masalah global yang mengancam umat manusia.	Meningkatnya jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FIA) / Comprehensivve Economic Partnership Agreement (GEPA) yang disepakati menjadi 40 perjanjian secara kumulatif. Tahun dasar 2020: 23 perjanjian secara kumulatif (Sumber data:	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.		Kementerian Perdagangan).									
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.			17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).							
	9.1 Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Mendorong peran serta investasi Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun dasar 2020: Rp59,597 T (6 proyek) (Sumber data: Public-Private Partnership/PPP Book)	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.2 Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.		17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).							
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi,		Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.			fundamental dari Statistik Resmi.								
			17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.							
			17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).							
			17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.							
			17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.							
			17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16 Tahun 1997 tentang Statistik.							
	10.1 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.		17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.							
			17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).							
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang	11.1 Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang profesional, integritas, dan amanah 2019.		17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
		Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas (Sumber data: RPJMN 2020-2024).	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lem baga.							
			17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/ atau pranata komputer.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.							
	11.2 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan statistik.		17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pencatatan kematian.							
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) di 20 provinsi (Sumber data: Kementerian Dalam Negeri).	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.							
			17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)							
			17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.							

SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL PERPRES 59/2017	SASARAN NASIONAL PERPRES 111/2022	INDIKATOR METADATA 1		TARGET RAD-SDGs 2023	INDIKATOR PROXY	TARGET RPJMD 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERANGKAT DAERAH	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).							
			17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.							

Berdasarkan data capaian TPB diatas, ringkasan pencapaian TPB di Kota Depok tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102 Rekapitulasi Pencapaian TPB/SDG's Kota Depok terhadap Target RAD Tahun 2023

Tujuan	Jumlah Indikator	Status Realisasi Indikator			
		Tercapai	Akan Tercapai/ Membaik	Perlu Perhatian Khusus	Data Tidak Tersedia
1. Tanpa Kemiskinan	19	9	4	3	3
2. Tanpa Kelaparan	7	4	0	0	3
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	23	9	2	6	6
4. Pendidikan Berkualitas	11	5	2	4	0
5. Kesenjangan Gender	13	8	1	1	3
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	15	7	1	5	2
7. Energi Bersih & Terjangkau					
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	15	4	1	2	8
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	3	1	0	0	2
10. Berkurangnya Kesenjangan	4	2	0	1	1
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	7	1	4	1	1
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	4	1	0	2	1
13. Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	0	0
14. Ekosistem Lautan					
15. Ekosistem Daratan	3	1	0	0	2
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	14	10	3	0	1
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4	3	0	0	1
Jumlah Total	143	66	18	25	34
Persentase		48,18%	13,14%	18,25%	24,82%

Sumber : Data Monev TPB Tahun 2023, Bappeda, diolah

Status pencapaian TPB pada tahun 2023 yang terdiri dari 144 indikator, sebagai berikut :

- 1) Mencapai target: 66 indikator (48,18%) dari jumlah total 143 indikator;
- 2) Akan tercapai/membaik dari capaian tahun sebelumnya: 18 indikator (13,14%) dari jumlah total 143 indikator;
- 3) Perlu perhatian khusus (tidak tercapai/menurun dari capaian tahun sebelumnya): 25 indikator

(18,25%) dari jumlah total 143 indikator;

- 4) Data capaian tidak tersedia: 34 indikator (24,82%) dari jumlah total 143 indikator.

Secara umum kendala pencapaian :

- 1) Kesulitan perolehan data capaian dari Perangkat Daerah penanggung jawab;
- 2) Perbedaan rumus hitung antara indikator sesuai Metadata SDG's dengan rumus hitung capaian kinerja pada Permendagri 86 tahun 2017;
- 3) RAD TPB belum menjadi produk hukum tersendiri (perwal), RAD TPB yang sudah disusun merupakan bagian dari RAD TPB Prov. Jawa Barat;
- 4) Belum terbangunnya sistem kelembagaan untuk pelaksanaan rencana aksi daerah TPB/SDGs mulai dari organisasinya, standar operating procedure termasuk menentukan mekanisme pembiayaannya dimana untuk menyukseskan agenda TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran negara/daerah tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya baik swasta (filantropi) maupun organisasi non-pemerintah dan Masyarakat.

2.2.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian integral dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terencana. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, implementasi SPM harus melalui empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan untuk memenuhi standar pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan, serta pelaksanaan layanan tersebut secara konkret. Keempat tahapan ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi dasar integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD. Lebih dari itu, komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan SPM akan dinilai oleh pemerintah pusat, baik dari aspek integrasi dalam dokumen perencanaan maupun dari kepatuhan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan secara triwulanan. Oleh karena itu, pelaksanaan SPM menjadi elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat.

2.2.7.1 Sektor Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan pada Triwulan I Tahun 2025 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.103 Capaian Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Layanan	SPM Pendidikan								% Capaian
		Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Realisasi	(%)	Indikator	Target	Realisasi (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	37.100 siswa	38.480 siswa	100	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari : 1 . Angka partisipasi sekolah 2. Angka partisipasi Murni 3 Peningkatan proporsi jumlah	72.65 73.90 59	71,02 71,66 70,23	99.46%	99,68%

No	Jenis Layanan	SPM Pendidikan								% Capaian
		Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Realisasi	(%)	Indikator	Target	Realisasi (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	271.500 siswa	295.011 siswa	100	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari :			99.58%	
						*SD				
						1 . Angka partisipasi sekolah	98.7	99.68		
						2 . Kemampuan literasi	81	68.37		
						3 . Kemampuan numerasi	60	56.84		
						4. Indeks iklim keamanan	74.31	74.9		
						5. Indeks iklim kebhinekaan	70.34	72.53		
						6. Indeks iklim inklusivitas	56.96			
						*SMP				
						1 . Angka partisipasi sekolah	98,32	97.56		
						2 . Kemampuan literasi	81	90.09		
						3 . Kemampuan numerasi	54.38	68.03		

SPM Pendidikan										% Capaian
No	Jenis Layanan	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Realisasi	(%)	Indikator	Target	Realisasi (%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Indeks iklim keamanan	72	72.68		
						5. Indeks iklim kebhinekaan	64.43	71.43		
						6. Indeks iklim inklusi	56.06	60.5		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan tau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13.200 siswa	19.684 siswa	100	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari : 1 . Angka partisipasi sekolah (7-18 Tahun) kesetaraan	20	32.2		100%
INDEKS PENCAPAIAN SPM KOTA DEPOK BIDANG PENDIDIKAN										99,68%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok, 2025

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Bidang Pendidikan sampai Triwulan I tahun 2025 sebesar 99,68%.

Permasalahan

Kendala yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah terjadinya perubahan pada sistem e-SPM tanpa sosialisasi terlebih dahulu, termasuk pada tahapan pengumpulan data sampai dengan tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pendataan tidak maksimal karena kesulitan mendapatkan data Madrasah.

2) Perhitungan Kebutuhan

Perubahan kebijakan berubah pula penghitungan kebutuhan.

3) Perencanaan dan penganggaran

Perubahan kebijakan berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran, walaupun bisa dilakukan perubahan tergantung urgensi dan kebutuhannya.

4) Pelaksanaan

- Perubahan kebijakan berdampak pada pelaksanaan penerapana SPM karena membutuhkan anggaran;
- Terbitnya kebijakan baru, sosialisasinya kurang, penerapannya dadakan membingungkan operator di kabupaten/kota;
- Ada beberapa Indikator kinerja e-SPM belum sesuai dengan indikator di raport pendidikan;

Waktu mengisi laporan di aplikasi e-SPM, tidak bersamaan dengan terbitnya raport pendidikan

2.2.7.2 Sektor Kesehatan

Capaian penerapan SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104 Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan Triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.233	5.241	16,26	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	25.786	2.353	9,13	21,03
						Tablet Tambah Darah	5.801.940	943.380	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	32.233	5.241	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	32.233	5.241	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	32.233	5.241	16,26	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.835	786	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Hepatitis B	32.233	5.241	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Sifilis	32.233	5.241	16,26	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: HIV	32.233	5.241	16,26	
						Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	32.233	5.241	16,26	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	32.233	5.241	16,26	
						Media KIE	32.233	5.241	16,26	
						Gel USG	2.149	349	16,24	
						Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan: Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan: Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	110	110	100,00	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester	32.233	5.241	16,26	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kedua, Dua kali pada trimester ketiga)				
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.233	5.239	16,25	Formulir Partograf	32.233	5.239	16,25	23,34
						Kartu ibu (rekam medis)	32.233	5.239	16,25	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	32.233	5.239	16,25	
						Media KIE	32.233	5.239	16,25	
						Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	110	110	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.801	5.111	16,59	Vaksin Hepatitis BO	30.801	5.111	16,59	24,93
						Vitamin K1 Injeksi	30.801	5.111	16,59	
						Salep/Tetes Mata Antibiotik	30.801	5.111	16,59	
						Formulir Bayi Baru Lahir	30.801	5.111	16,59	
						Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	92.403	15.333	16,59	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	30.801	5.111	16,59	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	30.801	5.111	16,59	
						Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	110	110	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	38	38	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Kader Kesehatan	13.201	13.201	100,00	
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	164.151	2.383	1,45	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	164.151	2.383	1,45	9,82
						Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	164.151	2.383	1,45	
						Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	164.151	2.383	1,45	
						Vitamin A Biru	7.917	115	1,45	
						Vitamin A Merah	85.908	1.246	1,45	
						Vaksin imunisasi dasar: BCG	30.801	4.247	13,79	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	33.108	3.505	10,59	
						Vaksin imunisasi dasar: IPV	33.108	3.434	10,37	
						Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	33.108	3.876	11,71	
						Vaksin imunisasi dasar: Campak- Rubela	33.108	7.137	21,56	
						Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	32.647	5.307	16,26	
						Vaksin imunisasi lanjutan : Campak- Rubella	32.647	5.320	16,30	
						Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	164.151	2.383	1,45	
						Peralatan Anafilaktik	38	38	100,00	
						Formula terapi gizi buruk	38	38	100,00	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	13.201	13.201	100,00	
						Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	3.473	3.473	100,00	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	290.671	72.668	25,00	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	289.117	72.449	25,06	23,93
						Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	1.554	219	14,09	
						Kuesioner Skrining Kesehatan	290.671	72.668	25,00	
						Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	289.117	72.449	25,06	
						Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	1.554	219	14,09	
						Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	3.531.684	883.981	25,03	
						Alat Pemeriksaan Hb	263	263	100,00	
						Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	14.989	3.757	25,07	
						Media promosi kesehatan	924	924	100,00	
						Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi	102.148	662	0,65	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR	
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Anak Sekolah (BIAS)					
						Tenaga kesehatan	212	212			
						: Dokter/Dokter gigi			100,00		
						Tenaga kesehatan	242	242			
						: Bidan			100,00		
						Tenaga kesehatan	213	213			
						: Perawat			100,00		
						Tenaga kesehatan	50	50			
						: Tenaga Gizi			100,00		
						Tenaga kesehatan	110	110			
						: Tenaga Kefarmasian			100,00		
						Tenaga Kesehatan	131	131	100,00		
						: Tenaga Kesehatan Masyarakat					
						Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor	13.201	13.201			
									100,00		
						Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	924	924	100,00		
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan	573.791	84.205	14,68	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	190	190	100,00		27,07
						Alat : Tensimeter	114	114	100,00		
						Alat : Glukometer	114	114	100,00		

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pelayanan kesehatan sesuai standar				Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	114	114	100,00	
						Alat: Alat Pemeriksa Hb	114	114	100,00	
						Reagen pemeriksaan Hb	114	114	100,00	
						Kit Ophthalmologi Komunitas	114	114	100,00	
						Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	114	114	100,00	
						Alat Pelayanan KB	114	114	100,00	
						Alat : Tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol	573.791	84.205	14,68	
						Alat : KIT IVA Tes	286.998	5.685	1,98	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	573.791	84.205	14,68	
						Vaksin Tetanus Difteri (td)	22.772	2.353	10,33	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	131	131	100,00	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	38	38	100,00	
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	191.368	47.128	24,63	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	1.001	1.001	100,00	36,22
						Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	152	152	100,00	
						Alat pemeriksaan kolesterol	152	152	00,00	
						Bahan medis Habis	191.368	47.128	24,63	
						Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol				
						Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari- hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	191.368	47.128	24,63	
						Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	191.368	47.128	24,63	
						Media KIE	38	38	100,00	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100,00	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	131	131	100,00	
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	13.201	13.201	100,00	
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	146.191	28.827	19,72	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	146.191	28.827	19,72	31,76
						Obat Hipertensi	146.191	28.827	19,72	
						Tensimeter	114	114	100,00	
						Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	146.191	28.827	19,72	
						Media promosi kesehatan	38	38	100,00	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan	38	38	100,00	
						: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku				
						Tenaga kesehatan	110	110	100,00	
						: Tenaga Kefarmasian				
						Tenaga kesehatan	131	131		
						: Tenaga Kesehatan Masyarakat			100,00	
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.933	7.116	16,20	Obat Diabetes Melitus	43.933	7.116	16,20	28,77
						Fotometer atau Glukometer	76	76	100,00	
						Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	43.933	7.116	16,20	
						Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	43.933	7.116	16,20	
						Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	114	114	00,00	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	110	110	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	131	131	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00	
						Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	76	76	100,00	
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.088	385	18,44	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	38	38	100,00	31,13
						Penyediaan Psikofarmaka	5	5	100,00	
						Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.088	385	18,44	
						Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.088	385	18,44	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	76	76	100,00	
						Tenaga kesehatan : Dokter	212	212	100	
						Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	38	38	100	
						Tenaga professional lainnya	2	2	100	
						Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	66	66	100	
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.868	5.596	17,56	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	38	38	100	27,45
						Reagen Zn TB	31.868	5.596	17,56	
						Masker bedah dan masker N95	31.868	5.596	17,56	
						Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	63.736	11.192	17,56	
						Catridge tes cepat molekuler	22.266	3.910	17,56	
						Formulir pencatatan dan pelaporan	31.868	5.596	17,56	

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	PENCAPAIAN
										PER INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100,00	
						Tuberkulin	3.186	559	17,54	
						Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	110	110	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	131	131	100,00	
						Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	76	76	100,00	
						Tenaga kesehatan : Radiografer	10	10	100,00	
						Kader Kesehatan	38	38	100,00	
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan	38.063	11.151	29,30	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) Tes cepat HIV (RDT) pertama Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang	38	38	100,00	40,61

NO	JENIS LAYANAN SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR				INDEKS PENCAPAIAN PER INDIKATOR
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pelayanan kesehatan sesuai standar				sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
						Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	38	38	100,00	
						Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	212	212	100,00	
						Tenaga kesehatan : Perawat	213	213	100,00	
						Tenaga kesehatan : Bidan	242	242	100,00	
						Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	76	76	100,00	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	131	131	100,00	
						Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	38	38	100,00	

IP SPM BIDANG KESEHATAN TW I TAHUN 2025

27,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok, 2025

Permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kota Depok antara lain:

1) Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan sudah ditunjang dengan form penghitungan dari Kementerian Kesehatan yaitu Sistem Informasi Costing Bidang Kesehatan (SISCOBIKES). Siscobikes merupakan sebuah tools untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM Bidang Kesehatan.

2) Perencanaan dan Penganggaran

Dukungan anggaran baik dari APBD maupun DAK sudah cukup diberikan oleh pemerintah. Namun, anggaran DAK belum bisa dilaksanakan pada triwulan I yang mempengaruhi realisasi anggaran pendukung SPM Kesehatan sehingga capaian layanan SPM Kesehatan pada triwulan I tahun 2025 belum optimal.

3) Pelaksanaan

Permasalahan

Anggaran yang bersumber dari dana DAK belum dapat dilaksanakan pada triwulan I karena masuk dalam pergeseran anggaran.

Solusi

- a) Memaksimalkan penggunaan anggaran dari sumber APBD dan lainnya serta berkolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan dan implementasi SPM Bidang Kesehatan
- a) Memaksimalkan kegiatan pada triwulan berikutnya

2.2.7.3 Sektor Pekerjaan Umum

Capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105 Capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			9,01%	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)	0,35%	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	8276	12	8264	12,00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	0,12%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8276	12	8264	0,14%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	0,23%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					1,16%	
	JARINGAN PERPIPAAN					0,10%	
	Kuantitas SPAM						
	1 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	2024	2	2022	0,10%	
	Kualitas SPAM						

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	2024	2	2022	0,10%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					2,22%	
	Kuantitas SPAM						
	1 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	45	1	44	2,22%	
	Kualitas SPAM						
	2 . Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	45	1	44	2,22%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					17,67%	
			Target 100% (SPM)	Target (Harus Dilayani)	Capaian (Terlayani)		
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI	Orang	22796	4632	18164		

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	(REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	16,23%	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22796	4632	18164	20,23%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%	1,41%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					7,07%	
	KUANTITAS SPALD					1,65%	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	1 . a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	787	13	774	1,65%	
	KUALITAS SPALD					12,48%	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)						
	1 . a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana	Rumah Tangga			0.0000	0.00 %	TUTUP MUTU INI

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota						
	2 . b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	4912	1145	2331	23,31%	TUTUP MUTU INI
	3 . c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	787	13	774	1,65%	TUTUP MUTU INI

Sumber : DPUPR Kota Depok, 2025

Permasalahan

- Laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada tersedianya layanan akses air minum yang aman dan sistem pengelolaan air limbah yang tersedia.
- Kurangnya database penduduk rawan air minum.
- Belum adanya kelengkapan data potensi mata air di Kota Depok.
- Dalam pelaksanaan kegiatan masih beberapa kali terjadi overlap dengan kegiatan PDAM.
- Keterbatasan anggaran kegiatan serta wewenang dalam intervensi kegiatan.
- Keterbatasan lahan di permukiman rawan sanitasi karena untuk kegiatan ini diperlukan lahan minimal 30 m².

Solusi

- Perlu dilakukan updating data secara berkala mengenai data penduduk rawan air minum.
- Perlu dilakukan pendataan secara rinci mengenai data potensi sumber mata air di Kota Depok.
- Perlu dilakukan pemetaan kegiatan antara PDAM dengan Dinas PUPR.
- Perlunya rasionalisasi anggaran yang disesuaikan target output maupun outcome yang akan dicapai juga kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan dana bantuan seperti DAK atau lainnya..
- Pemerintah menyiapkan lahan khusus untuk IPAL Komunal dan SPAM di lokasi permukiman padat penduduk.
- Perlu disediakan anggaran lebih guna merubah sistem pengolahan IPAL dari anaerob menjadi aerob sehingga penerima manfaat lebih banyak.

2.2.7.4 Sektor Perumahan Rakyat

Capaian penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106 Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Triwulan I Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang	Jumlah warga negara	0 (Tidak ada bencana yang	0 (Tidak ada bencana yang	0% (Tidak ada bencana yang	Jumlah barang dan/jasa, terdiri dari :			

SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT									
NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
	Layak Huni	korban	ditetapkan	ditetapkan	ditetap kan	1. Rehabilitasi	0 (Tidak ada	0 (Tidak ada	0 % (Tidak ada
	Bagi	bencana	melalui SK	melalui SK	mela lui	rumah bagi	bencana yang	bencana yang	bencana yang
	Korban	yang	Kepala	Kepala	SK Kepala	korban	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan
	Bencana	memperoleh	Daerah)	Daerah)	Dae rah)	bencana	melalui SK	melalui SK	melalui SK
	Kabupaten/	rumah					Kepala	Kepala	Kepala Daerah)
	Kota	layak huni					Daerah)	Daerah)	
						2. Pembangun	0 (Tidak ada	0 (Tidak ada	0 % (Tidak ada
						an kembali	bencana yang	bencana yang	bencana yang
						rumah bagi	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan
						korban	melalui SK	melalui SK	melalui SK
						bencana	Kepala	Kepala	Kepala Daerah)
							Daerah)	Daerah)	
						3. Permukiman	0 (Tidak ada	0 (Tidak ada	0 % (Tidak ada
						kembali bagi	bencana yang	bencana yang	bencana yang
						korban	ditetapkan	ditetapkan	ditetap kan
						bencana	melalui SK	melalui SK	melalui SK
							Kepala	Kepala	Kepala Daerah)
							Daerah)	Daerah)	
						4. Bantuan	0 (Tidak ada	0 (Tidak ada	0 % (Tidak ada
						akses rumah	bencana yang	bencana yang	bencana yang
						sewa layak	ditetapkan	ditetapkan	ditetap kan
						huni bagi	melalui SK	melalui SK	melalui SK
						korban	Kepala	Kepala	Kepala Daerah)
						bencana	Daerah)	Daerah)	
2	Fasilitasi	Jumlah	NA (Tidak	NA (Tidak	NA (Tidak	Jumlah barang			
	Penyediaan	warga negara	ada	ada Program	ada	dan/jasa, terdiri			
	Rumah	yang terkena	Program	Relokasi	Program	dari :			
	yang Layak	relokasi	Relokasi	yang	Relokasi				
	Huni	akibat	yang	ditetapkan	yang	1. Fasilitasi	NA (Tidak	NA (Tidak ada	NA (Tidak ada
	Bagi	program	ditetapkan	melalui SK	ditetapkan	penggantian	ada Program	Program	Program
	Masyarakat	pemerintah	melalui SK	Kepala	melalui SK	hak atas	Relokasi yang	Relokasi yang	Relokasi yang
	yang terkena	daerah	Kepala	Daerah)	Kepala	penguasaan	ditetapkan	ditetapkan	ditetap kan
	Relokasi	kab/kota	Daerah)		Daerah)	tanah	melalui SK	melalui SK	melalui SK
	Program	yang				dan/atau	Kepala	Kepala	Kepala Daerah)
						bangunan	Daerah)	Daerah)	

SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT									
NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
Pemerintah Daerah	memperoleh rumah layak huni					a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)
						b. Proses sosialisasi kepada masyarakat dan	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)
						c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)
						2. Bantuan akses rumah Sewa Layak Huni	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)	NA (Tidak ada Program Relokasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah)

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, 2025

Berdasarkan tabel capaian di atas, penerapan 2 (dua) jenis layanan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2025 masih difokuskan pada pendataan.

Untuk SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, pendataan masih dilakukan pada lokasi yang terkena bencana. Pada periode Triwulan I 2025 belum ada rehabilitasi rumah korban bencana untuk pemenuhan SPM ini karena belum ada SK Penetapan Status Bencana Daerah dari Wali Kota Depok sebagai dasar pemberian bantuan.

Adapun untuk SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah di lokasi rawan bahaya yaitu :

1. Pendataan rumah di Sempadan kali di 4 lokasi :

- a. Sempadan Kali ciliwung;
- b. Sempadan Kali Pesangrahan;
- c. Sempadan Kali Cab. Timur;
- d. Sempadan Kali Krukut;

2. Pendataan rumah di Sejajar rel;

3. Pendataan rumah di bawah SUTET.

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Triwulan I Tahun 2025 di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Prosedur Penyusunan SK Penetapan Status Bencana sebagai dasar penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota masih memerlukan waktu yang panjang ;
- b. Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- c. Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Fasilitas Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kurangnya pemahaman dari pelaksana dalam penerapan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kondisi kota Depok;
- e. Kota Depok belum memiliki Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Triwulan I Tahun 2025 di Kota Depok, yaitu:

- a. Melakukan penyelarasan tata naskah SK Penetapan Status Bencana dengan kondisi bencana yang terjadi di Kota Depok ;
- b. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;

- c. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Fasilitas Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan koordinasi ke Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kemen PUPR tentang tata cara merelokasi ke Rusunawa milik Pemerintah Kota Depok.

2.2.7.5 Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Triwulan I Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.107 Capaian Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100.00 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	161	161	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	147	147	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	dokumen	33	33	0	100.00 %

3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	183	183	0	100.00 %
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	0	100.00 %

Sumber : Satpol PP Kota Depok, 2025

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2025 sebesar 100%.

- Permasalahan :

Indikator SPM Trantibum : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kab/Kota tidak dilakukan penyerapan anggaran karena tidak adanya Masyarakat yang terdampak.

- Solusi :

Perlunya mekanisme khusus pelaksanaan indikator SPM Trantibum terkait pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran.

• Sub Bidang Kebencanaan

Capaian pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108 Capaian Pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						14.90 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					15.18 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	8.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	500	50	450	10.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	7.18 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					35.88 %
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	36.36 %
	a. Tersedianya Dokumen legalitas penetapan KRB (perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan (lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	d. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	3	0	3	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	38.54 %
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					51.25 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	20	15	5	75.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	5	1	4	20.00 %

	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	1	9	10.00 %
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					40.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					24.00 %
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	50	10	40	20.00 %
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					13.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	8.00 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	500	50	450	10.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	5.58 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					27.92 %
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	27.27 %
	a. Tersedianya Dokumen legalitas RPB (perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB (lampiran perkada)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	d. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	e. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	12.50 %
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	0	3	0.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	16.67 %
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					33.33 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	0	2	0.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	0	5	0.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	0	2	0.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	20	0	20	0.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	0	2	0.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	0.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	c. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	2	0	2	0.00 %
	e. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	0	1	0.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top	orang	1	0	1	0.00 %

	exercise (sesuai dengan kebutuhan)					
	g. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	57.69 %
	1) . Koordinasi Teknis Pemanthapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					36.67 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	12	4	8	33.33 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemanthapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	2	1	1	50.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	0	1	0.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	0	1	0.00 %
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %

	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					15.93 %
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	4.32 %
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	500	27	473	5.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	11.61 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					58.06 %
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00 %

	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0	0	0.00 %
	2 . Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		0	0	0	33.33 %
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00 %
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	0	1	0.00 %
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00 %
	3 . Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %

	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100.00 %

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaan dan Penyelamatan Kota Depok, 2025

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Sub Bidang Kebencanaan tahun 2024 sebesar 14,90%.

- Sub Bidang Kebakaran

Capaian pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Bidang Kebakaran Tahun 2025 dapat terlihat sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.109 Capaian Pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebakaran Triwulan I Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						19.83 %	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					19.83 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	15.06 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	680	128	552	18.82 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	4.77 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

			Dilayani / Dipenuhi				
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					23.84 %	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	203	32	171	15.76 %	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	16	16	0	100.00 %	
	Data Dukung : 3276-20250417034634SOP DAMKAR (2).pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	139	32	107	23.02 %	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	1	0	1	0.00 %	
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	1409	32	1377	2.27 %	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	4824	96	4728	1.99 %	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Sub Bidang Kebakaran tahun 2025 sebesar 19,83%.

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran Triwulan I tahun 2025 di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- Masih belum efektifnya kinerja Relawan Bencana di lapangan;
- Masih kurangnya SDM baik PNS maupun Non PNS yang memiliki kompetensi Ilmu kebencanaan;
- Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana;
- Masih kurangnya SDM baik PNS maupun Non PNS yang tersertifikasi;
- Keterbatasan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi titik lokasi padat penduduk;
- Sumber Air (Hydrant) yang masih minim.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran Triwulan I Tahun 2025 di Kota Depok, yaitu:

- Membuat pertemuan relawan pada forum pengurangan risiko bencana;
- Mengajukan SDM yang memiliki kompetensi kebencanaan;
- Mengajukan anggaran pendukung SPM sub urusan kebencanaan.
- Membuat pos relawan;
- Mengusulkan untuk sertifikasi kompetensi teknis kebakaran untuk PNS dan Non PNS ke BKPSDM;
- Mengidentifikasi titik potensi penempatan Hydran pada kawasan rawan bencana kebakaran yang berada di akses yang sulit terjangkau.
- Melakukan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang dapat mengakses di lokasi sempit dan padat penduduk;

Membuat kajian rawan bencana kebakaran yang terupdate dan memetakan titik lokasi Hydrant dan pembangunan jaringan pipa hydrant.

2.2.7.6 Sektor Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	102	7	6.86%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	102	7	6.86%
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	50	2	4.00%
						Penyediaan permakanaan	58	5	8.62%
						Penyediaan sandang	58	1	1.72%
						Penyediaan alat bantu	10	1	10.00%
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	25	2	8.00%
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	4	40.00%
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	35	5	14.29%
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	1	1	100.00%
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	50	1	2.00%
						Pemberian pelayanan	40	6	15.00%

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
						penelusuran keluarga			
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35	4	11.43%
						Layanan rujukan	60	4	6.67%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	64	3	4.69%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	64	3	4.69%
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	15	3	20.00%
						Penyediaan permakanaan	27	2	7.41%
						Penyediaan sandang	27	2	7.41%
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	5	2	40.00%
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	12	1	8.33%
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	40	1	2.50%
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	1	33.33%
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi	2	1	50.00%

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
						layanan pendidikan dan kesehatan			
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	45	1	2.22%
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40	1	2.50%
						Layanan rujukan	25	2	8.00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	131	40	30.53%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	131	40	30.53%
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	45	23	51.11%
						Penyediaan permakanan	61	29	47.54%
						Penyediaan sandang	61	20	32.79%
						Penyediaan alat bantu	10	1	10.00%
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	15	7	46.67%
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	100%
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyangga disabilitas lanjut usia terlantar	60	24	40.00%
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti	2	1	50.00%

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
						dokumen kependudukan			
						Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitas layanan kesehatan	25	1	4.00%
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	75	36	48.00%
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	60	21	35.00%
						Layanan rujukan	40	18	45.00%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	284	50	17.61%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	284	50	17.61%
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	40	30	75.00%
						Penyediaan permakanan	54	37	68.52%
						Penyediaan sandang	54	16	29.63%
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	10	1	10.00%
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80	50	62.50%
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyangga disabilitas gelandangan dan pengemis terlanjar	50	22	44.00%
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,	2	2	100.00%

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
						Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	2	1	50.00%
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	149	49	32.89%
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	149	38	25.50%
						Layanan rujukan	80	14	17.50%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	3000	673	22.43%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Penyediaan permakanan	3000	673	22.43%
						Penyediaan sandang	1000	465	46.50%
						Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100.00%
						Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	50	25.00%
						Pelayanan dukungan psikososial	1	1	100.00%

Sumber : Dinas Sosial Kota Depok, 2025

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Bidang Sosial tahun 2025 triwulan I sebesar 20,25%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2025 di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baru dilakukan di akhir tahun 2023 sehingga data yang dihasilkan belum komprehensif/menyeluruh, sehingga pendataan yang ada masih sedikit. Hal ini membuat kesulitan dalam penentuan target, sehingga target disusun berdasarkan jumlah pelayanan tahun lalu;
- b) Pemahaman terhadap kebijakan terkait SPM bidang sosial masih kurang dikarenakan kebijakan terkait (khususnya kebijakan dari Kementerian Sosial) masih kurang dalam menjelaskan dalam pelaksanaan SPM urusan sosial – perbedaan terhadap kegiatan yang ada di Kementerian Dalam Negeri;
- c) Keterbatasan dalam sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemenuhan SPM bidang sosial;
- d) Pelaksanaan SPM butuh dukungan aktif dari perangkat daerah lain;
- e) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pelayanan.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025 di Kota Depok, yaitu:

- a) Berdiskusi dengan Dinas Sosial wilayah lain dalam meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial;
- b) Hasil diskusi terkait dengan pendataan menggunakan data dasar tahun lalu (berdasarkan masukan dari Kementerian Sosial);
- c) Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait lainnya dan lembaga non-pemerintah (seperti LSM dan komunitas) untuk penanganan PPKS;
- d) Meningkatkan kualitas sarana Rumah Perlindungan Sosial (RPS) dengan melakukan pembangunan kembali RPS sehingga lebih dapat memenuhi kebutuhan;
- e) Melakukan pengadaan berupa sarana kendaraan motor untuk penanganan korban bencana pada tahun 2025.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan Kota Depok, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai permasalahan pembangunan yang ada. Permasalahan ini merupakan

kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan. Identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Depok meliputi berbagai aspek seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Analisis isu strategis merupakan langkah penting dalam memahami konteks yang lebih luas dari permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi arah pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengidentifikasi isu strategis yang relevan akan membantu dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kota Depok akan lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Metodologi yang digunakan dalam penentuan permasalahan dan isu strategis ini, adalah dengan melalui diskusi terpumpun yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok. Diskusi menghasilkan beberapa permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan.

2.3.2. Permasalahan

Dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan Kota Depok, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai permasalahan pembangunan yang ada. Permasalahan ini merupakan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal yang diharapkan. Identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Depok meliputi berbagai aspek seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Proses ini berguna untuk mengenali, mendalami dan sekaligus merumuskan permasalahan perkotaan secara mendasar dan permasalahan yang terjadi di masyarakat masyarakat. Dengan merumuskan permasalahan, sumber daya kota dapat dialokasikan secara efektif dan solutif dalam menjawab akar masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu identifikasi permasalahan juga berguna untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara fokus dan tepat sasaran. Dalam dokumen ini, identifikasi permasalahan pembangunan Kota Depok akan

diuraikan dalam beberapa aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum.

2.3.2.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Permasalahan pada aspek geografi meliputi tingkat kerawanan bencana, kualitas lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah integrasi tata ruang dan pembangunan kawasan Jabodetabekjur.

Masih tingginya tingkat kerawanan banjir dan bencana alam lainnya. Wilayah Kota Depok memiliki potensi rawan terhadap beberapa jenis bencana, seperti banjir dan longsor. Daerah yang rentan terhadap banjir mencakup pemukiman di dataran rendah yang tersebar diseluruh wilayah Kota Depok. Faktor penyebab banjir meliputi tingginya durasi dan intensitas curah hujan yang juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, meluapnya sungai karena saluran kecil dan kapasitas aliran yang tidak memadai, serta sistem drainase yang kurang optimal. Sementara daerah rawan longsor terletak di sepanjang Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Situ Pedongkelan.

Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kota Depok mengalami 56 kejadian bencana alam dengan Jumlah Korban Terdampak Mencapai 2.550 Jiwa. Kota Depok, dengan skor Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 79,80 menurut BNPB (2024), termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat risiko bencana sedang. Hal ini menunjukkan potensi bencana yang cukup tinggi sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang lebih baik untuk mengurangi dampak bencana alam terhadap masyarakat dan infrastruktur kota. Bencana alam yang terjadi di Kota Depok tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan materiil, tetapi juga dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif, mitigasi dan memperkuat manajemen disaster untuk mengurangi risiko bencana alam di Kota Depok.

Kualitas lingkungan hidup masih relatif rendah. Meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan di Kota Depok. Pencemaran air terutama disebabkan oleh tingginya volume air limbah yang dibuang ke badan air dari berbagai aktivitas masyarakat dan industri, sehingga menurunkan kualitas air dan mengancam kesehatan masyarakat. Masih rendahnya akses aman sanitasi dan sumber air bersih yang masih mengandalkan air tanah, khususnya pada kawasan pemukiman yang padat, berkontribusi pada bertambahnya luas pemukiman

kumuh. Selain itu, kualitas udara di Kota Depok kadang-kadang memburuk akibat polusi yang berasal dari berbagai sumber, terutama emisi kendaraan bermotor.

Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan lahan, alih fungsi lahan dan urbanisasi serta belum optimalnya keterlibatan sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peran utama dalam memperbaiki kualitas hidup dan menjaga keseimbangan ekologis kota. RTH tidak hanya menjadi tempat untuk rekreasi dan olahraga bagi warga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan, mengurangi polusi udara, memperbaiki kualitas udara, serta mengatur tata air dan mitigasi banjir.

Jika dilihat dari pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Akan tetapi hal ini masih menjadi tantangan di Kota Depok, dimana capaian terhadap target 20% RTH publik belum terpenuhi. Luas RTH di Kota Depok menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun akibat meningkatnya pembangunan kawasan perumahan. Implementasi dalam penyediaan RTH juga seringkali menghadapi kendala terkait pembebasan lahan. Selain itu, terdapat banyak lahan di Kota Depok yang statusnya lahan tidur dengan kepemilikan swasta atau pribadi. Perencanaan dan implementasi tata ruang yang cermat dan ketat sesuai dengan regulasi yang ada, diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, menjaga daya dukung lahan dan memastikan pertumbuhan kota yang terkendali. Selain itu, sektor swasta khususnya sektor perumahan juga perlu didorong untuk berkontribusi dalam pengembangan RTH.

Pengelolaan sampah yang belum optimal Timbulan sampah kota Depok mencapai 1.265,79 ton per hari, dengan 99,72% (1.265,06 ton) telah terkelola dan 0,28% (0,73 ton) belum tertangani. Dari jumlah yang terkelola, pengurangan sampah melalui 423 unit bank sampah (2023) baru mencapai 5,99 ton per hari, sementara Unit Pengolahan Sampah (UPS) sebanyak 28 unit hanya mengolah 41,58 ton per hari. Sebagian besar sampah, yakni 73,08% atau 925 ton per hari, masih langsung diangkut ke TPA Cipayung (RIPS Kota Depok, 2024).

TPA Cipayung yang berkonsep controlled landfill saat ini mengalami kelebihan kapasitas dan cenderung beroperasi sebagai open dumping. Berbagai fasilitas pengolahan seperti instalasi lindi dan gas metana telah tertimbun sampah, memicu pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan konflik sosial di sekitar lokasi. Masalah diperparah dengan terbatasnya infrastruktur, sehingga hanya sekitar 850 ton sampah per hari yang dapat masuk ke TPA, sementara sisanya rawan dibuang sembarangan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah, dengan hanya 36% rumah tangga yang mengolah sampah secara mandiri. Potensi pengolahan sampah organik dan daur ulang belum dimanfaatkan secara maksimal. Saat ini, sistem pengelolaan sampah turut menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 299.602,6 kg CO₂-eq per hari, terutama dari penimbunan dan pembakaran terbuka. Kondisi ini menunjukkan urgensi transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, ramah lingkungan, dan partisipatif dari hulu ke hilir.

Belum terintegrasinya tata ruang dan pembangunan Kawasan Jabodetabekjur Kawasan Jabodetabekjur merupakan kawasan aglomerasi yang saling terhubung secara fungsional dan menjadi satu kesatuan pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global. DKI Jakarta sebagai kota inti memiliki ketergantungan timbal balik dengan wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur. Karena itu, integrasi tata ruang dan pembangunan kawasan menjadi krusial untuk menjamin keselarasan dalam pelayanan dan pembangunan wilayah.

Hingga saat ini, integrasi kebijakan dan implementasi pembangunan antarwilayah di kawasan Jabodetabekjur masih belum optimal. Ketidaksinambungan ini berdampak pada ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Kota-kota penyangga seperti Depok dihadapkan pada persoalan struktural yang serupa banjir, kemacetan, polusi udara, dan manajemen persampahan namun dengan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan infrastruktur yang relatif tertinggal dibandingkan DKI Jakarta.

Ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan kapasitas sistem transportasi di Kota Depok menimbulkan dampak nyata berupa kemacetan yang semakin parah, khususnya di koridor utama seperti Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Sawangan. Volume kendaraan didominasi oleh sepeda motor (54%) dan mobil pribadi (36%), dengan angka ketergantungan terhadap moda pribadi mencapai 87,83% di kalangan komuter. Minimnya pilihan transportasi umum yang terintegrasi dan andal menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini. Selain itu, terbatasnya jalur alternatif dan infrastruktur jalan memperburuk kepadatan lalu lintas di titik-titik simpul seperti Exit Tol Sawangan, Simpang Parung Bingung, dan Simpang Tugu Batu. Praktik parkir liar, terutama di sepanjang Jalan Margonda Raya, turut menghambat kelancaran arus kendaraan. Kondisi ini menegaskan perlunya integrasi lintas sektor antara tata ruang, sistem transportasi, dan infrastruktur jalan dalam skala kawasan agar wilayah Jabodetabekjur dapat berkembang secara seimbang, efisien, dan berkelanjutan.

Penyediaan air bersih pun masih diwarnai dengan “perebutan” hak atas izin pemanfaatan air permukaan lintas provinsi seperti Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Pesanggrahan. Pencegahan dan penanganan banjir yang harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir

tidak dapat dinafikan. Namun peran wilayah hulu dan tengah DAS dalam pencegahan banjir di DKJ belum diimbangi dengan insentif pengendalian ruang dalam konteks kawasan. Untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan di Kawasan diperlukan sinkronisasi dan integrasi mulai tahap perencanaan hingga implementasi yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Rendahnya akses air minum perpipaan, ketersediaan akses air minum yang layak sudah menjadi perhatian nasional dan internasional. Keseriusan pemerintah dalam menyediakan akses air minum perpipaan dituangkan ke dalam INPRES No. 1 Tahun 2024 tentang percepatan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Di samping itu, secara internasional hal ini dituangkan ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Pada Tahun 2023, cakupan akses pelayanan air minum perpipaan hanya menjangkau 21,06% penduduk Kota Depok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi layanan air minum perpipaan masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk memastikan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat Kota Depok.

b. Demografi

Permasalahan aspek demografi mencakup tingginya imigrasi masuk dibandingkan imigrasi keluar dan persebaran penduduk

Tingginya migrasi masuk dibandingkan migrasi keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk diantaranya posisi Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta, sebagai pusat perekonomian Indonesia sehingga mempengaruhi pesatnya pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman. Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Depok ini membawa berbagai implikasi bagi Kota Depok, termasuk meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan juga semakin besar sehingga menuntut upaya perencanaan dan pengelolaan kota yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini tercermin dari variasi distribusi kepadatan penduduk di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Kecamatan Cipayung mencatat kepadatan tertinggi dengan 16.265 orang per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Sawangan dan Bojongsari memiliki kepadatan terendah, yaitu sebesar 7.563 orang per kilometer persegi. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan

kota, termasuk kesenjangan akses terhadap fasilitas umum, perbedaan kualitas hidup antar wilayah, serta potensi masalah sosial dan tekanan lingkungan di wilayah yang lebih padat.

2.3.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Ekonomi. Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi meliputi beberapa isu seperti biaya hidup, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Tingkat Pengangguran yang masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh mismatch antara supply dan demand dalam pasar tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja produktif tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja. Kota Depok telah memasuki masa bonus demografi di mana dependency ratio berada pada level yang rendah. Namun demikian, peningkatan jumlah angkatan kerja belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kualifikasi yang diharapkan oleh dunia usaha atas tenaga kerja belum sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja. Mayoritas pengangguran di Kota Depok tahun 2023 adalah lulusan SMA/SMK, yaitu sebesar 53,49% dari total pengangguran.

Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Meskipun kemajuan ekonomi Kota Depok telah tumbuh pesat sejak Kota Depok menjadi daerah otonom di tahun 1999, namun kesejahteraan masyarakat belum terdistribusikan secara merata. Di satu sisi, terdapat individu-individu terutama kelompok menengah keatas yang terus meningkat, sedangkan di sisi lain banyak diantara warga yang masih dalam kategori miskin. Kesenjangan di antara strata sosial berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2024, Ketimpangan pendapatan yang tinggi yaitu 0,468 mengakibatkan kesenjangan sosial yang signifikan, di mana sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Tingginya pengangguran (6,27% pada 2024) dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Kesejahteraan Sosial Budaya. Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesejahteraan sosial budaya meliputi beberapa isu: akses dan kualitas layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, perlindungan sosial bagi anak dan lansia, pemajuan kebudayaan, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Akses layanan pendidikan berkualitas yang masih belum inklusif. Terbatasnya kapasitas daya tampung sekolah negeri di tingkat SMP, SMA, dan SMK menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kota Depok. Pada tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri (SDN) dan swasta Kota Depok meluluskan

34.000 orang. Namun jumlah ini tidak sebanding dengan daya tampung di SMP negeri yang ada di Kota Depok. Kapasitas sekolah negeri yang tidak memadai terlihat dari jumlahnya yang terbatas dan menyerupai piramida yaitu semakin tinggi jenjang sekolah, semakin sedikit kapasitasnya. Saat ini, di Kota Depok terdapat 214 SD Negeri, 34 SMP Negeri, 15 SMA Negeri, dan hanya 4 SMK Negeri.

Salah satu indikator pendidikan yang penting adalah memastikan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan formal selama 13 tahun (TK, SD, SMP, dan SMA). Akan tetapi, infrastruktur sarana pembelajaran penunjang pendidikan yang berkualitas belum merata pada seluruh sekolah di Kota Depok, seperti perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran lainnya. Beragam permasalahan ini menjadi tantangan yang harus direspon secara terencana, karena saat ini jumlah penduduk usia produktif di Kota Depok yang cukup tinggi belum diimbangi dengan akses dan kualitas pendidikan yang cukup. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur pendidikan, keterbatasan dukungan akademik di luar sekolah, serta belum optimalnya perlindungan bagi anak dari keluarga rentan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pendidikan di berbagai wilayah Kota Depok. Penanganan isu ini memerlukan pendekatan terpadu agar pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing dapat terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur pendidikan, keterbatasan dukungan akademik di luar sekolah, serta belum optimalnya perlindungan bagi anak dari keluarga rentan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pendidikan di berbagai wilayah Kota Depok. Penanganan isu ini memerlukan pendekatan terpadu agar pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing dapat terwujud secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kurangnya fasilitas olahraga untuk masyarakat

Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan kompetitif. Namun, hingga saat ini, Kota Depok masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga, baik untuk kebutuhan pembinaan prestasi maupun untuk kegiatan olahraga masyarakat umum. Di banyak wilayah, fasilitas olahraga publik masih terbatas, tidak merata, atau belum memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi luas, keamanan, maupun kelengkapan sarana penunjangnya.

Ketiadaan atau minimnya pusat pelatihan cabang olahraga yang representatif dan berstandar menyebabkan potensi atlet muda di Kota Depok belum dapat dikembangkan secara optimal. Banyak atlet lokal harus berlatih di luar kota karena keterbatasan sarana di daerah sendiri. Hal ini menghambat proses pembinaan berkelanjutan dan melemahkan sistem pengembangan talenta olahraga yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan generasi muda yang berprestasi.

Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu adalah tantangan yang harus dijawab seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk. Saat ini, pelayanan kesehatan dasar di Kota Depok masih belum merata di seluruh wilayah kelurahan. Jumlah layanan Puskesmas di Depok belum mempertimbangkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang dilayani. Dengan jumlah penduduk sebesar 2,14 juta jiwa, saat ini baru tersedia 38 Puskesmas di seluruh Kota Depok.

Beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam sektor kesehatan di Kota Depok adalah rasio angka kematian ibu yang masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal. Pada tahun 2019, jumlah kematian ibu mencapai 37 kasus, kemudian mengalami penurunan menjadi 26 kasus pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, angka kematian ibu naik tajam menjadi 65 kasus, sebelum akhirnya kembali menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2022. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan ibu di Kota Depok.

Selain itu, tingginya tingkat migrasi di Kota Depok menimbulkan implikasi serius terhadap penyebaran penyakit menular seperti DBD, Diare, ISPA, HIV/AIDS, dan TBC. Peningkatan angka kematian bayi selama periode tahun 2020-2022 juga memerlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan merancang strategi intervensi yang efektif guna mengurangi angka kematian bayi di masa mendatang. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga harus didorong melalui upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dengan permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah kolaboratif dan konkrit untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Upaya pemajuan kebudayaan di Kota Depok belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kawasan cagar budaya yang berpotensi menjadi destinasi wisata namun belum digali secara maksimal. Kota Depok perlu melakukan pendataan ulang terhadap bangunan dan situs bersejarah yang ada untuk memastikan pelestariannya. Banyak cagar budaya yang membutuhkan intervensi nyata secara terintegrasi dan komprehensif. Selain itu, kekayaan warisan kesenian, tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat Kota Depok seperti Gong Sibolong, Rebut Dandang, Tari Topeng Cisalak yang bercirikan budaya Melayu Betawi dan Tari Merak yang bercirikan budaya Sunda, serta warisan budaya nusantara yang ada di Kota Depok juga memerlukan perhatian dalam pelestarian dan promosi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat menggerakkan roda perekonomian daerah, memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat.

Rendahnya tingkat toleransi di Kota Depok

Salah satu tantangan sosial yang mengemuka dalam pembangunan Kota Depok adalah rendahnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat, sebagaimana tercermin dalam penilaian sejumlah lembaga independen yang menempatkan Depok dalam kategori kota dengan indeks toleransi yang rendah. Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya pembangunan nilai-nilai keberagaman, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi perhatian khusus mengingat Kota Depok merupakan wilayah urban dengan heterogenitas penduduk yang tinggi, baik dari sisi agama, suku, latar belakang budaya, maupun orientasi sosial.

Rendahnya tingkat toleransi dapat berdampak langsung pada menurunnya kohesi sosial, munculnya segregasi antar kelompok, serta berkurangnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial. Hal ini juga dapat menghambat partisipasi warga dalam kegiatan komunitas, mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik, dan memicu potensi konflik sosial, terutama pada momentum-momentum politik atau keagamaan yang sensitif.

Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan perlunya peningkatan kualitas keamanan pangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan yang baik. Tren konsumsi pangan penduduk di Kota Depok bervariasi antar kelompok pangan, namun cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk kelompok pangan hewani, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. Persentase penurunan terbesar pada kelompok buah/biji berminyak, sedangkan persentase peningkatan terbesar terjadi pada kelompok pangan hewani. Sementara itu, rata-rata pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk per kapita untuk kelompok padi-padi, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan kelompok lain-lain mengalami tren penurunan. Sementara itu, sebagai wilayah perkotaan, lahan pertanian di Kota Depok semakin berkurang akibat tingginya alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur. Dampaknya ketergantungan pada hasil pertanian pedesaan semakin tinggi. Di sisi lain, dalam aspek ketahanan pangan bahwa selain keterjangkauan dan pemanfaatan pangan di Kota Depok, kuantitas ketersediaan pangan yang memadai belum dapat menjamin kualitas ketersediaan pangan yang baik, oleh karenanya perlu ditingkatkan kualitas keamanan pangan.

2.3.2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Ekonomi. Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Depok meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan wirausaha baru, dan kapasitas dan daya saing IKM/UMKM.

Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas. Laju pertumbuhan PDRB Kota Depok cenderung mengalami peningkatan selama 2005-2023. Bahkan, pada periode sebelum pandemi Covid-19, yakni

2005-2019, pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 6%, melebihi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional yang berkisar di 5% pada periode yang sama. Namun, pertumbuhan ekonomi yang diperoleh ini belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas karena belum diiringi dengan pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Penciptaan wirausaha baru belum optimal. Penciptaan wirausaha baru adalah elemen penting dalam memperkuat perekonomian suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wirausaha baru tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing daerah. Namun, penciptaan wirausaha baru di Kota Depok saat ini belum optimal. Rasio kewirausahaan Kota Depok baru mencatatkan angka 2,18% dan masih berada di bawah rasio kewirausahaan nasional. Upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru di Kota Depok masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses terhadap modal, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan peluang bisnis. Rendahnya rasio kewirausahaan juga dilatarbelakangi oleh banyaknya warga yang memilih untuk berwirausaha karena kondisi yang terpaksa akibat tidak berhasil memperoleh pekerjaan di sektor formal. Desain pembinaan, pelatihan dan pendampingan harus dibenahi jika Kota Depok ingin meningkatkan penciptaan wirausaha baru secara signifikan, termasuk mengoptimalkan upaya peningkatan wirausaha baru yang berasal dari Perempuan Kepala Keluarga (PeKka).

Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang meliputi permodalan yang terbatas, teknologi yang belum optimal, kendala dalam memenuhi legalitas usaha, serta akses yang terbatas dalam pemasaran. Selain itu, tantangan juga muncul dari kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas dan daya saing IKM/UMKM di masa depan agar UMKM dapat optimal berperan sebagai tulang punggung ekonomi lokal dan pilar penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, serta mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata.

Daya saing manusia. Permasalahan daya saing manusia di Kota Depok meliputi pendidikan dan kompetensi tenaga kerja serta mismatch pendidikan.

Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja. Pendidikan yang merupakan faktor kunci penyediaan tenaga kerja terampil harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing kota ke depan. Sampai saat ini, kualitas tenaga kerja di Kota Depok secara umum masih rendah. Profil

angkatan kerja di Depok masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke bawah. Data dari BPS menunjukkan hanya 30% tenaga kerja di Depok yang memiliki pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Selain itu, pelatihan kerja yang belum optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Ketika pasar tenaga kerja diisi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan unskilled, dunia usaha merasa sulit memberikan nilai kompensasi yang lebih tinggi karena harus ada keseimbangan antara kualitas, produktivitas, dan kompensasi. Hal inilah yang seringkali menjadi alasan bagi pengusaha untuk menekan upah pekerja. Faktor ini juga seringkali menjadi pemicu terjadinya perselisihan hubungan industrial (PHI) berupa benturan antara tenaga kerja dan pengusaha karena masalah pengupahan. Dengan demikian, perbaikan dalam pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan optimalisasi pelatihan kerja menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan tenaga kerja di Depok.

Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Hal ini diindikasikan oleh tingkat pengangguran terbuka yang paling banyak bersumber dari lulusan SMA/SMK sederajat sebesar 53,49%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah atau pendidikan vokasi dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Pembaruan kurikulum yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja, serta peningkatan kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia usaha, harus didorong agar siswa memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.

Daya Saing Infrastruktur. Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Depok meliputi pemenuhan infrastruktur dasar dan transportasi publik.

Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal. Dalam aspek infrastruktur dasar, Kota Depok masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, khususnya pada sektor transportasi dan jaringan jalan. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air, jalan, jembatan, drainase, serta sistem air minum perpipaan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data tahun 2022, dari total 1.957 kilometer panjang jalan kota, tercatat 115 kilometer dalam kondisi rusak dan 97,98 kilometer mengalami kerusakan berat. Permasalahan ini disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas, ketidaksesuaian standar konstruksi jalan, minimnya inovasi teknologi pemeliharaan, serta lemahnya sistem perawatan rutin.

Di sisi lain, cakupan pelayanan air minum baik perpipaan maupun non-perpipaan masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama kawasan pinggiran kota. Rendahnya cakupan jaringan perpipaan dan terbatasnya sumber daya air menyebabkan sebagian besar penduduk kesulitan mengakses air bersih yang layak. Permasalahan serupa juga terjadi pada sistem drainase kota yang belum mampu mengelola limpasan air hujan secara optimal. Akibatnya, banjir dan genangan air kerap terjadi di berbagai wilayah saat musim hujan, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kondisi infrastruktur lain.

Meskipun cakupan sistem sanitasi telah mencapai angka yang tinggi, yakni 99,13%, namun masih ditemukan kekurangan dalam aspek keamanan pengelolaan buangan limbah. Artinya, peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi menjadi hal yang tak kalah penting dibandingkan cakupan kuantitatif. Di sektor persampahan, volume sampah harian yang terus meningkat belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan akhir. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik dan menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) yang masih berada di bawah standar nasional juga turut mempengaruhi kualitas udara, iklim mikro, dan ketersediaan ruang publik sebagai sarana interaksi sosial warga.

Transportasi publik yang belum memadai. Sebagai kota penyangga ibu kota, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Depok menjadi semakin mendesak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan intensitas pergerakan harian. Transportasi publik yang andal tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemacetan, emisi polutan, dan kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan. Aksesibilitas moda transportasi massal yang baik akan memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat tanpa kendaraan pribadi, sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah, terutama bagi komuter yang bekerja di Jakarta. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kota Depok merupakan penyumbang komuter terbesar ke DKI Jakarta, dengan proporsi sebesar 24,5% atau sekitar 485.355 jiwa.

Meskipun kebutuhan akan sistem transportasi publik semakin tinggi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur dan layanan transportasi umum di Kota Depok masih belum memadai. Kemacetan lalu lintas terus memburuk dan terjadi secara rutin di sejumlah koridor utama seperti Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Mochtar, Jalan Kartini, Jalan Tanah Baru, dan Jalan Raya Cipayang. Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kapasitas jalan yang

tersedia menjadi salah satu faktor utama. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi disebabkan oleh terbatasnya pilihan moda transportasi umum yang nyaman, efisien, dan terintegrasi.

Permasalahan ini diperparah oleh penurunan jumlah dan kualitas armada angkutan umum. Berdasarkan data BPS, jumlah angkutan kota (angkot) menurun tajam dari 2.884 unit pada tahun 2012 menjadi 1.548 unit pada tahun 2023. Selain penurunan jumlah, banyak armada yang beroperasi dalam kondisi tidak layak, kurang nyaman, dan tidak terawat, sehingga semakin menurunkan minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.

Selain keterbatasan moda transportasi, infrastruktur pendukung seperti halte yang layak, jalur khusus angkutan umum, serta sistem informasi jadwal dan rute yang akurat masih sangat terbatas di Kota Depok. Ketiadaan elemen-elemen tersebut menjadikan transportasi publik kurang kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi, serta menghambat transisi menuju sistem mobilitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan daya saing transportasi publik memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pembangunan fisik, perencanaan strategis, inovasi layanan berbasis teknologi, serta penguatan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daya Saing Iklim Investasi. Permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Depok meliputi kualitas penyajian data dan informasi serta kualitas pelayanan perizinan.

Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing iklim investasi di Kota Depok. Investor potensial membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses untuk membuat keputusan yang tepat. Data dan informasi yang disajikan terkadang kurang terperinci sehingga menyulitkan calon investor dalam menilai potensi dan peluang investasi yang sebenarnya. Dibutuhkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas penyajian data dan informasi untuk dapat menarik lebih banyak investasi. Dokumen informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi seperti masterplan, feasibility study, dan business plan, harus tersedia secara memadai.

Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal. Iklim investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepastian hukum dan regulasi, kondisi demografi, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kemudahan dan kenyamanan investor dalam mengurus proses perizinan. Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal menjadi tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan daya saing iklim investasi di Kota Depok. Pelayanan perizinan belum optimal karena adanya beberapa jenis

perizinan yang waktu penyelesaiannya belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), atau sering kali melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dapat memperlambat proses investasi. Selain itu, belum optimalnya sarana sistem teknologi informasi dalam mendukung perizinan berbasis online turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap daya saing iklim investasi. Perbaikan signifikan dalam efisiensi penyelesaian perizinan dan pengembangan sistem yang lebih andal dan user-friendly menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi.

2.3.2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum. Tata kelola pemerintahan yang efektif memainkan peran sentral dalam kemajuan dan keberlanjutan Kota Depok. Sebagai kota yang terus berkembang dan memiliki kompleksitas yang semakin meningkat, tata kelola pemerintahan yang efektif adalah kunci dalam menyelaraskan berbagai kepentingan masyarakat, mengelola sumber daya secara optimal, serta menyediakan pelayanan publik secara paripurna. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam penyediaan layanan publik di Kota Depok seperti permasalahan dalam digitalisasi pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, SDM yang belum memiliki kapasitas pelayanan dan kurangnya kerja sama dan belum optimalnya efektivitas kerja sama.

Digitalisasi pelayanan publik belum optimal. Meski Kota Depok berhasil meningkatkan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 menjadi 4.32 dan memperoleh predikat “Memuaskan”, digitalisasi layanan pemerintahan di Kota Depok masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah dalam implementasi SPBE, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan teknologi digital di berbagai sektor pelayanan. Kedua, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam implementasi SPBE yang menjadi hambatan serius dalam memaksimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, belum optimalnya strategi diseminasi atau promosi aplikasi dan layanan seperti Depok Single Window, mengakibatkan belum optimalnya tingkat awareness masyarakat terhadap fungsi dan manfaat layanan tersebut. Dengan demikian perbaikan tata kelola harus terus dilakukan agar Kota Depok dapat mengoptimalkan implementasi e-government untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat belum optimal. Penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah. Namun hingga saat ini, masih terdapat keluhan bahwa sebagian laporan pengaduan dari masyarakat belum ditindaklanjuti secara optimal. Perbaikan serius harus dilaksanakan agar setiap warga dapat dengan mudah mengadukan keluhan atau

permasalahan mereka kepada Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan tanggapan yang cepat serta solusi yang tepat. Peningkatan transparansi dalam proses penanganan pengaduan serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah signifikan untuk mempercepat respons dan memastikan setiap keluhan direspon dengan cepat, tepat dan sesuai kebutuhan.

SDM layanan belum seluruhnya berorientasi pelayanan prima. Hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih banyak petugas pelayanan yang kurang terlatih dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan yang responsif dan proaktif. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, pengembangan kompetensi SDM dan membangun budaya organisasi yang memprioritaskan pelayanan prima.

Kurangnya kerja sama dan belum optimalnya efektivitas kerja sama. Untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dasar, pemenuhan SPM, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Depok telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lainnya, Pemerintah kabupaten/kota lain, serta pihak lainnya, dan menandatangani Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan, dan Rencana Kerja Tahunan yang masih berlanjut hingga saat ini.

2.3.3. Isu Sesuai Konteks

2.3.3.1. Isu Strategis Global

Perubahan Iklim. Hal ini menjadi salah satu tantangan paling mendesak di abad ke-21, dengan dampak yang dirasakan di seluruh dunia. Peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, pencairan es di kutub, dan naiknya permukaan air laut menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Tahun 2015-2022 tercatat sebagai delapan tahun terpanas dalam sejarah. Laju kenaikan permukaan air laut juga meningkat dua kali lipat sejak tahun 1993.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global, komunitas internasional telah membentuk Trust Fund sebagai sumber pendanaan bagi berbagai program mitigasi dan adaptasi di berbagai negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, juga turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya global ini. Salah satunya melalui penandatanganan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri pada tahun 2030, dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Pemerintah juga menargetkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pesisir, daratan sedang, dataran tinggi, serta hutan hujan tropis yang berperan sebagai paru-paru dunia, menjadikan peran Indonesia sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Untuk mendukung kebijakan ini, Indonesia telah membentuk Sekretariat Nasional Perubahan Iklim serta mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada tahun 2019. Lembaga ini bertugas mengelola pembiayaan publik bagi upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim.

Isu terkait dengan perubahan iklim juga telah menjadi target SDG 13 yaitu climate action. Tujuan dari SDG ini adalah menuntun upaya segera dan terkoordinasi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pada skala global, melalui SDG ini negara-negara di dunia didorong untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana terkait iklim. Di samping itu juga perlu diintegrasikan antara kebijakan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan di Kota Depok. Dalam konteks Kota Depok sendiri, diketahui bahwa sumber GRK terbesar berasal dari sumber emisi tidak bergerak seperti penggunaan LPG di rumah tangga yang mencapai 64,47% dari total emisi GRK di Kota Depok.

Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk perubahan iklim mencapai Rp 896 triliun per tahun, namun angka ini baru mencakup sekitar 34% dari total kebutuhan pendanaan tahunan yang diperkirakan sebesar Rp2.662 triliun. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah terus mendorong partisipasi sektor swasta guna memperkuat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Geopolitik dan Geoekonomi. Hal ini merupakan isu yang menciptakan dinamika global yang kompleks dan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara-negara di dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan-Indo Pasifik mempengaruhi stabilitas internasional dan memiliki implikasi secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Ketegangan antara negara-negara besar, seperti persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik di berbagai wilayah, mempengaruhi perdagangan, investasi, dan aliansi politik. Perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, konflik Timur Tengah antara Israel dengan Palestina yang semakin memanas, ketegangan di Laut Cina Selatan telah memberi pengaruh terhadap situasi perekonomian dunia. Dalam jangka panjang, situasi ini akan mendorong deglobalisasi, di mana setiap negara berupaya membangun kemandirian dan ketahanan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dari potensi krisis yang dapat menyebar melalui jalur perdagangan, keuangan internasional, dan komoditas dalam rantai pasok global.

Demografi Global. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa populasi global akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,5 miliar pada tahun 2045. Pertumbuhan ini

disebabkan oleh penurunan angka kematian dan peningkatan usia harapan hidup saat lahir. Struktur demografi, seperti peningkatan jumlah penduduk usia tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda, akan menimbulkan tantangan dalam penyediaan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dengan 95 persen dari pertumbuhan ini terjadi di negara-negara dengan ekonomi berkembang. Penduduk perkotaan di Asia juga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,7 kali lipat.

Disrupsi Teknologi. Perkembangan teknologi digital yang cepat telah mengubah wajah dunia dengan munculnya berbagai aplikasi yang semakin memudahkan hidup manusia. Hal ini terus mengubah lanskap ekonomi dan sosial global. Inovasi dalam bidang seperti kecerdasan buatan, robotika, dan internet of things menimbulkan tantangan besar seperti ketimpangan digital, privasi data, dan penurunan permintaan tenaga kerja dalam jenis-jenis pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh teknologi. Namun, disrupsi teknologi juga menciptakan peluang dan potensi besar dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan, misalnya melalui penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perdagangan Internasional.

Peningkatan jumlah kelas menengah di seluruh dunia akan mengakibatkan peningkatan permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi global, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan ekspor produk lokal, dan menjaga keberlangsungan hubungan perdagangan dengan mitra luar negeri. Langkah-langkah kebijakan yang proaktif dan inklusif, seperti menyediakan infrastruktur perdagangan yang memadai, memberikan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing produk, serta membangun jejaring kerja sama internasional, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan internasional.

Perkembangan teknologi telah membuat transaksi perdagangan menjadi sangat mudah dan hampir tidak ada batas negara (borderless) dalam perdagangan internasional. Ditambah dengan meningkatnya jumlah kelas menengah membuat transaksi perdagangan antarnegara yang memanfaatkan teknologi informasi melalui adanya marketplace menjadi semakin mudah. Bagi UMKM, ini merupakan peluang untuk bisa memasuki pasar internasional dari produk-produk yang dihasilkan jika didukung dengan kualitas yang baik, keunikan, dan harga yang kompetitif. Dukungan dalam bentuk kebijakan yang proaktif dan inklusif seperti menyediakan infrastruktur perdagangan yang memadai, memberikan dukungan bagi pelaku usaha lokal khususnya UMKM untuk meningkatkan daya saing

produk, serta membangun jejaring kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan internasional. Namun di sisi lain, produk dari luar dengan harga yang murah dan tampilan menarik serta mudah didapat melalui marketplace juga menjadi tantangan tersendiri bagi produsen lokal termasuk di daerah-daerah untuk bisa tetap diminati oleh konsumen di dalam negeri. Diperlukan upaya yang kuat juga dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas produk lokal khususnya UMKM agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor yang datang melalui perdagangan secara online di marketplace.

2.3.3.2. Isu Strategis Nasional

Bonus Demografi Indonesia. Bonus Demografi merupakan periode yang menjanjikan untuk dapat mengubah status Indonesia dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan akan menyumbang lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan akan semakin rendah, yang artinya beban terhadap penduduk usia produktif akan semakin ringan. Dengan makin besarnya proporsi penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa, diharapkan nilai tambah yang dihasilkan semakin besar pula. Bonus demografi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Namun bonus demografi ini harus didukung dengan kualitas angkatan kerja yang baik dari sisi fisik maupun kompetensi agar bisa mengisi peluang yang ada. Agar dapat mengoptimalkan potensi ini, diperlukan investasi yang besar khususnya dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kualitas angkatan kerja yang rendah dengan kualitas fisik yang rendah yang tidak bisa diterima oleh pasar kerja membuat bonus demografi ini menjadi sia-sia. Bonus demografi ini juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Jika lapangan kerja yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja ini tidak tersedia, maka bonus demografi justru bisa menjadi musibah karena menjadi beban bagi sesama usia produktif.

Bonus Demografi terjadi juga di Depok dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif dan menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun. Bonus Demografi ini perlu didukung dengan ketersediaan lapangan dan dukungan bagi kesempatan berusaha untuk angkatan kerja muda khususnya yang berpendidikan SMA dan SMK. Saat ini terjadi kecenderungan meningkatnya pengangguran usia muda terutama yang berpendidikan SMK. Bonus Demografi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan keterampilan. Memperbanyak pelatihan kerja menjadi salah satu alternatif untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih mampu bersaing di pasar kerja.

Ekonomi Hijau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan ekonomi hijau sebagai prioritas dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan memfokuskan pada praktik ekonomi yang ramah lingkungan, Indonesia berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Terlebih, Data World Economy Forum menyebutkan, separuh dari total produk domestik bruto (PDB) dunia dihabiskan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri. Penerapan ekonomi hijau tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan peluang kerja melalui investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Investasi dalam sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengembangan produk-produk hijau juga memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang semakin memperhatikan keberlanjutan.

Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Data World Economic Forum menyebutkan separuh dari total produk domestik bruto (PDB) dunia dihabiskan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri. Pemerintah Indonesia melalui Bappenas telah menetapkan tiga sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau Indonesia yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah bertindak secara progresif untuk menetapkan ekonomi hijau di berbagai dokumen, salah satunya dalam RPJMN 2020 – 2024 yang memuat Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Penerapan ekonomi hijau tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan peluang kerja melalui investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Investasi dalam sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan teknologi ramah lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan Infrastruktur Dasar. Konektivitas dan infrastruktur dasar memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah menempatkan peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan

jangka panjang. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan akses yang mudah ke sumber daya vital seperti air bersih dan listrik, menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan konektivitas antar wilayah juga dapat membuka peluang investasi baru, memfasilitasi perdagangan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dasar juga membantu meningkatkan daya saing suatu negara dalam pasar global dengan memperbaiki rantai pasok dan mempercepat distribusi barang.

Perubahan Iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana.

Perubahan iklim membawa dampak signifikan terhadap ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat, seperti kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam yang mengancam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan. Selain itu, degradasi lingkungan akibat deforestasi, urbanisasi, dan pencemaran telah mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat dan mengurangi produktivitas sumber daya alam. Terletak di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia juga menghadapi risiko bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami, serta bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Komitmen yang kuat dan strategi yang komprehensif diperlukan agar dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan risiko bencana dapat diatasi dengan baik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pijakan penting dalam pembangunan Indonesia sejak era reformasi. Melalui desentralisasi, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan yang semula terpusat dialihkan ke pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan masing-masing wilayah. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Namun, beberapa tantangan dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah perlu menjadi fokus perhatian seperti masalah kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah, ketidaksetaraan antar wilayah dalam hal pendapatan dan pelayanan publik, serta komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Untuk melihat dampak perpindahan IKN ini secara teknis dapat

dilakukan dengan cara mensimulasikan perekonomian nasional dan masing-masing provinsi dengan skenario perpindahan IKN ini. Salah satu penelitian terbaru yang melakukan analisis ini adalah Yusuf et al., (2023). Dalam penelitian tersebut, diprediksi pemindahan IKN sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi Kota Depok sebagai kota penyangga DKI Jakarta. Turunnya pengeluaran pemerintah Pusat di DKI Jakarta dapat mengakibatkan penurunan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta. Konsekuensinya, belanja masyarakat di Jakarta juga terpengaruh. Sebagai kota penyangga, belanja masyarakat Kota Depok yang bekerja di instansi pemerintah pusat akan mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, penurunan belanja pemerintah pusat di Depok akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal. Sektor konstruksi, yang seringkali bergantung pada proyek-proyek pemerintah, juga diperkirakan akan terdampak. Akibatnya, PDRB Kota Depok, baik dari belanja masyarakat maupun investasi pemerintah, akan diprediksi mengalami penurunan.

Penelitian tersebut memperkirakan efek negatif pemindahan IKN ke Kalimantan Timur disimulasikan akan menurunkan PDRB DKI Jakarta sekitar 7%. Dengan keterkaitan antara PDRB Kota Depok yang kuat dengan PDRB DKI Jakarta maka efek negatif ini juga akan dirasakan oleh Kota Depok walaupun dengan level yang kemungkinan lebih rendah. Dengan demikian, dalam menghadapi dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis yang proaktif dan berkesinambungan. Penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk mempertimbangkan skenario-skenario yang mungkin terjadi serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.3.3.3. Isu Provinsi Jawa Barat

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2024 mencapai 74,92, namun mulai dari tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak lagi digunakan dan digantikan oleh Indeks Modal Manusia. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 memiliki target IMM sebesar 0,58, hal ini dapat dicapai dengan mengukur seberapa baik suatu negara dalam memobilisasi modal manusia, potensi ekonomi, dan profesionalisme warga negaranya. Sehingga perlu ditingkatkan terkait ketahanan hidup, pendidikan, dan kesehatan penduduk di Jawa Barat.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 yaitu 8,87 tahun dengan target pada tahun 2026 sebesar 9,66, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,68 tahun dengan target pada tahun 2026 sebesar 12,88. Permasalahan utama

pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Usia Harapan Hidup mencapai 73,8 tahun, Rasio Kematian Bayi yaitu 3,54 per 1000 kelahiran, Rasio Kematian Ibu masih mencapai 97,82 per 100.000 kelahiran, dan Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2024 yaitu 15,52 persen dengan target pada tahun 2026 yaitu 17,86 persen. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.

Adapun kualitas hidup sumber daya manusia lainnya ditunjukkan oleh kondisi kesetaraan gender, pembangunan keluarga, pemuda, dan kelompok rentan yang mencakup perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat. Apabila dilihat dari capaian indikatornya, Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023 yaitu 51,17 poin yang menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai rata-rata domainnya berada dibawah nasional. Tahun 2023, capaian Indeks Perlindungan Anak yaitu 70,51 yang menunjukkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, sedangkan capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yaitu 66,44 poin yang menunjukkan penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan perhitungan pada kedua indikator tersebut, disamping masing perlu diperhatikannya pembangunan keluarga serta perlindungan anak di Jawa Barat.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2023 mencapai 0,482 yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan nasional. Dari kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain belum terwujudnya kesetaraan gender, belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi kelompok rentan, belum optimalnya pembangunan pemuda dan upaya peningkatan ketahanan keluarga serta keluarga berencana.

Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada Bulan Maret 2024 mencapai 7,08 persen, dengan target pada tahun 2026 yaitu 5,85- 6,46 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga

menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 masih mencapai 6,75 persen, dengan target pada tahun 2026 yaitu 6,99 persen. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri. Untuk diperlukan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan optimalisasi dalam peningkatan daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Adapun ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat masih tinggi ditunjukkan oleh Indeks Gini pada tahun 2024 mencapai 0,428 poin, dengan target pada tahun 2026 yaitu 0,381-0,420 poin. Untuk itu, dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor Perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih mengalami kendala terkait mobilitas dan kemudahan aksesibilitas menuju sentra ekonomi walaupun tingkat konektivitas antar wilayah pada tahun 2023 sudah mencapai 59,62 persen, namun hal ini belum dapat diimbangi dengan kualitas dari infrastruktur tersebut sehingga masih diperlukan Upaya lebih untuk mencapai target tahun 2026 yaitu 60,00 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketimpangan pendapatan ditunjukkan melalui capaian Rasio Gini Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar 0,428 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dimana rasio gini sebesar 0,425, hal ini menunjukkan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat semakin melebar. Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan Pembangunan infrastruktur dasar

di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan, serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 66,02 poin pada tahun 2024. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah

Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2024. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata Kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penerapan inovasi daerah dalam pembangunan di Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 81,27 dengan predikat Sangat Inovatif. Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu "Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola", maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

"PEMERATAAN DISTRIBUSI AKSES LAYANAN DASAR"

Tema tersebut memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Proses penyusunan isu strategis tahun 2026 mempertimbangkan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan mengacu pada arah kebijakan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta memastikan keterkaitan dengan isu strategis/tantangan dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2026.

2.3.3.4. Isu Regional Jabodetabek

Isu strategis regional Jabodetabek mencakup pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan kebijakan penertiban administrasi kependudukan.

Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membawa implikasi bagi daerah sekitarnya. Depok sebagai tetangga terdekat di bagian selatan Jakarta dan menjadi tempat tinggal banyak ASN pemerintah pusat yang akan berpindah ke IKN akan mengalami dampak berupa berkurangnya jumlah penduduk yang akan ikut pindah ke IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN juga berdampak pada kegiatan sosial-ekonomi yang selama ini menopang keberadaan instansi pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pegawai yang ada di dalamnya. Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara akan ditetapkan sebagai kota bisnis berskala global yang berarti dinamika bisnis di Jakarta akan lebih meningkat. Hal ini berdampak pada daerah sekitarnya termasuk Depok untuk bisa mendukung dinamika berkembangnya kegiatan bisnis di Jakarta.

Depok sebagai tetangga terdekat Jakarta harus memiliki kesiapan dalam mendukung dan menampung limpahan dinamika kegiatan bisnis ekonomi di Jakarta terutama dalam menyediakan suplai berbagai kebutuhan di Jakarta. UMKM dan sektor ekonomi lainnya harus mengambil manfaat dari pengembangan Jakarta sebagai kota global dan menyiapkan SDM yang andal untuk bisa menjadi pendukung kota global Jakarta. Di sisi lain, Depok juga akan menjadi salah satu pilihan lokasi tempat tinggal utama bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta namun menghendaki hunian yang relatif terjangkau dan lingkungan yang masih cukup baik (tidak bising dan banyak polusi). Saat yang sama, Jakarta juga mungkin akan ditinggalkan sebagian penduduknya yang bekerja di instansi pemerintah pusat yang akan pindah ke Ibukota yang baru di Kalimantan Timur. Selama ini cukup banyak ASN yang tinggal di Depok dan bekerja di instansi pemerintah pusat di Jakarta.

UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

UU No. 2 Tahun 2024 telah memberikan banyak kewenangan khusus bagi Jakarta yang bisa berdampak pada daerah di sekitarnya. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan oleh Daerah Khusus Jakarta adalah dalam bidang perhubungan. Dalam kewenangan khusus di bidang perhubungan ini, Jakarta bisa memberikan subsidi layanan angkutan umum lintas daerah yang dapat dimanfaatkan

oleh penduduk daerah tetangga tanpa membebani anggaran daerahnya. Jakarta juga bisa melakukan penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan angkutan umum massal secara terintegrasi antara Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya. Depok sebagai tetangga terdekat Jakarta menjadi yang paling mendapatkan manfaat dari kewenangan khusus di bidang perhubungan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Depok dalam meningkatkan kualitas layanan transportasinya.

UU No. 2 Tahun 2024 juga menetapkan adanya kawasan aglomerasi sebagai penopang Jakarta sebagai kota global dan untuk keterpaduan perencanaan pembangunan di wilayah Jakarta dan kawasan penyangganya yang meliputi Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor. Untuk mendukung implementasi kawasan aglomerasi ini dibentuk Dewan Kawasan. Kawasan aglomerasi ini akan memiliki kekuatan hukum yang besar dalam pelaksanaannya dibanding format koordinasi pengelolaan Jabodetabek yang sebelumnya. Depok sebagai salah satu kota yang masuk dalam kawasan aglomerasi perlu memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan di kawasan aglomerasi dan menyiapkan diri untuk menjalankan peran penting tersebut.

Penertiban Administrasi Kependudukan

Sejak awal tahun 2024, Pemprov Jakarta membuat kebijakan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang memiliki NIK/KTP Jakarta tapi sudah tidak tinggal lagi di Jakarta. Sebagian orang yang masih memiliki NIK Jakarta tersebut tidak memindahkan NIK/KTP Jakarta-nya karena masih ingin menikmati berbagai fasilitas, khususnya bantuan sosial (KJP, KJS, dll) yang diberikan oleh Pemprov Jakarta. Kebijakan penonaktifan NIK ini membuat warga tersebut harus memindahkan NIK dan KTP-nya ke domisili saat ini.

Depok menjadi salah satu daerah yang cukup banyak warganya masih memiliki NIK/KTP Jakarta karena sebelumnya tinggal di Jakarta. Ketika mereka memindahkan NIK-nya menjadi NIK Depok, maka beban pemberian bantuan sosial akan beralih ke Pemkot Depok. Di sisi lain, ketika warga tersebut memindahkan nomor kendaraannya sesuai domisili sekarang dan NIK Depok, maka pajak atas kendaraannya juga bisa beralih menjadi pendapatan daerah Depok. Pembentukan kawasan aglomerasi juga menjadi pemicu bagi Depok dalam melakukan akselerasi dalam pembangunan dan pelayanan publik karena adanya akselerasi pembangunan pada kawasan tersebut. Jika ini tidak dilakukan, Depok bisa tidak mendapatkan manfaat dari pembentukan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur ini.

2.3.4. Isu Kota Depok

Isu strategis daerah Kota Depok diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan pembangunan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi, maupun regional), dan potensi yang dapat dikembangkan oleh Kota Depok yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan hasil penjarangan aspirasi masyarakat. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah sebagai berikut:

2.3.4.1. Peningkatan Kualitas Manusia

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Melalui pendidikan berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri secara optimal dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan adalah kunci bagi terbukanya berbagai kesempatan dan peluang di masa depan. Indeks Pendidikan di Kota Depok pada tahun 2023 berada pada nilai 77.38 menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 79.96.

Untuk mewujudkan tingkat dan kualitas Pendidikan yang semakin baik, diperlukan berbagai upaya dari mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan memastikan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Diperlukan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan.

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warga. Akses kesehatan yang memadai mencakup kemampuan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang kompeten. Sementara itu, kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjamin setiap warga dapat menerima layanan kesehatan secara mudah, aman dan berkualitas. Kota Depok saat ini mempunyai 38 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Depok, akan tetapi masih belum merata di seluruh kelurahan. Jumlah layanan Puskesmas di Kota Depok belum mempertimbangkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua warga. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong terwujudnya Kota Depok yang dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh warganya.

Penurunan Stunting

Penurunan prevalensi stunting harus dilakukan melalui intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang mencakup banyak hal. Upaya percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting baru tidak hanya dalam bentuk pemberian makanan kepada balita, tapi juga penyediaan sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, pelayanan pasca persalinan, pendampingan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dalam rangka pengurangan kemiskinan yang ke semuanya termasuk dalam intervensi sensitif dalam penurunan dan pencegahan stunting. Bahkan intervensi sensitif ini memberi kontribusi 70% dalam pencegahan stunting. Intervensi ini tidak hanya dilakukan kepada balita, namun dimulai sejak remaja, pra nikah dan pra kehamilan ibu serta pada 1000 hari pertama kehidupan (dimulai sejak konsepsi sampai usia bayi mencapai 2 tahun).

2.3.4.2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota

Peningkatan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur sosial, ekonomi, dan budaya sebuah kota. Dalam perencanaan kota harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi keluarga dalam hal pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Pembangunan keluarga yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan keluarga juga berdampak positif pada stabilitas sosial, kohesi komunitas dan keselarasan antar generasi.

Selama ini, ketahanan keluarga telah menjadi fokus dan prioritas utama pembangunan Kota Depok. Upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah (Perda), bahkan Depok menjadi kota pertama yang memiliki Perda Ketahanan Keluarga, yaitu Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Depok mengambil langkah strategis untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan, dukungan, dan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh anggotanya. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga telah mengesahkan

Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan, serta menginisiasi pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang menyelenggarakan layanan konsultasi gratis oleh psikolog dan konselor terkait isu-isu anak dan keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Kota Depok sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, dengan nilai yang berada dalam kategori tinggi, yaitu antara 0.8 hingga 1.0. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan keluarga Kota Depok sangat Baik.

Salah satu tantangan besar yang tengah dihadapi dalam pembangunan kualitas keluarga adalah meningkatnya beban masyarakat terhadap penyakit kronis. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Depok mencatat peningkatan kasus penyakit tidak menular maupun penyakit infeksi kronis seperti penyakit ginjal kronik, tuberkulosis (TBC), diabetes melitus, dan hipertensi, yang sebagian besar dialami oleh anggota keluarga usia produktif maupun lanjut usia. Penyakit-penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi keluarga, karena membutuhkan biaya pengobatan jangka panjang dan menyebabkan hilangnya produktivitas. Kebutuhan akan Rumah Sakit Layanan Khusus menjadi sangat relevan dan mendesak dalam konteks ini. Kota Depok, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan karakteristik sebagai kota urban penyangga ibu kota, belum sepenuhnya memiliki fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang mampu menangani beban kasus penyakit kronis secara menyeluruh dan terfokus.

Ketahanan keluarga merupakan isu strategis yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan dan aspirasi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, suatu kota dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anggota masyarakat. Dalam hal tersebut, Kota Depok telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memprioritaskan ketahanan keluarga, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi, program, dan inisiatif yang telah diimplementasikan. Dengan terus menerus memperkuat upaya ini, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

Penguatan Perlindungan Lansia

Perubahan struktur demografi penduduk Kota Depok mulai terlihat terutama pada kelompok lansia (60 tahun ke atas). Proyeksi demografis Kota Depok memperlihatkan adanya penurunan jumlah anak-anak (0-14 tahun) dari tahun 2025 hingga 2045, serta peningkatan yang sangat kecil pada jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Namun, proyeksi tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kelompok usia 65 tahun ke atas, mencerminkan adanya tren penuaan penduduk/aging population yang berpotensi mempengaruhi angka ketergantungan di masa depan.

Menurut analisis data yang telah disusun, proyeksi jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) di Kota Depok menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang signifikan, dari 137.270 individu pada tahun 2025 menjadi 345.060 individu pada tahun 2045. Pertumbuhan populasi usia lanjut ini memiliki implikasi yang penting dalam perencanaan perkotaan, termasuk peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan infrastruktur sosial.

Dinamika demografi pada periode penuaan penduduk memerlukan perhatian yang khusus, terutama dari segi kesehatan. Telah menjadi suatu fakta yang diterima secara luas bahwa semakin lanjut usia seseorang, semakin tinggi pula kerentanannya terhadap berbagai penyakit. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan sebesar 48,14 persen lansia di Indonesia mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan yang memadai bagi kaum lansia.

Fenomena aging population harus dihadapi secara terencana untuk memastikan bahwa lansia dapat hidup mandiri dan sejahtera. Selain itu harus memastikan bahwa beragam bantuan khusus untuk lansia yang memerlukan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa berbagai fasilitas umum yang tersedia di seluruh Kota Depok telah ramah lansia.

Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas

Berdasarkan proyeksi yang disusun dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Depok 2022-2045, jumlah penduduk Kota Depok diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan dari tahun 2023 hingga 2045. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.145.400 jiwa. Angka ini diperkirakan akan naik mencapai 2.652.562 jiwa pada tahun 2045.

Pengelolaan kependudukan yang berkualitas adalah isu strategis dalam pembangunan Kota Depok. Dengan pertumbuhan populasi yang terus berlangsung, penataan kependudukan menjadi faktor penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, migrasi, dan distribusi penduduk yang memengaruhi dinamika kependudukan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Kota Depok. Migrasi penduduk adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam menghadapi fenomena ini, Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan kependudukan yang berkualitas bagi Kota Depok.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keterjangkauan Harga Pangan

Peningkatan ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketahanan pangan adalah wujud kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap warga. Hal ini mengacu pada upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan pangan perlu menjangkau seluruh wilayah agar semua warga dapat hidup lebih sehat dan produktif.

Data ketahanan pangan Kota Depok menunjukkan peningkatan skor untuk ketahanan pangan berbasis indeks dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, skor keterjangkauan adalah 95,97 dan pemanfaatan adalah 76,15, dengan nilai komposit sebesar 85,07. Di tahun 2023, terjadi peningkatan pada setiap aspek, keterjangkauan menjadi 98,46 pemanfaatan menjadi 82,11, sehingga nilai komposit naik menjadi 89,47.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber daya pangan, penguatan rantai pasok pangan, serta promosi pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kemandirian pangan lokal dan pengembangan urban farming perlu didorong dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi Kota Depok.

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kota

Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban kota adalah hal esensial yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga. Keamanan dan ketertiban kota juga merupakan fondasi penting dalam pembangunan kota secara menyeluruh. Indeks Trantibum Kota Depok tahun 2023 sebesar 76,55, yang dihitung berdasarkan 3 dimensi yaitu dimensi strategi dengan nilai 19,8, dimensi SDM sebesar 49 dan dimensi sistem sebesar 31,2.

Suasana yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat untuk memberikan kontribusi yang produktif dalam berbagai sektor pembangunan kota. Untuk mencapai hal tersebut, agar dipastikan bahwa lingkungan kota terhindar dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial. Penegakan hukum dan pengendalian keamanan dan ketertiban harus dilakukan secara konsisten. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk diperkuat sehingga dapat menciptakan suasana kota yang tenteram dan tertib.

Kohesi Sosial

Dalam konteks pembangunan sosial, aspek kohesi sosial menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk kota yang inklusif dan harmonis. Kota Depok, meskipun berkembang pesat secara fisik dan ekonomi, masih menghadapi tantangan dalam aspek kehidupan sosial, terutama terkait tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Salah satu indikator yang mencerminkan hal ini adalah Indeks Kota Toleran (IKT), di mana Depok beberapa kali tercatat sebagai kota dengan peringkat toleransi yang rendah. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pembenahan dalam membangun relasi sosial yang sehat, penghormatan atas keberagaman, dan jaminan atas kebebasan beragama di tingkat lokal.

Pemberdayaan PPKS dan Penanganan Permasalahan Sosial

Pemberdayaan kaum rentan dan penanganan permasalahan sosial adalah isu strategis yang harus mendapatkan perhatian penting dalam upaya menciptakan inklusi sosial dan kesejahteraan yang merata di Kota Depok. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, penderita yang telah terinfeksi HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah harus memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga termasuk kelompok rentan melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan advokasi. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan Kota Depok yang inklusif untuk semua.

2.3.4.3. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi adalah agenda penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor, Kota Depok dapat mengalami lonjakan investasi yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperluas basis ekonomi lokal.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah menghadirkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan infrastruktur yang mendukung, pengembangan manusia yang terampil dan berdaya saing, serta promosi inovasi dan teknologi. Komitmen yang kuat dalam memperbaiki iklim investasi akan mendorong Kota Depok memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan daerah. Karenanya, upaya pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan Kota Depok.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Depok tahun 2023 mencapai 62,76 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 63,35 persen. Sedangkan Indeks Gini Kota Depok pada tahun 2023 memiliki nilai 0.402 dengan klasifikasi ketimpangan moderat dan terdapat tren peningkatan ketimpangan pendapatan setiap tahunnya.

Pemerintah harus berupaya mewujudkan pembangunan berkeadilan agar ketimpangan ekonomi di Kota Depok tidak semakin melebar. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah strategis harus dilakukan dari mulai menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui stabilisasi bahan pokok dan bantuan sosial hingga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi, serta membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang masif dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan kerja masa depan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga Depok dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Berdasarkan Kepmendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023, Indeks Inovasi Kota Depok tercatat sebesar 51.12 (inovatif). Kota Depok berada di peringkat ke-46 dari total 93 kota yang dievaluasi di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan sejauh mana inovasi telah diintegrasikan dalam berbagai aspek pembangunan di Depok, termasuk dalam pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Inovasi dan kreativitas daerah adalah salah satu faktor kunci yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap inovasi dan kreativitas lokal, potensi ekonomi kota dapat dioptimalkan dengan mengembangkan produk-produk lokal unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan produk lokal juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi dan kreativitas daerah juga diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian

Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Depok. UMKM adalah salah satu pilar kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis. Berbagai program dan kebijakan yang mendukung UMKM diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan UMKM mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, pemasaran, hingga pelaporan keuangan.

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai salah satu motor penggerak dalam pemulihan ekonomi Kota Depok, selain karena kontribusinya terhadap PDRB juga kemampuannya menyerap tenaga kerja. Tercatat hingga tahun 2023, terdapat 3.524 orang WUB/Start Up dan 700 orang Perempuan Pengusaha hasil program Penciptaan Pengusaha/Start Up Baru dan Perempuan Pengusaha. Kota Depok terus mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru di bidang industri kreatif.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu adanya stimulus dan dorongan bagi UMKM agar dapat berkembang secara signifikan. Langkah-langkah strategis seperti penyediaan akses pembiayaan, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan kapasitas serta kualitas produk UMKM dapat menjadi intervensi yang diharapkan untuk mendukung UMKM naik kelas (scaling up). Dengan berbagai intervensi tersebut, diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang kuat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi

Pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan potensi ekonomi dan menarik investasi ke Kota Depok. Kota Depok memiliki empat potensi wisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata pendidikan. Dengan memanfaatkan berbagai potensi ini, Kota Depok memiliki kesempatan untuk menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan dari berbagai daerah. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas layanan bagi para pengunjung. Pemanfaatan potensi wisata di Kota Depok diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, perlu penyediaan fasilitas rekreasi dan ruang publik yang mudah diakses oleh warga. Ini mencakup pembangunan taman, hutan kota, lapangan olahraga, pusat kebugaran, dan area rekreasi lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menyediakan fasilitas tersebut,

tidak hanya memberikan ruang untuk rekreasi dan aktivitas fisik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial yang dapat membangun harmoni sosial antar warga di Kota Depok.

Pembentukan BUMD Baru

Perkembangan kota yang cepat serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi membuat adanya kebutuhan pengelolaan pelayanan publik dan pemanfaatan perkembangan ekonomi dengan pendekatan bisnis. Pembentukan BUMD menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkannya. Depok memiliki potensi yang besar di bidang properti seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan hunian. Depok juga berkembang pesat secara ekonomi yang membutuhkan dukungan ketersediaan pangan dengan stok yang terjaga, kualitas yang baik dan harga yang stabil. Pembentukan BUMD yang terkait dengan penyediaan pangan seperti BUMD pasar menjadi salah satu alternatif untuk mengelola potensi pemenuhan kebutuhan pangan dan pengelolaan pasar-pasar sebagai pusat perdagangan bahan pangan. BUMD dalam bentuk penyediaan pembiayaan kepemilikan properti dapat mendukung pemenuhan kebutuhan properti di Depok. Sementara untuk pengelolaan transportasi publik yang baik dan dengan dukungan pemerintah pusat, maka BUMD bidang pengelolaan transportasi publik juga menjadi salah satu alternatif.

Penguatan Perdagangan Retail dan Pusat Perbelanjaan

Salah satu tantangan yang dihadapi di era digital adalah ancaman terhadap perdagangan retail dengan makin maraknya perdagangan online. Fenomena banyaknya tenant yang tutup di pusat perbelanjaan dan semakin sepiunya mall-mall dan pusat perbelanjaan mulai terjadi di beberapa kota termasuk Depok. Jika tidak dilakukan intervensi khusus, bukan tidak mungkin keberadaan perdagangan retail terutama yang dilakukan oleh UMKM akan semakin terancam dan akan berdampak pada peningkatan pengangguran yang berasal dari PHK di sektor perdagangan retail ini.

Beberapa langkah kebijakan dan langkah strategis perlu dilakukan untuk memperkuat pedagang-pedagang kecil retail terutama yang menjadi tenant di pusat perbelanjaan maupun keberadaan pusat perbelanjaan itu sendiri. Memperbanyak event daerah dan Pemkot serta lembaga lokal di pusat perbelanjaan, pekan diskon dalam rangka kegiatan Kota Depok atau HUT Kota Depok, serta berbagai festival ke daerah yang melibatkan pedagang retail bisa menjadi beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kembali perdagangan retail dan menghidupkan pedagang UMKM di Kota Depok dari derasnya perdagangan online dengan produk yang berasal dari produk impor

Pengembangan Depok sebagai Pusat MICE Jabodetabek

Secara geografis Depok memiliki posisi yang sangat strategis yaitu bertetangga langsung dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional dan berada di kawasan Jabodetabek sebagai kawasan yang paling cepat perkembangannya. Depok juga berdekatan dengan Bogor dimana banyak instansi pemerintahan. Kawasan Jabodetabek selain sebagai kawasan bisnis dan pemerintahan juga menjadi kawasan riset dan pendidikan tinggi dengan hadirnya beberapa lembaga riset dan perguruan tinggi. Dari sisi bisnis, kawasan Jabodetabek juga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional, bahkan juga beberapa jenis industri masih berada di kawasan ini.

Depok dengan lokasinya yang strategis, dekat dengan metropolitan Jakarta dan menjadi lokasi lembaga pendidikan tinggi ternama membuatnya juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata berbasis Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE). Pengembangan wisata ini juga sejalan dengan wisata edukasi dengan dukungan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Depok. Apalagi di Depok juga saat ini banyak berkembang hotel berbintang yang didukung dengan sarana meeting dengan berbagai kapasitas termasuk untuk event besar. Dukungan bagi banyak event seni dan budaya menjadi salah satu cara dalam mengembangkan wisata berbasis MICE.

Pengembangan Depok sebagai pusat MICE di Jabodetabek juga untuk menjawab tantangan deindustrialisasi yang terjadi di Depok dimana sudah tidak bisa lagi mengembangkan industri manufaktur di wilayah Depok karena keterbatasan lahan. Area industri yang ada sebagian juga sudah beralih menjadi kawasan perumahan. Depok secara perlahan harus beralih dari sektor sekunder ke sektor tersier yaitu jasa termasuk melalui pengembangan pariwisata berbasis MICE yang didukung dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Pengembangan Urban Farming Berbasis Komunitas

Keterbatasan lahan di Depok dan mulai banyak beralihnya lahan pertanian serta lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman dan komersial menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan pangan di Depok. Oleh karena itu, selain melalui kerjasama dengan daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Urban Farming menjadi salah satu strategi dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk terutama untuk kebutuhan sayuran dan ikan air tawar. Depok memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan urban farming karena iklim yang sesuai serta masih tersedianya lahan untuk pengembangan urban farming ini.

Pengembangan urban farming juga dilakukan dalam kerangka pengembangan ekonomi hijau. Sehingga komoditas yang dikembangkan bukan hanya untuk kebutuhan pangan namun juga tanaman hias dan tanaman buah untuk pekarangan. Sehingga pengembangan ini juga bisa menyerap tenaga

kerja bagi angkatan kerja di Depok. Namun pengembangan urban farming ini perlu diperkuat dengan pendekatan komunitas agar keterlibatan masyarakat juga bisa lebih banyak melalui kelompok-kelompok yang terbentuk. Pendekatan komunitas ini juga akan memudahkan SKPD terkait dalam melakukan pembinaan yang lebih terarah serta tidak sekedar melaksanakan program tapi berorientasi pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja.

Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem telah menjadi agenda dunia dan nasional. Demikian pula dengan upaya penurunan stunting sebagian dari penyiapan generasi emas. Kemiskinan perkotaan menunjukkan kecenderungan peningkatan selama pandemi covid-19. Belum optimalnya upaya penurunan prevalensi stunting dalam 3 tahun terakhir justru menunjukkan prevalensi stunting yang meningkat pada satu tahun terakhir. Angka pengangguran yang meningkat dan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam setahun terakhir berpotensi menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.

Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan oleh daerah membutuhkan dukungan akurasi data jumlah, sebaran dan lokasi terjadinya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, ada persoalan data demografi dimana ada warga yang tidak tercatat dalam data demografi wilayah khususnya yang berasal dari penduduk pendatang. Data kemiskinan juga masih tersebar di beberapa SKPD yang memiliki program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan dan masih ditemukan adanya ketidaksamaan data. Intervensi program untuk pengentasan kemiskinan membutuhkan data yang akurat dalam bentuk by name by address sehingga lebih tepat sasaran. Upaya pengentasan kemiskinan juga membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri antar perangkat daerah.

2.3.4.4. Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan

Sebagai salah satu kota satelit yang terintegrasi dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya, Kota Depok menghadapi tantangan mobilitas yang semakin kompleks. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi memberikan tekanan signifikan terhadap infrastruktur transportasi, di mana kemacetan telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat perkotaan. Data BPS Kota Depok menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 2.884 angkot yang beroperasi, namun jumlah ini menurun drastis menjadi hanya 1.548 unit pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya kapasitas

layanan angkutan umum tradisional yang semakin tidak memadai dalam menghadapi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Sejalan dengan itu, jumlah penumpang angkutan umum juga mengalami penurunan tajam sejak pandemi, dengan tren tahunan menunjukkan kontraksi sebesar -73,22% pada 2020 dan -14,35% pada 2021, meskipun mulai pulih pada 2022 dan 2023. Pemulihan ini masih belum mampu mengimbangi kebutuhan perjalanan harian warga yang terus meningkat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan infrastruktur sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi krusial. Revitalisasi angkutan massal berbasis bus dan rel, pengadaan kendaraan bebas emisi seperti bus listrik (zero emission vehicle/ZEV), serta peningkatan konektivitas dengan moda transportasi publik seperti Transjakarta merupakan langkah nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Kota Depok juga perlu memperkuat sinergi lintas wilayah dengan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi secara regional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung walkability dan built environment yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda menjadi aspek penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Seperti penyediaan jalur sepeda, trotoar yang aman dan nyaman, serta konektivitas antar moda akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim.

Dengan merumuskan sistem transportasi yang efisien, terkoordinasi, dan inklusif, Kota Depok diharapkan mampu menciptakan layanan transportasi publik yang andal, mengurangi kemacetan, dan memberikan aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mempercepat transisi menuju kota berkelanjutan dan rendah karbon.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu

Pengelolaan sampah di Kota Depok masih menerapkan sistem open dumping dimana sampah hanya ditampung di satu tempat pembuangan akhir terbuka. Saat ini, ketinggian gunung sampah di TPA Cipayung sudah mencapai 30 meter, sementara batas tinggi maksimal adalah 10 meter. Total produksi sampah di Kota Depok mencapai 1.260 ton per hari, dengan rata-rata setiap warga menghasilkan 0,59kg sampah per hari.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu adalah isu strategis yang membutuhkan rumusan strategi dalam perencanaan pembangunan. Dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan perkotaan yang pesat, volume sampah di Kota Depok terus meningkat, menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terencana dan terpadu dalam manajemen

sampah menjadi sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah yang tidak optimal berdampak signifikan terhadap lingkungan global. Timbunan sampah organik yang menumpuk di TPA terbuka akan mengalami proses dekomposisi anaerobik yang menghasilkan gas metana (CH_4), sebagai penyebab utama pemanasan global karena kemampuannya memerangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida (CO_2). Emisi metana dari sektor limbah menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan efek rumah kaca dan mempercepat laju perubahan iklim. Kondisi ini tidak hanya memperburuk krisis iklim global, tetapi juga meningkatkan risiko bencana iklim di tingkat lokal, seperti meningkatnya suhu udara, pola hujan yang tidak menentu, dan potensi banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah.

Berkaitan hal diatas diperlukan pendekatan yang holistik untuk dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi strategi pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah, serta menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah dan praktik daur ulang. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Depok.

Antisipasi Banjir dan Genangan

Antisipasi terhadap banjir dan genangan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana di Kota Depok. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Depok (2021) luasan wilayah rawan bencana banjir dan genangan air yaitu 2.161,73 Ha. Ancaman ini berasal dari beberapa faktor seperti tingginya durasi dan intensitas curah hujan, meluapnya sungai karena saluran kecil dan kapasitas aliran yang tidak memadai, serta sistem drainase yang kurang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan yang komprehensif.

Upaya pencegahan harus meliputi pembenahan infrastruktur drainase dan jaringan pengendalian banjir yang mencakup beberapa sungai utama, pembangunan tanggul atau bangunan pengaman lainnya, perbaikan saluran air, serta sistem informasi untuk peringatan dini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran aktif dalam upaya pencegahan juga sangat diperlukan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap banjir dan genangan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang kota menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan Kota Depok yang dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan. Sehubungan hal tersebut perlu dioptimalkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga ruang kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkualitas. Konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum juga diperlukan agar ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dapat dipatuhi secara efektif.

Melalui pengendalian yang ketat, Kota Depok diharapkan dapat terhindar dari masalah tata ruang yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, Kota Depok diharapkan dapat menciptakan ruang kota yang nyaman dan berdaya dukung tinggi bagi penduduk serta perkembangan wilayahnya secara keseluruhan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi satu kesatuan dalam setiap agenda pembangunan di Kota Depok. Pembangunan Kota Depok harus memperhatikan kapasitas ekologi seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimilikinya. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Depok merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup kota yang merupakan generalisasi dari Indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kota Depok. IKLH merepresentasikan kualitas media lingkungan hidup yang terwakili dari kualitas air, air laut, udara, dan lahan. Nilai IKLH Kota Depok di Tahun 2024 adalah 54,55 atau masuk dalam kategori sedang, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 57,85 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan.

Kondisi lingkungan hidup di Kota Depok juga memiliki keterkaitan erat dengan kondisi iklim global. Krisis iklim telah menjadi permasalahan internasional yang mendesak, dan penanganannya secara eksplisit tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 13 yaitu Climate Action. Perubahan nomenklatur climate change menjadi climate crisis (Krisis Iklim) menjadi sebuah penanda bahwa permasalahan ini harus menjadi fokus perhatian dalam pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan peran aktif Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui keterlibatan internasional seperti keikutsertaan dalam Paris Agreement maupun pembuatan lembaga dan kebijakan terkait seperti pembuatan badan pembangunan rendah karbon indonesia.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok, diperlukan adanya berbagai langkah strategis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi secara seimbang seperti pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan kawasan lindung dan konservasi, pengembangan transportasi ramah lingkungan, investasi dalam infrastruktur hijau, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan komitmen yang kuat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Depok dapat mengarahkan pembangunannya menuju masa depan yang berkelanjutan dan lestari.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota merupakan aspek penting dalam pembangunan Kota Depok. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola daerah yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional diperlukan untuk dapat menjawab beragam permasalahan kota seperti adanya kawasan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses air bersih. Kerja sama dan sinergitas antara Pemerintah Kota Depok, sektor swasta, dan masyarakat melalui berbagai agenda pemberdayaan masyarakat juga diperlukan guna memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Pengembangan Transportasi Publik melalui Skema BTS

Sebagai kota metropolitan dan kota modern, Kota Depok belum didukung dengan transportasi publik yang cukup baik. Transportasi publik di Depok masih bertumpu pada angkutan kota (Angkot) yang jumlahnya cukup banyak dan melayani rute berbagai penjuru kota Depok maupun dari Depok ke wilayah Bogor dan Jakarta. Data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menyebutkan jumlah moda Angkot di Depok mencapai 3213 unit. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3954 unit. Kalau pun ada transportasi publik yang lebih modern dan daya angkut besar, masih dioperasikan oleh pemerintah daerah tetangga yaitu layanan bus Transjakarta yang sampai terminal Depok dan menghubungkan Depok dengan beberapa wilayah di Jakarta.

Kelemahan dari transportasi yang mengandalkan Angkot ini adalah daya angkut yang rendah, tidak adanya standar pelayanan minimum dan standar pengemudi yang melayani angkutan tersebut. Akibatnya tingkat keamanan dan keselamatan penumpang menjadi relatif rendah akibat pengemudi

angkot yang ugal-ugalan atau kriminalitas di dalam angkot tersebut. Daya angkut yang kecil juga menyebabkan jumlahnya menjadi banyak sehingga menimbulkan kemacetan. Tidak adanya standar pelayanan juga menyebabkan pengemudi berhenti di sembarang tempat dan tidak memberikan kenyamanan kepada penumpang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kota Depok akan mengoperasikan transportasi publik dalam bentuk bus sedang bersubsidi Biskita dengan skema Buy The Service (BTS). BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator. Dengan skema ini, pemerintah kota bekerja sama dengan operator mengoperasikan bis sedang dengan fasilitas AC dan pembayaran non tunai serta dengan pengemudi dan operasional yang memenuhi standar pelayanan minimum untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Pada tahap awal 15 bis akan dioperasikan tarif nol rupiah selama 6 bulan pertama serta baru melayani satu rute. Untuk selanjutnya akan dikembangkan rute lainnya dan tarif yang disubsidi oleh pemerintah kota dengan melalui Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi publik. Pengembangan transportasi publik modern dengan skema ini diharapkan berdampak pada roda perekonomian di daerah bisa lebih baik, transportasi berjalan lebih baik, masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih layak

Penguatan Konektivitas Timur-Barat

Selama ini, pengembangan Kota Depok lebih banyak berfokus pada koridor Utara-Selatan, terutama melalui Jalan Margonda Raya. Namun, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan pembangunan, Pemerintah Kota Depok akan mengembangkan konektivitas di sepanjang koridor Barat-Timur. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur baru yang akan menghubungkan wilayah Barat dan Timur Kota Depok secara lebih efektif. Pembukaan akses ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di koridor Utara-Selatan serta menarik lebih banyak investasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Kota Depok.

Pembangunan Terusan Juanda

Salah satu program pengembangan infrastruktur penting yang akan dilakukan adalah perpanjangan Jalan Juanda, yang dikenal sebagai Terusan Juanda. Program ini bertujuan untuk memperluas akses dari Jalan Juanda yang saat ini berakhir di wilayah tengah Depok, hingga menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). Dengan adanya Terusan Juanda, diharapkan terjadi

peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah tengah dan sekitar RSUD, yang tidak hanya akan memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan tersebut sebagai pusat kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan rasio Level of Service (LoS)

Pengembangan infrastruktur jalan perkotaan kota Depok menjadi bagian penting dalam penanganan kemacetan. Acuan keberhasilan penanganan kemacetan di Kota Depok salah satunya dengan meningkatkan rasio Level of Service (LoS). Pengembangan infrastruktur jalan dan tata ruang Kota Depok yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan rasio Level of Service (LoS) sebagai indikator utama penanganan kemacetan. LoS, yang mengukur efisiensi dan kenyamanan pergerakan lalu lintas, dapat ditingkatkan melalui perencanaan holistik yang menggabungkan perluasan jaringan jalan, penguatan transportasi publik berbasis rendah emisi, serta pengembangan infrastruktur pedestrian dan jalur sepeda untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan demikian, peningkatan LoS tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menciptakan kota yang lebih layak huni, tangguh, dan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.

Indeks Kota Hijau dengan UI Green-City Metric

Sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan, penggunaan Indeks Kota Hijau dengan UI Green-City Metric menjadi pertimbangan. Adapun enam (6) parameter penilaian tersebut (i) Penataan Ruang dan Infrastruktur; (ii) Energi dan Perubahan Iklim; (iii) Tata Kelola Sampah dan Limbah; (iv) Tata Kelola Air; (v) Akses dan Mobilitas dan; (vi) Tata Pamong atau Governance. Hal ini dikarenakan 6 (enam) parameter penilaian telah mengakomodir pembangunan infrastruktur perkotaan hingga tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan terukur ini, peningkatan Indeks Kota Hijau tidak hanya merefleksikan keberlanjutan ekologis, tetapi juga menciptakan kota yang inklusif, tangguh menghadapi perubahan iklim, dan selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

2.3.4.5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Kota Depok merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, diperlukan restrukturisasi berupa pengurangan tumpang tindih birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan optimalisasi implementasi teknologi informasi untuk mempercepat proses administratif. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kemenpan RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kota

Depok tahun 2022 mendapatkan Skor B dan meningkat pada tahun 2023 menjadi A- dengan nilai 82,14 dan meningkat Kembali di tahun 2024 menjadi 86,37 poin dengan kategori A. Capaian ini disebabkan oleh kenaikan indikator-indikator RB terutama indikator Zona Integritas (ZI). Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Depok mendapatkan predikat ZI melalui unit kerja yang dinilai oleh Tim Penilai Nasional/Kemenpan RB yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang holistik di Kota Depok diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pengembangan Kerja sama Antar Daerah dan Kerja sama Internasional

Pengembangan kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional memegang peran penting dalam memperluas potensi pembangunan Kota Depok. Kerja sama antar daerah memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kerja sama internasional membuka peluang untuk mendapatkan investasi asing, bantuan teknis, dan akses pasar global bagi produk-produk lokal. Kerja sama antar daerah dan internasional juga dapat memperluas cakupan program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Depok. Melalui upaya ini, Kota Depok dapat menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antar daerah dan kerja sama internasional diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kota Depok serta kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang.

Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Sinergi BUMD dan Dinas

Sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang berkualitas. BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan beragam layanan yang memengaruhi langsung kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Depok. BUMD yang didirikan dengan tujuan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dapat berperan dalam peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai sektor khusus dalam pembangunan daerah memastikan tersedianya layanan yang esensial seperti kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan lainnya. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, penerapan good corporate governance, dan penguatan sinergi antara BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah harus dilakukan

untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kota Depok.

Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Kota yang semakin berkembang dengan pesat dan perambahan penduduk juga tinggi terutama yang berasal dari pendatang, menyebabkan tuntutan penyediaan berbagai fasilitas di Kota Depok juga tinggi. Mulai dari transportasi publik yang lebih baik, perluasan jaringan air bersih, pengelolaan sampah yang lebih baik dan daya tampung pengolahan lebih besar, penyediaan perumahan layak dan terjangkau, penyediaan sarana olahraga, penambahan taman kota dan ruang publik serta penyediaan infrastruktur telekomunikasi digital yang mendukung kegiatan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini tentu saja membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk mempercepat penyediaan berbagai fasilitas tersebut, tidak bisa mengandalkan APBD Depok yang dalam APBD 2024 hanya memiliki anggaran belanja daerah sebesar Rp. 4,15 triliun.

Saat ini berbagai skema pembiayaan pembangunan telah banyak dikembangkan dan digunakan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan skema pembiayaan non APBD ini dilakukan untuk mempercepat penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk semakin membuat nyaman kota. Skema seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU/public private partnership telah dikembangkan di beberapa daerah dan mendapat pendampingan dari pemerintah pusat. Demikian pula dengan pembiayaan melalui pelibatan masyarakat seperti pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyediaan fasilitas umum, penugasan kepada BUMD misalnya untuk pembuatan fasilitas yang bisa bernilai komersil. Alternatif lainnya adalah melalui pemanfaatan kewajiban pengembang atas penerbitan Surat Izin Penunjukan Peruntukan Tanah (SIPPT) dalam penyediaan fasos-fasum maupun pendanaan yang berasal dari disinsentif pemanfaatan ruang seperti denda kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) seperti yang dilakukan di Jakarta. Kota Depok yang sedang berkembang dan banyak pengembang melakukan pembangunan gedung-gedung tinggi, potensial untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pemanfaatan ruang ini.

Tabel 2.111 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Ketercapaian akses sanitasi yang baik 2. Ketersediaan RTRW dan dokumen pendukung untuk mengembangkan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis 3. Potensi pengembangan cakupan layanan air minum perpipaan	1. Tingginya tingkat kerawanan banjir dan bencana alam lainnya 2. Kualitas lingkungan hidup masih relatif rendah 3. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau 4. Pengelolaan sampah yang belum optimal 5. Belum terintegrasinya tata ruang dan pembangunan Kawasan Jabodetabekjur 6. Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal 7. Transportasi publik yang belum memadai 8. Rendahnya akses air minum perpipaan 9. Kemantapan jalan belum terintegrasi dengan pengendalian genangan 10. Angkutan umum tradisional menurun 11. Rendahnya LoS 12. Ketaatan pada tata ruang dengan dokumen perencanaan yang tidak komprehensif	1. Belum optimalnya pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi layak dan pencemaran lingkungan hidup [E1] 2. Penurunan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air [E3] 3. Belum Optimalnya Penanganan dan Mitigasi Bencana Banjir, longsor dan Perubahan Iklim [E4] 4. Belum optimalnya perbaikan permukiman kumuh dan Lingkungan Hidup yang Terjaga Secara Berkelanjutan [E6] 5. Belum optimalnya Layanan Infrastruktur transportasi [E7] 6. Perlunya Peningkatan Konektivitas Wilayah [E13] 7. Kurangnya Lahan Ruang Terbuka Hijau [E18] 8. Pengendalian tata guna lahan [E19] 9. Efisiensi Energi [E20] 10. Penurunan Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara [E5] 11. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai [E15]	1. Perubahan iklim (SDG no. 13) 2. Pemerataan pembangunan dan keberadaan penduduk kelas menengah 3. Persaingan sumber daya alam 4. Urbanisasi dan pembangunan perkotaan serta transportasi berkelanjutan	1. Konektivitas dan infrastruktur dasar 2. Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana 3. Pemindahan Ibu Kota Negara	1. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar 2. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 3. Keberlanjutan Penataan Ruang	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan 1. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 3. Antisipasi Banjir dan Genangan 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota 5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Ekonomi Kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas 2. Penciptaan wirausaha baru belum optimal. 3. Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas 4. Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja 5. Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. 6. Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi	1. Rendahnya Kualitas SDM, Tingginya Pengangguran dan masih adanya kemiskinan [E12] 2. Pembangunan Pusat Kegiatan UMKM [E17] 3. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi [E8]	SDG's sebagai kelanjutan dari tujuan pembangunan MDG	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; Implementasi dari kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; Kebijakan pengembangan industri pengolahan; Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; Percepatan Penghapusan kemiskinan yang ekstrem	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi: 1. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi 2. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah 3. Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi 4. Perluasan Kesempatan Kerja 5. Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian 6. Keterjangkauan dan Stabilitas Harga 7. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi
Bonus demografi dan SDM produktif	Belum meratanya akses pendidikan dan ketimpangan kualitas SDM	1. Kesenjangan akses dan kualitas layanan dasar 2. Penambahan Infrastruktur Pendidikan [E14] 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera [E9] 4. Permasalahan sosial & Ketimpangan Masyarakat [E11] 5. Pengendalian Jumlah Penduduk [E16]	1. SDG 4: Quality Education 2. SDG 4: Pendidikan yang Berkualitas 3. Bonus Demografi 2030	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. Kualitas pendidikan belum merata 3. SDM belum siap kerja 4. Gizi buruk dan stunting 5. Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi	1. Kebutuhan pendidikan vokasi berbasis lokal 2. Kesenjangan Kualitas SDM Antarwilayah (Urban-Rural) 3. Rendahnya Link and Match Pendidikan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) 4. Tingginya Angka Stunting dan Gizi	Peningkatan Kualitas Manusia: 1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Aksesibilitas layanan kesehatan 3. Pengentasan kemiskinan 4. Penurunan stunting.

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
					Buruk di Beberapa Wilayah	
Peningkatan literasi dan keterbukaan informasi publik	Kurangnya akses terhadap perpustakaan dan arsip daerah	1. Minimnya budaya literasi dan dokumentasi sejarah 2. Partisipasi masyarakat dalam akses informasi publik	1. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions 2. SDG 16: Institusi yang Damai, Adil, dan Kuat	1. Kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah 2. Rendahnya akses ke platform teknologi 3. Konflik sosial & disintegrasi sosial 4. Tantangan etika digital di kalangan pemuda 5. Revolusi mental dan budaya kerja produktif	1. Keterbatasan fasilitas literasi di tingkat kelurahan 2. Lemahnya Literasi Digital dan Daya Saing Inovasi Lokal 1. Kesiapan infrastruktur dan regulasi digitalisasi layanan 2. Ketimpangan Akses Digital dan Infrastruktur TIK	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota 1. Penguatan perlindungan lansia, 2. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas, 3. Ketahanan pangan, dan 4. Keamanan kota. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 1. Reformasi birokrasi, 2. Kerja sama antar daerah, serta 3. Optimalisasi pelayanan publik
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik	Layanan publik belum sepenuhnya terintegrasi secara digital	1. Reformasi Birokrasi & Penegakan Hukum [E2] 2. Infrastruktur dan SDM pendukung layanan digital belum optimal 3. Kemitraan untuk Mencapai tujuan [E10] 4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi dalam mendukung setiap rencana program [E21]				

Sumber: KLHS

2.3.5. Keterkaitan antara isu strategis pembangunan Kota Depok dengan visi kepala daerah terpilih

Keterkaitan antara isu strategis pembangunan Kota Depok dengan visi kepala daerah terpilih, "Bersama Depok Maju," dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia, Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Keterkaitan dengan Visi Kepala Daerah: Visi "Bersama Depok Maju" menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berkualitas. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi prioritas utama untuk menciptakan generasi yang cerdas dan kompetitif. Selain itu, aksesibilitas pelayanan kesehatan yang baik akan mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yang sejalan dengan misi kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Kota, Isu ini mencakup penguatan perlindungan lansia, pengelolaan kependudukan yang berkualitas, ketahanan pangan, dan keamanan kota. Keterkaitan dengan Visi Kepala Daerah: Visi "Bersama Depok Maju" mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu pilar utama. Penguatan perlindungan lansia dan peningkatan kualitas keluarga merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan dan keterjangkauan harga pangan akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Depok.
- 3) Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi, Isu ini meliputi perbaikan iklim investasi, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan UMKM. Keterkaitan dengan Visi Kepala Daerah: Visi kepala daerah terpilih menekankan pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dengan meningkatkan iklim investasi dan memberikan dukungan kepada UMKM, Kota Depok dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi untuk mendorong inovasi dan kreativitas daerah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4) Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan, isu ini mencakup pengembangan sistem transportasi, pengelolaan sampah terpadu, antisipasi banjir, dan perlindungan lingkungan hidup. Keterkaitan dengan Visi Kepala Daerah: Visi "Bersama Depok Maju" menekankan percepatan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pengembangan sistem transportasi yang efisien akan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mengurangi kemacetan. Selain itu, pengelolaan sampah terpadu dan upaya antisipasi banjir akan mendukung

keberlanjutan lingkungan kota, sejalan dengan komitmen kepala daerah untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman bagi warganya.

- 5) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Isu ini berfokus pada reformasi birokrasi, kerja sama antar daerah, serta optimalisasi pelayanan publik. Keterkaitan dengan Visi Kepala Daerah: Visi kepala daerah terpilih menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah langkah penting dalam mewujudkan visi "Bersama Depok Maju." Dengan mengoptimalkan sinergi antara BUMD dan dinas terkait, pemerintah Kota Depok dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan mengaitkan isu-isu strategis tersebut dengan visi kepala daerah terpilih, diharapkan setiap program dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Depok dapat berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan Kota Depok yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.3.5. Isu Strategis Kota Depok Tahun 2026

Isu strategis Pembangunan Kota Depok Tahun 2026 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia
 - a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - b. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
 - c. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
- 2) Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga
 - b. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keterjangkauan Harga Pangan
 - c. Pemberdayaan kaum rentan dan penanganan permasalahan sosial
- 3) Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi
 - a. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi
 - b. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - c. Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah
 - d. Penguatan Peran UMKM dalam Perekonomian
 - e. Pengembangan Pariwisata dan Fasilitas Rekreasi
 - f. Pengembangan MICE
 - g. Pengembangan Urban Farming Berbasis Komunitas
- 4) Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan
 - a. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan

- b. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Termaju
- c. Antisipasi Banjir dan Genangan
- d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
- e. Pembangunan Rendah Karbon
- f. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Penguatan konektivitas Timur-Barat

5) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Reformasi Birokrasi
- b. Pengembangan Alternatif Pembiayaan Pembangunan

DRAFT



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah ini disajikan capaian kinerja perekonomian Kota Depok tahun 2024, prospek perekonomian tahun 2025 serta kebijakan pembangunan perekonomian daerah tahun 2026. Adapun kerangka keuangan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan ini akan menjadi dasar untuk mengalokasikan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tahun 2026 masih mengacu pada rancangan akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2024, perkembangan dan prospek perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global serta pemenuhan janji Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025-2030.

3.1.1. Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global diperkirakan memburuk akibat serangan Israel ke Iran yang mulai terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025. Sementara perekonomian duniapun masih tertekan dengan perang Rusia-Ukraina dan pengenaan tarif oleh Presiden Donald Trump. Perang Rusia-Ukraina telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia, sedangkan Trump telah memperlakukan tarif kepada 160 negara di dunia.

Pertumbuhan ekonomi dunia, baik di negara-negara maju maupun ASEAN akan semakin tertekan. Inflasi dunia yang mencapai 4,94 persen pada tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat. Adapun dampak dari perang Iran-Israel akan merambat ke seluruh penjuru dunia. Berikut beberapa perkiraan dampak utamanya:

1. Lonjakan Harga Minyak

Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar dunia, dan konflik ini mengancam jalur distribusi

utama seperti Selat Hormuz. Harga minyak mentah Brent melonjak hingga lebih dari US\$ 74 per barel, bahkan sempat naik 13% dalam satu pekan. Ini akan memicu inflasi global karena energi adalah komponen penting dalam hampir semua sektor ekonomi.

2. Gangguan Rantai Pasok Global

Serangan terhadap infrastruktur migas dan ancaman terhadap jalur pelayaran seperti Laut Merah dan Terusan Suez membuat banyak kapal harus memutar lewat Afrika, menambah waktu dan biaya pengiriman hingga US\$ 1 juta per perjalanan. Ini memperlambat distribusi barang dan menaikkan harga logistik.

3. Ketidakpastian Pasar Keuangan

Investor global menjadi lebih berhati-hati sehingga akan menguncang bursa saham. Hal ini akan mengakibatkan nilai tukar berfluktuasi dan aset-aset safe haven seperti emas dan dolar AS mengalami lonjakan permintaan.

4. Ancaman Perlambatan Ekonomi

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan setiap kenaikan 10% harga minyak dapat menambah inflasi negara maju sebesar 0,4%. Hal ini dapat memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

5. Efek Domino ke Negara Berkembang

Negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia menghadapi tekanan fiskal karena subsidi energi membengkak. Selanjutnya ada kekhawatiran bahwa defisit anggaran bisa melebar jika harga minyak terus naik.

Sejak pecahnya perang Iran-Israel sejumlah lembaga dan ekonom memperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) global akan mengalami penurunan sebesar 0,2 hingga 0,4 poin persentase dibandingkan proyeksi awal sebelum konflik. Sebelum terjadi konflik, proyeksi LPE global berada di kisaran 2,9%–3,1%. Dengan adanya lonjakan harga minyak, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian pasar keuangan, proyeksi tersebut kini direvisi menjadi sekitar 2,5%–2,8%.

3.1.2. Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan baru sejak terjadinya perang Iran-Israel, dimana tantangan ini datang disaat Indonesia masih menunggu hasil negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif *resiprokal*. Negosiasi ini fokus pada meredam dampak kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sejak April 2025 yang keputusan akhir hasil negosiasi akan ditentukan pada atau sebelum 8 Juli 2025. Berikut poin-poin penting dari isi negosiasi tersebut adalah :

1. Penyesuaian tarif impor terhadap produk AS secara selektif.
2. Peningkatan impor LPG dan LNG dari AS sebagai bentuk kerja sama energi.
3. Revitalisasi perjanjian dagang seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
4. Peningkatan investasi dan ekspor Indonesia ke pasar AS.
5. Kerja sama di sektor strategis seperti energi, teknologi, dan kesehatan.

Akibat konflik Iran-Israel, sejumlah lembaga internasional dan analis dalam negeri telah menurunkan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Indonesia pada tahun 2025. Sebelum konflik terjadi proyeksi LPE Indonesia berada di kisaran 5,0%–5,2%, namun setelah terjadi konflik Bank Dunia menurunkan proyeksi menjadi 4,7%. IMF juga merevisi LPE Indonesia ke angka 4,7%. Jika konflik ini terus bereskalasi yang mengakibatkan harga minyak dunia menembus US\$100 per barel, beberapa analis memperkirakan LPE Indonesia bisa turun hingga 4,0%.

Adapun faktor yang menyebabkan turunnya proyeksi tersebut adalah :

- Lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz menekan APBN dan subsidi energi.
- Inflasi meningkat, terutama pada sektor transportasi dan pangan.
- Pelemahan daya beli masyarakat dan potensi penurunan investasi asing langsung (FDI).
- Ketidakpastian global membuat investor menahan ekspansi dan konsumsi domestik melambat.

Inflasi Indonesia pada tahun 2024 tergolong sangat rendah dan terkendali, bahkan mencatatkan rekor sebagai yang terendah sepanjang sejarah sejak 1958. Secara tahunan (year-on-year), inflasi Indonesia mencapai 1,57 persen, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya inflasi Indonesia di tahun 2024 adalah :

- Harga pangan stabil terutama setelah lonjakan pada 2022–2023.
- Deflasi di sektor transportasi yang menekan laju inflasi umum.
- Permintaan domestik melemah terutama dari kelas menengah akibat tekanan daya beli dan kebijakan moneter ketat.

Kondisi yang dihadapi Indonesia harus menjadi perhatian dalam mengambil kebijakan terkait inflasi, karena melemahnya permintaan domestik mencerminkan melemahnya konsumsi rumah tangga dan perlambatan sektor riil. Melemahnya konsumsi rumah tangga (RT) bisa menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian, terutama di negara seperti Indonesia, di mana konsumsi RT menyumbang lebih dari 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen diperkirakan tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari Middle Income Trap sebelum 2045, sehingga diperlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai dengan 7 persen pada tahun 2025-2045. Berlandaskan pada Asta Cita, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 8 persen dalam periode 2025-2029 yang didorong

melalui transformasi perekonomian sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas untuk peningkatan output potensial dan pertumbuhan ekonomi.
2. Sumber-sumber pertumbuhan baru yang berasal dari proyek prioritas.
3. Peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan proyek prioritas.

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah pada tahun 2026 mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dimana jalan tol Depok-Antarasi termasuk ruas jalan tol Bojonggede-Salabenda terdapat dalam daftar proyek tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2025 tercatat 4,87 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2024 sebesar 5,02 persen (yoy). PDB triwulan I 2025 didukung konsumsi rumah tangga sejalan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Investasi tumbuh sejalan dengan realisasi penanaman modal, sementara ekspor tumbuh ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan ekspor jasa.

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan, Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan, serta Pertanian mencatatkan kinerja yang baik. Perkembangan terkini pada triwulan II 2025 menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi.

Sebagai akibatnya perang Iran-Israel, meskipun ekonomi Indonesia masih tumbuh, tekanan eksternal ini membuat LPE Indonesia pada Triwulan II 2025 bergerak moderat, diperkirakan hanya naik tipis dibanding Triwulan I (4,87% yoy), dengan kontribusi utama tetap datang dari konsumsi domestik dan belanja pemerintah yang memperbesar subsidi energi untuk menahan dampak kenaikan harga minyak. Perang Iran-Israel telah menjadi salah satu faktor global yang menghambat momentum akselerasi ekonomi Indonesia di triwulan kedua 2025, meskipun stabilisasi fiskal dan program stimulus pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan tetap positif.

Eskalasi konflik Iran-Israel diperkirakan akan membawa dampak lanjutan ke tahun 2026 berupa tingginya harga minyak dunia dan meningkatnya biaya logistik global, yang berpotensi menekan daya beli, mempersempit ruang fiskal untuk subsidi energi, dan menahan akselerasi pertumbuhan.

3.1.3. Kondisi dan Prospek Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen,

pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan Provinsi Jawa Barat dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026. Adapun target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%, c-to-c)	4,95	4,96 – 5,37	5,15 - 6,20
2	Laju Inflasi	(%, y-o-y)	1,67	2,5 + 1	2,5 + 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	(%)	41,39	41.15 - 41.38	40,10 - 42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	(%)	3,07	2,88	3,21 - 3,46
5	PMTB (% PDRB)	(%)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(%)	21,53	26,3	20,50 - 20,54

Sumber : Ranhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Proyeksi terhadap LPE Jawa Barat ditahun 2026 adalah sebesar 5,15 - 6,20 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh stabilitas perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Terkendalnya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalnya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen ditahun 2024, tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045.

Menurut Berita Resmi Statistik BPS, LPE Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025 tumbuh 4,93 persen, meningkat dibandingkan triwulan I tahun 2024. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 17,96 persen. Dari sisi pengeluaran didukung oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 5,37 persen. Sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth, SOG*) secara (y-o-y) dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 1,76 persen. Dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 3,06 persen.

Pada tahun 2026, Industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub

sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Selain Industri, sektor pariwisata Jawa Barat diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting untuk mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan.

Nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Upaya mencapai target nilai investasi dibarengi dengan penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui implementasi *green economy* dan *blue economy*.

3.1.4. Kondisi dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada perekonomian dunia, nasional dan Provinsi Jawa Barat. Kondisi perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi konflik baru akibat perang Iran-Israel. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026, IMF memperkirakan pertumbuhannya mencapai 3,0 %, sedangkan Bank Dunia memprediksi pertumbuhannya akan stagnan di kisaran 2,7 %.

Adapun untuk proyeksi LPE Indonesia ditahun 2026, Bank Indonesia memproyeksikan pada kisaran 4,7–5,5 % sedangkan menurut IMF, LPE Indonesia akan berada pada sekitar 4,7% turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1% di awal 2025. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15-6,20 persen pada tahun 2026

Untuk menetapkan target Indikator Makro Ekonomi Kota Depok ditahun 2026, selain melihat kondisi, prospek dan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian dunia, nasional dan Provinsi Jawa Barat, juga memperhatikan capaian indikator pembangunan ekonomi Kota Depok ditahun 2024 yang terdiri dari :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
2. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB);
3. Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita (PDRB per Kapita);
4. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka;
6. Indeks Gini;

7. Tingkat Inflasi;
8. Tingkat Kemiskinan;
9. Prevalensi Stunting;
10. Indeks Pembangunan Manusia;
11. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berikut ini adalah capaian kinerja indikator perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2020-2024.

3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Tabel berikut memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB Kota Depok atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,56	0,32	4,46	3,63	8,44
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	- 1,33	3,04	4,19	4,27	5,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	- 2,26	9,78	5,37	6,83	4,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,45	6,93	4,93	9,40	10,11
6	Konstruksi	- 2,36	5,61	4,99	4,91	5,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	- 7,43	4,25	4,80	4,82	4,61
8	Transportasi dan Pergudangan	- 1,24	0,28	10,52	5,62	15,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 1,39	- 1,72	9,92	7,59	0,01
10	Informasi dan Komunikasi	30,36	7,68	7,99	7,98	11,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	5,87	1,59	5,88	5,17
12	Real Estat	1,97	9,95	9,48	6,17	6,24

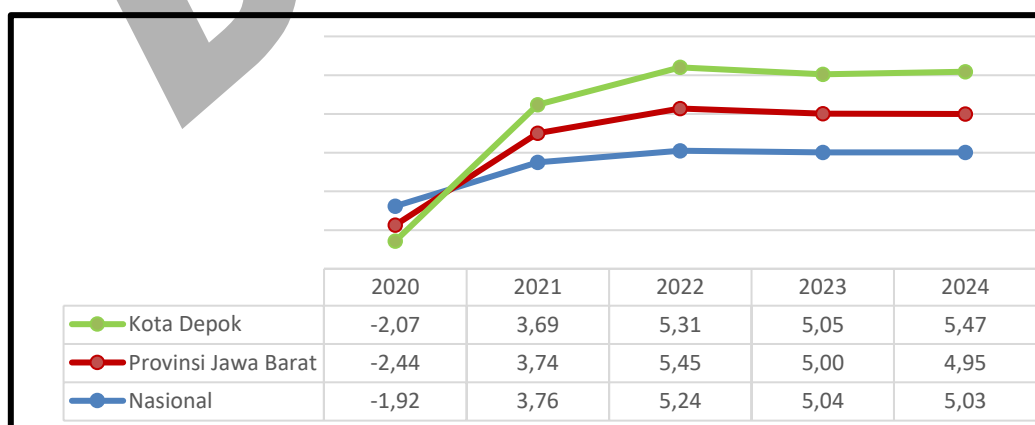
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
13	Jasa Perusahaan	- 10,94	8,57	8,40	7,13	1,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 7,24	- 2,33	0,93	2,93	5,73
15	Jasa Pendidikan	7,52	0,16	4,91	3,69	6,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,38	8,08	5,43	5,40	4,31
17	Jasa lainnya	- 4,87	1,42	9,73	7,84	0,06
Produk Domestik Regional Bruto		-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2025

Laju Perumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2024 mencapai 5,47%, berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana LPE Provinsi Jawa Barat turun dari 5% ke 4,95%. Penurunan LPE juga terjadi ditingkat nasional, dimana pada tahun 2023 mencapai 5,05% dan pada tahun 2024 turun menjadi 5,03%.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun 5 tahun (2020 – 2024) dapat dilihat pada grafik diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok menuju ke arah tren yang positif. Setelah sempat pada tahun 2020 capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok berada bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional, maka pada tahun 2024 nilai pertumbuhan ekonomi Kota Depok Kembali ke tren semula yaitu konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat (4,95%) dan nasional (5,03%), sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi secara umum dibagi menjadi tiga

sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.

Sektor primer mencakup pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sektor ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Sektor sekunder meliputi industri manufaktur dan konstruksi. Sektor ini mengolah bahan mentah dari sektor primer menjadi produk bernilai tambah dan sektor tersier mencakup jasa seperti perdagangan, transportasi, perbankan, pendidikan, dan pariwisata. Sektor ini berperan dalam distribusi barang dan layanan kepada masyarakat.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Secara serentak ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 70,84 persen terhadap total PDRB Kota Depok tahun 2024.

Sektor primer di Kota Depok ditopang hanya oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang pada tahun 2024 berkontribusi sebesar 1,35%. Kenaikan pertumbuhan sektor ini sangat besar dan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun dari 2020-2024, dimana pada tahun ini mencapai 8,44%. Sektor sekunder berkontribusi pada angka 50,24% dalam pembentukan PDRB Kota Depok, sedangkan sektor tersier berkontribusi sebesar 48,41%.

Lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Depok tahun 2024 yaitu sebesar 29,16 persen kemudian secara berturut turut dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,96 persen, dan Konstruksi sebesar 20,72 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Pada Tahun 2024 beberapa lapangan usaha yang kontribusinya terhadap PDRB terjadi kenaikan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Peningkatan aktivitas urban farming di Kota Depok memberikan kontribusi pada peningkatan laju lapangan usaha pertanian.

Beroperasinya jalan tol Depok-Antasari, tol Cinere-Jagorawi, tol Cimanggis-Cibitung, dan LRT (Light Rail Transit) Jakarta-BogorDepok-Bekasi berpengaruh pada naiknya kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024**

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Sektor Primer	1,37	1,34	1.31	1.31	1.35
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1,34	1.31	1.31	1.35
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-

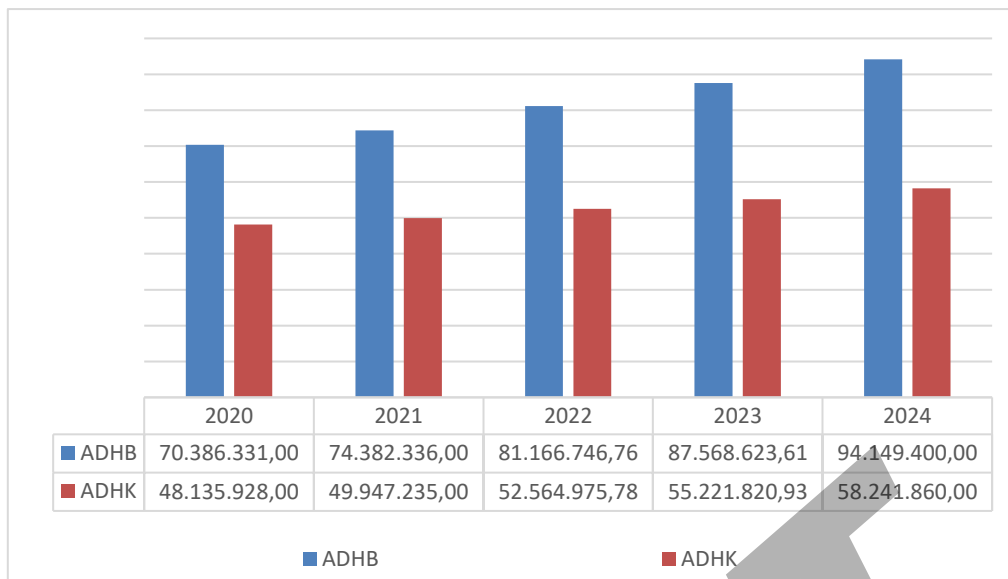
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
B	Sektor Sekunder	49,90	50,40	50,19	50,16	50,24
3	Industri Pengolahan	28,89	29,18	28,90	28,86	29,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	20,64	20,84	20,92	20,93	20,72
C	Sektor Tersier	48,72	48,31	48,50	48,51	48,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,21	21,18	21,11	21,11	20,96
8	Transportasi dan Pergudangan	4,36	4,21	4,44	4,45	4,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	3,93	4,01	4,02	3,81
10	Informasi dan Komunikasi	2,35	2,37	2,32	2,32	2,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,25	4,31	4,31	4,23
12	Real Estat	1,69	1,76	1,82	1,82	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,38	2,20	2,19	2,20
15	Jasa Pendidikan	3,41	3,33	3,29	3,28	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,16	1,13	1,13	1,14
17	Jasa lainnya	3,69	3,54	3,67	3,67	3,56
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2025 (data diolah)

3.1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Nilai PDRB dapat memberikan gambaran kemampuan perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto tersaji dalam dua besaran, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah gambaran PDRB Kota Depok dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Gambar 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2020 – 2024
(dalam juta rupiah)**



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Nilai PDRB merupakan cerminan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 94.149,4 miliar rupiah atau 94,15 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 6.580,92 miliar rupiah atau 6,58 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 87.568,62 miliar rupiah atau 87,57 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 55.221,82 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 58.241,86 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Depok mengalami peningkatan ekonomi sekitar 5,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan peningkatan produksi hampir semua lapangan usaha tanpa dipengaruhi inflasi.

3.1.4.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 3.4. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
ADHB	34,36	35,66	38,40	40,82	43,51
ADHK	24,50	23,94	24,87	25,74	26,92

Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah Bappeda)

PDRB per kapita Kota Depok Tahun 2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar 43,51 juta rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 40,82 juta rupiah. Jika menghilangkan pengaruh inflasi, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan, yakni dari 25,74 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 26,92 juta rupiah pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar 4,58 persen secara riil.

3.1.4.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian secara signifikan. Sumber-sumber perekonomian yang dihasilkan dari kreativitas berbasiskan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari menunjukkan tren yang terus meningkat baik dari sisi penyediaan dan kebutuhan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015, telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif secara nasional, yaitu meliputi: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi, dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Riset dan Pengembangan; dan (16) Seni Rupa.

Dalam rangka mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan sektor ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Depok memerlukan dukungan berbagai macam Indikator Ekonomi Kreatif. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif. Melalui penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif ini dapat diketahui besarnya peran masing-masing sektor dalam ekonomi kreatif dalam roda perekonomian Kota Depok, sehingga dapat ditentukan skala prioritas pengembangan ekonomi kreatif di Kota Depok.

Sektor ekonomi kreatif di Kota Depok mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB setiap sub sektor ekonomi kreatif yang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019-2023. Nilai PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp 10.934,66 miliar menjadi Rp 12.999,99 milyar di tahun 2023 atau menjadi

peningkatan sebesar 18,89% dalam kurun waktu 4 tahun.

Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2023 (Rp Juta)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Arsitektur	27,862	26,643	27,258	30,992	33.526
2	Desain Interior	1,576	1,507	1,542	1,753	1.896
3	Desain Komunikasi Visual	1,002	958	981	1,115	1.206
4	Desain Produk	4,701	4,495	4,599	5,229	5.656
5	Film, Animasi, Video	40,518	37,286	40,856	46,597	50.356
6	Fotografi	31,577	30,196	30,893	35,125	37.996
7	Kriya	1,735,453	1,733,590	1,849,632	1,998,581	2.153.408
8	Kuliner	6,920,778	6,928,636	6,966,685	7,525,592	8.153.165
9	Musik	23,528	23,503	25,076	25,280	27.319
10	Fashion	1,700,715	1,698,890 1	1,812,609	1,853,714	1.999.231
11	Aplikasi dan Game Developer	149,157	142,634	145,924	165,916	179.480
12	Penerbitan	199,203	198,989	212,309	214,037	231.299
13	Periklanan	20,087	18,485	20,255	23,101	25.794
14	Televisi dan Radio	12,705	16,699	17,737	18,956	20.485
15	Seni Pertunjukan	44,093	42,164	43,137	49,047	53.057
16	Seni Rupa	21,706	20,756	21,235	24,145	26.118
	PDRB Ekonomi Kreatif	10,934,662	10,925,433	11,220,727	12.019.180	12.999.992

Sumber : Diskominfo Kota Depok, (data diolah 2024)

3.1.4.4.1. Struktur Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB wilayah. Pada tahun 2023, sektor Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB ADHB Kota Depok sebesar 14,85% atau relatif sama dibanding tahun 2022 yang mencapai 14,80%. Hal ini disebabkan proporsi peningkatan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif relatif sama dibanding peningkatan PDRB sektor ekonomi lainnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu memberikan perhatian lebih pada sektor Ekonomi Kreatif untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.6. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023 (Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Arsitektur	0,25	0,24	0,24	0,26	0,27
2	Desain Interior	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Desain Komunikasi Visual	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Desain Produk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Film, Animasi, Video	0,37	0,34	0,36	0,39	0,39
6	Fotografi	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29
7	Kriya	15,87	15,87	16,48	16,63	16,56
8	Kuliner	63,29	63,42	62,09	62,61	62,72
9	Musik	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21
10	Fashion	15,55	15,55	16,15	15,42	15,38
11	Aplikasi dan Game Developer	1,36	1,31	1,30	1,38	1,38
12	Penerbitan	1,82	1,82	1,89	1,78	1,78
13	Periklanan	0,18	0,17	0,18	0,19	0,20
14	Televisi dan Radio	0,12	0,15	0,16	0,16	0,16
15	Seni Pertunjukkan	0,40	0,39	0,38	0,41	0,41
16	Seni Rupa	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20
	PDRB Ekonomi Kreatif	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kota Depok, 2024

Secara umum, struktur Ekonomi Kreatif berdasarkan komposisinya terhadap pembentukan PDRB relatif tidak mengalami perubahan selama periode 2019-2023. Tiga sub sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok ADHB adalah sub sektor kuliner, sub sektor kriya dan sub sektor fashion.

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa sub sektor kuliner adalah sub sektor yang paling mendominasi perekonomian kreatif di Kota Depok, berkontribusi sekitar 62,72 persen dari total PDRB Sektor Ekonomi Kreatif ADHB tahun 2023. Sub sektor Kuliner merupakan kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Sektor lainnya yang berkontribusi besar adalah sub sektor kriya dan fashion. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sub sektor tersebut yaitu kuliner, kriya dan fashion perlu mendapatkan perhatian khusus, karena terjadinya fluktuasi pada ketiga sub sektor ini akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum.

3.1.4.4.2. Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi di Kota Depok adalah mengatasi pengangguran disamping pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh Sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 sejumlah 120.722 orang lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 114.992 orang (Tabel 3.9). Peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi di Kota Depok akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, dimana seluruh sub sektor Ekonomi Kreatif mengalami penurunan, khususnya penurunan pada tiga sub sektor yang berkontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sub sektor kuliner, kriya dan fesyen.

Tabel 3.7. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2019 – 2023 (Orang)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Arsitektur	118	111	114	120	126
2	Desain Interior	115	108	111	117	123
3	Desain Komunikasi Visual	119	112	115	123	131
4	Desain Produk	148	140	143	147	150
5	Film, Animasi, Video	1.089	911	991	1.075	1.162
6	Fotografi	1.679	1.584	1.619	1.703	1.778
7	Kriya	13.543	12.540	12.335	12.840	12.893
8	Kuliner	80.195	57.645	57.961	60.489	63.871
9	Musik	846	783	786	826	936
10	Fashion	26.086	24.154	25.771	27.900	29.198
11	Aplikasi dan Game Developer	1.221	1.152	1.178	1.239	1.294
12	Penerbitan	3.051	2.825	2.833	2.976	3.369
13	Periklanan	361	302	330	359	385
14	Televisi dan Radio	189	136	146	158	171
15	Seni Pertunjukan	3.059	2.886	2.951	3.105	3.242
16	Seni Rupa	1.787	1.686	1.723	1.813	1.893
Jumlah Tenaga Kerja		133.606	107.075	109.108	114.992	120.722

Sumber : Diskominfo Kota Depok, (data diolah 2024)

Sementara itu, jumlah unit usaha Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 sebanyak 48.204 unit usaha lebih banyak dibanding tahun 2022 sebanyak 45.807 unit usaha (Tabel 6). Adanya kebijakan pelonggaran terhadap mobilitas penduduk dan social distancing untuk mengurangi dampak covid-19 pada tahun 2021 dibanding periode awal Covid-19 di tahun 2020, bahkan di tahun 2022 tidak ada lagi pembatasan mobilitas penduduk berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya

peningkatan aktivitas

Usaha di Sektor Ekonomi Kreatif terutama sub sektor kuliner dan fesyen yang memiliki jumlah unit usaha paling banyak dalam struktur Ekonomi Kreatif di Kota Depok. Secara keseluruhan daya serap tenaga kerja usaha sektor ekonomi kreatif di Kota Depok tahun 2023 menyerap sekitar 3-5 orang tenaga kerja per unit usaha.

Tabel 3.8 Jumlah Unit Sektor Ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2023

No	Uraian	2023
1	Arsitektur	42
2	Desain Interior	41
3	Desain Komunikasi Visual	43
4	Desain Produk	50
5	Film, Animasi, Video	232
6	Fotografi	556
7	Kriya	2.79
8	Kuliner	31.936
9	Musik	312
10	Fashion	9.732
11	Aplikasi dan Game Developer	67
12	Penerbitan	842
13	Periklanan	55
14	Televisi dan Radio	33
15	Seni Pertunjukkan	648
16	Seni Rupa	456
Jumlah Tenaga Kerja		45.807

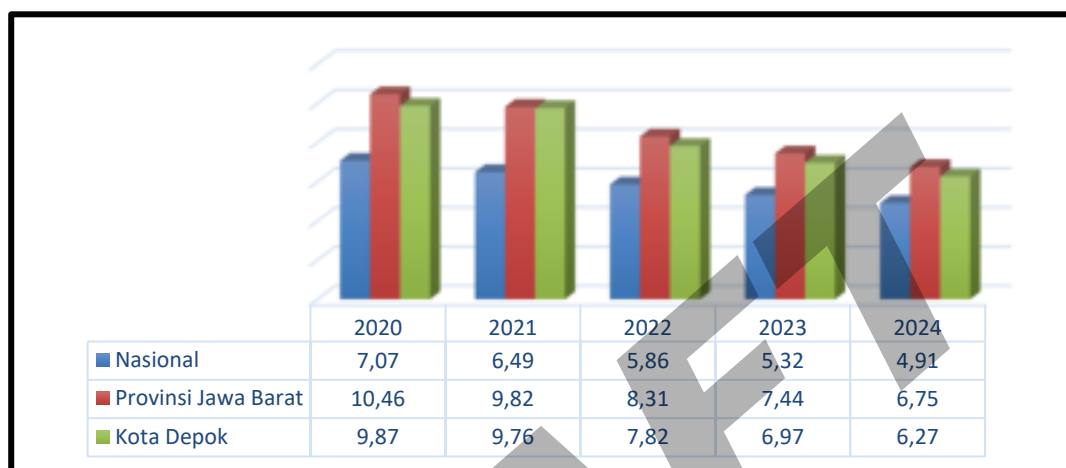
3.1.4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT Kota Depok hasil Sakernas bulan Agustus 2024 sebesar 6,27%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Sejak tahun 2022, angka TPT Kota Depok menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,85% dibandingkan dengan Agustus 2022 (7,82%). TPT yang mengalami kenaikan pada 4 (empat) tahun terakhir jika dibandingkan tahun 2019, disebabkan dampak dari pandemi Covid - 19 yang berpengaruh

sangat kuat terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Namun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengurangi pengangguran telah menunjukkan hasil yang signifikan. Program pelatihan kerja, pelatihan produktivitas tenaga kerja, dan program penciptaan wirausaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja sangat mendukung capaian ini.

Gambar 3.3. Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah dengan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber :BPS Kota Depok Tahun 2025, (data diolah)

Angka TPT Kota Depok selama kurun waktu lima tahun selalu berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan selalu berada di atas capaian Angka TPT nasional. TPT Kota Depok hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,27 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 10,04 persen dibandingkan dengan angka TPT tahun 2023.

Tabel 3.9. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Depok, Tahun 2020 – 2024

Status keadaan Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.869,32	1.927,76	1.986,88	1.646,30	1.666,42
Angkatan Kerja	1.195,63	1.207,11	1.258,74	1.033,24	1.048,09
Bekerja	1.077,60	1.089,30	1.160,31	961,194	982,349
Pengangguran	118,03	117,81	98,43	72,043	65,742
Bukan Angkatan Kerja	673,69	720,65	728,14	613,059	618,327

Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok. Penduduk usia kerja pada Tahun 2024 sebanyak 1.666,42 ribu orang, bertambah sebanyak

20,12 ribu orang jika dibandingkan tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.048,09 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 618,327 ribu orang. Jumlah penganggur di Kota Depok menurun dari 72.043 orang menjadi 65.742 orang. Penurunan ini dikaitkan dengan berbagai program Pemkot Depok, seperti penciptaan 5.000 pelaku UMKM, 1.000 pengusaha perempuan, bursa kerja, pelatihan keterampilan, dan program padat karya.

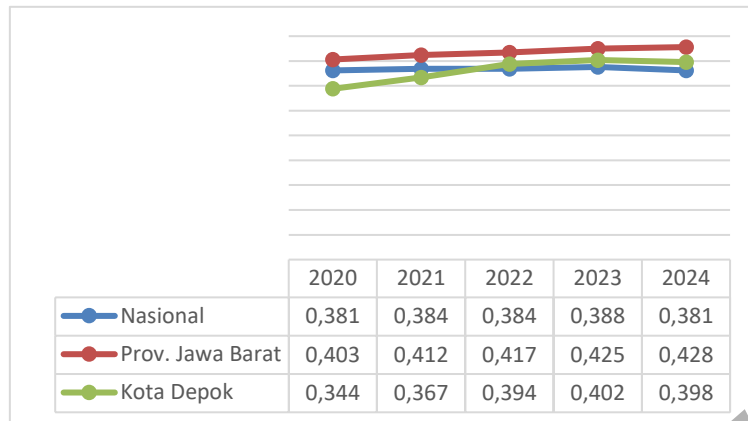
3.1.4.6. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu adalah Gini Rasio atau Koefisien Gini. Nilai Gini Rasio (GR) berkisar antara 0 hingga 1 dengan klasifikasi ketimpangan rendah ($GR < 0,3$), ketimpangan sedang ($0,3 < GR < 0,5$) dan ketimpangan tinggi ($GR > 0,5$).

Berdasarkan grafik di bawah, gini rasio Kota Depok sepanjang tahun 2020 –2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 indeks gini Kota Depok melampaui poin 0,400 yaitu 0,402. Jika dibandingkan tahun 2023, capaian indeks gini tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,004 poin.

Seperti tersaji pada Gambar di bawah ini, Pada awal masa pandemi yaitu tahun 2020 angka gini rasio di Kota Depok sebesar 0,344, pandemi terus berlanjut hingga tahun 2022 dan angka gini rasio Kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2022 indek gini naik 7,36% dan pada tahun 2023 naik kembali sebesar 2,03%. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,9% dikarenakan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan dan beberapa faktor ekonomi yang membaik. Jika gini rasio di Kota Depok dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tren dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, baik Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional mengalami kenaikan gini rasio dan Kota Depok cenderung fluktuatif. Dampak pandemi terhadap ketimpangan di Kota Depok terus meningkat dari tahun 2020-2023 dan kembali menurun pada tahun 2024.

Gambar 3.4 Perbandingan Tren Gini Rasio Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2025 (data diolah)

Meningkatnya angka ketimpangan ini menggambarkan semakin lebarnya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Depok dapat tetap terjaga. Upaya pendekatan terus dilakukan antara lain melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka kesenjangan terus dilakukan meskipun dampaknya belum secara optimal dirasakan.

Upaya Pemerintah Kota Depok terus diberikan pada golongan masyarakat yang hingga saat ini belum merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Upaya-upaya inovatif dan inklusif terus dilakukan dan menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan, sehingga setiap warga dapat ikut serta dalam kemajuan Kota Depok. Demikian halnya fokus pada pembangunan yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi secara umum.

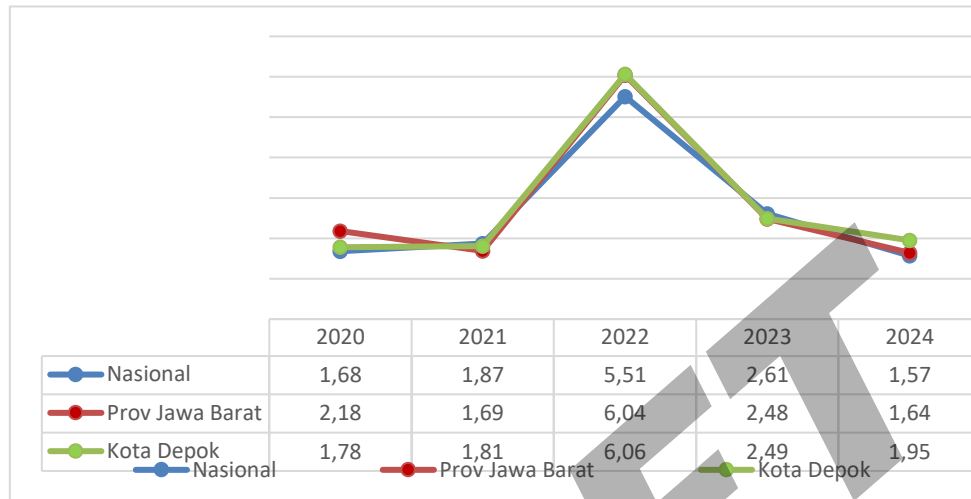
3.1.4.7. Inflasi

Indeks Harga Konsumen merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting untuk menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. IHK dihitung untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Inflasi Kota Depok dihitung berdasarkan Survei Harga Konsumen yang dilaksanakan secara berkala. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Harga Konsumen Kota Depok yang dihitung menggunakan tahun dasar 2022=100, sebagaimana ditetapkan dalam Survei Biaya Hidup (SBH). Selama tahun 2024,

penghitungan IHK Kota Depok tetap mengacu pada dasar ini untuk memantau dinamika harga secara periodik.

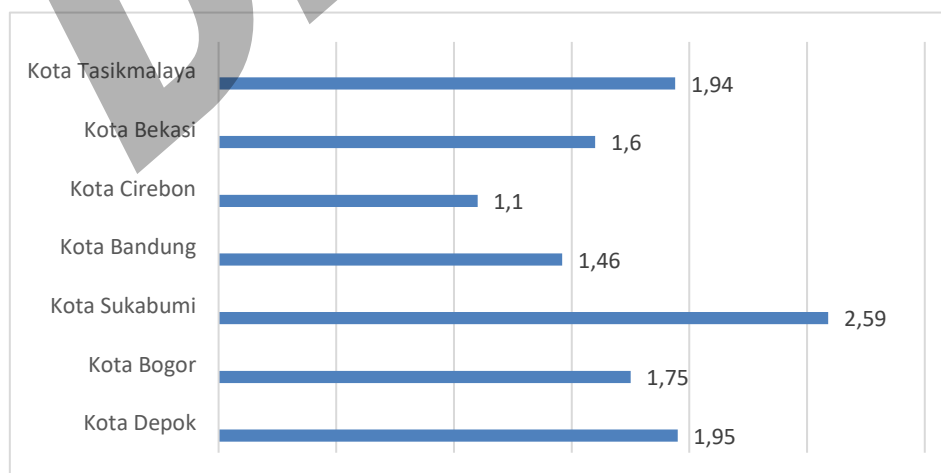
Gambar 3.5. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Depok Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2025, (data diolah)

Gambar diatas menunjukkan dinamika inflasi tahunan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Inflasi tahun kalender Kota Depok selama tahun 2024 tercatat sebesar 1,95 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,49 persen. Ini menunjukkan adanya penurunan laju inflasi di Kota Depok pada tahun 2024.

Gambar 3.6. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender 7 Kota Di Jawa Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2025, (data diolah)

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, angka inflasi tahun kalender Kota Depok tahun 2024 merupakan tertinggi kedua setelah Kota Sukabumi yang mencatat inflasi sebesar 2,59

persen. Sementara itu, rata-rata inflasi tahun kalender Provinsi Jawa Barat adalah 1,64 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57 persen.

Angka inflasi tahun kalender 2024 di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat masih berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia yaitu $2,5 \pm 1$ persen. Hanya tiga daerah yang berada di bawah batas bawah target, yaitu Kabupaten Bandung (1,46 persen), Kabupaten Subang (0,93 persen), dan Kota Cirebon (1,10 persen).

Sepanjang tahun 2024, inflasi di Kota Depok terjadi pada 8 bulan, sementara deflasi terjadi pada 4 bulan, yaitu Mei, Juni, Juli, dan September. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,56 persen, disebabkan oleh keterlambatan panen raya beras akibat faktor cuaca. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan tersebut dengan andil sebesar 0,36 persen.

Tabel 3.10. IHK dan Inflasi Kota Depok Bulan Desember 2024 dan Tahun Kalender 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Inflasi Bulan Desember 2024	Laju Inflasi Tahun Kalender 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	114,9	117,76	106,81	0,24	1,95
Makanan, Minuman & Tembakau	119,91	126,32	109,59	0,82	1,91
Pakaian & Alas Kaki	99,56	99,97	100,74	0,00	0,12
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	109,32	112,01	104,74	-0,02	0,94
Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	120,98	121,84	103,6	-0,48	1,79
Kesehatan	109,83	110,20	104,1	-0,02	2,56
Transportasi	117,35	117,71	107,87	0,03	0,51
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,58	98,21	98,77	0,07	-1,02
Rekreasi, Olahraga & Budaya	109,54	111,96	107,41	-0,22	3,19
Pendidikan	118,79	121,35	107,07	0,0	1,67
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	121,8	123,22	105,69	0,31	3,73
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	117,39	123,36	118,29	0,15	10,14

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2025, (data diolah)

Dilihat dari kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat memberikan andil inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024, disusul oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi sepanjang

tahun 2024 di antaranya adalah emas perhiasan, kopi bubuk, kontrak rumah, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng, ayam goreng, beras, upah asisten rumah tangga, dan telur ayam ras.

Sebaliknya, komoditas-komoditas seperti cabai merah, bensin, cabai rawit, jeruk, telepon seluler, air kemasan, bahan bakar rumah tangga, melon, susu cair kemasan, dan susu bubuk untuk balita tercatat memberikan andil deflasi terbesar sepanjang tahun.

Secara khusus, emas perhiasan menjadi sorotan karena mengalami kenaikan harga global yang konsisten sepanjang tahun, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,3394 persen di Kota Depok pada 2024. Kopi bubuk juga menjadi komoditas dengan pengaruh signifikan terhadap inflasi, menyusul meningkatnya harga di pasar dunia. mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2023. Inflasi tahun kalender tahun 2023 sebesar 2,49 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 1,95 persen.

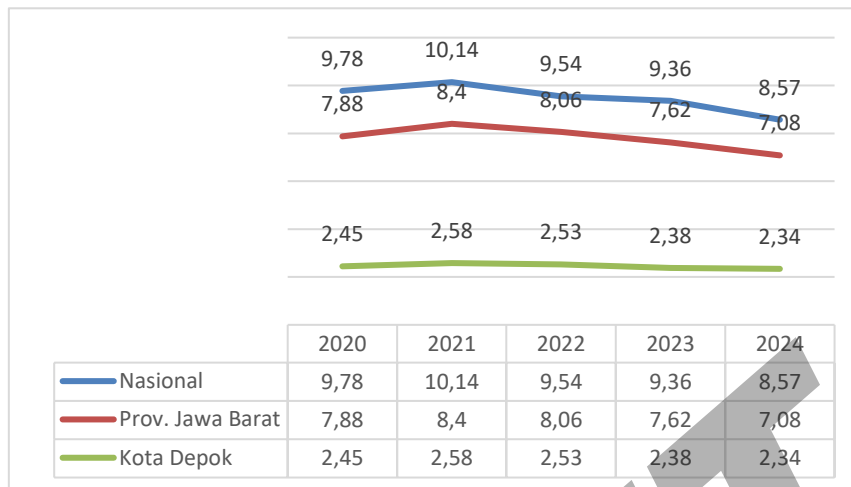
3.1.4.8. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan di Kota Depok digunakan angka persentase penduduk miskin Kota Depok yang bersumber dari BPS Kota Depok. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Kota Depok adalah jumlah penduduk Kota Depok yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Kota Depok dikali 100%. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Penurunan persentase kemiskinan di Kota Depok dari 2,38% pada 2023 menjadi 2,34% pada 2024 menunjukkan tren positif. Namun, jumlah penduduk miskin secara absolut justru meningkat dari 61,95 ribu menjadi 62,6 ribu orang. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan. Meskipun persentase kemiskinan menurun, jika jumlah total penduduk bertambah signifikan, maka jumlah orang yang masuk kategori miskin tetap bisa meningkat. Tingkat kemiskinan di Kota Depok terendah di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-4 terendah di level nasional.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin baik nasional, regional maupun Kota Depok. Seiring dengan pulihnya laju pertumbuhan ekonomi, Kota Depok lebih mampu mengendalikan kerentanan laju pertumbuhan penduduk miskin dibanding Provinsi Jawa Barat seperti ditampilkan pada gambar di bawah. Artinya secara umum persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka kemiskinan nasional baru mencapai single digit pada tahun 2018, sedangkan Kota Depok sudah mencapainya sejak pertama kali dihitung tahun 2004.

Gambar 3.7 Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2025, (data diolah)

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

Perekonomian Kota Depok Tahun 2026 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi periode sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian global, nasional, maupun kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat.

3.1.5.1. Tantangan Ekonomi Global

Pada tahun 2026, tantangan ekonomi global diperkirakan akan cukup berat. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan lembaga-lembaga internasional lainnya, beberapa tantangan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Perlambatan pertumbuhan global, dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya sekitar 2,4% pada 2026, lebih rendah dari prediksi sebelumnya.
2. Ketegangan perdagangan internasional akibat kebijakan tarif tinggi, terutama dari Amerika Serikat, yang memicu ketidakpastian dan mengganggu rantai pasok global.
3. Fragmentasi ekonomi global yang diakibatkan oleh meningkatnya proteksionisme dan melemahnya kerja sama multilateral sehingga perekonomian dunia bergerak ke arah ekonomi yang lebih terpecah.
4. Tekanan inflasi dan suku bunga tinggi akibat ketidakpastian global yang mendorong inflasi dan membuat suku bunga tetap tinggi sehingga berdampak pada investasi dan konsumsi.
5. Risiko geopolitik yang dipicu oleh terjadinya konflik regional dan ketegangan antar negara mengakibatkan memburuknya sentimen pasar dan menghambat pemulihan ekonomi.

3.1.5.2. Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan cukup kompleks, hal ini dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi oleh para ekonom dan pemerintah adalah

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, dimana proyeksi pertumbuhan Indonesia direvisi turun menjadi sekitar 4,7% akibat tekanan global dan lemahnya kinerja ekspor serta konsumsi domestik.
2. Ketergantungan pada belanja pemerintah, dimana efisiensi belanja negara berdampak pada sektor seperti pariwisata dan UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.
3. Tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dimana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar karena efisiensi penggunaan modal masih rendah.
4. Lemahnya investasi sektor swasta karena sektor swasta menghadapi tekanan likuiditas dan suku bunga tinggi, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi belum maksimal.
5. Risiko eksternal akibat fragmentasi ekonomi global, proteksionisme, dan ketegangan geopolitik menekan ekspor dan nilai tukar rupiah.
6. Kesenjangan keterampilan tenaga kerja diakibatkan karena sekitar 60% lulusan pendidikan belum memenuhi kebutuhan industri, yang menghambat produktivitas dan daya saing.

3.1.5.3. Tantangan Ekonomi Jawa Barat

Beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat diantaranya dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret tahun 2024 mencapai ,08 persen, dengan target pada tahun 2024 yaitu 5,85-6,46 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 masih diangka 6,75 persen dengan target pada tahun 2026 yaitu 6,99 persen. Faktor pemicu TPT adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja dan kurangnya minat mencari kerja untuk usaha mandiri. Untuk ketimpangan pendapatan yang terjadi, dimana pada tahun 2024 mencapai 0,428 poin dan target tahun 2026 sebesar 0,381-0,420 poin. Dalam mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan ini, provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan

berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

2. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Kualitas Lingkungan hidup daerah ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 66,02 poin pada tahun 2024. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup provinsi Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian perubahan tutupan lahan serta masih perlu upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

Dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa, Jawa Barat menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kekacauan sistem pengelolaan lahan dan air, termasuk degradasi hutan yang berimbas pada pendangkalan sungai Jatiluhur dan Citarum.

3.1.5.4. Tantangan Ekonomi Kota Depok

Tantangan yang dihadapi Kota Depok tidak dapat lepas dari kondisi perkembangan perekonomian dunia, nasional dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS Kota Depok, selama periode 2020-2024 perekonomian Kota Depok masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi (kontribusinya sekitar 60% terhadap PDRB), nilai ini lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat sebesar 51%. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah seluruh konsumsi RT di Kota Depok berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 119.443,08 milyar rupiah, menyumbang 126,87 persen dari total PDRB Kota Depok yang nilainya sebesar Rp. 94.149,54 milyar rupiah.

Data BPS tersebut menunjukkan bahwa Kota Depok menghadapi tantangan besar, dimana sebagian besar barang konsumsi, terutama bahan pangan olahan, barang elektronik, pakaian bermerek, bahkan beberapa bahan baku industri kecil masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, termasuk impor antar provinsi maupun luar negeri. Nilai net ekspor Kota Depok sebesar Rp. 79.528,74 milyar rupiah menunjukkan bahwa Kota Depok masih termasuk dalam kota yang nilai impornya lebih besar dari nilai ekspornya. Bagi perekonomian kondisi ini tidak ideal karena berimplikasi pada hilangnya efek ganda

(*multiplier effect*) ekonomi karena uang yang dibelanjakan rumah tangga sebagian besar mengalir keluar Depok.

Beberapa penyebab masalah ini adalah terbatasnya produksi lokal, dimana Depok menghadapi tantangan keterbatasan lahan pertanian, peternakan, maupun industri pengolahan berskala besar disertai dengan rantai pasok retail modern dan grosir masih mengandalkan distributor dari wilayah Jabotabek atau impor langsung. Selain itu tantangan lainnya adalah kurangnya substitusi produk lokal, dimana permintaan konsumen Depok yang cenderung menyasar produk bermerek atau berkualitas tinggi belum sepenuhnya dijawab oleh produsen lokal..

Dalam menghadapi tantangan ini, pada tahun 2026 Kota Depok mulai fokus memperkuat produksi, distribusi, dan konsumsi produk lokal. Diawali pada tahun 2025 dimana pemerintah mulai mengkaji pendirian BUMD pangan disertai pengelolaan lahan pertanian modern di setiap kecamatan. Pengelolaan pertanian modern diharapkan mampu menguatkan ketahanan pangan sekaligus menjadi upaya dalam pengendalian inflasi serta menjadi daya tarik wisata melalui pemanfaatan lahan tersebut sebagai lokasi *agro eduwisata*. Selain upaya tersebut, untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, Kota Depok juga akan melakukan rehabilitasi, revitalisasi/pemeliharaan pada Rumah Potong Hewan (RPH) Tapos milik Pemerintah Kota Depok.

Tantangan lain yang dihadapi Kota Depok adalah upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi di Kota Depok. Pada tahun 2024 proporsi PMTP terhadap PDRB sebesar 53,11% (terbesar kedua setelah konsumsi RT) dengan laju investasi sebesar 5,12 persen. Kebijakan terkait investasi harus lebih diperhatikan untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kota Depok. Banyaknya event yang akan diselenggarakan di Kota Depok pada tahun 2026 diiringi dengan peningkatan dan perbaikan pada infrastruktur diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga target laju investasi Kota Depok untuk tahun 2026 pada kisaran 5.26 - 5.38 persen dapat tercapai.

Untuk menguatkan peran UMKM lokal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Depok, pada tahun 2026 pemerintah akan menghadapi tantangan ini melalui upaya peningkatan kapasitas UMKM atau UMKM “naik kelas”. Mendorong UMKM menjadi lebih produktif dan kompetitif berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Ketika UMKM berkembang dari skala mikro ke kecil atau kecil ke menengah akan menimbulkan *multiflier effect* positif, dimana UMKM akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan omzet, dan jangkauan pasar menjadi lebih luas. Aktivitas usaha UMKM yang makin meningkat ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan PDRB Kota Depok dimana peningkatan aktifitas UMKM akan mengurangi TPT, mengurangi indeks gini, serta angka kemiskinan.

Bentuk nyata dukungan pemerintah Kota Depok pada UMKM akan diwujudkan melalui

program unggulan “**Jualan Sama-sama UMKM Naik Kelas**”. Pada tahun 2026 Pemerintah Kota Depok akan mengadakan Events Jualan Sama Sama UMKM Kecamatan (JUSS Kecamatan), Penyediaan Aset Pemerintah untuk area usaha bagi UMKM, Penyediaan Ruang dan Peralatan Pemasaran Digital, Promosi dan Pemasaran melalui Event Lokal, *Agro Eduwisata* dan Penyelenggaraan *Calender of Event* (CoE) Tingkat Kota Depok serta penyiapan pembangunan gedung pertunjukan kota dan ruang terbuka kreatif bertaraf nasional dan modern.

Banyaknya event yang akan diselenggarakan di Kota Depok pada tahun 2026 diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan aktifitas ekonomi kreatif. Naiknya aktifitas ekonomi melalui event ini diharapkan akan menaikkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Depok. Kunjungan wisatawan ke Depok menghasilkan *multiplier effect* ekonomi diantaranya menggerakkan UMKM, menyerap tenaga kerja, memicu investasi infrastruktur, dan membuka model usaha baru yang pada akhirnya LPE Kota Depok juga meningkat.

Pembangunan manusia salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu daerah, hal ini tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari sisi kesehatan, sumber daya manusia yang sehat dan terampil akan lebih produktif, inovatif, serta mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dalam kegiatan ekonomi. Kesehatan yang terjaga menjadi kunci setiap orang dapat beraktivitas optimal tanpa terganggu penyakit atau kondisi yang melemahkan.

Investasi pada pembangunan manusia bukan hanya meningkatkan taraf hidup individu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, karena kualitas SDM menentukan daya saing suatu daerah. Pembangunan manusia di Kota Depok sangat erat kaitannya dengan upaya penurunan *stunting*. Salah satu pilar penting pembangunan manusia adalah peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pada usia dini. Tahun 2024, *prevalensi stunting* ada pada angka 12,50%, dan dengan upaya preventif yang dilakukan oleh Kota Depok di tahun 2026, nilai ini diharapkan dapat mencapai 11,79%, lebih tinggi dari yang ditargetkan oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 10,20%.

Adapun dalam menghadapi tantangan dalam peningkatan pembangunan manusia bidang kesehatan, akan melalui upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan antara lain melalui persiapan penataan Kawasan Stadion Merpati untuk memaksimalkan fungsinya, pembangunan *Depok Open Space* (DOS) 3 sebagai upaya menyiapkan sarana bagi masyarakat untuk berolahraga. Melalui olahraga membantu memperkuat sistem imun, menjaga kebugaran jantung, paru, serta mengendalikan berat badan. Olahraga bukan hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sedangkan upaya kuratif akan dilakukan melalui persiapan pengembangan RSUD ASA sebagai tempat untuk layanan unggulan ginjal.

Upaya meningkatkan LPE juga dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan yang baik membuka peluang lebih luas bagi individu untuk memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi tantangan dalam peningkatan pembangunan manusia bidang pendidikan, Pemerintah Kota Depok pada tahun 2026 akan melakukan pemerataan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan melalui kegiatan rehabilitasi/pembangunan sekolah negeri di wilayah perbatasan, gerakan toilet layak di sekolah-sekolah, Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Swasta gratis (RSSG), bimbingan belajar bagi siswa untuk masuk PTN, beasiswa pendidikan dan pembangunan rumah kreatif anak istimewa.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah indeks gini, dimana indeks ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, semakin tinggi angkanya, semakin timpang distribusi pendapatan. Di Kota Depok, pembangunan ekonomi yang terus meningkat belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kesejahteraan, terlihat dari fluktuasi indeks gini yang masih relatif tinggi dibanding target ideal. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum optimal dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, menurunkan ketimpangan menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menghadapi tantangan ini, pada tahun 2026 salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menurunkan indeks gini adalah menyiapkan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Pemberian jaminan sosial bagi pekerja rentan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan di Kota Depok. Dengan adanya jaminan sosial ini beban ekonomi kelompok rentan dapat berkurang, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Kebijakan ini pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan lapisan bawah masyarakat, mengurangi kemiskinan sekaligus diharapkan akan berdampak langsung pada penurunan indeks gini.

Pemerintah Kota Depok juga dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi kerugian ekonomi yang diimbulkan oleh kemacetan. Dampak negatif akibat kemacetan diantaranya terganggunya mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa serta lamanya waktu tempuh bagi pekerja dan pelaku usaha. Produktivitas tenaga kerja menurun karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja terbuang di jalan dan pelaku usaha menghadapi keterlambatan dalam proses distribusi barang/jasa. Dampak ekonomi lebih besar dari kemacetan adalah efisiensi ekonomi menurun, biaya operasional meningkat, dan daya saing bisnis lokal menurun.

Untuk menghadapi tantangan ini pemerintah Kota Depok akan melakukan penataan jalan dan penanganan kemacetan yang terintegrasi. Upaya ini akan dilakukan melalui pengadaan lahan

pelebaran jalan Muhtar Raya sampai simpang Parung Bingung, pelebaran jalan alternatif sawangan, rekonstruksi Jalan Muchtar Raya, Pembangunan dua jembatan di Kali Pesangrahan dan Kali Angsana, persiapan perencanaan penataan Jalan Citayam Kecamatan Pancoran Mas, persiapan pembangunan *flyover* Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor, penyiapan penataan Jalan Juanda kukan dan lanjutan menuju RS UI, Penataan Simpang Grand Depok City (GDC) Jln. KSU ABT, operasional Koridor 1 Biskita dan penyiapan Subterminal Pondok Rajeg.

Keterbatasan infrastruktur jalan di Kota Depok juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat kemacetan. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi karena pembangunan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung konektivitas antar wilayah dan kelancaran mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menjadi prasyarat bagi peningkatan produktivitas, daya saing daerah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal Kota Depok menjadi tantangan utama dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah, sehingga diperlukan pembiayaan alternatif untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok mengembangkan skema pembiayaan inovatif, salah satunya melalui pemanfaatan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan yang kredibel dan sesuai regulasi. Pemanfaatan pinjaman daerah ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, seperti sistem transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur digital.

Kebijakan ini akan dijalankan secara terukur dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, manajemen risiko, serta dampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, sinergi dengan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, serta partisipasi sektor swasta melalui skema KPBU, CSR, dan sumber pembiayaan alternatif lainnya juga akan terus didorong untuk memperkuat basis pembiayaan pembangunan infrastruktur Kota Depok.

Pada Tahun 2026, Pemerintah Kota Depok berencana membangun Perlintasan Tidak Sebidang (*Fly Over*) di Jalan Margonda Raya pada Simpang Margonda – Juanda sepanjang 460 m² (6/2T) dari titik Waroeng Spesial Sambal Margonda sampai dengan KFC Margonda. Pembangunan ini akan dikerjakan *multi years* dengan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang bersumber dari skema Pembiayaan Pinjaman Daerah.

Tantangan lainnya yang dihadapi Pemerintah Kota Depok adalah penanganan banjir, dimana banjir menjadi salah satu penyebab lumpuhnya aktifitas perekonomian. Banjir dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena mengganggu aktivitas produksi, distribusi barang, hingga layanan publik. Kerusakan infrastruktur, terhentinya operasional usaha, serta meningkatnya biaya pemulihan pasca bencana membuat sektor-sektor ekonomi melambat. Selain itu, banjir juga menekan daya beli

masyarakat karena penghasilan terpakai untuk memperbaiki kerusakan rumah atau aset, sehingga pada akhirnya berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi, yang menahan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2026, menjawab tantangan ini Pemerintah Kota Depok akan melakukan penataan drainase terintegrasi.

Pada tahun 2026, Kota Depok juga menghadapi tantang jumlah pengangguran yang masih tinggi, upaya dalam menjawab tantangan ini salah satunya dilakukan dengan persiapan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) terintegrasi dan peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja.

Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya meningkatkan aktivitas industri, transportasi, dan urbanisasi, yang dapat memberi tekanan pada lingkungan jika tidak diimbangi dengan kebijakan berkelanjutan. Sebaliknya, kualitas lingkungan yang baik tercermin dalam IKLH yang tinggi mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan daya tarik investasi, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kota Depok menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kenaikan LPE dan IKLH, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan, guna menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan. Pada tahun 2026 Kota Depok menargetkan LPE pada kisaran 5,49 – 5,66 persen, hal ini harus sejalan dengan capaian IKLH yang ditargetkan sebesar 58,12 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi juga memiliki hubungan erat dengan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali berpotensi meningkatkan emisi GRK melalui aktivitas industri, transportasi, dan energi. Namun dengan penerapan konsep ekonomi hijau dan efisiensi energi, pertumbuhan ekonomi tetap dapat dicapai sekaligus menurunkan intensitas emisi GRK per unit PDRB. Hal ini berarti meskipun ekonomi terus tumbuh, jumlah emisi yang dihasilkan per rupiah output ekonomi dapat ditekan. Dengan demikian, strategi penurunan intensitas emisi GRK menjadi penting untuk memastikan bahwa peningkatan LPE di Kota Depok tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan dapat mendukung komitmen pengendalian perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi Kota Depok ditahun 2026 adalah peningkatan LPE disertai dengan penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 1,48 ton Co2eq / miliar rupiah.

Selain menghadapi tantangan-tantangan diatas, Kota Depok perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dapat berkembang sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Depok. Fokus pada sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Kota Depok juga perlu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat bisnis dan investasi. Peningkatan daya saing ini tidak lepas dari upaya meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik yang efisien, dan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif.

Mengacu pada capaian indikator perekonomian tahun 2024, tantangan dan prospek yang

dihadapi perekonomian Kota Depok, maka besaran target yang ditetapkan Kota Depok untuk Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Depok Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun	
				2026*	2026**
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,49 – 5,66	5,89 – 6,20
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	43,51	50,73 – 51,7	50,73 – 53,1
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Persen	3,3	3,3	3,3
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,34	2.23 - 2.24	1,69 – 1,84
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,27	6.07 - 5.95	5,39 – 5,69
6	Rasio Gini	Poin	0,398	0,376 – 0,404	0,376 – 0,404
7	Indeks Pembangunan Manusia	poin	83,05	84,12	84,12
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq / Miliar Rupiah	1,07	1,48	1,48
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	54,55	58,12	76,05
10	Prevalensi Stunting	Persen	12,50	11,79	10,20

Sumber :

- 2026* Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2024
- 2026** Surat Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030 oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1. Kebijakan Nasional Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Tabel 3.12. Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Visi RPJPN 2025-2045 “ NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan ”	
Visi RPJMN 2025-2029 “ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2025 ”	
Tema RKP 2026 “ Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif ”	
Pangan dan Energi	Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Swasembada pangan, Energi dan Air • Optimalisasi BULOG • Pelaksanaan <i>food estate</i> • Peningkatan bauran ethanol dan diodiesel • Energi terbarukan • Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir • Pengelolaan sampah*	Pendidikan dan Kesehatan • Ekosistem Makan Bergii Gratis • Percepatan renovasi sekolah • Sekolah Rakyat* • Sekolah unggulan • Digitalisasi pendidikan* • Cek Kesehatan • Percepatan Rumah Sakit Daerah Deregulasi dan Kepastian Hukum • Reformasi birokrasi • Kemudahan berbisnis • Ketertarikan investasi	Adopsi Teknologi • Transormasi digital • Riset dan inovasi Pertahanan Semesta • Komponen cadangan • Pemenuhan alutsita • Penguatan kemampuan teritorial Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi • Percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia • Optimalisasi potensi Danantara Percepatan Pengentasan Kemiskinan • Data tunggal kemiskinan • Digitalisasi bantuan • 3 juta rumah • Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*
PN2	PN 1,3,4,5,6,7, dan 8		

Keterangan: *) Lima Direktif Presiden

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026

3.1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi :

1. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
2. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
3. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
4. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan

insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen
8. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
9. Penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;
10. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
11. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
12. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
13. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
14. Penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
15. Penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
16. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
17. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
18. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
19. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
20. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);

21. Pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
22. Penataan dan restrukturisasi BUMD

3.1.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Depok

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, capaian pembangunan tahun 2024, tantangan ekonomi serta dalam rangka pemenuhan program unggulan Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok pada RKPD Kota Depok Tahun 2026 fokus pada :

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mempermudah arus barang dan jasa, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan masyarakat, mendorong investasi, pemerataan pembangunan dan meningkatkan peluang bagi sektor pariwisata dan UMKM untuk tumbuh;
2. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dalam rangka mencegah dampaknya pada aktivitas ekonomi, kerusakan infrastruktur, beban anggaran pemerintah, penurunan produktivitas tenaga kerja dan menurunnya minat investor di wilayah rawan banjir;
3. Peningkatan upaya penanggulangan sampah perkotaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan efisiensi ekonomi serta mendorong ekonomi sirkular dan menciptakan lapangan kerja hijau;
4. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya industri non polutan;
5. Penyiapan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung kemandirian dan pembangunan ekonomi Kota Depok;
6. Pengelolaan lahan pertanian modern per kecamatan diikuti dengan pengembangan teknologi pertanian modern dalam rangka pengendalian inflasi, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas unggulan lokal Kota Depok;
7. Penyiapan pertanian modern per kecamatan sebagai lokasi *Edu Agrowisata* dalam rangka mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kota Depok;
8. Penataan dan penguatan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, situs sejarah maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;
9. Penguatan proses bisnis UMKM melalui penyiapan lokasi pemasaran, perluasan peran ekosistem digital, kolaborasi dengan koperasi terkait penyiapan bahan baku sampai dengan pemasaran;

10. Penguatan peran ekonomi kreatif dalam peningkatan perekonomian Kota Depok melalui peningkatan peran serta pelaku ekonomi kreatif dalam penyelenggaraan event-event di Kota Depok;
11. Penyiapan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Depok;
12. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain termasuk pinjaman daerah, serta kerjasama pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, Forum Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan yaitu: **pertama:** Ruang fiskal APBD masih terbatas dalam pengertian pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. **Kedua:** APBD semakin terbebani *Mandatory Spending* yang semakin besar, sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti keharusan anggaran belanja urusan pendidikan 20 % dari APBD (pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003); kewajiban daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 % dari total belanja APBD (pasal 147 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022); alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 % (pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022) serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di kelurahan sebesar 5 % (pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018). Dengan adanya *mandatory spending* tersebut maka porsi alokasi belanja lainnya otomatis semakin kecil. **Ketiga:** Efisiensi dan efektifitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan, masih terdapat belanja daerah yang memiliki dampak minimal terhadap peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah menyeimbangkan antara belanja daerah dengan pendapatan daerah dengan prinsip *money follow program*, artinya hanya program prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran. Secara rinci kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Disamping itu kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui PBB gratis bagi warga yang memiliki NJOP maksimal Rp 200. Berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya.

Kebijakan belanja daerah pada RKPD Kota Depok Tahun 2026 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mencapai keseimbangan tersebut maka belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja atau perbaikan fiskal Pemerintah Daerah serta perbaikan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan belanja daerah diatas, kegiatan yang mendapat alokasi anggaran adalah kegiatan yang menghasilkan *outcome* sesuai tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2030. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- 1) Penanggulangan kemacetan: diantaranya adalah: pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Muhtar Raya (titik simpang Jalan. Pemuda-simpang Parung Bingung); rekonstruksi Jalan Muchtar Raya (Jalan Pemuda-simpang Parung Bingung) Kecamatan Sawangan; pembangunan jalan alternatif Sawangan (Jalan. Engram-Jalan Pemuda); Penataan Simpang Grand Depok City (GDC); pengadaan lahan simpang Keadilan; pengadaan lahan Jalan Underpass UI; penyusunan DED dan amdal flyover Jalan Margonda; penyusunan DED dan amdal flyover Jalan Raya Bogor (pintu keluar tol cisalak) dan operasional koridor 1 Biskita.
- 2) Penanggulangan banjir diantaranya adalah pembangunan 2 Jembatan Kali Pesangrahan dan Kali Angsana (Jl. H. Muchtar Raya dekat Simpang Parung Bingung) dan penataan drainase Simpang

Kodim (Masjid Mampang) dan pembangunan embung Kalibaru.

- 3) Jaminan sosial bagi ketua RT, RW, LPM dan kader posyandu dan pekerja rentan.
- 4) Penataan Balikpapan Depok diantaranya pembangunan Depok Open Source tahap 3. dan pembangunan jalan, trotoar, dan infrastruktur kawasan Balikpapan;
- 5) Pengelolaan persampahan dihilir melalui pengadaan dan operasional incinerator;
- 6) Pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah events jualan UMKM sama-sama kecamatan (JUSS kecamatan); agro eduwisata; pembangunan rumah emak dan penyusunan DED pembangunan Balai Ikhlas Kerja.

Belanja lainnya yang menjadi prioritas pada RKPD Kota Depok Tahun 2026 adalah : pemenuhan kebutuhan belanja pegawai; pemenuhan belanja rutin dan mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; pemenuhan belanja yang bersumber dari alokasi dana transfer dan BLUD; pemenuhan belanja yang termasuk kategori darurat dan mendesak serta pemenuhan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan berbasis rukun warga (RW) untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pada tingkat kelurahan. Prioritas pembangunan di kelurahan adalah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan berbasis dana RW , meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan sasarannya adalah:
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti : drainase lingkungan, sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan, sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya;
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi seperti jalan pemukiman /perumahan, Sarana prasarana transportasi lainnya;
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan seperti pembangunan / renovasi posyandu, mobil siaga dan mobil jenazah;
 - d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan (hadroh /marawis)
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sasarannya adalah:
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (operasional posyandu dan stunting);
 - b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (pelacakan anak putus sekolah);
 - c) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan (wisata keberagaman);

- d) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (pelatihan *training of trainer*)

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2024 serta proyeksi SiLPA tahun 2025. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah, penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta (Perseroda). Arah dan kebijakan keuangan daerah diuraikan secara rinci dibawah ini mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

Komponen pendapatan daerah yang utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (limitatif).

Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Depok masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya pendapatan bersumber dari pendapatan transfer menunjukkan kecenderungan menurun.

Sejalan dengan kondisi tersebut maka Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, meningkatkan penerimaan piutang pajak, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya.

Penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Berdasarkan tabel Indikator makro sebagaimana disebutkan pada Bab II, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2026 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2025, sehingga Pendapatan Asli Daerah akan mengikuti trend tersebut, dengan beberapa penyesuaian pada jenis pendapatan pajak dan pendapatan transfer pemerintah daerah.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Depok masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah untuk mengimbangi kebutuhan belanja tersebut melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2026.

Target pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok pada RKPD Tahun 2026 sebesar Rp 3.990.196.933.592,00, menunjukan trend yang meningkat dari tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp3.842.415.262.487,00; atau mengalami peningkatan sekitar Rp 147.781.671.105,00. Apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2025 maka target RKPD 2026 lebih rendah, hal ini

disebabkan karena pada APBD telah dimasukan Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat. Peningkatan target pendapatan Asli Daerah disebabkan adanya upaya Pemerintah Kota Depok dalam memulihkan kondisi ekonomi tetap pada kondisi normal. Sedangkan untuk dana transfer, kebijakan penentuan target menjadi kewenangan Pemerintah, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tabel dibawah ini diperlihatkan perbandingan pendapatan daerah dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 3.13. Pendapatan Daerah pada RKPD Kota Depok Tahun 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	3.842.415.262.487,00	4.328.171.198.378,00	3.990.196.933.592,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.299.604.072.733,00	2.348.534.453.898	2.419.769.283.792,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.980.030.796.211,00	2.020.443.817.376	2.100.460.708.580,00
4.1.02	Retribusi Daerah	291.773.126.107,00	291.415.718.221	291.508.424.797,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.016.816.722,00	22.016.816.722	19.016.816.722,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.783.333.693,00	14.658.101.579	8.783.333.693,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.542.811.189.754,00	1.979.636.744.480,00	1.570.427.649.800,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.292.670.299.000,00	1.741.819.573.800,00	1.292.670.299.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.140.890.754,00	237.817.170.680,00	277.757.350.800,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
	TOTAL PENDAPATAN	3.842.415.262.487,00	4.328.171.198.378,00	3.990.196.933.592,00

Sumber : BKD Tahun 2025, diolah

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2026 antara lain :

1. Peningkatan kerja sama dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui berbagai kegiatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Transfer
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);;
3. Pertukaran data kependudukan dan kepemilikan kendaraan bermotor dengan Dinas Kependudukan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk menjaring kendaraan bermotor yang masih berdomisili di luar Kota Depok;

4. Mengoptimalkan peran aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam melakukan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, direncanakan penambahan fasum yang dikelola bekerja sama dengan kelompok masyarakat setempat pada beberapa fasilitas olahraga yang dipadukan dengan pusat UMKM;
6. Digitalisasi pemungutan pendapatan daerah, melalui percepatan dan perluasan penerapan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi, diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi;
7. Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah melalui pelaksanaan Gebyar Pajak sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran perpajakan, berupa rehabilitasi ruang pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
9. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/ internetbanking dan market place, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan serta memperbanyak pemeriksaan lapangan terhadap kepatuhan ketentuan perpajakan.
11. Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD serta menyempurnakan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
12. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2030 dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026, diantaranya adalah:

- 1) Ketahanan Pangan;
- 2) Ketahanan Energi;
- 3) Makanan bergizi gratis;
- 4) Program pendidikan;
- 5) Program kesehatan;
- 6) Pembangunan Desa, Koperasi dan UKM;
- 7) Pertahanan Semesta;
- 8) Akselerasi Investasi.

Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan demikian pemerintah Kota Depok dalam menyusun belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja (*performance budgeting*), yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu sumber pendanaan belanja daerah berasal dari peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, serta mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Prioritas lainnya adalah pengalokasian anggaran belanja pegawai Aparatur Sipil Negara hasil seleksi tahun 2025 yang akan diangkat pada tahun 2026 untuk mengganti pegawai yang pension.

Sejalan dengan kebijakan belanja diatas, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Kegiatan yang mendapat alokasi anggaran adalah kegiatan yang menghasilkan *outcome* sesuai tujuan dari visi dan misi kepala daerah. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas, dengan demikian belanja APBD diarahkan salah satunya untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan fokus tematik RKPD Tahun 2026.

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan sumberdaya sendiri dalam pengembangan usaha mikro, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan aktivitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Proses pengadaan barang/jasa secara swakeloa yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap wilayahnya masing-masing, dan secara simultan mengasah dan memunculkan sumber daya manusia di setiap wilayah yang ikut berperan serta aktif dalam pembangunan sarana prasarana umum di wilayahnya.

Kebijakan belanja daerah lainnya adalah untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan belanja tidak terduga (BTT) untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam maupun non alam serta penyediaan alokasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) , pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Depok perlu

menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada tahun 2026 Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan untuk melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu:

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, pph dengan perhitungan tariff efektif rata-rata (TER) yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD selama 12 bulan, 1 bulan THR dan 1 bulan gaji ke 13;
2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan bagi Non ASN;
3. Mengalokasikan belanja prioritas Wali Kota terpilih periode 2025-2030, diantaranya adalah:
 - 1) Rehabilitasi / Pembangunan Sekolah negeri di wilayah perbatasan ;
 - 2) Gerakan toilet layak;
 - 3) Penyelenggaraan Rintisan SMP Swasta gratis;
 - 4) Bimbingan belajar bagi siswa SLT di Kota Depok untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri;
 - 5) Beasiswa pendidikan bagi siswa/ mahasiswa;
 - 6) Pembangunan Rumah Kreatif;
 - 7) Pengembangan Puskesmas dan RSUD ASA untuk layanan ginjal;
 - 8) insentif bagi Ketua RT, RW, LPM dan Kader Posyandu; guru ngaji lekar dan pendidik rohani
 - 9) Jaminan Sosial bagi Ketua RT, RW, LPM dan Kader Posyandu dan Pekerja Rentan;
 - 10) Pembangunan DOS 3 untuk pelebaran area jogging track;
 - 11) Pembelian incinerator dan operasionalnya untuk mengurangi volume sampah di TPA;
 - 12) Penataan drainase Simpang Kodim (Mesjid Mampang);
 - 13) Pengadaan lahan pelebaran jalan Muhtar Raya mulai titik simpang Jl. Pemuda - simpang Parung Bingung; Simpang Keadilan, Jalan Underpass UI'
 - 14) Pembangunan jalan pelebaran jalan alternatif sawangan (Jl. Engram - Jl. Pemuda) dan rekonstruksi Jalan Muchtar Raya (Jl Pemuda-Sp Parung Bingung) Kec. Sawangan;
 - 15) Pembangunan 2 Jembatan Kali Pesangrahan dan Kali Angsana (Jl. H. Muchtar Raya dekat Simpang Parung Bingung);

- 16) DED dan Amdal flyover Margonda dan Jalan Raya Bogor (exit tol cisalak) dan DED Pembangunan BLK
- 17) Penataan Simpang Grand Depok City (GDC) Jln. KSU ABT;
- 18) Operasional Koridor 1 Biskita;
- 19) Events Jualan UMKM Sama Sama Kecamatan (JUSS Kecamatan);
- 20) Agro Eduwisata;
- 21) Pembangunan Jalan, Trotoar, dan Infrastruktur Kawasan Balaikota;
- 22) Pembangunan Embung Kalibaru Permai;
- 23) Master Plan Kota Depok;
- 24) Pembangunan Rumah Emak;
4. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan DAK Bantuan Operasional Sekolah dan BLUD;
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah

Berdasarkan tabel dibawah ini diperlihatkan bahwa belanja daerah Kota Depok pada RKPD Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 4.125.182.235.672,00, dari anggaran RKPD tahun 2025 yang mencapai sebesar Rp 3.926.119.391.501,00 atau meningkat sebesar Rp 199.062.844.171,00. Tetapi apabila dibandingkan dengan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025, maka belanja pada RKPD tahun 2026 masih lebih rendah, hal ini disebabkan pada APBD sudah mengakomodir anggaran berasal dari DAK dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Pada tabel dibawah ini diperlihatkan **selain** adanya perubahan anggaran pada beberapa jenis belanja. Kenaikan anggaran **yang** signifikan terjadi pada jenis belanja modal jalan karena adanya rencana pembangunan fly over Jalan Margonda Raya yang akan didanai dari pinjaman daerah bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Tabel. 3.14. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
5	BELANJA DAERAH	3.926.119.391.501,00	4.537.067.866.021,00	4.125.182.235.672,00
5,1	BELANJA OPERASI	3.072.088.343.537,00	3.519.780.418.799,00	3.081.710.077.452,00
	Belanja Pegawai	1.430.970.103.800,00	1.579.158.313.895,00	1.397.086.204.707,00

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
	Belanja Barang dan Jasa	1.496.124.954.937,00	1.762.288.939.404,00	1.526.851.974.153,00
	Barang Subsidi	1.800.000.000,00	1.500.000.000,00	1.327.054.601,00
	Barang Hibah	81.856.284.800,00	119.130.165.500,00	105.394.822.875,00
	Barang Bantuan Sosial	61.337.000.000,00	57.703.000.000,00	51.050.021.116,00
5,2	BELANJA MODAL	804.031.047.964,00	981.670.447.222,00	993.472.158.220,00
	Belanja Modal Tanah	121.952.099.000,00	215.292.569.000,00	190.469.996.250,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.442.242.977,00	217.757.086.077,00	192.650.362.069,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.433.576.036,00	213.858.597.613,00	189.201.357.365,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	342.418.394.951,00	334.394.399.532,00	420.825.053.172,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	784.735.000,00	367.795.000,00	325.389.364,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	35.617.000.000,00	50.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	35.617.000.000,00	50.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA	3.926.119.391.501,00	4.537.067.866.021,00	4.125.182.235.672,00

Sumber : BKD Tahun 2025, diolah

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyusunan rencana SiLPA tidak didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya tetapi mengacu pada perkiraan efisiensi belanja, *over target* pendapatan dan alokasi dana *earmark* yang belum dibelanjakan, sedangkan realisasi SiLPA sudah menghitung efisiensi belanja, *over target* pendapatan dan alokasi dana *earmark* ditambah dengan SiLPA dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, kegiatan yang gagal lelang serta kegiatan yang mengalami *cut off* sehingga nilai realisasi SiLPA selalu lebih tinggi dari

rencana SiLPA. Perlu menjadi perhatian khusus apabila SiLPA ini berasal dari program/kegiatan yang belum/tidak dapat dilaksanakan karena mengindikasikan penyusunan dan perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat dan akurat. Penerimaan SiLPA (pembiayaan) ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun disisi lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari SiLPA.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan trend realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2021-2024. Berdasarkan trend tersebut maka pada tahun 2026 direncanakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA sebesar Rp 100.000.000.000,00; dan yang berasal dari pinjaman daerah sebesar Rp 125.000.000.000,00 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Selanjutnya kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendanai penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta Persero sebesar Rp 90.000.000.000,00 serta untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp 14.697.920,00.

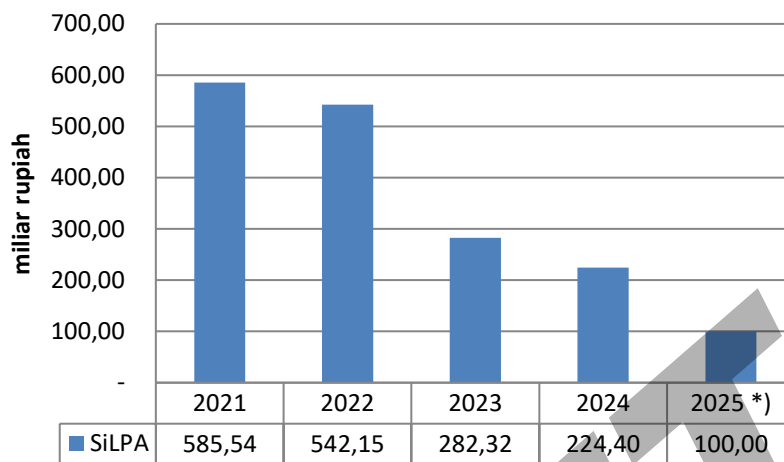
Tabel. 3.15. Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2025	APBD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH	83.704.129.014,00	208.896.667.643,00	134.985.302.080,00
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	221.657.743.856,00	298.896.667.643,00	225.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.657.743.856,00	298.896.667.643,00	100.000.000.000,00
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			125.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	137.953.614.842,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	137.953.614.842,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
6.2.02	Pembayaran Pokok Utang			14.697.920,00
	Pembiayaan Netto			

Sumber : BKD Tahun 2025, diolah

Perkembangan SiLPA selama lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2021 sekitar Rp 585.536.810.398, kemudian secara berturut-turut menurun sampai pada tahun 2024 diperoleh SiLPA sebesar Rp 224.404.034.779. Berdasarkan data tersebut maka diproyeksikan SiLPA pada tahun 2025 sekitar 100.000.000.000,00. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja pada tahun 2026.

Gambar 3.8 Perkembangan SiLPA pada RKPD Kota Depok Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Tahun 2025



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Depok TA 2021-2024
*) Proyeksi BKD (2025)

3.2.4 Arah Strategi Peningkatan Sumber Pendanaan Daerah melalui Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah alternatif sumber pendanaan APBD dan solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan-kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan-kegiatan untuk kepentingan layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pinjaman daerah dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang/ aspek yaitu : 1) aspek hukum 2) aspek ekonomi dan 3) aspek kemampuan keuangan daerah.

1. Aspek Hukum

Kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai pada tahun 2001. Penetapan tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan sebagai salah satu kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi aspek penciptaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Karenanya, seluruh fungsi kewenangan diserahkan kepada daerah, kecuali

kewenangan absolut yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows program*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan horizontal maupun vertikal.

Desentralisasi fiskal mendorong daerah mempunyai kemandirian keuangan melalui penggalan potensi pada sumber keuangan/sumber pendapatan yang telah dilimpahkan ke daerah. Namun demikian pertumbuhan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang selalu mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, maka perlu dicari sumber-sumber penerimaan yang lain. Salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keuangan adalah dengan melakukan pinjaman daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Batasan waktu pinjaman daerah untuk jangka menengah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 pasal 13 sebagai berikut ini:

- 1) Ayat (1): “Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan”.
- 2) Ayat (3): Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka pinjaman daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD, Persetujuan dari DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana disebutkan pada pasal 15 sebagai berikut ini:

- 1) Ayat (1): “Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
- 2) Ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara”;

Rambu-rambu yang disebutkan pada 21 peraturan yang sama sebagai berikut: Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- 1) jumlah pinjaman;
- 2) jangka waktu pinjaman;
- 3) suku bunga pinjaman;
- 4) peruntukan pinjaman;
- 5) hak dan kewajiban; dan
- 6) ketentuan dan persyaratan.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 bahwa menyampaikan rencana pinjaman jangka menengah untuk mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut

- 1) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- 3) kerangka acuan kegiatan;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- 7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- 8) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran;
- 9) Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
- 10) rencana keuangan Pinjaman Daerah.

Berdasarkan aspek hukum tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pinjaman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Batasan kemampuan keuangan daerah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 yaitu sebesar 0,24 % dari Total PDB/PDRB.

2. Aspek Ekonomi

Kota Depok memiliki berbagai permasalahan diantaranya adalah kemacetan. Penduduk yang semakin banyak umumnya bekerja di luar Kota Depok, mengakibatkan tingginya jumlah perjalanan dan kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi yang handal. Sekitar 40 persen pekerja Kota Depok tercatat bekerja di luar Kota Depok, sehingga melakukan perjalanan pulang-pergi (komuter) setiap hari. Namun, lemahnya infrastruktur transportasi dan minimnya keberadaan transportasi massal yang murah, nyaman dan aman, membuat pekerja Kota Depok lebih mengandalkan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan komuter harian mereka. Pada 2024, tercatat jumlah kendaraan penumpang dan sepeda motor mencapai hingga 98 persen dari total kendaraan bermotor. Hanya 0,8 persen kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan umum. Dengan dominasi kendaraan pribadi yang sangat masif, tidak heran bila kemudian penambahan panjang jalan raya tidak pernah mampu mengimbangi penambahan jumlah kendaraan sehingga kemacetan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pada tabel dibawah ini dipelihatkan perbandingan jumlah setiap jenis kendaraan.

Tabel 3.16 Jumlah dan Jenis Kendaraan di Kota Depok Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Tahun 2024
1	Mobil Penumpang	192.821
2	Bus, Microbus	698
3	Truck, Pick Up	19.245
4	Sepeda Motor	926.839
	Jumlah	1.139.603

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (21 Februari, 2024)

Dominasi jumlah kendaraan pribadi menyebabkan munculnya simpul-simpul kemacetan di Kota Depok. Simpul kemacetan tersebar pada sekitar 20 lokasi kemacetan diantaranya yang menjadi fokus penanganan pada tahun 2026 dan tahun 2027 adalah simpang Jalan Margonda –Juanda, simpang Jalan Raya Bogor-Juanda, simpang Jalan Kartini-Grand Depok City, Simpang Jalan Mochtar–pintu Tol Desari dan seputar fly over Universitas Indonesia. Untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, selain penanganan fisik dan penyediaan modal transportasi masal; dibutuhkan juga penanganan masalah nonfisik/sosial seperti peningkatan kesadaran untuk beralih pada moda transportasi masal serta penegakan disiplin masyarakat dalam berlalulintas.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan prasarana transportasi semakin besar dan tidak dapat seluruhnya ditopang oleh kapasitas fiskal konvensional. Oleh karena itu, skema *creative financing* seperti pinjaman daerah adalah Solusi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik

di Kota Depok dan tentunya itu menjadi instrumen penting yang harus dioptimalkan. Pinjaman daerah sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Depok untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pinjaman daerah memiliki dampak positif terhadap potensi peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memiliki risiko seperti ketergantungan pada utang dan potensi masalah keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas daerah. Infrastruktur yang lebih baik dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pinjaman yang berhasil digunakan untuk proyek produktif dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD.

Selain nilai positif dari pinjaman daerah, perlu juga diperhatikan dampak negatifnya seperti adanya risiko ketergantungan utang dapat meningkatkan risiko keuangan daerah dan membuat daerah rentan terhadap krisis keuangan. Jika pinjaman tidak dikelola dengan baik, daerah dapat mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dan mengalami masalah keuangan. Pinjaman daerah dapat menjadi beban keuangan yang lebih berat jika terjadi penurunan pendapatan daerah akibat kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu perlu disiapkan dokumen perencanaan yang memadai untuk proyek yang dibiayai dengan pinjaman. Bahwa Pemerintah Kota Depok akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk mengatasi kemacetan pada simpul simpang Jalan Margonda-Juanda dan simpang Jalan Raya Bogor-Juanda dengan membangun fly over, sehingga akan disiapkan dokumen study kelayakan dan Detail engineering Design (DED) untuk dua simpul kemacetan tersebut.

3. Aspek Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah menetapkan batas maksimal pinjaman daerah untuk mencegah risiko utang yang berlebihan. Batas yang ditetapkan oleh Pemerintah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mampu membayar cicilan pinjaman tersebut. Kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pinjaman daerah diukur dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang minimal harus 2,5. DSCR ini menghitung kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman, dengan rumus tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, daerah juga harus memenuhi persyaratan lain seperti tidak memiliki tunggakan pinjaman dan mendapatkan persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan panjang.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana

pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- 2) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio/DSCR*) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Belanja lain}} \geq 2,5$$

- 3) Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- 4) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Nilai DSCR menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman jangka menengah. Besaran nilai tersebut memiliki kriteria tertentu yang menunjukkan cakupan nilai minimal bagi daerah untuk dapat dikatakan mampu dalam mengembalikan pinjaman. Suatu daerah dikatakan dapat melakukan pengembalian pinjaman apabila nilai DSCR yang dihasilkan sebesar minimal 2,5. Apabila perolehan nilai DSCR kurang dari 2,5 maka hal tersebut dapat diprediksi akan terjadi arus kas negatif.

Pemerintah Kota Depok pada lima tahun mendatang akan mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), untuk itu perlu dilakukan simulasi kemampuan keuangan daerah selama lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil proyeksi sampai dengan tahun 2030 diperoleh data Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dan Belanja Wajib (BW) sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.17 Kemampuan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2025-2030

Tahun	PAD	DBH	DAU	DBH-DR	Belanja Wajib	Kemampuan Keuangan Daerah
1	2	3	4	5	6	7-(2+3+4-5-6)
2025	2.368.720.490.306,00	142.878.717.800,00	1.157.909.471.000,00	0,00	1.579.158.313.895,00	2.090.350.365.211,00
2026	2.368.577.633.166,00	135.688.582.972,00	1.157.909.471.000,00	0,00	1.474.020.316.895,00	2.188.155.370.243,00
2027	2.581.833.744.097,00	118.752.467.396,00	1.027.277.414.000,00	0,00	1.499.020.316.895,00	2.228.843.308.598,00
2028	2.723.594.096.404,00	119.379.057.612,00	1.027.277.414.000,00	0,00	1.524.020.316.895,00	2.346.230.251.121,00
2029	2.865.633.034.716,00	119.106.544.700,00	1.027.277.414.000,00	0,00	1.549.020.316.895,00	2.462.996.676.521,00
2030	3.007.850.170.526,00	118.916.925.238,00	1.027.277.414.000,00	0,00	1.569.020.316.895,00	2.585.024.192.869,00
JUMLAH	13.547.488.678.909,00	611.843.577.918,00	5.267.019.127.000,00	0,00	7.615.101.584.475,00	11.811.249.799.352,00

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2030 (diolah BKD, 2025)

Berdasarkan data kemampuan keuangan daerah diatas, Pemerintah Kota Depok akan mengajukan pinjaman sebesar Rp 250.000.000,00 kepada PT SMI dengan bunga sebesar 5,7 %, provisi sebesar 1 % dengan tenor pinjaman selama 5 tahun. Adapun simulasi pinjman tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.18 Simulasi Pinjaman dengan tenor 5 tahun

Tahun	Pokok Pinjaman	Pembayaran Bunga	Provisi	Pembayaran Cicilan
1	2	3	4	5
2025	-	5.814.790,00	2.250.000,00	8.064.790,00
2026	-	14.447.920,00	250.000,00	14.697.920,00
2027	71.428.570,00	12.932.440,00		84.361.010,00
2028	71.428.570,00	8.767.710,00		80.196.280,00
2029	71.428.570,00	4.639.730,00		76.068.300,00
2030	35.714.290,00	771.880,00		36.486.170,00
JUMLAH	250.000.000,00	47.374.470,00	2.500.000,00	299.874.470,00

Sumber: Simulasi PT Sarana Multi Infrastruktur (2025)

Berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk dapat melakukan pinjaman daerah minimal nilai $DSCR \geq 2,5$; maka kemampuan keuangan daerah Kota Depok dapat memenuhi persyaratan dimaksud, karena nilainya jauh diatas 2,5. Pada tabel dibawah ini disajikan Debt Service Coverage Ratio diatas 2,5.

Tabel.3.19 Debt Service Coverage Ratio selama 5 tahun

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Pembayaran Cicilan	Debt Service Coverage Ratio
1	2	3	4=(2/3)

2025	2.090.350.365.211,00	8.064.790,00	259.195
2026	2.188.155.370.243,00	14.697.920,00	148.875
2027	2.228.843.308.598,00	84.361.010,00	26.420
2028	2.346.230.251.121,00	80.196.280,00	29.256
2029	2.462.996.676.521,00	76.068.300,00	32.379
2030	2.585.024.192.869,00	36.486.170,00	70.849

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2025, data diolah

3.2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber– sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam merencanakan pembangunan di Kota Depok. Anggaran Pembangunan Kota Depok selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa DAK, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil; pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa Dana Bagi Hasil Daerah dan Bantuan.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kolaborasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Depok adalah dalam rencana pembangunan fly over Jalan Margonda yang akan didanai dari pinjaman daerah.

Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga pada tahun pelaksanaan masih banyak perangkat daerah yang mengajukan pergeseran anggaran, dampaknya adalah pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat;
2. Belum optimalnya perencanaan anggaran kas pada setiap perangkat daerah, penyusunan

anggaran kas tidak memperhitungkan waktu pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran kas yang disusun tidak dipedomani dalam pelaksanaan anggaran sehingga pengajuan pencairan menumpuk pada akhir tahun;

3. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan karena menunggu dokumen perencanaan yang sedang disusun atau menunggu pembebasan lahan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadi cut off di akhir tahun;
4. Terkendala dalam persiapan dan proses pengadaan barang dan jasa dengan jumlah petugas terbatas tidak sebanding dengan jumlah paket yang akan diproses melalui UPBJ;
5. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
6. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, kendala lahan, permasalahan hukum, hambatan cuaca);
7. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Petunjuk Teknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok diantaranya adalah:

1. Menyusun perencanaan secara tepat sasaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Setiap tahapan dilakukan melalui proses verifikasi rincian belanja, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam menyusun perencanaan;
2. Penyusunan anggaran Kas disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan; sebagai pengendaliannya adalah anggaran kas yang telah diajukan tetapi tidak dilaksanakan/ tidak diserap akan ditangguhkan, perangkat daerah yang membutuhkan anggaran dapat mengajukan kembali kembali usulan kebutuhan anggaran kas;
3. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (e-controlling);
4. Belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya permasalahan lain maka akan dihapus dan diganti dengan belanja prioritas;
5. Peningkatan Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan toko daring; peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi

dan keuangan kegiatan;

6. Peningkatan monitoring dan evaluasi setiap trwiulan serta pemberian reward and punishment terkait dengan capaian kinerja kegiatan;
7. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
8. Mewajibkan pelaksanaan swakelola, khususnya untuk pengelolaan dana di kelurahan melalui Dana RW

DRAFT

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hal mendasar dalam menentukan pilihan strategi dalam pencapaiannya. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

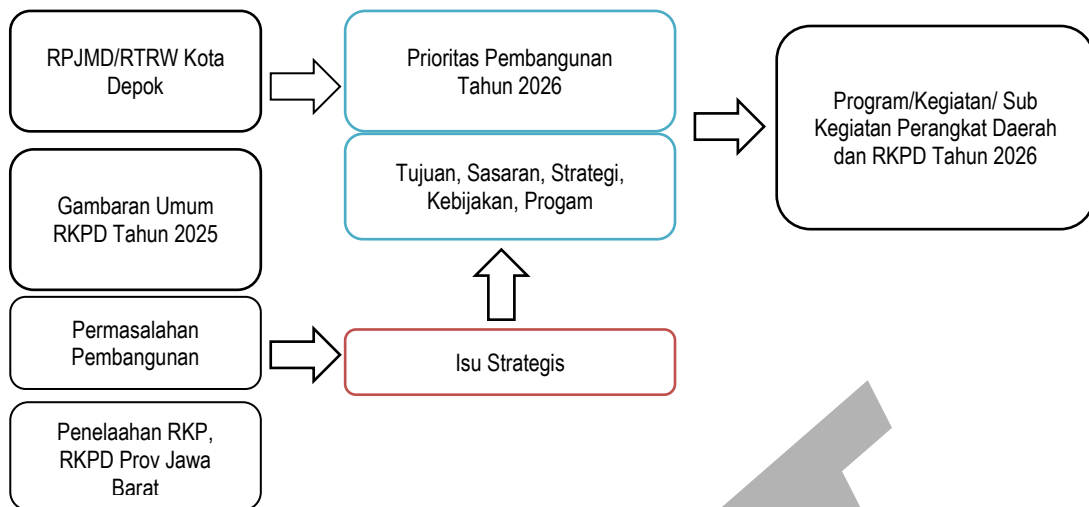
Dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah, perencanaan pembangunan Kota Depok dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antar lain melalui APBD Kota Depok, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, CSR, pinjaman daerah dan pembiayaan lain sesuai ketentuan perundangan, memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas berbasis program dan menjaga kesinambungan antar dokumen perencanaan melalui 12 (dua belas) program prioritas pembangunan tahun 2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2026 mengacu dan memperhatikan : (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 ; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2025; (3) Program Prioritas Nasional (ProSN); (4) Kebijakan Pelaksanaan Rakortekrenbang (5) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, (6) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ; (7) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2026; dan (8) RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042.

Dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan, dilakukan pengendalian secara periodik dan berkala, dimana hasil pengendalian menjadi dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis yang akan menjadi salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, Program Strategis Nasional, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Pembangunan daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2026 untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029. Selain pengembangan program, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan dengan memperhatikan upaya-upaya pemantapan ekonomi Kota Depok melalui program-program unggulan pembangunan sarana prasarana pendidikan, bantuan biaya bimbingan belajar, beasiswa dan/atau bantuan pendidikan, rumah kreatif anak istimewa, pemerataan pembangunan dan layanan kesehatan, Rumah Sakit layanan unggulan ginjal, fasilitasi wisata keberagaman dan perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah, jaminan sosial tenaga kerja bagi RT, RW, LPM dan Pekerja Rentan, penyediaan prasarna pemusatan latihan cabang olah raga prestasi, penyediaan sarana olah raga masyarakat, pemabngunan pengelolaan sampah termaju, penataan drainase kota terintegrasi, penataan jalan dan penanganan kemacetan terintegrasi, jualan sama-sama UMKM naik kelas, pengelolaan lahan modern per kecamatan, pemabngunan Balai Latihan Kerja (BLK) terintegrasi dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan gedung pertunjukan kota dan ruang terbuka kreatif bertaraf nasional dan modern, dana RW sebesar 300 juta per RW per tahun, PBB gratis dengan NJOP kurang dari sama dengan 200 juta dan peningkatan kesejahteraan ASN dan Non ASN, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti persampahan, kemacetan, banjir, kemiskinan, stunting dan iklim investasi. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir RKPD Kota Depok Tahun 2026



Sumber: Hasil Analisa Bappeda, Tahun 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penetapan sasaran pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga keterkaitan terhadap sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pembangunan perlu dilaksanakan dengan bekerja sama antara seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berasar pada fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan cita-cita Indonesia Emas dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional atau goals (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, 2025

Sasaran utama pembangunan nasional pada jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan nasional tersebut tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission.

Rencana pembangunan nasional Tahun 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Kesetaraan Gender Pembangunan nasional memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Modal Sosial dan Budaya Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
6. Transformasi Digital Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021.

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu **“JAWA BARAT ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. **Perwujudan Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul**, memiliki Tujuan yaitu: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 2) Terbentuknya individu, beragama, beretika, dan berbudaya;
 - 3) Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
 - 4) Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan
 - 5) Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

2. **Perwujudan Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif.** Misi ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran :

- 1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk pemenuhan kebutuhan dalam dan luar negeri;
- 2) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan;
- 3) Meningkatkan Sektor Perdagangan melalui optimalisasi distribusi barang dan jasa;
- 4) Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif;

Tujuan 2 : Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja Lapangan Berusaha

- 1) Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
- 2) Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

3. **Perwujudan Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya,** memiliki tujuan yaitu : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
- 2) Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
- 3) Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.

4. **Perwujudan Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dengan Prinsip Good and Clean Governance.** Terdapat dua tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya penerapan iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan
- 2) Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Depok

Dalam rangka mewujudkan visi “**Bersama Depok Maju**” sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, maka diperlukan tujuan pembangunan yang menjadi langkah konkret untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Tujuan ini merupakan turunan langsung dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta disusun berdasarkan identifikasi tantangan, potensi, dan isu strategis pembangunan yang dihadapi Kota Depok dalam lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam kebijakan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki relevansi dengan visi besar yang ingin dicapai. Dengan demikian, setiap tujuan pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045.

Selain itu, penyusunan tujuan pembangunan juga mempertimbangkan keterkaitan dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kota Depok tetap selaras dengan strategi pembangunan nasional dan regional, sehingga dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan adanya tujuan yang jelas dan terukur, diharapkan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing Kota Depok sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

1) **Misi 1 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara Inklusif**

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga dan pemuda, serta kohesi sosial. Misi ini bertujuan untuk **Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**. Keberhasilan misi ini diukur melalui pencapaian *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* sebagai indikator utama, dengan sejumlah sasaran strategis yang dikembangkan secara sistematis. Pemilihan indikator tersebut utamanya karena adanya relevansi langsung dengan tujuan misi.

Misi 1 menekankan pembangunan manusia yang inklusif. IPM secara langsung mengukur capaian pembangunan manusia dalam aspek yang paling esensial, sehingga sangat relevan sebagai indikator utama. IPM mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Ketiganya merupakan fondasi utama dalam pembangunan SDM yang inklusif dan

berkelanjutan. Secara global, IPM digunakan secara luas oleh BPS, UNDP, dan lembaga internasional lainnya, sehingga menjadikannya indikator yang diakui secara luas dan memungkinkan perbandingan lintas wilayah maupun global. IPM tidak hanya mengukur kuantitas layanan, tetapi juga kualitas hasil pembangunan SDM, seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan daya beli masyarakat. Sehingga penggunaan IPM sebagai indikator utama dalam misi ini akan memperkuat dasar perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja daerah, baik dalam evaluasi internal maupun kepada publik.

Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator yakni *Harapan Lama Sekolah (HLS)*. Indikator ini mencerminkan capaian aktual dan potensi masa depan dalam hal pendidikan, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Meningkatnya HLS menggambarkan optimisme terhadap masa depan pendidikan di Kota Depok. Akses yang merata dan kualitas pendidikan yang meningkat menjadi prasyarat penting untuk menjamin keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Sasaran kedua berfokus pada meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana-prasarana pelayanan kesehatan. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah *Usia Harapan Hidup (UHH)* dan *Prevalensi Stunting*. UHH mencerminkan rata-rata umur harapan hidup masyarakat sebagai hasil dari perbaikan layanan kesehatan secara umum, termasuk promosi kesehatan, pelayanan kuratif, serta perlindungan sosial. Sementara itu, prevalensi stunting mengukur seberapa besar tantangan gizi kronis yang dihadapi anak-anak di usia dini. Penurunan prevalensi stunting menjadi indikator keberhasilan dalam menjamin masa depan generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari hambatan perkembangan. Kedua indikator ini sekaligus menjadi cerminan dari efektivitas sistem kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran ini menggunakan *Indeks Pembangunan Pemuda* dan *Indeks Pembangunan Keluarga* sebagai alat ukur. Indeks Pembangunan Pemuda mengevaluasi partisipasi dan potensi generasi muda dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, sementara Indeks Pembangunan Keluarga menilai ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan mengembangkan pemuda dan keluarga sebagai dua pilar utama kehidupan sosial, Pemerintah Kota Depok menempatkan pondasi pembangunan tidak hanya pada aspek individu, tetapi juga pada struktur sosial terkecil, yaitu keluarga, sebagai ruang utama pembentukan nilai, etika, dan kesiapan menghadapi masa depan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kohesi sosial masyarakat, yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan harmoni di tengah keragaman. Dua indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah *Indeks Konflik Sosial* dan *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Indeks Konflik Sosial

mengidentifikasi dan memantau potensi atau intensitas konflik yang dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman, sementara Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur seberapa kuat relasi sosial antar kelompok agama dalam konteks toleransi, saling menghormati, dan kerja sama. Kohesi sosial yang tinggi tidak hanya menjamin ketenangan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Depok sebagai kota yang multikultural, perlu membangun relasi sosial yang harmonis agar visi “Bersama Depok Maju” dapat terwujud dalam semangat kebersamaan dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan strategi pembangunan manusia yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial serta stabilitas masyarakat. Dengan adanya indikator-indikator yang terukur, kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih terarah dan dievaluasi secara sistematis untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia yang lebih inklusif dan berdaya saing di Kota Depok.

2) Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan

Dalam arah pembangunan Kota Depok mengedepankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya modern dan tangguh, tetapi juga berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim. Misi ini berangkat dari tantangan nyata yang dihadapi kota-kota dalam kawasan metropolitan seperti Depok, termasuk tingginya tekanan urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim. Tujuan utama dari misi ini adalah **terwujudnya infrastruktur yang maju, merata, ramah lingkungan, dan berketahanan iklim**. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan indikator utama berupa *Indeks Kota Hijau*, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kota dalam mengintegrasikan aspek pembangunan hijau, efisiensi sumber daya, dan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama dari misi ini adalah *meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah*. Sasaran ini berangkat dari kebutuhan strategis untuk memperbaiki sistem transportasi dan mobilitas warga, sekaligus menurunkan beban lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Dengan membangun jaringan jalan dan transportasi umum yang efisien dan terhubung, pemerintah kota berupaya menciptakan pergerakan antar wilayah yang cepat, terjangkau, dan berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah *Level of Service (LoS)*, yang menunjukkan tingkat kinerja dan kenyamanan sistem transportasi secara keseluruhan. Target penurunan V/C Ratio - *Level of Service (LoS)* ditetapkan secara bertahap melalui skema pembangunan selama tiga tahun pertama (2025-2028) sebesar 0,01 per tahun. Selanjutnya, percepatan penurunan dilakukan melalui intervensi kebijakan lanjutan pada 2028-2030 dengan penurunan sebesar 0,015 per tahun. Penurunan tersebut didukung dengan intervensi kebijakan lainnya. Strategi ini disusun untuk menjamin peningkatan

kinerja layanan transportasi secara berkelanjutan dan terukur.

Sasaran kedua adalah meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dan krisis iklim, yang menjadi semakin krusial seiring meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Untuk itu, kebijakan dan infrastruktur yang mendukung mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim harus diperkuat. Pemerintah kota menilai efektivitas kebijakan ini menggunakan Indeks Risiko Bencana, yang menggambarkan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana serta kapasitas respons yang dimiliki. Target penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 0,2 poin per tahun sebagai bentuk sasaran yang realistis dan terukur, mengingat adanya intervensi langsung pada sumber risiko utama, yakni banjir dan genangan. Intervensi tersebut meliputi perbaikan dan revitalisasi jaringan drainase dan optimalisasi fungsi setu sebagai bagian dari sistem pengendali banjir alami dan buatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pengurangan kerentanan wilayah secara bertahap serta peningkatan ketahanan adaptif masyarakat terhadap dampak bencana dan krisis iklim yang semakin kompleks..

Sasaran ketiga menitikberatkan pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran ini mendukung terciptanya ekosistem kota yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan sampah, kualitas udara, air, dan ruang terbuka hijau. Salah satu upaya strategis adalah pengembangan kegiatan *Car Free Day* yang berperan dalam mengurangi emisi polutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bersih dan sehat. Untuk mengukur pencapaiannya, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah, yang mencakup evaluasi menyeluruh atas kondisi fisik, kimia, dan biologi lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat perkotaan. Penetapan target IKLH Kota Depok merujuk pada pendekatan top-down yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penyesuaian target ini dilakukan untuk mencerminkan sinkronisasi antar level perencanaan serta menyesuaikan dengan perubahan metodologi perhitungan IKLH secara nasional. Melalui berbagai program strategis seperti pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, yang didukung penggunaan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dan efisien. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IKLH secara konsisten dan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Sasaran keempat adalah *terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan*. Dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan hunian yang layak, terjangkau, serta ramah lingkungan menjadi sangat mendesak. Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan nyaman. Untuk itu, indikator yang digunakan adalah *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan*, yang menilai seberapa luas jangkauan dan keberhasilan intervensi kebijakan

perumahan kota. Justifikasi target dalam RPJMD ini disusun selaras dengan arah pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Depok, diharapkan target ini mampu mendorong pengembangan permukiman terintegrasi dengan layanan dasar, transportasi, serta ruang terbuka hijau.

Landasan perumusan tujuan dan sasaran ini tidak hanya bertumpu pada kebutuhan lokal tetapi juga selaras dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 11 (*Sustainable Cities and Communities*) serta tujuan 13 (*Climate Action*). Dengan pendekatan berbasis data dari Perda Kota Hijau dan standar internasional terkait kota hijau, pembangunan infrastruktur di Kota Depok diharapkan dapat menjadi model bagi kota lain dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

3) **Misi 3 : Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi**

Berlandaskan pada kebutuhan strategis untuk menjawab isu dan tantangan utama pembangunan Kota Depok yang berkaitan dengan transformasi ekonomi, daya saing daerah, serta inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perubahan lanskap ekonomi global, nasional, maupun lokal, pertumbuhan ekonomi suatu daerah kini tidak lagi semata-mata bergantung pada eksploitasi sumber daya alam atau tenaga kerja murah, melainkan ditentukan oleh kapasitas inovasi, kemampuan adaptasi teknologi, serta penguatan sektor ekonomi berbasis kreativitas dan nilai tambah. Oleh karena itu, Depok dituntut untuk mentransformasi struktur ekonomi daerah agar lebih dinamis, resilient, dan inklusif.

Tujuan utama dari misi ini adalah **terwujudnya pembangunan ekonomi yang kreatif berbasis teknologi**, yang diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan berkelanjutan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, digunakan indikator *Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*, yang menggambarkan pertumbuhan output ekonomi secara makro dari sisi produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan sektor-sektor strategis.

Pertumbuhan makroekonomi Kota Depok hingga 2030 diproyeksikan bergerak dalam koridor moderat namun konsisten. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditetapkan mengikuti rentang target RPJPD 2025-2045 dan RPJMN, yaitu 5,4 – 6,7 persen, dengan capaian kumulatif 35 – 40 persen pada akhir Tahap I. Kenaikan ini diasumsikan terjaga oleh kelancaran program infrastruktur dasar, pemulihan aktivitas pascapandemi, serta koordinasi pengendalian inflasi lintas sektor. Sejalan dengan itu, laju PDRB per kapita—berangkat dari baseline 4,58 persen pada 2024—ditingkatkan 28,5 persen hingga 2030 sehingga mengikuti kurva kenaikan LPE secara proporsional. Kinerja investasi juga dipatok naik 14 persen pada 2030, setara setengah laju peningkatan LPE, selaras dengan fakta bahwa porsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Depok berkisar 50–53 persen dari total PDRB. Strategi

penataan kawasan ekonomi, skema KPBU, dan portal e-catalog peluang investasi diharapkan menarik arus modal baru, khususnya ke sektor pengolahan dan perdagangan besar.

Dari sisi kualitas pertumbuhan, indikator ketimpangan dan kemiskinan diproyeksikan bergerak terkendali. Rasio Gini diarahkan turun moderat, mencapai 20 persen dari target akhir RPJPD (0,366 – 0,389) melalui efektivitas program bantuan sosial, padat karya, dan dukungan khusus bagi UMKM mikro serta keluarga rentan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang secara historis turun rata-rata 0,2 poin per tahun, diproyeksikan turun optimis hingga 55 persen dari rentang target 5,2 – 4,5 persen pada 2045. Asumsi ini bertumpu pada beroperasinya BLK terintegrasi, penempatan kerja berbasis digital, dan investasi pro-job creation. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun secara lebih konservatif, hanya 15 persen menuju batas bawah target 0,24 – 0,39 persen, mengingat risiko “natural rate of poverty” dan diminishing marginal returns terhadap penurunan kemiskinan di perkotaan padat.

Perubahan struktur ekonomi juga tercermin dalam rasio PDRB sektoral. Kontribusi industri pengolahan, meski tetap terbesar, diproyeksikan turun moderat 20 persen dari baseline 29,16 persen menuju 26,53 persen pada 2045, menandai de-industrialisasi yang sejalan dengan pergeseran ke jasa dan ekonomi kreatif. Sebaliknya, rasio PDRB ekonomi kreatif diharapkan menanjak ke 20 persen pada 2030, menuju target 25 persen pada 2045. Kenaikan ini akan ditopang oleh event budaya berskala nasional, integrasi pariwisata, serta pembangunan Gedung Pertunjukan Kreatif sebagai katalis ekosistem aplikasi, gim, film, animasi, dan subsektor digital lain. Penataan rangkaian event, promosi lintas platform, dan strategi pemanfaatan aset budaya secara terstruktur menjadi kunci akselerasi.

Sasaran pertama dalam misi ini adalah *meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan*, yang diukur melalui indikator *Laju PDRB per Kapita* serta *Laju Investasi*. Sasaran ini mencerminkan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dalam distribusi manfaat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan per individu. Kualitas pertumbuhan ekonomi dilihat dari daya serapnya terhadap tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan kemampuannya menopang ketahanan ekonomi lokal. (masuk UMKM +koperasi merah putih), singung urban farming untuk untuk stabilisasi harga.

Sasaran kedua adalah *menguatkan ekonomi sektor-sektor prioritas daerah berbasis teknologi*. Sasaran ini difokuskan pada pengembangan sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta peningkatan iklim investasi yang inovatif dan produktif pada sektor-sektor potensial lainnya. Indikator yang digunakan meliputi ~~rasio~~ *Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan* dan *PDRB ekonomi kreatif*. Pendekatan ini menekankan pentingnya *economic upgrading* dari sektor-sektor potensial untuk menciptakan nilai tambah berbasis inovasi, sekaligus memastikan arah transformasi perekonomian Kota Depok ke sektor tersier dan adaptif terhadap berbagai disrupsi teknologi.

Transformasi ekonomi Kota Depok diarahkan ke sektor tersier dengan tetap menjaga kontribusi sektor-sektor utama yang selama ini menjadi penopang PDRB, seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Meskipun industri pengolahan mengalami tren penurunan kontribusi dalam satu dekade terakhir, peran sektor ini masih signifikan dan tetap perlu didorong dari sisi peningkatan nilai tambah dan efisiensi proses. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta konstruksi menunjukkan tren positif yang dapat menjadi kekuatan baru dalam menopang ekonomi lokal, terutama melalui integrasi dengan sektor lain seperti logistik, distribusi digital, dan hunian berkelanjutan.

Dalam konteks daya saing wilayah sebagai kota penyangga DKI Jakarta, sektor transportasi dan pergudangan juga harus diperkuat sebagai simpul logistik strategis. Meski kontribusinya terhadap PDRB masih stagnan dalam rentang 4,5%–4,8%, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi jangka panjang yang menjanjikan. Kota Depok perlu menangkap momentum ini dengan mendorong investasi di bidang transportasi barang, sistem distribusi modern, dan kemitraan logistik berbasis teknologi yang terhubung dengan pelaku UMKM dan pasar ritel lokal.

Transformasi menuju sektor tersier juga menempatkan sektor pariwisata, khususnya MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), sebagai pendorong pertumbuhan baru. Posisi geografis Depok yang strategis dan kedekatannya dengan Jakarta serta keberadaan kampus-kampus unggulan memberi peluang besar untuk menarik event berskala nasional dan internasional. Namun, tren penurunan kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman (akmamin) dalam lima tahun terakhir menjadi alarm penting. Oleh karena itu, revitalisasi sektor ini harus dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi berbasis edukasi dan budaya, serta kerja sama aktif dengan institusi dan korporasi besar sebagai penyelenggara kegiatan berskala luas di Depok.

Selanjutnya, sektor ekonomi kreatif menjadi ruang utama transformasi berbasis teknologi, terutama pada subsektor digital seperti aplikasi, permainan (*game*), animasi, dan film. Dukungan terhadap pelaku ekraf lokal melalui inkubasi, pelatihan, akses pembiayaan, dan ruang kreasi kolaboratif menjadi krusial. Strategi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadikan kreativitas dan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

Selain itu, sektor pertanian dalam kota (*urban farming*) tetap menjadi elemen penting dalam kerangka ekonomi hijau dan ketahanan pangan lokal. Meskipun kontribusinya kecil terhadap PDRB, upaya mempertahankan dan mengembangkan pertanian kota patut diapresiasi. Urban farming berbasis komunitas perlu diperluas sebagai solusi atas fluktuasi harga komoditas tertentu seperti cabai dan bawang merah yang kerap memicu inflasi lokal.

Sasaran ketiga adalah *menurunnya angka pengangguran disertai peningkatan kualitas pekerjaan (decent jobs)*, yang diukur melalui *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*. Kota Depok sebagai pusat pertumbuhan kawasan aglomerasi Jabodetabek menghadapi tantangan utama dalam menyediakan lapangan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk usia kerja yang tinggi. Selain itu, struktur ekonomi berbasis jasa menuntut peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam sektor-sektor modern yang berkembang.

Strategi utama diarahkan pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja produktif yang selaras dengan dinamika transformasi ekonomi berbasis teknologi. Langkah ini ditempuh melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta fasilitasi sistem informasi pasar kerja digital. Selain itu, sinergi program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya produktif, penumbuhan wirausaha baru, serta dukungan bagi sektor informal juga terus diperkuat. Dengan baseline TPT sebesar 6,27 persen pada tahun 2024, target penurunan TPT menjadi 5,297 persen pada tahun 2030 diproyeksikan secara bertahap melalui strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penguatan intermediasi antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

Sasaran keempat adalah *menurunnya tingkat kemiskinan*, yang diukur melalui *persentase penduduk miskin*. Meskipun Kota Depok mencatat angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, tantangan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas, terutama karena kompleksitas dinamika kemiskinan di wilayah perkotaan. Kemiskinan di Kota Depok tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses yang belum merata terhadap pekerjaan produktif, hunian layak, serta infrastruktur dasar di sejumlah kawasan padat penduduk.

Tantangan kemiskinan struktural di wilayah urban seperti Depok juga mencakup tekanan biaya hidup yang tinggi, ketergantungan pada sektor informal, serta keterbatasan aset produktif yang dimiliki rumah tangga miskin. Banyak rumah tangga berada dalam kondisi rentan (*near poor*), yang sewaktu-waktu dapat terdorong ke bawah garis kemiskinan akibat fluktuasi ekonomi atau guncangan sosial. Ketimpangan spasial pembangunan antarwilayah masih terjadi, dan permasalahan permukiman tidak layak maupun kepadatan hunian turut memperburuk kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi pengurangan kemiskinan diarahkan pada pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor. Pemerintah Kota Depok mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui fasilitasi pengembangan UMKM, koperasi lokal, serta pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, program perlindungan sosial diperkuat melalui skema bantuan yang lebih terarah serta sinergi antarperangkat daerah dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan *baseline* kemiskinan sebesar 2,34 persen pada tahun 2024, target penurunan menjadi 1,8 persen pada tahun 2030 ditetapkan secara bertahap dan realistis, dengan

harapan terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kota Depok.

Secara keseluruhan, Misi 3 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Depok harus ditransformasikan menuju arah yang lebih adaptif terhadap disrupsi teknologi, berpihak pada ekonomi rakyat, serta mendorong inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Melalui strategi ini, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan dapat lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh warga kota.

4) **Misi 4 : Peningkatan Transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital**

Misi ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan responsif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi dan memperluas adopsi sistem digital dalam berbagai aspek tata kelola.

Tujuan utama dari misi ini adalah **meningkatkan transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital**. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Depok untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemanfaatan teknologi digital. Ukuran keberhasilan dari transformasi ini tercermin dalam *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)*, yang mengukur sejauh mana upaya reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penyederhanaan proses birokrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Selaras dengan Tujuan Misi 4 yang mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola digital. Reformasi birokrasi adalah pondasi utama yang memungkinkan digitalisasi dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas. Indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB tersebut menjadi salah satu ukuran terstandar dan terukur, dengan hasil yang dapat dibandingkan secara nasional, sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja lintas periode RPJMD. Reformasi birokrasi meningkatkan kinerja pelayanan publik, menekan praktik KKN, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan transparansi. Transformasi digital dalam tata kelola akan efektif jika fondasi reformasi birokrasi sudah terbentuk kuat dan terukur.

Selain fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik, misi ini juga mencakup *penguatan kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan*, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sasaran ini penting untuk memperluas jejaring kerja sama yang mendukung pembangunan daerah secara lebih sinergis dan terpadu. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator *Indeks Kolaborasi Pemerintahan dan Pembangunan*, yang mencerminkan intensitas dan kualitas hubungan

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga akademik, serta mitra internasional.

Dengan mendorong digitalisasi layanan dan tata kelola yang inklusif serta membangun kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, Pemerintah Kota Depok diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Misi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya kota yang modern, efisien, dan demokratis.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029

MISI RPJPD 2025 – 2045		MISI RPJMD 2025– 2029	
1		2	
Misi 1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif Sehat dan Cerdas	Misi 1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Secara Inklusif
Misi 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang kreatif, inovatif, dan bertumpu pada ekonomi hijau	Misi 3	Pembangunan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi
Misi 3	Mewujudkan Transformasi Tata kelola Pemerintahan yang Melayani, Berbasis Digital, dan Berkelas Dunia	Misi 4	Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
Misi 4	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah		(Terintegrasi dalam Misi 3 dan 4)
Misi 5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berbasis Ketahanan Keluarga		(Terintegrasi dalam Misi 1, 2, dan 3)
Misi 6	Meningkatkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan		(Menjadi Prinsip dalam Seluruh Misi RPJMD)
Misi 7	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan
Misi 8	Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan		(Menjadi Prinsip dalam Seluruh Misi RPJMD)

Sumber : draft Rانhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2026

Keselarasan antara Misi RPJPD Kota Depok Tahun 2025–2045 dan Misi RPJMD Tahun 2025–2029 mencerminkan konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang saling terintegrasi dan saling memperkuat. Setiap misi dalam RPJMD dirancang sebagai bentuk operasionalisasi dari misi strategis dalam RPJPD, dengan memperhatikan urgensi implementasi dalam lima tahun ke depan tanpa mengabaikan arah transformatif jangka panjang. Misalnya, fokus pada penguatan SDM yang inklusif, pembangunan ekonomi kreatif berbasis teknologi, serta transformasi tata kelola berbasis digital adalah bagian dari upaya konkret dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih luas sebagaimana diarahkan dalam RPJPD. Selain itu, prinsip-prinsip strategis seperti pemerataan pembangunan wilayah, keberlanjutan lingkungan, ketahanan sosial dan budaya, serta penguatan infrastruktur pelayanan dasar yang ramah lingkungan juga telah melekat dalam pelaksanaan seluruh misi RPJMD, baik secara eksplisit maupun terintegrasi lintas misi. Dengan pendekatan ini, Kota Depok tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan keadilan pembangunan, tetapi juga menyusun kerangka kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lokal, nasional, dan global.

Berikut ini tabel baseline dan target indikator tujuan dan indikator sasaran sesuai misi Pembangunan Kota Depok 2025-2029.

Tabel 4.2. Baseline dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Depok

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Misi 1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara Inklusif	T.1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	83,05	83,44	83,96
			S.1.1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,11	14,2	14,28
			S.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	Poin	75,82	75,87	76,18
				Prevalensi Stunting	Persen	12,5	11,26	10,20
			S.1.3 Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	67,3	68,8	70,44
				Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	63,49	66,44	69,39
			Indeks Potensi Konflik Sosial		Poin	1,54	1,52	1,50
2	Misi 2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Yang Maju dan Ramah Lingkungan	T.2 Terwujudnya Infrastruktur yang Maju, Merata, Ramah Lingkungan dan Berketahanan Iklim	Indeks Kota Hijau		Persen	53,73	54,54	55,35
			S.2.1 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Level of Service (LoS)	Poin	C (0,72)	C (0,70)	C(0,69)
			S.2.2 Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dan krisis iklim	Indeks Risiko Bencana	Poin	62,25	62,05	61,85

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
			S.2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	54,55	57,87	58,12
			S.2.4 Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	49,39	53,54	54,78
3	Misi 3 Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi	T.3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Persen	5,47	5.40 – 5,58	5,49-5,66
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju PDRB Per kapita	Persen	4,58	4,59-4,81.	4,82-5.03
				Laju Investasi	Persen	5,12	5.13-5.25	5.26-5.38
			Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	29,16	29.07	28.98
				PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	14,85	15,19	15,53
			Gini Rasio		Poin	0.398	0.391 - 0.398	0,376-0,404
			Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan <i>decent job</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6.27	6.199 - 6.15	6.07-5.95
4	Misi 4 Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik	T.4 Meningkatnya Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		Poin	87,11	87,16	87,21
			S.4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	87,11	87,16	87,21

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
	dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	S.4.2 Meningkatnya kolaborasi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional	Indeks Kolaborasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Persen	na.	50	55

Sumber : Bappeda Kota Depok Tahun 2025, diolah

DRAFT

Tabel 4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Depok Tahun 2026

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
	Misi 1 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara Inklusif	S.1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) 2. Peningkatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital 3. Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas 5. Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan 2. Pemerataan pembangunan sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan 3. Memperluas akses pendidikan berkualitas 4. Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu 5. Membentuk Layanan Unit Disabilitas
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan	1. Perubahan perilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Rumah Sakit Layanan Khusus Ginjal) 3. Percepatan penuntasan kasus <i>stunting</i> dan pencegahan <i>new stunting</i> 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak	1. Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan 2. Digitalisasi layanan kesehatan (telemedisin) 3. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat 4. Pemenuhan dan peningkatan SDM kesehatan 5. Pembudayaan hidup sehat, pengendalian faktor risiko penyakit, dan penyehatan

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
			menular	lingkungan
		S.3 Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Pemberdayaan Perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian. 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya 4. Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi Pembangunan 5. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga	1. Mengembangkan Ruang Publik untuk Olahraga 2. Mendorong Pembinaan Atlet Muda dan Talenta Berbakat 3. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas 4. Meningkatkan program kepemudaan seputar kapasitas pemuda
		S.4 Meningkatnya kohesi sosial dan pelestarian kebudayaan daerah	1. Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa 2. Penguatan keamanan dan ketertiban Masyarakat 3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis 4. Penguatan kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural	Meningkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat melalui dialog dan kerjasama antar komunitas
	Misi 2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Yang Maju dan Ramah Lingkungan	S.5 Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas kota yang berkelanjutan	1. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 2. Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata 3. Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan	1. Meningkatkan Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan strategis antar wilayah 2. Memfasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
			sarana dan prasarana perkotaan secara merata 4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok 5. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek 6. Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah 7. Penyiapan pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	yang inklusif 3. Melaksanakan pembangunan awal jalan penghubung wilayah Barat-Timur 4. Membangun simpul transportasi publik di pusat-pusat pelayanan kota
		S.6 Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dan krisis iklim	1. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Infrastruktur untuk Ketahanan Bencana 2. Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Rendah Emisi 3. Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (<i>smart city</i>), kota kreatif (<i>creative city</i>) dan kota hijau (<i>green city</i>)	1. Memantau penerbitan izin pemanfaatan ruang sesuai regulasi, penguatan penegakan hukum dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sistem drainase yang terpadu, dan optimalisasi fungsi infrastruktur biru. 2. Menyelesaikan dokumen rencana dan regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarna pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
		S.7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan teknologi. 2. Penerapan ekonomi sirkular dan <i>smart waste management</i>. 3. Pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami melalui kolaborasi multipihak dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan.	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui integrasi system pengelolaan SDA, pengendalian pencemaran, dan optimalisasi pemanfaatan ruang hijau sebagai penyangga ekologis kota
		S.8 Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan	1. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di kawasan kumuh, melalui fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman. 2. Perluasan layanan air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan jaringan perpipaan, infrastruktur air baku, serta pengembangan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan.	Mendorong arah Pembangunan perumahan dan sanitasi berbasis kolaborasi multi-pihak dan regulasi pendukung
	Misi 3 Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi	S.9 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Penguatan pengendalian Tingkat inflasi daerah 2. Kemudahan layanan perizinan dan non perizinan 3. Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah 4. Penguatan dukungan pada produk unggulan dan perlindungan konsumen 5. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif 6. Modernisasi koperasi dan kelembagaan ekonomi rakyat 7. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link dan match</i> industri besar dengan IKM/UMKM 8. Pemberian deregulasi dan	1. Menyederhanakan regulasi dan kemudahan perijinan/non perijinan untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, pemberdayaan dan pengembangan UMKM 2. Mengembangkan pertanian modern untuk pengendalian tingkat inflasi daerah

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
			debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonominya produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan 9. Penataan dan restrukturisasi BUMD 10. Pemberdayaan komunitas dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya	
		S.10 Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	1. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif 2. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Motor melalui adopsi teknologi proses dan diversifikasi produk 3. Revitalisasi pariwisata dan sektor akomodasi makan minum melalui peningkatan kualitas destinasi dan penyelenggaraan event berskala besar 4. Pengembangan ekonomi kreatif digital melalui inkubasi talenta, kolaborasi dan akses pasar daring 5. Penguatan simpul logistik kota melalui pengembangan transportasi dan pergudangan terintegrasi 6. Penguatan pondasi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan 7. Peningkatan ketahanan pangan lokal melalui <i>urban farming</i> berteknologi dan perbedayaan komunitas	1. Meningkatkan kapasitas SDM ekonomi kreatif melalui pelatihan digital skill dan inkubasi produk kreatif lokal 2. Memperkuat konektivitas pasar dan efisiensi distribusi melalui digitalisasi rantai pasok UMKM dan pelaku perdagangan besar 3. Menghidupkan kembali destinasi pariwisata lokal melalui penataan kawasan dan aktivasi event seni-budaya komunitas 4. mengintensifkan pembijnaan dan pelatihan pertanian rumah tangga berbasis hidroponik, akuaponik, dan vertikultur
		S.11 Menurunnya angka pengangguran yang	1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung	Menguatkan kurikulum pendidikan dan pelatihan

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
		disertai peningkatan <i>decent job</i>	percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri	ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan dan penempatan kerja dalam dan luar negeri.
		S.12 Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan kemandirian sosial 2. Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan 3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional 4. Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional 5. Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat rentan miskin melalui peningkatan produktivitas pekerja dan memberikan akses lapangan kerja 2. Menurunkan pengeluaran masyarakat rentan miskin melalui kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan dasar
	Misi 4 Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	S.13 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur	1. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif 3. Pengembangan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata Kelola, politik, hukum dan keamanan daerah 5. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka	Melakukan penguatan Kerjasama antar daerah dan antar Lembaga untuk peningkatan kebijakan, infrastruktur fisik dan infrastruktur digital

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
			transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan 6. Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blank spot</i> 7. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>) 9. Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. 10. Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan <i>agile</i> 11. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat. 12. Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis 13. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 14. Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi lingkungan, dan tata kelola pemerintahan 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota 17. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 18. Evaluasi pada tahapan fondasi pembangunan 2025-2029	

No	Misi	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
		S.14 Meningkatnya kerjasama pengembangan pemerintahan dan pembangunan di tingkat di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional	1. Pelaksanaan hubungan kemitraan <i>sister city</i> dalam rangka Pembangunan perkotaan 2. Kerja sama daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan 3. Penguatan hubungan pusat daerah dan kerja sama antar daerah 4. Kerja sama dan koordinasi antar daerah dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan pengelolaan potensi antar wilayah	1. Memperkuat Kerjasama antar daerah dan antar lembaga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Menciptakan Kerjasama antar daerah yang mendukung kolaborasi efektif antar kota wilayah perbatasan

Sumber: Bappeda Kota Depok Tahun 2025, diolah

4.2 Prioritas Pembangunan

Pembangunan Kota Depok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Depok dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2025, dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pada dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2025 telah ditetapkan Tema RKP, sasaran pembangunan dan prioritas nasional. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing PN memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;

Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;

Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;

Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;

Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;

Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan sasaran, permasalahan dan isu strategis pembangunan serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD. Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2026 juga ditetapkan untuk mendukung Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026.

7.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 mendapat saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok sebagai berikut :

- A. Sekretariat Daerah Kota Depok : Dalam Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi khususnya terkait dengan efisiensi penganggaran;
 2. Terkait penegasan batas wilayah, agar dilakukan inventarisasi dan penetapan terhadap : a. batas-batas wilayah baik batasan antar Kabupaten/Kota maupun batas wilayah antar RT RW di Kota Depok; b. batas-batas aset milik Pemerintah Daerah khususnya pada sarana pendidikan, sarana olah raga dan sarana ibadah;
 3. Terhadap Aset Pemerintah yang sudah terbangun agar : a. dapat dilakukan Pengelolaan dan Pemanfaatan oleh Kelompok Masyarakat; b. segera dilengkapi dengan sertifikat.
 4. Agar disosialisasikan regulasi tentang mekanisme pemberdayaan lahan milik Pemerintah Daerah (khususnya sarana ibadah) untuk fungsi ekonom
- B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, disampaikan Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan terdapatnya keterbatasan dalam pengawasan terhadap Nomor Induk Berusaha, maka diusulkan agar dilakukan penambahan jumlah personil pengawas;
 2. Agar disusun regulasi yang mengatur tentang Block Plan, mengingat keberadaan block plan berdampak pada berkurangnya penyerahan Fasos Fasum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 3. Dalam pemberian perizinan khususnya terhadap pemeriksaan dokumen izin menara agar proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan secara teliti dan seksama;
 4. Agar dalam proses perencanaan penganggaran di bidang mitigasi pengawasan dan pengaduan perizinan lebih dioptimalkan;
 5. Agar disusun regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terkait sanksi yang dapat diterapkan pada perumahan tanpa izin yang sudah dibangun serta pelanggaran terhadap sepadan jalan dan sepadan sungai.
 6. Komisi A mendorong agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dapat melakukan tindakan penertiban bagi bangunan yang tidak memiliki izin, serta melakukan langkah koordinasi dengan SATPOL PP dan Dinas PUPR untuk mengatasi persoalan tersebut. Apabila diperlukan sebaiknya dinas yang berwenang dapat melakukan penertiban dan memberikan surat peringatan sebagaimana mestinya.
 7. Segera membangun mal-mal pelayanan publik yang amat dibutuhkan oleh masyarakat.
 8. Pengendalian dan pengawasan atas seluruh bangunan usaha jenis apapun dengan memastikan kepemilikan sertifikat laik fungsi (SLF) termasuk juga bagi sekolahsekolah atau sarana pendidikan lainnya.
 9. Selain itu, berkaitan dengan iklim investasi di Kota Depok, DPMPTSP perlu mengambil tindakan atas pengembang atau investor yang melakukan pelanggaran. Apabila dibutuhkan sebaiknya disediakan pelayanan perijinan yang proaktif misalnya dengan program jemput bola.
- C. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu bidang riset dan pengkajian, agar Bappeda mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Riset dan Inovasi Daerah
 2. Dalam penetapan Ruang Terbuka Hijau agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 3. Agar dalam penyusunan dokumen perencanaan, Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok;
 4. Agar diinfokan terkait jadwal peng-inputan SIPD.

- D. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Agar pengusulan jumlah ASN Kota Depok lebih dioptimalkan;
 2. Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran khususnya yang diperuntukan untuk PPPK dilakukan dengan seksama, sehingga tidak terjadi PHK masal terhadap PPPK di Kota Depok;
 3. Agar segera dibuat perencanaan Kebutuhan Pegawai di Kota Depok, yang dalam penentuan formasinya agar melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- E. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok :
1. Peningkatan Produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a. Dalam upaya meningkatkan minat baca di Kota Depok, agar dilakukan pengintegrasian Depok Open Space dengan sarana perpustakaan di lokasi tersebut; b. Dalam rangka memperluas jangkauan Perpustakaan serta untuk meningkatkan minat baca, agar dibentuk Perpustakaan di Tingkat RW.
 2. Transformasi Pelayanan Publik, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a. Terkait Sistem Informasi pengelolaan arsip agar dilakukan optimalisasi, khususnya terkait ketersediaan data arsip Kota Depok saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor.
- F. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok senantiasa melibatkan DPRD;
 2. Agar dibentuk Program Rekonsiliasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Depok;
 3. Agar diinventarisasi Organisasi Keagamaan yang ada di Kota Depok untuk kemudian dibentuk Forum Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Keagamaan di Kota Depok.
- G. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok :
1. Dalam lingkup Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a. Dilakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan ekonomi kreatif berbasis digital secara merata;
 2. Dalam lingkup Transformasi Pelayanan Publik, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi proses digitalisasi pelayanan publik secara online dan komprehensif (mulai dari proses pendaftaran pelayanan publik);

- b. Pembangunan sistem Pelayanan informasi yang terintegrasi mulai dari Perangkat Daerah sampai tingkat RT RW se Kota Depok pada satu account yang sama;
- c. Dilakukan penambahan penyebaran titik lokasi 1 RW 1 Wifi;
- d. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana digital dalam upaya pengamanan terhadap konten negatif;
- e. Dilakukan kodifikasi perizinan videotron di Kota Depok sebagai mekanisme kontrol Pemerintah Daerah;
- f. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penyebaran titik lokasi 1 (satu) RW 1 (satu) Wifi gratis;
- g. Dalam pemasangan dan penyebaran jaringan dilaksanakan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.

H. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok :

- 1. Dalam Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar difasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya agar dilakukan pengadaan crane. b. Agar dilakukan optimalisasi terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi keterampilan; c. Dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Peraturan Daerah agar melibatkan peran DPRD Kota Depok;
- 2. Dalam Lingkup Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a. Agar disusun regulasi tentang mekanisme teknis penertiban reklame, spanduk dan umbul-umbul di tempat umum; b. Agar dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima secara humanis dan konsisten; c. Dalam melakukan pelaksanaan penindakan agar senantiasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

I. Inspektorat Daerah Kota Depok, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1. Terhadap Inspektorat Daerah melakukan Pembinaan terhadap temuan mal administrasi pada Perangkat Daerah;
- 2. Dalam rangka meningkatkan Integritas Inspektorat Daerah Kota Depok, agar Inspektorat Daerah dapat merealisasikan Mandatory Spending pada Tahun 2026 yang akan datang;
- 3. Agar inspektorat melakukan audit pelaksanaan penerapan sanksi/penertibat pada setiap Perangkat Daerah;
- 4. Agar dilakukan Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Wali Kota terpilih.

- J. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar difasilitasi pengusulan insentif kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Agar dilakukan optimalisasi pelayanan kependudukan secara digital;
 3. Agar disusun data pergerakan dan peta penyebaran penduduk berdasarkan status kependudukan (penduduk asli dan migran);
 4. Dalam mengoperasikan Aplikasi bantu, agar melibatkan RT dan RW;
 5. Agar dibuat peta data kependudukan berdasarkan tingkat kelas ekonomi masyarakat Kota Depok;
 6. Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan dan pembebasan lahan di wilayah kerja agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait guna mencegah block plan;
 7. Optimalisasi pemanfaatan pelayanan elektronik dalam update data kependudukan;
 8. Optimalisasi penggunaan data kependudukan digital;
- K. Sekretariat DPRD Kota Depok :
1. Terhadap Anggaran yang berkaitan dengan anggota DPRD agar direncanakan dengan optimal;
 2. Agar difasilitasi perencanaan kegiatan seminar yang melibatkan Anggota DPRD;
 3. Agar difasilitasi peningkatan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD;
 4. Agar ditambah jumlah kegiatan Sosialisasi Perda, Sosialisasi Komisi, serta penambahan jumlah peserta sosialisasi dan reses
 5. Pengadaan Kendaraan Toyota Hi-Ace untuk masing-masing komisi
- L. Kecamatan :
1. Agar dilakukan fasilitasi pengajuan revitalisasi gedung Kelurahan Limo dan meruyung di Kecamatan Limo, Gedung kantor kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Cilodong di Kecamatan Cilodong, Gedung Kantor Kelurahan Cinere, Gandul dan Pangkalan jati di Kecamatan Cinere serta Renovasi Puskesmas Lewinanggung dan Cilangkap yang sudah;
 2. Dalam menyampaikan usulan RTLH agar direvisi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan;
 3. Agar penggunaan pakaian ASN tingkat Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas ASN yang berlaku;
 4. Agar difasilitasi perencanaan tata ruang Kota di tingkat Kecamatan;
 5. Terhadap progres pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan agar disampaikan kepada DPRD;

6. Dalam proses penetapan Fasilitas Kelurahan, agar di update pembaharuan data secara konsisten;
7. Agar difasilitasi pengajuan perbaikan Jalan Rivelia Hills.

Adapun Hasil Perumusan Pokok-Pokok Pikiran Komisi B Tahun 2026 Disusun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Diuraikan Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Sebagai Berikut :

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
 1. Pemerintah Daerah Perlu mendorong pemasaran, pemodalan, dan tempat usaha bagi pelaku UMKM di Depok Supaya UMKM benar-benar berkembang dan menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota, pemerintah harus mengambil peran aktif dalam Memfasilitasi Pemasaran UMKM, Mempermudah Akses Permodalan UMKM dan Menyediakan Tempat Pemasaran & Etalase UMKM.
 2. Pemerintah harus memastikan bahwa output dan outcome dari program pembinaan wirausaha benar-benar nyata dan terukur
 3. Pemerintah Kota perlu melakukan Pendataan UMKM yang memiliki omset pendapatan tinggi untuk melakukan kerjasama pembinaan UMKM yang berpendapatan kecil dan menengah
 4. Pemerintah harus segera bertindak agar potensi pendapatan dari UMKM besar tidak hilang, sementara usaha kecil tetap mendapat perlindungan dan pembinaan
 5. Memfasilitasi UMKM agar dapat bekerja sama dengan hotel-hotel di Kota Depok
 6. Penataan komunitas UMKM yang tumpang tindih memerlukan upaya pemetaan, klasifikasi, serta konsolidasi antar komunitas yang memiliki fokus usaha serupa
 7. Mendorong produk UMKM lokal masuk ke jaringan ritel modern seperti mall/supermarket / minimarket sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing dan pemasaran produk daerah
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
 1. Melakukan Pendataan Dan Tindakan Tegas Terhadap Tempat Hiburan Yang Tidak Memiliki Izin Resmi, Serta Memastikan Potensi Pajak Dari Sektor Hiburan Dapat Dioptimalkan Untuk Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Depok
 2. Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi Yang Baik, Aman, Nyaman Dan Berkelanjutan Diantaranya Melalui Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Depok Termasuk

Melakukan Pembaharuan Terkait Profil Pariwisata Di Kota Depok Dengan Berkoordinasi Dengan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok.

3. Melakukan Inovasi Dalam Bidang Investasi Penanaman Modal.
 4. Terkait Program Promosi Penanaman Modal Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Dengan Mengoptimalkan Penyajian Data Informasi Potensi Dan Peluang Investasi Dan Promosi Investasi Kepada Calon Investor Yang Terdiri Dari Penyusunan Profil Investasi Dan Promosi Investasi.
 5. Melakukan Kerjasama Dengan Investor Ataupun Perusahaan Yang Ada Di Kota Depok Dan Menyusun Regulasi Terkait Pengoptimalan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Kota Depok Berkoordinasi Dengan Dinas Ketenagakerjaan.
 6. Terkait Pelayanan Penanaman Modal Melakukan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan Melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Peningkatan Sarana System Teknologi Informasi Dan Melakukan Kerjasama Pelayanan Penanaman Modal Melalui Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Baik Secara Daring Maupun Nondaring.
 7. Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Perlu Melakukan Revisi Peraturan Wali Kota Terkait Perijinan Periklanan Atau Penyelenggaraan Reklame.
- C. Urusan Pemerintahan Di Bidang Pangan
1. Dalam Program Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Perlu Adanya Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan (Urban Farming), Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Diversifikasi Konsumsi Pangan, Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga;
 2. Dalam Program Kerawanan Pangan Perlu Dilakukan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan Kerawanan Pangan Daerah, Dan Pengadaan, Pengelolaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Daerah Kota Depok.
 3. Dalam Program Keamanan Pangan Perlu Dilakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar.

D. Urusan Perdagangan

1. Mengembangkan dan Melakukan Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional agar menjadi Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Terkait Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Melalui Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Dan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Masyarakat Harus Mencakup Pembangunan Fisik, Manajemen, Ekonomi, Dan Sosial.
3. Terkait Dengan Retribusi Daerah Atas Pelayanan Pasar, Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Optimalisasi Pendapatan Retribusi Dengan Melakukan Perbaikan Layanan Pemungutan Retribusi Dengan Menerapkan Teknologi Informasi Sehingga Menjadi Lebih Mudah Dan Tidak Bocor.
4. Terkait Dengan Optimalisasi Pelayanan Pasar Perlu Dilakukan Kajian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.
5. Melakukan Kolaborasi Program-Program Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Dengan Dinas-Dinas Maupun Instansi Terkait Agar Teralisasi, Dan Dapat Mendongkrak Perekonomian Serta Menghasilkan Output Masyarakat Sejahtera Di Kota Depok.

E. Urusan Pariwisata

1. Penguatan sektor pariwisata dengan menghadirkan ikon wisata yang khas bagi Kota Depok. Pemerintah Kota agar Menyusun konsep ikon pariwisata yang jelas, agar Depok dapat lebih dikenal sebagai kota yang memiliki daya tarik wisata, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
2. Mengoptimalkan Aset - Aset Daerah di Kota Depok.
3. Menggali Potensi Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Dan Olahraga
4. Perlu Adanya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Perlu Adanya Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi Atau Wadah Atau Lembaga Untuk Mendukung Masyarakat Dalam Menciptakan Produk-Produk Ekonomi Kreatif, Berpromosi Dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota, Serta Tersedianya Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi Yang Handal Dan Merata.
6. Memfokuskan Dan Mengembangkan Penemuan Daya Tarik Wisata Untuk Kota Depok Terkait Tempat Destinasi Yang Ada Di Kota Depok.

7. Mengoptimalkan Tempat-Tempat Wisata Di Kota Depok Dan Melakukan Penataan Umkm Di Tempat Wisata-Wisata Di Kota Depok

F. Urusan Penunjang Unsur Pemerintahan

Bidang Urusan Keuangan

Komisi B DPRD Kota Depok Menyampaikan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Komisi B DPRD Kota Depok Tahun 2026 Terhadap Bidang Urusan Keuangan Sebagai Berikut :

1. Membentuk Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mewajibkan atau mendorong perusahaan untuk melaporkan program CSR-nya.
3. Mengintegrasikan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. Memfasilitasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan Masyarakat
5. Perlu Melakukan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kota Depok Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Komisi B Mengusulkan Hal-Hal Sebagai Berikut:
 - a) Mengimplementasikan E- Retribusi.
 - b) Melakukan Inovasi Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Modern Terkait Peralihan Pembayaran Digitalisasi Dalam Memaksimalkan Pendapatan Retribusi Parkir.
 - c) Meningkatkan Retribusi Parkir Dengan Bekerja Sama Antara Dinas Pendapatan Provinsi Dengan Pihak Kepolisian Dan Pemerintah Kota Dengan Sistem Pembayaran Parkir Setahun Sekali.
6. Terhadap Retribusi Daerah
 - a) Pada Dinas Perhubungan:
 - 1) Optimalisasi Potensi Pendapatan Dari Sektor Parkir.
 - 2) Pengambilalihan Bus Jakarta Airport Connection Untuk Meningkatkan PAD
 - 3) Melakukan Pendataan Dengan Detail Terkait Retribusi Pendapatan Titik-Titik Lokasi Parkir
 - 4) Di Kota Depok.
 - 5) Dalam Memaksimalkan Pendapatan Retribusi Pendapatan Parkir Di Kota Depok, Dinas
 - 6) Perhubungan Melakukan Inovasi Dalam Hal Pembayaran Melakukan Penerapan Pembayaran Non Tunai.

- 7) Dalam Memaksimalkan PAD Kota Depok Dinas Perhubungan Kota Depok Melakukan Pengontrolan Terkait Parkir-Parkir Di Kota Depok Terkait Tarif Dan Lainnya.
- b) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.
 - 1) Memaksimalkan Target Melalui Pendataan Terkait Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Meningkatkan Pendapatan Retribusi Pengelolaan Persampahan.
 - 2) Melakukan Pengawasan Terkait Retribusi Pengangkutan Sampah Di Perumahan-Perumahan Kota Depok Dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan Serta Hasil Retribusi Pengangkutan Sampah Di Perumahan Dapat Dimasukkan Ke Kas Daerah Dan Sudah Disepakati Oleh Lingkungan Pengelola.
 - 3) Melakukan Sebuah Inovasi Terkait Persampahan Untuk Membuat Sesuatu Yang Akan Berdampak Kepada Pertumbuhan Ekonomi
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor hiburan di Kota Depok, pemerintah kota dapat melakukan beberapa langkah strategis, seperti:
 - a) Menyusun Regulasi yang Mendukung Industri Hiburan
 - b) Peningkatan Infrastruktur Pendukung
 - c) Mendorong Event dan Festival
 - d) Promosi dan Digitalisasi Sektor Hiburan
 - e) Pengelolaan Pajak Hiburan yang Transparan
8. Pemerintah perlu lebih optimal dalam mengelola aset dan potensi daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Melakukan Kegiatan Pengoptimalan Dengan Baik Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Memaksimalkan Inventarisasi Terkait Barang Milik Daerah (BMD) serta melakukan Inovasi Yang Relevan
10. Melakukan pendataan dan tindakan tegas terhadap tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi, serta memastikan potensi pajak dari sektor hiburan dapat dioptimalkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
11. Perlu adanya database pajak dan retribusi usaha yang lengkap dan terstruktur per kelurahan dan kecamatan, Dengan adanya database yang akurat, pemerintah bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor usaha tanpa membebani pedagang kecil, sehingga kebijakan pajak tetap adil dan tepat sasaran.
12. Terkait dengan keberadaan gerai UMKM di Depok Timur yang memiliki omzet ratusan juta rupiah setiap bulan tetapi tidak memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Depok, Komisi B DPRD Kota Depok meminta agar segera digusur.

13. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pajak reklame.
14. Optimalisasi aset milik daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor olahraga dan fasilitas umum
15. Memanfaatkan Tanah/Lahan Fasos Fasum Atau Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Pembuatan Fasilitas Sentra–Sentra UMKM Dalam Memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Depok

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Puskesmas.
2. Optimalisasi pendapatan dari sektor kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah KiSA Dan Rumah Sakit Umum Daerah ASA Kota Depok :

Pokok-Pokok Pikiran Komisi B DPRD Kota Depok Tahun 2026 Kepada Rsud Ksa Dan Asa Kota Depok Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Di RSUD Kota Depok.
2. Meningkatkan Alat Kesehatan Di RSUD Kota Depok.
3. Menjadikan Skala Prioritas Penambahan Dokter Spesialis Di RSUD Kota Depok.
4. Optimalisasi pendapatan dari sektor Kesehatan

Adapun Hasil Perumusan Pokok-Pokok Pikiran Komisi C Tahun 2026, Maka Berdasarkan Pembahasan Dengan Perangkat Daerah Yang Berada Dibawah Leading Sektor Komisi C Telah Menginventarisir Baik Program Dan Kegiatan Yang Akan Diajukan Pada Pokok Pikiran, Diantaranya Adalah :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur Ada Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Infrastruktur Diantaranya:

1. Masih Adanya Jalan Yang Rusak Serta Pengelolaan Dan Manajemen Jalan Yang Belum Tertata Dengan Baik.
2. Belum Memiliki Data Based Jalan Yang Aktif.
3. Masih Banyaknya Trotoar Yang Tidak Terawat Dengan Baik.
4. Masih Adanya Persimpangan Jalan Yang Sempit Yang Menyebabkan Titik Kemacetan.
5. Masih Banyak Titik-Titik Banjir Yang Belum Tertangani

Dalam Menyikapi Hal Tersebut Komisi C Mengusulkan Hal-Hal Sebagai Berikut:

1. Perbaikan Drainase Lingkungan Rw 04 Kel. Bhakti Jaya Kec. Sukma Jaya
2. Perbaikan System Drainase Jl. Angin Mamiri, Banjir Pada Rw 11 Dan Rw 10 Kel.Mekarjaya Kec. Sukmajaya
3. Revitaliasi Sungai Kelurahan Abadi Jaya Di Rw 02, Rw 11, Rw 29 Dan Rw 29
4. Pembuatan Drainase Di Perumahan Griya Blok F Rt 13 Rw 23 Dan Rw 06 Kelurahan Mekar Jaya
5. Revitalisasi Drainase Rw 06 Dan Rw 03 Untuk Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Bhakti Jaya
6. Pembangunan Turap Jalan Raya Krukut Rt 04 Rw 01 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo
7. Pembangunan Turap Kali Krukut Rt 01 Rw 06 Kelurahan Krukut Kecamatan
8. Pembangunan Turap Rt 02 Rw 01 Kali Jati Cilobak 5 Kecamatan Cinere
9. DED Smp 21 Limo Eks Smpn 13 Untuk Dijadikan Pembangunan Waduk (Tempat Olahraga) Rt 05 Rw 01 Ke. Krukut Kec. Limo
10. Pelebaran Dan Perbaikan Jembatan Situ Cilangkap Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos
11. Peningkatan Jalan/Hotmix Pada Jalan Utama Setu Menuju Kp. Banjaran Pucung Kelurahan Cilangkap Kec. Tapos
12. Pembangunan Drainase Jalan Utama Rw 16 Dan Rw 14 Kelurahan Cilangkap Kec. Tapos
13. Pembangunan Turap Anyelir 3 Dan Rw 9 Gdc Kelurahan Kali Mulya Kec Cilodong
14. Mengatasi Banjir Di Wilayah Taman Manggis Indah Kel. Sukamaju Rw 09, Kantor Kelurahan Cilodong, Kantor Kelurahan Sukamaju
15. Perbaikan Pintu Air Kali Buk Penyebab Terjadi Banjir Disebabkan Pintu Air Tertutup Kel. Pancoran Mas Rw 09 Dan Rw 19
16. Pembangunan Embung Rw 15 Kelurahan Pancoran Mas
17. Pembuatan Embung Air Untuk Resapan Rw 20 Kelurahan Sukatani Kec. Tapos
18. Pembuatan Saluran Air/ Drainaserw. 06 Kelurahan Sukatani Dan Rw 06 Kel Sukamaju Baru Kecamatan Tapos
19. Turab Sungai Cipinang/ Sunter Rw. 13 Kel. Sukatani Dan Kel. Tapos Kec. Tapos
20. Drainase Kemang I Dan Kemang Raya Kemang I Dan Kemang Raya Kelurahan Sukatani Rt. 04 Rw. 08 Kec. Tapos
21. Pembangunan Turap Dinding Saluran Di Rt 07 Rw 08 Kel. Jati Jajar Kec. Tapos
22. Betonisasi Jalan Penghubung Dari Kel Suka Maju Baru Ke Kel. Jati Jajar Kel Suka Maju Baru Dan Kel. Jati Jajar
23. Perbaikan Drainase Di Depan Komplek Perindustrian Di Depan Komplek Perindustrian Kel. Tugu Kec. Cimanggis

24. Perbaikan Drainase/Turap Rw 09 Samping Rumah Susun Brimob Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis
25. Perbaikan Drainase, Gorong-Gorong, Turap Di Komplek Bukit Cengkeh Rt 07 Rw 16 Kel. Tugu Kec. Cimanggis
26. Pembangunan Drainase Dan Polisi Tidur Rt 07 Rw 06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis
27. Pembangunan Turap Jl Raya Tanah Baru Rt 01, Rt 02 Rw 07 Kel. Tanah Baru Kec. Beji
28. Pengaspalan Graha Studio Alam Rt 07 Rw 09 Kel. Sukma Jaya
29. Pembangunan Terusan Turap Jalan Raya Krukut Kel. Krukut Kec. Limo Rw 01 S.D Rw 06 Kel. Krukut Kec. Limo

B. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dalam Rangka Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Pengadaan Lahan Puskesmas Di Kelurahan Tirta Jaya Dan Kelurahan Mekar Jaya Cisalak
2. Relokasi Puskesmas Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos
3. Pembangunan Puskesmas Di Kelurahan Leuwinanggung Kec. Tapos
4. Pengadaan Lahan Untuk Tpst Dengan Insenerator Di Kelurahan Tapos
5. Renovasi Sekolah Suka Tani 6 Kel. Suka Tani Kec. Tapos
6. Pembebasan Lahan Smpn Jati Jajar Di Rw 08 Kel. Jati Jajar Kec. Tapos
7. DED Pembangunan Sdn Meruyung Dan Pembangunan Puskesmas Di Kel. Meruyung Kec Limo
8. Rehabilitasi Rekonstruksi Pemeliharaan Gedung Sekolah Yang Rusak
9. Pembelian Lahan Untuk RDF

C. PERHUBUNGAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Perhubungan Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Penerangan Jalan Pada Sekolah-Sekolah Di Kota Depok
2. Penambahan Papan Penunjuk Tempat Perumahan Jati Jajar
3. Penerangan Jalan Cagar Alam Dan Jalan Vitara Raya Pancoran Mas
4. Pemasangan Pju Jl. Raya Tapos Pekapuran Samping Golf Kel. Harja Mukti Cimanggis Dan Kel. Suka Tani Kec. Tapos
5. Pju Di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis
6. Pemasangan Marka Jalan Petunjuk Menuju Fasilitas Umum (Rs, Perumahan, Puskesmas, Kantor Pemerintahan)

7. Penerangan Jalan Dan Taman Merdeka Depok 2 Tengah Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya
8. Pembuatan Putaran Di Perempatan Gdc

LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Pembelian Dum Truck
2. Pembelian Pick Up
3. Pembelian Tronton
4. Lahan Untuk Rdf
5. Pembelian 1 Unit Rdf 3 Module

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatann Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Pengadaan Lemari Apar Di Setiap Kelurahan Di Kota Depok
2. Pengadaan Alat Pemadan Api Ringan (Apar) Untuk Sekolah Se Kec. Tapos
3. Pengadaan Scba Air Boss
4. Pembelian Helm Safe Guard With Nect Protector
5. Sapatu Holik Lukov Gii

DINAS KESEHATAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Kesehatan Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Relokasi Puskesmas Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos
2. Pembangunan Puskesmas Di Kelurahan Leuwinanggung Kec. Tapos
3. Pembuatan Ipal Di 10 Puskesmas Kota Depok
4. Pembangunan Puskesmas Di Kelurahan Cisalak

DINAS PENDIDIKAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Pendidikan Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

1. Renovasi Sekolah Suka Tani 6 Kel. Suka Tani Kec. Tapos

2. Pengecoran Lapangan Sekolah Sdn Tugu 3 Kecamatan Cimanggis
3. Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Smpn Jati Jajar
4. Rekonstruksi, Rehabilitasi Pada Gedung-Gedung Sekolah Yang Rusak

Berikut kami sampaikan Pokok-Pokok Pikiran Komisi D DPRD Kota Depok Pada Tahun Anggaran 2026 yang telah dihasilkan, yaitu :

- A. Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel
 2. Peningkatan dan pemerataan sarana & prasarana pendidikan Sekolah Negeri dan Swasta
 3. Peningkatan akses pembiayaan pendidikan PAUD / TK/ RA, SDN / SDS, MIN/ MIS, SMPN/SMPS, MTSN/ MTSS yang akuntabel
 4. Peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan dasar dan pendidikan mutu non formal
 5. Peningkatan relevansi pendidikan
 6. Peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan kejuruan bersinergi dengan dunia kerja
 7. Tersedianya media pembelajaran di setiap sekolah di Kota Depok
 8. Perbaikan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Depok tidak berbasis Zonasi
 9. Optimalisasi Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti bagi pelajar Kota Depok
 10. Implementasi Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Kebudayaan Daerah
 11. Optimalisasi Sarana dan Prasarana PAUD / TK/ RA, SDN / SDS, MIN/ MIS, SMPN/SMPS, MTSN/ MTSS
 12. Bantuan bagi Peserta Didik Tidak Mampu dan Yatim PAUD / TK/ RA, SDN / SDS, MIN/ MIS, SMPN/SMPS, MTSN/ MTSS
 13. Meningkatkan Kesejahteraan dan Optimalisasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD / TK/ RA, SDN / SDS, MIN/ MIS, SMPN/SMPS, MTSN/ MTSS
 14. Penerimaan SPMB sesuai dengan Kapasitas Rombel dan Daya Tampung dalam satu rombel sejumlah 36 Siswa
 15. Penyediaan Sarana Pendidikan berupa Smartboard
 16. Percepatan penyelesaian permasalahan lahan pembangunan SMPN 35 Depok
 17. Peningkatan bantuan Pendidikan dan bantuan penyetaraan Strata-1 (S1) bagi Tenaga Pengajar PAUD
 18. Membuka menu pokok – pokok pikiran non infrastruktur untuk bidang pendidikan
 19. Penambahan jumlah honor insentif bagi Guru Swasta yang awalnya Rp. 150.000 menjadi Rp. 350.000/Bulan mulai dari Guru PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS Swasta

20. Dinas Pendidikan Kota Depok agar menjadikan lahan SMPN 13 Depok sebagai embung air untuk serapan air atau waduk
21. Pemeliharaan pagar SDN Krukut 03 Depok dan SDN limo 3 Depok
22. Penambahan SDN di wilayah Kelurahan Meruyung dan SMA Negeri di wilayah Kecamatan Cimanggis
23. Penyediaan lahan untuk SMPN 21 Depok dan SDN limo 3 Depok
24. Pemeliharaan bangunan SDN Cinere 01, SDN Cinere 02, SDN Cinere 03, SDN limo 2 Depok, SDN tugu 3 Depok, dan SDN Tapos 5 Depok
25. Mendukung anggaran pada kegiatan lembaga Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok
26. Dinas Pendidikan Kota Depok agar memindahkan SMPN 31 Depok di Kelurahan Sukamaju ke Wilayah lain
27. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan toilet SMPN Negeri 7 Depok
28. Penambahan ruang guru dan renovasi pagar SMPN 28 Depok
29. Peningkatan sarana dan prasarana meubelair sekolah pada tingkat SD dan SMP
30. Peningkatan infrastruktur dengan renovasi sekolah – sekolah yang rusak berat dan rusak ringan

B. Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan rumah sakit yang akuntabel
2. Optimalisasi program penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Pemerataan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Optimalisasi program pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit menular dan tidak menular serta munculnya penyakit menular lain (new emerging & re-emerging)
5. Optimalisasi program penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Tatanan Kota Sehat; Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
6. Penguatan program stunting karena masih terdapat Ibu & Balita Gizi Buruk
7. Peningkatan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan posyandu
8. Peningkatan Kompetensi Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan untuk pelayanan Khusus
9. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi secara berkelanjutan Program UHC ke masyarakat
10. Pembangunan puskesmas di setiap kelurahan
11. Melanjutkan program UHC di tahun 2026
12. Meningkatkan sosialisasi Program UHC ke masyarakat Kota Depok

13. Penambahan faskes kesehatan ditingkat kelurahan untuk program cek kesehatan gratis ulang tahun
14. Penambahan puskesmas di wilayah Kelurahan Leuwinanggung
15. Relokasi Pembangunan puskesmas di wilayah Kelurahan Cilangkap
16. Perlunya Sistem Fasilitas Kesehatan Depok yang Terintegrasi dalam bentuk penyeragaman Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sampai ketingkat posyandu (sebagai contoh dashboard monitoring terintegrasi secara realtime)
17. Pembangunan puskesmas di wilayah Kelurahan Pancoran Mas dengan memanfaatkan lahan KONI yang luasnya $\pm 6500 \text{ m}^2$
18. Agar seluruh puskesmas di Kota Depok tidak dipungut biaya (gratis)
19. Peningkatan peserta layanan BPJS Kesehatan terintegrasi pada seluruh rumah sakit di Kota Depok secara adil (tidak melakukan diskriminasi pelayanan Kesehatan)
20. Agar BPJS Kesehatan tidak membatasi durasi rawat inap Jaminan kesehatan Nasional pada seluruh rumah sakit di Kota Depok.

C. Bidang Ketenagakerjaan

1. Mendukung program jaminan perlindungan bagi pekerja rentan dan tenaga kerja informal (sosial keagamaan dan lainnya)
2. Penguatan sosialisasi terkait jaminan perlindungan ketenagakerjaan sampai ke tingkat kelurahan
3. Sosialisasi secara masif kepada para pekerja terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan
4. Optimalisasi pelatihan tenaga kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan melalui jobfair atau bursa kerja
5. Mendukung program pelatihan Bahasa asing dan penambahan kuota bagi penempatan kerja diluar negeri (Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Taiwan)
6. Mendukung program jaminan perlindungan bagi pekerja rentan (DELINA KEREN)
7. Mendukung program yang memperdayakan masyarakat melalui kegiatan padat karya berkelanjutan
8. Peningkatan Daya Saing tenaga kerja produktif dan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja
9. Optimalisasi tenaga kerja lokal
10. Optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK) lokal
11. Perlunya strategi inovasi untuk mengurangi pengangguran di Kota Depok
12. Mengoptimalkan peraturan – peraturan daerah bidang ketenagakerjaan yang ada di Kota Depok dan bekerjasama dengan dinas terkait

D. Bidang Sosial

1. 2 unit mobil untuk rehabilitasi dan double garden penanganan bencana
2. Sarana dan prasarana lahan, gedung, biaya operasional, untuk lembaga rehabilitasi lanjutan bagi ODGJ
3. Sarpas rumah singgah, perlengkapan dan meubelair untuk Gedung
4. Biaya honor tenaga harian lepas untuk TRC dan penanganan PPKS
5. Pengembangan fasilitas berupa pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat (PKH) dan pemberdayaan kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE)
6. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial sebagai penanganan kemiskinan
7. Kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
8. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Dinas Sosial Kota Depok agar melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) dalam rangka pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekurang kurangnya 3 bulan sekali dilaksanakan dan dibiayai oleh kelurahan dari dana APBD
9. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk miskin dan rentan miskin Kota Depok
10. Penunjang sarana & prasarana yang akuntabel di tiap kelurahan untuk pendataan DTKS
11. Mengusulkan pembukaan layanan informasi (gerai) untuk sosialisasi bantuan sosial dan pendataan warga miskin di setiap kelurahan
12. Agar Dinas Sosial Kota Depok mendatangi langsung (jemput bola) untuk pelayanan administrasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas
13. Perlunya Dinas Sosial Kota Depok meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran
14. Peningkatan pengawasan kondisi dan fasilitas Rumah Singgah/Rusunawa Kota Depok
15. Penambahan alat bantu sosial seperti kaki palsu dan kursi roda bagi penyandang disabilitas
16. Agar Dinas Sosial Kota Depok mengakomodir pokok-pokok pikiran Anggota Komisi D DPRD Kota Depok

E. Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Seni dan Budaya.

1. Support anggaran program dan kegiatan pengembangan cabang olahraga prestasi khususnya persiapan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2026
2. Peningkatan pemberdayaan sarana prasarana untuk pemuda dan olahraga
3. Peningkatan partisipasi pemuda di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan
4. Peningkatan pembinaan dan pembibitan calon atlit berbagai cabang olahraga sejak dini

5. Pembangunan sarana prasarana olahraga melibatkan ahli pembangunan dibidang olahraga
 6. Penguatan dan pembinaan serta apresiasi atlet berprestasi untuk mempertahankan atlet lokal berprestasi
 7. Peningkatan Peran Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kebugaran masyarakat di tingkat RT/RW
 8. Penyediaan alat fitness outdoor di setiap taman Kota Depok
 9. Penyediaan wisma atlet untuk kegiatan pertandingan olahraga di Kota Depok
 10. Support anggaran program dan kegiatan pengembangan Induk Olahraga (Inorga) rekreasi di Kota Depok
 11. Sosialisasi dan promosi keberadaan KORMI Kota Depok sampai ke tingkat kelurahan agar Induk Olahraga (Inorga) yang dimasyarakat mengetahui bahwa Induk Olahraga (Inorga) dibawahhi oleh KORMI Kota Depok
 12. Peningkatan kegiatan gelaran seni kebudayaan lokal yang atraktif & inovatif di tingkat Kelurahan dan RT/RW
 13. Pembangunan gedung pertunjukan kesenian
 14. Promosi kebudayaan lokal pada masyarakat di tingkat Kelurahan dan RT/RW
 15. Penguatan Ketahanan Budaya Kota Depok
 16. Peningkatan sarana & prasarana kegiatan seni & budaya kearifan lokal
 17. Optimalisasi kebijakan & strategi pengembangan & pemajuan serta penguatan identitas kebudayaan kearifan lokal
 18. Pelibatan komisi D DPRD Kota Depok dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.
- F. Bidang Agama
1. Penambahan honorium marbot (penjaga rumah ibadah)
 2. Mendukung dan melanjutkan serta penguatan sosialisasi program pemberian insentif Bimbingan Rohani (Bimroh) dan menambahkan jumlah kuota Bimbingan Rohani (Bimroh)
 3. Perlunya melakukan verifikasi dan validasi data peserta Bimbingan Rohani (Bimroh) yang menerima insentif di setiap kelurahan di Kota Depok
 4. Transparansi Pemberian insentif bimbingan rohani
 5. Penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Depok
 6. Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai agama di Kota Depok
- G. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Tata kelola perangkat daerah yang akuntabel
 2. Penguatan sosialisasi dan edukasi program dan kegiatan Ketahanan Keluarga di Kota Depok sampai tingkat kelurahan
 3. Penguatan Nilai-Nilai Keluarga di Masyarakat
- H. Perlindungan Anak dan Perempuan
1. Tata kelola perangkat daerah yang akuntabel
 2. Optimalisasi Kota Depok Sebagai Kota Ramah Anak
 3. Pemenuhan hak anak dan pelayanan perlindungan anak berbasis digital
 4. Peningkatan partisipasi anak dalam musrenbang anak
 5. peningkatan Perlindungan Anak dan Perempuan korban kekerasan
 6. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap program stunting
 7. Penguatan sosialisasi dan edukasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 8. Penjangkauan terhadap pelaporan kekerasan perempuan dan anak
 9. Penguatan program dan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja di Kota Depok
 10. Penambahan 1 unit mobil perlindungan perempuan dan anak untuk membantu korban kekerasan perempuan dan anak
 11. Penguatan sosialisasi dan edukasi serta berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok terkait bahaya bullying bagi anak dengan melibatkan tenaga psikolog
 12. Perluas layanan psikologis di 11 kecamatan dengan penganggaran tenaga psikologi

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2026

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan implementasi pelaksanaan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian visi dan misi dengan arah kebijakan dan strategi, ditetapkan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan Kota Depok pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (Depok Cerdas)
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Merata (Depok Sehat)
3. Peningkatan Pembangunan Dan Ketahanan Keluarga (Depok Berkualitas)
4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama (Depok Inklusif)
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman (Depok Hijau)

6. Peningkatan Tata Kelola Persampahan (Depok Bersih)
7. Peningkatan Konektivitas Dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi (Depok Lancar)
8. Perlindungan Sosial Kelompok Rentan (Depok Peduli)
9. Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas UMKM (Depok Berdaya)
10. Perluasan Kesempatan Kerja (Depok Bekerja)
11. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan (Depok Mandiri)
12. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)

Tabel. 4.4. Keselarasan Arah Kebijakan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Depok Tahun 2026

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis Kota Depok Tahun 2026
1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) 2. Peningkatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital 3. Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas 5. Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global	Peningkatan Kualitas Manusia Isu strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.	Fasilitasi dan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Saprasi dan infrastruktur pendidikan Akses pendidikan

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
1. Perubahan perilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Rumah Sakit Layanan Khusus Ginjal) 3. Percepatan penuntasan kasus <i>stunting</i> dan pencegahan <i>new stunting</i> 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan Kualitas Manusia	Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Penurunan stunting
1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Pemberdayaan Perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian. 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya 4. Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi Pembangunan 5. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga	Peningkatan Kualitas Manusia	1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang belum optimal 2. Akses fasilitas keemudaan dan olahraga yang belum merata 3. Kesejahteraan keluarga yang perlu ditingkatkan	1. Peningkatan kualitas keluarga dan pemuda Pengelolaan kependudukan yang berkualitas
1. Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	Peningkatan Kualitas Manusia	Rendahnya tingkat kohesi sosial.	Peningkatan kohesi sosial

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
2. Penguatan keamanan dan ketertiban Masyarakat 3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis 4. Penguatan kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural			
1. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 2. Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata 3. Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata 4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok 5. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek 6. Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah 7. Penyiapan pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan isu ini mencakup pengendalian pemanfaatan ruang kota, pengembangan sistem transportasi, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, antisipasi banjir dan genangan, pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, serta pengembangan sistem transportasi dan penanggulangan kemacetan	1. Kemacetan 2. Transportasi publik yang belum memadai 3. Angkutan umum tradisional menurun	Pengembangan sistem transportasi dan penanggulangan kemacetan
1. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Infrastruktur untuk Ketahanan Bencana	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1. Kerentanan banjir dan bencana	1. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
2. Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Rendah Emisi 3. Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (<i>smart city</i>), kota kreatif (<i>creative city</i>) dan kota hijau (<i>green city</i>)		2. Masih terjadi pencemaran air dan udara 3. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik 4. Kemantapan jalan belum terintegrasi dengan pengendalian genangan	2. Antisipasi banjir dan genangan
1. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan teknologi. 2. Penerapan ekonomi sirkular dan <i>smart waste management</i>. 3. Pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami melalui kolaborasi multipihak dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan.	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu
1. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di kawasan kumuh, melalui fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman. 2. Perluasan layanan air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan jaringan perpipaan, infrastruktur air baku, serta pengembangan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan.	Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal Rendahnya akses air minum perpipaan	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota
1. Penguatan pengendalian Tingkat inflasi daerah 2. Kemudahan layanan perizinan dan non perizinan 3. Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi merupakan isu strategis utama yang mencakup upaya pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan	1. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas 2. Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi	1. Peningkatan perbaikan iklim investasi 2. Penguatan peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian 3. Pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
barang jasa dan mendukung perekonomian daerah 4. Penguatan dukungan pada produk unggulan dan perlindungan konsumen 5. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif 6. Modernisasi koperasi dan kelembagaan ekonomi rakyat 7. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link dan match</i> industri besar dengan IKM/UMKM 8. Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomu produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan 9. Penataan dan restrukturisasi BUMD 10. Pemberdayaan komunitas dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya	kerja, pengurangan ketimpangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan keterjangkauan harga pangan, pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah, pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi serta peningkatan perbaikan iklim investasi.	3. Belum optimalnya pengembangan kepariwisata untuk menarik wisatawan dan Invetasi di Kota Depok	
1. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif 2. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Motor melalui adopsi teknologi proses dan diversifikasi produk 3. Revitalisasi pariwisata dan sektor akomodasi makan minum melalui peningkatan kualitas destinasi dan penyelenggaraan event berskala besar	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	1. Kapasitas dan daya saing IKM / UMKM masih terbatas 2. Belum optimalnya upaya peningkatan akses promosi, permodalan dan pemasaran bagi industri kreatif 3. Penciptaan wirausaha baru belum optimal. 4. Belum optimalnya tata kelola ketahanan pangan berbasis daya dukung lingkungan	Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
4. Pengembangan ekonomi kreatif digital melalui inkubasi talenta, kolaborasi dan akses pasar daring 5. Penguatan simpul logistik kota melalui pengembangan transportasi dan pergudangan terintegrasi 6. Penguatan pondasi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan 7. Peningkatan ketahanan pangan lokal melalui <i>urban farming</i> berteknologi dan perbedayaan komunitas			
1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	1. Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja 2. Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja.	Pengurangan Ketimpangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan kemandirian sosial 2. Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan 3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional 4. Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional	Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi	Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
5. Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu			
1. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif 3. Pengembangan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata Kelola, politik, hukum dan keamanan daerah 5. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan 6. Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blank spot</i> 7. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>) 9. Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. 10. Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan <i>agile</i>	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Merupakan salah satu isu strategis pembangunan Kota Depok yang mencerminkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap masyarakat. Isu ini mencakup penguatan reformasi birokrasi, peningkatan keterbukaan informasi publik, transformasi layanan digital, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.	Layanan publik belum sepenuhnya terintegrasi secara digital	Optimalisasi pelayanan publik melalui sinergi secara digital dan pengembangan kerjasama

Arah Kebijakan RKPD Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2026	Isu Startegis Kota Depok Tahun 2026
11. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat. 12. Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis 13. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 14. Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi lingkungan, dan tata kelola pemerintahan 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota			

Sumber: Bappeda Kota Depok, data diolah Tahun 2025

Isu Strategis dari KLHS Kota Depok

Terdapat 5 isu yang ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD sebagai berikut :

1. Air bersih dan sanitasi layak (TPB 6)
2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
3. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
4. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
5. Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17)

Arahan kebijakan dan program untuk mencapai TPB prioritas tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Pemerataan akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur terhadap akses air minum	Program Perekonomian dan Pembangunan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	Penjaminan kemudahan akses terhadap air minum sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Peningkatan kuantitas dan kualitas air minum melalui kerjasama dan pengembangan teknologi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Hubungan Industrial
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi aman dan dan kebersihan yang memadai	Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik dan limbah industri	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dan limbah industri	Program pengembangan permukiman
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
	Pengembangan layanan kesehatan dan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Penjaminan sanitasi layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

**Tabel 4.6. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian
TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita	Perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi serta pengembangan di bidang perekonomian secara strategis dan transparan.	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan keterbukaan akses terhadap informasi kesempatan kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan iklim kewirausahaan terutama bagi usia muda.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Peningkatan iklim penanaman modal.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Regulasi dan promosi di bidang perdagangan lokal maupun ekspor.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengembangan Ekspor
	Perencanaan, pengendalian, dan regulasi yang tertib di bidang perindustrian.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19)	Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan.	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM yang bekerja di dalamnya, serta penyediaan fasilitas pendukung.	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	Pengembangan wisata olahraga rekreasi, kebudayaan, dan sejarah, serta pengelolaan objek-objek wisata yang terkait.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Tabel 4.7. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Penanggulangan dan penanganan bencana.	Program Penanggulangan Bencana
		Program Penanganan Bencana
		Program Penanggulangan Kebakaran
	Penyediaan infrastruktur untuk penanganan dan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana	Program Pengembangan Perumahan
		Program Penyelenggaraan Jalan
	Penyediaan fasilitas, layanan, dan SDM kesehatan untuk korban terdampak bencana.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengelolaan sampah terpadu dari tingkat sumber hingga ke tingkat perkotaan dan regional.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Persampahan
	Perencanaan, penataan, dan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah di lingkungan permukiman.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Menurunnya kemacetan, dan meningkatnya jangkauan angkutan umum perkotaan	Penguatan regulasi, edukasi, pengadaan, dan pengelolaan sarana prasarana transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

**Tabel 4.8. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian
TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Penurunan angka kematian bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
Mengakhiri epidemi dan penyakit menular lainnya	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular	Program penelitian dan pengembangan daerah
	Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

**Tabel 4.9. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian
TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik	Peningkatan perencanaan dan penyusunan anggaran terkait aturan mengenai pajak dan keuangan daerah	Pogram Pengelolaan Keuangan Daerah
	peningkatan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Evaluasi keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Secara ringkasnya, untuk melihat keterkaitan masalah, isu strategis dan program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan
RPJMD Tahun 2025-2029**

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
Fasilitasi dan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Saprasi infrastruktur pendidikan 3. Akses pendidikan	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) 2. Peningkatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan dasar dan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital 3. Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas	Prioritas 1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (Depok Cerdas)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
		5. Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global	
Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 2. Penurunan stunting	1. Perubahan perilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Rumah Sakit Layanan Khusus Ginjal) 4. Percepatan penuntasan kasus <i>stunting</i> dan pencegahan <i>new stunting</i> 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Prioritas 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Merata (Depok Sehat)
1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang belum optimal 2. Akses fasilitas keemudaan dan olahraga yang belum merata 3. Kesejahteraan keluarga yang perlu ditingkatkan	1. Peningkatan kualitas keluarga dan pemuda 4. Pengelolaan kependudukan yang berkualitas	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Pemberdayaan Perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian. 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya 4. Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan	Prioritas 3 Peningkatan Pembangunan Dan Ketahanan Keluarga (Depok Berkualitas)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
		kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi Pembangunan 5. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga	
Rendahnya tingkat kohesi sosial.	Peningkatan kohesi sosial	1. Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa 2. Penguatan keamanan dan ketertiban Masyarakat 3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis 4. Penguatan kebudayaan lokal dan kerukunan masyarakat multikultural	Prioritas 4 Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama (Depok Inklusif)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
1. Kemacetan 2. Transportasi publik yang belum memadai 3. Angkutan umum tradisional menurun	Pengembangan sistem transportasi dan penanggulangan kemacetan	1. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 2. Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata 4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok 5. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek 6. Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah 7. Penyiapan pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	Prioritas 7 Peningkatan Konektivitas Dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi (Depok Lancar)
1. Kerentanan banjir dan bencana 2. Masih terjadi pencemaran air dan udara 3. Minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau publik 4. Kemantapan jalan belum terintegrasi dengan pengendalian genangan	1. Pengendalian pemanfaatan ruang kota 2. Antisipasi banjir dan genangan	1. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Infrastruktur untuk Ketahanan Bencana 2. Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Rendah Emisi 3. Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (<i>smart city</i>), kota kreatif (<i>creative city</i>) dan kota hijau (<i>green city</i>)	Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman (Depok Hijau)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
Pengelolaan sampah yang belum optimal	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu	1. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan teknologi. 2. Penerapan ekonomi sirkular dan <i>smart waste management</i>. 3. Pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami melalui kolaborasi multipihak dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan.	Prioritas 6 Peningkatan Tata Kelola Persampahan (Depok Bersih)
1. Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal 2. Rendahnya akses air minum perpipaan	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota	1. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di kawasan kumuh, melalui fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman. 2. Perluasan layanan air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan jaringan perpipaan, infrastruktur air baku, serta pengembangan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan.	Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman (Depok Hijau)
1. Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas 2. Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi 3. Belum optimalnya pengembangan kepariwisata untuk menarik wisatawan dan Investasi di Kota Depok	1. Peningkatan perbaikan iklim investasi 2. Penguatan peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian 3. Pengembangan pariwisata dan fasilitas rekreasi	1. Penguatan pengendalian Tingkat inflasi daerah 2. Kemudahan layanan perizinan dan non perizinan 3. Penyediaan pelayanan transportasi publik dan logistik yang andal, untuk memperlancar distribusi barang jasa dan mendukung perekonomian daerah 4. Penguatan dukungan pada produk unggulan dan perlindungan konsumen	Prioritas 9 Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas UMKM (Depok Berdaya)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
		5. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, menengah yang inklusif 6. Modernisasi koperasi dan kelembagaan ekonomi rakyat 7. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan <i>link dan match</i> industri besar dengan IKM/UMKM 8. Pemberian deregulasi dan debirokratisasi kemudahan perizinan terutama investasi pada sektor-sektor ekonomu produktif, inklusif, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan 9. Penataan dan restrukturisasi BUMD 10. Pemberdayaan komunitas dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya	
1. Kapasitas dan daya saing 2. IKM / UMKM masih terbatas 3. Belum optimalnya upaya peningkatan akses promosi, permodalan dan pemasaran bagi industri kreatif 4. Penciptaan wirausaha baru belum optimal. 5. Belum optimalnya tata kelola ketahanan pangan berbasis	Pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah	1. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif 2. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Motor melalui adopsi teknologi proses dan diversifikasi produk 3. Revitalisasi pariwisata dan sektor akomodasi makan minum melalui peningkatan kualitas destinasi dan penyelenggaraan event berskala besar	Prioritas 11 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
daya dukung lingkungan		4. Pengembangan ekonomi kreatif digital melalui inkubasi talenta, kolaborasi dan akses pasar daring 5. Penguatan simpul logistik kota melalui pengembangan transportasi dan pergudangan terintegrasi 6. Penguatan pondasi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan 7. Peningkatan ketahanan pangan lokal melalui <i>urban farming</i> berteknologi dan perbedayaan komunitas	
1. Masih rendahnya pendidikan dan kompetensi tenaga kerja 2. Mismatch antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja.	Pengurangan Ketimpangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Prioritas 10 Perluasan Kesempatan Kerja (Depok Bekerja)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan kemandirian sosial 2. Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan 3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional 4. Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional 5. Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu	Prioritas 8 Perlindungan Sosial Kelompok Rentan (Depok Peduli)
Layanan publik belum sepenuhnya terintegrasi secara digital	Optimalisasi pelayanan publik melalui sinergi secara digital dan pengembangan kerjasama	1. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif 3. Pengembangan kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata Kelola, politik, hukum dan keamanan daerah 5. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan 6. Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blank spot</i> 7. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi	Prioritas 12 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (untuk Tahun 2026)	Prioritas Pembangunan
		berbasis riset dan inovasi daerah 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (<i>digital governance</i>) 9. Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. 10. Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan <i>agile</i> 11. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat. 12. Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis 13. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 14. Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi lingkungan, dan tata kelola pemerintahan 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota	

Sumber : Bappeda 2025, diolah

Penjelasan tentang sasaran, strategi, arah kebijakan dalam setiap prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.11 sampai 4.22 berikut ini.

Penjelasan tentang sasaran, strategi, arah kebijakan dalam setiap prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.11 sampai 4.22 berikut ini.

Tabel 4.11. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Kesehatan secara Merata

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Merata	1.2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,18	1. Perubahan perilaku dan penerapan pola hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dan profesionalisme tenaga kesehatan serta penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 3. Percepatan penuntasan kasus stunting dan pencegahan new stunting 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 5. Pemberdayaan potensi olahraga masyarakat dan prestasi	1. Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan 2. Digitalisasi layanan kesehatan (telemedisin) 3. Meningkatkan layanan kesehatan Masyarakat 4. Pemenuhan dan Peningkatan SDM kesehatan 5. Pembudayaan hidup sehat, pengendalian faktor risiko penyakit, dan penyehatan lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan standar	71,43 %		DISDIK
								Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	15,00 %		
								Prosentase Pelaporan Indikator Nasional Mutu di Fasyankes	54,06 %		
								Proporsi fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi Kesehatan nasional	40,50 %		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan			100 %				
			Prevalensi Stunting	11,2			Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu, Industri Rumah Tangga Pangan sesuai	47,98 %		

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								standar			
								Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	47,98 %		
							Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan		100 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.12. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelayanan Pendidikan untuk Semua

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Pelayanan Pendidikan untuk Semua	1.1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)		1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 2. Peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter dan literasi digital	1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan 2. Memeratakan pembangunan sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan 3. Memperluas akses pendidikan berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Anak usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	80,02 % 98,80 % 		DISDIK

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					3. Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar 4. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK bagi kelompok disabilitas 5. Penguatan riset, inovasi dan penyediaan akses pendidikan pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global	4. Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu 5. Membentuk Layanan Unit Disabilitas	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbarui Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Depok Persentase koleksi daerah yang dimiliki	 88 20 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.13. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Pembangunan Dan Ketahanan Keluarga

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Pembangunan Dan Ketahanan Keluarga	1.3. Terwujudnya kehidupan keluarga yang berkualitas dan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda	63,2	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang	1. Mengembangkan Ruang Publik untuk Olahraga 2. Mendorong Pembinaan Atlet Muda dan Talenta Berbakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Rasio Wirausaha Pemuda Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	5,9 3 %		DISPORYATA

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		yang sejahtera			disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas kemandirian 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya 4. Pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam penguatan kapasitas partisipasi pembangunan 5. Pembangunan keluarga berkualitas berbasis ketahanan keluarga.	3. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas 4. Meningkatkan program kepemudaan seputar kapasitas pemuda	Keolahragaan				
			Indeks Pembangunan Keluarga	69,39			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	9,3		
							Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0,21 %		
							Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1 %		
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	0,3 %		
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	36 %		
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	73,16		
							Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	89,59		
							Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1		

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	67,0		
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	33 %		
							Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial	25,77 %		DINSOS
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.14. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama	1.3. Meningkatnya kohesi sosial masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	3,73	1. Menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa 2. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat 3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis 4. Penguatan kebudayaan	Meningkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat melalui dialog dan kerjasama antar komunitas	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Persentase anggota masyarakat sasaran yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	100 % 100 %		

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					lokal dan kerukunan masyarakat multikultural		serta Budaya Politik				KESBANGPOL
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan terkait ketahanan ekososbud, agama dan P4GN			100 %				
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan			100 %				
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan			92 %				
				Persentase Penyelenggaran Tibum Tranmas			76 %		SATPOL PP		
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			97 %				
			TOTAL ANGGARAN								

Tabel 4.15. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Permukiman	2.2. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dan krisis iklim	Indeks Risiko Bencana	61,85	1. Peningkatan fungsi sungai dan setu sebagai sumber air baku dan jaringan untuk melakukan pencegahan bencana banjir 2. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air 4. Pengelolaan risiko bencana dan kerusakan lingkungan (GC) 5. Penguatan kota tahan bencana dengan pendekatan green and grey infrastructure pada pembangunan kota 6. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan 7. Penguatan fondasi arah kota peradaban dengan mempertajam dimensi kota cerdas (smart city), kota kreatif (creative city) dan kota hijau (green city) (GC)	1. Memperkuat monitoring izin ruang berbasis digital dengan penegakan hukum transparan dan pengembangan drainase terpadu untuk pengendalian banjir dan kualitas lingkungan. 2. Menyelesaikan regulasi penanggulangan bencana lengkap, meningkatkan sarana pencegahan kebakaran, serta melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan komunitas untuk respons cepat di tingkat lokal.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	2 %		DPUPR
								Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	15,78 %		
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	96,07 %		DPUPR
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang (IP2R)	0,33		DPUPR
							Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100 %		DAMKAR
								Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		
								Persentase penanganan pasca bencana	100 %		
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	42,59 %		DAMKAR	

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
							Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,80 %						
		2.4. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	54,78	1. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di kawasan kumuh, melalui fasilitasi dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman. 2. Perluasan layanan air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan jaringan perpipaan, infrastruktur air baku, serta pengembangan sanitasi perkotaan yang berkelanjutan. 3. Peningkatan sanitasi aman perkotaan	Mendorong pembangunan perumahan dan sanitasi yang berkelanjutan melalui sinergi kolaboratif multi-pihak dan penguatan regulasi berbasis data untuk memastikan akses layanan yang merata dan berkualitas.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase MBR dan atau korban bencana yang difasilitasi hunian layak	0,23 %		DISRUMKIM				
							Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	3,58 %						
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	67,403						
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dengan PSU tertangani	26,46 %		
											Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman	99,63 %		DPUPR
											Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	20,79 %		DPUPR
TOTAL ANGGARAN															

Tabel 4.16. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Tata Kelola Persampahan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Tata Kelola Persampahan	2.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,12	1. Penguatan kelembagaan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dan teknologi. 2. Penerapan ekonomi sirkular dan smart waste management. 3. Pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami melalui kolaborasi multipihak dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan 4. Kerja sama pengelolaan sampah melalui fasilitas pengolahan regional Jawa Barat (TPPASR Lulut Nambo)	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran terpadu, optimalisasi ruang hijau multifungsi sebagai penyangga ekologis, serta pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memperkuat resiliensi lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			
							Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %		
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemar Air (IP)	5,113		DLHK
								Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	89,0		
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	100 %		
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	57 %		
							Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	57 %		

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Program Peningakatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	82,99 %		
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	41,14 %		DLHK
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	70 %		
							Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi	74 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.17. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Konektivitas Dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Konektivitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	2.1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	C (0,69)	1. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) 2. Penyediaan transportasi umum yang inklusif secara merata ke seluruh wilayah kota 3. Penguatan aksesibilitas antar wilayah serta peningkatan sarana dan prasarana perkotaan secara merata 4. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana pelayanan transportasi publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabodetabek 5. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalan antara wilayah Barat – Timur Kota Depok 6. Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi daerah 7. Penyiapan pembangunan ruas jalan baru dan ruas jalan alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kinerja ruas jalan	1. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan strategis antarwilayah 2. Memfasilitasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang inklusif 3. Melaksanakan pembangunan awal jalan penghubung wilayah Barat–Timur 4. Membangun simpul transportasi publik di pusat-pusat pelayanan kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio kemantapan jalan	90,75 %		DPUPR
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas darat	0,62		DISHUB
								Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60,59 %		
							Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	100 %		DISRUMKIM
							Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.18. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perlindungan Sosial Kelompok Rentan	3.4. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	2.23 - 2.24 %	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan 3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional 4. Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional 5. Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu 6. Penguatan pondasi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat rentan miskin melalui peningkatan produktivitas pekerja dan memberikan akses lapangan kerja 2. Menurunkan pengeluaran masyarakat rentan miskin melalui kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		DINSOS
								Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	2,9 %	
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.19. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif dan Kapasitas UMKM

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas UMKM	3.4. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	2.23 - 2.24 %	1. Perlindungan kelompok miskin dan kelompok rentan yang berfokus pada pengembangan ketahanan sosial 2. Peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat rentan 3. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan sosial nasional 4. Integrasi bantuan sosial berbasis data terpadu yang mengintegrasikan data daerah kota, provinsi dan nasional 5. Penanggulangan kemiskinan perkotaan terpadu 6. Penguatan pondasi ekonomi sektor unggulan dan jasa lain yang memiliki nilai tambah tinggi	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat rentan miskin melalui peningkatan produktivitas pekerja dan memberikan akses lapangan kerja 2. Menurunkan pengeluaran masyarakat rentan miskin melalui kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap pelayanan dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		DINSOS
								Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	2,9 %	
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.20. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Perluasan Kesempatan Kerja

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perluasan Kesempatan Kerja	3.3. Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan decent job	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.07 - 5.95 %	1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan dan penempatan kerja dalam dan luar negeri	Menguatkan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan dan penempatan kerja dalam dan luar negeri	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %		DISNAKER
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat BNSP	91%		
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	15 %		
							Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	100 %		
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	100 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.21. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perluasan Kesempatan Kerja	3.3. Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan decent job	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.07 - 5.95 %	1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta pemagangan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Menguatkan kurikulum pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemagangan dan penempatan kerja dalam dan luar negeri	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %		DISNAKER
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat BNSP	91%		
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	15 %		
							Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	100 %		
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	100 %		
TOTAL ANGGARAN											

Tabel 4.22. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Prioritas Pembangunan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif	4.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	87,21	1. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif 3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola, lternat, politik, hukum dan keamanan daerah 5. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital di bidang social, ekonomi dan lingkungan 6. Penataan dan pengembangan coverage dan kecepatan akses internet pada area – area weak coverage dan blankspot 7. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan regulasi berbasis riset dan inovasi daerah 8. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan kapasitas pemerintahan digital (digital governance)	Melakukan Penguatan kerjasama antar daerah dan antar lembaga untuk peningkatan kebijakan, infrastruktur fisik dan infrastruktur digital	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi			BKPSDM
							Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya				
							Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya				
							Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik				
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan			DISKOMINFO
							Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	82 %		
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	1,8		
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	3,4		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan	59 %									

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					9. Penataan kelembagaan yang adaptif dan pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi. 10. Penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan agile 11. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat. 12. Pembentukan produk hukum yang berkualitas dengan proses yang dialogis, dialektis, dan kritis 13. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 14. Penguatan kesinambungan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan 15. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 16. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota 17. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 18. Evaluasi pada tahapan fondasi pembangunan 2025-2029		Pengamanan Informasi	Sandi Pemerintah Daerah			
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti	93,27 %		INSPEKTORAT
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi	Level 3		
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %		BAPPEDA
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang PPM	100 %		
								Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %		
								Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		
							Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Program Riset dan Inovasi Daerah				
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Alokasi Anggaran Sesuai Ketentuan	95 %		BKD
								Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91 %		
								Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	100 %		
							Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip			DISKARPUS
							Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			SETDA
							Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %		SETWAN
								Persentase Penetapan Ranperda Tahun N			
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD			SEMUA PD

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2026	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI 2026	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2026	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4.2. Meningkatnya pengembangan kolaborasi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, regional, dan internasional	Indeks Kolaborasi Pemerintahan dan Pembangunan 55 %		1. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area publik yang mendukung sektor ekonomi 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, serta penguatan potensi pembiayaan alternatif 3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyelenggaraan transformasi kelembagaan dan tata kelola, lternat, politik, hukum dan keamanan daerah	1. Memperkuat kerjasama antar daerah dan antar lembaga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Menciptakan kerjasama antar daerah yang mendukung kolaborasi efektif antar kota wilayah perbatasan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	12 %		BKD
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			
							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			SETDA
TOTAL ANGGARAN											

Program Terkait Penanganan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kebijakan kemiskinan secara umum seharusnya tidak saja menurunkan angka kemiskinan, namun juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebagai dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin

Penanggulangan kemiskinan didukung dengan adanya program-program yang disusun sehingga masyarakat miskin khususnya dapat terbantu dengan adanya program tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Bantuan Pendidikan dengan target sasaran yang sudah ditentukan. Dengan adanya penentuan target penerima program penanggulangan kemiskinan nasional tersebut diharapkan Pemerintah Kota Depok mampu menerapkannya, sehingga sasaran dari target tersebut dapat tercapai dan membantu meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat di Kota Depok.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan, salah satu upaya adalah dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penghapusan kemiskinan ekstrem diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Depok yakni dengan melaksanakan kolaborasi dan sinergi program kegiatan Perangkat Daerah pengampuh yang mempunyai tujuan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan sehingga pada tahun 2023 berdasarkan data estimasi yang dihitung oleh Satgas data P3KE, estimasi jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Depok adalah sebesar 380 jiwa dengan estimasi Tingkat kemiskinan 0%.

Namun demikian, berdasarkan data hasil analisis kemiskinan BPS Kota Depok pada tahun 2023 masih terdapat penduduk miskin di Kota Depok dengan persentase kemiskinan sebesar 2,38 persen atau diperkirakan sebesar 61,95 ribu orang, untuk itu Pemerintah Kota Depok yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tetap akan fokus pada program-program prioritas dan kegiatan yang mengacu pada dokumen RPJMD dan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

Program-program pengentasan kemiskinan di Kota Depok diantaranya :

- 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui pemberian bantuan pangan, verifikasi dan validasi data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, dan penguatan kelembagaan Puskesmas SLRT.
- 2. Program Rehabilitasi Sosial, melalui bantuan untuk disabilitas dan lansia, dan penanganan PPKS yang lebih tepat dan berkesinambungan.
- 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- 4. Program Pengelolaan Pendidikan, melalui bantuan pendidikan bagi siswa miskin SDS/MI Swasta, SMPS/MTs Swasta.
- 5. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan pemukiman kumuh melalui pembangunan RTLH.
- 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja

Penanganan Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) . Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.

Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi gizi sensitif diantaranya adalah akses air bersih, sanitasi lingkungan, fortifikasi pangan, penyediaan akses kepada layanan Kesehatan perencanaan keluarga, pendidikan pengasuhan keluarga, ketahanan keluarga, Pendidikan anak usia dini, edukasi Kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, Pendidikan gizi Masyarakat . meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, penyediaan jaminan Kesehatan. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan

- a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas .
- b. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan
- c. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat)

Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas sesuai Kondisi tertentu
Ibu Hamil	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/KEK	Suplementasi kalsium Pemeriksaan kehamilan	Perlindungan dari malaria Pencegahan

Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas sesuai Kondisi tertentu
	Suplementasi TTD	Peningkatan kualitas Antenatal care dengan penyediaan alat USG 2 D di Puskesmas	HIV, Sifilis Hepatitis dengan mengadakan skrining pada saat ANC
Ibu Menyusui dan anak 0-23 bulan	Promosi dan konseling menyusuiPromosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)Tata laksana gizi buruk Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus Pemantauan dan promosi pertumbuhan	Suplementasi kapsul Vitamin A Suplementasi taburia Imunisasi Suplementasi zinc untuk pengobatan diare Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Penyediaan layanan Imunisasi	Pencegahan kecacingan
Remaja Putri dan Wanita Usia Subur	Suplementasi TTD	Konseling Edukasi	
Anak 24-59 bulan	Tata laksana gizi buruk Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus Pemantauan dn promosi pertumbuhan Penyediaan Theurapetic Feeding Center (TFC) rawat jalan dan rawat inap	Suplementasi kapsul Vitamin A Suplementasi taburia Suplementasi zinc untuk pengobatan diare Manajemen Terpadu balita Sakit (MTBS)	Pencegahan kecacingan

Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Di samping penjelasan visi dan misi yang nantinya akan dijabarkan hingga program dan indikasi kegiatan, dokumen RPJMD Kota Depok 2025 - 2029 merupakan dokumen strategis untuk mengawal perwujudan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Terdapat 20 (dua puluh) janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Keduapuluh janji tersebut merupakan Program Unggulan yang merepresentasikan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mencapai visi Bersama Depok Maju. Keduapuluh Program Unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Bimbingan Belajar Gratis bagi 2.000 Siswa untuk Masuk PTN
3. Beasiswa dan/atau bantuan kuliah gratis bagi 200 anak
4. Rumah Kreatif Anak Istimewa
5. Pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan Layanan Puskesmas Gratis
6. Rumah sakit layanan khusus ginjal
7. Pembangunan pengelolaan sampah termaju
8. Penataan drainase kota terintegrasi
9. Penataan jalan dan penanganan kemacetan terintegrasi
10. Jualan sama-sama UMKM naik kelas

- 11. Pengelolaan lahan pertanian modern per kecamatan
- 12. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) terintegrasi dan penyerapan tenaga kerja
- 13. Penyediaan Gedung Pertunjukan Kota dan Ruang Terbuka Kreatif bertaraf nasional dan modern
- 14. Fasilitasi wisata keagamaan dan perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah
- 15. Jaminan sosial tenaga kerja bagi RT, RW, LPM dan pekerja rentan
- 16. Penyediaan prasarana pemusatan latihan cabang olahraga prestasi
- 17. Penyediaan sarana olah raga masyarakat
- 18. Dana RW sebesar 300 juta per RW per tahun
- 19. PBB gratis dengan NJOP di bawah 100 juta
- 20. Peningkatan kesejahteraan ASN dan Non ASN termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan

Keduapuluh Program Unggulan tersebut secara bertahap akan direalisasikan dimulai sejak perubahan anggaran tahun 2025. Adapun target pelaksanaan program unggulan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21. Target Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2026

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Target 2026	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerataan Dan Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan	Rehabilitasi / Pembangunan Sekolah Negeri Di Wilayah Perbatasan	12 Sekolah	DISDIK,
		Gerakan Toilet Layak	120 Toilet	DISDIK
		Seragam Gratis Siswa Miskin Peserta Didik Baru		DISDIK
		Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG)	32 Sekolah, 2.500 Siswa	DISDIK
2	Bimbingan Belajar Gratis Bagi 10.000 Siswa Untuk Masuk Ptn	Bimbingan Belajar	2.000 Siswa	DISDIK
3	Beasiswa Dan/Atau Bantuan Kuliah Gratis	Beasiswa Pendidikan	200 Orang @ 23 Juta	DISDIK
4	Rumah Kreatif Anak Istimewa	DED Rumah Kreatif Anak Istimewa	1 Dokumen	DISRUMKIM
		Pembangunan Rumah Kreatif	1 Gedung	DISRUMKIM
		DED Pengembangan JPO Akses Rumah Kreatif	1 Dokumen	DISRUMKIM
5	Pemerataan Layanan Kesehatan Melalui Pembangunan Puskesmas Dan Layanan Puskesmas Gratis	DED Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas	3 Dokumen	DINKES
		Pembangunan Puskesmas	2 Gedung	
		Rehabilitasi Puskesmas	1 Gedung	
6	Rumah Sakit Layanan Khusus Ginjal	DED Pengembangan RSUD ASA Untuk Layanan Ginjal	1 Dokumen	DINKES
7	Fasilitasi Wisata Keagamaan Dan	Dakel 25 Juta Per Kelurahan	63 Kelurahan	KECAMATAN
		Jaminan Sosial Bagi Penjaga Rumah	1.000 Orang	KESRA

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Target 2026	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perlindungan Sosial Bagi Penjaga Rumah Ibadah	Ibadah		
		Insentif Bagi Guru Ngaji Lekar Dan Pendidik Rohani	1.000 Orang	KESRA
8	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Rt, Rw, Lpm Dan Pekerja Rentan	Insentif Bagi Ketua RT, RW, LPM Dan Kader Posyandu		
		Jaminan Sosial Bagi Ketua RT, RW, LPM Dan Kader Posyandu	630 Orang	
		Insentif Dan Jaminan Sosial Bagi Kader PKK Kecamatan	1.260 Orang	
		Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan	8.662 Orang	
9	Penyediaan Prasarana Pemusatan Latihan Cabang Olah Raga Prestasi	Review DED Penataan Kawasan Stadion Merpati	1 Dokumen	DISRUMKIM
10	Penyediaan Sarana Olah Raga Masyarakat	Pembangunan Depok Open Space (DOS) 3	1 Area	DISRUMKIM
11	Pembangunan Pengelolaan Sampah Termaju	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	20 Unit	DLHK
		Operasional Mesin Pengolah Sampah	20 Unit	DLHK
12	Penataan Drainase Kota Terintegrasi	Penataan Drainase Yang Terintegrasi	1 Kawasan	DPUPR DPUPR
13	Penataan Jalan Dan Penanganan Kemacetan Terintegrasi	Penanganan Kemacetan Jl. Raya Sawangan: - Pengadaan Lahan Pelebaran Jl Muhtar Raya - Pembangunan Jalan Alternatif Jl Sawangan (Jl Engram – Jl Pemuda) - Rekonstruksi Jl Muhtar Raya - Pembangunan Jembatan Jl Muhtar Raya	1.000 M 900 M 1 Segmen 2 Jembatan	DISRUMKIM DPUPR DISHUB
		Underpass Citayam: DED Penataan Jl Citayam	1 Dokumen	
		Flyover Margonda: - DED Flyover Margonda - Amdal Flyover Margonda	1 Dokumen 1 Dokumen	
		Flyover Jalan Raya Bogor: - DED Flyover Jl Raya Bogor - Amdal Flyover Jl Raya Bogor	1 Dokumen 1 Dokumen	
14	Jualan Sama-Sama Umkm Naik Kelas	Event Jualan UMKM Sama Sama Kecamatan (JUSS Kecamatan)	44 Event	DKUM
		Penyediaan Aset Pemerintah Untuk Area Usaha Bagi UMKM	3 Lokasi	
		Penyediaan Ruang Dan Peralatan Pemasaran Digital	1 Paket	DKUM
		Promosi Dan Pemasaran Melalui Event Lokal	12 Event	
15	Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Per Kecamatan	Agro Eduwisata	3 Kecamatan	DKP3
16	Pembangunan Balai Latihan Kerja (Blk)	DED Pembangunan BLK	1 Dokumen	DISRUMKIM

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Target 2026	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terintegrasi Dan Penyerapan Tenaga Kerja			
17	Penyediaan Gedung Pertunjukkan Kota Dan Ruang Terbuka Kreatif Bertaraf Nasional Dan Modern	FS Pembangunan Gedung Pertunjukan	1 Dokumen	DISPORYATA
18	Dana Rw Sebesar 300 Juta Per Rw Per Tahun	Dana RW	938 RW	KECAMATAN
19	Pbb Gratis Dengan Njop ≤ 100 Juta	PBB Gratis Dengan NJOP ≤ 200 Juta		BKD
20	Peningkatan Kesejahteraan Asn Dan Non Asn Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan	Kenaikan Per 2 Tahun	-	

Sumber : Bappeda, Tahun 2025, diolah

4.2.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

Sinkronisasi dan keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pembangunan Kota Depok dilihat dari data yang ada dalam dokumen Rancangan Awal RKP 2025, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat 2025, dan Rancangan Awal RKPD Kota Depok 2025. Proritas pembangunan Kota Depok 2025 diadopsi dari RPJMD Kota Depok 2021-2026. Sinkronisasi Nasional- Jawa Barat - Kota Depok tersebut dilakukan dengan cara menyandingkan 3 (tiga) hal: prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan (Nasional, Provinsi, dan Kota), Hasil penyelarasan Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

Hasil penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok 2026 dengan Pembangunan Nasional 2026 dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2026

Prioritas Nasional Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2026	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1	Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua
		P4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif,	P12	Peningkatan tata kelola pemerintahan kolaboratif

Prioritas Nasional Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2026	
			Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>		
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P11	Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan
		P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P7	Peningkatan konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
		P4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	P12	Peningkatan tata kelola pemerintahan kolaboratif
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P11	Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan
		P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P7	Peningkatan konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1	Peningkatan pelayanan kesehatan secara merata
				P2	Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua
				P3	Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga
				P4	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan toleransi beragama

Prioritas Nasional Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2026	
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		
				P10	Perluasan Kesempatan Kerja
				P11	Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P7	Peningkatan konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
				P11	Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P7	Peningkatan konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
		P4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good dan Clean Governance</i>	P12	Peningkatan tata kelola pemerintahan kolaboratif
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P4	Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan toleransi beragama
		P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		

Sumber : Rancangan RKP 2026, Rancangan Akhir RKPD Jawa Barat 2026, RPJMD Kota Depok 2025-2029, Tahun 2025, diolah

Sinkronisasi Sasaran

Sinkronisasi sasaran pembangunan Daerah Kota Depok dilakukan dengan cara mencermati Tabel sandingan antara Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Jawa Barat 2026 dengan Sasaran dan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 2026 yang diadopsi dari dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026. Berdasarkan penelusuran dokumen, sasaran dan indikator sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 2026 tersebut diadopsi dari dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Tabel tersebut kemudian disandingkan dengan Sasaran Pembangunan Kota Depok 2026 yang diadopsi dari Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029. Berdasarkan sinkronisasi sasaran pembangunan nasional-provinsi-kota, dapat dilihat bahwa cukup banyak sasaran pembangunan Daerah Kota Depok 2026 yang berkontribusi terhadap sasaran pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 dan sasaran Pembangunan Nasional 2026. Terdapat beberapa sasaran Pembangunan Kota Depok yang memiliki kontribusi terhadap satu atau lebih sasaran di level provinsi dan nasional.

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Depok tahun 2026 dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026, serta keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dan indikator sasaran prioritas Provinsi Jawa Barat dengan indikator sasaran prioritas pembangunan Kota Depok dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.22. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok 2025 dengan Pembangunan

Nasional 2025 dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2025

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2025
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	P6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	P1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
	P5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;	P8. Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
	P6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
		P4. Peningkatan Kualitas Permukiman
PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	P1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
		P5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
PN 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	P1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P8. Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
	P2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	P3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
	P3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	P2. Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat
	P4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;	P9. Peningkatan Nilai-nilai Keluarga
PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	P1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	P6. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
		P5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	P5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;	P8. Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
		P1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
		P4. Peningkatan Kualitas Permukiman

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2025
		P6. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
		P7. Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	P6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	P2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	P3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
	P4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;	P10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Rancangan RKP 2025, Rancangan Awal RKPD Jawa Barat 2025, RPJMD Kota Depok 2021-2026, Tahun 2024, diolah

Sinkronisasi Sasaran

Sinkronisasi sasaran pembangunan Daerah Kota Depok dilakukan dengan cara mencermati Tabel sandingan antara Sasaran Pembangunan Jawa Barat 2025 dengan Sasaran Pembangunan Nasional 2025 (Tabel ini diadopsi dari dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat 2025). Pada Tabel tersebut Kolom dengan judul “Sasaran RKP 2025”, berdasarkan penelusuran dokumen yang ada, content “Sasaran RKP 2025” tersebut diadopsi dari dokumen RPJMN 2020-2024. Berdasarkan tabel tersebut, kemudian dilakukan identifikasi sasaran pembangunan Kota Depok 2025 (sasaran ini diadopsi dari RPJMD Kota Depok 2021-2026). Berdasarkan sinkronisasi sasaran pembangunan nasional-provinsi-kota, dapat dilihat bahwa beberapa sasaran pembangunan Daerah Kota Depok 2025 memiliki dukungan/kontribusi terhadap sasaran pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2025 dan sasaran Pembangunan Nasional 2025. Terdapat beberapa sasaran Pembangunan Kota Depok yang memiliki kontribusi terhadap satu atau lebih sasaran di level provinsi dan nasional.

Hasil identifikasi tersebut disandingkan, hasil penyandingan disajikan pada tabel berikut ini. Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Depok tahun 2025 dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kota Depok dapat dilihat dalam tabel berikut dimana indikator sasaran prioritas Kota Depok terkait dengan indikator prioritas nasional.

Tabel 4.23. Keterkaitan antara Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP 2026, Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Jawa Barat 2026 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Depok 2026

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PP4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance		P12. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif) P4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama (Depok Inklusif)	
SN1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	SP17. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Demokrasi
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik				
	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik			Meningkatnya kohesi sosial masyarakat	Indeks Konflik Sosial
	Indeks Hak Asasi Manusia				
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		PP1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PP2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif PP3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P4. Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama P12. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif	
SN2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	SP3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Meningkatnya kohesi sosial masyarakat	Indeks Konflik Sosial
	Global Cybersecurity Index		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Demokrasi

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
SN3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	Indeks Ketahanan Pangan	SP7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	Prevalensi Ketidacukupan Pangan				
SN4. Meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	Kapasitas Tampungan Air per Kapita	SP13. Meningkatkan layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan				
	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman		Indeks Kualitas Infrastruktur	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman				
	Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka				
SN5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	Kontribusi PDB Syariah	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Inklusi Keuangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju PDRB per kapita
				Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
					Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
SN6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Inklusi Keuangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju PDRB per kapita
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
					Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
					Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
SN7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Ekonomi Hijau	SP7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju Investasi
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	SP13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	SP13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
	Proporsi Tenaga Kerja Hijau			-	-
	Tingkat Input Material Sirkular			-	-
SN8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	SP7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
	Perlindungan Kawasan Perairan				
	Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru				
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,		PP2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi		P11. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan	

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif PP3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)	
SN9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Waktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)	SP13. Meningkatkan layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Level of Service
	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)				
	Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)				
SN10. Meningkatkan Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Inklusi Keuangan (%)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju Investasi
	Aset Perbankan/PDB (%)				
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	Aset Asuransi/PDB (%)				
	Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB (%)				
	Total Kredit/PDB (%)				
	Inklusi Keuangan (%)				
SN11. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Rasio PDB Pariwisata (%)	SP9. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
	Devisa Pariwisata (Miliar USD)				
SN12. Meningkatkan Lapangan Kerja yang	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	SP10. Meningkatkan Penciptaan dan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Menurunnya angka pengangguran yang disertai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
Berkualitas	Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)	Perluasan Lapangan Kerja		peningkatan <i>decent job</i>	
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)				
	Rasio Kewirausahaan (%)	SP14. Meningkatkan Meningkatkan Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil	Rasio Kewirausahaan Daerah	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
SN13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	SP9. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PP1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		P1 Peningkatan pelayanan kesehatan secara merata P2 Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua P3 Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga P4 Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan toleransi beragama	
SN14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahu keatas (tahun)	SP4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah
	Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah		
	Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains				
	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional17.03				

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
	a. Literasi Membaca				
	b. Numerasi				
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)				
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)				
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	SP11. Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi		
	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran				
SN15. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	SP1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)				
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita		Prevalensi Stunting
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	Prevalensi obesitas >18 tahun				
	Cakupan kepesertaan				

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
	jaminan kesehatan nasional (%)				
SN16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	SP5. Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Keluarga
	Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak		-
	Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda
	Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender		-
	Indeks Pembangunan Gender		-		-
	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		Indeks Kesejahteraan Sosial		-
	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	SP15. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat	-		-
SN17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peringkat Indeks Inovasi Global	SP10. Meningkatkan Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	-	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	-
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	SP16. Meningkatkan penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
SN18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	SP5. Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda
	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games				
	Peringkat pada Asian Games				

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
	Peringkat pada Asian Para Games				
	Peringkat pada SEA Games				
	Peringkat pada ASEAN Para Games				
	Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)				
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PP2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P9. Peningkatan Kinerja Ekonomi Kraetif Dan Kapasitas UMKM P10. Perluasan Kesempatan Kerja P11. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan	
SN19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	SP6. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)				
	Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta)				
SN20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Biaya Logistik (% PDB)	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)				

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
SN21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	SP10. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Laju Pendapatan Perkapita
	Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)				Laju Investasi
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PP3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P7. Peningkatan konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi P11. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan	
SN22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	Tingkat Kemiskinan	SP15. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
	Proporsi penduduk kelas menengah				
	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal			Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan decent job	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
SN23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	SP13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
SN25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi					
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PP1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PP2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif PP4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good dan Clean Governance</i>		P2. Peningkatan pelayanan pendidikan untuk semua P9. Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas UMKM P12. Peningkatan tata kelola pemerintahan kolaboratif	
SN26. Terwujudnya	Indeks Integritas Partai Politik	SP3. Terbentuknya	Indeks Ketahanan	Meningkatnya kualitas	

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	Indeks Pembangunan Hukum	individu Berintegritas dan Taat Hukum	Nasional Daerah Jawa Barat	pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi
	Indeks Materi Hukum				
	Indeks Persepsi Korupsi				
	Indeks Integritas Nasional				
SN27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Indeks Pelayanan Publik	SP18. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
SN28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	SP3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Tingkat Kriminalitas	Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Keluarga
SN29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	Clearance rate tindak pidana judi	SP3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Tingkat Kriminalitas	Terwujudnya kehidupan keluarga dan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Keluarga
SN30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa		Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	
SN31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	Rasio pendapatan negara terhadap	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif
SN32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan	Tingkat Inflasi (%)	SP8. Meningkatkan Sektor Perdagangan	Tingkat Inflasi (%)		

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2026		Prioritas Kota Depok Tahun 2025	
Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa			
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PP1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul PP3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P4. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan toleransi beragama P5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pemukiman (Depok Hijau)	
SN33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	SP2. Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	-	Meningkatnya kohesi sosial masyarakat	-
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Indeks Layanan Keagamaan		-		-
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan		-
	Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		-		Indeks Kerukunan Umat Beragama
SN34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	SP13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	-	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dan krisis iklim	-
	Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas kelautan & pesisir, air, pertanian dan kesehatan)		-		-
	Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RRPJMD Kota Depok 2025-2029, 2025, diolah

4.2.7 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional (PN)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional (PN) digambarkan dengan cara menyusun persandingan keterkaitan antara Program Prioritas Daerah Kota Depok dengan Kegiatan Prioritas Nasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Persandingan keterkaitan tersebut disusun dengan cara :

- a. Pertama, mencermati nomenklatur kegiatan prioritas pada PN,
- b. Kedua, mengidentifikasi nomenklatur program daerah (beserta indikator program) yang diperkirakan berkesesuaian,
- c. Ketiga, menyusun tabel/matrik yang memperlihatkan dua kolom nomenklatur tersebut dalam satu baris yang sama

4.2.7.1 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN 01.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas nasional pada PN 01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat pada tabel berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 7 program.

Tabel 4.24. Tingkat Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, penguatan Demokrasi, Dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);	Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil Untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat Dan Berpendapat	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Ketahanan Sosial, Budaya Dan Toleransi Beragama (Depok Inklusif)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Anggota Masyarakat Sasaran yang Dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang dselesaikan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		Penguatan Kesetaraan Masyarakat Atas Informasi Publik	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.2. **Tingkat Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional pada PN 02. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;**

Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas nasional pada PN.02 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak **16** program.

Tabel 4.25. Tingkat Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional pada PN 02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Keamanan siber, sandi dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat,	P4 Mewujudkan Masyarakat dan	Program Penyelenggaraan	Peningkatan Tata Kelola	Program Penyelenggaraan	Persentase Tingkat Kematangan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		terutama pada ranah siber dan area rentan	Birokrasi yang Adaptif, berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance.	Persandian untuk pengamanan informasi	Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	
		Fasilitasi <i>business matchmaking startup digital</i>	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	
		Fasilitasi <i>digital technopreneur</i>	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif.	Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas Umkm (Depok Berdaya)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha yang bertransformasi dari informal ke formal	
							Pertumbuhan Wirausaha	
						Program Pengembangan UMKM	Proporsi usaha mikro menjalin kemitraan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good dan Clean Governance</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	
			P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
							Peningkatan Produksi Hortikultura	
							Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang termanfaatkan untuk lahan pertanian	
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cirebon	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Sampah	Peningkatan Tata Kelola Persampahan (Depok Bersih)	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya persentase sampah kota yang terkelola	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
							Pengelolaan Lingkungan Hidup	
3	Swasembada pangan. energy dan air	Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
							Peningkatan Produksi Hortikultura	
							Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian	
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam Perizinan Usaha Perikanan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan ikan Angka Konsumsi Ikan	
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penambahan Jumlah Kelompok	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.3 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Tingkat dukungan program daerah terhadap program prioritas pada PN.03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak **3** program.

Tabel 4.26. Tingkat Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Pada PN.03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Penguatan produktivitas industry makanan dan minuman	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/dilaksanakan	
		Penguatan produktivitas industry tekstil dan produk tekstil serta alas kaki						
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner dan pemampu ekonomi kreatif		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kinerja Ekonomi Kreatif Dan Kapasitas UMKM (Depok Berdaya)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.4 Tingkat dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.04 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN.04 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.29. berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 16 program.

Tabel 4.27. Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.04 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Merata (Depok Sehat)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan milik pemerintah daerah di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar	
							Cakupan Penerima PKG	
							Prosentase Pelaporan Indikator Nasional Mutu di Fasyankes	
							Proporsi fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistcm informasi Kesehatan nasional	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		Pembangunan kualitas keluarga				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang diberdayakan	
						Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
2	Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak / raudhatul athfal / bustanul athfal) dan sekolah menengah atas / sekolah menengah kejuruan / madrasah aliyah / sederajat		Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk Semua (Depok Cerdas)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
						Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	
						Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	
							Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Merata (Depok Sehat)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan milik pemerintah daerah di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok				
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu	
		kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupate/kota					Cakupan Penerima Pemeriksaan kesehatan gratis		
							Prosentase Pelaporan Indikator Nasional Mutu di Fasyankes		
							Proporsi fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistcm informai Kesehatan nasional		
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	
						Persentase sarana kefarmasian, Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu, Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar			
	Fasilitasi literasi digital		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE			
	Digital Pembangunan Kampus II		Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Untuk	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)			

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kota Depok			Semua (Depok Cerdas)		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.5 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.05 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.05 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak **13** program.

Tabel 4.28. Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.05 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1.293.496.400
								56.150.000

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar dan industri startegis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi	kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program perencanaan dan pembangunan industri	Ketahanan Pangan (Depok Sejahtera)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	
		Pengembangan industri elektronik dan digital				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	52.880.000,00
						Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN	220.000.000,00
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi	360.000.000,00
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	59.999.750,00
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pelayanan Data Dan Sistem	1.673.280.000,00
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	9.293.460.150,00

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	723.072.000,00
						Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	1.216.855.000,00
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	634.267.000,00
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	589.987.250,00
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.5.1 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN. 06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; dapat dilihat pada Tabel 4.29 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional

tersebut adalah sebanyak 10 program.

Tabel 4.29. Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Permukiman (Depok Hijau)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase MBR dan atau korban bencana yang difasilitasi hunian layak	
		Peremejaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh		Program Kawasan Permukiman		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dengan PSU tertangani	
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase dokumen penataan bangunan dan lingkungan	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang (IP2R)	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.7 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.07 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.07 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dapat dilihat pada Tabel 4.30 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 7 program.

Tabel 4.30. Tingkat dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.07 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat			Kota Depok		Pagu
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	
1	Membangun single identity number dan system informasi administrasi dan data base kependudukan untuk mencegah identitas ganda mencegah penyalagunaanya dan memudahkan pelacakan asset, pajak maupunpersoalan nomor induk kependudukan ganda pada daftar pemilih tetap di dalam pemilu	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan <i>public digital</i>	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good dan Clean Governance</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (Depok Kolaboratif)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA	
						Program Pencatatan Sipil	Persentase layanan pencatatan sipil	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat			Kota Depok		Pagu
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.2.7.8 Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.08 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.08 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 2 program.

Tabel 4.31. Tingkat dukungan program daerah terhadap Program Prioritas Nasional pada PN.08 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
1	Masyarakat adil, makmur dan harmonis	Penyediaan Sumber Daya Manusia berkompeten, sarana dan prasarana	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	
							Persentase penanganan pasca bencana	

No	Nasional		Provinsi Jawa Barat		Kota Depok			
	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Dukungan Program Prioritas Daerah	Indikator Program	Pagu
		pencarian dan pertolongan	Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Pemukiman (Depok Hijau)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
							Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat 2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Kota Depok, 2025

4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) mengukuhkan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang diarahkan sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, dan regional. Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur ini terbentuk dari kawasan perkotaan inti, yaitu DKI Jakarta, dan kawasan perkotaan sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional termasuk di antaranya adalah kawasan perkotaan Depok dan kawasan perkotaan Cinere di Kota Depok, serta kawasan kawasan perkotaan lain di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Keterpaduan peran dan fungsi antar kota inti dan kota sekitarnya pada kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur perlu didukung dengan jaringan jalan dan sistem transportasi yang terpadu dan handal, infrastruktur yang terintegrasi, serta sistem prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimum perkotaan. Untuk menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan ekologis, pengembangan kawasan budidaya sebagai kawasan perkotaan diarahkan ke Barat-Timur kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Adapun pengembangan kawasan budidaya terbangun ke arah selatan dan pengembangan kawasan perkotaan pada daerah wilayah sungai dan resapan air dikendalikan.

Dalam konstelasi Kawasan Jabodetabekpunjur ini, Kota Depok berperan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan DKI Jakarta. Kawasan perkotaan Depok memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan perguruan tinggi, pelayanan kesehatan, sistem angkutan umum penumpang dan barang regional, dan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan kawasan perkotaan Cinere memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan kesehatan, dan pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa rencana jaringan transportasi penting Jabodetabek-Punjur yang terkait dengan Kota Depok adalah: (i) Jakarta Outer Ring Road II ruas Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung; (ii) Jalan tol Depok-Antasari; (iii) jalur elevated untuk busway koridor Manggarai – Pasar Minggu – Lenteng Agung – Depok; (iv) jalur angkutan massal berbasis rel Cawang – Cibubur; (v) jalur angkutan massal berbasis rel Cibubur – Bogor; (vi) Stasiun LRT (light rapid transit) di Stasiun Cibubur, Kecamatan Cimanggis; (vii) stasiun Pondok Rajeg di Kecamatan Cilodong; (viii) stasiun kereta api Cinere di Kecamatan Limo.

Rencana Jaringan prasarana perkotaan lainnya yang terkait Kota Depok antara lain IPA Cikeas

di Kecamatan Tapos, IPA Ciliwung di Kecamatan Cimanggis, serta IPA Pesanggrahan di Kecamatan Limo.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRWP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;.
5. Pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
6. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
7. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
8. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

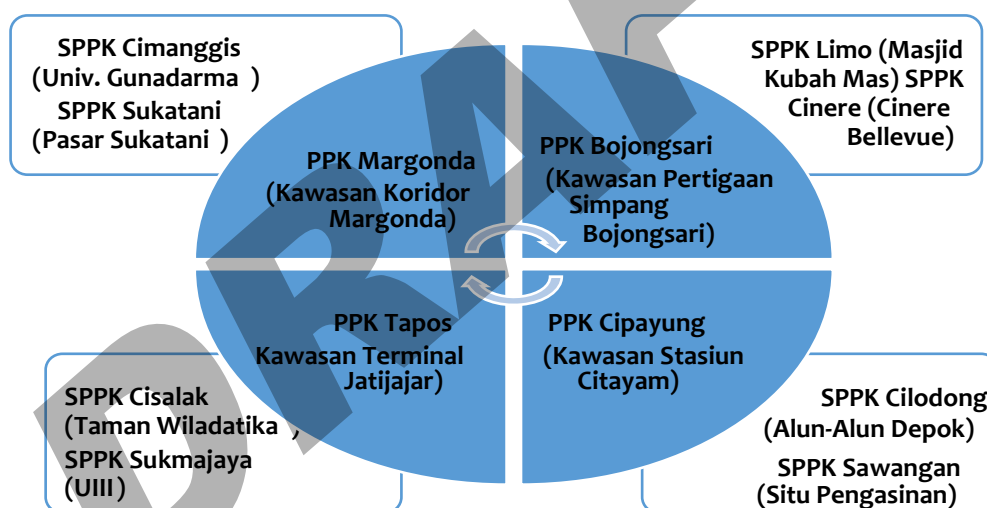
Kebijakan Penataan Ruang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042

Sesuai arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2022-2042, pengembangan wilayah Kota Depok direncanakan terdiri dari 4 (empat) PPK (Pusat Pelayanan Kota) yaitu (i) PPK Margonda yang diarahkan sebagai central business district (CBD) dengan pusat inti di kawasan koridor Margonda; (ii) PPK Bojongsari yang diarahkan sebagai tourism and recreation center dengan pusat inti di kawasan pertigaan simpang Bojongsari; (iii) PPK Tapos yang diarahkan sebagai smart mobility (multi-mode system) dengan pusat inti di kawasan Terminal Jatijajar; dan (iv) PPK Cipayung yang diarahkan sebagai green economy center dengan pusat inti di kawasan Stasiun Citayam.

Adapun Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota terdiri dari: (i) SPPK Cisalak; (ii) SPPK Cimanggis; (iii) SPPK Sukmajaya; (iv) SPPK Cilodong; (v) SPPK Sukatani; (vi) SPPK Limo; (vii) SPPK Cinere; dan (viii) SPPK Sawangan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan dapat mencakup satu kelurahan atau beberapa kelurahan.

Gambar 4.4. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok 2022-2042



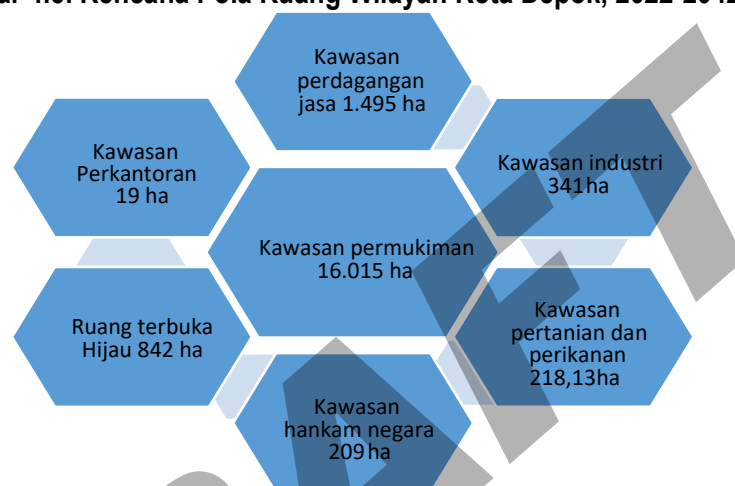
Sumber: RTRW Kota Depok 2022-2042

Distribusi peruntukan ruang wilayah Kota Depok dalam Depok dalam Perda No. 9 tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok tahun 2022-2042 ini diarahkan untuk Kawasan lindung berupa badan air situ seluas kurang lebih 248 hektar, sempadan sungai dan situ seluas kurang lebih 553 hektar, kawasan konservasi Taman Hutan Raya di kelurahan Pancoran Mas seluas 7 hektar, ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 842 hektar. Adapun untuk kawasan budidaya diarahkan berupa badan jalan seluas kurang lebih 170 hektar, kawasan pertanian seluas 71 hektar, kawasan perikanan budidaya seluas 15 hektar, kawasan industri seluas 341 hektar, kawasan permukiman seluas 16.012 hektar, kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 1.495 hektar, kawasan perkantoran dengan luas 19 hektar, dan kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 209 hektar, dan kawasan transportasi seluas

kurang lebih 6 hektar.

Kawasan strategis kota berupa kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: Kawasan Koridor Margonda berfungsi sebagai Center Business District, Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya berfungsi sebagai Tourism and Recreation Center, Kawasan Terminal Jatijajar berfungsi sebagai Smart Mobility (Multi-Mode System), Kawasan Stasiun Citayam berfungsi sebagai Green Economy Center.

Gambar 4.5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Depok, 2022-2042



Sumber: RTRW Kota Depok 2022-2042

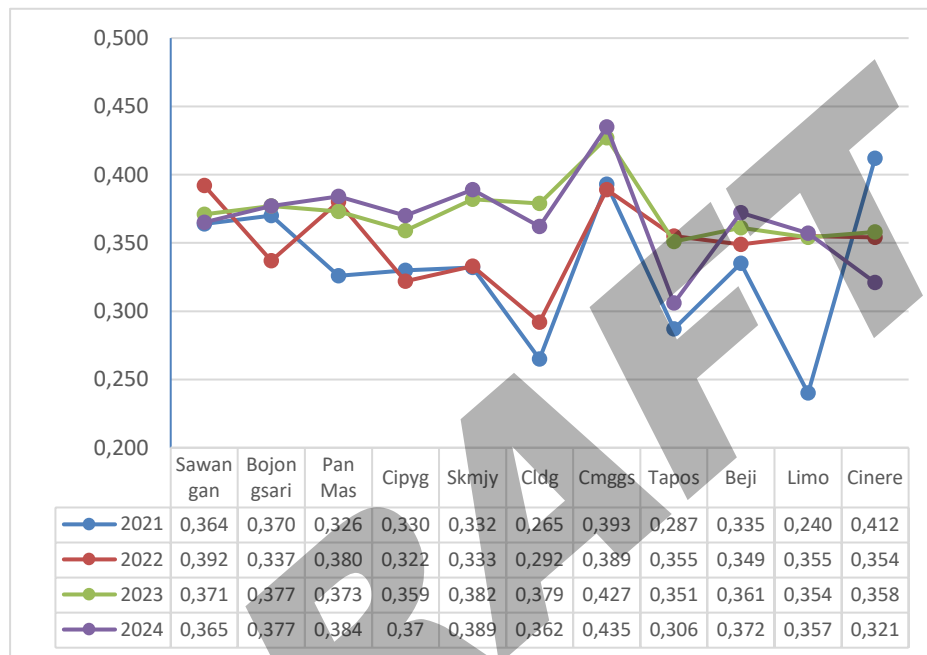
Ketimpangan antar Kecamatan di Kota Depok

Selama empat tahun terakhir tidak ada kecamatan di Kota Depok yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi (nilai gini ratio lebih dari 0,5). Pada tahun 2024 nilai gini ratio tertinggi terdapat di kecamatan Cimanggis (0,435) diikuti oleh kecamatan Sukmajaya (0,389) dan kecamatan (0,384). Nilai gini ratio terendah diperoleh kecamatan Tapos (0,306). Nilai gini ratio kecamatan Cimanggis di 2023 (0,427) dan 2024 lebih tinggi dibanding gini ratio Kota Depok sebesar 0,402 di 2023 dan 0,391 di 2024, namun baik tingkat kota maupun seluruh kecamatan di Kota Depok masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang (nilai gini ratio antara 0,3 - 0,5). Nilai gini ratio kecamatan mengalami pergerakan dari tahun ke tahun. Gini ratio kategori rendah pernah dimiliki kecamatan Limo (0,240), kecamatan Cilodong (0,265), dan kecamatan Tapos (0,287) di tahun 2021, namun sejak tahun 2022 hampir seluruh kecamatan mengalami peningkatan ketimpangan dibanding kondisi di 2021.

Pergerakan nilai gini ratio kecamatan-kecamatan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir memiliki pola yang berbeda-beda. Beberapa kecamatan memiliki nilai yang cenderung naik pada tahun 2022 – 2024, yaitu kecamatan Bojongsari, Cipayung, Sukmajaya, Cimanggis, dan Beji. Kecamatan Sawangan dan Tapos memiliki pergerakan gini ratio cenderung turun, sedangkan kecamatan Limo memiliki nilai gini ratio yang cenderung tetap di sekitar 0,35.

Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Depok lima tahun terakhir berada di angka 6,12%, nilai gini ratio yang ada menunjukkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas manfaat masih dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas, terutama pada kecamatan-kecamatan dengan gini ratio lebih tinggi, sehingga perlu upaya-upaya inovatif untuk menurunkannya.

Grafik 4.5. Nilai Gini Ratio Kecamatan Kota Depok, 2021-2024



Sumber data : Diskominfo Kota Depok, data diolah 2025

Pembangunan Manusia Antar Kecamatan Kota Depok

Tabel di bawah ini menyajikan Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. IPM Kota Depok Tahun 2024 naik apabila dibandingkan dengan angka IPM di tahun sebelumnya menjadi 82,98. Nilai IPM tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 88,65 disusul Kecamatan Cinere yaitu 88,25 dan Kecamatan Cimanggis sebesar 86,36. Sementara itu nilai IPM terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 77,02 disusul Kecamatan Tapos yang terendah kedua sebesar 79,07.

Tabel 4.32. Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Beji	81.51	81.71	81.81	81.85	82.67	83.36
2.	Bojongsari	77.56	77.76	77.86	77.87	78.61	79.23
3.	Cilodong	82.05	82.26	82.36	82.40	83.22	83.84
4.	Cimanggis	84.58	84.79	84.90	84.92	85.74	86.36
5.	Cinere	86.46	86.67	86.78	86.80	87.62	88.25
6.	Cipayung	75.36	75.55	75.65	75.66	76.4	77.02
7.	Limo	80.58	80.78	80.88	80.92	81.66	82.28
8.	Pancoran Mas	81.90	82.11	82.21	82.25	83.07	83.69
9.	Sawangan	77.79	77.99	78.09	78.10	78.84	79.46
10.	Sukmajaya	86.87	87.08	87.19	87.21	88.03	88.65
11.	Tapos	77.35	77.55	77.65	77.66	78.04	79.07
Kota Depok		80.98	81.14	81.54	82.02	82.53	83.05

Sumber data : Diskominfo Kota Depok, data diolah 2025

Berdasarkan hasil kajian dan analisis perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok, setiap kecamatan di Kota Depok perlu memperbaiki kualitas dari setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah prioritas yaitu Cipayung, Tapos dan Sawangan, dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi faktor-faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi yang kurang maksimal. Di bidang kesehatan perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW Siaga. Pada bidang pendidikan, upaya menaikkan rata-rata lama sekolah dapat ditempuh dengan mengaktifkan Kejar Paket A, Paket B maupun Paket C serta memastikan penduduk usia sekolah dapat bersekolah semuanya. Setelah mengikuti Kejar Paket A dan Paket B, apabila masih terkejar umurnya, perlu dimasukkan kembali ke pendidikan formal. Perlu pula dilakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia. Diantaranya adalah meningkatkan peran semua komponen masyarakat untuk bersinergi meningkatkan kualitas pembangunan manusia

4.4 Pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kota Depok Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Indikator kinerja daerah salah satu nya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Penerapan SPM diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah.

DRAFT

Tabel 4.33. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM PENDIDIKAN							
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	143.656.333.500
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	62,34	01.02.2.03 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	28.745.105.450
				01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1179 Unit	1.590.000.000
				01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	3 Paket	50.000.000
				01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	427.780.800
				01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	462 Satuan Pendidikan	140.282.000
				01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	15 Orang	600.378.000
				01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1960 Orang	936.338.000
				01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	900 Satuan Pendidikan	15.916.248.000
				01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1210 Satuan Pendidikan	7.830.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1205 Orang	188.557.950
				01.02.2.03.22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1000 Orang	164.207.000
				01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	149.999.950
				01.02.2.03.26 Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasidan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.740.000
				01.02.2.03.37 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	179.999.750
				01.02.2.03.39 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	170.574.000
				01.02.2.03.41 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	1 Paket	200.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	96,82	01.02.2.01 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	114.911.228.050
				01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	13 Unit	700.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Telah Dibangun		
				01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	1.000.000.000
				01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	206 Unit	11.000.000.000
				01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7835 Peserta Didik	8.164.000.000
				01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.723.677.050
				01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6135 Orang	72.812.000.000
				01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1194 Orang	366.035.200
				01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	85 Satuan Pendidikan	9.685.833.100
				01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	206 Satuan Pendidikan	10.000.000
				01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	645 Orang	200.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dasar		
				01.02.2.01.35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	420 Orang	200.000.000
				01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000
				01.02.2.01.39 Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000
				01.02.2.01.43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan	1.200.000.000
				01.02.2.01.46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	4.749.711.600
				01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	205 Satuan Pendidikan	269.151.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	2,03	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77 %	399.785.000
				01.04.2.01 Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan	70 %	399.785.000
				01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	1 Dokumen	199.764.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.021.000
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	80.180.539.800
				01.02.2.01 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	80.180.539.800
				01.02.2.01.26 Sub kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6135 Orang	72.812.000.000
				01.02.2.01.27 Sub kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1194 Orang	366.035.200
				01.02.2.01.49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	420 Orang	503.008.000
				01.02.2.01.39 Sub kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000
				01.02.2.01.35 Sub kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	420 Orang	200.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.2.01.46 Sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	4.749.711.600
				01.02.2.01.55 Sub kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	1.000.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,77	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77 %	399.785.000
				01.04.2.01 Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan	70 %	399.785.000
				01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	199.764.000
				01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.021.000
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	80.180.539.800
				01.02.2.01 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	80.180.539.800
				01.02.2.01.26 Sub kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6135 Orang	72.812.000.000
				01.02.2.01.27 Sub kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1194 Orang	366.035.200

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
				01.02.2.01.49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	420 Orang	503.008.000
				01.02.2.01.39 Sub kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000
				01.02.2.01.35 Sub kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	420 Orang	200.000.000
				01.02.2.01.46 Sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	4.749.711.600
				01.02.2.01.55 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	1.000.000.000
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77 %	399.785.000
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	2,1	01.04.2.01 Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan	70 %	399.785.000
				01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	1 Dokumen	199.764.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.021.000
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	39.565.062.300
				01.02.2.02 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100%	39.565.062.300
				01.02.2.02.39 Sub kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1185 Orang	37.230.939.650
				01.02.2.02.40 Sub kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3582 Orang	1.031.681.800
				01.02.2.01.60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1130 Orang	250.001.500
				01.02.2.02.52 Sub kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	199.999.800
				01.02.2.02.48 Sub kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1567 Orang	152.439.550

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.2.02.35 Sub kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	700.000.000
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77%	399.785.000
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,92	01.04.2.01 Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan	70 %	399.785.000
				01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	199.764.000
				01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.021.000
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	39.565.062.300
				01.02.2.02 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	39.565.062.300
				01.02.2.02.39 Sub kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1185 Orang	37.230.939.650

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.2.02.40 Sub kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3582 Orang	1.031.681.800
				01.02.2.02.60 Sub kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1130 Orang	250.001.500
				01.02.2.02.52 Sub kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	199.999.800
				01.02.2.02.48 Sub kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1567 Orang	152.439.550
				01.02.2.02.35 Sub kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	700.000.000
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	41,3	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,75 %	17.223.900.000
				01.02.2.03 Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	17.223.900.000
				01.02.2.03.26 Sub kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.740.000
				01.02.2.03.39 Sub kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	170.574.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				01.02.2.03.17 Sub kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	900 Satuan Pendidikan	15.916.248.000
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	76,5	01.02.2.03.16 Sub kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1960 Orang	936.338.000
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rasio pengawas dan penilik PAUD	3,4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77 %	399.785.000
				01.04.2.01.01 Sub kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	199.764.000
				01.04.2.01.02 Sub kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	200.021.000
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	1.459.455.550
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	80 %	1.459.455.550
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	32233 Orang	149.999.700

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32233 Orang	67.266.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30801 Orang	53.701.800
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	164151 Orang	51.766.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	291216 Orang	66.424.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146742 Orang	64.245.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573791 Orang	530.475.700
8	Pelayanan kesehatan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	379903 Orang	30.600.500

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44177 Orang	26.169.850
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3032 Orang	68.807.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31868 Orang	315.395.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38063 Orang	350.000.000
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	16.93 %	277.016.000
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	16.93 %	277.016.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	277.016.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99.37 %	10.499.469.800
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99.37 %	10.499.469.800
		Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	600 Rumah Tangga	10.499.469.800	
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni (Persentase pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana)	100%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/ Korban Bencana	1,47 %	253.357.900
				Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tersedia	100 %	28.397.850
				Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	28.397.850
				Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang direhabilitasi	100 %	224.960.050
				Sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah	224.960.050
2	Fasilitasi	Jumlah WargaNegara	100%	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman	95,29 %	199.999.550

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten /kota	yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			kumuh tertangani		
				Kegiatan : Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase dokumen yang tersedia	100 %	199.999.550
				Sub Kegiatan : Penyusunan/Review/Legalisasi kebijakan bidang KPK	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	199.999.550
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase jumlah RTLH yang tertangani	66,50 %	31.402.266.000
				Kegiatan : Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah RTLH yang tertangani	66,50 %	31.402.266.000
				Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	54 Unit Rumah	31.402.266.000
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63,33 %	13.463.285.650
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	75,35 %	13.463.285.650
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	299.990.750
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong	355 Orang	13.163.294.900

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penegakan Perda dan Perkada		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 %	266.197.000
				Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	266.197.000
				Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	266.197.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 %	164.999.950
				Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	164.999.950
				Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	350 Kawasan	164.999.950
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100 %	1.145.920.000
				Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.145.920.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		bencana		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	1.145.920.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	8.989.417.950
				Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	8.989.417.950
				Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	8.989.417.950
SPM SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;	Jumlah warga negara penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	1.234.976.800
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis- gelandangan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	990 orang	1.234.976.800
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	155.952.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	59.969.000
				Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	170.435.000
				Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	79.697.000
				Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	41.608.800
				Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	165 Orang	81.790.000
				Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	645.525.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yg meperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial		975.160.400
				Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bencana	100 %	542.400.000
				Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	417.000.000
				Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	250 Orang	125.400.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Program/kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2025	Pagu Tahun 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
					Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bencana	74 Orang	432.760.400
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	74 Orang	432.760.400

Sumber : Disdik, Dinkes, Damkar, Rumkim, PUPR, Dinsos, Pol.PP, 2024, diolah

4.5 Kebijakan Inovasi Daerah

4.5.1 Kebijakan Inovasi Daerah

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5.2 Inovasi Pembangunan Daerah Kota Depok

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dituangkan dalam inovasi kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan tema pembangunan Kota Depok Tahun 2026 yaitu “Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan Publik”.

Penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya inovasi daerah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas.

Kebijakan inovasi adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh perangkat litbang daerah dalam menumbuhkan budaya inovasi di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah. Inovasi memiliki peran penting sebagai akselerator untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif, dalam mendukung terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung perkembangan inovasi di daerah, pemerintah daerah perlu membangun suatu ekosistem yang disebut sebagai Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang terdiri dari penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya kelitbangan dan jejaring. Pada tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Depok yang berisikan pedoman kebijakan penguatan SIDa, Penataan unsur SIDa dan pengembangan SIDa.

Dalam rangka mengembangkan inovasi daerah pada tahun 2026, selain melaksanakan kelitbangan utama yang menjadi dasar terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, juga direncanakan penguatan kelitbangan pendukung dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan forum pakar/tenaga ahli, penguatan ketatalaksanaan melalui penyusunan pedoman kelitbangan agar aktor kelitbangan/inovasi melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, fasilitasi inovasi daerah melalui beberapa aksi, pengembangan basis data kelitbangan melalui pengembangan sistem e-litbang dan penguatan kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

Fasilitasi inovasi daerah dilakukan melalui beberapa aksi sebagai berikut:

1. Menghimpun data inovasi baru maupun pengembangan dan pembaruan yang dilakukan perangkat daerah terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan tahun sebelumnya melalui sistem berbasis teknologi;

2. Melakukan sinergisasi dengan perangkat daerah terhadap data inovasi yang berada dalam program yang dikoordinatori oleh kementerian/instansi vertikal seperti Kemenkominfo, Kemenpan RB, Bappenas dan lain lain. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dengan perangkat daerah penggerak program tersebut;
3. Melaksanakan penilaian terhadap inovasi perangkat daerah yang layak menjadi inovasi tingkat kota dan melakukan pengembangan yang bersifat kolaboratif;
4. Melaksanakan pelaporan inovasi daerah melalui sistem inovasi daerah Kemendagri;
5. Mengembangkan klaster inovasi yang berbasis sektor unggulan kota;
6. Mendorong tumbuhnya inovasi yang berasal dari ASN, salah satunya yang berasal dari proyek perubahan.

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun inovasi yang akan dikembangkan dan didorong oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rintisan Sekolah Swasta Gratis

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan yang baik dapat membentuk pola pikir kritis dan kreatif, menanamkan nilai-nilai sosial, tanggung jawab dan kerja sama, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan kesehatan diri dan lingkungan, serta diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang diemban Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan kewajiban ini, Pemerintah Kota Depok telah membangun 34 SMP Negeri yang dapat menampung 10.396 siswa. Kapasitas ini tidak dapat menampung seluruh lulusan sekolah dasar yang ingin melanjutkan sekolah. Sebagian di antaranya adalah siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Selain SMP negeri, terdapat 227 SMP swasta di kota Depok yang seyogyanya dapat menampung siswa-siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Namun demikian, biaya pendidikan di SMP swasta umumnya lebih mahal di banding SMP negeri, utamanya karena sekolah swasta tidak menerima subsidi penuh dari pemerintah. Akibatnya siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di SMP negeri kesulitan untuk membayar biaya sekolah swasta. Di sisi lain, terdapat SMP-SMP swasta yang masih memiliki ruang kelas kosong yang siap diisi.

Mulai pada tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kota Depok menghadirkan inovasi Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang memberikan akses pendidikan gratis di jenjang SMP bagi 2.500 siswa melalui kerjasama dengan 33 sekolah swasta yang tersebar di 11 kecamatan. Melalui program RSSG ini, Pemerintah Kota Depok memberikan subsidi penuh biaya pendidikan sehingga siswa dari keluarga tidak mampu berkesempatan menikmati pendidikan gratis sejak masuk di kelas VII (tidak ada uang pangkal dan uang gedung) hingga lulus SMP.

Program RSSG ini menjadi inovasi Pemerintah Kota Depok untuk:

- a) Mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri melalui pemberdayaan SMP-SMP swasta
- b) Mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat alasan biaya
- c) Mengurangi keterbatasan kemampuan siswa kurang mampu dalam membayar biaya pendidikan di sekolah swasta
- d) Membantu biaya operasional SMP swasta yang tidak tertutupi karena kapasitas tampung yang tidak terisi penuh
- e) Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

2. **Jualan Sama-sama UMKM Naik Kelas**

Program unggulan ini dirancang sebagai strategi terintegrasi untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Fokus utamanya adalah mengakselerasi transformasi UMKM dari pelaku ekonomi subsisten menuju entitas usaha yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Pendekatan program ini bersifat strategis dan berorientasi jangka menengah. Pemerintah Kota akan melakukan kurasi terhadap pelaku UMKM dan memberikan intervensi terarah melalui skema fasilitasi berbasis tiga pilar utama: pemasaran, promosi, dan permodalan.

a) Pemasaran

UMKM yang terpilih akan dibantu untuk masuk ke marketplace melalui insentif platform fee, serta penyediaan aset pemerintah sebagai ruang usaha dan pusat pemasaran kolektif berupa ruang digital lengkap dengan peralatan live streaming sebagai sarana edukasi dan promosi online.

b) Promosi

Untuk mendorong visibilitas produk UMKM, promosi akan dilakukan melalui dua jalur: promosi digital (edukasi dan penyediaan konten) serta keikutsertaan UMKM dalam event skala lokal hingga nasional dan internasional. Upaya ini didesain untuk memperluas jangkauan pasar UMKM dan memperkuat posisi produk lokal di mata konsumen.

c) Permodalan

Program ini menyediakan skema subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah di bank mitra untuk memperluas akses kredit modal kerja. Melalui langkah ini diharapkan beban pelaku usaha mikro dalam mencari pembiayaan menjadi lebih ringan dan sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan UMKM.

Dengan sinergi antara fasilitasi legalitas usaha, promosi aktif, insentif digitalisasi, dan dukungan pembiayaan, program "Jualan Sama-Sama" diharapkan dapat secara nyata mendorong UMKM Kota Depok untuk naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi kota yang inklusif dan berkelanjutan.

3. **Rumah kreatif Anak Istimewa**

Pemerintah Kota Depok sedang mengembangkan **Rumah Kreatif Anak Istimewa** sebagai wadah inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Program ini akan berlokasi di Jalan Margonda Raya dan

ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2026. Rumah Kreatif Anak Istimewa sebagai ruang pembinaan keterampilan dan kreativitas anak-anak disabilitas, sebagai pelengkap dari layanan SLB yang telah ada.

Tujuan utama rumah kreatif ini:

- Memberikan pelatihan seni, keterampilan, dan pembelajaran agama (mengaji)
- Menyediakan dukungan psikologis dan layanan kesehatan
- Mendorong kemandirian, rasa percaya diri, dan ekspresi kreatif anak-anak Istimewa

DRAFT

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045. Rencana Kerja tersebut disusun dalam rangka pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2026 dan visi dan misi kepala daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Depok yang tertuang dalam visi dan misi, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini termuat program dan kegiatan prioritas disertai pagu indikatif pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kota Depok Tahun 2026.

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN dan APBD Provinsi. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi pendanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana usulan melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang telah diusulkan melalui SIPD adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1. Rencana Usulan Kegiatan Prioritas Kota Depok Melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Usulan	Usulan Anggaran	Alamat Lokasi
1	#BK Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp. 70.694.648.640	Jalan Margonda Raya No. 54, Kota Depok
2	#BK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 13.500.000.000	Jalan Margonda Raya No. 54, Kota Depok
3	#BK Penataan dan Pengelolaan Situ	Rp. 15.000.000.000	Jalan Juanda Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kota Depok

No	Usulan	Usulan Anggaran	Alamat Lokasi
4	#BK Dana Operasional Posyandu Kelurahan dan TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 2.623.500.000	Dinas Kesehatan Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54, Kota Depok
5	#BK Penataan dan Pengelolaan Situ	Rp. 10.000.000.000	Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Kota Depok
6	#BK Penataan dan Pengelolaan Situ	Rp. 10.000.000.000	Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Kota Depok
7	#BK Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Olahraga	Rp.14,409,347,500	Dinas Disporwata Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 54, Kota Depok
8	#BK Pengembangan Rumah Sakit (Layanan Unggulan)	Rp. 625.217.002.615	Jl. Raya Tapos, Kel. Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Kota Depok
9	#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota		Kota Depok : 18 kelurahan (Kelurahan Beji Timur, Pancoran Mas, Sukamaju, Tugu, Pasir Gunung Selatan, Mekarsari, Depok, Rangkapan Jaya, Sukmajaya, Cilangkap, Sukamaju Baru, Pengasinan, Duren Mekar, Kalimulya, Limo, Cilodong, Pondok Cina, Cipayung) , Kota Depok
10	#BK Pengembangan SPAM	Rp. 73.000.000.000	Kelurahan Limo, Pondok Petir dan Cinere, Kota Depok
11	#BK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	Rp. 39.000.000.000	Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.34,5, Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kota Depok
12	#BK Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Kabupaten/Kota (termasuk Underpass, Overpass, Perlintasan Tidak Sebidang Rel Kereta Api)	Rp. 40.000.000.000	Kecamatan Cipayung, Kota Depok
13	#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000.000	Jalan Raya Sawangan, Kota Depok
14	#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000.000	Jalan Engram - Jl Pemuda, Kota Depok

No	Usulan	Usulan Anggaran	Alamat Lokasi
15	#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 15.000.000.000	Jalan Cipayung, Kota Depok
16	#BK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	Rp. 28.500.000.000	Dinas DLHK Kota Depok Jl. Raya Bogor, Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos, Kota Depok
17	#BK Pembangunan IPAL Komunal	Rp. 8.000.000.000	Jalan Margonda Raya No.54, Kota Depok
18	#BK Penataan Saluran Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)	Rp. 50.000.000.000	Dinas PUPR Jl. Raya Bogor Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok
19	#BK Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Olahraga	Rp. 1.000.000.000	Jalan Margonda Raya No.54, Kota Depok
20	#BK Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 4.500.000.000	Jalan Margonda Raya No. 54, Kota Depok

Tabel 5. 2 Rencana Usulan Kegiatan Prioritas Kota Depok Melalui APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026

No	Kegiatan	Biaya	Lokasi
1	Revitalisasi Tpa Cipayung	Rp. 305.756.980.000	Lokasi
2	Pengendalian sedimen Embung Pengdongkelan	Rp. 21.985.236.000	Kecamatan Sawangan dan Cipayung
3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Perbatasan Depok Jakarta (Cinere, Pangkalan Jati, Tanah Baru, Jalan Raya Bogor)	Rp. 12.320.000.000	Kecamatan Cimanggis
4	Pembangunan Turap Jalan Raya Krukut (Limo) Menuju Jakarta	Rp. 28.000.000.000	Wilayah Kota Depok
5.	Pengadaan Alat Kesehatan penunjang pelayanan kesehatan Primer dan Rujukan	Rp. 54.423.665.451	Kecamatan Limo Kota Depok
6	Perluasan akses Layanan Transjakarta dan Jak lingko di rute Depok-Jakarta		Wilayah Kota Depok
7	Pengadaan Bus Sekolah	Rp. 7.700.000.000	Wilayah Kota Depok
8	Pembangunan Turap dannormalisasi Sungai Pesanggrahan Pasir Putih	Rp 57.000.000.000	Kecamatan Sawangan

No	Kegiatan	Biaya	Lokasi
9	Pengendalian sedimen Sungai Pesanggrahan Depok- Jakarta	Rp. 22.478.400.000	Wilayah Kota Depok

Sumber : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah per Juni 2025

Rencana kegiatan melalui APBD Kota Depok Tahun 2026 secara ringkas di jelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.3. Ringkasan Pagu Indikatif APBD Kota Depok Tahun 2026

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	3	11	29	764.087.742.990,00
2	Dinas Kesehatan	5	20	78	339,400,750,980.00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	23	72	77,306,048,030.00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	8	17	39	26,786,227,580.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	33	31,754,512,593.00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	7	10	35,293,428,388.00
7	Dinas Sosial	6	14	42	14,918,639,690.00
8	Dinas Tenaga Kerja	4	6	7	10,115,026,507.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9	19	32	13,463,093,797.00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	6	10	12	18,914,899,818.00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	11	17	39	145,721,380,083.00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	13	26	20,477,451,897.00
13	Dinas Perhubungan	2	8	9	38,731,724,096.00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	8	19	24,323,735,236.00
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6	8	11	9,700,073,499.00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	10	28	17,965,168,050.00
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	8	16	22	9,747,423,470.00
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	9	21	13,432,988,215.00
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	10	17	41	27,212,136,852.00
20	Sekretariat Daerah	3	11	22	76,545,937,329.00
21	Sekretariat Dprd	2	16	64	115,831,206,518.00

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Prog	Jumlah Keg	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
22	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	4	8	10	14,278,901,767.00
23	Badan Keuangan Daerah	4	7	6	91,721,113,261.00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	11	32	25,942,353,399.00
25	Inspektorat Daerah	3	8	22	27,716,861,300.00
26	Kecamatan Pancoran Mas	4	12	24	15,156,176,982.00
27	Kecamatan Cilodong	4	10	22	12,791,000,000.00
28	Kecamatan Sawangan	4	6	10	16,446,722,130.00
29	Kecamatan Cinere	4	8	14	11,704,236,116.00
30	Kecamatan Sukmajaya	4	11	23	14,232,182,422.00
31	Kecamatan Limo	4	9	21	11,001,843,877.00
32	Kecamatan Beji	4	11	23	14,457,302,759.00
33	Kecamatan Tapos	4	11	23	16,853,910,759.00
34	Kecamatan Bojongsari	4	11	23	15,882,356,660.00
35	Kecamatan Cimanggis	4	11	23	16,842,327,901.00
36	Kecamatan Cipayung	4	7	11	13,666,670,022.00
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	11	29	5,811,450,454.00
	TOTAL	182	421	972	2.045.598.992.348

Sumber : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah per Juni 2025

Pagu indikatif tabel 4.3 baru memasukkan belanja wajib belanja wajib harus memenuhi gaji dan tunjangan KDH/WKDH/DPRD/ASN/Non ASN selama setahun, gaji 13 dan 14 sesuai peraturan perundangan, kewajiban membayar listrik. Untuk belanja prioritas masih dalam proses penginputan pada SIPD dalam pemenuhan Janji Walikota, KDS, BOS APBD dan APBN, PBI, BLUD, khusus Dinas Kesehatan termasuk operasional RSUD ASA. Belanja Prioritas digunakan untuk pemenuhan sesuai skala prioritas urusan untuk mencapai target kinerja RPJMD dan Renstra sesuai urusan, belanja Kegiatan Tematik bagi Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, DLHK, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kegiatan tematik.

Pagu Indikatif masih bersifat sangat sementara, akan dilakukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan berdasarkan kemampuan kapasitas fiskal atau defisit RAPBD tahun 2026 serta belanja wajib/prioritas. Pagu disesuaikan dengan upaya pencapaian target RPJMD Kota Depok tahun 2025-2029, Janji Kampanye dan Isu Strategis yang berlaku pada tahun berkenaan.

**Tabel 5.4 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026**

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
1.	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	75,50	558.146.763.340,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	80,02 %	205.540.979.650,00
			Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,80 %	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		400.000.000,00
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui		
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	82,60	0,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan standar	71,43%	0,00
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	15,00 %	
			Prosentase Pelaporan Indikator Nasional Mutu di Fasyankes	54.06%	

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
			Proporsi fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi Kesehatan nasional	40.50%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100%	0,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu, Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	47.98%	0,00
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	47.98%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100%	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71,45	37.766.702.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	2 %	16.920.000.000,00
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	15,78%	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem penyediaan air minum jaringan	20,79%	668.490.050,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Sistem Penyediaan Air Minum	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		99,63%	0,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	96,065%	0,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengajuan dokumen PBG dan SLF yang disetujui	98,98%	0,00
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		20,00%	0,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio kemantapan jalan	90,75%	19.505.840.913,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analis konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	65,65%	206.750.000,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		0,33	160.950.000,00
4	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	78,00	20.162.107.580,00
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase MBR dan atau korban bencana yang difasilitasi hunian layak	0,23%	824.150.000,00
		Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh kurang dari 10 Ha yang ditangani	3,58%	258.120.000,00
		Program Perumahan Dan Kawasan	Rasio permukiman layak huni	67,403	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Permukiman Kumuh			
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan dengan PSU tertangani	26,46%	5.329.250.000,00
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	100%	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	212.600.000,00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100%	0,00
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tersedianya dokumen peningkatan akses terhadap redistribusi tanah	100%	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	72,40	16.648.542.593,00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	92%	0,00
			Persentase Penyelenggaraan Tibum Tranmas	76%	

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	97%	
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	76,2	26.793.201.862,00
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100%	1.006.400.000,00
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	
			Persentase penanganan pasca bencana	100%	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	42,59%	7.334.450.000,00
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	83,80 %	
7	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Sosial	77,00	10.706.038.390,00
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial	25,77%	1.761.900.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar , gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	1.243.061.000,00
			Persentase pemerlu pelayanan		

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
			kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	2,9%	673.728.300,00
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan pasca bencana	100%	326.552.000,00
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	207.360.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	72	9.939.976.507,00
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat BNSP	91%	76.300.000,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	15%	53.000.000,00
		Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja pada perusahaan yang menerapkan	100%	45.750.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
			perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,75	12.346.783.797,00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0,21%	0,00
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1,00 %	0,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	0,3 %	0,00
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	36%	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	73,16	311.390.000,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	89,59	389.520.000,00
		Program Pengendalian Penduduk	TFR	2,1	45.450.000,00
		Program Pembinaan	Angka Prevalensi Kontrasepsi	67,0	226.600.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Keluarga Berencana (KB)	Modern/Modern Contraceptive(mCPR)		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	33%	143.350.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	73,00	0,00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	0,00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Pencemar Air (IP) 2. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	IP = 5,113 ISPU = 89,0	0,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	100%	0,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	57%	0,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	57%	0,00
		Program Peningkatan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup	82,99%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	yang Ditingkatkan Kompetensinya		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	41,14%	0,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	70%	0,00
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	75,99%	0,00
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi	74%	0,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,55	18.015.651.897,00
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA	92,00%	0,00
		Program Pencatatan Sipil	Persentase layanan pencatatan sipil	98,8%	0,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	25,00%	646.700.000,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	0,00
12	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	72,00	782.060.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas darat	0,62	16.829.900.000,00
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	60,59%	
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang tertangani	100%	
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	78,92	14.607.004.710,00
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	82%	3.417.847.450,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	1,8	4.752.108.426,00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	3,4	0,00
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	59	558.070.650,00
14	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	76,5	8.811.548.499,00
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	33,18%	99.450.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	4,55%	85.800.000,00
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	92,42%	42.900.000,00
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	16,59%	313.950.000,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha yang bertransformasi dari informal ke formal	55,39%	
		Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	158,45%	346.425.000,00
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Proporsi usaha mikro menjalin kemitraan	20,00%	
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72	16.436.368.050,00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 %	0,00
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	4%	0,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	98,98%	0,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku	55%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
			Usaha dalam Membuka Usaha		
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	1.528.800.000,00
16	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	75	8.752.233.470,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	5,9	146.100.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	3%	653.440.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	9,3	0,00
		Program Pengembangan Kebudayaan	tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	10%	144.300.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	82.35% (15/19)	0,00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,1%	51.350.000,00
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	53.33% (8/15)	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	0,68%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75,5	9.916.920.215,00
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	91,54%	2.564.170.000,00
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	83,3%	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Depok	88	951.898.000,00
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi daerah yang dimiliki	20	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	76,66	16.446.189.018,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,0	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	87,8%	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1%	

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1%	472.450.000,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan ikan Angka Konsumsi Ikan	1%	0,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2%	154.740.500,00
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	4%	
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1%	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Daging ASUH	1%	1.686.959.500,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	26,3%	154.560.800,00
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	30%	
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	74,4	18.127.600.000,00
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%	0,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	71,42%	8.305.419.952,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7%	0,00
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	477.964.580,68 (USD)	0,00
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	441.866.900,00
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	4,51%	337.250.000,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	42,10%	0,00
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100%	0,00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	100%	0,00
20	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80,90	76.545.937.329,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2,7000 Poin	0,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	86%	0,00
21	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		83.517.538.068,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	32.313.668.450,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Bappeda Kota Depok	81,05	13.672.851.767,00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	103.900.000,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang PPM	100%	99.450.000,00
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	84%	102.700.000,00
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	84%	102.700.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
23	Badan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok	80,38	91.721.103.911,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Alokasi Anggaran Sesuai Ketentuan	95%	
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91%	
			Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	12%	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79	25.720.783.399,00
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100%	221.570.000,00
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	30,85%	
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	99.10 %	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	79%	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
25	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SAKIP Inspektorat	81,7	17.175.054.942,00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti	93,27 %	2.908.084.750,00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi	Level 3	1.394.838.000,00
26	Kecamatan Cimanggis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cimanggis		15.431.137.901,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	1.150.440.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	27.543.515.250,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	260.750.000,00
27	Kecamatan Pancoran Mas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Kecamatan Pancoran Mas	71,00	15.156.176.982,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan	Persentase kegiatan Pemberdayaan	100%	32.400.000.000,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
28	Kecamatan Cilodong	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Kecamatan Cilodong	71,50	11.639.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	15.101.179.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
29	Kecamatan Sawangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Sawangan		16.059.582.130,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	243.300.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	25.691.852.60,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	
30	Kecamatan Cinere	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cinere	66,00	11.672.554.116,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	31.682.000,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	12.557.235.500,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	
31	Kecamatan Sukmajaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Sukmajaya		14.232.182.422,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	35.053.510.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
32	Kecamatan Limo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Limo	75,1	10.671.283.445,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	82%	330.560.432,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	80%	11.095.105.500,00
		Program Koordinasi	Persentase masalah ketentraman dan	100%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ketertiban umum yang tertangani		
33	Kecamatan Tapos	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Tapos	70,05	0,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	0,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
34	Kecamatan Bojongsari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Bojongsari		15.882.356.660,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	24.472.765.225,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
35	Kecamatan Cipayung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cipayung	68	11.754.934.832,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	16.191.802.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	
36	Kecamatan Beji	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Beji	71.00	14.456.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik sesuai SOP	100%	0,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai pedoman	100%	20.678.304.020,00
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	100%	0,00
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.00	5.628.310.454,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase anggota masyarakat sasaran yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	0
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang mengikuti pendidikan politik	100%	0

No.	Perangkat Daerah	Program	Kinerja		Pagu
			Indikator	Target	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80%	91.600.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan terkait ketahanan ekososbud, agama dan P4GN	100%	0
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	90.100.000,00

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Rancangan pagu sebagaimana tertuang pada Tabel 5.4 diatas, baru memuat belanja pegawai, belanja fixed cost belum memasukkan prioritas perangkat daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja prioritas lainnya. Sedangkan untuk rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah Kota Depok beserta pagu pendanaannya di jabarkan pada lampiran RKPD tahun 2026 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Depok.

Selanjutnya beberapa Proyek Strategis Kota Depok yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 beserta skema pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan disusun sebagai salah satu daftar proyek prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan Adapun beberapa proyek strategis Kota Depok Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Table 5.5 Proyek Strategis/Kegiatan Prioritas Kota Depok Tahun 2026

No	Kegiatan Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)	Volume	Perangkat Daerah
1	Pembangunan Infrastruktur Flyover	250.000.000.000**	1 Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Konsultan Perencanaan Penataan Jalan Citayam Kec. Pancoran Mas		1 Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Rehabilitasi / Pembangunan Sekolah negeri	61.751.720.000		Dinas Pendidikan
4	Gerakan toilet layak	3.500.000.000	70 toilet	Dinas Pendidikan
5	Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Swasta gratis (RSSG)	15.000.000.000	5.000 siswa	Dinas Pendidikan
6	Bimbingan belajar	2.000.000.000	1.000 siswa	Dinas Pendidikan
7	Beasiswa pendidikan	4.600.000.000	100 siswa	Dinas Pendidikan
8	DED Rumah Kreatif Anak Istimewa	1.294.570.000	1 paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Pembangunan Rumah Kreatif Anak Istimewa	17.752.070.000	1 paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	DED Pengembangan JPO Akses Rumah Kreatif	500.000.000	1 paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	DED dan Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas	24.000.000.000	1 paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	DED Pengembangan RSUD ASA untuk layanan unggulan ginjal	5.000.000.000	1 paket	Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Dana Kelurahan 300 juta per RW	281.400.000.000	938 RW	Kecamatan
14	Tuan Rumah Bersama Pekan Olahraga Provinsi	35.305.464.300	1 Kegiatan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
15	Pembangunan Jalan, Trotoar, dan Infrastruktur Kawasan Balaikota	5.391.825.500	1 kegiatan	Dinas Perumahan dan Permukiman
16	Pembangunan Rumah Emak	25.000.000.000	1 lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
17	Kajian Master Plan Kota Depok	1.000.000.000	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	DED Pengembangan RSUD ASA untuk layanan unggulan ginjal	5.000.000.000	1 paket	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)	Volume	Perangkat Daerah
19	Pembangunan pengelolaan sampah termaju dengan incenerator	9.000.000.000	2 unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
20	Fisik Pembangunan Embung	5.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Pemenuhan Universal Health Coverage	154.069.519.359		Dinas Kesehatan
22	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.530.000.000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
23	Penataan jalan dan penanganan kemacetan terintegrasi di Jalan Raya Sawangan	172.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	FS dan DED Flyover Simpang Tidak Sebidang Jalan Margonda dan Jalan Raya Bogor	600.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Operasional Koridor Biskita	20.000.000.000	1 Koridor	Dinas Perhubungan
26	Calender of Events	7.800.000.000	12 Events	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
27	Pengelolaan lahan pertanian modern per kecamatan melalui agro eduwisata	3.000.000.000	3 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.6 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	0	Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Yang Bersertifikat BNSP	Persen	91	6,055,470,355.00	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Descent Job	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	15	1,140,007,585.00	Dinas Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi	Persentase Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial	Persen	100	2,492,966,190.00	Dinas Tenaga Kerja
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran Yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	Persen	100	516,818,400.00	Dinas Tenaga Kerja
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatkan Kapasitas Dan Daya Saing Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Persen	55.39	5,000,000,000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
			Pertumbuhan Wirausaha				

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tersedianya narasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	poin	90	955,136,025.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	persen	0	31,867,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	87.08	73,082,900.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	1	11,018,590.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1	6,372,108,910.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan produksi olahan ikan Angka Konsumsi Ikan	persen	1	107,250,880.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persen	2	1,306,813,170.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	4		

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	1		
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi pangan hewani dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Daging ASUH	persen	1	17,022,018,900.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	26.3	780,544,490.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	32		
10	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kelompok petani	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok	persen	1		
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam Perizinan Usaha Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam Perizinan Usaha Perikanan	persen	1		
12	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	100	15,994,720.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	71.42	8,995,276,201.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	7	605,123,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
15	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	USD	477,964,580.68	740,659,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	100	547,866,113.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	4.51	480,635,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	100	900,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persen	4	305,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	98.98	150,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	55	150,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	1,700,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	persen	42.1	1,142,539,993.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
24	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	persen	100	11,600,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	persen	100	42,997,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	33.18	350,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
27	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	6.36	200,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
28	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	persen	71.17	550,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
29	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	16.59	1,850,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
30	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro	Pertumbuhan Wirausaha yang bertransformasi dari informal ke formal	persen	55.39	5,000,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pertumbuhan Wirausaha	persen			
31	Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro Naik Kelas yang daya saing	Proporsi usaha mikro menjalin kemitraan	persen	55.45	4,600,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
32	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	persen	2.1	500,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
33	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	persen	53.33	500,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
34	Program Pengembangan Sumber Daya	Meningkatnya Kapasitas SDM	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif	persen	0.68	250,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga,

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	pariwisata dan ekonomi kreatif	yang aktif dan tervalidasi				Kebudayaan, dan Pariwisata
35	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	persen	10	1,464,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
36	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	persen			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
37	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	persen	82.35	200,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tersedianya narasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target Kemiskinan adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kemiskinan

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 5-6 Tahun	Persen	80,02		Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun	Persen	98,80		
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun	Persen	48,62		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	Persen	15,00		Dinas Kesehatan

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman	Persen	99,63		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya permukiman yang layak huni	Rasio permukiman layak huni	Poin	67,403		Dinas Perumahan dan Permukiman
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100		Dinas Sosial
			Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100		
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	2,9		Dinas Sosial
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat BNSP	Persen	91		Dinas Tenaga kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan descent job	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	15		Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Pekerja pada perusahaan yang menerapkan	Persen	100		Dinas Perdagangan

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
			perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial				dan Perindustrian
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen	86		Sekretariat Daerah

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tersedianya narasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target Rasio Gini adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.9 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Rasio Gini

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	0.00	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Yang Bersertifikat BNSP	Persen	91	6,055,470,355.00	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Decent Job	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	15	1,140,007,585.00	Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
4	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Pekerja Yang Terlindungi	Persentase Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dan Dialog Sosial	Persen	100	2,492,966,190.00	Dinas Tenaga Kerja
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Transmigrasi	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran Yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	Persen	100	516,818,400.00	Dinas Tenaga Kerja
6	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	2,589,242,925.00	Dinas Sosial
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100		
7	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan	Persen	2.9	18,957,595,440.00	Dinas Sosial

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tersedianya narasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.10 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Program Pengelolaan Kependidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 5-6 Tahun	persen	80.02	724,311,801,450.00	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun	persen	98.8		
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun	persen	48.62		
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	14.47	400,000,000.00	Dinas Pendidikan
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	persen	90	150,000,000.00	Dinas Pendidikan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kota Depok	poin	88	1,806,559,500.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi daerah yang dimiliki	persen	20	16,345,000.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan standar	persen	71.43	399,944,382,755.00	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	persen	15		

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
			Prosentase Pelaporan Indikator Nasional Mutu di Fasyankes	persen	54.06		
			Proporsi fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi Kesehatan nasional	persen	40.5		
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	persen	100	1,046,752,950.00	Dinas Kesehatan
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu dan pangan	Persentase sarana kefarmasian, Perusahaan Rumah Tangga Perbekalan kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu, Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	persen	47.98	376,123,950.00	Dinas Kesehatan
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	persen	47.98		
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang diberdayakan	persen	100	455,000,000.00	Dinas Kesehatan
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	poin	5.9	1,350,000,000.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	persen	3	44,000,000,000.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
12	Program Pengembangan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	poin	9.3	2,100,000,000.00	Dinas Pemuda, Olah Raga,

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
	Kapasitas Kepramukaan						Kebudayaan dan Pariwisata
13	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	21	1,489,499,290.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	100	509.891.360,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen	0.3	811.165.630,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	persen	36	179.779.435,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	poin	73.16	1,179,846,085.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	poin	89.59	1,145,865,600.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	poin	2.1	340,172,580.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	poin	67	1,059,018,895.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	33	3,498,729,190.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Keaktifan PSKS dalam Pelayanan Peningkatan	Persentase PSKS Aktif dalam Peningkatan	persen	25.77	4,095,777,400.00	Dinas Sosial

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
		Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial				
23	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	poin	90	955,136,025.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
24	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	persen	0	31,867,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
25	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	87.08	73,082,900.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
26	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	persen	1	11,018,590.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1	6,372,108,910.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
28	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan produksi olahan ikan	persen	1	107,250,880.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	persen	2	1,306,813,170.00	
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	persen	4		
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	1		
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi pangan hewani dan	Persentase Peningkatan	persen	1	17,022,018,900.00	Dinas Ketahanan Pangan,

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
		kualitas prasarana pertanian	Penyediaan Daging ASUH				Pertanian, dan Perikanan
30	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	26.3	780,544,490.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	32		
31	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas kelompok petani	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok	persen	1		
32	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam Perizinan Usaha Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan dalam Perizinan Usaha Perikanan	persen	1		
33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	100	15,994,720.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	71.42	8,995,276,201.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	7	605,123,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	USD	477,964,580.68	740,659,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
37	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	100	547,866,113.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	4.51	480,635,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
39	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	100	900,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
40	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	persen	4	305,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	98.98	150,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
42	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	55	150,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
43	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	100	1,700,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
44	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	persen	42.1	1,142,539,993.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
45	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perizinan	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	persen	100	11,600,000.00	Dinas Perdagangan

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
		berusaha sektor perindustrian					dan Perindustrian
46	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini	persen	100	42,997,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
47	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	33.18	350,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
48	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	6.36	200,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
49	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	persen	71.17	550,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
50	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	16.59	1,850,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
51	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro	Pertumbuhan Wirausaha yang bertransformasi dari informal ke formal	persen	55.39	5,000,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pertumbuhan Wirausaha	persen			
52	Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro Naik Kelas yang daya saing	Proporsi usaha mikro menjalin kemitraan	persen	55.45	4,600,000,000.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
53	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	persen	2.1	500,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
54	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	persen	53.33	500,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
55	Program Pengembangan Sumber Daya	Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	persen	0.68	250,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga,

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
	Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						Kebudayaan, dan Pariwisata
56	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	persen	10	1,464,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
57	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	persen			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
58	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	persen	82.35	200,000,000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025

Pemerintah Kota Depok dalam mendukung pencapaian target Tersedianya narasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target Stunting adapun program dan kegiatan Kota Depok disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.11 Program Yang Mendukung Pencapaian Target Stunting

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 5-6 Tahun	Persen	80,02		Dinas Pendidikan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	Persen	15,00		Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Presentase Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang diberdayakan	Persen	100		Dinas Kesehatan

No	Program	Outcome	Indikator	Satuan	Target	Pagu	PD Penanggung Jawab
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	0,3		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	73,16		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive(mCPR)	Poin	67,0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	33		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Pon	90		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase peningkatan produksi olahan ikan Angka Konsumsi Ikan	Persen	1		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sumber : hasil analisis Bappeda 2025



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tahun perencanaan berjalan. Pencapaian target merupakan hasil dari pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah dilaksanakan oleh semua PD pada Pemerintah Kota Depok selama tahun 2026 dengan para pemangku kepentingan daerah. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

6.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Selain IKU dan IKK dalam rangka menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kota Depok menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Depok, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Proyeksi indikator kinerja makro disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Penetapan Target Indikator Makro Kota Depok Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun	
				2026*	2026**
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,47	5,49 – 5,66	5,89 – 6,20
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	43,51	50,73 – 51,7	50,73 – 53,1
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Persen	3,3	3,3	3,3
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	2,34	2.23 - 2.24	1,69 – 1,84
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,27	6.07 - 5.95	5,39 – 5,69
6	Rasio Gini	Poin	0,398	0,376 – 0,404	0,376 – 0,404
7	Indeks Pembangunan Manusia	poin	83,05	84,12	84,12
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq / Miliar Rupiah	1,07	1,48	1,48
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	54,55	58,12	76,05
10	Prevalensi Stunting	Persen	12,50	11,79	1,41

Sumber :

- 2026* Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2024
- 2026** Surat Penyampaian Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030 oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah. Target IKU selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 6.2

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,11	14,20	14,28	Disdik
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,82	75,87	76,18	Dinkes
3	Prevalensi stunting	Persen	12,5	12,0	11,2	Dinkes
4	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61	62	63,2	Disporyata
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	63,49	66,44	69,39	DP3AP2KB
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	3,53	3,63	3,73	Kesbangpol
7	Level of Service (LoS)	Poin	C (0,72)	C (0,70)	C (0,69)	DPUPR, Dishub
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	62,25	62,05	61,85	DPUPR , Damkar
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	54,55	57,87	58,12	DLHK
10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	49,39	53.54	54.78	Disrumkim , DPUPR
11	Laju PDRB per Kapita	Persen	4,58	4.59 – 4.81	4.82 – 5.03	Disdagin, DKUM, DKP3
12	Laju Investasi	Persen	5,12	5.13 - 5.25	5.26 - 5.38	DPMPSTSP
13	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	29,16	29,07	28.98	Disdagin
14	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	14,85	15,19	15,53	Disporyata
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,27	6.19	6.07 - 5.95	Disnaker
16	Persentase Penduduk Miskin	Persen	2,34	2,25	2.23 - 2.24	Tim TKPKD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	87,11	87,16	87,21	Setda
18	Indeks Kolaborasi Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	na.	50%	55%	Setda, Bappeda

Sumber :
Hasil proyeksi, Perangkat Daerah dan diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2025

6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) untuk membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
I	Aspek Geografi dan Demografi					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	89,81			DKP3
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	4,52			DKP3
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh / kapita				
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Konsumsi air siap minum perpipaan	Persen	18,5			Disrumkim
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin				DLHK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen				
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelohan Sampah	Kg / orang				
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen				
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen				
10	Indeks Risiko Bencana	Poin	72,28			
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin				
	Persentase Penurunan Emisi GRK					
12	Kumulatif	Ton CO2Eq/Miliar Rupiah				
13	Tahunan					
14	Kapasitas Air Baku	Persen	1.15			
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,37			
16	Rasio Penduduk	Persen				
17	Kepadatan Penduduk	Orang / km2	10828			
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.47			Indikator Makro, PD sektor ekonomi
19	Tingkat Kemiskinan	Persen	2.34			
20	PDRB Perkapita	Persen				Indikator Makro, PD sektor ekonomi
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.27			Indikator Makro, PD sektor ekonomi
22	Gini Ratio	Poin	0.398			Indikator Makro, PD sektor ekonomi
23	Indeks Modal Manusia	Poin				Indikator Makro, PD sektor ekonomi
24	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,44			Indikator Makro, PD sektor ekonomi
25	Usia Harapan Hidup	Tahun				Dinkes
26	Angka Kematian Ibu	Orang				Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
27	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment success rate)	Persen				Dinkes
28	Indeks Keluarga Sehat	Poin				Dinkes
29	Prevalensi Stunting	Persen	12,5	12,0	11,2	Dinkes, Tim TPPS
30	Rara-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun	Tahun				Disdik
31	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,11	14,2	14,28	Disdik
32	Angka Literasi/Numerasi	Poin				Disdik
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin				Diskarpus
34	Indeks Literasi Digital	Poin				Diskarpus
35	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen				Disnaker
36	Indeks Kerukunan Umat Bergama	Poin	3,53	3,63	3,73	Bakesbangpol
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin				
38	Indeks Perlindungan Anak	Poin				
39	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin				
40	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin				
41	Indeks Ketimpangan Gender	Poin				
42	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	61	62	63,2	Disporyata
III	Aspek Daya Saing Daerah					
44	Angka Ketergantungan					
45	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen				
46	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen				
47	Jumlah Tamu Wisatawan	Orang				
48	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen				
49	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen				
50	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
51	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen				Disnaker, DP3AP2KB
52	Indeks Inovasi Daerah	Poin				
53	Indeks Ekonomi Hijau	Poin				
54	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin				
55	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer					
56	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin				
57	Pembentukan Modal Tetap Bruto					
58	Ekspor Barang dan Jasa					
59	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin				
60	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin				
61	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan					
62	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB					
63	Tingkat Inflasi	Persen				
64	Total Kredit/PDRB					
65	Inklusi Keuangan					
66	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kota					
67	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen				
68	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)					
69	Angka Ketergantungan					
70	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen				
71	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen				
72	Jumlah Tamu Wisatawan	Orang	Disporyata			
73	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	Disporyata			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
74	Rasio Kewirausahaan Daerah					
75	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen				Disnaker
76	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen				Disnaker, DP3AP2KB
77	Indeks Inovasi Daerah	Poin				
78	Indeks Ekonomi Hijau	Poin				
79	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin				
80	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin				
81	Pembentukan Modal Tetap Bruto					
82	Ekspor Barang dan Jasa	Poin				
83	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin				
84	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin				
85	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen				
86	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB					
87	Tingkat Inflasi	Persen				
88	Total Kredit/PDRB	Persen				
89	Inklusi Keuangan					
90	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kota					
91	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen				
92	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen				
IV	Aspek Pelayanan Umum					
93	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,82			Setda
94	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	4,32			Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab
95	Indeks Pelayanan Publik	Poin				
96	Persentase Penegakan Perda	Persen	91,55			Setda
97	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin				Bakesbangpol
98	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	76,62			
99	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,29			
100	Indeks Kepatuhan Daerah	Poin				Setda
101	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,11			Setda
	Indikator Kinerja Kunci					
A	Pendidikan					
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun				Disdik
	Harapan Lama Sekolah	Tahun				Disdik
B	Kesehatan					
	Usia Harapan Hidup	Tahun				Dinkes
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman					

- Sumber:
- Data diolah Bappeda Kota Depok, tahun 2024
 - Target dari Dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026
 - Indikator Kinerja Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, definisi operasional terdapat dalam lampirannya

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Depok yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. RKPD ini merupakan penjabaran Tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2025-2045, serta memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Perumusan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) serta prinsip *money follow programs*, guna menjamin perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh proses perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat, serta isu-isu strategis lokal yang berkembang.

RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen RKPD Kota Depok Tahun 2026 ini, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Renja masing-masing agar selaras dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta sasaran kinerja yang tertuang dalam RKPD Kota Depok Tahun 2026.
3. RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2026. Oleh karena itu, RKPD perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, yang akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Wali Kota.
4. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainnya, setiap Perangkat Daerah harus menyusun

Rencana Kerja yang menggambarkan keterpaduan dan sinergi program/kegiatan/sub kegiatan antar sumber pendanaan.

5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan/subkegiatan, serta melakukan koreksi dan perbaikan yang diperlukan, dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota melalui Bappeda.
6. Masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan daerah dengan mengacu pada RKPD ini.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

Prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus merespons tantangan pembangunan kota secara strategis dan adaptif. Fokus pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD ini ditujukan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi transformasi Kota Depok Maju.

Arah kebijakan pembangunan Kota Depok Tahun 2026 mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan ketahanan kota terhadap berbagai risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat secara merata dan berkeadilan. Kota Depok juga berkomitmen untuk memperkuat karakter sebagai kota yang inklusif, yang menjunjung tinggi harmonisasi antar etnis, agama, dan golongan.

Di bidang infrastruktur dan tata ruang, pembangunan difokuskan pada pengembangan kawasan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem transportasi kota. Penataan jalan dan penanganan kemacetan, khususnya di ruas strategis seperti Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Margonda dan Jalan Raya Bogor menjadi prioritas guna meningkatkan mobilitas dan konektivitas warga. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada pemerataan dan penguatan sektor produktif melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi.

Sebagai bentuk pembangunan berbasis kewilayahan dan partisipatif, Pemerintah Kota Depok mengalokasikan Dana RW sebesar Rp300 juta per RW. Transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital juga menjadi prioritas utama untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan. Seluruh agenda pembangunan ini akan didukung oleh penguatan kerja sama pembangunan lintas sektor di tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional, guna menciptakan sinergi dan inovasi dalam pembangunan kota.

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas untuk Tahun 2026 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program* yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

RKPD Kota Depok Tahun 2026 pada akhirnya akan menjadi pedoman pengukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan di Kota Depok. RKPD ini juga diharapkan menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Depok: “Bersama Depok Maju”.

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

DRAFT



BUKU 2 RKPD 2026

DRAFT

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA DEPOK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						764.087.742.990,00							876.678.406.564,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						764.087.742.990,00							876.678.406.564,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						764.087.742.990,00							876.678.406.564,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	558.146.763.340,00						-	656.528.406.564,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	104.050.000,00			-	-	-	-	114.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	104.050.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	555.884.263.340,00			-	-	-	-	654.108.906.564,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3295 Orang/bulan	555.884.263.340,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		654.108.906.564,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	477.950.000,00			-	-	-	-	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	477.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	750.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.500.000,00			-	-	-	-	162.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	205.540.979.650,00						-	219.730.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	113.451.840.000,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	122.890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	400.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1681 Orang	100.351.840.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				420 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				206 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6600 Peserta Didik	10.000.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	83.065.439.650,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	87.190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	400.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5100 Peserta Didik	17.000.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		18.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1158 Orang	62.965.439.650,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				35 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1130 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	3.592.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	3.930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	400.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	400.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				15 Orang	992.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	5.431.700.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	5.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	750.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				60 Orang	1.981.700.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				898 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		1.610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				10 unit	400.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	400.000.000,00						-	420.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	400.000.000,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							0,00						287.134.047.595,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							287.134.047.595,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							287.134.047.595,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	262.283.466.805,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	186.643.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.610.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		105.033.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	260.535.191.705,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1289 Orang/bulan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		260.425.191.705,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.340.069.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1899 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.969.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	221.562.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.662.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.200.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	22.842.607.090,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	14.860.180.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		1.817.387.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		13.042.793.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	7.146.230.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32364 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32233 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33108 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				158157 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291216 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				573791 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145041 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				146191 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43933 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3032 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31868 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38063 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		785.328.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		336.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2900 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				52 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		239.295.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				9 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		352.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1100 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		79.299.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				70 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		314.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				38 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				200 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		67.538.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6209 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				405 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		75.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1868 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		46.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	341.196.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				7 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		341.196.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				85 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				28 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				90 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	0,00						-	1.262.258.850,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	329.258.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		209.258.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	153.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				646 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				250 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	0,00						-	470.714.850,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	50.714.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		50.714.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	0,00						-	275.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1100 Keluarga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
		UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
		UPTD PUSKESMAS MEKARSARI						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
		UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
		UPTD PUSKESMAS TUGU						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TUGU
		UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
		UPTD PUSKESMAS TAPOS						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS TAPOS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TAPOS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TAPOS
		UPTD PUSKESMAS CILANGKAP						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
		UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
		UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR
		UPTD PUSKESMAS SUKATANI						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SUKATANI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SUKATANI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SUKATANI
		UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
		UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA						0,00							391.800.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							391.800.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							391.800.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	391.800.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	391.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		391.800.000,00	UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA
		UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA						0,00							71.263.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							71.263.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							71.263.500,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	71.263.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	71.263.500,00	UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.263.500,00	UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA
		UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				17 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
		UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA
		UPTD PUSKESMAS CILODONG						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CILODONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CILODONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CILODONG
		UPTD PUSKESMAS KALIMULYA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KALIMULYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KALIMULYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KALIMULYA
		UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI
		UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
		UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU
		UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
		UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
		UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
		UPTD PUSKESMAS RATU JAYA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS RATU JAYA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS RATU JAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS RATU JAYA
		UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI						0,00							66.028.600,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							66.028.600,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							66.028.600,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	66.028.600,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	66.028.600,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.028.600,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI
		UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA
		UPTD PUSKESMAS TANAH BARU						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0,00								0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0,00								0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS TANAH BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TANAH BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS TANAH BARU
		UPTD PUSKESMAS MAMPANG						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS MAMPANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MAMPANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS MAMPANG
		UPTD PUSKESMAS SAWANGAN						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				26 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
		UPTD PUSKESMAS PENGASINAN						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan Kota Depok, Sawangan, Bedahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
		UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
		UPTD PUSKESMAS KEDAUNG						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS KEDAUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KEDAUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS KEDAUNG
		UPTD PUSKESMAS CINANGKA						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CINANGKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CINANGKA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CINANGKA
		UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
		UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU
		UPTD PUSKESMAS LIMO						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS LIMO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				11 Dokumen	0,00	Kota Depok, Limo, Limo Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Meruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS LIMO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Meruyung Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS LIMO
		UPTD PUSKESMAS CINERE						0,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UPTD PUSKESMAS CINERE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cinere, Gandul Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CINERE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cinere, Gandul Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UPTD PUSKESMAS CINERE
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							0,00						2.665.799.085,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							2.665.799.085,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							2.665.799.085,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	2.665.799.085,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.665.799.085,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.665.799.085,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI							0,00						9.502.785.710,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							9.502.785.710,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							9.502.785.710,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	9.502.785.710,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	8.876.357.050,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.800.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.357.050,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	626.428.660,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		626.428.660,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT						0,00							13.246.989.466,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0,00								13.246.989.466,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0,00								13.246.989.466,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	13.246.989.466,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	6.269.142.766,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		549.142.766,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				16 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.610.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	6.733.098.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.798.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.537.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	195.798.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.798.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	48.948.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.948.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT						0,00							28.103.921.560,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							28.103.921.560,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							28.103.921.560,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	28.103.921.560,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	4.371.629.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				75 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		660.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				9 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		301.629.900,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	23.521.105.520,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.895.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.134.590,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				60 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.352.075.230,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	156.186.140,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		156.186.140,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT
		UPTD PUBLIC SAFETY CENTER 119						0,00							2.503.123.171,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							2.503.123.171,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00							2.503.123.171,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	2.503.123.171,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.503.123.171,00	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER 119
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.503.123.171,00	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER 119
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						49.517.176.050,00							78.939.317.269,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						49.517.176.050,00							78.939.317.269,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						49.517.176.050,00							78.939.317.269,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.480.702.000,00						-	40.123.893.184,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	632.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		319.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		313.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	28.105.000.000,00			-	-	-	-	30.915.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124/12 Orang/bulan	28.105.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.915.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	64.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		64.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	211.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		183.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.830.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.147.019.524,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		395.742.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		257.567.679,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		352.088.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		242.083.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		96.799.698,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		802.737.837,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	943.892.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		503.892.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.285.250.000,00			-	-	-	-	4.008.834.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	635.250.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		698.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	650.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.310.059.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.090.452.000,00			-	-	-	-	1.199.497.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	364.672.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		401.139.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				220 Unit	220.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		242.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	505.780.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		556.358.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	16.920.000.000,00						-	18.374.768.500,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.800.000.000,00			-	-	-	-	17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	16.800.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau														
			Jumlah Danau yang Direvitalisasi				3 Danau	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0.6 KM	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0.5 KM	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				12 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	-	-	-	1.374.768.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.9 KM	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				2 UNIT	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.224.768.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 UNIT	120.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	668.490.050,00						-	349.030.055,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	668.490.050,00			-	-	-	-	349.030.055,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				20 Orang	42.284.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.512.455,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				20 SR	626.206.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		302.517.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				90 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	0,00						-	11.549.416.780,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	11.549.416.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				10 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				513 Rumah Tangga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.549.416.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2800 M	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				21 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	0,00						-	60.500.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	0,00			-	-	-	-	60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	0,00						-	99.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	99.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	1.080.284.000,00						-	2.076.320.400,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.080.284.000,00			-	-	-	-	2.076.320.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				11 KM	45.284.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0 KM	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				22,5 KM	1.035.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.076.320.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				14 Meter	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan														
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				0 Meter	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	206.750.000,00						-	1.052.036.700,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	483.894.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				80 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				80 Orang	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		252.894.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	156.750.000,00			-	-	-	-	249.010.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	156.750.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		249.010.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	319.132.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				20 Badan Usaha	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		319.132.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	160.950.000,00						-	5.254.351.650,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.477.048.705,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.048.705,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				6 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		946.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				0 Publikasi	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				8 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar														
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	160.950.000,00			-	-	-	-	1.982.055.645,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				4 Dokumen	53.650.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		642.055.645,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				80 Layanan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	107.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.355.247.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		585.247.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				4 Kasus	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A						15.325.556.913,00							21.135.939.550,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.325.556.913,00							21.135.939.550,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						15.325.556.913,00							21.135.939.550,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	15.325.556.913,00						-	21.135.939.550,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	15.325.556.913,00			-	-	-	-	21.135.939.550,00	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				19,14 KM	835.144.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.135.939.550,00	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				35 Jembatan	14.490.412.313,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN						10.100.000.000,00							40.833.293.299,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.100.000.000,00							40.833.293.299,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						10.100.000.000,00							40.833.293.299,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.000.000.000,00						-	37.156.965.484,00	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	27.500.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				29 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27.500.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.000.000.000,00			-	-	-	-	9.656.965.484,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	7.000.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.656.965.484,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	3.100.000.000,00						-	3.676.327.815,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	3.100.000.000,00			-	-	-	-	3.676.327.815,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				12,57 KM	3.100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.676.327.815,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU							5.758.200.000,00						481.040.725,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.758.200.000,00							481.040.725,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						5.758.200.000,00							481.040.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	286.000.000,00						-	481.040.725,00	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	195.040.725,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.842.200,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.684.130,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.289.700,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.484.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.769.895,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.970.800,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	286.000.000,00			-	-	-	-	286.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	286.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		286.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	5.472.200.000,00						-	0,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.472.200.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				0 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				4912 Rumah Tangga	2.888.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 Unit	2.584.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						20.498.317.580,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.285.717.580,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						20.285.717.580,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	19.762.347.580,00						-	0,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase adm keuangan tepat waktu	-			100 persen	18.359.607.580,00			-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	18.359.607.580,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	-			100 persen	52.920.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	52.920.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	-			100 persen	255.500.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok (Ibu Hamil, Balita, Anak Usia Sekolah)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	255.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok (Ibu Hamil, Balita, Anak Usia Sekolah)		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	950.000.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	950.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	-			100 persen	144.320.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	144.320.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Aparatur Pemerintah Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	258.120.000,00						-	0,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha tertangani	-			100 persen	258.120.000,00			-	-	Masyarakat Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2 Ha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				2 Ha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				2 Ha	258.120.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				8 Hektar	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				1000 Unit Rumah	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				100 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	265.250.000,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase lingkungan perumahan dengan PSU yang tertangani	-			100 persen	265.250.000,00			-	-	Masyarakat Kota Depok	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				125 Lokasi	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				125 Lokasi	265.250.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						212.600.000,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						212.600.000,00							0,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-			-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	212.600.000,00						-	0,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	212.600.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok (Ibu Hamil, Balita, Anak Usia Sekolah)	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				30 Laporan	212.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok (Ibu Hamil, Balita, Anak Usia Sekolah)		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria														
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.				2 Berita Acara	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA						1.139.150.000,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.139.150.000,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.139.150.000,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	315.000.000,00						-	0,00	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>persentase penyediaan adm umum perkantoran</i>	-			100 persen	15.000.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				21 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				24 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				27 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 persen	300.000.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	824.150.000,00						-	0,00	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>persentase tower rumah susun yang dikelola</i>	-			100 persen	824.150.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				12 Dokumen	824.150.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM						5.148.760.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.148.760.000,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.148.760.000,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	84.760.000,00						-	0,00	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	45.000.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah kondisi baik	-			100 persen	39.760.000,00			-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	39.760.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
2.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	5.064.000.000,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	5.064.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				14 Lokasi	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				14 Lokasi	5.064.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						16.648.542.593,00							17.600.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.648.542.593,00							17.600.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						16.648.542.593,00							17.600.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.648.542.593,00						-	1.700.000.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 %	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangann tepat waktu</i>	-			100 %	16.648.542.593,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	1.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				85/14 Orang/bulan	16.648.542.593,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		1.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				8 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</i>	-			100 %	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</i>	-			100 %	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				199 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dalam pelayanan</i>	-			100 %	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				70 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah kondisi baik	-			100 %	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				214 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	15.900.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	-			100 %	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	15.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		2.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				48 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				102 laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				34 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				244 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		13.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	-			100 %	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				12 laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				16 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				24 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS	-			5 Orang	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						34.662.051.862,00							38.128.257.048,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						34.662.051.862,00							38.128.257.048,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						34.662.051.862,00							38.128.257.048,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	26.793.201.862,00						-	29.472.522.048,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.950.000,00			-	-	-	-	59.345.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	53.950.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.345.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	22.067.274.862,00			-	-	-	-	24.274.002.348,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	22.067.274.862,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.274.002.348,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	53.820.000,00			-	-	-	-	59.202.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				819 Laporan	53.820.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		59.202.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.473.270.000,00			-	-	-	-	1.620.597.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	280.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		308.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.193.270.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.312.597.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.144.887.000,00			-	-	-	-	3.459.375.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	330.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		363.880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	2.745.610.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		3.020.171.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	68.477.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.324.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	1.006.400.000,00						-	1.107.040.000,00	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	1.006.400.000,00			-	-	-	-	1.107.040.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	1.006.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.107.040.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	6.862.450.000,00						-	7.548.695.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.862.450.000,00			-	-	-	-	7.548.695.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	6.862.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.548.695.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI						100.000.000,00							110.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							110.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						100.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	100.000.000,00						-	110.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIPAYUNG							85.000.000,00						93.500.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.000.000,00							93.500.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						85.000.000,00							93.500.000,00		
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	85.000.000,00						-	93.500.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	85.000.000,00			-	-	-	-	93.500.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIPAYUNG	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	85.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.500.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIPAYUNG	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIMANGGIS							89.000.000,00						97.900.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						89.000.000,00							97.900.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						89.000.000,00							97.900.000,00	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	89.000.000,00						-	97.900.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	89.000.000,00			-	-	-	-	97.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIMANGGIS
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	89.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		97.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIMANGGIS
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CINERE						99.000.000,00							108.900.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						99.000.000,00							108.900.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						99.000.000,00							108.900.000,00	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	99.000.000,00						-	108.900.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	99.000.000,00			-	-	-	-	108.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CINERE
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	99.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		108.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CINERE
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN TAPOS						99.000.000,00							108.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						99.000.000,00							108.900.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						99.000.000,00							108.900.000,00	
1.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	99.000.000,00						-	108.900.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	99.000.000,00			-	-	-	-	108.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN TAPOS
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	99.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		108.900.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN TAPOS
		DINAS SOSIAL						14.918.639.690,00							18.856.762.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.918.639.690,00							18.856.762.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						14.918.639.690,00							18.856.762.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.706.038.390,00						-	12.324.362.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	94.658.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.658.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.704.019.390,00			-	-	-	-	9.954.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	9.704.019.390,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.939.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	83.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	836.219.000,00			-	-	-	-	943.164.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	85.585.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	44.560.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44.560.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7960 Paket	282.470.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		295.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	91.804.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.804.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				875 Laporan	315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	165.800.000,00			-	-	-	-	249.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		41.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	150.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		175.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.540.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	1.761.900.000,00						-	3.672.500.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.761.900.000,00			-	-	-	-	3.660.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	86.700.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi				63 Lembaga	1.434.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				186 Orang	240.750.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		195.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				186 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.243.061.000,00						-	922.480.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	1.141.371.000,00			-	-	-	-	583.190.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	165.952.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	59.969.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	252.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		265.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	65.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		46.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	39.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		81.790.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	558.950.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	101.690.000,00			-	-	-	-	339.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	49.650.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.650.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	28.120.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.560.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	23.920.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				10 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	673.728.300,00						-	663.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	673.728.300,00			-	-	-	-	663.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				92258 Orang	432.228.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				2500 Usulan	241.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		268.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	326.552.000,00						-	972.760.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		425.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	326.552.000,00			-	-	-	-	422.760.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	326.552.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		422.760.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	207.360.000,00						-	301.660.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	207.360.000,00			-	-	-	-	301.660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				82 Makam	130.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	77.360.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.660.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						10.115.026.507,00							11.265.126.507,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.065.026.507,00							11.205.126.507,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						10.065.026.507,00							11.205.126.507,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.889.976.507,00						-	11.000.076.507,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.713.336.507,00			-	-	-	-	10.713.336.507,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	9.713.336.507,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.713.336.507,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	120.120.000,00			-	-	-	-	220.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	120.120.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.520.000,00			-	-	-	-	66.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	56.520.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	76.300.000,00						-	86.300.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	76.300.000,00			-	-	-	-	86.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				1 Orang	76.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	53.000.000,00						-	63.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	53.000.000,00			-	-	-	-	63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 Orang	53.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	45.750.000,00						-	55.750.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.750.000,00			-	-	-	-	55.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	45.750.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	X	NON URUSAN						50.000.000,00							60.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						50.000.000,00							60.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							13.083.573.797,00						160.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.083.573.797,00							160.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12.668.173.797,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	12.346.783.797,00						-	0,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.165.843.797,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	12.165.843.797,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.620.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				318 Laporan	52.620.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	128.320.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	118.480.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	9.840.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				50 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan</i>				78 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Pemerintah , Masyarakat	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota														
			<i>Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota</i>				500 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Pemerintah , Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	311.390.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	40.560.000,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	40.560.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	270.830.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				0 Lembaga	270.830.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				8 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				0 Dokumen	10.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						415.400.000,00							60.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	45.450.000,00						-	0,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.450.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	45.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	226.600.000,00						-	0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	46.050.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	46.050.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	180.550.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				110 Orang	180.550.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-			-	143.350.000,00						-	60.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	100.900.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	50.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				0 Kelompok	50.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	42.450.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				3 Laporan	42.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						379.520.000,00							400.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						379.520.000,00							400.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						379.520.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				80 orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	379.520.000,00						-	400.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	379.520.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang	379.520.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				120 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		400.000.000,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							16.600.929.518,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.446.189.018,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						16.446.189.018,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	16.446.189.018,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.993.248.027,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	15.993.248.027,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.720.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	52.720.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.220.991,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	9.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	389.420.991,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						154.740.500,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						0,00							0,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						154.740.500,00							0,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	154.740.500,00						-	0,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	154.740.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	154.740.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN							154.560.800,00						0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						154.560.800,00							0,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						154.560.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	154.560.800,00						-	0,00		
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	154.560.800,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				2 Laporan	154.560.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN							1.686.959.500,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.686.959.500,00							0,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.686.959.500,00							0,00		
1.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	1.686.959.500,00						-	0,00		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.686.959.500,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan															
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.686.959.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN							472.450.000,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						472.450.000,00							0,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						472.450.000,00							0,00		
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	472.450.000,00						-	0,00		
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	472.450.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	472.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN							0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0,00							0,00		
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	0,00						-	0,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota															
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				110 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR							0,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0,00							0,00		
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional															
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				212.840 Ton	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN							0,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00		-	-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan														
			Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				13 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				3 Kegiatan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				23,04 Ha	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota														
			<i>jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan</i>				1 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				25 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				200 Badan Usaha	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>				950 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				10 Pengaduan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Sanksi	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				295 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				212.840 Ton	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				21.700 Ton	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						0,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						0,00							0,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				0.42 Ha	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	3.28.04.2.01.0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA						0,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				23,04 Ha	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						0,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						0,00							0,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				0,175 Ha	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA
	3.28.04.2.01.0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							18.662.351.897,00						22.812.738.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.662.351.897,00							22.812.738.400,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						18.662.351.897,00							22.812.738.400,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.015.651.897,00						-	19.567.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	97.400.000,00			-	-	-	-	107.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	97.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.752.431.897,00			-	-	-	-	19.460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	17.700.081.897,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.460.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				18 Laporan	52.350.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.620.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	51.620.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.200.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				84 Unit	37.700.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	32.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	19.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	25.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	0,00						-	1.147.300.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	1.147.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				8 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		1.147.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	0,00						-	849.310.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	849.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil</i>				5 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		849.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	646.700.000,00						-	1.248.988.400,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	302.100.000,00			-	-	-	-	790.064.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>				2 Dokumen	302.100.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		790.064.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	146.400.000,00			-	-	-	-	188.009.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	146.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		188.009.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	198.200.000,00			-	-	-	-	270.915.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	93.700.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.965.150,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	104.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		114.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	-	-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						12.838.260.000,00							24.803.987.686,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.838.260.000,00							24.803.987.686,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						12.838.260.000,00							24.803.987.686,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	782.060.000,00						-	24.803.987.686,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	24.803.987.686,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/bulan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.803.987.686,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.520.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.520.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	730.540.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	730.540.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	12.056.200.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	850.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	850.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	11.033.400.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	11.033.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	172.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Unit	172.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL						3.507.250.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.507.250.000,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3.507.250.000,00							0,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	3.507.250.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	3.507.250.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	3.507.250.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM						1.200.000.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.200.000.000,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						1.200.000.000,00							0,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.200.000.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				600 Unit	700.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5800 Unit	500.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR						66.450.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						66.450.000,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						66.450.000,00							0,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	66.450.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	66.450.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	66.450.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						23.335.031.236,00							25.589.357.199,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.335.031.236,00							25.589.357.199,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						22.776.960.586,00							23.915.808.616,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Diskominfo	-			78.92 Nilai	14.607.004.710,00						-	15.337.354.946,00	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	-			100 %	14.069.868.710,00			-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	-	14.773.362.146,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	14.069.868.710,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		14.773.362.146,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</i>	-			100 %	402.585.000,00			-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	-	422.714.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	402.585.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		422.714.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	-			100 %	134.551.000,00			-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	-	141.278.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				11 Unit	91.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		96.390.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				36 Unit	42.751.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		44.888.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah</i>	-			84 %	3.417.847.450,00						-	3.588.739.823,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase layanan informasi publik yang tersedia</i>	-			100 %	3.417.847.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	3.588.739.823,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>				1 Permohonan	142.070.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		149.173.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				1 Rekomendasi	227.992.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		239.391.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			<i>Persentase khalayak yang terpapar informasi publik</i>				50 Persentase	2.001.645.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		2.101.727.355,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				130 Media	712.394.350,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		748.014.068,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				48 Konten	333.746.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		350.433.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek Teknologi Digital / Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	-			1.8 Nilai	4.752.108.426,00						-	4.989.713.847,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan tersedia	-			100 %	274.621.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	288.352.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	274.621.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		288.352.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terlayani dalam bidang TIK	-			100 %	4.477.487.426,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	4.701.361.797,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				37 Perangkat Daerah	1.301.701.700,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		1.366.786.785,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	878.806.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		922.746.720,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				37 Perangkat Daerah	2.050.324.326,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		2.152.840.542,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	246.655.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		258.987.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						0,00							1.087.574.400,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	-			3.4 Nilai Index	0,00						-	1.087.574.400,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang tersedia	-			92 %	0,00			-	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok	-	1.087.574.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				30 %	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				30 %	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				30 %	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		1.043.574.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						558.070.650,00							585.974.183,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	-			59 %	558.070.650,00						-	585.974.183,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang diamankan	-			76 %	558.070.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kota Depok	-	585.974.183,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				37 Perangkat Daerah	358.070.750,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kota Depok		375.974.288,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	199.999.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kota Depok		209.999.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						9.700.073.499,00							11.335.045.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.700.073.499,00							11.335.045.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.700.073.499,00							11.335.045.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.811.548.499,00						-	10.340.000.000,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.176.548.499,00			-	-	-	-	9.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	8.176.548.499,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		9.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	515.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		165.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	235.000.000,00			-	-	-	-	325.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	110.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		140.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	99.450.000,00						-	150.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	99.450.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				211 Unit Usaha	99.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	85.800.000,00						-	0,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	85.800.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				110 Unit Usaha	85.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-			-	42.900.000,00						-	45.045.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	42.900.000,00			-	-	-	-	45.045.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				211 Orang	42.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.045.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	313.950.000,00						-	350.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	313.950.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				211 Unit Usaha	313.950.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	346.425.000,00						-	450.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	346.425.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	346.425.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						17.965.168.050,00							4.702.080.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.719.120.000,00							4.702.080.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						1.719.120.000,00							4.702.080.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	-			100 %	190.320.000,00						-	1.283.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	-			100 %	47.320.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.038.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		325.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		176.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				373 Laporan	47.320.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		212.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 %	143.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	108.350.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	34.650.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	-			100 %	0,00						-	795.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal</i>	-			100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	495.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		275.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah investor PMDN</i>	-			20 Investor	0,00						-	160.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah event</i>	-			1 Event	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi	-			100 %	0,00						-	605.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan	-			100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	605.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				14000 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				120 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	-			100 %	0,00						-	165.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian penanaman modal	-			100 %	0,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				12 Kegiatan Usaha.	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				45 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pelayanan data dan sistem	-			100 %	1.528.800.000,00						-	1.694.080.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	-			1 Dokumen	1.528.800.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.694.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				14000 Dokumen	1.528.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.694.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						16.246.048.050,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.246.048.050,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	-			100 %	16.246.048.050,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.246.048.050,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparataur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	16.246.048.050,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Aparatur Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						9.747.423.470,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.696.073.470,00							0,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						9.551.773.470,00							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.752.233.470,00						-	0,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	44.850.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	44.850.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.127.238.470,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	8.127.238.470,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.220.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	51.220.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	450.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.925.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	64.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	14.925.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	146.100.000,00						-	0,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	146.100.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	94.750.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				210 Orang	51.350.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	653.440.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	653.440.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Unit	653.440.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						144.300.000,00							0,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	144.300.000,00						-	0,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	144.300.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	144.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplaitatif	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplaitatif	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						51.350.000,00							0,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						51.350.000,00							0,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	51.350.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	51.350.000,00			-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	51.350.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	0,00			-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				0 Lembaga	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						13.432.988.215,00							13.054.198.955,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.432.988.215,00								13.054.198.955,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					951.898.000,00								1.206.560.900,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-		-	951.898.000,00							-	1.206.560.900,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	540.968.000,00				-	-	-	-	679.865.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustaka an	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.779.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				3000 Eksemplar	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	540.968.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		636.586.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	410.930.000,00			-	-	-	-	526.695.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				5 Perpustaka an	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				450 Lokus	410.930.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		526.695.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	0,00						-	0,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				2 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				0 Eksemplar	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						12.481.090.215,00							11.847.638.055,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.916.920.215,00						-	11.264.265.155,00	
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.200.000.000,00			-	-	-	-	10.120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				44 Orang/bulan	9.200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	530.108.215,00			-	-	-	-	748.245.355,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	42.241.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.738.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	50.259.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		142.613.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	60.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.593.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				11 Paket	100.008.265,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.358.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	27.599.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.358.955,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				350 Laporan	250.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		305.582.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.812.000,00			-	-	-	-	396.019.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		137.698.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	35.912.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.799.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		203.522.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	2.564.170.000,00						-	583.372.900,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.152.720.000,00			-	-	-	-	60.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				84 Berkas	2.152.720.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	206.900.000,00			-	-	-	-	262.111.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				60 Arsip	206.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		262.111.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	204.550.000,00			-	-	-	-	260.761.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				250 Pengguna	204.550.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		260.761.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						25.794.054.952,00							26.574.584.558,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						25.794.054.952,00							26.574.584.558,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						25.794.054.952,00							26.574.584.558,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.127.600.000,00						-	19.033.980.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.950.000.000,00			-	-	-	-	18.847.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	17.950.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.847.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	177.600.000,00			-	-	-	-	186.480.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	177.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.480.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik</i>				10 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	7.329.204.952,00						-	7.186.492.058,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	7.254.268.150,00			-	-	-	-	7.186.492.058,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				5 Unit	409.990.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				5 Unit	6.844.278.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.186.492.058,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	74.936.802,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	74.936.802,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				16 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				56 Produk	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				506 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-			-	337.250.000,00						-	354.112.500,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	337.250.000,00			-	-	-	-	354.112.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				6 UMKM	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				50 UMKM	337.250.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		354.112.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	0,00						-	0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL							441.866.900,00						463.960.245,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						441.866.900,00							463.960.245,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						441.866.900,00							463.960.245,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	441.866.900,00						-	463.960.245,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	441.866.900,00			-	-	-	-	463.960.245,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				6046 Unit	441.866.900,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		463.960.245,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR CISALAK							593.624.000,00					0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						593.624.000,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						593.624.000,00							0,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	593.624.000,00						-	0,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	593.624.000,00			-	-	-	-	0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR CISALAK
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	593.624.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR CISALAK
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TUGU							53.446.000,00					119.458.290,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						53.446.000,00							119.458.290,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						53.446.000,00							119.458.290,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	53.446.000,00						-	119.458.290,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	53.446.000,00			-	-	-	-	119.458.290,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TUGU
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	53.446.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.458.290,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TUGU
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR AGUNG							142.529.000,00					226.744.350,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						142.529.000,00							226.744.350,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						142.529.000,00							226.744.350,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	142.529.000,00						-	226.744.350,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	142.529.000,00			-	-	-	-	226.744.350,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR AGUNG
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	142.529.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.744.350,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR AGUNG
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SUKATANI						76.034.000,00							151.933.373,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						76.034.000,00							151.933.373,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						76.034.000,00							151.933.373,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	76.034.000,00						-	151.933.373,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	76.034.000,00			-	-	-	-	151.933.373,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SUKATANI
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	76.034.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		151.933.373,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SUKATANI
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KEMIRI MUKA						110.582.000,00							289.267.545,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						110.582.000,00							289.267.545,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						110.582.000,00							289.267.545,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	110.582.000,00						-	289.267.545,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	110.582.000,00			-	-	-	-	289.267.545,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KEMIRI MUKA
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	110.582.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		289.267.545,00	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KEMIRI MUKA
		SEKRETARIAT DAERAH						76.545.937.329,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						76.545.937.329,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						76.545.937.329,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	76.545.937.329,00						-	0,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	51.066.512.211,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	51.066.512.211,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	384.482.135,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	384.482.135,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.270.746.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.240.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.030.746.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	218.080.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	218.080.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				102 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				696 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	3.109.316.983,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.187.604.538,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.921.712.445,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	496.800.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	248.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	248.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	0,00						-	0,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Kasus	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						115.831.206.518,00							100.000.050,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						115.831.206.518,00							100.000.050,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						115.831.206.518,00							100.000.050,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	83.517.538.068,00						-	0,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.603.632.900,00			-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	400.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	225.059.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	277.899.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	300.673.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	400.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sekretariat DPRD Kota Depok		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.896.772.124,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	10.355.372.174,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	151.399.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	390.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	749.998.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	149.998.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	500.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.990.063.244,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	249.996.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1.213.339.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	806.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	900.727.644,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	500.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	20.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	8.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1.300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	6.900.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.800.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	700.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	54.081.071.700,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/Bulan	53.481.071.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				0 Paket	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				0 Orang	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	896.000.100,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0 Dokumen	200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				0 Laporan	96.000.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0 Laporan	600.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-			-	32.313.668.450,00						-	100.000.050,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	1.108.512.050,00			-	-	-	-	100.000.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen	100.000.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	688.512.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				0 Dokumen	19.999.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0 Dokumen	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				0 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	3.620.000.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				0 Dokumen	1.030.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0 Dokumen	1.030.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				0 Dokumen	530.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				0 Dokumen	530.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				0 Dokumen	230.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0 Dokumen	270.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	3.685.875.000,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				0 Laporan	800.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0 Laporan	700.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0 Laporan	700.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	700.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				0 Dokumen	35.875.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0 Dokumen	750.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	2.714.774.900,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				0 Dokumen	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0 Orang	1.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				0 Orang	597.799.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0 Dokumen	20.000.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				0 Dokumen	496.975.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				0 Dokumen	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	4.299.999.800,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				0 Laporan	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				0 Dokumen	99.999.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				0 Dokumen	4.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				0 Orang	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	674.943.100,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				0 Dokumen	224.943.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				0 Laporan	450.000.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	16.209.563.600,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				0 Laporan	1.062.030.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0 Dokumen	2.147.533.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0 Dokumen	11.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH						13.978.901.767,00							15.885.935.324,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.948.901.767,00							15.847.935.324,00	
	5.01	PERENCANAAN						13.846.201.767,00							15.737.935.324,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.642.851.767,00						-	14.802.935.324,00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.413.361.767,00			-	-	-	-	13.777.935.324,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	13.413.361.767,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.777.935.324,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	105.570.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	105.570.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.920.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	123.920.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	103.900.000,00						-	670.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		410.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-			100 %	103.900.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN	-	260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	103.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	ASN		260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	99.450.000,00						-	265.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	49.900.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	49.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	49.550.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	49.550.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						102.700.000,00							110.000.000,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	102.700.000,00						-	110.000.000,00		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	102.700.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	102.700.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	X	NON URUSAN						30.000.000,00							38.000.000,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30.000.000,00							38.000.000,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.000.000,00						-	38.000.000,00		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	-	-	-	38.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		38.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAERAH							91.721.103.911,00							93.873.301.731,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						91.721.103.911,00							93.873.301.731,00		
	5.02	KEUANGAN						91.721.103.911,00							93.873.301.731,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	91.721.103.911,00						-	93.873.301.731,00		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	89.745.728.811,00			-	-	-	-	91.745.728.811,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/bulan	89.745.728.811,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		91.745.728.811,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.471.715.100,00			-	-	-	-	1.579.754.720,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	324.775.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.076.750,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	529.664.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.664.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	617.276.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		679.013.720,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	503.660.000,00			-	-	-	-	547.818.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	246.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		269.805.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	257.160.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		278.013.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						25.942.353.399,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						25.942.353.399,00							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						25.942.353.399,00							0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	25.720.783.399,00						-	0,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	25.490.418.399,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	25.490.418.399,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	54.365.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	54.365.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	176.000.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	140.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	36.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	221.570.000,00						-	0,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				75 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				14 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	221.570.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	221.570.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				442 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				55 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						0,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				600 Orang	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						21.477.977.692,00							0,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						21.477.977.692,00							0,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						21.477.977.692,00							0,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.175.054.942,00						-	0,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	182.434.450,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	49.448.450,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	32.780.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37 Laporan	100.206.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.490.671.092,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	14.490.671.092,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.213.741.200,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	1.213.741.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.045.792.200,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.873.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	379.122.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	49.894.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	157.698.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	32.477.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	414.727.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.416.000,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	164.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	78.016.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	2.908.084.750,00						-	0,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	2.726.902.750,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	180.960.750,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				37 Laporan	1.785.844.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				9 Laporan	291.244.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	146.215.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				37 Dokumen	322.639.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	181.182.000,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				7 Laporan	181.182.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	1.394.838.000,00						-	0,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	1.394.838.000,00			-	-	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 perangkat daerah	337.834.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 perangkat daerah	466.030.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	590.974.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN PANCORAN MAS						15.156.176.982,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						15.156.176.982,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						15.156.176.982,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.156.176.982,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.156.176.982,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	15.156.176.982,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
		KELURAHAN MAMPANG						4.800.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.800.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.800.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.800.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.800.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MAMPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.520.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MAMPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2.280.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MAMPANG
		KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU						4.500.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.500.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.500.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.500.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1.450.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	3.050.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU
		KELURAHAN DEPOK						6.900.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6.900.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						6.900.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.900.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	6.900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN DEPOK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.635.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN DEPOK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	4.265.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN DEPOK
		KELURAHAN DEPOK JAYA						4.200.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.200.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.200.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.200.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.200.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN DEPOK JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1.640.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN DEPOK JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	2.560.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN DEPOK JAYA
		KELURAHAN RANGKAPAN JAYA						5.700.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.700.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						5.700.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.700.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.700.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3.200.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	2.500.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA
		KELURAHAN PANCORAN MAS						6.300.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6.300.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						6.300.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.300.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	6.300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	4.550.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	1.750.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANCORAN MAS
		KECAMATAN CILODONG						11.639.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.639.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						11.639.000.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.639.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			53 Orang/bulan	11.639.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Cilodong	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	11.639.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Cilodong		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Kecamatan Cilodong		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			12 Paket	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			12 undefined	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Kecamatan Cilodong	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	ASN Kecamatan Cilodong		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Ber orientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	ASN Kecamatan Cilodong		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			11 Unit	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				55 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-	-	0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN CILODONG
		KELURAHAN CILODONG						0,00							2.639.276.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							2.639.276.200,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							2.639.276.200,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	2.639.276.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.639.276.200,00	KELURAHAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.331.276.200,00	KELURAHAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		308.000.000,00	KELURAHAN CILODONG
		KELURAHAN KALIMULYA						108.000.000,00							3.628.837.300,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						108.000.000,00							3.628.837.300,00	
	7.01	KECAMATAN						108.000.000,00							3.628.837.300,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	108.000.000,00						-	3.628.837.300,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	108.000.000,00			-	-	-	-	3.628.837.300,00	KELURAHAN KALIMULYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.117.522.100,00	KELURAHAN KALIMULYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	108.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		511.315.200,00	KELURAHAN KALIMULYA
		KELURAHAN SUKAMAJU						8.995.856.000,00							9.895.441.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						8.995.856.000,00							9.895.441.600,00	
	7.01	KECAMATAN						8.995.856.000,00							9.895.441.600,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	8.995.856.000,00						-	9.895.441.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	8.995.856.000,00			-	-	-	-	9.895.441.600,00	KELURAHAN SUKAMAJU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	7.875.392.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.662.931.200,00	KELURAHAN SUKAMAJU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	1.120.464.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.232.510.400,00	KELURAHAN SUKAMAJU
		KELURAHAN KALIBARU						3.298.572.000,00							3.628.429.200,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.298.572.000,00							3.628.429.200,00	
	7.01	KECAMATAN						3.298.572.000,00							3.628.429.200,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.298.572.000,00						-	3.628.429.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.298.572.000,00			-	-	-	-	3.628.429.200,00	KELURAHAN KALIBARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.802.140.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.082.354.000,00	KELURAHAN KALIBARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	496.432.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		546.075.200,00	KELURAHAN KALIBARU
		KELURAHAN JATIMULYA						2.698.751.000,00							2.968.626.100,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.698.751.000,00							2.968.626.100,00	
	7.01	KECAMATAN						2.698.751.000,00							2.968.626.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.698.751.000,00						-	2.968.626.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.698.751.000,00			-	-	-	-	2.968.626.100,00	KELURAHAN JATIMULYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.302.919.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.533.210.900,00	KELURAHAN JATIMULYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	395.832.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		435.415.200,00	KELURAHAN JATIMULYA
		KECAMATAN SAWANGAN						16.302.882.130,00							17.118.026.237,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						16.102.882.130,00							16.908.026.237,00	
	7.01	KECAMATAN						16.102.882.130,00							16.908.026.237,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.859.582.130,00						-	16.652.561.237,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.434.102.130,00			-	-	-	-	16.205.807.237,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	15.434.102.130,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.205.807.237,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.120.000,00			-	-	-	-	54.726.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	52.120.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.726.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	249.020.000,00			-	-	-	-	261.471.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	249.020.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		261.471.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	124.340.000,00			-	-	-	-	130.557.000,00	KECAMATAN SAWANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	53.120.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.776.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	17.820.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.711.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	53.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		56.070.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	243.300.000,00						-	255.465.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	243.300.000,00			-	-	-	-	255.465.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	243.300.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.465.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	X	NON URUSAN						200.000.000,00							210.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						200.000.000,00							210.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	200.000.000,00						-	210.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
		KELURAHAN SAWANGAN						3.295.910.000,00							3.625.501.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.295.910.000,00							3.625.501.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.295.910.000,00							3.625.501.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.295.910.000,00						-	3.625.501.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.295.910.000,00			-	-	-	-	3.625.501.000,00	KELURAHAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	2.840.740.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.124.814.000,00	KELURAHAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	455.170.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.687.000,00	KELURAHAN SAWANGAN
		KELURAHAN BEDAHAN						4.791.431.000,00							5.270.574.100,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.791.431.000,00							5.270.574.100,00	
	7.01	KECAMATAN						4.791.431.000,00							5.270.574.100,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.791.431.000,00						-	5.270.574.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.791.431.000,00			-	-	-	-	5.270.574.100,00	KELURAHAN BEDAHAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	4.188.967.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.607.863.700,00	KELURAHAN BEDAHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	602.464.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		662.710.400,00	KELURAHAN BEDAHAN
		KELURAHAN KEDAUNG						3.296.646.000,00							3.626.310.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.296.646.000,00							3.626.310.600,00	
	7.01	KECAMATAN						3.296.646.000,00							3.626.310.600,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.296.646.000,00						-	3.626.310.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.296.646.000,00			-	-	-	-	3.626.310.600,00	KELURAHAN KEDAUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	2.868.982.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.155.880.200,00	KELURAHAN KEDAUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	427.664.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		470.430.400,00	KELURAHAN KEDAUNG
		KELURAHAN PASIR PUTIH						3.513.002.000,00							3.688.652.100,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.513.002.000,00							3.688.652.100,00	
	7.01	KECAMATAN						3.513.002.000,00							3.688.652.100,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.513.002.000,00						-	3.688.652.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.513.002.000,00			-	-	-	-	3.688.652.100,00	KELURAHAN PASIR PUTIH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	3.061.402.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.214.472.100,00	KELURAHAN PASIR PUTIH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	451.600.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		474.180.000,00	KELURAHAN PASIR PUTIH
		KELURAHAN SAWANGAN BARU						2.998.003.600,00							3.297.803.960,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.998.003.600,00							3.297.803.960,00	
	7.01	KECAMATAN						2.998.003.600,00							3.297.803.960,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.998.003.600,00						-	3.297.803.960,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.998.003.600,00			-	-	-	-	3.297.803.960,00	KELURAHAN SAWANGAN BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	2.544.403.600,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.798.843.960,00	KELURAHAN SAWANGAN BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	453.600.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		498.960.000,00	KELURAHAN SAWANGAN BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN CINANGKA						3.598.704.000,00							3.998.874.400,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.598.704.000,00							3.998.874.400,00	
	7.01	KECAMATAN						3.598.704.000,00							3.998.874.400,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.598.704.000,00						-	3.998.874.400,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.598.704.000,00			-	-	-	-	3.998.874.400,00	KELURAHAN CINANGKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	3.195.704.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.555.574.400,00	KELURAHAN CINANGKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	403.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		443.300.000,00	KELURAHAN CINANGKA
		KELURAHAN PENGASINAN						4.198.156.000,00							4.617.971.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.198.156.000,00							4.617.971.600,00	
	7.01	KECAMATAN						4.198.156.000,00							4.617.971.600,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.198.156.000,00						-	4.617.971.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.198.156.000,00			-	-	-	-	4.617.971.600,00	KELURAHAN PENGASINAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	3.668.124.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		4.034.936.400,00	KELURAHAN PENGASINAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	530.032.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		583.035.200,00	KELURAHAN PENGASINAN
		KECAMATAN CINERE						11.704.236.116,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.704.236.116,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						11.704.236.116,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.672.554.116,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				17 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.766.406.116,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/bulan	10.766.406.116,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	90.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	90.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	554.088.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	228.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	326.088.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.060.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	46.960.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	15.100.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	31.682.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	31.682.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	31.682.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CINERE
		KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU						1.799.531.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.799.531.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.799.531.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.799.531.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.799.531.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				60 Unit	1.536.099.000,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	263.432.000,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU
		KELURAHAN PANGKALAN JATI						2.099.077.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.099.077.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.099.077.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.099.077.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.099.077.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				96 Unit	1.842.077.000,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	257.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PANGKALAN JATI
		KELURAHAN CINERE						5.681.185.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.681.185.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						5.681.185.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.681.185.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.681.185.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3.477.158.000,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CINERE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2.204.027.000,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CINERE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN GANDUL						2.977.442.500,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.977.442.500,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.977.442.500,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.977.442.500,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.977.442.500,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN GANDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	2.574.842.500,00	Kota Depok, Cinere, Gandul	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		0,00	KELURAHAN GANDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	402.600.000,00	Kota Depok, Cinere, Gandul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN GANDUL
		KECAMATAN SUKMAJAYA						14.232.182.422,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.232.182.422,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						14.232.182.422,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.232.182.422,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	74.666.800,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	59.666.800,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	15.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.919.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	12.900.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	19.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	171.105.622,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.432.422,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	15.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	60.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.673.200,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	50.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.023.410.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	144.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	879.410.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	20.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	12.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
		KELURAHAN MEKARJAYA						9.300.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						9.300.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						9.300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	9.300.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	9.300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	8.066.848.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MEKARJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	1.233.152.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MEKARJAYA
		KELURAHAN CISALAK						3.900.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.900.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.900.000.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.900.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.900.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CISALAK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	3.300.640.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CISALAK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	599.360.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CISALAK
		KELURAHAN ABADIJAYA						8.689.567.000,00							8.689.567.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						8.689.567.000,00							8.689.567.000,00	
	7.01	KECAMATAN						8.689.567.000,00							8.689.567.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	8.689.567.000,00						-	8.689.567.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	8.689.567.000,00			-	-	-	-	8.689.567.000,00	KELURAHAN ABADIJAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				58 Unit	7.473.151.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.473.151.000,00	KELURAHAN ABADIJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				29 Pokmas / Ormas	1.216.416.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		1.216.416.000,00	KELURAHAN ABADIJAYA
		KELURAHAN TIRTAJAYA						584.876.000,00							2.992.916.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						584.876.000,00							2.992.916.000,00	
	7.01	KECAMATAN						584.876.000,00							2.992.916.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	584.876.000,00						-	2.992.916.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	584.876.000,00			-	-	-	-	2.992.916.000,00	KELURAHAN TIRTAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	208.876.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.611.484.000,00	KELURAHAN TIRTAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	376.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		381.432.000,00	KELURAHAN TIRTAJAYA
		KELURAHAN SUKMAJAYA						3.895.911.000,00							3.895.911.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.895.911.000,00							3.895.911.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.895.911.000,00							3.895.911.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.895.911.000,00						-	3.895.911.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.895.911.000,00			-	-	-	-	3.895.911.000,00	KELURAHAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	3.380.911.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.380.911.000,00	KELURAHAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	515.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		515.000.000,00	KELURAHAN SUKMAJAYA
		KELURAHAN BAKTIJAYA						8.683.156.000,00							8.693.156.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						8.683.156.000,00							8.693.156.000,00	
	7.01	KECAMATAN						8.683.156.000,00							8.693.156.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	8.683.156.000,00						-	8.693.156.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	8.683.156.000,00			-	-	-	-	8.693.156.000,00	KELURAHAN BAKTIJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1319 Unit	7.658.660.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		7.658.660.000,00	KELURAHAN BAKTIJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1.024.496.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.034.496.000,00	KELURAHAN BAKTIJAYA
		KECAMATAN LIMO						11.001.843.877,00							11.275.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.001.843.877,00							11.275.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						11.001.843.877,00							11.275.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.671.283.445,00						-	10.875.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.556.303.445,00			-	-	-	-	9.700.000.000,00	KECAMATAN LIMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	9.556.303.445,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.700.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.220.000,00			-	-	-	-	155.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	140.220.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		155.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	818.810.000,00			-	-	-	-	845.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110.000.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	708.810.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		715.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	155.950.000,00			-	-	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	74.080.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	31.870.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	50.000.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN LIMO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	330.560.432,00						-	400.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19 Laporan	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	330.560.432,00			-	-	-	-	400.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	330.560.432,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	KECAMATAN LIMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LIMO
		KELURAHAN LIMO						4.797.714.000,00							4.850.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.797.714.000,00							4.850.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.797.714.000,00							4.850.000.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.797.714.000,00						-	4.850.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.797.714.000,00			-	-	-	-	4.850.000.000,00	KELURAHAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	4.177.818.000,00	Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.200.000.000,00	KELURAHAN LIMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Pokmas / Ormas	619.896.000,00	Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		650.000.000,00	KELURAHAN LIMO
		KELURAHAN GROGOL						3.899.054.500,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.899.054.500,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.899.054.500,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.899.054.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.899.054.500,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN GROGOL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				103 Unit	3.344.190.500,00	Kota Depok, Limo, Grogol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN GROGOL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				58 Pokmas / Ormas	554.864.000,00	Kota Depok, Limo, Grogol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN GROGOL
		KELURAHAN KRUKUT						2.398.337.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.398.337.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.398.337.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.398.337.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.398.337.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KRUKUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	2.074.441.000,00	Kota Depok, Limo, Krukut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KRUKUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	323.896.000,00	Kota Depok, Limo, Krukut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KRUKUT
		KELURAHAN MERUYUNG						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MERUYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	0,00	Kota Depok, Limo, Meruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MERUYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Limo, Meruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MERUYUNG
		KECAMATAN BEJI						14.456.000.000,00							26.982.126.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.456.000.000,00							26.982.126.500,00	
	7.01	KECAMATAN						14.456.000.000,00							26.982.126.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	-			100 % 100 %	14.456.000.000,00						-	15.570.331.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Pendukung SAKIP	-			100 %	8.000.000,00			-	-	ASN	-	66.614.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN		58.564.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	8.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		8.050.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann Tepat Waktu	-			100 %	13.508.000.000,00			-	-	ASN	-	14.009.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	13.500.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		14.000.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	8.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN		9.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	699.917.500,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		17.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		24.900.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		116.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		65.800.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				540 Laporan	210.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		256.217.500,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.000.000,00			-	-	-	-	449.800.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	150.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	270.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		289.800.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	310.000.000,00			-	-	-	-	345.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	85.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	25.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN BEJI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	11.180.295.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	256.245.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		256.245.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.440.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.440.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	9.484.050.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		9.484.050.000,00	KECAMATAN BEJI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	231.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	195.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		105.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	36.500.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		36.500.000,00	KECAMATAN BEJI
		KELURAHAN KUKUSAN						2.398.346.170,00							2.399.946.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.398.346.170,00							2.399.946.170,00	
	7.01	KECAMATAN						2.398.346.170,00							2.399.946.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.398.346.170,00						-	2.399.946.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.398.346.170,00			-	-	-	-	2.399.946.170,00	KELURAHAN KUKUSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2.043.514.170,00	Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.058.514.170,00	KELURAHAN KUKUSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	354.832.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		341.432.000,00	KELURAHAN KUKUSAN
		KELURAHAN TANAH BARU						4.198.059.250,00							4.198.059.250,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.198.059.250,00							4.198.059.250,00	
	7.01	KECAMATAN						4.198.059.250,00							4.198.059.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.198.059.250,00						-	4.198.059.250,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.198.059.250,00			-	-	-	-	4.198.059.250,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	3.667.059.250,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.667.059.250,00	KELURAHAN TANAH BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	531.000.000,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		531.000.000,00	KELURAHAN TANAH BARU
		KELURAHAN KEMIRI MUKA						5.995.501.100,00							5.995.501.100,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.995.501.100,00							5.995.501.100,00	
	7.01	KECAMATAN						5.995.501.100,00							5.995.501.100,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.995.501.100,00						-	5.995.501.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.995.501.100,00			-	-	-	-	5.995.501.100,00	KELURAHAN KEMIRI MUKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	5.172.069.100,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.172.069.100,00	KELURAHAN KEMIRI MUKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	823.432.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		823.432.000,00	KELURAHAN KEMIRI MUKA
		KELURAHAN BEJI						5.099.175.500,00							5.099.175.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.099.175.500,00							5.099.175.500,00	
	7.01	KECAMATAN						5.099.175.500,00							5.099.175.500,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.099.175.500,00						-	5.099.175.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.099.175.500,00			-	-	-	-	5.099.175.500,00	KELURAHAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	4.407.511.500,00	Kota Depok, Beji, Beji	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.407.511.500,00	KELURAHAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	691.664.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		691.664.000,00	KELURAHAN BEJI
		KELURAHAN PONDOK CINA						888.449.000,00							2.697.703.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						888.449.000,00							2.697.703.000,00	
	7.01	KECAMATAN						888.449.000,00							2.697.703.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	888.449.000,00						-	2.697.703.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	888.449.000,00			-	-	-	-	2.697.703.000,00	KELURAHAN PONDOK CINA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	888.449.000,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.312.943.000,00	KELURAHAN PONDOK CINA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		384.760.000,00	KELURAHAN PONDOK CINA
		KELURAHAN BEJI TIMUR						2.098.773.000,00							2.098.773.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.098.773.000,00							2.098.773.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.098.773.000,00							2.098.773.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.098.773.000,00						-	2.098.773.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.098.773.000,00			-	-	-	-	2.098.773.000,00	KELURAHAN BEJI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	1.808.173.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.808.173.000,00	KELURAHAN BEJI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	290.600.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		290.600.000,00	KELURAHAN BEJI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TAPOS						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				8 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				25 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN TAPOS
		KELURAHAN TAPOS														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAPOS
		KELURAHAN CILANGKAP														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CILANGKAP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3413 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CILANGKAP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CILANGKAP
		KELURAHAN SUKAMAJU BARU						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN SUKAMAJU BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKAMAJU BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKAMAJU BARU
		KELURAHAN SUKATANI						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN SUKATANI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKATANI
		KELURAHAN LEUWINANGGUNG						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN LEUWINANGGUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN LEUWINANGGUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN LEUWINANGGUNG
		KELURAHAN CIMPAEUN						0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						0,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CIMPAEUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	0,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIMPAEUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIMPAEUN
		KECAMATAN BOJONGSARI						15.882.356.660,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						15.882.356.660,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						15.882.356.660,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.882.356.660,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.078.886.660,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	15.078.886.660,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.662.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	155.662.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	607.048.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.997.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	510.050.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.760.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	40.760.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	0,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
		KELURAHAN DUREN MEKAR						3.298.793.500,00							3.298.793.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.298.793.500,00							3.298.793.500,00	
	7.01	KECAMATAN						3.298.793.500,00							3.298.793.500,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.298.793.500,00						-	3.298.793.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.298.793.500,00			-	-	-	-	3.298.793.500,00	KELURAHAN DUREN MEKAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				89 Unit	2.807.833.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		2.740.081.500,00	KELURAHAN DUREN MEKAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	490.960.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		558.712.000,00	KELURAHAN DUREN MEKAR
		KELURAHAN CURUG						4.750.769.500,00							725.434.046,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.750.769.500,00							725.434.046,00	
	7.01	KECAMATAN						4.750.769.500,00							725.434.046,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.750.769.500,00						-	725.434.046,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.750.769.500,00			-	-	-	-	725.434.046,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				124 Unit	4.025.339.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		4.046,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	725.430.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		725.430.000,00	KELURAHAN CURUG
		KELURAHAN BOJONGSARI BARU						2.666.944.500,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.666.944.500,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.666.944.500,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.666.944.500,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.666.944.500,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Mengacu Pada Hasil Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2025	-	0,00	KELURAHAN BOJONGSARI BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				97 Unit	2.294.407.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Mengacu Pada Hasil Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2025		0,00	KELURAHAN BOJONGSARI BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	372.537.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Mengacu Pada Hasil Musrenbang RKPD Kota Depok Tahun 2025		0,00	KELURAHAN BOJONGSARI BARU
		KELURAHAN BOJONGSARI						572.750.925,00							4.188.260.450,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						572.750.925,00							4.188.260.450,00	
	7.01	KECAMATAN						572.750.925,00							4.188.260.450,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	572.750.925,00						-	4.188.260.450,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	572.750.925,00			-	-	-	-	4.188.260.450,00	KELURAHAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				97 Unit	572.750.925,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		3.505.210.450,00	KELURAHAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		683.050.000,00	KELURAHAN BOJONGSARI
		KELURAHAN DUREN SERIBU						3.294.049.200,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.294.049.200,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.294.049.200,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.294.049.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.294.049.200,00			-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplaitatif	-	-	0,00	KELURAHAN DUREN SERIBU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	2.877.121.200,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PAJAK DAERAH	-	Mengemba ngkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplaitatif	-		0,00	KELURAHAN DUREN SERIBU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	416.928.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	KELURAHAN DUREN SERIBU
		KELURAHAN SERUA						4.191.523.000,00							4.191.523.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.191.523.000,00							4.191.523.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.191.523.000,00							4.191.523.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.191.523.000,00						-	4.191.523.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.191.523.000,00			-	-	-	-	4.191.523.000,00	KELURAHAN SERUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				114 Unit	3.679.123.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Serua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		3.679.123.000,00	KELURAHAN SERUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	512.400.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Serua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		512.400.000,00	KELURAHAN SERUA
		KELURAHAN PONDOK PETIR						5.697.934.600,00							5.697.934.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.697.934.600,00							5.697.934.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	KECAMATAN						5.697.934.600,00							5.697.934.600,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.697.934.600,00						-	5.697.934.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.697.934.600,00			-	-	-	-	5.697.934.600,00	KELURAHAN PONDOK PETIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				157 Unit	4.902.858.600,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.902.858.600,00	KELURAHAN PONDOK PETIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19 Pokmas / Ormas	795.076.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		795.076.000,00	KELURAHAN PONDOK PETIR
		KECAMATAN CIMANGGIS						16.842.327.901,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						16.842.327.901,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						16.842.327.901,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	15.431.137.901,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.946.947.901,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	14.946.947.901,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	49.420.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	49.420.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	428.470.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	162.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	266.470.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.300.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	6.300.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	1.150.440.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.150.440.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99 Laporan	1.150.440.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	260.750.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	260.750.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				13 Laporan	260.750.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIMANGGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN CISALAK PASAR						2.680.008.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.680.008.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.680.008.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.680.008.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.680.008.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CISALAK PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.279.512.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CISALAK PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	400.496.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CISALAK PASAR
		KELURAHAN TUGU						5.697.924.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.697.924.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						5.697.924.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.697.924.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	5.697.924.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN TUGU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	4.841.596.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TUGU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	856.328.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TUGU
		KELURAHAN CURUG						3.298.835.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.298.835.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						3.298.835.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.298.835.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.298.835.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.805.875.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	492.960.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG
		KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN						4.475.015.600,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.475.015.600,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.475.015.600,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.475.015.600,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.475.015.600,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3.929.320.600,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	545.695.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN
		KELURAHAN HARJAMUKTI						4.792.840.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.792.840.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						4.792.840.000,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	4.792.840.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	4.792.840.000,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN HARJAMUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	4.202.840.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN HARJAMUKTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	590.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN HARJAMUKTI
		KELURAHAN MEKARSARI						6.598.892.650,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						6.598.892.650,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						6.598.892.650,00							0,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.598.892.650,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	6.598.892.650,00			-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	5.649.404.650,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MEKARSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	949.488.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN MEKARSARI
		KECAMATAN CIPAYUNG						11.754.934.832,00							1.607.486.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						11.754.934.832,00							1.607.486.000,00	
	7.01	KECAMATAN						11.754.934.832,00							1.607.486.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	11.754.934.832,00						-	516.506.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.754.934.832,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	11.754.934.832,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	57.662.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.662.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	424.336.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		424.336.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	34.508.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		34.508.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	0,00						-	1.090.980.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.090.980.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.090.980.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-	-		0,00	KECAMATAN CIPAYUNG
		KELURAHAN RATU JAYA						3.597.215.000,00							3.956.936.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.597.215.000,00							3.956.936.500,00	
	7.01	KECAMATAN						3.597.215.000,00							3.956.936.500,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.597.215.000,00						-	3.956.936.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.597.215.000,00			-	-	-	-	3.956.936.500,00	KELURAHAN RATU JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3.166.583.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		3.483.241.300,00	KELURAHAN RATU JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	430.632.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		473.695.200,00	KELURAHAN RATU JAYA
		KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG						3.898.620.500,00							4.288.482.550,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.898.620.500,00							4.288.482.550,00	
	7.01	KECAMATAN						3.898.620.500,00							4.288.482.550,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.898.620.500,00						-	4.288.482.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.898.620.500,00			-	-	-	-	4.288.482.550,00	KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	3.440.820.500,00	Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.784.902.550,00	KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	457.800.000,00	Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		503.580.000,00	KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG
		KELURAHAN CIPAYUNG JAYA						2.999.135.500,00							299.913.550,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.999.135.500,00							299.913.550,00	
	7.01	KECAMATAN						2.999.135.500,00							299.913.550,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.999.135.500,00						-	299.913.550,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.999.135.500,00			-	-	-	-	299.913.550,00	KELURAHAN CIPAYUNG JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	2.629.135.500,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		262.913.550,00	KELURAHAN CIPAYUNG JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	370.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		37.000.000,00	KELURAHAN CIPAYUNG JAYA
		KELURAHAN CIPAYUNG						3.598.143.000,00							3.957.957.300,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.598.143.000,00							3.957.957.300,00	
	7.01	KECAMATAN						3.598.143.000,00							3.957.957.300,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.598.143.000,00						-	3.957.957.300,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	3.598.143.000,00			-	-	-	-	3.957.957.300,00	KELURAHAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	3.004.159.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.304.574.900,00	KELURAHAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	593.984.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		653.382.400,00	KELURAHAN CIPAYUNG		
		KELURAHAN PONDOK JAYA						2.098.688.000,00							2.308.556.800,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.098.688.000,00							2.308.556.800,00			
	7.01	KECAMATAN						2.098.688.000,00							2.308.556.800,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.098.688.000,00						-	2.308.556.800,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.098.688.000,00			-	-	-	-	2.308.556.800,00	KELURAHAN PONDOK JAYA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	1.815.688.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.997.256.800,00	KELURAHAN PONDOK JAYA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	283.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		311.300.000,00	KELURAHAN PONDOK JAYA		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															3.507.817.900,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.810.010.454,00							3.507.817.900,00			
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.810.010.454,00							3.507.817.900,00			
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.628.310.454,00						-	563.160.900,00			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	113.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		65.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.501.580.454,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				25 Orang/bulan	5.501.580.454,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				27 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.170.000,00			-	-	-	-	299.660.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		4.414.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		9.156.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				2 0	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		131.090.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	52.170.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.560.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	74.560.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	0,00						-	1.835.444.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.835.444.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1500 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				42 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.027.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		55.944.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				42 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Jumlah pemilih yang mengikuti pendidikan politik	-			0.14 %	0,00						-	25.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	0,00			-	-	ASN, Masyarakat, Pelajar	-	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN, Masyarakat, Pelajar		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	-	ASN, Masyarakat, Pelajar		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	ASN, Masyarakat, Pelajar		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	-			80 %	91.600.000,00						-	0,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	91.600.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Organisasi Masyarakat	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Organisasi Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Orang	91.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Organisasi Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	0,00						-	335.373.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	0,00			-	-	-	-	335.373.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				250 Orang	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		335.373.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	90.100.000,00						-	748.840.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	90.100.000,00			-	-	-	-	748.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	52.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				250 Orang	37.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		748.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	JUMLAH							1.829.500.992.104,00							1.884.566.949.468,00		